



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINDAKAN KERJA MASYARAKAT PIDIE :
ANTARA AGAMA, ADAT TRADISI DAN HISTORISITAS LOKAL**

**(Studi sosiologi terhadap gejala kemiskinan masyarakat
di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya)**

DISERTASI


**ISKANDAR
0706222763**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI**

**DEPOK
JANUARI 2012**


HALAMAN PERNYATAAN PLAGIARISME

Disertasi saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia. Jika dikemudian hari ternyata ditemukan bukti saya melakukan tindakan plagiarisme maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai ketetapan Universitas Indonesia.

Nama : ISKANDAR
NPM : 0706222763
Tanda tangan : 
Tanggal : 12 Januari 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Disertasi ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Iskandar
NPM : 0706222763
Tanda tangan : 
Tanggal : 12 Januari 2012

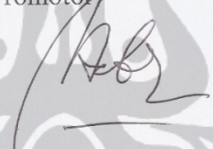


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Iskandar
NPM : 0706222763
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Tindakan Kerja Masyarakat Pidie: Antara Agama, Adat Tradisi dan Historisitas Lokal (Studi Sosiologi Terhadap Gejala Kemiskinan Masyarakat di Gampong Meunasah Balek, Kec. Meureudu Kab Pidie Jaya).

Promotor


Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang

Ko Promotor


Francisia SSE Seda, Ph.D


LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Iskandar
NPM : 0706222763
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Tindakan Kerja Masyarakat Pidie: Antara Agama, Adat Tradisi dan Historisitas Lokal (Studi Sosiologi Terhadap Gejala Kemiskinan Masyarakat di Gampong Meunasah Balek, Kec. Meureudu Kab Pidie Jaya).

DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:


Promotor


Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang

Ko Promotor


Francisia SSE Seda, Ph.D

MENGETAHUI:
KETUA PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA

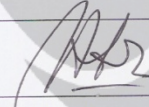
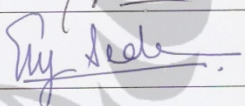
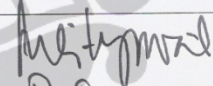
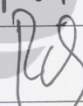
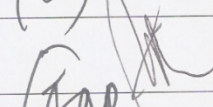
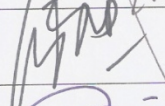
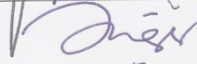

Lugina Setyawati, Ph.D

Disertasi ini diajukan oleh:

Nama : Iskandar
NPM : 0706222763
Departemen : Sosiologi
Judul Disertasi : Tindakan Kerja Masyarakat Pidie: Antara Agama, Adat Tradisi dan Historisitas Lokal (Studi Sosiologi Terhadap Gejala Kemiskinan Masyarakat di Gampong Meunasah Balek, Kec. Meureudu Kab Pidie Jaya).

Disertasi ini telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Disertasi Program Pascasarjana Sosiologi pada tanggal dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Belas dan dinyatakan: **LULUS**

TIM PENGUJI

Promotor	Prof. Dr, Robert M.Z. Lawang	
Ko Promotor	Francisia SSE Seda, Ph.D	
Tim Penguji:		
Ketua Sidang	Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, M.Si	
Anggota	Dr. Rochman Achwan, MDS	
Anggota	Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr	
Anggota	Dr. Linda Darmajanti, MT	
Anggota	Lugina Setyawati, Ph.D	

KATA PENGANTAR

Studi ini adalah salah satu rangkaian rencana hidup yang tersusun dan sejauh ini sedang berproses. Dari prosesnya penulis harap tersedianya waktu untuk berkontemplasi, menambah pemahaman spiritual, merengkuh hal-hal yang mendamaikan hati, mencerahkan pemikiran dan menikmati kebersamaan dalam biduk kehidupan sembari berjalan menuju sebuah titik akhir, Tuhan. Kepada ALLAH SWT penulis memuji atas nikmat dan rahmat atas semua pengalaman hidup selama proses pendidikan ini. Kepada-Nya penulis berharap bahwa semua pengorbanan ini mendapat sesuatu yang disebut pahala. Mengingat-Nya tak pernah lepas dari risalah yang disampaikan perantara Rasul Muhammad SAW. Untuk kanjeng Nabi SAW, penulis panjatkan salawat serta salam kepada sahabat dan keluarganya sekalian.

Tidak sejangkal langkahpun yang mudah pada proses studi ini. Namun penulis berusaha menikmati proses puseran dasar kawah pembentukan pemikiran, spiritual dan karakter insani. Sebagai Pegawai Negeri yang berkuat dari pagi hingga petang dengan rutinitas tugas sesuai dan minimnya waktu interaksi dengan lingkungan luar birokrat menghambat munculnya pikiran kritis. Studi S.3 membuat penulis berkesempatan melihat dari luar kotak, memiliki kerangka pikir yang berbeda. Terutama dalam memandang hakikat hidup, dunia berikut tujuan serta aktifitas yang menjadi konsekuensi dari adanya tujuan tersebut. Sekalipun demikian, proses akademis serta penyusunan disertasi mengenai “Tindakan Kerja Masyarakat Pidie : Antara Agama, Adat Tradisi dan Historisitas Lokal” telah membawa penulis lebih mengenal masalah sosial di Aceh, khususnya Pidie.

Ungkapan terimakasih kepada Ubiet Junita Sari, SKM, M.Epid. Bersamanya penulis menyusuri hidup hingga keberanian membawa kami membuang fasilitas dan mencari pengalaman hidup di sekitar kampus Universitas Indonesia. Ia mampu memberi pengaruh dan mendorong semangat pada titik-titik kritis saat motivasi nyaris hilang kala studi dihadang kendala. Menjadi mitra berbagi suka, duka serta mitra diskusi yang tak terbatas topik. Terimakasih tak

berhingga telah menjalani masa sulit ini dengan mengetatkan anggaran rumah tangga di perantauan. Melaluinya Tuhan menciptakan tiga buah hati yang menjadi pelita dan penghibur kehidupan. Nada Aliefya Safira, yang cantik, berani dan kritis. Fatih Muhammad Aufa, diplomatis dalam bertutur, peka dan baik budi. Sungguh berkesan harus susuri kampus UI setiap pagi dan sore untuk mengantar dan menjemput keduanya dari MI Nurul Iman Tanah Baru. Satu buah hati yang lucu yang lahir di Depok, Fahri Muhammad Azzam yang mulut kecilnya sering berceloteh apa saja karena diharuskan mengalah dengan naskah disertasi milik ayahnya. Bukan itu saja, akhirnya ia terbiasa nyaman tertidur dalam ayunan walaupun suara printer ayahnya terpaksa mengusik dari dekat. Mereka adalah tiga orang tak dapat penulis ungkapkan betapa peran mereka tak tergantikan bahkan hingga penulis telah tiada nantinya. Terima kasih telah menemani dalam suka duka ini pada studi S.3 dan S.2 dari kedua orang tua ananda.

Penulis beruntung, sempat menamam memori masa masa kecil mereka dengan lalu lalang dengan motor tua diantara keindahan, keteduhan, kehijauan, kerapian dan kemegahan seluruh sudut kampus Universitas Indonesia di Depok. Penulis berharap, kelak mereka menjelma menjadi pemuda-pemudi yang mampu menjejakkan kaki pada altar wisuda Universitas Indonesia sebagai mahasiswa berprestasi.

Disisi lain, untuk sebuah interaksi yang luar biasa intensitasnya antara penulis dengan Promotor serta Co-Promotor tak cukup rasanya hanya ungkapan terimakasih. Bapak Prof. Dr. Robert M.Z Lawang yang penuh kesabaran, kebaikan hati dan sarat pengalaman teorik dan empirik membawa penulis ke fase pemahaman ilmu sosial yang realistik. Ibu Francisia S.S.E Seda, Ph.D di tengah kesibukan selalu berusaha memberi waktu dan merespon setiap bentuk komunikasi dalam proses penyelesaian disertasi ini. Pembelajaran dari beliau berdua yang sempat penulis serap tak hanya materi akademis. Namun juga keteladanan dalam berpikir, bersikap, berucap dan bertindak. Demikian pula dalam fase pengujian disertasi, Penulis merasa beruntung mendapatkan kesempatan memperoleh masukan-masukan demi penyempurnaan Disertasi dari dua orang Pengguji Ahli yang dari keduanya penulis merasa diberi bekal

tambahan penguasaan sosiologi ekonomi. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc. Agr dari IPB Bogor yang memberi kenangan tersendiri dalam penajaman implikasi teoritik sosial ekonomi yang berbasis data lapangan. Karena beliau, berlalu lalang diantara kampus IPB dan UI menjadi hal yang indah. Bersamaan dengan itu, kenangan yang tak terlupakan dengan Dr. Der Soz Rochman Achwan, MDS Penguji Ahli Internal yang memberi penajaman isu "agensi" pada penulisan disertasi ini. Keduanya membuka bagian penting atas temuan-temuan penelitian ini, terkait dengan upaya mengkonseptualisasikan secara sosiologis dan menemukan posisinya dalam kerangka teori sosiologi. Selanjutnya, tidak lupa terimakasih penulis kepada Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, MA yang terlibat dalam dua fase pengujian disertasi ini. Kehadiran beliau dengan performan dan kompetensinya telah memberi aura tersendiri ditengah-tengah suasana sidang pengujian yang ketat dan sakral.

Hal lain berupa ungkapan terimakasih turut penulis haturkan kepada seluruh Dosen Pengajar pada Departemen Sosiologi, dan khusus kepada beberapa Dosen yang secara langsung sempat penulis serap pencerahannya. Beliau yang penulis hormati, Prof Dr Der Soz Gumilar R Sumantri saat penulis studi sedang menjalankan beban tanggung jawab sebagai Rektor. Prof Dr Paulus Wirotomo yang ringkas dan simpel. Iwan Gardono Ph.D dan Ganda Upaya MA yang sangat menginspirasi integritasnya. Prof. Dr Kamanto Sunarto yang memberi cakrawala dalam masa studi telaah hasil penelitian dan Dr. Linda D Ibrahim, MT, Lugina Setyawati, MA, Ph.D yang sangat lelah melayani urusan manajemen mengelola mahasiswa yang beraneka ragam tingkah laku. Berdua mereka berkenan memberi ruang untuk bertukar pikiran, Dr. Fu Xie, Dr. Mutia Gani Rochman dan nama-nama lain yang tak penulis cantumkan namanya.

Dalam perjalanan studi, penulis sangat terbantu dengan keramahtamahan tim kerja sekretariat Program Pasca Sarjana Sosiologi. Budi baiknya, akan penulis kenang yaitu Mba Lidya Triana M.Si sebagai sekretaris Prodi yang sering penulis ganggu waktunya di luar jam kerja untuk koordinasi penjadwalan ujian. Demikian juga mas Santoso yang sangat baik dan cermat dalam bekerja, mba Rini dan mas Agus yang tak kalah baiknya. Mba Valen di Kessos yang banyak membantu

urusan di awal pendaftaran pasca. Bagian lain yang tak kalah membantu adalah para pimpinan dan pengelola Perpustakaan FISIP UI dan Perpustakaan Pusat UI yang telah menyediakan ruang kerja yang tenang untuk penulis pakai menyelesaikan laporan penelitian disertasi ini. Terimakasih penulis kepada para petugas Pengamanan Lingkungan Kampus UI yang berkenan menjaga alat angkut penulis, motor tua beroda dua. Petugas PT.KAI yang menjaga Pintu Perlintasan KRL pos stasiun Pondok Cina, yang dengan kesigapannya penulis merasa nyaman melintasi rel menuju kampus dan menuju tempat tinggal.

Salut atas persahabatan dan kekerabatan yang dibangun rekan mahasiswa Program Doktor Sosiologi angkatan 2007. Terutama beliau-beliau yang sangat sempat menjalani cerita suka dan duka bersama, Dr. Ketut Gede Mudiarta sebagai yang terbaik diantara satu angkatan, Kandidat Doktor Kustini, Kandidat Doktor Wahidah R Bulan. Disamping itu, salam terimakasih kepada Kandidat Doktor Devi, Kandidat Doktor Servulus Bobo Riti, Kandidat Doktor Ramli, Kandidat Doktor Gary Rahman. Rekan yang sering tak terpantau keberadaannya yaitu Kandidat Doktor Jacob P Ninu, Kandidat Doktor Kusnadi, Kandidat Doktor Faizin, Kandidat Doktor Heru Cokro, Kandidat Doktor Sabar Sitanggang.

Ungkapan terimakasih atas kesempatan meneruskan pendidikan hingga ke jenjang doktor, penulis sampaikan kepada segenap jajaran pimpinan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Anggota DPRD Lhokseumawe. Penghormatan penulis, Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala BKPP dan seluruh pegawai yang berada di dalam bidang tugas kediklatan pegawai.

Terakhir yang penting adalah mereka yang mampu membuat penulis meneteskan bulir air mata karena keberartian beliau dalam hidup Penulis. Beliau adalah Ibunda Tercinta Maryani Ali, Bapak Ramli Abusyahi, Almarhum Bapak Ilyas Kasim, Ibunda Tercinta Aisyah Daud, Ayah Darwin Mizan, Almarhum Nek Baya Ali Sabi, Almarhumah Nek Biet Siti Caya, Almarhum Ayah Nek Daud, Almarhumah Nenek Montasiek. Beliau yang mendukung penulis menyelesaikan studi, sebagian telah berpulang pada NYA saat studi ini belum rampung. Penulis tak bisa lagi mengatakan padanya bahwa studi ini selesai.

Mereka yang selalu mendoakan dan memberi dukungan semangat pada diri penulis sekeluarga, Abang Mayor (Pelaut) Ali Setyandi beserta kak Adrianti SP, kak Inong Sofiarini M.Si beserta cut bang Pon SE, syekh Afit beserta dr. Shally dan seluruh sepupu, diantaranya Agustina, Fitri, Marzuki yang banyak membantu mendampingi penulis saat pengumpulan data, Razak, Fandi yang berkenan menjadi driver di hari promosi. Fadilla dan Wardiana yang dengan baik membantu mengkondisikan urusan pekerjaan internal menjadi beres. Kepada Wike, Sri, Amir, Jeffri di Depok dan Bang Nasir serta Kak Indah di Cinere. Khusus kepada Dr. Saifuddin, MPd, kedatangannya dari Aceh untuk menghadiri sidang Promosi memberi amunisi semangat kepada penulis. Seluruh adik dan keponakan serta anggota keluarga penulis yang hidup sederhana dan bersahaja di pelosok Aceh. Terima kasih kepada seluruh pemimpin dan masyarakat Pidie Jaya di kawasan Meureudu, atas keramahtamahannya dalam masa penelitian ini berlangsung.

Sebelum tiba pada bagian akhir pengantar, perkenankan penulis mengungkapkan bahwa karena karunia-NYA maka penulis punya kesempatan belajar hingga ke jenjang ini. Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna. Berorientasi pada proses jauh lebih baik, daripada terbawa gaya hidup serba instan. Melalui proses studi ini, semoga penulis tak mengikuti jejak hidup si pohon pisang setelah produksi perdana lalu hilang perlahan.

Depok, 12 Januari 2012

Penulis,

Iskandar

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iskandar
NPM : 0706222763
Program Studi : Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Disertasi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINDAKAN KERJA MASYARAKAT PIDIE :
ANTARA AGAMA, ADAT TRADISI DAN HISTORISITAS LOKAL**

Beserta perangkat yang tersedia (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 12 Januari 2012

Yang menyatakan



(ISKANDAR)

ABSTRAK

Nama : Iskandar
Program Studi : S3 Sosiologi, Departemen Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia
Judul : **Tindakan Kerja Masyarakat Pidie : Antara Agama, Adat Tradisi dan Historisitas Lokal**

Disertasi ini membahas tindakan kerja masyarakat dan keterpautannya dengan nilai Islam dan nilai adat tradisi pada masyarakat Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan nilai etika kerja Islam dan nilai ideal adat belum termanifestasi pada tindakan kerja aktor. Minimnya kadar kelekatan sosial pada tindakan kerja terkait dengan ketidakberfungsian institusi agama (*imuem meunasah*) dan institusi adat (*kejruen blang, panglima laot, peutua seuneubok, haria peukan*) dalam mensosialisasikan dan menegakkan aturan-aturan yang ada. Hal itu terkait dengan krisis agensi dalam institusi-institusi sosial yang mengakibatkan terjadinya kekosongan patron sehingga mendorong aktor menjejawantahkan nilai menurut pengetahuan dan pengalamannya masing-masing sesuai historisitas dinamika kehidupan mikro dan dinamika lingkungan sosial makro. Penelitian ini mengisi celah kosong dari konsep kelekatan sosial tindakan ekonomi yang mengabaikan posisi agensi pada kajian dinamika kehidupan ekonomi masyarakat.

Kata kunci :

Tindakan ekonomi, kerja, agama, nilai, adat, institusi sosial, ekonomi, pidie

ABSTRACT

Name : Iskandar
Study : Sociology, Departement of Sociology, Faculty of Social and Political Science at University of Indonesia
Title : **The Working Action of the Pidie Communities : Among the Religion, Tradition and Local History**

The focus of this study is the economic action and relationship with Islamic ethic and economic value of adat at society of Gampong Meunasah Balek subdistrict of Meureudu district of Pidie Jaya and Nanggroe Aceh Darussalam Province. This research is qualitative in the form of case study. The result of this study shows that Islamic ethic and idea of adat economic value has not manifest at actor economic action. This social dis-embeddness was relations with disfunction of social institution such as religion institution (*imuem meunasah*) and adat institution (*kejruen blang, panglima laot, peutua seuneubok, haria peukan*) to socialization and enforcement of rules. It was relations with crisis of social institution's agency. It was made vacuum of patron condition, so actor effort himself to manifest of value according their knowledge, experience that so according dynamic of actor life history and setting of social environment. This study could contributed to concept of social embeddness of economic action that who have not give attention to agency at sociology of economic study.

Key words :

Sociology of economic, work, economic action, Islamic ethic, adat, value, social institution, Pidie.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iskandar
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 Desember 1973
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, sejak Nopember 1993.
Instansi : Pemerintah Kota Lhokseumawe
Pangkat : Pembina (IV/a), TMT 1-10- 2007.
Agama : Islam
Alamat : Jln. Rel kereta api no. 152 C Cunda
Lhokseumawe – Aceh . Kode Pos 21352
Telepon : (0645) 46863 (Rumah)/ 0812 10325467 (Selular)
Email : nf_aceh@yahoo.co.id

Data Keluarga :

Istri : Ubiet Junita Sari, SKM, M.Epid (FKM UI, 2008)
Anak : 3 (tiga) orang
1. Nada Aliefya Safira (9 tahun)
2. Fatih Muhammad Aufa (6,5 tahun)
3. Fahri Muhammad Azzam (1 tahun)
Orang Tua : Ramli Abusyahi (ayah) dan Maryani Ali (ibu)
: Darwin Mizana dan Aisyah Daud (mertua)

Riwayat Pendidikan :

- ❖ SD Negeri 2 Lhokseumawe, lulus tahun 1986
(sempat sekolah pada SD Negeri 1 Bayu-Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1980 s.d 1981 dan SD Negeri 2 Meureudu-Kabupaten Pidie pada tahun 1982 s.d 1983)
- ❖ SMP Negeri 1 Lhokseumawe, lulus tahun 1989
- ❖ SMA Negeri 1 Lhokseumawe, lulus tahun 1992
- ❖ D-4 STPDN di Jatinangor (Jawa Barat), lulus tahun 1997
- ❖ S.1 Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya, Malang. Lulus tahun 2000
- ❖ S.2 Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Lulus tahun 2006.
- ❖ S.3 Program Pascasarjana Sosiologi FISIP Universitas Indonesia). Lulus tahun 2012.

Riwayat Pekerjaan :

- ❖ Tahun 1990 s.d 1991, bekerja paruh-waktu sebagai buruh perusahaan *advertising* Biro Reklame di Cunda, Lhokseumawe.
- ❖ Tahun 1992 s.d 1993, bekerja sebagai juru bantu di bidang tatusaha pada PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna cabang Lhokseumawe
- ❖ Tahun 1993 s.d 1997, bekerja sebagai Praja ikatan dinas pada STPDN-lembaga pendidikan kedinasan di bawah Depdagri.
- ❖ Tahun 1997 s.d 1998, bekerja sebagai pembantu administrasi di sub bagian Diklat Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- ❖ Tahun 1998 s.d 1999, bekerja pada Seksi Pemerintahan kantor Camat Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh

- ❖ Tahun 1999 s.d 2000, bekerja sebagai mahasiswa tugas belajar pada Universitas Brawijaya di Malang.
- ❖ Tahun 2000 s.d 2001, bekerja sebagai pembantu ajudan (adc) Bupati Aceh Utara.
- ❖ 2002 s.d 2007, bekerja sebagai perencana/ pelayanan diklat dan pengembangan pegawai di bagian kepegawaian Sekretariat Pemerintah Kota Lhokseumawe
- ❖ 2007 s.d 2012, bekerja sebagai mahasiswa tugas belajar program pascasarjana program studi Sosiologi FISIP Universitas Indonesia di Depok



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiv
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xv
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Signifikansi penelitian	14
1.6 Pembabakan Penulisan Disertasi	17
Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teoritik	19
2.1.2 Tindakan Kerja dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	19
2.1.2 Perspektif Keterlekatan Sosial dalam Tindakan Ekonomi	22
2.1.3 Agama, Adat Tradisi Budaya dan Ekonomi Masyarakat	24
2.1.3.1 Kajian Weber terhadap Ekonomi Kapitalis	24
2.1.3.2 Konsepsi Islam tentang Tindakan Kerja dalam Kehidupan Ekonomi	25
2.1.3.3 Konsepsi Kerja dalam Pranata Sosial Adat Budaya Pidie	28
2.3.1 Kajian <i>New Institutionalism</i> atas Tindakan Kerja terkait ketertautannya dengan Nilai Agama dan Nilai Adat pada kehidupan ekonomi masyarakat	36
2.2 Telaah Hasil Studi Terdahulu	42
2.2.1 Studi terkait Dinamika Struktur Sosial dan Sosio-kultural Masyarakat Aceh	42
2.2.2 Studi Tindakan pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat	45
2.3 Pemetaan Historisitas Lokal Masyarakat Pidie terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi	47

2.3.1	Situasi Pidie pada Abad 16	48
2.3.2	Situasi Pidie antara Abad 17 hingga tahun 1873	49
2.3.3	Situasi Pidie antara tahun 1873 hingga 1945	54
2.3.4	Situasi Pidie antara tahun 1945 hingga 2005	60
2.3.5	Situasi Pidie setelah tahun 2005	64
2.3	Kerangka Pemikiran dan Konseptual	66
2.3.1	Pertautan agama dan kemiskinan	68
2.3.2	Pertautan Adat Tradisi Kebudayaan Dengan Kemiskinan Masyarakat	69
2.3.3	Kemiskinan dan Struktur Sosial Masyarakat Pidie	69
Bab 3	METODOLOGI	
3.1	Pendekatan dan Tipe Penelitian	75
3.2	Waktu dan Lokasi Penelitian	76
3.3	Posisi dan Peran Peneliti	84
3.4	Pengumpulan Data	86
3.5	Analisis dan Penyajian Data	92
3.6	Strategi Validasi Data	93
3.7	Catatan Hambatan Studi Lapangan (<i>Field Study</i>)	94
Bab 4	KONSTRUKSI SOSIAL KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT	
4.1	Gambaran Derajat Kemiskinan Masyarakat Pidie	95
4.2	Konstruksi Sosial	96
4.2.1	Struktur Sosial	98
4.2.2	Situasi Sosio Kultural Masyarakat Gampong Meunasah Balek	100
4.2.3	Profil Wilayah dan Institusi Pemerintahan	102
4.2.4	Profil Geografis dan Sosio Demografis Pidie Jaya	108
BAB 5	TINDAKAN KERJA MASYARAKAT PIDIE DALAM HISTORISITAS LOKAL	
5.1	Tindakan Kerja Masyarakat Pidie dalam Dinamika Historisitas Lokal	109
5.2	Isu-Isu Lokal Masyarakat Pidie terkait Tindakan Kerja Aktor menurut bidang Pekerjaan	120
5.2.1	Petani dan Kesederhanaan Orientasi	122
5.2.2	Nelayan, Kerja Keras dan Konsumtif	140
5.2.3	Aktor Pedagang dan Keterjepitan Kondisi	154
5.3	Diskusi	170

BAB 6	KONTRIBUSI NILAI DAN STRUKTUR SOSIAL TERHADAP DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT PIDIE	
6.1	Dinamika Ekonomi Masyarakat Pidie	183
6.1.1	Spirit Masyarakat Pidie dalam Bekerja	183
6.1.2	Tabiat dan Kebiasaan Kerja Masyarakat Pidie	194
6.1.3	Strategi Bekerja : “ <i>Ureung Kaya</i> ” dan “ <i>Ureung Gasin</i> ”	207
6.1.3.1	Dibalik Kesuksesan Usaha dan Pekerjaan “ <i>Ureung Kaya</i> ”	208
6.1.3.2	Dibalik Ketidakberhasilan Usaha dan Pekerjaan “ <i>Ureung Gasin</i> ”	229
6.1.4	Dorongan Bekerja karena Pendidikan Anak	238
6.2	Struktur Sosial dan Eksistensi Nilai Agama serta Adat dalam Dinamika Kehidupan Ekonomi	240
6.2.1	Ragam Ibadah Keagamaan, Institusi Sosial dan Persinggungannya dengan Aktifitas Ekonomi Masyarakat	241
6.2.2	Ragam Tradisi Adat, Institusi Sosial dan Persinggungannya dengan Aktifitas Ekonomi Masyarakat	250
6.3	Pemuka Agama, Adat dan Transformasi Nilai Terkait Budaya Kerja	258
6.4	Aspek Dukungan dan Hambatan Lingkungan Eksternal	259
6.5	Diskusi	261
Bab 7	DISKUSI, REFLEKSI DAN IMPLIKASI TEORITIS	
7.1	Diskusi dan Refleksi	275
7.2	Implikasi Teoritis	278
7.2.1	Tindakan Kerja Masyarakat	278
7.2.2	Kontribusi Agama dan Adat Tradisi terhadap Tindakan Kerja dalam Kerangka Ekonomi Masyarakat Pidie	283
Bab 8	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
8.1	Kesimpulan	289
8.1.1	Tindakan Kerja Masyarakat Pidie	289
8.1.2	Tautan Islam dengan Tindakan Kerja Masyarakat Pidie	290
8.1.3	Tautan Adat Tradisi dengan Tindakan Kerja Masyarakat Pidie	290
8.2	Rekomendasi	291
8.2.1	Rekomendasi Kebijakan	291
8.2.2	Rekomendasi Penelitian Lanjutan	297
	DAFTAR PUSTAKA	298
	LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Penduduk Pidie Jaya Menurut Pekerjaan	5
Tabel 2.1 Ikhtisar Ibadah <i>Mahdhah</i> dan Kandungan Nilai Relasi Sosial	25
Tabel 2.2 Ikhtisar Prinsip Dasar Pemikiran Nee (2005)	40
Tabel 2.3. Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Abad 16 terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	48
Tabel 2.4. Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Abad 17 – tahun 1873 terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	53
Tabel 2.5. Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca 1873 – 1945 terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	59
Tabel 2.6. Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca 1945 – 2005 terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	64
Tabel 2.7. Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca Tahun 2005 terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat	66
Tabel 2.8 Iktisar Pemetaan Teori sebagai Landasan Analisis dan pengembangan Teoritik	71
Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan Penduduk Gampong Meunasah Balek Tahun 2010 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.	82
Tabel 3.2. Jumlah penduduk Gampong Meunasah Balek Tahun 2010 Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	84
Tabel 3.3 Ikhtisar Informan dalam Pengumpulan Data	90
Tabel 4.1. Jumlah Gampong dan Kemukiman dalam Kabupaten Pidie Jaya	101
Tabel 4.2. Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pidie Jaya tahun 2004-2008	102
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008	103
Tabel 4.4. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Luas Wilayah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008.	104
Tabel 4.5. Jumlah Keluarga Miskin Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008	105
Tabel 6.1 Ikhtisar Kehidupan Ekonomi Masyarakat terkait Struktur Sosial	178
Tabel 6.2. Ikhtisar Tabiat dan Kebiasaan Kerja Masyarakat Pidie	191

Tabel 6.3.	Ikhtisar Strategi Aktor Menjadi <i>Ureung Kaya</i> dalam Struktur Sosial Masyarakat Pidie	215
Tabel 6.4.	Ikhtisar Strategi Aktor Menjadi <i>Ureung Gasin</i> dalam Struktur Sosial Masyarakat Pidie	226
Tabel 6.5	Ikhtisar Kegiatan Ibadah Keagamaan dan Dorongan Ekonomi Masyarakat	239
Tabel 6.6	Ikhtisar Kegiatan Tradisi Adat dan Dorongan Ekonomi Masyarakat	247





DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1.	Skema model Interaksi antar level regulasi formal (macro), organisasi (messo) dan individu (micro) menurut Victor Nee (2005)	39
Gambar 2.2.	Kerangka Pemikiran tentang Tindakan Kerja Masyarakat Pidie	67
Gambar 2.3.	Kerangka Konseptual Tindakan Kerja Masyarakat Pidie	68
Gambar 3.1.	Peta Kabupaten Pidie Jaya dan Lokasi Penelitian	78
Gambar 3.2.	Peta Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya	79
Gambar 3.3.	Jalan kecamatan melintasi Gampong Meunasah Balek, menghubungkan pantai wisata “ <i>manohara</i> ” Meunasah Balek, dengan dan keude Meureudu. Tambak air payau di sisi kiri dan kanan jalan	80
Gambar 3.4.	Galangan Perbaikan dan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan di TPI Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya	82
Gambar 4.1	Kapal penangkap ikan jenis <i>pukat langga</i> menyusuri sungai <i>krueng</i> Meureudu	97
Gambar 4.2.	Pedagang keturunan India sedang berbincang setelah sembahyang ashur di Mesjid Meureudu dan seorang wanita yang sehari-harinya sebagai pedagang kecil, sedang menuju Meunasah menghadiri acara PKK	101
Gambar 5.1	Pesawahan di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya	122
Gambar 5.2.	Petak sawah garapan seorang pensiunan yang menjalani usaha tani sejak lama. Pola tanam selang antara padi dan cabe serta timun telah lama dijalaninya	132
Gambar 5.3.	Suasana boat sandar dan aktifitas kerja masyarakat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Meureudu yang berada di gampong Meunasah Balek	141
Gambar 5.4	Pendangkalan sungai krueng Meureudu yang mengganggu lalulintas kapal nelayan di sungai krueng Meureudu	146
Gambar 5.5	Rumah Tradisional Aceh milik salah satu pedagang sukses di tahun 1970-an di Gampong Meunasah Balek	154
Gambar 5.6.	Rumah beton moderen milik warga yang sukses bekerja sebagai pegawai negeri dan wirausahawan kuliner di dusun Meunasah Dayah Kleng	155
Gambar 5.7.	Suasana Pasar <i>keude</i> Meureudu dari arah gampong Meunasah Balek	164

Gambar 6.1	Aktifitas bekerja masyarakat di pagi hari. Sebagian melayani kebutuhan makanan di pagi hari di jalanan utama gampong. (kiri) dan seorang wanita terlihat mendorong bahan bakar <i>tapeuh</i> di dekat pabrik industri rumah tangga <i>kue adee</i> .	184
Gambar 6.2	Aktifitas masyarakat di TPI Meuredu, saat kapal “Ernita” berhasil membawa hasil tangkapan.	186
Gambar 6.3	Kapal penangkap ikan jenis pukot langga. Kapal dengan nama lambung “Ernita” ini milik salah seorang nelayan berhasil (kiri) dan kapal mesin 42 parkir di tempat penjualan minyak milik salah satu nelayan sukses lainnya	187
Gambar 6.4	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirausaha di dapur <i>kue adee</i> (kiri) dan pengusaha kuliner yang mendorong gerobak <i>mie caluk</i> (kanan) di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya.	199
Gambar 6.5.	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan memanen padi di sawah Gampong	214
Gambar 6.6.	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan pertanian tanaman non padi di Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya.	215
Gambar 6.7.	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan petani tambak di Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya.	217
Gambar 6.8.	Peremajaan Pertokoan yang merubuhkan pertokoan lama berbahan kayu. Kebijakan ini melambungkan biaya sewa yang harus ditanggung pedagang di saat transaksi dagang menurun.	219
Gambar 6.9.	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirasusaha <i>kue adee</i> di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya.	221
Gambar 6.10.	Usaha <i>kue adee</i> mendorong Petani tambak dengan kreatifitasnya mengolah lahan kosong di sekitar pantai untuk usaha pertanian tanaman singkong. Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupatean Pidie Jaya	223
Gambar 6.11.	Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirasusaha kuliner <i>mie caluk</i> di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya	226
Gambar 6.12.	Masyarakat bekerja keras pada panen raya di gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya	232
Gambar 6.13.	Masyarakat pedagang dan pengusaha kecil dengan andalan warung kecil dan gerobak di Gampong Meunasah Balek Kec. Meuredu Kab. Pidie Jaya	236





BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Terdapatnya kantong masyarakat miskin menurut batas wilayah administratif pemerintahan menegaskan bahwa gejala ketidakmerataan (*in equality*) hasil-hasil pembangunan ekonomi belum dapat teratasi. Keadaan tersebut terindikasi dari tingginya jumlah penduduk miskin di Indonesia, sebagaimana disebutkan BPS bahwa tahun 2008 jumlah penduduk miskin Indonesia lebih dari 325 juta jiwa dengan persentase rata-rata kemiskinan berada pada angka 14,14%. Populasi penduduk miskin terdistribusi pada beberapa daerah kantong kemiskinan nasional, seperti provinsi Papua (37,53%), Irian Jaya Barat (35,71%), Maluku (28,23%), Gorontalo (25,01%), NTT (23,31%), NTB (22,78%), Aceh (21,80%) dan Lampung (20,22%). (BPS, 2009)

Michael Ross dalam World Bank (2008) menyebutkan fenomena daerah-daerah penghasil sumber daya alam komoditas ekspor seperti Aceh dan Papua tidak menjamin terwujudnya kemakmuran bagi masyarakatnya. Bahkan kebalikannya, sumber daya tersebut berhubungan erat dengan konflik yang telah merusak Aceh lebih dari 30 tahun dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melemahkan pemerintahan, menurunnya kualitas layanan publik serta menggiring daerah ini ke dalam kondisi tingkatan kemiskinan yang tertinggi di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Aspinall (2005) menyebutkan konflik Aceh memasuki tahap ketiga dan merupakan tahap terbrutal yang mengubah Aceh menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Aceh merupakan satu-satunya provinsi dengan angka kemiskinan yang terus meningkat setelah tahun 2000. Perbaikan ekonomi Aceh berangsur memperlihatkan hasil setelah konsensus politik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menandai mengakhiri kebijakan masa lalu yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Aceh.

Tingkatan kemiskinan provinsi Aceh mengalami fluktuasi mengikuti dinamika sosial seperti gangguan keamanan akibat konflik vertikal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah selama hampir 30 tahun. Bertambah dengan guncangan kehidupan sosial dan ekonomi akibat bencana gempa bumi yang disertai gelombang tsunami. Angka kemiskinan Aceh pada masa konflik 28,4 persen (2004), kehancuran dampak bencana mendorong angka kemiskinan hingga mencapai 32,6 persen (2005). Dampak positif kesepakatan damai RI-GAM dan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi mampu menekan angka kemiskinan hingga 26,5 persen (2006). Kemudian angka kemiskinan semakin menurun menjadi 23,5 persen (2007) dan 21,8 persen (2008). (BPS dan World Bank).

Penurunan secara signifikan angka kemiskinan berkaitan dengan aliran dana otsus yang memfokuskan salah satunya pada upaya pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan tersebut. Bidang lainnya yang menjadi fokus dari pembiayaan yang bersumber dari dana otsus adalah bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, bidang pendidikan, bidang sosial dan bidang kesehatan. Pembiayaan enam agenda pembangunan tersebut disebutkan dalam pasal 183 ayat 2 UUPA bahwa Aceh akan menerima dana otsus selama dua puluh tahun. Untuk besaran 2 persen setara DAU nasional akan diterima Aceh selama lima belas tahun, dan mulai tahun ke-16 sampai tahun ke-20, besarnya dikurangi menjadi 1 persen setara DAU nasional.

Hasil kajian World Bank (2008) menegaskan bahwa kemiskinan Aceh sebagian besar merupakan fenomena pedesaan, dengan lebih dari 30 persen rumah tangga di pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini dibandingkan dengan tingkat rumah tangga miskin di wilayah perkotaan yang kurang dari 15 persen. Karakteristik lainnya dengan tingginya tingkat kemiskinan yaitu ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang rendah, rumah tangga yang dikepalai perempuan dan rumah tangga dengan mata pencaharian di bidang pertanian. Faktor pokok penentu kemiskinan tidak berubah meskipun terjadi perubahan yang cepat dalam aspek politik dan sosial ekonomi.

Dalam bagian yang sama, Bank Dunia (2008) mereferensikan prioritas kerja pengentasan kemiskinan Aceh dengan strategi pengurangan kemiskinan yang berfokus pada peningkatan produktifitas sektor-sektor pertanian dan perikanan. Hal ini harus dihubungkan dengan strategi memperbaiki kemampuan orang-orang miskin (pengembangan ketrampilan, rehabilitasi aset-aset fisik) dan menghubungkan mereka dengan kutub-kutub pertumbuhan wilayah perkotaan (prasarana pedesaan dan akses ke pasar yang lebih baik). Kemiskinan terjadi pada wilayah-wilayah berciri pedesaan dan minim akan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi Aceh mencapai tingkat 30,26 persen terjadi di Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan kabupaten pemekaran yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007.

Salah satu kabupaten di pantai timur Aceh yang mengalami perlambatan pengembangan ekonomi. Selama 30 tahun daerah ini nyaris tidak merasakan kemunculan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kecuali Meureudu, Ulee Glee, Trieng Gadeng, dan Beureunuen. Sebelum pemekaran wilayah, praktis hanya Sigli sebagai pusat pemerintahan kabupaten Pidie yang memiliki denyut ekonomi lebih berarti. Sekalipun demikian, Sigli tidak berhasil membangkitkan kemajuan ekonomi masyarakat di sekitarnya karena gaya tarik ekonomi kota Banda Aceh jauh lebih kuat.

Masyarakat miskin lainnya di pantai timur, terdapat di Kabupaten Pidie (28,11%) dan Kabupaten Aceh Utara (27,56%). Sisanya masyarakat Aceh yang berdiam di pantai barat dan wilayah pedalaman memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata kemiskinan provinsi, seperti Kabupaten Aceh Barat (29,26%), Kabupaten Benar Meriah (29,21%), Kota Subussalam (28,99%), Kabupaten Nagan Raya (28,11%), Kabupaten Gayo Lues (26,57%), Kabupaten Simeulu (26,45%) dan Kota Sabang (25,72%). Daerah dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Banda Aceh dengan angka kemiskinan sebesar 9,56 persen. (BPS, 2008)

Tingginya persentase kemiskinan di Aceh bukan hanya disebabkan oleh bencana gempa bumi / tsunami yang terjadi pada akhir tahun 2004. Sebelum kejadian tersebut fenomena kemiskinan dengan persentase yang lebih tinggi terdapat di kawasan dengan karakteristik penduduk yang bergantung hidup di sektor pertanian, seperti di Kabupaten Nagan Raya (35,94%), Kabupaten Aceh Barat (35,65%), Kabupaten Pidie (35,24%), Kabupaten Aceh Utara (34,27%), Kabupaten Simeulu (34,26%). Keadaan yang sama, persentase penduduk miskin terendah terdapat di Kota Banda Aceh (8,89%), Lhokseumawe (14,98%), Langsa (15,29%), Aceh Tenggara (23,87%) dan Aceh Tamiang (25,23%) (BPS, 2004).

Kemiskinan dominan terjadi di pedesaan (Bank Dunia, 2008) dan fakta kemiskinan di Pidie Jaya yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan nafkah kehidupan dari bidang pertanian sawah, perkebunan dengan komoditas andalan kakao, kelapa dan pinang. Ketiga komoditas ini melibatkan lebih 13 ribu kepala keluarga, dengan total produksi tahun 2007 lebih dari 4 ribu ton. Perikanan air laut dan budi daya air tawar termasuk andalan masyarakat Pidie Jaya. Pidie Jaya mempunyai luas lahan sawah 7.997 Ha. Konsentrasi areal pesawahan terletak di kecamatan Bandar baru (1.365Ha), Tring Gadeng (1.376 Ha), Meuredu (1.100 ha), Ulim (1.002 Ha) dan banda Dua (1.834 ha). Pada tahun 2008, Produksi budi daya air tawar mencapai 1.367,1 ton. Diluar itu, terdapat pedagang, pekerja bangunan dan pegawai pemerintah.

Data yang termuat dalam Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya (2009) menguatkan informasi bahwa sektor pertanian menjadi penopang utama struktur ekonomi masyarakat di kawasan itu. Sebagian besar masyarakat Pidie menggantungkan nafkah kehidupannya di bidang pertanian dan bidang ini berkontribusi menyumbang hingga 65,80 % terhadap total PDRB pada tahun 2008. Secara sektoral, pada tahun tersebut kontribusi atas PDRB ditopang oleh masyarakat tani yang bekerja di sub sektor pertanian tanaman bahan makanan (27,77 %) dan sub sektor peternakan (21,51 %).

Aktifitas kehidupan sosial masyarakat Pidie dari sudut pandang mata pencaharian tersebar pada beberapa sektor. Namun sektor pertanian mendominasi

dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun, pekerjaan di sektor ini yang tidak mengikat waktu membuat mereka memiliki kebiasaan meramaikan sawah saat musim tanam atau musim panen. Jeda waktu dari kegiatan pokok dimanfaatkan petani untuk meramaikan kedai-kedai kopi di pasar lokal terdekat. Secara statistik pembagian kerja masyarakat Pidie Jaya terlihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1
Penduduk Pidie Jaya Menurut Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah penduduk
1	Aparatur pemerintah/PNS	4.348
2	TNI/POLRI	571
3	Karyawan swasta/BUMN	1.872
4	Pensiunan	1.378
5	Petani/pekebun	23.228
6	Nelayan/pelaut	2.418
7	Wiraswasta/pedagang	14.748
8	Buruh	4.903
9	Peternak	173
10	Tukang	1.442
11	Mengurus rumah tangga	24.903
12	Pelajar/mahasiswa	28.657
13	Belum/tidak bekerja	38.484
	Jumlah	147.190

Sumber : Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2009

Sejalan dengan orientasi produktifitas pemanfaatan waktu maka taraf hidup masyarakat Pidie sangat variatif. Seperti terlihat dari model rumah tempat tinggal yang beraneka ragam, diantaranya terdapat rumah yang berbentuk permanen berbahan utama beton, berbahan papan semi permanen, rumah panggung berbahan dasar papan dan bahkan masih terdapat rumah panggung berbahan dasar batang rumbia. Kepemilikan kendaraan alat transportasi pribadi seperti mobil, motor dan sepeda menjadi bukti empirik lainnya atas fenomena disparitas taraf hidup yang tajam.

Meskipun angka Pendapatan regional per kapita penduduk Pidie Jaya pada tahun 2008 sebesar 7 juta rupiah per tahun. Gambaran angka pendapatan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama setahun tersebut tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, karena masih banyak rumah tangga penduduk yang berpenghasilan di bawah 1 juta per bulan. Hal tersebut terjadi karena distribusi pendapatan penduduk di wilayah tersebut belum merata. Keadaan lain yang dapat menjelaskan perbedaan pendapatan rata-rata per kapita tersebut adalah ketimpangan pendapatan antar penduduk yang demikian lebar. (BPS dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2009).

Bagi ibu-ibu dan wanita muda lainnya yang bekerja di sektor pertanian, jeda waktu dari pekerjaan pokok cenderung diisi dengan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Diluar itu sering dijumpai para wanita segala umur mengerjakan industri rumah tangga semacam membuat tikar pandan atau membuat emping melinjo secara tradisional dan pemasarannya mengandalkan jalur tengkulak yang mengunjungi rumah-rumah di perkampungan Pidie.

Dengan komposisi masyarakat yang homogen, mengingat kawasan Pidie tidak memiliki daya tarik para kaum migran untuk mengadu nasib. Geliat kemajuan masyarakat Pidie dipacu oleh penetapan Meureudu sebagai pusat pemerintahan. Perkembangan terakhir telah menghidupkan dinamika baru bagi masyarakat Pidie, setidaknya telah memancing pendatang untuk turut bekerja di sektor Pemerintahan.

Meskipun demikian, ditinjau dari segi letak geo politik dan geo ekonomi lokal. Pidie Jaya mempunyai peluang mencapai kemajuan ekonomi karena akses hubungan yang terbuka. Dua keadaan berikut menguatkan keterbukaan kawasan Pidie, *pertama*; sepanjang kawasan Kabupaten Pidie Jaya (termasuk Kabupaten Pidie) dilintasi jalan negara yang menghubungkan Medan dan Banda Aceh. Jalan negara tersebut, menjadi penghubung kota-kota berkembang lainnya seperti Binjai, Pangkalan Brandan, Langkat, Kuala Simpang, Langsa, Idi, Lhoksukon, Lhokseumawe, Bireuen. *Kedua*, Pidie Jaya memiliki garis pantai yang

memanjang sebagai batas wilayah dengan perairan Selat Malaka. Sepanjang pantai yang terdapat peluang pemberhentian nelayan, semisal munculnya pelabuhan tradisional nelayan tidak jauh dari muara sungai. Contoh konkrit pelabuhan tradisional ini, terlihat seperti di Mereudu dan Pante Raja. Bahkan saat ini, Mereudu dikembangkan pelabuhan nelayan tradisional sebagai TPI (Tempat Pendaratan Ikan) andalan kawasan itu. Disamping itu, di kawasan ini juga hadir pabrik kilang LNG Arun berikut beberapa industri berskala nasional.

Penelitian ini fokus pada pemikiran kritis atas fenomena rendahnya tingkat penghidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie. Disatu sisi agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Provinsi Aceh mengajarkan penganutnya untuk berperilaku kerja positif namun disisi lain masyarakat tidak memberikan tampilan perilaku kerja sebagaimana yang diajarkan agama. Bahkan perilaku kerja juga tidak tampil sebagaimana diatur oleh adat kebiasaan masyarakat Aceh yang dikenal “kesenyawaannya” dengan nilai agama. Peneliti mendalami fenomena kemiskinan masyarakat Aceh dengan dibatasi pada masyarakat Pidie yang berada di Kabupaten Pidie Jaya. Alasan pemilihan masyarakat Pidie dalam konteks analisis kemiskinan Provinsi Aceh, dapat disebutkan antara lain, *Pertama*; Pidie Jaya adalah kawasan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Aceh. *Kedua*., secara historis Pidie dikenal sebagai komunitas masyarakat Aceh yang punya entitas tersendiri. Pidie dalam sejarahnya dikenal sebagai sebuah teritori mandiri dari Kerajaan Aceh. Pidie sebelumnya adalah kerajaan Pedir yang berbeda dengan Aceh, sehingga sampai sekarang Pidie tidak disebut sebagai Aceh Pidie, melainkan kabupaten Pidie saja. Konfrontasi dengan Portugal, mendorongnya bergabung dengan Kerajaan Aceh.

Hal ini terlihat bahwa penyebutan nama kabupaten Pidie tidak mendapat label “Aceh” sebagaimana penyebutan nama kabupaten lain. Dalam perkembangannya, kemunculan daerah-daerah otonom baru di era reformasi tidak lagi menambalkan kata “Aceh” di awal nama kabupaten. Saat ini, masyarakat Pidie telah dipisahkan ke dalam dua satuan wilayah administratif pemerintahan, yaitu Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Alasan formalnya, guna mempercepat capaian pembangunan dan peningkatan layanan masyarakat Pidie

dibelahan timur. *Ketiga*, secara histori masyarakat Pidie adalah petani sawah handal. Fakta empirik menunjukkan bahwa Pidie dikenal sebagai daerah andalan produksi beras sebagai basis pemenuhan kebutuhan bahan makanan pokok masyarakat Aceh dan sekitarnya. Pidie menjadi lumbung padi utama bagi Aceh. Pidie dikenal memiliki komplek tanah sawah yang terhampar luas dengan dataran-dataran terbuka (Alfian,1999). Keterangan yang sama juga disebutkan situs resmi (*website*) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bahwa Negeri Meureudu langsung berada dibawah Kesultanan Aceh dengan status negeri bebas. Penduduknya punya satu kewajiban istimewa terhadap Kerajaan Aceh, yakni menyediakan beras. Karenanya ia merupakan lumbung beras utama kerajaan. Disamping itu, masyarakat Pidie pandai berdagang. Dikalangan perantau, orang Pidie dikenal sebagai “tionghoa hitam”. Masyarakat Pidie suka merantau dan berdagang. Orang Pidie bersama orang asal Bireuen mendominasi pasar-pasar di berbagai wilayah Aceh.

Keempat, posisi Pidie dinilai strategis. Secara geoekonomi dan geopolitik, Pidie menjadi penyangga utama pemenuhan bagi kepentingan aktifitas sosial, ekonomi, politik di pusat pemerintahan Aceh. Baik saat bernama Banda Aceh masa Aceh moderen, ataupun saat bernama Kutaradja pada masa Aceh klasik. *Kelima*, secara geografis Pidie menjadi anomali diantara kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah.

Lima alasan di atas, menunjukkan bahwa gejala kemiskinan masyarakat Pidie adalah sebuah masalah. Idealnya masyarakat Pidie memungkinkan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik melalui upaya pembangunan ekonomi wilayah. Untuk keluar dari kemiskinan, kelompok masyarakat miskin harus meningkatkan kemampuan mereka dalam menaikkan produktivitas pertanian dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan lebih produktif. Peningkatan produktivitas pertanian memungkinkan terjadinya perluasan lapangan kerja di sektor tersebut. Sektor pertanian yang lebih produktif akan mendorong kemunculan bidang usaha non pertanian di daerah pedesaan yang akan menyerap sebagian dari kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian. Kepemilikan usaha non pertanian dan keterlibatan dalam produksi pertanian diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang

meningkatkan kemungkinan untuk keluar dari kemiskinan. Program Penilaian Kemiskinan Indonesia tahun 2006, menyatakan bahwa peningkatan produktivitas pertanian serta peningkatan produktivitas di bidang non-pertanian, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (World Bank, 2008).

Dalam laporan Kajian Kemiskinan di Aceh tahun 2008, Bank Dunia mengungkapkan bahwa strategi pengurangan kemiskinan harus berkonsentrasi pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin (melalui ketrampilan, asset fisik dan sumberdaya manusia) dan menghubungkan masyarakat miskin dengan kutub-kutub pertumbuhan melalui sarana pedesaan dan meningkatkan mobilitas dari pedesaan ke perkotaan. World Bank (2007) menyebutkan peranan pertanian dalam mengurangi kemiskinan disorot dalam Laporan Pembangunan Dunia yang menyatakan bahwa 80 persen penurunan angka kemiskinan pedesaan di seluruh dunia (terutama di Asia), merupakan hasil dari membaiknya keadaan-keadaan di daerah pedesaan dibandingkan dengan perpindahan masyarakat dari daerah pedesaan ke perkotaan. Disamping itu, ditegaskan pula bahwa pertumbuhan yang berasal dari bidang pertanian dua kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan pertumbuhan yang berasal dari sektor-sektor lain.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpandangan bahwa solusi pengurangan angka kemiskinan pada masyarakat Pidie Jaya berada pada bagaimana masyarakat Pidie dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam bidang pertanian. Upaya optimalisasi produksi pertanian berkaitan erat dengan tingkat produktivitas kerja masyarakat Pidie, dan rendahnya tingkat produktivitas kerja telah menyeret mereka ke tingkat kemiskinan tertinggi di Aceh.. Produktifitas berkaitan dengan aspek tindakan kerja berikut hal yang melatarbelakanginya.

Sistem pemaknaan sebagai basis dari tindakan pada dasarnya berakar pada aspek kultural dan struktural. Kedua aspek saling berkelindan dan dalam konteks pembangunan ekonomi, kedua aspek diduga kurang diperhatikan dalam merangsang peningkatan produktivitas kerja masyarakat Pidie yang berkarakteristik masyarakat pedesaan. Realitas menunjukkan pihak eksternal

terjebak dalam agenda rutin berupa penyuntikan modal finansial dan penyaluran kebutuhan material fisik lainnya seperti pengadaan pupuk, bibit unggul, pestisida, pembuatan saluran irigasi. Secara bersamaan masukan tersebut juga merupakan tuntutan masyarakat yang menjadi gambaran dari hilangnya kemandirian (otonomi) desa dalam memproduksi kebutuhannya sendiri (Lawang, 2005).

Masyarakat bukan hanya tidak mampu memproduksi material fisik penunjang kehidupannya, namun masyarakat ditenggarai kehilangan kekuatan untuk mempertahankan atau memperbaharui nilai-nilai kerja sebagai kearifan lokal. Disaat yang sama, pihak eksternal juga mengabaikan penguatan, pengenalan dan pembaharuan nilai kerja kepada masyarakat. Pemahaman subyektif atas makna kerja bagi masyarakat Pidie penting untuk diketahui, karena ketidapahaman ini akan berkontribusi pada ketidaktepatan pemilihan model dan pendekatan dalam penyusunan strategi pembangunan ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang inilah, peneliti menganggap penting penelitian mengenai tindakan kerja pada masyarakat Pidie.

1.2. Perumusan Masalah

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah melalui pembangunan ekonomi wilayah yang disertai dukungan dana trilyunan rupiah ditenggarai belum memperoleh hasil optimal sebagaimana diharapkan. Fenomena ini menguatkan pandangan pemikir sosial bahwa bahwa kekuatan ekonomi dan keuangan bukan aspek tunggal untuk menjamin keberhasilan capaian pembangunan ekonomi. Aspek sosial masyarakat merupakan sisi penting lainnya yang cenderung diabaikan para perencana dan pelaksana pembangunan. Seperti halnya hambatan capaian pembangunan ekonomi pada komunitas masyarakat Pidie yang berada di Kabupaten Pidie Jaya, seharusnya perlu ditinjau hambatan apa di balik fenomena rendahnya produktivitas kerja.

Data kemiskinan BPS menunjukkan bahwa rendahnya taraf hidup sebagian masyarakat Pidie telah memberikan kontribusi signifikan atas angka kemiskinan

provinsi Aceh yang selama 5 tahun terakhir berada pada angka 28,4 persen (2004), 32,6 persen (2005), 26,5 persen (2006), 23,5 persen (2007) dan 21,8 persen (2008). (BPS dan World Bank)

Meskipun dalam data statistik mengindikasikan terjadinya peningkatan taraf hidup sebagian masyarakat Aceh, namun hal itu tidak terjadi pada masyarakat Aceh yang berada di Kabupaten Pidie Jaya dan kabupaten induknya. Tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Pidie tahun 2004 berada pada angka 35,24 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Pidie 28,11 persen pada tahun 2008. Kabupaten ini melepas sebagian wilayahnya menjadi Kabupaten baru yaitu yang mendapatkan warisan kemiskinan pada angka 30,26 persen. Angka ini merupakan angka kemiskinan tertinggi di antara wilayah-wilayah lain dalam provinsi Aceh.

Dalam konteks ini Pidie mengalami perubahan sosial, sejarah menuliskan bahwa Pidie dengan potensi petaniannya menjadi sentra produksi pangan yang diandalkan kesultanan Aceh untuk ketersediaan logistik pangan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan itu. Keadaan tersebut mengindikasikan tingginya produktivitas kerja masyarakat Pidie pada masa itu. Namun rendahnya taraf hidup sekitar 44 ribu orang dari 147.190 orang penduduk Pidie Jaya saat ini, mengindikasikan terjadinya penurunan produktivitas kerja pada sebagian masyarakat Pidie. (BPS dan Dinas Kependudukan Pidie Jaya)

Keadaan terakhir menunjukkan bahwa di tengah gejala kemerosotan produktivitas kerja masyarakat Pidie, struktur sosial ekonomi masyarakat masih di topang oleh masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian. Sektor ini berkontribusi hingga 65,80 % atas PDRB Pidie Jaya pada tahun 2008. Di dalam sektor pertanian tersebut, terdapat sub pertanian tanaman pangan dan peternakan yang mendominasi kontribusi atas PDRB. (BPS dan Bappeda Kabupaten Pidie Jaya, 2008).

Gejala merosotnya produktivitas kerja masyarakat Pidie ditenggarai memiliki pertalian yang erat dengan nilai “yang mengitari” orientasi berpikir dan berperilaku masyarakat pidie dalam kehidupan sosialnya. Nilai-nilai ideal

kehidupan sosial masyarakat Pidie bersumber pada ajaran agama dan nilai adat tradisional sebagaimana tersebut dalam semboyan lokal “*Adat ngeun hukom hana cree, lagee zat ngeun sifeut*” (adat kebiasaan tidak berpisah dengan hukum syariah, seperti zat dengan sifatnya).

Tingginya angka kemiskinan pada masyarakat Pidie berkaitan dengan rendahnya perilaku kerja produktif yang menggejala pada sebagian masyarakat Pidie saat ini. Hal ini ditenggarai akibat melunturnya ikatan masyarakat atas nilai-nilai ajaran Islam dan nilai lokal yang mendorong masyarakat untuk memiliki perilaku kerja positif. Lebih jauh, ditenggarai rendahnya pemaknaan kerja yang bermuara pada memburuknya perilaku kerja merupakan cerminan dari penurunan semangat implementasi sebagian masyarakat Pidie atas doktrin ajaran agama yang sekalipun menyebut kerja sebagai ibadah.

Kerja dipandang sebagai tindakan sosial ekonomi individu yang berorientasi pada perilaku orang lain yang berada pada lingkungan sosialnya. Setiap tindakan kerja mempunyai *background* berupa kepentingan. Kepentingan merupakan kristalisasi dari arah dan tujuan tindakan kerja yang menjadi latar dari makna subyektifitas aktor pelaku kerja. Sistem makna sebagai landasan makna subyek aktor melekat pada sistem sosial dimana aktor melangsungkan kehidupan sosialnya. Disamping itu, relasi antara kekuasaan dengan aktor pelaku kerja tidak dapat dilepaskan dari tindakan kerja sang aktor.

Kondisi lingkungan sosial akibat konflik ditenggarai saling berkelindan atas melemahnya nilai-nilai lokal dalam mendorong perilaku kerja masyarakat. Sejauh ini, terlihat bahwa sebagian pihak belum mampu mendeteksi hambatan-hambatan yang berada di ranah “dalam” masyarakat itu sendiri. Ditenggarai mereka mengharapkan permasalahan tersebut secara alamiah akan teratasi dengan sendirinya seiring proses capaian pembangunan. Dalam upaya pemahaman perilaku kerja dan relevansinya dengan nilai yang dianut masyarakat maka dirasa perlu untuk mendalami nilai apa yang sebenarnya melandasi perilaku kerja masyarakat Pidie.

Kemiskinan seharusnya tidak menjadi persoalan utama bagi masyarakat Pidie yang mayoritas beragama Islam, karena di dalam Islam terkandung nilai-nilai yang mengajarkan dan mendorong penganutnya untuk berperilaku kerja positif. Sejalan dengan itu nilai adat yang berlaku ditengah masyarakat Pidie, menghendaki masyarakat untuk berperilaku kerja positif. Adat memberi penghargaan atas masyarakat yang berperilaku rajin bekerja memenuhi nafkah diri dan keluarganya, sebaliknya adat mencela perilaku malas bekerja yang ditunjukkan masyarakat.

Kemiskinan menjadi fenomena umum masyarakat Pidie, namun disaat yang sama juga terdapat masyarakat Pidie yang terbilang sukses kehidupan sosial ekonominya. Disatu sisi fenomena kemiskinan tidak sejalan dengan semangat yang terkandung dalam nilai agama dan nilai adat berlaku, disisi lain terdapatnya sejumlah masyarakat Pidie yang kehidupan ekonominya sukses menunjukkan adanya keragaman dampak dari tindakan sosial masyarakat Pidie yang berbasis pada nilai-nilai kehidupan yang sama.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, untuk menemukan jawaban maka dirumuskan dalam pertanyaan penelitian berikut :

- a. Bagaimana tindakan kerja masyarakat Pidie?
- b. Bagaimana pertautan antara nilai ajaran agama yang dianut masyarakat Pidie dengan tindakan kerja tersebut?
- c. Bagaimana pertautan antara nilai adat yang berlaku dalam masyarakat Pidie dengan tindakan kerja tersebut?

Pertanyaan penelitian yang pertama diuraikan jawabannya pada Bab 5 Disertasi ini. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana cara masyarakat Pidie berpikir yang berwujud konkrit pada serangkaian tindakan-tindakan kerjanya. Dalam menganalisis realitas-realitas data empirik akan digunakan pemikiran-pemikiran sosial yang berkembang dalam teori tindakan Weberian, seperti yang dikemukakan Karl Polanyi (pertentangan ekonomi formal dan ekonomi substantif) dan Granovetter dengan konsep tindakan “embeddedness”.

Pertanyaan penelitian kedua dan ketiga diuraikan jawabannya pada Bab 6 Disertasi ini. Penempatan jawaban pada bab yang sama dilatarbelakangi pertimbangan bahwa masyarakat Pidie tidak memisahkan adat dari agama. Semboyan lokal “*Adat ngeun hukom hana cree, lagee zat ngeun sifeut*” (adat kebiasaan tidak berpisah dengan hukum syariah, seperti zat dengan sifatnya). Teori Nee atas “*New Institutionalism*” menjadi alat analisis atas realitas yang ditemukan secara empirik atas gejala kondisi keterpautan nilai-nilai dengan tindakan kerja masyarakat. Dimana nilai agama dan adat tersebut direpresentasikan kehadirannya pada institusi-institusi sosial yang lahir, hidup berkembang guna menjadi alat penegakkan fungsi sosial.

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan pokok penelitian ini adalah untuk :

- a. Mendeskripsikan tindakan kerja masyarakat Pidie.
- b. Menjelaskan pertautan antara nilai ajaran agama yang dianut masyarakat Pidie dengan tindakan kerja tersebut.
- c. Menjelaskan pertautan antara nilai adat yang berlaku dalam masyarakat Pidie dengan tindakan kerja tersebut.

1.5. Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Penelitian Secara akademis

Penelitian ini memberi sumbangan yang signifikan, baik bagi ilmu pengetahuan sosial, masyarakat secara umum dan masyarakat Pidie (Aceh) pada khususnya. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperluas dan memperkaya bangun pengetahuan (*body of knowledge*) sosiologi ekonomi, sosiologi penghidupan (*livelyhood sociology*) dan sosiologi kemiskinan. Secara umum dalam sosiologi ekonomi, penelitian ini memberi perluasan pandangan bahwa dalam sebuah setting masyarakat yang fanatik dalam beragama, terdapat tindakan-tindakan ekonomi yang *diss-embeddedness*. Hal mana terjadi akibat agama tidak lagi menjadi rujukan dalam penataan semangat menjalankan kehidupan secara

menyeluruh, akibatnya agama tidak berfungsi secara sosialnya (*social disfunctionality*). Etika Kerja Islam belum menjadi etos kerja masyarakat Pidie.

Keadaan ini menginformasikan bahwa seperangkat nilai (*value*) dapat mengalami degradasi kekuatan fungsi pengaturan sosialnya, saat mana tidak terdapat *agency* yang mampu menerjemahkannya ke dalam tindakan konkrit. Sehingga persoalan tindakan ekonomi, bukan hanya terbatas seperangkat norma dan nilai yang menjadi basis tindakan masyarakat, dimana dikenal adanya tindakan yang melekat dengan situasi sosial (*embeddedness*) atau tidak mengalami kelekatan sosial (*diss-embeddedness*). Akan tetapi seperangkat nilai mengalami evolusi, saat mana evolusi itu diinterpretasikan secara berbeda oleh para Aktor pelaku. Kecuali saat mana *agency* hadir menerjemahkan dan mengejewantahkan nilai-nilai tersebut pada wujud konkrit cara berpikir dan bertindak. Saat itu seperangkat nilai menjadi basis tindakan ekonomi masyarakat yang menjadikan seorang *Agency* sebagai rujukan utama.

Bagi sosiologi penghidupan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya keragaman cara dan strategi yang dilakukan masyarakat Pidie dalam rangka pemenuhan berbagai kebutuhan guna menjamin keberlangsungan kehidupan diri dan orang-orang sekeliling yang berada di bawah tanggung jawabnya. Bagi sosiologi kemiskinan, informasi menyangkut mandegnya fungsi sosial dari seperangkat nilai agama dan institusi sosial yang tidak mengalami perubahan dalam mengikuti dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi titik perhatian yang penting dalam kajian ini.

Secara spesifik, penelitian ini menghasilkan keluaran. Diantaranya ketidakmampuan teori Granovetter menyangkut *Embeddedness* (kelekatan sosial) dalam menjelaskan tindakan kerja (tindakan ekonomi) masyarakat Pidie yang berada pada sebuah setting sosial masyarakat agraris pedesaan yang kental dengan hubungan dan aktifitas tradisi-tradisi adat dan ritual-ritual agama. Disamping itu, perhatian terhadap kedudukan *agency* yang belum mendapat tempat dalam pemikiran Granovetter menjadi hal penting yang ditemukan dalam penelitian ini. *Agency* penting untuk menjamin adanya artikulasi nilai-nilai sehingga dapat diwujudkan dalam tindakan konkrit.

Penelitian ini penting bagi masyarakat Pidie, karena penelitian ini bertolak dari pemikiran tentang pentingnya pemahaman komprehensif atas tindakan sosial masyarakat dalam aktifitas kerja yang mereka lakukan guna menjamin ketercapaian tujuan-tujuan ekonomi yang ditargetkan. Dalam penelitian ini, konsep pembangunan ekonomi dalam batasan program kerja pengentasan kemiskinan terganjal pencapaiannya akibat tidak terintegrasinya pemahaman atas tindakan kerja. Konsep tindakan kerja menjadi fokus perhatian, terutama dalam memahami basis nilai yang digunakan masyarakat Pidie.

Peneliti berharap dengan tersusun data dan informasi hasil pendalaman studi tindakan kerja masyarakat ini, dapat berkontribusi pada pengembangan teori-teori sosiologi ekonomi dan sebagian diantaranya termasuk dalam kajian teoritik sosiologi pembangunan ekonomi. Pengembangan konsep dalam studi ini berada pada konsep perilaku kerja masyarakat, struktur dan kultur masyarakat dalam pertaliannya dengan konsep pembangunan ekonomi wilayah. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat mampu mengangkat gejala perilaku sosial ekonomi masyarakat pedesaan ke tataran ilmiah. Sehingga dengannya dapat dirangkai pertautan antara sikap perilaku itu sendiri dengan dinamisasi sistem sosial.

Penelitian-penelitian tentang tindakan kerja yang dilakukan sebelumnya, tidak memberi perhatian pada dinamika perilaku kerja masyarakat yang merujuk pada konteks struktural dan kultural lingkungan kehidupan sosial aktor (*mikro*), pertautannya dengan dengan kebijakan elit pemerintah gampong dan pemerintah lokal (*messo*) pada agenda pembangunan ekonomi masyarakat yang bermuara pada tingkat capaian peningkatan taraf hidup masyarakat sebagai salah satu tujuan hidup bernegara (*makro*). Secara sempit dapat dikatakan, studi ini ingin mengangkat kajian kritis atas tindakan kerja sekelompok masyarakat yang hidup dalam tatanan sistem nilai mendorong penganutnya berperilaku kerja positif, namun fakta objektif menunjukkan tingkat kehidupan ekonomi masyarakatnya tidak relevan dengan nilai yang dianut.

1.5.2 Signifikasi Aspek Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah lokal maupun pihak lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam perumusan perencanaan, pengembangan strategi dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi agar memberi tempat bagi pandangan sosiologis atas tindakan kerja masyarakat.

Disamping itu, hasil studi yang relevan dengan perilaku ekonomi dan aspek lainnya yang berada dalam pembahasan ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi pemilihan pendekatan yang memiliki keakuratan ketepatan penanganan masalah kemiskinan pada masyarakat Pidie dan masyarakat lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik.

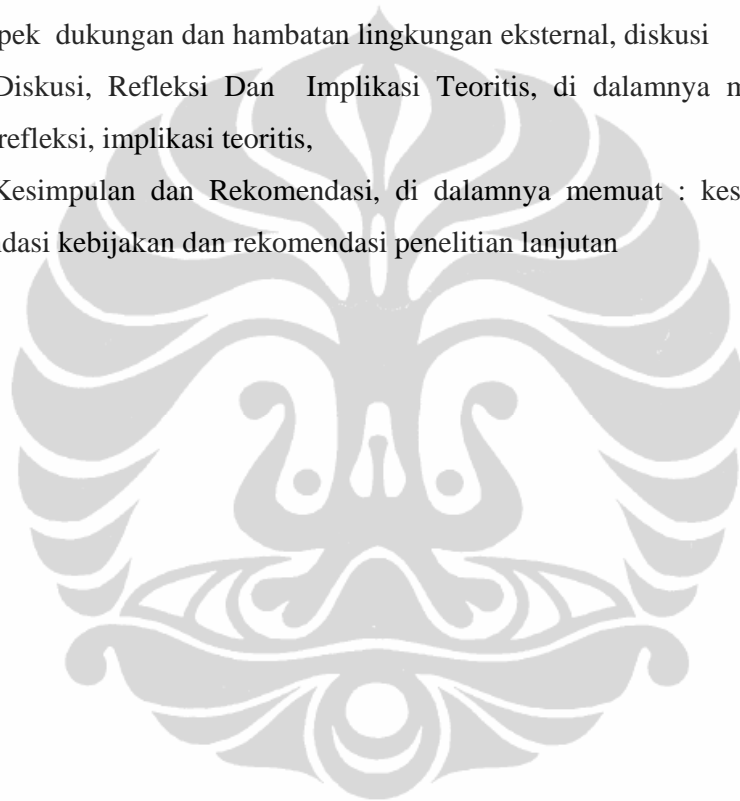
1.6. Pembabakan Penulisan Disertasi

Disertasi hasil penelitian akan disajikan dalam 8 bagian atau bab dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan, di dalamnya memuat : latar belakang, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian.
2. Bab 2 Kajian Pustaka, di dalamnya memuat : kerangka teoritik, telaah beberapa hasil studi terdahulu dan Pemetaan Historisitas Lokal Masyarakat Pidie terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi
3. Bab 3 Metodologi Penelitian, di dalamnya memuat : pendekatan dan tipe penelitian, waktu dan lokasi penelitian, posisi dan peran peneliti, pengumpulan data, analisis dan penyajian data, strategi validasi data dan hambatan selama studi lapangan.
4. Bab 4 Konstruksi Sosial Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pidie, di dalamnya memuat : gambaran Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Pidie Jaya, konstruksi sosial, profil wilayah dan institusi pemerintahan, profil geografis dan sosio demografis pidie jaya, struktur sosial, situasi sosio kultural masyarakat gampong meunasah balek.
5. Bab 5 Tindakan Kerja Masyarakat Pidie Dalam Historisitas Lokal , di dalamnya memuat : tindakan kerja masyarakat pidie dalam dinamika

historisitas lokal, isu-isu lokal pada masyarakat pidie, terkait tindakan kerja aktor menurut bidang pekerjaan.

6. Bab 6 Kontribusi Nilai Dan Struktur Sosial terhadap Dinamika Ekonomi Masyarakat Pidie, di dalamnya memuat : dinamika ekonomi masyarakat pidie, struktur sosial dan eksistensi nilai agama serta adat dalam dinamika kehidupan ekonomi, pemuka agama, adat dan transformasi nilai terkait budaya kerja, aspek dukungan dan hambatan lingkungan eksternal, diskusi
7. Bab 7 Diskusi, Refleksi Dan Implikasi Teoritis, di dalamnya memuat : diskusi, refleksi, implikasi teoritis,
8. Bab 8 Kesimpulan dan Rekomendasi, di dalamnya memuat : kesimpulan, rekomendasi kebijakan dan rekomendasi penelitian lanjutan



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teoritik

2.1.1. Tindakan Kerja dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Secara umum tindakan kerja merupakan tindakan individu yang dilakukan dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan individu lain yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. Tindakan sosial ini berada dalam cakupan aktifitas ekonomi individu dan masyarakat, karenanya disebut dengan tindakan ekonomi. Dalam kajian ekonomi masyarakat, Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* menyebut manusia sebagai *homo economicus*. Pemikiran mengandung pemahaman bahwa manusia termotivasi melakukan tindakan-tindakan ekonomi karena dorongan kepentingan pribadi. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara rasional dengan berbasiskan pada kelengkapan informasi yang dimilikinya.

Pemikiran yang berbasis pada filsafat utilitarian ini, kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan ekonomi klasik dan neo klasik. Asumsi yang digunakan bahwa perilaku ekonomi individu senantiasa digerakkan oleh kepentingan pribadi individual yang berlandaskan pada kemampuan berfikir memperhitungkan pilihan-pilihan guna meraih keuntungan serta menghindari kerugian dalam setiap tindakannya. Tindakan akan disebut rasional bila dalam setiap tindakan itu terdapat orientasi yang mengarahkan kepada upaya memaksimalkan keuntungan diri sendiri, mencapai utilitas tertinggi dalam konsumsi, optimalisasi proses produksi serta kelancaran sirkulasi finansial guna penghimpunan modal sehingga terwujud kapitalisasi dan investasi. Dengan demikian, dalam pandangan ini setiap tindakan ekonomi individu adalah manifestasi dari kalkulasi rasionalitas dalam kerangka memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian, terlepas dari aspek moral dan etika yang bersumber dari nilai-nilai agama dan adat budaya.

Tindakan sosial di dalam sosiologi dipandang sebagai tindakan yang memiliki orientasi sosial. Kerja merupakan tindakan individu yang dilakukan karena dorongan kepentingan ekonomi dan diorientasikan pada orang lain. Kerja

tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi tetapi juga oleh tradisi maupun emosi. Lebih sempit dari itu, tindakan ekonomi di dalam ilmu ekonomi dipandang sebagai tindakan eksklusif individu yang berorientasi pada kegunaan atau utilitas.

Dalam konsep ekonomi formalis yang diusung oleh penganut teori ekonomi neo-klasik diasumsikan bahwa ketika individu melakukan suatu tindakan adalah bersifat rasional dan instrumental. Tujuan yang hendak dicapai adalah memaksimalkan keuntungan secara individual. Kerangka pemikiran seperti ini, menempatkan motivasi ekonomi sebagai basis tindakan sosial. Penganut teori ekonomi neo-klasik mengabaikan hal-hal diluar motivasi ekonomi seperti unsur-unsur nilai, budaya dan agama di dalam mengamati dinamika tindakan sosial individu pada aktifitas ekonominya. Konsep pemikiran ekonomi formalis yang demikian disebutkan oleh para pemikir sosiologi ekonomi sebagai *dis-embeddedness*. Asumsi yang dipakai oleh ekonomi neo klasik mengenai individu *homo economicus* yang atomistik dan rasional dalam maksimasi utilitas

Mengedepankan sisi moral yang diabaikan dalam pemikiran ekonomi formalis, Weber justru memperhatikan tindakan rasional ekonomi individu bertolak dari konteks nilai agama (*Protestant Calvinis*), hal tersebut berlangsung pada masa awal perkembangan ekonomi kapitalisme. Selanjutnya pemikiran tersebut dikembangkan oleh Karl Polanyi (1957), Mark Granovetter (1985,2005), Robert Wuthnow (2005) dan Victor Nee (1998,2005). Mereka mengajukan konsep ekonomi substantifis yang mengatakan bahwa tindakan rasional individu dalam kehidupan ekonomi difasilitasi, dimotivasi dan diatur oleh kepercayaan bersama, relasi sosial, norma dan institusi sosial. Dengan demikian, tindakan ekonomi dibatasi konteks sosial yang di dalam konteks itu terdapat kepercayaan bersama berikut norma yang diawasi serta ditegakkan bersama.

Dalam kajian ekonomi masyarakat, Polanyi (1957) membedakan antara ekonomi substantivisme dan formalisme. Perspektif ekonomi substantivisme memandang ekonomi sebagai sesuatu realitas yang nyata dimana digambarkan bahwa untuk dapat bertahan hidup setiap individu menggantungkan dirinya pada alam dan individu-individu lain yang berada di sekitarnya. Karenanya terjadi saling ketergantungan antara individu dalam sebuah kehidupan ekonomi

masyarakat. Sementara itu, perspektif formalisme memandang ekonomi sebagai realitas yang abstrak dimana digambarkan individu sebagai homo economicus yang hanya menggunakan perhitungan logika kalkulatif atas tujuan yang hendak dicapai berikut cara-cara terefisien yang akan dipilih secara rasional.

Dalam ekonomi formalis, tindakan sosial dalam cakupan aktifitas sosial ekonomi senantiasa bertautan dengan hubungan-hubungan sosial masyarakat. Dalam kajiannya, tindakan individu selalu berada dalam pengaruh konteks budaya dan nilai-nilai agama yang berkembang dalam masyarakat. Demikianpun aktifitas kerja tidak terlepas dari kehidupan sosial yang sudah ada dalam hubungan-hubungan masyarakat. Granovetter (1985) memberikan konsep pemikiran ekonomi substansial, dengan *embeddedness* yang merupakan salah satu upaya sosiologi ekonomi dalam menjelaskan permasalahan tindakan sosial dalam konteks aktifitas ekonomi individu, termasuk di dalamnya aktifitas bekerja.

Melalui pendekatan kelekatan sosial (*embeddedness approach*), Granovetter lebih memberikan perhatian terhadap pola-pola relasi personal dalam berbagai aktifitas ekonomi individu. Karenanya, pemikiran teoritik Granovetter memberikan suatu interpretasi yang lebih mendasar bahwa berbagai aktifitas ekonomi individu mengandung “kelekatan sosial” (*embededdness*). Aktifitas ekonomi individu tidak terlepas dari hubungan-hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kecenderungan ini memberikan suatu kerangka pemikiran bahwa nilai-nilai budaya dan agama dapat menjadi penghambat atau bahkan mendorong perkembangan kehidupan ekonomi pada masyarakat tertentu.

Weber mengatakan bahwa secara umum, perbedaaan mendasar analisa sosiologi tindakan ekonomi dari analisa ekonomi terdapat pada tiga unsur yaitu (1) tindakan ekonomi adalah sebuah tindakan sosial; (2) tindakan ekonomi selalu melibatkan makna; dan (3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan. Sejalan dengan itu, maka dikenal tiga tipe tindakan ekonomi yang berbeda, yakni *custom*, *convention* dan *interest*. Tindakan yang ditentukan oleh kepentingan didefenisikan sebagai tindakan instrumental dan berorientasi kepada harapan yang identik. Tindakan ini mempersyaratkan *setting* sosial dimana aktor lain berpikir dengan cara instrumental yang sama.

Tindakan sosial dibatasi pengertiannya pada perilaku subyek individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku individu lainnya, dengan demikian perilaku yang dilakukan tanpa mempertimbangkan reaksi pihak lain maka tidak termasuk di dalamnya. Weber (1964) menyebutkan tindakan sosial memiliki makna subyektif bagi pelakunya, memiliki orientasi terhadap perilaku individu lainnya di dalam hubungan interaksi sosial. Weber membuat penggolongan tindakan sosial ke dalam empat tindakan, yaitu (1) tindakan rasional instrumental, dilakukan dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai; (2) tindakan rasional yang berorientasi nilai, tindakan ini dilakukan seseorang yang didasari oleh nilai-nilai dasar dalam masyarakat; (3) tindakan afektif, dilakukan seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya; (4) tindakan tradisional, dilakukan atas dasar kebiasaan, adat istiadat yang turun temurun tanpa upaya kritis dari pelakunya.

2.1.2. Perspektif Keterlekatan Sosial dalam Tindakan Ekonomi

Para pemikir studi sosiologi memiliki perbedaan-perbedaan perspektif dalam mempelajari tindakan individu dan atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan itu disebabkan oleh berbedanya asumsi yang digunakan menyangkut hakikat dan posisi individu dalam masyarakat. Sejauh ini, setidaknya terdapat dua perspektif akibat perbedaan asumsi tersebut yaitu kelekatan sosial (*embeddedness*) dan utilitarian. Perspektif utilitarian mengabaikan sisi moral dan sosial dari individu yang melakukan tindakan sosial. Asumsi utamanya adalah manusia sebagai aktor yang rasional yang mana selalu berusaha mendapatkan kesenangan, keuntungan dan kesejahteraan pada tingkat capaian setinggi mungkin dalam keadaan mana dapat diraihnyanya melalui aktifitas yang paling minimal tingkat pengorbanan. Bahkan, jika mungkin tanpa pengorbanan sama sekali.

Motivasi dengan mengedepankan prinsip untung rugi dan mengambil pilihan terefisien diantara pilihan-pilihan tersedia menjadi landasan individu dalam mengambil tindakan sosial. Prinsip tersebut berakar pada pemikiran Adam Smith yang menggambarkan hakikat manusia manusia sebagai *homo economicus*.

Prinsip efisiensi dalam tindakan sosial tersebut dipakai dalam kajian ekonomi hingga saat ini. Dalam sosiologi, aliran berpikir ini dikenal dengan ekonomi formal.

Berbeda halnya dengan pemikiran yang mengkaji tindakan ekonomi dengan berbasiskan idealisme dan moral manusia mengikuti pola hubungan-hubungan sosial dimana mereka berada. Pengkajian gejala ekonomi dalam aliran ini dikenal sebagai ekonomi substansi. Karl Polanyi, Granovetter serta Scott termasuk di dalam kelompok ekonomi substansi. Polanyi dengan "*The economy as instituted process*" menegaskan bahwa ekonomi formal diturunkan dari penalaran logika berpikir semata, sedangkan ekonomi substansi justru diturunkan dari fakta dimana individu tak hanya berpikir logis dalam setiap tindakan ekonominya namun juga memperhatikan moral dan idealisme nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam aliran ekonomi substansi dikenal "keterlekatan sosial" (*embeddedness*) yang diinisiasi oleh Granovetter (1985) melalui pemikirannya dalam tulisan "*The Social Embeddedness of Economic Actions*". Granovetter mengungkapkan bahwa setiap tindakan ekonomi selalu terlekat dengan konteks dan latar sosial. Keterlekatan ekonomi tidak hanya terbatas pada "jaringan-jaringan hubungan antar personal" tetapi juga terdapat pada supra individual dan kondisi-kondisi hubungan masyarakat interpersonal. Dalam pandangan ini, ekonomi ditandai dengan keterlekatan baik pada skala makro maupun mikro.

Berkaitan dengan keterlekatan ini, terdapat tiga proposisi utama dalam sosiologi ekonomi baru menurut Swedberg dan Granovetter, yaitu (1) tindakan ekonomi adalah suatu bentuk tindakan sosial; (2) tindakan ekonomi disituasikan secara sosial; dan (3) institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial. Dengan demikian tindakan ekonomi dan institusi ekonomi merupakan ekspresi hubungan sosial. Tindakan seseorang tak semata-mata didorong oleh perhitungan untung rugi. Sejalan dengan itu, James C. Scott dalam "*The Moral Economy of the Peasant*" menegaskan bahwa dalam bekerja petani selalu mengedepankan prinsip "*safety first*" sehingga cenderung resisten terhadap hal-hal baru yang dianggap dapat menganggu kepastian hasil usaha tani yang digarapnya.

2.1.3. Agama, Adat Budaya dan Ekonomi Masyarakat

2.1.3.1. Kajian Weber terhadap Ekonomi Kapitalis.

Analisa Weber dalam bukunya *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* dinilai sebagai momentum perkembangan studi sosiologi yang memberi perhatian pada kajian mencari pertautan nilai-nilai etika agama dengan sistem ekonomi masyarakat. Weber, sebagaimana khasnya memberi penekanan pada konsep rasionalitas pada kajian perkembangan kapitalisme moderen yang berlangsung pada masyarakat Barat. Secara singkat, Weber mengemukakan tesisnya bahwa aspek-aspek tertentu dalam etika Protestan merupakan perangsang kuat dalam meningkatkan pertumbuhan sistem ekonomi kapitalis dalam tahap-tahap awal pembentukannya. Dalam pertumbuhannya kapitalisme menjadi besar dan mandiri, sekaligus merusak etika agama itu sendiri. Pengaruh yang merangsang ini dapat dilihat sebagai sesuatu *elective affinity* antara tuntutan etis tertentu yang berasal dari kepercayaan Protestan dan pola-pola motivasi ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi kapitalisme.

Konsep *elective affinity* menghindari asumsi hubungan sebab dan akibat antara etika Protestan dengan perkembangan kapitalisme, akan tetapi lebih merupakan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat saling mendukung secara timbal balik. Jenis motivasi yang timbul karena menerima kepercayaan Protestan dan etis Protestan membantu merangsang jenis perilaku yang dibutuhkan atas lahirnya kapitalisme *bourgeois* moderen.

Baik Protestanisme maupun kapitalisme menyangkut pandangan hidup yang rasional dan sistematis. Etika Protestan memberi tekanan pada usaha menghindari kemalasan, menekankan kerajinan bekerja di semua bidang kehidupan sekaligus membatasi diri atas kenikmatan materi dengan hidup sederhana. Pada saat yang sama perkembangan kapitalisme moderen menuntut individu membatasi konsumsi, uang yang dihasilkan dituntut untuk diinvestasikan kembali untuk pertumbuhan modal. Menuntut bekerja dengan teratur, berdisiplin pada perencanaan yang sistematis untuk tujuan-tujuan masa yang akan datang.

Menurut Weber, akar motivasi individu berada jauh lebih dalam daripada keputusan rasional yang disengaja mengenai alat dan tujuan atau komformitas dari

mereka yang berotoritas. Analisa Weber dalam pemikiran ini menunjukkan pengertian mengenai pentingnya kepercayaan agama dan nilai dalam membentuk pola-pola motivasional individu serta tindakan ekonominya.

2.1.3.2. Konsepsi Islam tentang Tindakan Kerja dalam Kehidupan Ekonomi.

Abdullah (1983) dalam pengantar publikasi hasil penelitian “Agama dan Perubahan Sosial” kerjasama Leknas LIPI dan Departemen Agama RI disebutkan bahwa kajian agama dan perubahan sosial merupakan salah satu upaya untuk mengetahui dengan baik hubungan timbal balik antara agama sebagai kenyataan batiniah dengan kenyataan sosial yang empirik, dalam mana kenyataan batiniah memanifestasikan diri. Tidak memadai bila kenyataan batiniah hanya dilihat dari substansi ajaran saja sebagaimana biasa dilakukan. Sebab jika benar kenyataan religius itu bermakna dalam hidup maka haruslah dilihat pula bagaimana agama itu terpancar dalam penghayatan kultural dan kenyataan sosial.

Lebih lanjut dijelaskan Abdullah bahwa menjadi bagian dari tanggung jawab penelitian sosial untuk mengetahui bagaimana corak hubungan antara “apa yang diyakini sebagai kebenaran” dengan “apa yang mengitari diri” memberi bentuk dan irama dari dinamika sosial, dan sebaliknya. Penelitian tersebut tidak mempersoalkan “benar” atau “salah” substansi dari “apa yang diyakini itu” karena hal itu berada dalam kajian teologi dan filsafat. Perhatian utamanya diletakkan pada bagaimana ajaran itu memantulkan dirinya dalam kesadaran dan dalam pola perilaku pribadi dan perilaku sosial.

Islam mengkonsepsikan kerja yang dilakukan individu, kelompok, komunitas ataupun masyarakat sebagai ibadah. Karenanya, aktifitas kerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan agama. Sehingga dapat digambarkan secara sosial bahwa setiap saat dan pada saat yang sama apapun tindakan manusia selalu terkait dengan hubungannya dengan Tuhan (*habluminallah*) dan juga hubungannya dengan sesama manusia (*hablumminnas*). Seluruh aktifitas dan prosesi hubungan vertikal transdental dan hubungan horizontal ini berada dalam kerangka ibadah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwa “Tidak

diciptakan Jin dan Manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT” (Adz Zariyat:56).

Ibadah secara etimologis diambil dari kata ‘*abada, ya’budu, ab’dan,fahuwa ‘aabidun, ‘abid* yang berarti hamba atau budak yang tak memiliki apa-apa. Dirinya milik tuannya, seluruh aktifitas hidupnya ditujukan untuk mendapatkan keridhaan tuannya dan menghindari murkanya. Terkait dengan *hablumminnas* dan *hablumminallah*, ibadah yang dimaksud terbedakan atas ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* yakni ibadah ritual yang telah diatur ketentuan syarat dan rukun pelaksanaannya. seperti shalat, bersuci (*wudhu*), puasa, membayar zakat, berqurban, melaksanakan haji ke mekkah. Ibadah ini mempersyaratkan dijalankan dengan berpedoman pada tiga prinsip yaitu 1) terdapat dalil yang memerintahkan, 2) tata cara pelaksanaan mengikuti yang dicontohkan Nabi SAW dan 3) azas ketaatan fisik dan hati.

Meskipun demikian, dalam ibadah *mahdhah* terdapat nilai-nilai yang diharapkan mampu diimplementasikan oleh individu pada saat lainnya ketika berlangsung relasi dengan sesama individu dalam bermasyarakat. Aktifitas ibadah non ritual (*ghairu mahdhah*) mencakup seluruh aktifitas individu yang berdimensi hubungan dengan Tuhan dan relasi sosial yang berorientasi dengan sesama manusia beserta ekologi lingkungan hidup lainnya. *Ghairu mahdhah* menerapkan prinsip fleksibilitas, rasional, dan mengedepankan orientasi kemanfaatan bagi pribadi dan lingkungan. Bekerja mencari nafkah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi diri sendiri dan keluarga termasuk dalam kelompok ibadah *ghairu mahdhah*.

Dalam kerangka *ghairu mahdhah*, terdapat aturan hubungan muamalat yang mengikat dan mengatur secara detil prinsip-prinsip interaksi antara individu dalam konteks sosial. Dalam keadaan tertentu, bila individu tak mampu melaksanakan kewajiban ibadah *mahdhah* maka dapat dilakukan dengan ibadah *ghairu mahdhah*. Mirip kompensasi dalam aspek hubungan horizontal, seperti membayar fidyah bagi yang tak mampu berpuasa. Namun, ketidakmampuan menjalankan kewajiban akibat hubungan muamalat, tak dapat digantikan atau dihilangkan selain dari yang telah diatur tersebut.

Tabel 2.1.

Ikhtisar Ibadah *Mahdhah* dan Kandungan Nilai Relasi Sosial

No.	Ibadah <i>mahdhah</i>	Ketentuan pelaksanaan	Nilai terkandung untuk relasi sosial (<i>value rasional religious doctrine</i>)
1	Shalat <i>fardhu</i> dan sunat	Diwajibkan sebanyak lima kali dalam sehari, dengan batas-batas waktu yang tak dapat diganti satu dengan lainnya . Dilaksanakan secara individual ataupun kolektif (berjemaah). Kolektif yang lebih diutamakan.	Komitmen, kepatuhan, ketaatan, kerjasama kolegal, loyal, jaringan relasi, disiplin, teratur, hidup bersih, konsentrasi dan fokus dalam tindakan.
No.	Ibadah <i>mahdhah</i>	Ketentuan pelaksanaan	Nilai terkandung untuk relasi sosial (<i>value rasional religious doctrine</i>)
2	Puasa	Dilaksanakan selama satu bulan penuh di bulan Ramadhan. Menahan diri untuk tidak makan, minum serta hubungan suami istri serta menahan emosi amarah sejak imsak hingga magrib.	Kemampuan pengendalian emosional, peduli/empati terhadap masyarakat rentan pangan dan saling meminta-memeri maaf.
3	Haji	Berlangsung di Mekkah (Arab Saudi) dan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Menggunakan pakaian khusus dan melakukan ritual-ritual tertentu sesuai rukun yang ditetapkan.	Kolegal, kesetaraan antar etnis dan status sosial, perdamaian, mobilitas (hijrah), pergerakan fisik, daya tahan mental dan kesediaan berkorban dan memaafkan. Dorongan untuk kaya.
4	Zakat fitrah dan zakat <i>maal</i>	Menyerahkan sejumlah beras (makanan pokok) kepada panitia pengelola (<i>'amil</i>), yang akan diteruskan kepada delapan kelompok yang telah ditetapkan. Menyerahkan 2,5 persen dari asset/ harta untuk fakir miskin dan kelompok lain yang telah ditetapkan.	Kolegal <i>sharing</i> , peduli dan kejujuran. Dorongan untuk kaya.

Islam menekankan bahwa setiap tindakan individu selalu terkait dengan nilai-nilai moral dan etika. Demikian juga dengan tindakan ekonomi tidak didasarkan pada pertimbangan mencari keuntungan semata, akan tetapi di dalamnya termuat juga misi untuk menjaga keharmonisan hubungan individu

dengan Tuhan (*hablumminallah*) dan keharmonisan dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Keharmonisan tersebut lebih luas lagi adalah dalam kerangka menjaga keseimbangan antara nilai moral dan rasionalitas, kepentingan individu dan kolektifitas serta kepentingan dunia dan kepentingan akhirat.

2.1.3.3. Konsepsi Kerja dalam Pranata Sosial Adat Budaya Pidie

Dalam upaya memahami struktur sosial, kultur merupakan bagian yang penting. Berkaitan dengan itu, Selo Soemardjan dan Soeleman Sumardi pada “Setangkai Bunga Sosiologi” dalam Taneko (1984) menyebutkan bahwa kultur bukan bentuk perilaku konkrit, namun di dalamnya terdapat standar normatif untuk berperilaku. Ia merupakan pandangan hidup (*way of life*) yang dipelajari dan harus diikuti oleh warga masyarakat. Kultur merupakan hasil sintesa dari karya, rasa dan cipta.

Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan memenuhi kebutuhan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan manusia dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Rasa mewujudkan segala nilai kemasyarakatan yang diperlukan untuk mengatur masalah kehidupan masyarakat dalam arti luas. Cipta menunjukkan kemampuan berpikir dari individu dalam masyarakat yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Unsur rasa dan cipta menghasilkan nilai-nilai sosial dalam seperangkat kultur rohaniah (*immateril culture*). Karenanya, kultur lebih merupakan *blue print of behavior* yang memberikan pedoman-pedoman tentang keyakinan relatif tentang apa yang harus dilakukan, boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan dalam kehidupan sosial.

SC Dube dalam “Kritik Asia Terhadap Pembangunan” Atal dan Peiris (1980) menyebutkan nilai memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat. Nilai memiliki kekuatan sebagai preferensi dalam tindakan masyarakat. Nilai-nilai memberikan kontribusi yang berarti terhadap pembentukan pandangan dunia (*world view*) mereka. Nilai-nilai memunculkan perasaan identitas kepada masyarakat dan menentukan seperangkat tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, nilai-nilai merupakan komponen yang penting dari orientasi–orientasi kognitif dan evaluatif bagi suatu masyarakat.

Sejalan dengan itu, Sosrodihardjo (1986) setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai sosial, yang mengatur tata atau ketertiban di dalam masyarakat tersebut. Termasuk di dalam nilai-nilai sosial ini tata susila dan adat kebiasaan. Nilai-nilai sosial ini merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain.

Dengan demikian, nilai-nilai mengandung standar normatif untuk berperilaku bagi individu di dalam kehidupan sosialnya. Meskipun demikian, Taneko (1984) menyebutkan bahwa sulit untuk mengetahui secara pasti dan tegas atas nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Kluckhohn sebagaimana dikutip Kuntjaraningrat (1974) mensesderhanakan kerumitan ini dengan pernyataannya bahwa semua nilai kultural dalam semua kebudayaan pada dasarnya menyangkut lima masalah pokok yaitu nilai mengenai hakekat kehidupan manusia, nilai mengenai hakekat dari karya manusia, nilai mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, nilai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitar dan nilai mengenai hakekat dari manusia dengan sesamanya.

Secara empirik, nilai-nilai budaya masyarakat Aceh tercermin pada keberadaan lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai wahana kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan kehidupan sosial sehari-hari, seperti pemerintahan, keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Setelah mengalami berbagai perlakuan dalam beberapa dekade mengakibatkan lembaga ini tidak mendapat tempat formal dalam struktur pemerintahan desa, sehingga kebijakan pemerintah memberi penguatan sebagaimana termuat dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Lembaga adat yang dimaksudkan adalah diantaranya terdapat di gampong yaitu lembaga adat yang sifatnya profesional. Lembaga adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di Aceh adalah: *Tuha Peut, Imum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, Syahbanda* dan untuk tingkat Kemukiman terdapat *Imuem Mukim, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Syik, Keujruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria peukan.*

Lembaga-lembaga itulah yang melaksanakan pembagian tugas dalam setiap *gampong*. *Panglima laot* untuk membantu *keuchik* di bidang kelautan, *Peutua Suneubok* untuk pimpinan urusan kehutanan-perkebunan dan perladangan, *Keujreun Blang* untuk membantu *keuchik* dalam urusan persawahan dan distribusi pengairan tanaman, serta *haria pekan* untuk membantu *keuchik* di bidang ketertiban, keamanan, kebersihan, serta mengutip retribusi pasar *gampong*. *Panglima laot*, dalam hal ini juga dibantu *syahbanda*, yakni orang yang memimpin dan mengatur perahu, lalu lintas kapal/perahu¹.

Di *gampong* terdapat lembaga adat yang membantu pemerintahan *gampong*, seperti bidang administrasi dibantu *waki keuchik* atau disebut *keurani*, dalam bidang pendidikan dibantu *Inoeng*, *Cut*, *Leubè*, *Leubè*, dalam bidang pengambilan keputusan ada *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan*, dalam bidang mata pencaharian ada *Keujreun Blang*, *Peutua Seuneubok*, *Panglima Laot*, *Pawang Gléé*, dalam bidang perkawinan ada *seulangké*, *peunganjo*, dalam bidang kesehatan ada *dukon*, *ma blién*, dalam bidang hukum ada lembaga *weuk waséé*, *lembaga suloh*, lembaga hak *langgéh*, dalam bidang perekonomian ada lembaga *mugè*, *meusyarikat*, *gala*, *mawaih*, *meudua laba*, dan lain-lain.

Di samping yang telah disebutkan, Alfian (1999) menyebutkan bahwa dalam masyarakat Aceh juga dikenal adanya beberapa lembaga. Misalnya, lembaga ekonomi dalam masyarakat *gampong*, sebagai sumber keuangan untuk biaya pemeliharaan *Meunasah* dan membiayai sebagian honor *Imeum Meunasah*, digunakan *umoeng meusara*. *Umoeng musara* itu sebagai tanah yang diwakafkan untuk kemaslahatan *gampong* oleh orang tertentu. Hasil penggarapan tanah inilah yang digunakan untuk dinikmati.

Sejalan dengan itu, menyangkut dengan aktifitas perekonomian masyarakat yang secara sosiologis dilihat sebagai wujud konkrit kesadaran individu untuk bertindak memenuhi rangsangan yang diterima baik datang dari dirinya sendiri atau akibat interaksi orang lain. Tindakan-tindakan tersebut tidak terlepas dari seperangkat sistem nilai yang terpelihara didalam komunitas

¹ Lihat Pasal 1 ayat (13), (14), (15), (16), dan ayat (17) Perda Nomor 7 Tahun 2000.

masyarakat dimana ia berada. Di kalangan masyarakat Pidie terdapat semboyan yang mencerminkan basis nilai yang mereka anut. Ungkapan lokal seperti “*Adat ngeun hukom han jeut cree. Lage’ zat ngeun sifeut*”, menggambarkan bahwa adat tradisi dan kebiasaan masyarakat Pidie tak terpisahkan dari nilai-nilai agama yang mereka anut

Nilai-nilai sosial hanya mungkin mencapai tujuannya apabila terdapat wadah tempat menegakkannya. Tanpa wadah yang jelas, maka nilai-nilai sosial tidak mempunyai daya pengatur. Wadah yang dimaksud disini adalah struktur atau susunan masyarakat. Taneko (1984) memberi batasan pengertian struktur sosial sebagai jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah, norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan sosial.

Sosrodihardjo (1986) menyebutkan fungsi struktur masyarakat sebagai penegak disiplin dalam kehidupan sosial. Karenanya, di dalam struktur masyarakat ditegaskan adanya perbedaan antara wewenang, pengaruh dan kekuasaan suatu lapisan masyarakat. Penggolongan masyarakat pada dasarnya adalah dampak dari pembagian masyarakat di dalam perbagai lapisan menurut pengaruh dan kekuasaan golongan itu. Sehingga struktur masyarakat mencerminkan perbedaan antara kekuasaan dan pengaruh dari warga masyarakat yang bersangkutan. Siapa yang menduduki tempat yang tinggi di dalam struktur masyarakat maka dia mempunyai pengaruh dan kekuasaan yang besar.

Disamping itu, ukuran kekuasaan dan pengaruh berbeda dari zaman yang satu ke zaman yang lain. Pada waktu masyarakat terdiri dari kasta-kasta, maka ukuran kekuasaan dan pengaruh diukur dan ditentukan mula-mula oleh pemilikan tanah dan tenaga manusia. Setelah semua itu kokoh, maka keturunan memegang peranan. Sejalan dengan perkembangan, kaum bangsawan dan raja harus mulai memperhitungkan kehadiran kaum pedagang yang memiliki uang dan jaringan luas.

Nilai-nilai sosial gotong royong lebih merupakan simbol dari pertukaran jasa yang sangat mempengaruhi ikatan saling ketergantungan antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam kelompok masyarakat tradisional. Keadaan

ini mempersyaratkan antar individu harus saling berhubungan erat, sehingga pengabaian terhadap sistem penilaian sosial dapat menjadi sumber konflik. Dalam kelompok masyarakat ini, penilaian terhadap seorang individu lebih dilihat pada sifat-sifatnya yang sangat subyektif. Hal ini mudah difahami, karena semua disangkutkan kepada subyek.

Sebaliknya pada kelompok masyarakat moderen, antar individu dapat saling berhubungan tanpa perlu untuk saling mengenal secara dekat. Bahkan dalam sebuah hubungan, keperluan dapat dicapai dengan tidak saling mengenal bahkan tanpa perlu melihat wajah. Sehingga saling ketergantungan semakin menipis dan selanjutnya nilai-nilai sosial yang mengatur individu yang satu dengan individu yang lain tidak terasa fungsinya seperti yang terjadi dalam masyarakat tradisional.

Dalam masyarakat moderen, Sosrodihardjo (1986) menyebutkan penilaian terhadap seorang individu lebih sering didasarkan pada materi yang tampak atau kepada obyek yang dimiliki. Karenanya dalam masyarakat moderen, pengaruh dan kekuasaan sangat labil, mengingat uang dan kekayaan dapat berubah kepemilikannya dalam waktu singkat. Keadaan ini menyebabkan individu yang berada dalam struktur masyarakat moderen lebih reaktif dalam menjaga keberadaannya agar tetap memiliki obyek yang membuat ia dapat bertahan dalam struktur dimaksud.

Masyarakat Pidie melangsungkan kehidupan sosialnya pada satuan komunitas gampong. Secara formal, gampong disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung berada di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Pemerintah Gampong adalah *Keuchik* dan *Imuem Meunasah* berserta Perangkat Gampong (Qanun Nomor 5 Tahun 2003).

Istilah Gampong disebutkan Hasjmy (1995) terdapat dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi² yaitu semacam Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh Darussalam yang menegaskan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam tersusun dari *Gampong, Mukim, Nanggroe, Sagoe* dan Kerajaan. Kutipan dengan susunan bahasa aslinya adalah:

“ pada tiap-tiap satu gampong didirikan meunasah, diangkat seorang keuchik dan seorang wakilnya dan empat orang tuha, yaitu Tuha Peut dan satu orang Imam Rawatib. Maka pekerjaan mereka itu yang tersebut yaitu mengerjakan amar makruf dan mencegah munkar, dan mengurus hal rakyat dengan adil, apa-apa yang telah makruf dan uruf pada tempatnya masing-masing atas pekerjaan dan kebajikan”.

Sejalan dengan itu, Zainuddin (1961) menyebutkan *gampong* sebagai kesatuan wilayah adat terkecil di Aceh yang terdiri dari beberapa *jurong, tumpok* dan *ujong*. *Jurong* merupakan sebutan bagian-bagian gampong yang satu sama lain dipisahkan oleh *jurong* atau lorong. Istilah *tumpok* digunakan untuk menyebutkan bagian *gampong* yang berupa kumpulan rumah-rumah penduduk membentuk koloni yang agak terpisah dari kampung induk. *Ujong* merupakan sebutan untuk bagian gampong yang terletak disisi paling ujung dari sebuah *gampong*. Bahkan ada yang berpendapat bahwa gampongpun adalah sebuah tumpok.

Sebutan *gampong* disebutkan Hurgronje (1985) sebagai satuan teritorial terkecil. Sebuah *gampong* dilingkari pagar, dihubungkan oleh satu pintu gapura dengan jalan raya (*rèt* atau *rót*), suatu jalan yang melewati *blang* atau *lampoih* serta *tamah* yang menuju ke *gampong* lain. Dulu setiap *gampong* mencakup satu *kawom* (satuan-satuan baik dalam artian teritorial maupun kesukuan) atau sub-*kawom* yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan.

Dalam arti fisik, Djuned (2002) mengatakan *gampong* merupakan wilayah yang digunakan untuk tempat hunian atau *rumoh* (rumah), *blang* (persawahan),

² Kanun Al Asyi ditemukan dalam naskah tua yang berasal dari Said Abdullah Di Meulek yang menjadi Wazir Rama Setia Katibul Muluk dalam masa pemerintahan Sultan Alaidin Mahmud Syah (1870-1874M)

lampoh atau *seunebok* (perkebunan), *padang* (tanah terbuka) dan *gle rimba* (hutan). Dalam arti hukum, *gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.

Alfian (1987) menyebutkan bahwa dari segi penghuninya, struktur warga dari sebuah *gampong* di Aceh terdiri dari tiga unsur yaitu 1) unsur pimpinan *gampong* yang dipimpin oleh *keuchik* sebagai pemegang adat dan dibantu *imuem meunasah* sebagai penegak *hukom* (hukum agama); 2) unsur *ureung tuha* ; 3) unsur *ureung le* atau *ureung ramee* (orang banyak). *Keuchik* diibaratkan sebagai ayah dari *ureung gampong* dan *imuem meunasah* diibaratkan sebagai ibu atau *ma*. Unsur *ureung tuha gampong* disebut juga *ureng tuha peut*.

Menyangkut dengan pola rumah pada masing-masing *gampong*, Sanusi (2005) mengatakan bahwa pola pemukiman tempat tinggal ditandai dengan perumahan yang padat dan terpusat dengan jarak satu sama lain saling berdekatan. Arah bangunan rumah seragam yang kesemuanya menghadap kiblat. Pada awalnya bentuk bangunan rumah di *gampong* adalah rumah panggung yang dikenal dengan sebutan *rumoh santeut* dan selanjutnya ditengah-tengah *gampong* terdapat *meunasah*.

Penerapan norma-norma adat dalam penggunaan ruang dari rumah Aceh atau dalam interaksi antar warganya, serta adanya *meunasah* di setiap *gampong* merupakan pertanda bahwa kehidupan masyarakat *gampong* berbasis kepada adat dan agama. Adanya *meunasah* mempertegas ciri khas perkampungan di Aceh yang sekaligus *meunasah* sendiri menjadi sebuah pertanda adanya sebuah *gampong* di Aceh. Di setiap *gampong* pasti memiliki *meunasah*, bahkan ada *gampong* yang memiliki lebih dari satu *meunasah*. Hal ini menunjukkan bahwa awal mula pembentukan *gampong* dimulai dari adanya *meunasah*. Tanpa *meunasah* sebuah pemukiman belum tentu dapat dikatakan sebagai sebuah *gampong*. *Meunasah* merupakan pusat kegiatan sosial atau *adat* dan juga kegiatan keagamaan atau *hukom*³, sehingga dikatakan bahwa *meunasah* berfungsi sebagai pusat pemerintahan *gampong*. Atas dasar itu, di pantai timur Aceh istilah *meunasah* sering digunakan untuk menggantikan sebutan *gampong*.

³ Hukum yang dimaksudkan adalah hukum syariat Islam bukan hukum negara

Meunasah dalam Sanusi (2005) diartikan sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat menginap bagi kaum pria yang sudah *aqil baligh* serta pria *gampong* lain yang singgah di *gampong* itu. Demikian juga pemikiran Ismail (2002) yang menyebutkan *meunasah* dan mesjid di Kemukiman merupakan simbol identitas keacehan yang telah berkontribusi fungsinya membangun pola dasar SDM masyarakat menjadi satu kekuatan semangat yang monumental, historis, herois dan sakralis. Fungsi lembaga ini memiliki muatan nilai-nilai aspiratif, energis, Islamis menjadi sumber inspiratif, semangat masyarakat membangun penegakkan keadilan dan kemakmuran serta menentang kezaliman dan penjajahan. Fungsi-fungsi *meunasah* antara lain yaitu tempat ibadah shalat jamaah, dakwah, diskusi, musyawarah mufakat, penyelesaian sengketa, pengembangan kreasi, posko pembinaan generasi muda, tempat olahraga dan pusat pemerintahan *gampong*. *Meunasah* merupakan pusat pengendali proses interaksi sosial masyarakat, karena saling membutuhkan sesama manusia dalam komunitas *gampong* atau antar *gampong*.

Gampong dan *meunasah*, adakalanya dipersepsikan dalam pemahaman terpisah. Ada yang memandang bahwa *meunasah* dan *gampong* sebagai wilayah atau teritorial. Ada pula yang memandang *meunasah* sebagai tempat ibadah saja. Dalam hal ini, *meunasah* adalah tempat aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial dijalankan dalam sebuah *gampong*⁴. Jika saja *meunasah* sebagai lembaga, dalam arti tempat beraktivitas keagamaan dan sosial, maka lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang cukup besar peranan dalam membantu pelaksanaan pemerintahan. Mengingat lembaga ini sangat dekat kultur dan tata kehidupan masyarakat adat.

Gampong dipimpin oleh *keuchik* –pimpinan yang menurun wewenang *uleebalang* di wilayah *gampong* itu. Dalam sejarahnya, jabatan itu turun-temurun. *Keuchik* didasarkan pada kenyataan hakiki bahwa dialah yang membela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan *uleebalang* maupun *gampong* lain. *Keuchik* menguasai satu *gampong*, namun ada juga yang mengepalai dua hingga tiga *gampong*.

⁴ Tulisan Sulaiman Tripa dimuat dalam harian *Serambi Indonesia*, terbit tanggal 18 Juli 2002

Berkenaan dengan ini, Syarif (2005) menyebutkan bahwa *gampong* di Aceh ditandai dengan kepemimpinan bersama untuk mengurus warganya di bidang adat dan hukum. Adat diurus oleh *keuchik* dan *hukom* diurus oleh *imuem meunasah*. Kedudukan *keuchik* dan *imuem meunasah* dalam pemerintahan *gampong* diibaratkan seperti peran ayah dan peran ibu dalam sebuah rumah tangga. Dalam hal ini segala urusan adat dan tanggung jawab atas setiap keputusan *gampong* terhadap warganya merupakan tanggung jawab *keuchik*. *Keuchik* memimpin segala urusan yang berhubungan dengan adat dan *meunasah* mengurus hal-hal yang berhubungan dengan hukum.

Dalam sistem Pemerintahan Adat Aceh, Djuned (2002) menyebutkan bahwa pemerintahan *gampong* dilaksanakan oleh tiga unsur pimpinan yaitu unsur pemerintahan, unsur agama dan unsur perwakilan. Unsur perwakilan adalah *tuha peut* yang mendampingi *keuchik* dalam setiap menetapkan suatu keputusan sehingga memiliki nilai kekuatan dan wibawa bagi masyarakat *gampong*. Sistem kedaulatan dan demokrasi yang berlangsung di tingkat *gampong*, benar-benar dilaksanakan. Dalam *gampong* dikenal dengan *mupakat* yakni segala persoalan diselesaikan secara pertukaran pendapat secara beramai-ramai. Jadi segala persoalan *gampong*, juga diumumkan secara *mupakat* pula.

2.1.4. Kajian *New Institutionalism* terhadap Tindakan Kerja terkait ketertautannya dengan Nilai Agama dan Nilai Adat pada kehidupan ekonomi masyarakat

Melalui teori *new institutionalism* atau “kelembagaan (institusionalisme) baru” Nee (2005) berusaha menjelaskan bagaimana proses bekerjanya nilai-nilai adat kebiasaan, nilai kepercayaan (agama), norma-norma dan insitusi-institusi baik formal maupun informal di dalam proses pengembangan ekonomi masyarakat. Ia berusaha mempertautkan antara hubungan-hubungan sosial dengan institusi pada perilaku ekonomi.

Pemikiran Nee (2005) relevan untuk menganalisis keterkaitan antara tindakan kerja dengan nilai agama dan nilai adat, khususnya dalam konteks wujud gejala kehidupan ekonomi masyarakat Pidie (kemakmuran atau kemiskinan).

Pemikiran Nee tersebut, dirasa memenuhi hal-hal terkait dengan gejala pokok yang berkelindan di dalam persoalan kaitan tindakan kerja, nilai agama serta nilai adat di dalam konteks keberhasilan atau kegagalan kehidupan ekonomi masyarakat. Hal tersebut bertolak dari pemikiran bahwa Nee melihat gejala keberhasilan atau kegagalan suatu kehidupan ekonomi masyarakat secara utuh, dimana ia memperhatikan keberlangsungan mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada setiap level kausal yang terdiri dari level mikro (individu), meso (kelompok atau organisasi) dan makro (*policy environment*).

Dikemukakan Nee, bahwa keberhasilan akan tercapai dalam wujud terjadinya insentif keberhasilan ekonomi bila terjadi harmonisasi hubungan dari level makro (*policy environment*) kepada institusi informal atau organisasi di level meso dan seterusnya hingga ke level mikro (individu). Sebaliknya, kegagalan dapat terjadi bila terjadi kerusakan salah satu mekanisme integrasi atau diistilahkan *decoupling*. Penjelasan yang dikemukakan Nee tersebut, pada dasarnya berkisar pada penjelasan bagaimana institusi formal berinteraksi dengan *social network* dan norma-norma sosial yang sifatnya informal dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Nee memandang penting lingkungan institusi dan budaya dalam membentuk tingkah laku ekonomi masyarakat. Sehingga ditegaskannya bahwa perlu perhatian pada urgensi antara hubungan sosial dengan institusi dalam studi perilaku ekonomi dengan fokus pada mekanisme yang mengatur bagaimana kombinasi formal dan informal rules memfasilitasi dan mengatur perilaku ekonomi serta hubungan-hubungan antar elemen pada tingkatan kausal.

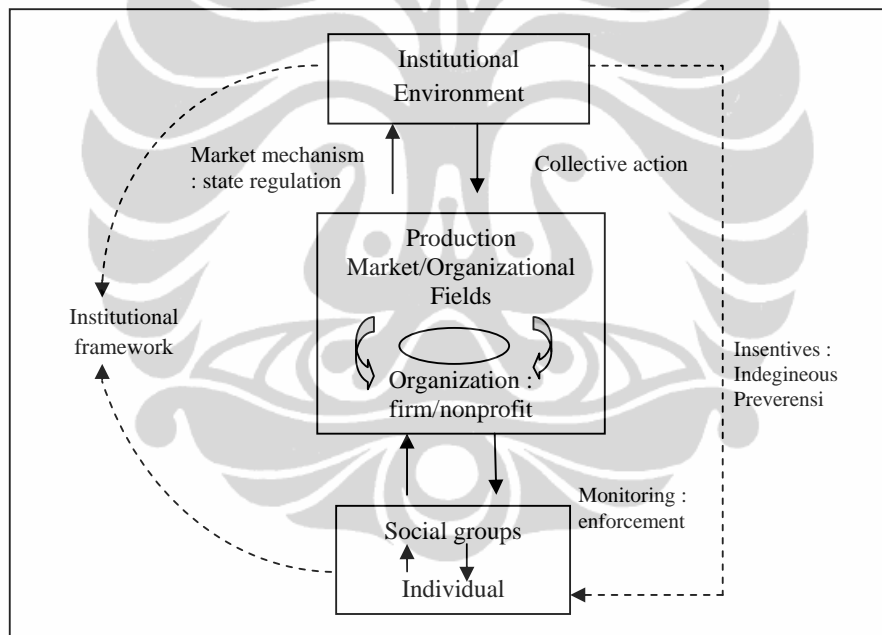
Secara konkrit yang dimaksudkan Nee (2005) dengan *insitutional environment* adalah kebijakan-kebijakan formal berupa peraturan-peraturan ataupun gagasan baru yang dijalankan secara dinamis sehingga menjadi kerangka dalam mendorong dan mengatur tindakan ekonomi aktor atau kelompok. Sementara itu, idealnya tindakan ekonomi aktor berbasis pada relasi informal yang didalamnya terkandung nilai-nilai kepercayaan bersama (*shared belief*) baik agama maupun adat, norma-norma dan aturan-aturan informal yang berfungsi mengarahkan tindakan kerja aktor dalam mewujudkan kepentingan ekonominya.

Proses dialiektika, pertalian atau pertautan antara *insitutional environment* dengan relasi informal yang mengikat tindakan-tindakan aktor dalam mencapai kepentingan-kepentingan ekonominya merupakan sebuah *insitutional framework* atau kerangka institusional.

Konsep kunci pemikiran Nee (2005), secara sederhana menegaskan adanya mekanisme sosial dimana di dalamnya berlangsung hubungan ketertautan dan berkelindan antara unsur formal (*state rules*) dan unsur informal seperti nilai-nilai agama (*share belief*), *social network* dan *social embeddedness* menurut konteks sosial budaya tertentu, yang kemudian menjadi basis bagi individu melakukan tindakan sosial guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonominya. Konsep pemikiran *new institutionalism* menelaah bagaimana institusi berperan penting dalam menstrukturisasi transaksi-transaksi ekonomi sosial serta menelaah bagaimana menjelaskan peran mendasar dari kepercayaan agama, norma adat budaya, jaringan sosial dan kepercayaan pada lembaga atau institusi dalam persoalan-persoalan ekonomi moderen. Pada dasarnya apa yang disampaikan Nee (2005) dalam *New Institutionalism*, adalah gabungan dari pemikiran teori pilihan rasional yang dikemukakan Coleman, teori ekonomi institusional dan teori kelekatan sosial (*embeddedness theory*) yang digagas Granovetter.

Dalam *new institutionalism*, Victor Nee tidak hanya membahas sosiologi ekonomi namun juga ekonomi institusional baru. Pemikirannya berkontribusi dalam menjelaskan perilaku ekonomi yang pada hubungan individu di level mikro dengan kelompok sosial di level meso, yang berinteraksi dengan peraturan-peraturan formal di level makro. Pada konteks ini, penekanannya adalah terjadinya mekanisme sosial dimana aspek formal dan informal saling berhubungan dan berintegrasi sehingga menjadi dasar bagi individu dalam bertindak mencapai kepentingan ekonominya. Nee melihat titik lemah dari pemikiran Granovetter bahwa ia hanya menjelaskan *proximate causes* tanpa menyentuh *large macro causes*. Disamping itu, Granovetter tidak dapat menjelaskan mengapa aktor terlepas atau terpisah (*decouple*) dari hubungan sosial untuk mengejar kepentingan ekonomi.

Secara model dapat diketahui bahwa Nee memandang mekanisme institusional memiliki pengaruh yang lebih besar dikarenakan ia menentukan besaran insentif. Selanjutnya, nilai-nilai dan norma-norma yang ada di level bawah akan berinteraksi dengan *formal rules* dalam mendorong dan mengatur tindakan individu dalam merealisasikan kepentingannya. Digambarkan bahwa terdapat tiga level, level atas (macro) adalah *insitutional environment* yang terdapat kebijakan atau regulasi formal yang digulirkan pemerintah. Termasuk di dalamnya langkah penataan hak-hak kepemilikan, pasar dan perusahaan. Model interaksi tiga level tersebut sebagaimana tergambar pada skema di bawah ini :



Gambar 2.1. Skema model Interaksi antar level regulasi formal (macro), organisasi (messo) dan individu (micro) menurut Victor Nee (2005)

Prinsip-prinsip yang terdapat Pemikiran Nee (2005) relevan dengan permasalahan penelitian ini, dimana hal yang utama yang diperhatikan adalah tindakan kerja sebagai tindakan ekonomi dalam kehidupan masyarakat Pidie. Dimana tindakan tersebut pada tersebut berbasis pada nilai-nilai yang dianut

masyarakat, baik itu nilai agama ataupun nilai adat yang pada tataran konkrit dapat dilihat pada struktur sosial masyarakat Pidie itu sendiri. Dengan kata lain, salah satu wujud implemmentasi nilai-nilai anutan direpresentasikan pada kehadiran institusi-institusi sosial, dimana institusi itu menjadi salah satu elemen struktur sosial masyarakat. Institusi-institusi lokal semacam *meunasah* dengan *imuem meunasah* mencerminkan tegaknya nilai Islam pada struktur sosial masyarakat Pidie di level *gampong*. Kuatnya nilai adat yang dipegang masyarakat tercermin pada eksisnya insitutusi lokal lain semacam *keuchik*, *kejruen blang*, *peutua seunebok*, *panglima laot*, *haria pekan* dan yang lainnya.

Sementara itu, keberadaan insituti lokal dalam masyarakat *gampong* itu bertahan ataupun kemudian kembali berjalan dalam dinamika regulasi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah atas model-model pemerintahan. Perubahan ini setidaknya menghilangkan saat faham sentralistik uniformitas menguat dan menghadirkan kembali saat desentralisasi lokalistik yang menguat. Meskipun institusi lokal telah eksis kembali namun bagaimana integrasi serta relasinya dalam mekanisme sosial antar level dapat dikaji dengan model ini, terutama dengan memperhatikan fakta empirik fenomena kehidupan ekonomi masyarakat Pidie saat ini.

Untuk lebih memahami pemikiran Nee (2005) dalam teori *new institutionalism*, berikut ikhtisar prinsip-prinsip dasar yang dipakai yaitu :

Tabel 2.2
Ikhtisar Prinsip Dasar Pemikiran Nee (2005)

Elemen	Deskripsi
Asumsi tindakan	Tindakan ekonomi rasionalitas, terikat pada konteks masyarakat; aktor didorong oleh interest yang dibentuk oleh beliefs (keyakinan agama), norma dan <i>social network</i>
Aktor	Organisasi adalah aktor, individu mengartikulasikan interestnya di dalam organisasi dan network
Defenisi Institusi	Sistem saling terhubung antara institusi formal dengan institusi informal. Sistem ini memfasilitasi, mendorong dan mengatur tindakan ekonomi
Mekanisme level makro	Kebijakan, regulasi peraturan yang diatur pemerintah seperti mendorong tindakan kolektif dan mengatur pasar
Mekanisme level mikro	Tindakan individu dalam network dan organisasi; Tindakan ini didorong oleh kepentingan individu.

Pemikiran Nee tentang tindakan rasional merupakan pengembangan dari konsep tindakan Weberian yang disampaikan Coleman (1988) yang menyampaikan “setiap aktor memiliki kontrol terhadap sumber-sumber tertentu dan mempunyai kepentingan terhadap sumber-sumber tertentu dan kejadian”. Butir-butir penting dalam pernyataan tersebut adalah 1) bahwa inti dari tindakan rasional adalah aktor, dimana aktor atau agen dimaksud adalah individu-individu yang memiliki pikiran atau rasio, perasaan dan tradisi; 2) dalam kehidupan masyarakat tersedia sumber-sumber, namun individu hanya dapat menguasai sumber tertentu. Penguasaan ini dimungkinkan dalam bentuk kepemilikan dan pemanfaatannya atau hanya sebatas pemanfaatannya saja; 3) setiap aktor mempunyai kepentingan terhadap sumber-sumber tersebut; 4) salah satu sumber yang disediakan atau tersedia akan dijadikan capital oleh aktor. Dimana sumber tersebut dikuasai dan dijadikan pemenuhan kepentingannya.

Coleman menekankan bahwa individu memiliki kekuatan dan kebebasan dalam dirinya untuk bertindak, sehingga ia tidak bersifat pasif untuk didikte oleh struktur sosial. Coleman juga mengkritik pemikiran ekonomi yang mengedepankan paham utilitarian, sehingga seakan aktor bertindak bebas dan hanya memikirkan kepentingannya saja. Argumentasinya berdasar pada pemahaman bahwa institusi kapitalisme itu sendiri pada awalnya sarat dengan norma, peraturan dan kewajiban.

Lebih lanjut pemikiran Granovetter (2005) yang diambil Nee adalah gagasannya tentang manfaat ekonomis yang muncul akibat pengaruh struktur sosial yang dibentuk oleh jaringan sosial (*network*), terutama halnya terkait dengan kualitas informasi. Pemikiran ini dilandasi empat prinsip utama yaitu : 1) *norm and densitas network*; 2) *the strenght and weak ties* berupa manfaat ekonomi yang cenderung diperoleh dari jalinan jaringan ikatan lemah; 3) *the important of structural holes* yang berkontribusi menjembatani relasi individu dengan pihak luar; 4) *the interpretation of economic and non-economic action*, adanya tindakan-tindakan non ekonomi yang dilakukan individu, yang ternyata memberi kemanfaatan bagi tindakan ekonominya.

Ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi ini diakibatkan oleh adanya jaringan sosial. Dalam hal yang sama, ketertambatan kegiatan ekonomi ke dalam kegiatan-kegiatan individu dalam menjalankan kehidupan terkait agama, budaya dan politik. Granovetter menguraikan bagaimana jaringan kerja dan jaringan sosial bekerja mendinamisasi distribusi tenaga kerja, menentukan besaran harga barang, meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan menjadi sumber inovasi dan adopsi teknologi. Semua hal tersebut menguatkan argumentasinya bahwa terjadi interpretasi kegiatan sosial dalam tindakan ekonomi.

2.2. Telaah Hasil Studi Terdahulu

2.2.1. Studi terkait Dinamika Struktur Sosial dan Sosio-kultural Masyarakat Aceh

Studi ini dianggap fenomenal, lengkap dan mendalam menguraikan kehidupan masyarakat Aceh adalah studi yang dilakukan Snouck Hurgronje (1985). Studi atas kondisi kehidupan sosial masyarakat Aceh abad ke 19 dituangkan dalam bukunya “Aceh di mata kolonialis” (*The Achehnesse*). Meskipun kental dengan kepentingan kolonial Hindia Belanda dalam agenda penelitiannya, namun hasil kajiannya tetap relevan untuk melihat kondisi masyarakat Aceh saat itu. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa hal yang paling substansi dalam menggerakkan kehidupan masyarakat Aceh adalah agama. Hal tersebut tercermin dari hasil studi Hurgronje yang mengangkat tesis pola perbuatan keagamaan masyarakat Islam Aceh yang dikategorikan dalam tiga aspek yaitu 1) bidang agama murni; 2) bidang sosial kemasyarakatan (*muamalah*); dan 3) bidang politik.

Terkait dengan kebijakan politik kolonial, Hurgronje memberikan rekomendasi kebijakan dengan alternatif berbeda, yaitu 1) pemerintah harus memberikan kebebasan penuh kepada penganut Islam, bahkan jika perlu harus dibantu yakni bagi aktifitas masyarakat yang diidentifikasi hanya bertindak untuk menjankan ritual kegiatan agama secara murni; 2) pemerintah harus menghormati institusi-institusi lokal dengan tidak menghalangi kelangsungan kegiatan

masyarakat yang bertindak di dalamnya dengan tujuan-tujuan menjalankan hubungan sosial kemasyarakatan (*muamalah*); 3) Pemerintah disarankan bertindak tegas untuk menghalangi dan menghilangkan tindakan masyarakat yang bertujuan politik.

Rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Hindia Belanda yang diberikan Snouck Hurgronje, tampaknya didasarkan pada asumsinya tentang kondisi *real* masyarakat Islam di Hindia Belanda waktu itu yang diamatinya bahwa masyarakat memperhatikan persoalan Islam sebagai agama dalam bentuknya yang sempit seperti perkawinan, hubungan keluarga, dan peraturan yang berhubungan dengan waris. Sedangkan aspek politik dan sosial kurang mendapat perhatian.

Snouck Hurgronje (1985) yakin bahwa masyarakat Islam akan berbahaya bagi pemerintahan kolonial jika kebebasan dan kemerdekaan beragama diganggu. Semakin dilarang untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan *ubudiyah*, mereka semakin fanatik untuk mengerjakannya. Bahaya lebih besar akan mengancam pemerintah, bila lantaran terganggu kemerdekaan mengerjakan agama masyarakat Islam terus mengasingkan diri dari masyarakat biasa, lalu mendirikan perkumpulan-perkumpulan tarekat yang mengajarkan perang sabil yang mungkin tidak dapat diketahui secara cepat.

Semangat keislaman juga bisa bangkit, jika masyarakat Islam merasa terganggu dalam urusan *muamalat*, seperti urusan perkawinan, warisan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku, dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda. Jika urusan *ubudiyah* dan *muamalat* sudah diatur, maka yang perlu diawasi adalah hubungan umat Islam dengan dunia luar.

Paparan diatas menggambarkan bahwa Snouck Hurgronje (1985) membuat kategorisasi yang tajam terhadap pola perbuatan keagamaan masyarakat di Aceh. Ia menganggap ketiga aspek tersebut terpisah antara satu dengan lainnya, bukan sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Fenomena tersebut bila dikaitkan dengan perkembangan masyarakat Aceh terkini adalah masih terpisahnya antara nilai-nilai atau etika kerja sebagaimana diajarkan dalam agama Islam dengan perilaku ekonomi masyarakat.

Studi Lombard (2007) fokus pada situasi Aceh abad ke 17. Hasil penelitian yang telah dituangkan ke dalam buku “Sultan Iskandar Muda 1607 -1036” ini memberi koreksi atas beberapa informasi masyarakat Aceh yang disampaikan Hurgronje. Studi Lombard memberikan gambaran dominasi kekuasaan Sultan Aceh atas beberapa pelabuhan penting di Sumatera dan semenanjung Malaka. Hal ini terkait erat dengan kemampuan produksi dan monopoli perdagangan lada dengan pedagang-pedagang asing. Lada dikenal sebagai komoditas primadona dalam perdagangan internasional pada saat itu.

Studi lainnya yang dilakukan Sufi (1995) lebih relevan dengan studi ini, dimana ia mempelajari gejala etos kerja pada masyarakat Aceh. Dengan menggunakan teori Kluckhohn (1961), penelitian yang berlokasi di desa Lam Kawe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar menghasilkan beberapa temuan yakni (1) etos kerja masyarakat Aceh tidak terlepas dari konsepsi etos kerja Islam. Namun, masyarakat Aceh belum memiliki etos kerja sebagaimana tersebut dalam ajaran Islam; (2) Nilai-nilai lokal tradisional Aceh terpelihara dan mengandung dorongan untuk bekerja keras untuk mencapai kebahagiaan dan kemakmuran, seperti “ *Menyo hana ta usaha, pane teuka reut di manyang, menyo na ta usaha ka han kaya udeup seunang*” (dengan adanya usaha untuk bekerja maka kesenangan hidup dapat diraih); (3) Dorongan dan semangat kerja masyarakat Aceh terbatas pada capaian pemenuhan kebutuhan bertahan hidup (*fisiologis*). Diluar itu, target capaian kerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan anak serta terpenuhinya biaya ONH; (4) Masyarakat Aceh memiliki tradisi komitmen terhadap waktu, terutama terdapat agenda kerja di bidang pertanian dan perikanan laut; (5) Tingginya kemampuan produksi petani lada Aceh dalam memenuhi kebutuhan rempah-rempah dunia pada abad 18 dan 19, membuktikan bahwa etos kerja turut dipengaruhi oleh tinggi rendahnya peluang masyarakat meraih keuntungan langsung dari perdagangan internasional; (6) etos kerja masyarakat turut dipengaruhi semangat mobilitas vertikal, dengan terjadinya peningkatan status sosial ekonomi maka terbuka kesempatan untuk berbagi terhadap masyarakat bawah.

Studi Nazaruddin (2003) melihat sisi lain dari keterkaitan nilai-nilai adat dan agama dengan instabilitas sosial. Ia menyebutkan bahwa gejolak sosial Aceh pada dasarnya merupakan gejolak yang berorientasi nilai. Ketegangan struktural yang dapat berkembang menjadi determinan gejolak sosial, seperti ketidakadilan ekonomi, pengingkaran hak-hak asasi manusia, pelecehan agama, martabat dan harga diri. Meskipun pemerintah mensederhanakan persoalan gangguan keamanan karena adanya gerakan separatisme, sehingga meyakinkan publik bahwa akar permasalahan di Aceh muncul karena penyebab tunggal yaitu separatisme. Simplifikasi seperti ini secara diam-diam melumpuhkan daya kritis masyarakat, yang kemudian dimanipulir, seolah-olah masyarakat setuju terhadap aksi-aksi kekerasan sebagai satu-satunya solusi dalam menyelesaikan masalah Aceh. Akibatnya, semua tindak kekerasan dari penculikan, penyiksaan, pembakaran, dan pembunuhan (*arbitrary killing*) yang dilakukan pada masyarakat sipil termasuk aktifitas kemanusiaan dengan sangat mudah digeneralisasi sebagai kelompok bersenjata yang juga secara hitam putih dikatakan sebagai pendukung atau penentang separatisme.

2.2.2. Studi Tindakan pada Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Koentjaraningrat (1974) dalam buku “Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan” menyampaikan pemikirannya menyangkut dengan hambatan-hambatan pembangunan terkait dengan perilaku sosial dilihat dari aspek kultural. Koentjaraningrat menyebutkan bahwa dalam berperilaku, manusia menempatkan sistem nilai sebagai sumber pedoman tertinggi. Dalam keterkaitan antara perilaku dengan pembangunan, dikatakan bahwa bila suatu bangsa berkeinginan menggiatkan usaha pembangunan maka diharuskan untuk mengusahakan agar warganya memiliki nilai budaya sebagai berikut : 1) lebih menilai tinggi orientasi ke masa depan. Nilai itu akan mendorong masyarakat untuk terbiasa mempersiapkan perencanaan hidup secara cermat, termasuk di dalam kerangka ini adalah kebiasaan hidup hemat sehingga memiliki simpanan tabungan; 2) lebih menilai tinggi akan hasrat eksplorasi lingkungan dan energi alam sehingga hal ini akan mendorong peningkatan berinovasi dan penemuan teknologi; 3) lebih

menilai tinggi orientasi ke arah *achievement* dari karya dan penghargaan atas karya cipta manusia itu sendiri; 4) menilai tinggi mentalitas berusaha di atas kemampuan diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani mempertanggungjawab beban kepercayaan yang dipercayakan pada dirinya .

Lebih konkrit, Koentjaraningrat (1974) menambahkan penjelasannya atas sejumlah mentalitas yang melemahkan masyarakat dalam gerak pembangunan. Diantara mentalitas tersebut, sebagiannya telah mengakar pada kehidupan masyarakat sebelum revolusi kemerdekaan dan yang lainnya muncul setelah revolusi. Mentalitas sebelum revolusi lebih ke arah harmonisasi manusia dengan alam, seperti ungkapan petani bahwa bekerja adalah untuk makan sedangkan priyayi menganggap kerja sebagai amal yang lebih mengarah pada pencapaian simbol kebahagiaan hidup berupa harta, kedudukan dan kekuasaan. Masyarakat memandang waktu sebagai lingkaran yang sederhana, seperti pada petani pola waktu pembagian waktu mengikuti tahapan aktifitas pertanian. Sedangkan bagi priyayi, waktu lebih bersifat rutinitas dalam memelihara simbol-simbol kedudukan sosialnya. Sedangkan mentalitas atas pandangan terhadap sesama manusia, bagi petani lebih mengarah pada prinsip *sama rasa-sama rata*. Sedangkan bagi priyayi atau pegawai, sikap lebih berorientasi ke arah atasan, baik orang-orang yang lebih tua, ataupun senior pejabat yang berpangkat tinggi akan bermuara pada sikap menunggu restu dan mematikan sikap kemandirian dalam berusaha dan bertanggungjawab.

Pada bagian mentalitas pasca revolusi, Koentjaraningrat (1974) menjelaskan bahwa mentalitas itu lebih disebabkan akibat praktek penghilangan nilai-nilai yang ditanam kolonial dan di saat yang sama terjadi kegagalan penanaman nilai-nilai baru pengganti nilai yang dianggap berbau kolonial. Situasi ini bermuara pada menguatnya keragu-raguan masyarakat atas ketiadaan pedoman dan orintasi yang tegas sebagai dasar masyarakat berperilaku. Akhirnya muncul beberapa sifat mentalitas yaitu 1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu dalam bekerja dan berkarya, 2) sifat mentalitas yang suka menerabas, ingin mencapai kesenangan hidup melalui jalan singkat tanpa melalui proses yang seharusnya, 3) sifat mentalitas yang tidak percaya kepada diri sendiri, lebih suka

menggantungkan pemenuhan kebutuhan diri pada atasan 4) sifat mentalitas yang tidak berdisiplin murni, yang mendorong masyarakat untuk taat peraturan saat diawasi oleh pihak yang disegani dan 5) sifat mentalitas yang mengabaikan tanggung jawab yang kokoh.

Hasil penelitian Clifort Geertz (1997) yang telah dibukukan "*The Paddlers and Princes*" memberikan pemahaman akan involusi ekonomi pertanian kaum santri di Jawa. Tesis utama Geertz adalah perubahan sosial pada kaum santri dan kaum ningrat yang dimungkinkan oleh karena kemunculan rasionalitas ekonomi. Rasionalitas ini tumbuh akibat dari terdapatnya nilai-nilai baru semacam etika ekonomi (*economic ethic*) yang memainkan perannya dlm kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berlatar belakang pasar (mojokuto). Secara kajian sosial, Geertz (1997) melihat keadaan ini sebagai akibat dari perubahan nilai-nilai etika ke dalam wujud fungsi ekonomi.

Sementara itu, studi Malik (2010) tentang etos kerja perdagangan masyarakat Gu-Lakudo di Sulawesi Tenggara yang mencapai kemajuan akibat transformasi ekonomi dari pedesaan ke perkotaan dimana kemajuan itu melekat dengan etika Islam yang diartikulasikan oleh aktor (agen) berpengaruh bernama Abdul Syukur sehingga menjadi etos ekonomi perdagangan. Penelitian ini menunjukkan keberlakuan tesis aliran pemikiran ekonomi substantif bahwa tindakan ekonomi individu berakar pada konteks sosial budaya dan agama masyarakat atau aktifitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial yang mengakar pada jaringan sosial kemasyarakatan.

2.3. Pemetaan Historisitas Lokal terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pidie

Eksistensi Pidie sebagai sebuah kawasan yang didalamnya terdapat komunitas masyarakat yang disebut orang Pidie telah berlangsung sejak berabad-abad. Terdapat beberapa catatan dan hasil penelitian menyangkut keberadaan Pidie yang akan dipetakan menurut tahapan perkembangan dinamika sosial kehidupan masyarakat Pidie itu sendiri. Dalam perkembangan terkini, sejarah keberadaan kerajaan Pedir dan sejarah negeri Meureudu adalah dua babak cerita

yang digunakan para elit pemerintahan untuk mengisi ruang memori publik mereka atas historis masing-masing daerah. Sejarah ini menegaskan tingginya dinamika kehidupan komunitas masyarakat di kawasan ini. Terlepas dari komunitas orang Pidie yang saat ini terbagi dalam dua wilayah administratif pemerintahan.

2.3.1. Situasi Pidie pada Abad 16.

Memori kolektif masyarakat Aceh secara umum bertolak pada pertengahan abad ke 16 dan puncak keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda di abad ke 17, saat mana Kerajaan Aceh terbentuk setelah penaklukan beberapa kekuatan kerajaan pantai lainnya di kawasan itu yang salah satunya adalah Kerajaan Pidir (Pidie). Beberapa catatan para pedagang Portugis yang diangkat dan dikonstruksikan Lombard (2007) diketahui bahwa ketika Portugis mulai mendatangi laut-laut Indonesia, terdapat dua pelabuhan dagang utama yang memperebutkan tempat pertama yaitu Pasai dan Pidir. Pidir dan Pasai pada awal abad ke 16 mengeksport lada dalam jumlah besar ke Cina dan beberapa tempat lain.

Disebutkan pula bahwa pada dasarnya Pidir lebih tua dan lebih dahulu menikmati kemajuan sebagai kota pelabuhan dagang internasional, meskipun kemudian pengaruhnya meluntur akibat persaingan dan peperangan. Ungkapan Tome Pires yang diangkat Lombard “Pidir dahulu kala menguasai pintu masuk ke selat-selat, memegang seluruh perniagaan dan lebih ramai didatangi daripada *Pacee*. Namun para pedagang masih juga berdatangan, ...disinggahi setiap tahun oleh dua kapal dari Kambay dan Benggala, satu kapal dari “benua quelin”, satu lagi dari Pegu”.

Tabel 2.3.
Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Abad 16
terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

	Uraian
Penguasa Kebijakan	Kerajaan Pidir (pusat kebijakan berada di Pidie)
Struktur	Raja Pidir dan pembantunya dalam menyelenggara-rakan pemerintahan
Sosio-kultural (institusi level <i>gampong</i>)	Institusi adat dan agama telah eksis dalam masyarakat gampong, mungkin nama dari institusi itu yang berbeda namun tidak dapat dipastikan karena tidak ada dalam catatan dan tulisan-tulisan yang berkenaan. Pengaruh Islam bagi masyarakat Pidir sudah lebih dahulu masuk dari pengaruh Kerajaan Pasai dan Perlak.
Ekonomi Masyarakat	Pemenuhan kebutuhan pokok dengan pekerjaan dibidang tani, kebun dan hasil laut. Hasil pertanian berupa lada menjadi komoditas perdagangan internasional di pelabuhan Pidir. Produksi diduga digerakkan oleh ureung kaya atau uleebalang setempat

2.3.2. Situasi Pidie antara abad 17 hingga tahun 1873.

Disebutkan Pires (Lombard, 2007) bahwa pada masa itu, terdapat tiga kekuatan utama di kawasan ujung Sumatera yaitu Pidir, Pasai dan satu lainnya Kerajaan Aceh yang masih muda. Pidir diceritakan mengalami kemunduran dan kekalahan akibat serangan-serangan ambisius Ali Mughayatsyah yang berhasrat menggabungkan seluruh pelabuhan dagang di bawah kekuasaannya. Tujuannya adalah agar mudah mengawasi lalulintas perdagangan di sepanjang ujung Sumatera. Penaklukannya membuahkan hasil, bukan hanya Pidir yang berhasil dimenangkannya. Namun juga Daya, Deli dan Pasai pada tahun 1524.

Disebutkan Lombard, Pidir sendiri menjadi salah satu mata rantai dalam proses suksesi puncak kekuasaan yang dilakukan Iskandar Muda. Iskandar adalah cucu melalui anak perempuan dari seorang pria tua berumur 70 tahun yang ditunjuk oleh sekelompok kaum bangsawan Aceh yang ingin melanggengkan kedudukannya. Pria tua itu digelar Ala ad-Din Ri'ayat Syah menjalankan pemerintahan keras yang membawa akibat berbalik dengan harapan para pemilihnya. Sepeninggal kakeknya, Iskandar Muda mempermainkan strategi unik

dalam meraih kekuasaan. Mengadu antara raja Aceh dengan Gubernur Pidir, keduanya adalah saudara kandung ibunya sendiri. Drama ini berakhir dengan kematian dua pamannya dan menyisakan seorang Iskandar Muda yang tampil gemilang mengalahkan tentara Portugis yang hendak memanfaatkan situasi. Perang saudara. Iskandar Muda diangkat menjadi raja Aceh pada tahun 1607 dan menerapkan pemerintahan keras dengan menghabisi bangsawan lama dan mengangkat bangsawan baru yang berpihak padanya.⁵

Dalam masa inilah Iskandar Muda membagi wilayah Aceh ke dalam wilayah administrasi yang disebut *ulee balang* dan *mukim*. Mukim pada awalnya adalah himpunan beberapa gampong untuk mendukung sebuah mesjid yang dipimpin oleh seorang *imeum*. Sedangkan *ulee balang* pada awalnya barangkali bawahan utama Sultan yang dianugerahi Sultan beberapa kemukiman untuk dikelolanya secara feodal. Pola ini terdapat di Aceh Besar dan termasuk Pidie. Bahkan di Pidie disebutkan terdapat pemimpin dengan gelar *Meuntro*. Dengan demikian untuk kawasan Pidir yang sebagian menyebut dengan sebutan Pidie, elit yang berkuasa adalah para *ulee balang* Pidie.

Menyangkut keberadaan *Uleebalang*, Kappi (1988) menyebutkan bahwa struktur sosial Aceh di masa lampau tercermin dari sistem birokrasi pemerintahan, dimana kaum bangsawan, ulama dan perangkat birokrasi lainnya merupakan unsur pendukung utama *Uleebalang*. Karenanya struktur sosial dibagi menjadi dua golongan besar yaitu golongan yang menentukan (kebijakan) dan golongan rakyat kebanyakan. Golongan penentu adalah *Uleebalang* beserta perangkat pemerintahannya, termasuk *gampong* sebagai unit pemerintahan terendah. Perangkat pemerintahan *Uleebalang* terdiri dari 1) *kerani* yang bertugas sebagai juru tulis; 2) *Tuha Lapan Keuchik Peut* sebagai penasihat *Uleebalang*, yang diisi oleh cerdik pandai dan empat orang *keuchik* yang memimpin gampong terbanyak penduduknya dan terluas wilayah kekuasaannya; 3) *Imuem Chik* memegang urusan keagamaan yang merupakan ulama besar; 4) *Kadhi Uleebalang*, bertugas

⁵ Lombard mengambil catatan Beaulieu, seorang Perancis dalam "Memories du Voyage aux indes orientalis" halm 63. Relation de Divers Voyages curieux, Ed Travenort, Part II (Paris, 1664)

dibidang peradilan; 5) *Panglima* yang bertugas di bidang keamanan dan 5) *Upaih* sebagai pesuruh Uleebalang yang bertugas sebagai penyampai pesan uleebalang kepada bawahannya.

Lebih lanjut disebutkan Kappi (1988) bahwa dalam pemerintahannya Uleebalang dapat memerintah secara langsung kepada keuchik dan ada yang tidak diperintah langsung, yakni dengan perantara *Imeum Mukim* yang mengendalikan sejumlah gampong. *Imuem Mukim* biasanya adalah saudara atau kerabat dari *Uleebalang* itu sendiri. *Gampong-gampong* yang berada langsung dibawah *Uleebalang* atau melalui *Imeum Mukim*, dipimpin oleh *Keuchik* yang dibantu seorang *waki keuchik* dan *Teungku Imuem Meunasah*

Dengan keadaan itu, *Uleebalang* adalah pemegang kendali aktifitas kerja masyarakat di Negeri Pidie atau Meureudu. Salah satu kehandalan yang dipersembahkan *Uleebalang* Pidie adalah kemampuannya untuk memenuhi permintaan Sultan Iskandar Muda guna mencukupkan kebutuhan beras bagi masyarakat di pusat pemerintahan Kutaraja yang berkembang pesat. Karenanya Pidie dengan Daya dikenal sebagai lumbung Aceh dan sultan Iskandar Muda berhasil mengkondisikan seluruh penduduknya kenyang.

Sejalan dengan itu, menurut sumber cerita yang diturunkan antar generasi disebutkan bahwa negeri Meureudu terbentuk dan diakui sejak zaman Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa (1607-1636) yang mana negeri Meureudu termasuk daerah yang bebas dari aturan kerajaan. Hanya satu kewajiban Meureudu saat itu, menyediakan persediaan logistik berupa beras untuk kebutuhan kerajaan Aceh.

Dalam *Qanun Al-Asyi* atau Adat Meukuta Alam, yang merupakan konstitusi Kerajaan Aceh disebutkan bahwa dalam percaturan politik kerajaan Aceh, negeri Meureudu juga memegang peranan penting. Terutama saat ibukota kerajaan Aceh dikuasai Belanda dan Mesjid Indra Puri direbut, dokumen undang-undang kerajaan itu jatuh ke tangan Belanda. Dalam pasal 12 *Qanun Al-Asyi* disebutkan, “apabila Uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul

Uleebalang negeri itu atau diserang dan Uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas”.

Kutipan konstitusi Kerajaan Aceh itu, mensahihkan tentang keberadaan Negeri Meureudu sebagai daerah kepercayaan sultan untuk melaksanakan segala perintah dan titahnya dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan Kerajaan Aceh Darussalam. Meskipun tidak dapat terlalu dipercayai dan tidak ditemukan pada penelitian tentang Kerajaan Aceh, dalam versi cerita turun temurun dalam masyarakat setempat bahwa :

“Negeri Meureudu pernah akan dijadikan ibu kota kerajaan. Untuk melihat kepantasan ibukota dipilih cara melihat kejernihan air sungai Krueng Meureudu dengan air sungai Krueng Aceh. Hasilnya air sungai krueng Meureudu lebih bagus. Tapi ada pembesar kerajaan yang tak setuju sehingga air itu ditukar. Akibatnya ibu kota Kerajaan Aceh tetap berada di tepi aliran sungai krueng Aceh yang sekarang menjadi Banda Aceh. Bukti pernah ada niat untuk memindahkan ibukota kerajaan telah disiapkan sebuah benteng pertahanan yang sekarang ada di tepi sungai krueng Meureudu”.

Lebih lanjut dari kisah heroik ekspansi militer di era Sultan Iskandar Muda, bahwa :

“ Peranan Negeri Meureudu yang sangat strategis dalam percaturan politik Pemerintahan Kerajaan Aceh. Ketika Sultan Iskandar Muda hendak melakukan ekspansi militer ke semenanjung Melayu. Ia mengangkat Malem Dagang dari Negeri Meureudu sebagai Panglima Perang, serta Teungku Ja Pakeh-juga putra Meureudu-sebagai penasihat perang, mendampingi Panglima Malem Dagang. Setelah Semenanjung Melayu, yakni Johor berhasil ditaklukkan oleh Pasukan pimpinan Malem Dagang, Sultan Iskandar Muda semakin memberikan perhatian khusus terhadap Negeri Meureudu. Kala itu sultan paling tersohor dari Kerajaan Aceh itu mengangkat Teungku Chik di Negeri Meureudu, putra bungsu dari Meurah Ali Taher yang bernama Meurah Ali Husein, sebagai perpanjangan tangan Sultan di Meureudu”.

Karena jasa-jasanya negeri Meureudu disebut-sebut berada langsung berada dibawah kesultanan Aceh. Penduduknya dibebaskan dari segala beban dan kewajiban terhadap kerajaan, kecuali kewajiban menyediakan beras bagi Kerajaan Aceh karena posisinya sebagai lumbung beras utama kerajaan. Keistimewaan berlangsung hingga berkuasanya Sultan Iskandar Tsani. Pada tahun 1640, Iskandar Tsani mengangkat Teuku Chik Meureudu sebagai penguasa defenitif

yang ditunjuk oleh kerajaan. Ia merupakan putra sulung dari Meurah Ali Husein, yang bernama Meurah Johan Mahmud, yang digelar Teuku Pahlawan Raja Negeri Meureudu.

Berbeda dengan yang diungkapkan Lombard (2007), dalam masa seabad dari gambaran yang dicerikan informan maka disebut Teungku Raja Pakeh Dalam sebagai penguasa Pidie. Ia diangkat dengan keputusan (*sarakata*) oleh Sultan yang saat itu dipegang oleh Tuanku Ibrahim (1838-1870) dengan gelar Sultan Ali Ala' ad-din Mansyur Syah. *Ulee balang* Pidie yang satu ini, terkenal dalam membantu kerajaan Aceh dapat kembali menundukkan kerajaan-kerajaan lainnya di pantai timur yang sempat dua abad terlepas dari pengaruh kerajaan Aceh, seperti Langkat, Deli dan Serdang. Peperangan ini dilakukannya bersama pengeran Husain yang merupakan putera Sultan berkuasa.

Tabel 2.4.
Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Abad 17 – tahun 1873
terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

	Uraian
Penguasa Kebijakan	Kerajaan Aceh (pusat kebijakan berada di Kutaraja atau Banda Aceh)
Struktur	Terdapat dua golongan : <i>Uleebalang</i> (Raja) dengan segenap aparat pemerintahan dan rakyat biasa. <i>Uleebalang</i> -Raja negeri yang diangkat Sultan dengan <i>sarakata</i> /chap sikureung) <i>Imuem Mukim</i> , memimpin satuan mukim yang terdiri atas beberapa gampong. <i>Keuchik</i> adalah orang kepercayaan <i>uleebalang</i> memimpin rakyat biasa di tingkat gampong. Stratifikasi Sosial di gampong : <i>Uleebalang</i> , <i>Ulama birokrat-ulama dayah</i> , <i>Birokrat pendukung</i> (<i>Keuchik dan lainnya</i>), dan rakyat
Sosio-kultural (institusi level <i>gampong</i>)	Institusi adat dan agama semacam <i>keuchik</i> , <i>tengku imuem meunasah</i> , <i>Kejrueu blang</i> , <i>Panglima laot</i> dan lainnya menjalankan aktifitas atas dasar ide-ide sederhana yang berkisar pada aktifitas di bidang ekonomi (pemenuhan kebutuhan pokok), bidang politik pemerintahan, keteraturan sosial dan spiritualitas terkait hal keagamaan.
Ekonomi Masyarakat	Masyarakat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok melalui pengolahan hasil sawah, kebun dan laut

	<p>Hasil perkebunan berupa lada, masih menjadi komoditas perdagangan internasional.</p> <p><i>Uleebalang</i> berperan sentral dalam pengerahan rakyat untuk bekerja memproduksi beras dan lada dan <i>uleebalang</i> menjadi pihak yang diuntungkan dalam pemasaran produk tersebut</p>
--	---

2.3.3. Situasi Pidie antara tahun 1873 hingga 1945

Dalam rangkaian drama kontestasi kekuasaan di ujung Pulau Sumatera pada akhir abad ke 19 antara Kerajaan Belanda dengan penerus Sultan Iskandar Muda, Pidie adalah tempat dimana para elit kesultanan dan *ulee balang* mendapatkan tempat perlindungan dan dukungan moril dan materil untuk melakukan perlawanan bersenjata. Disebutkan Alfian (1999) bahwa dalam kedudukan sebagai Gubernur Sipil dan Militer Belanda untuk kawasan Aceh, Van Heutsz menempatkan Pidie sebagai target pertama dan utamanya pada awal karirnya. Ia menilai Pidie menjadi basis kaum pejuang dan senantiasa membantu Aceh Besar. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduknya yang relatif lebih banyak dari kawasan Aceh lainnya, disamping Pidie merupakan lumbung beras.

Kegagalan total agresi Militer Belanda pada tahun 1873 yang berakhir dengan kematian Jenderal Kohler Pemimpin Ekspedisi Militer Belanda, di halaman Masjid Raya Banda Aceh mendorong Belanda mengerahkan seluruh kekuatan guna mempertahankan reputasinya di hadapan negeri taklukan dan dunia internasional. Pengerahan seluruh kekuatan membuahkan hasil dengan mundurnya seluruh pembesar Kesultanan ke kawasan Pidie hingga ke Aceh Utara dan Gayo. Bersatunya *ulee balang* dan ulama terjadi dalam perang Kerajaan Aceh-Kerajaan Belanda yang berlangsung terbuka hingga tahun 1898. Wujud nyata adalah perlindungan dan dukungan Pidie atas Sultan beserta *ulee balang* adalah perlawanan yang diberikan Tengku Muhammad Saman atau dikenal dengan sebutan Tengku Chik Di Tiro. Bersama elit pejuang lainnya menyerang Belanda dari arah Pidie, sehingga menjadi babak sejarah yang menegaskan bahwa Pidie dengan segenap kemampuan adalah unsur utama kekuatan pendukung Kesultanan Aceh saat itu. (Ismuha,1983)

Dalam sebuah babak cerita penyerahan diri Sultan Muhammad Daud, sebagai sultan terakhir disebutkan bahwa sultan mengakui diri bukan lagi sebagai

pemilik kekuasaan atas Aceh. Ia telah menyerahkan kekuasaan kepada rakyatnya, melalui mana secara simbolik kekuasaan itu dipegang oleh Tengku Chik Di Tiro dengan penyerahan *cap sikureung* pada saat Sultan mundur dari kejaran militer Belanda hingga ke kawasan Tiro di Pidie.

Setelah Ulama kharismatik Tengku Chik Di Tiro Muhammad Saman meninggal dunia karena diracun dalam hindangan *khanduri* pada tahun 1891, Belanda tetap mendapat perlawanan dari para penerusnya hingga tahun 1912. Serangan-serangan terhadap fasilitas Belanda dilakukan dari arah Pidie yang menusuk hingga ke Aceh Besar. Pada dasarnya hingga kehadiran Jepang pada tahun 1942, Belanda pada dasarnya tak mampu menguasai Aceh secara keseluruhan. Belanda menguasai titik titik tertentu. Dari Meureudu dikenal beberapa pejuang tangguh, sehingga disaat Sultan Menyerahkan diri setelah penyanderaan istri dan anaknya. Turut pula didalamnya pembesar negeri Meureudu seperti Teuku Chik Meureudu.

Dalam masa tahun 1873 hingga 1912, disebutkan Ismuha (1983) ulama-ulama Aceh dengan keterlibatan beberapa *uleebalang* mengerahkan seluruh kekuatan-kekuatan di dayahnya masing-masing untuk menggelorakan perlawanan. Namun sejak 1913, muncul kesadaran dari beberapa ulama yang masih hidup untuk mulai mengusahakan menghidupkan pendidikan *dayah* kembali. Meskipun untuk itu, harus mendapat persetujuan dan pengawasan pemerintah Hindia Belanda yang mengatur tentang guru yang mengajar agama. Untuk mendirikan dayah atau madrasah harus dengan seijin tertulis Pemerintah Belanda. Inisiatif salah satu ulama yang sekaligus keluarga Sultan pada tahun 1915 berdiri Madrasah Khairiyah di Banda Aceh yang memasukkan pelajaran umum. Sementara itu, tahun 1920 Serekat Islam masuk ke Aceh yang membuat ulama dan *uleebalang* yang terlibat di dalamnya ditangkap seperti tengku Bujang Salim Krueng Geukueh dan Teuku Muhammad Said Cunda. Tengku Syekh Abdul Hamid Samalanga sebagai tokoh ulama SI melarikan diri ke timur tengah yang kelak menyerukan pembaharuan dalam bidang pendidikan.

Dalam masa Belanda berkuasa atas Aceh, Amin (1988) dan Hasjmy (1995) menyebutkan bahwa Belanda memberlakukan *uleebalang* dengan dua cara

yaitu : pertama, bagi mereka yang mengakui kedaulatan Belanda dengan sukarela mengikat diri dalam kontrak *korte verklaring* maka berlaku pemerintahan tidak langsung dari pemerintah Hindia Belanda. Kepada mereka diberikan kewenangan tetap berdaulat dan menjadi raja di negerinya sendiri namun dengan terikat beberapa kewajiban dan pembatasan. Kedua, bagi *uleebalang* yang ditaklukkan dengan senjata maka diberlakukan pemerintahan . Dalam hal ini berlaku untuk kawasan Aceh Besar dan sebagian Singkel.

Sementara itu dalam periode ini, disebutkan Kappi (1988) kemesraan dan harmoni yang selama ini terjalin berabad-abad antara *uleebalang* dan ulama mulai menunjukkan kerenggangan. Ulama sendiri di Aceh sebenarnya terpilah antara ulama *dayah* dan ulama yang terlibat dalam jaringan birokrasi. Kelompok ulama *dayah* bekerja menyebarkan ajaran Islam, mendidik dan dan mencetak kader-kader ulama baru di *dayah-dayah* (pesantren) yang dikelolanya. Di dalamnya terdapat posisi-posisi ulama yang menunjukkan kedalaman ilmu agamanya, berturut-turut semakin ke atas adalah *teungku dirangkang*, *tengku dibale* dan *tengku chik*. Sedangkan sebagian lainnya adalah *ulama* yang dilibatkan dalam birokrasi pemerintahan, seperti *Teungku Meunasah*, *Imuem Chiek di Mesjid Kemukiman*, *Kadhi Uleebalang*,. Hubungan ulama dengan masyarakat lebih akrab, dibanding dengan *hubungan* masyarakat dengan *Uleebalang*. Hal ini disebabkan karena banyaknya ragam aktifitas masyarakat terkait urusan keagamaan yang terjalin dan berlangsung dalam di institusi-institusi keagamaan seperti Meunasah, Mesjid dan Dayah.

Beberapa kebijakan *uleebalang* mendorong munculnya sikap kritis ulama terhadap *uleebalang*, diantaranya ulama mulai khawatir atas sikap *Uleebalang* yang berkenan mengakui kedaulatan dan kekuasaan Belanda melalui *korte verklaring* sehingga kepada mereka diberikan kewenangan memerintah sendiri (*zelf bestuurder*). Sebuah kondisi yang menguntungkan *uleebalang* dikarenakan pada dasarnya mereka ingin tetap dipertahankan kedudukannya sebagai penguasa negeri sebagaimana berlaku sebelumnya. Hal lain yang merisaukan ulama adalah beberapa *uleebalang* bertindak melebihi batas dalam memperlakukan rakyat dalam sistem kerja paksa, yang disertai dengan adanya perilaku yang tak sesuai

dengan ajaran Islam. Pada fase ini, guna menahan atau mengimbangi kekuasaan *uleebalang* secara perlahan ulama-ulama besar menghendaki dihidupkannya kembali kesultanan di Aceh, namun hal ini mengalami kegagalan

Salah satu Daerah Pemerintahan Sendiri (*zelf bestuurder*) adalah kawasan Pidie, yaitu Lameulo, Sigli dan Meureudu yang masing-masing ditetapkan Belanda sebagai tiga *Onder Avdeling* dari tujuh *Onder Avdeling* di bawah *Afdeeling Noordkust* yang berkedudukan di Sigli. Secara keseluruhan wilayah Aceh dibagi atas empat *Afdeeling* oleh Belanda. Seorang *controlleur* atau wedana ditunjuk Belanda untuk masing-masing memimpin Lameulo, Sigli dan Meureudu. Untuk kewedanaan (*Onder Afdeeling*) Meureudu, wilayah kekuasaannya meliputi dari Ulee Glee sampai ke Panteraja. Disebutkan bahwa dalam masa sebuah *website* resmi Pemerintah Kabupaten Pidie bahwa kewedanaan Meureudu sempat dipimpin oleh empat belas orang *Controlleur*.

Seiring dengan perkembangan kondisi Aceh, Ismuha (1983) menyebutkan bahwa Tengku Syek Abdul Hamid Samalanga ulama Aceh yang berada di Mekkah mengirim pesan perubahan dalam model pendidikan di dayah tradisional. Perubahan yang digerakkan oleh Tengku Daud Beureueh dan Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba akhirnya diadaptasi, hal itu ditandai dengan berlangsungnya pembaharuan dalam model pendidikan seperti mulai digunakannya peralatan media penunjang dimana siswa mulai duduk di kursi dan pengajaran oleh guru dibantu dengan pemaparan papan tulis, serta dimasukkannya mata pelajaran umum dalam kurikulum meskipun dalam bahasa Arab. Penggunaan bahasa Arab dalam pelajaran umum menghindarkan resistensi masyarakat atas pelajaran-pelajaran non agama. Hal itu berlangsung tahun 1930 saat mana berdiri madrasah Al Muslim di Matang Geulumpang Dua, madrasah Saa'dah Abadiyah di Sigli, madrasah Al Irsyad di Lhokseumawe dan madrasah Ahlussunah Wal Jamaah di Idi.

Perkembangan intelektual ulama yang mengemuka dan kesadaran untuk bersatu diantara sesama ulama mendorong mereka mengorganisasikan diri sehingga dibentuk PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) pada tahun 1939 dibawah pengaruh Tengku Muhammad Daud Beureueh. Karenanya ia ditunjuk

sebagai pemimpin kekuatan baru bagi pergerakan ulama di kawasan Aceh. Berdirinya PUSA juga didukung oleh *uleebalang*, seperti Teuku Haji Chik Muhammad Johan Syah yang merupakan kepala pemerintahan sendiri Negeri Peusangan. Ia dikenal kharismatik karena kedekatannya dengan rakyat juga sekaligus akrab dengan Belanda. PUSA lalu mendirikan *Normaal Islam Instituut* di Bireuen sebagai media pendidikan moderen bagi masyarakat Aceh. Pergerakan Daud Beureueh di Matang Geulumpang Dua, Sigli dan Lhokseumawe sebagai guru sekaligus ulama, membuatnya memiliki murid dan pengikut dalam cakupan wilayah yang relatif luas. PUSA sempat dicurigai *uleebalang* sebagai media menghidupkan kembali lembaga kesultanan oleh para ulama.

Kedatangan Jepang pada tahun 1942 dijadikan momentum oleh ulama untuk menghilangkan kekuasaan *uleebalang* yang bekerjasama dengan Belanda. Namun nyatanya kemudian, dalam pertimbangan-pertimbangan jangka pendek terlihat Jepang tetap menggunakan sinergitas *uleebalang* dan ulama sebagai jembatannya menguasai dan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di Aceh untuk kepentingan dukungan logistik dan sarana Perang Asia Timur Raya. Namun, Jepang membuat kebijakan besar dengan mengakomodir ulama dalam jaringan birokrasi yang mereka bangun. Ulama diberikan kedudukan resmi di dalam organ pemerintahan yakni pada organisasi Mahkamah Agama. Jepang juga mendayagunakan *Uleebalang* yang tetap dipertahankan sebagai kepala pemerintahan di negerinya masing-masing (*sunco*), bahkan ditambah dengan tugas sebagai controller (*gunco*). Jepang mengharapkan *uleebalang* dapat melaksanakan tugasnya seperti mengerahkan rakyat sebagai tenaga kerja, mengambil pemuda sebagai *heiho*, *gyugun* dan *tokobeit*, mengumpulkan kekayaan dan padi rakyat menurut jumlah yang telah ditentukan.

Dalam hal ini status pemerintahan *swapraja (zelfbestuur) uleebalang* dihapuskan, sehingga semua negeri berbentuk pemerintahan langsung pemerintah pendudukan Jepang. Demikian juga hak peradilan dicabut dari tangan *uleebalang* dan diserahkan kepada Pengadilan Negeri. Menyangkut perkara agama diserahkan peradilannya pada Mahkamah Agama. PUSA sendiri berkontestasi dengan kekuatan *ulee balang* yang dinilai berpreferensi terhadap kepentingan kekuasaan.

Dalam keuntungannya mendapat kepercayaan dari Jepang, PUSA beserta pengurusnya menjadi elit berkuasa di Aceh. Disebutkan Hasjmy (1995) bahwa “Meureudu dipimpin oleh apa yang disebut dengan *Sunco* Meureudu yakni *ulee balang* dan *Gunco* Meureudu untuk menyebut *controller*.

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, membuka kesempatan Belanda kembali ke Aceh. Hal ini mengkhawatirkan ulama dan sebagian *uleebalang* atas kemungkinan berkuasanya kembali Belanda dan menguatnya kekuatan kaum *uleebalang* yang berafiliasi dengan kekuatan Belanda. Namun berita proklamasi yang diumumkan Ir. Soekarno dan Hatta membuat mereka langsung berafiliasi dengan gerakan kemerdekaan tersebut.

Tabel 2.5.
Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca 1873 - 1945
terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

	Uraian
Penguasa Kebijakan	Belanda-Jepang (pusat kebijakan berada di Batavia) Sebagian <i>uleebalang</i> (<i>zelfbestuur</i>) Sebagian lain, menentang penguasaan asing. Namun Pidie menjadi basis menyerang kepentingan Belanda di Banda Aceh.
Struktur	Gubernur Sipil dan Militer Belanda- <i>Ulee balang-Tengku syik</i> (ulama) Stratifikasi Sosial : <i>Belanda-uleebalang</i> , <i>ulama birokrat-ulama dayah birokrat pendukung</i> (<i>Keuchik dan lainnya</i>), <i>ureung kaya, Keuchik ureung lee</i> (rakyat)
Sosio-kultural (institusi level <i>gampong</i>)	Insitutsi adat dan agama baik pada level <i>gampong</i> maupun level lebih besar seperti negeri, dan kesultanan diarahkan sepenuhnya untuk mengkonversikan semangat bekerja menjadi semangat berjuang mempertahankan kekuasaan. Keberhasilan konversi bentuk tindakan ditandai dengan keberhasilan transformasi ide-ide religius ke arah perebutan kekuasaan yang dimotori oleh ulama dan sebagian <i>uleebalang</i> anti Belanda sebagai <i>agent</i> perubahan
Ekonomi Masyarakat	Diantara aktifitas masyarakat yang terlibat perang, terdapat sebagian lainnya yang tetap bekerja memenuhi kebutuhan pokok dengan mengolah sawah, kebun dan laut. Diantara itu, <i>Uleebalang</i> yang tetap sebagai raja (<i>zelfbestuur</i>) dalam masa kekuasaan Belanda dan sebagai kepala negeri masa Jepang terus mengkondisikan rakyat untuk bekerja di sawah dan perkebunan miliknya dalam bekerja produksi lada guna diperdagangkan, namun dalam jumlah produksi yang cenderung menurun. Diantara itu, <i>Uleebalang</i> yang tetap sebagai raja (<i>zelfbestuur</i>) dalam masa kekuasaan Belanda dan sebagai kepala negeri masa Jepang terus mengkondisikan rakyat untuk bekerja di sawah dan perkebunan miliknya dalam bekerja produksi lada guna diperdagangkan, namun dalam jumlah produksi yang cenderung menurun.

2.3.4. Situasi Pidie antara tahun 1945 hingga 2005

Pengambilalihan daerah-daerah pendudukan Jepang oleh tentara sekutu yang membonceng tentara Belanda, membuat gembira sebagian *uleebalang* yang mengharapkan Belanda berkuasa kembali. Sementara ulama dan beberapa *uleebalang* lain sangat khawatir. Amin (1988) menyebutkan bahwa di antara *uleebalang* yang menonjol keberpihakannya kepada Belanda adalah TM Daud Cumbok yang menjadi *uleebalang* Lamlo-Pidie. Kelompok *uleebalang* cumbok mengorganisasikan kekuatan diri dengan membentuk Markas *Uleebalang* di Lamlo, salah satu bentuk dukungan terhadap Belanda adalah penolakan mereka untuk mengibarkan bendera merah putih. Sejalan dengan itu, ulama dan sebagian *uleebalang* anti Belanda juga mengorganisasikan diri. Momentum penyerahan senjata oleh Jepang di Sigli menjadi puncak kontestasi antara kelompok ulama-*uleebalang nasionalis* dengan kelompok *uleebalang pro* Belanda, yang akhirnya terjadi meletupkan perang terbuka antara kedua belah pihak.

Titik ini menjadi titik tragedi hitam manakala terjadi perang saudara yang kemudian terkenal dengan “peristiwa cumbok”. Peristiwa dimana kaum *uleebalang* yang sudah pernah menikmati kekuasaan sebagai pemimpin Daerah Pemerintahan Sendiri (*zelf bestuur*) menghendaki untuk memegang kembali kendali pemerintahan seperti saat Belanda berkuasa. Kelompok bangsawan yang bergerak menangkap lawan politiknya ini berpusat di Cumbok Lameulo, dipimpin oleh Teuku Daud. Pertikaian antar elit ini berakhir pada Januari 1946, dengan dihancurkannya pusat perlawanan *uleebalang* di Cumbok melalui peperangan yang digerakkan kaum ulama (Hasjmy,1995).

Menanggapi kegamangan keadaan pasca Agustus tahun 1945, ulama Aceh telah mengorganisasikan diri untuk mendukung kebebasan di bawah proklamasi Indonesia. Salah satu fakta empirik sebagaimana disebut Ismuha (1983) adalah pada 15 Oktober 1945 dikeluarkannya Maklumat Bersama yang ditandatangani empat ulama besar Aceh yaitu Tengku Haji Hasan Kruengkale, Tengku M.Daud Beureueh, Tengku M.Jakfar Sidik Lamjabat dan Tengku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri. Tindak lanjutnya adalah pada 17 Nopember 1945 dibentuk Laskar Mujahidin yang dipimpin Tengku Daud Beureueh. Laskar ini kemudian

dinamakan Divisi Tengku Chik Ditiro dan Divisi Tengku Chik Dipaya Bakong yang dipimpin oleh Teungku Amir Husin AlMujahid menjadi divisi lainnya yang berada di Aceh Timur. Dalam perkembangan lebih lanjut, Jakarta mengangkat Teungku Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Sebagai pemimpin Aceh, Daud Beureueh termasuk menolak dengan tegas ajakan untuk membentuk Negara Aceh yang tergabung federasi bentukan Belanda di penghujung 1949.

Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, maka pada 1 Januari 1950 Aceh dibentuk menjadi Provinsi dan Daud Beureueh diangkat menjadi Gubernur Aceh. Namun, kemudian dalam implementasi hasil Konferensi Meja Bundar yang menyatakan bahwa di Sumatera hanya ada 3 Provinsi maka mendorong Jakarta muncul kebijakan menghapus provinsi Aceh dan meleburnya ke dalam provinsi Sumatera Utara. Fase ini menandai keretakan hubungan Aceh dan Jakarta, merasa tuntutan Aceh diabaikan hingga tiga tahun maka akhirnya Daud Beureueh dengan dukungan seluruh elemen di Aceh menyatakan perlawanan bersenjata melalui Gerakan DI/TII pada 21 September 1953.

Kebijakan membentuk kembali Provinsi Aceh ditetapkan pada tahun 1 Januari 1957 dan 27 Januari 1957 dilakukan serah terima jabatan Gubernur kepada Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh. Kemudian Ali Hasjmy dan Panglima Kodam Kolonel Syamaun Gaharu melakukan pendekatan-pendekatan dengan kelompok DI/TII guna rekonsiliasi Aceh sehingga dapat dipulihkan keadaan Aceh pada 26 Mei 1957.

Preferensi dinamika sejarah kekuasaan di Aceh, secara tidak sadar telah dimotori oleh pemikiran, tingkah laku dan manuver yang dilakukan elit-elit tokoh dari kawasan Pidie. Dua nama yang melekat dalam konflik Aceh pasca kemerdekaan adalah Daud Beureueh melalui Gerakan DI/TII tahun 1953 dan kemudian Hasan Tiro dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1976. Meskipun di awal pergerakannya Hasan Tiro berafiliasi pada gerakan perlawanan Daud Beureueh, namun belakangan pergerakan lanjutannya melalui Gerakan Aceh Merdeka yang diletupkan pada tahun 1976 lebih merupakan bentuk ketidakpuasan atas politik ekonomi Pemerintah Pusat. Hasan Tiro menggunakan momentum

ditemukannya ladang gas alam di Aron (Aceh Utara) sebagai fase awal perlawanan keacehannya (Ishak, 2011).

Setelah dimulainya eksploitasi gas alam Arun, yang pusat penyulingannya mengambil tempat di Blang Lancang (saat ini Blang Lancang termasuk dalam wilayah Kota Lhokseumawe) mendorong kemunculan pusat ekonomi baru bagi kawasan Aceh. Lhokseumawe menjelma menjadi pusat kemajuan pembangunan dan pengembangan ekonomi masyarakat Aceh. Bahkan di era Gubernur Ibrahim Hasan (merupakan orang Pidie yang berkuasa antara tahun 1986-1993) dicanangkan sebagai zona industri disamping zona pertanian bagi Aceh lainnya. Dalam fase ini, terlihat kontras bahwa Pidie menjadi sebuah tempat yang berada di antara dua kota yang memiliki arti khusus bagi kemajuan Aceh yakni Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Pidie justru menjadi daerah hitam akibat letupan yang dilakukan oleh Hasan Tiro. Tiro sendiri adalah nama salah satu tempat di kawasan Pidie. Pidie seperti berada dalam lorong *status quo*, yang memberi kesan seakan rakyatnya sengaja dihukum secara moral dengan tidak adanya program pembangunan yang monumental. Pada saat yang sama masyarakat Pidie juga menikmati kebersahajaan dengan larut dalam aktifitas rutinnnya bekerja sebagai petani di sawah sembari memelihara ternak atau menjadi nelayan dan sebagian yang lainnya menjalani kehidupan sebagai pedagang.

Pada akhir tahun 80-an gangguan keamanan kembali menguat di kawasan Aceh Utara yang merupakan basis kawasan industri di Provinsi Aceh. Merasa perlu mengamankan kemajuan yang telah dicapai di wilayah kerjanya maka Gubernur meminta bantuan militer tambahan untuk mengantisipasi memburuknya gangguan keamanan. Namun dampak yang ditimbulkan justru berbalik dengan harapan. Keterlibatan militer secara berlebihan, dengan tudingan bahwa Gerombolan Pengacau Keamanan sebagai kelompok separatis menjadikan Operasi Jaring Merah mendapat legitimasi. Tindakan represif berlangsung pada daerah-daerah yang diberi predikat “daerah hitam”.

Dalam prakteknya Pidie termasuk kawasan operasi militer tersebut. Terbukti kemudian setelah reformasi. Publik dikejutkan dengan sajian berita di harian lokal secara rutin setiap hari mengangkat *serial* pengakuan demi

pengakuan para korban yang mengalami beragam perlakuan sadis tak manusiawi di pos militer yang mengambil tempat di salah satu bekas rumah penduduk yakni *rumoh geudong* (sekitar 30 km dari Mereudu). Pos militer ini sekaligus menjadi tempat dimana interograsi dan penyiksaan masyarakat yang ditangkap dengan tuduhan keterlibatan dirinya atau keluarganya dalam kelompok GPK Aceh.

Dalam masa pergolakan aceh pasca reformasi, setelah menguatnya kekuatan Gerakan Aceh Merdeka maka peperangan atau kontak tembak menggunakan senjata-senjata otomatis seperti AK 47 dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Pengungsi besar-besaran terjadi dari gampong-gampong yang mencari selamat, umumnya tempat pengungsian dipilih berada di jalanan negara. Mereka membangun tenda memenuhi halaman-halaman mesjid dan sekolah-sekolah. Pembakaran sekolah-sekolah dan penembakan aparat TNI-POLRI serta pegawai negeri menjadi berita harian di media lokal. Gerilyawan GAM menyebar hampir diseluruh kawasan pedalaman yang tak jauh dari pantai timur provinsi Aceh. Pidie adalah salah satunya, tempat dimana dominannya keberadaan pos-pos Brimob yang menempati rumah-rumah penduduk yang telah dikosongkan penghuninya.

Pengeledahan kampung-kampung dan dikumpulkannya kaum laki-laki, dengan kondisi yang tidak ramah sudah menjadi rutinitas. Karenanya sebagian besar kaum laki-laki saat itu, memilih meninggalkan gampong-gampong untuk menghindari hal-hal yang membuatnya menjadi korban peperangan. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik Aceh yang mengedepankan operasi militer berlangsung dalam nama-nama berbeda seperti Darurat Militer hingga Darurat Sipil, namun suasana kehidupan masyarakat di kawasan Pidie berjalan dalam keadaan serba di tempat. Masyarakat tak berani menamam padi di sawah, ternak yang telah dipelihara tak dapat dipantau karena pengungsian massal.

Berbagai usaha perdamaian yang dimediasi berbagai pihak luar, seperti Henry Dunant Centre (HDC) tidak membuahkan hasil maksimal. Namun dialog antara perunding GAM dan Perunding Indonesia yang berlangsung intensif dibawah pengawasan lembaga asing tersebut, menandakan pendekatan dialogis mendampingi pendekatan militer yang ditempuh Jakarta.

Tabel 2.6.
Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca 1945 - 2005
terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

	Uraian
Penguasa Kebijakan	Indonesia (pusat kebijakan berada di Jakarta) Gangguan relasi kekuasaan antara agen elit lokal dan Pusat, sehingga terjadi peristiwa DII/TII dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)
Struktur	Kombinasi <i>Ulee Balang</i> -Ulama (hingga perang cumbok tahun 1946) Ulama masuk Birokrasi-Militer. (pasca 1946) Pemimpin intelektual akademik, birokrat karir (Bupati-DPRD) Stratifikasi Sosial : <i>Ulama, Birokrat, militer Ureung kaya, ureung sep pajoh dan ureung gasin</i>
Sosio-kultural (institusi level <i>gampong</i>)	periode 1945-1959, menunjukkan bahwa Institusi agama dan adat pada berbagai level di sepenuhnya menjadi sentral perhatian dan kepengikutan masyarakat. Integrasi rakyat-elit insititusi ini mendorong munculnya tindakan bersama yang berbasiskan nilai-nilai kekuasaan (martabat/harga diri), meskipun tidak terkait kepentingan religiusitas. Sejak 1979 diberlakukan uniformitas model pemerintahan Desa yang menghapus insititusi lokal pada tataran formal. Periode akhir 80-an hingga 2005 insititusi adat dan religius, <i>keuchik</i> sebagai ayah dan <i>imuem meunasah</i> sebagai ibu bagi masyarakat <i>gampong</i> diintimidasi dijadikan sasaran tindak kekerasan oleh militer dalam pencarian gerilyawan GAM pada masa DOM dan pasca DOM Pasca 1998, dimunculkan kembali institusi lokal, namun dalam suasana kehilangan orientasi akibat kebijakan represif militer
Ekonomi Masyarakat	Dalam aktifitas sebagian turut berperang, sebagian lainnya tetap bekerja memenuhi kebutuhan hidup dengan mengolah sawah, kebun dan laut. Disamping itu perkembanganspesialisasi pekerjaan mendorong terbukanya pekerjaan sebagai pedagang dan sebagai tukang bangunan. Sebagian yang terdidik menjadi ulama, birokrat, militer dan polisi dan guru Perdagangan internasional telah hilang. Beberapa nelayan kaya, membuka hubungan dagang dengan tauke eksportir di Medan. Akhir tahun 90-an, dengan keahlian seorang interpreneur tani, dilakukan budidaya produksi melon dan beberapa tanaman non padi lainnya. Namun belum berorientasi perdagangan luar negeri atau ke luar Aceh.

2.3.5. Situasi Pidie setelah tahun 2005

Kondisi aman mulai dirasakan masyarakat Pidie setelah kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan elit GAM yang diletakkan dalam butir-butir Kesepakatan Damai Helsinki yang diperoleh pada akhir tahun 2005. Seiring dengan itu, melalui isu pemekaran kabupaten otonom baru yang bernama Pidie Jaya mulai diketahui publik di sekitar tahun 2004, 2005 dan 2006. Saat mana

ketika itu, isu pemekaran kabupaten Pidie sedang berlangsung penggodokannya secara politis dan administratif. Tercatat tidak ada penolakan atau upaya untuk menggagalkan pembentukan daerah otonom baru yang dari elit-elit di kabupaten Pidie.

Dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan, maka sebutan “pidie” masih harus tertera pada nama daerah otonomi pemekaran ini. Penambahan kata “jaya” dipilih untuk membedakan sekaligus sebuah harapan dari praktek pemekaran yang dilakukan oleh sebagian elit Pidie yang berada di kawasan ini. Secara resmi Pidie Jaya menjadi kabupaten yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 2007 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 dengan batas-batas wilayah masing-masing dari sebelah utara dengan selat malaka, sebelah selatan dan barat dengan kabupaten Pidie, serta sebelah timur dengan kabupaten Bireuen.

Nama yang menandakan upaya untuk memajukan masyarakat Pidie yang berusaha memajukan kehidupannya menunjukkan hasil yang lebih baik dari keadaan kabupaten induknya. Dalam dua tahun terakhir, kabupaten ini meraih predikat kabupaten pemekaran terbaik versi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fenomena ini diduga terkait dengan kemampuan Gade Salam dalam memimpin manajemen tata kelola pemerintahan. Latarbelakangnya sebagai politisi lokal di DPRD Provinsi. Kemenangannya dalam ajang pemilihan kepala daerah melalui partai Partai Aceh (PA) yang merupakan langkah integrasinya ke dalam wadah organisasi politik yang berlatar perjuangan institusi GAM.

Tabel 2.7.

**Ikhtisar Keadaan Sosial Masyarakat Pidie Pasca Tahun 2005
terkait Dinamika Struktur Sosial dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat**

	Uraian
Penguasa Kebijakan	Indonesia (pusat kebijakan berada di Jakarta) Berlaku Otonomi khusus, dengan UU Nomor 11/2006 Aceh dipimpin oleh tokoh Aceh dari elemen GAM yang menang pada Pemilu lokal
Struktur	Gubernur/ Kepala Pemerintahan Aceh/DPR Aceh, Bupati dan DPR Kab/Kota yang didominasi tokoh Aceh mantan GAM Stratifikasi sosial : Birokrasi, Politisi (anggota DPR Aceh-Kab/Kota),

	militer/polisi, Pengurus KPA-Pengusaha mantan GAM, <i>Ureung kaya, Ureung Sep Pajih dan ureung gasin</i>
Sosio-kultural (institusi level <i>gampong</i>)	Secara formal, institusi adat dan agama seperti Keuchik, imuem meunasah, Dibantu Tuha Peut, Kejrueu Blang, Peutua Seuneubok hadir melayani rutinitas masyarakat. Tindakan-tindakan yang terbangun dari institusi ini bersifat tradisional. Tidak transformatif terhadap tuntutan keadaan lingkungan. Tokoh-tokoh agama dan adat di level lebih atas dari <i>gampong</i> , tak mampu mentransformasikan nilai adat dan agama untuk menjawab permasalahan sosial masyarakat, seperti lemahnya motivasi kepentingan yang melandasi tindakan kerja, disamping karena rendahnya integritas ketokohan (agent of change), tak ada kapasitas juga kehilangan sensitifitas sosial. Tindakan individu ataupun kolektif -masyarakat memerlukan sebuah kepentingan individual-bersama yang besar, bagi masyarakat Aceh kepentingan itu hanya terdapat dalam isu agama dan keadilan/ martabat/ harga diri. Hilangnya musuh agama-ketidakadilan yang disimbolkan dengan Belanda-kebijakan represif Jakarta, tidak diisi dengan kehadiran musuh bersama yang “baru” seperti kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan yang menjadi salah satu pangkal dari krisis akidah keagamaan, martabat dan harga diri.
Ekonomi Masyarakat	Masyarakat bekeja memenuhi kebutuhan pokok dengan bekerja mengolah sawah, kebun dan laut. Sebagian lainnya lebih memilih untuk menjadi birokrat, militer, polisi atau politisi di legislatif, pedagang, kontraktor, pengusaha industri kuliner. Sementara itu, nelayan kaya berusaha ekspansi ke bidang pertanian, usaha burung walet dan properti. Birokrat/politisi ekspansi ke bidang pertanian/ perikanan

2.3. Kerangka Pemikiran

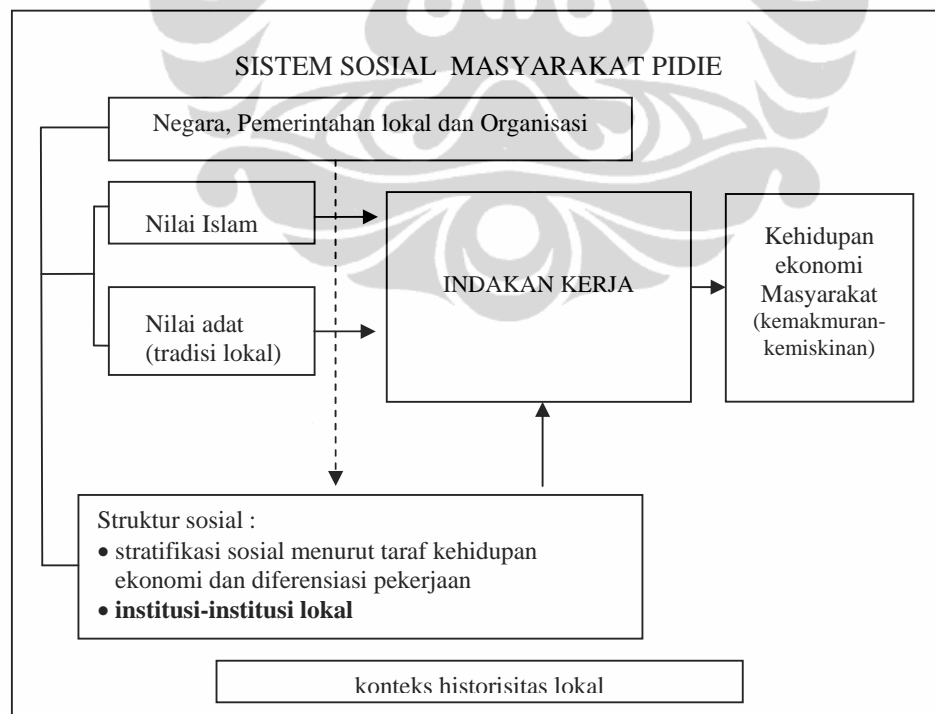
Dalam khasanah ilmu pengetahuan sosial, pemikiran ilmiah menyangkut tautan antara agama, adat dan derajat kehidupan ekonomi masyarakat selalu menarik untuk dibahas. Agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha merupakan ajaran agama yang hadir dan diterima oleh masyarakat setelah masyarakat berhubungan dengan para pedagang atau pendatang. Sebelumnya, di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri telah ada nilai-nilai adat tradisi masing-masing.

Di dalam ajaran agama-agama tersebut terdapat seperangkat nilai-nilai spiritual ideal yang mengajarkan dan mengarahkan sehingga pemeluknya berada dalam kebaikan dan keharmonisan secara hubungan horizontal dan vertikal. Nilai itu menjadi standar bagi masyarakat dalam bertindak. Sejalan dengan itu, agama yang mengajarkan mana perbuatan yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah serta perbuatan yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan yang dilarang untuk dilakukan. Semua nilai itu mendominasi nilai-nilai kehidupan

masyarakat pemeluknya, sehingga dalam keadaan ini nilai-nilai adat kebiasaan yang sebelumnya eksis mengalami penyesuaian sehingga dianggap tidak bertentangan dengan ajaran agama yang menjadi pegangan hidup mereka.

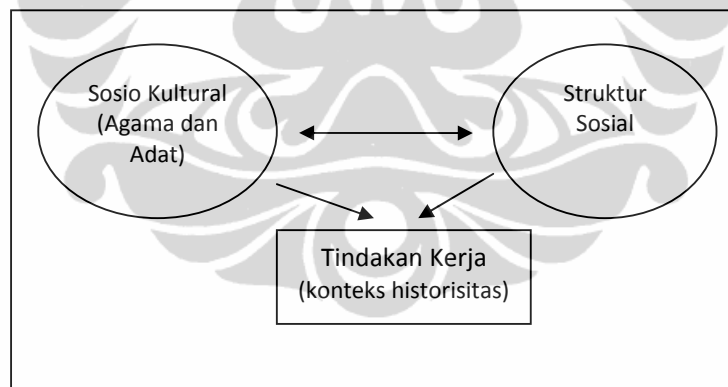
Dalam konteks ini, menarik untuk mencari sebab musabab munculnya gejala sosial mengaitkannya dengan seperangkat nilai agama dan adat tradisi yang mengikat tindakan masyarakat itu sendiri. Seperti persoalan dominasi kemiskinan pada sebuah komunitas masyarakat yang mayoritas beragama Islam, sebuah hal paradoks bila menilik pada ajaran Islam yang secara normatif mendorong penganutnya untuk berperilaku kerja keras dan memiliki kekayaan materi untuk menunjang hubungan vertikal dan horizontal.

Disisi lain, fenomena rendahnya derajat kehidupan ekonomi ditengah gambaran sosok masyarakat yang menonjolkan ciri-ciri telah mentradisinya praktek kerja keras di dalam mengolah sumber-sumber alam menjadi persoalan tersendiri. Dalam mendalami persoalan ini, penulis mencoba membuat skema pemikiran sebagai kerangka pikir dengan mengambil konsep-konsep teoritik yang dianggap relevan dengan studi sebagaimana tergambar di bawah ini :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran tentang Tindakan Kerja Masyarakat Pidie

Disamping itu, peneliti merasa perlu membuat sebuah kerangka konseptual tersendiri untuk memudahkan peneliti mendapatkan keterkaitan antara agama, adat dan kemiskinan dalam kehidupan masyarakat Pidie. Peneliti berupaya memberi arti kemiskinan, adat dan agama menurut pemahaman peneliti sejalan dengan hasil peninjauan kondisi lapangan. Kondisi masyarakat miskin di kawasan Pidie lebih merupakan perwujudan dari kondisi kebiasaan hidup sederhana dengan tidak mengekspos kondisi kepemilikan aset yang sesungguhnya. Adat yang dijadikan rujukan adalah kebiasaan yang sudah mentradisi, sedangkan agama lebih merupakan tatanan ritual keyakinan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah-ibadah wajib yang bersifat rutin. Secara sederhana dalam sebuah kajian keterkaitan agama, adat dan kemiskinan atau kekayaan yang dilihat dari perilaku kerja masyarakat Pidie itu sendiri, peneliti merangkai pemahaman tersebut dalam kerangka konsep berikut :



Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Tindakan Kerja Masyarakat Pidie

2.3.1. Pertautan agama dan kemiskinan.

Agama Islam yang didalamnya termuat nilai-nilai yang mendasari suasana kebatinan pemeluknya terhadap cara memandang dunia dan segala hal yang terdapat di dalamnya, telah mewujudkan berbagai kondisi. Namun pada dasarnya nilai-nilai yang termuat mengarahkan perilaku pemeluknya untuk bertindak dan berpikir positif serta menghindari hal-hal negatif. Seperangkat norma-norma

tersebut dapat berlaku efektif dan berfungsi menjadi landasan penganutnya dalam berpikir dan bertindak, apabila agama tak hanya dipahami seperangkat dogma. Agama memerlukan artikulasi dinamis yang mengikuti keadaan dan perkembangan zaman.

Kemiskinan merupakan wujud akhir dari berbagai kondisi masyarakat yang telah dilalui masyarakat. Didalamnya terdapat nilai kultural yang terkait dengan berbagai masalah struktural kehidupan lainnya. Dalam keadaan rumit tersebut, masyarakat memahami agama dalam berbagai level tingkatan. Karenanya apabila tidak mampu ditransformasikan dan diartikulasikan dalam bahasan-bahasa yang sederhana dan disertai contoh-contoh bentuk perbuatan produktif dari para elit ulama maka tak dapat dihindari bahwa agama berada dalam area pasif untuk merubah masyarakat ke arah yang diharapkan.

2.3.2. Pertautan adat tradisi kebudayaan dengan kemiskinan masyarakat

Kemiskinan dan adat tradisi kebiasaan dapat saja saling terkait, dengan dasar pemikiran bahwa kemiskinan adalah wujud dari akumulasi serangkaian tindakan yang ditunjukkan oleh masyarakat di mana adat kebiasaan itu terpelihara. Secara tradisi masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan bekerja mencari nafkah serta melakukan pengeluaran-pengeluaran menurut apa yang dilihat dan diwarisinya dari generasi terdahulu. Sulit memperoleh hal-hal baru atau terbososan berupa perubahan di dalam masyarakat yang jauh dari kontak sosial dengan masyarakat luar diri mereka sendiri.

2.3.3. Kemiskinan dan struktur sosial masyarakat Pidie

Bagaimanapun juga, masyarakat menjalani kehidupan secara dinamis dan selalu beradaptasi dengan struktur sosial yang terdapat di sekeliling mereka. Dalam keadaan ini, masyarakat tak dapat menghindari apabila dihadapkan dengan kekuatan makro yang mengkondisikan kehidupan mereka sedemikian rupa. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang digagas belum dapat memperoleh hasil yang diharapkan karena struktur sosial tidak mendapat

sentuhan. Sementara struktur sosial yang tidak *pro* terhadap kemajuan masyarakat sudah sekian lama terbentuk.

Dari uraian tinjauan kepustakaan di atas, maka dapat dirangkukan pementaan teoritik yang akan peneliti jadikan landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan tindakan kerja masyarakat Pidie terkait nilai yang dianut dan kontribusi aspek lainnya.

Tabel 2.8
Iktisar Pemetaan Teori sebagai Landasan Analisis dan pengembangan Teoritik

Penulis	Fokus Studi (fokus analisa)	Konsep/ teori yang digunakan	Temuan/ Thesis	Digunakan untuk menganalisis
Granovetter (2005)	Tindakan ekonomi melekat dengan konteks hubungan sosial	Keterlekatan sosial (<i>embeddedness</i>)	Bahwa individu melakukan tindakan ekonomi selalu menunjuk konteks hubungan sosialnya. Tindakan ekonomi selalu terletak dan dipengaruhi oleh budaya, institusi-institusi dan struktur sosial. Tindakan ekonomi merupakan tindakan yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor ekonomi. Perilaku ekonomi yang diperhatikan tidak hanya pada tindakan aktor semata, namun meluas hingga institusi ekonomi dan penetapan harga yang ada dalam suatu jaringan hubungan sosial. Jaringan sosial yang dimaksud menunjuk pada rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok.	Dipakai dalam menganalisis data terkait rumusan pertanyaan penelitian : “Bagaimana tindakan kerja masyarakat Pidie?”

Penulis	Fokus Studi (fokus analisa)	Konsep/ teori yang digunakan	Temuan/ Thesis	Digunakan untuk menganalisis
Kluckhohn (1961)	Analisa makna dalam budaya dengan pendekatan lima masalah pokok	Konsep Makna.	Terdapat lima penekanan dalam menemukan makna : 1) hakikat dari hidup manusia, 2) hakikat dari karya manusia, 3) hakikat dari kedudukan manusia dari ruang dan waktu, 4) hakikat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya dan, 5) hakikat dari hubungan manusia dengan sesamanya	Untuk mendapatkan pemahaman tindakan yang lebih dalam maka perlu analisis elaborasi data-data, sehingga mengungkap makna kehidupan menurut pandangan subyektif masyarakat Pidie
Koentjaraningrat (1974)	Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan	Sistem sosial budaya merupakan pedoman tertinggi bagi masyarakat dalam berperilaku	Mentalitas pembangunan masyarakat Indonesia sebagian diantaranya menghambat pembangunan. Mentalitas yang sudah mengakar dalam tradisi bangsa seperti sikap lebih berorientasi ke arah tokoh pembesar, atasan atau senior. Berorientasi pada pemeliharaan simbol-simbol status sosial. Disamping itu, di kalangan petani mengemuka prinsip <i>sama rasa-sama rata</i> Mentalitas yang muncul akibat kehilangan orientasi pasca revolusi : 1) sifat mentalitas yang meremehkan mutu	

			dalam bekerja dan berkarya, 2) sifat mentalitas yang suka menerabas, ingin mencapai kesenangan hidup tanpa melalui proses yang seharusnya, 3) sifat mentalitas yang tidak percaya kepada diri sendiri, 4) sifat mentalitas yang tidak berdisiplin murni, masyarakat untuk taat peraturan saat diawasi oleh pihak yang disegani dan sebaliknya 5) sifat mentalitas yang mengabaikan tanggung jawab pribadi yang kokoh.	
Nee (2005)	Integrasi hubungan antara level makro-meso-mikro dalam kegiatan ekonomi	Lingkungan kebijakan (<i>formal rules</i> -institusi formal) Organisasi sosial- <i>informal rules</i> Kelompok sosial – individu	Keberhasilan integrasi hubungan antara institusi formal (lingkungan kebijakan) dengan institusi informal dan <i>informal rules</i> di level meso dan level mikro akan menghasilkan insentif ekonomi. Sebaliknya dapat terjadi kegagalan (<i>decoupling</i>) jika kegiatan ekonomi tidak didukung oleh integrasi hubungan <i>formal rules</i> dan <i>informal rules</i> .	Dipakai untuk menganalisis data terkait rumusan pertanyaan penelitian “Bagaimana keterpautan tindakan kerja masyarakat Pidie dengan nilai Islam dan nilai adat?”
Geertz (1997)	Perubahan Sosial Ekonomi	Kaitan perilaku ekonomi dengan nilai masyarakat	kebudayaan yg berbeda. Tesis utamanya adalah adanya perubahan sosial yg memungkinkan munculnya <i>economic rationality</i> akibat tumbuhnya nilai-nilai baru semacam <i>economic ethic</i> yg memainkan perannya dlm kehidupan sosial ekonominya masyarakat berlatar pasar (mojokuto) dan ningrat (Tabanan). Perubahan ditandai komersialisasi pertanian, munculnya perusahaan. terbuka basis	

		kekerabatan dan penghargaan terhadap keterampilan. Perubahan berlangsung gradual dan memberikan lompatan pada munculnya enterpreneur.
--	--	---

Merujuk pada fokus studi yang telah ditetapkan maka sesuai dengan hasil-hasil studi terdahulu beserta literature review maka pengembangan penelitian ini dilandasi kerangka teori yang di dasari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan Granovetter (2005) tentang konsep *embeddedness* dalam tindakan sosial, pemikiran Kluckhohn (1961) menyangkut lima penekanan hakekat dalam menemukan makna, pemikiran Koentjaraningrat (1974) mengenai mentalitas perilaku masyarakat dalam pembangunan, Nee (2005) tentang *The New Institutionalisms Economic* dan Hurgronje (1985) mengenai kehidupan sosial masyarakat Aceh menurut agama dan adat budaya lokal, dan Pemikiran Geertz (1997) mengenai perubahan ekonomi masyarakat akibat tumbuhnya nilai-nilai baru pada masyarakat adat dan masyarakat religius.

Teori-teori itu merupakan hasil studi yang akan diterapkan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan kesesuaian atas aspek ruang dan tempat yang di lokasi penelitian beserta pertimbangan kesesuaian aspek waktu yang diselesaikan dengan situasi kekinian saat studi ini berlangsung. Secara substansi, teori yang akan diterapkan semaksimal mungkin menggambarkan keinginan peneliti untuk mengisi celah kosong (*gap*) sebagai bagian atau aspek yang tidak menjadi fokus pada studi-studi sebelumnya.



BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3. 1. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan ragam tipe studi kasus sebagai sebuah pilihan yang diambil merujuk pada tujuan penelitian itu sendiri, yakni untuk memperoleh pemahaman mendalam atas dinamika kehidupan masyarakat Pidie yang sebagian besar masyarakatnya berada dalam kondisi miskin. Paling tidak hal itu, ditunjuk oleh data kemiskinan yang dikeluarkan institusi pemerintah. Pemahaman tersebut dirangkai dalam sebuah ketertautannya dengan agama dan adat tradisi yang berlaku dalam masyarakat Pidie yang dikenal memiliki semboyan kebersenawaan antara agama dan adat. Dengan demikian peneliti berangkat dari asumsi ontologis bahwa realitas yang ada bersifat subyektif dan beragam sebagaimana yang difahami oleh informan. Dalam hal ini kebenaran merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial (Creswell, 2003). Sebagai sebuah studi yang induktif, peneliti berusaha menghindari dari sejumlah hubungan antar sejumlah konsep kemiskinan, agama dan adat yang telah ada sebelumnya. Di dalam studi ini, justru peneliti berkeinginan kuat untuk menggambarkan subyek penelitian secara rinci dan akurat terkait dengan fenomena tersebut.

Dalam kerangka tersebut, peneliti berusaha meningkatkan kualitas studi ini dengan melakukan beberapa upaya. Pertama, peneliti berusaha terlibat secara luas dan mendalam dengan kehidupan masyarakat di lokasi penelitian. Peneliti terlibat dalam keseharian masyarakat, berdialog dalam kondisi terbuka dalam berbagai ragam kesempatan yang tersedia di antara ragam aktifitas informan. Dalam kesempatan-kesempatan tersebut peneliti memanfaatkan untuk melihat langsung kondisi kemiskinan masyarakat, dilihat dari kecukupan ketersediaan tiga kebutuhan dasar berupa sandang, papan dan pangan. Kedua, Peneliti memperluas wilayah pengamatan dengan mengikuti dan menelesuri rangkaian kegiatan masyarakat yang tak jarang melewati batas-batas wilayah lokasi penelitian. Penelusuran ini penting bagi peneliti untuk mendapatkan informasi yang utuh

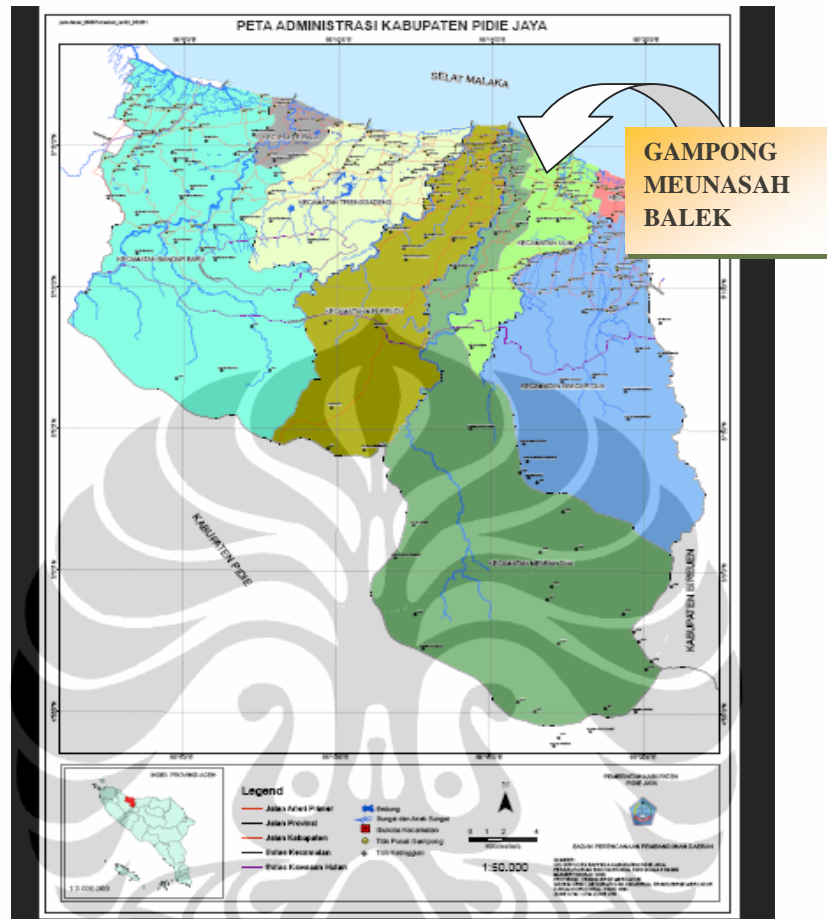
menyangkut dengan data awal yang diberikan informan. Misalnya, peneliti mengikuti rombongan masyarakat yang hendak menghadiri undangan kegiatan maulid di beberapa gampong tetangga atau menelusuri keberadaan dan peneliti juga mengikuti aktifitas informan yang lokasi sawah garapannya berada di wilayah gampong lainnya. Ketiga, perluasan perhatian dari proses mikro ke kondisi makro dan lintas waktu. Maksudnya, peneliti berusaha menghindari perangkap kurungan yang memandang bahwa kondisi sosial masyarakat seolah berada dalam sebuah ruang vakum yang semata-mata diisi oleh seperangkat nilai agama dan adat yang relevan dengan seperangkat dogma agama. Masyarakat Pidie yang telah menjalani kehidupan sosial dalam rentang waktu yang panjang, perlu peneliti perhatikan untuk melengkapi sikap yang ditunjukkan mereka dalam memandang kehidupan dunia. Keempat, perluasan teori. Dalam sepanjang proses penelitian, berbagai hal yang peneliti nilai sebagai suatu kebaruan maka perlu disempurnakan. Dalam hal ini peneliti melakukan upaya-upaya dialogis baik antara peneliti dengan informan, maupun antara proses mikro dengan kekuatan makro dan yang yang tak kalah penting adalah dialog antara data lapangan dengan teori. Karenanya, peneliti berusaha memberi tempat bagi ruang diskusi pada bagian akhir bab bahasan, terutama pada bab-bab yang menyajikan data lapangan terkait dengan pertanyaan penelitian. Bersamaan dengan itu, untuk dialog antara data lapangan dengan teori-teori relevan dapat dilihat pada bab yang menyajikan diskusi, refleksi dan implikasi teoritis.

3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu berbeda, pertama kali peneliti turun lapangan untuk tahap pertama berupa peninjauan penelitian pendahuluan berupa pengamatan kelayakan studi atas keadaan terkini kondisi masyarakat Pidie Jaya pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2009. Penelitian pendahuluan mendorong peneliti memilih Gampong Meuasah Balek Kemukiman Meuredu dalam Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya sebagai lokasi tempat dimana penelitian lapangan berlangsung. Selanjutnya, setelah proposal penelitian disetujui maka peneliti turun ke lokasi penelitian untuk

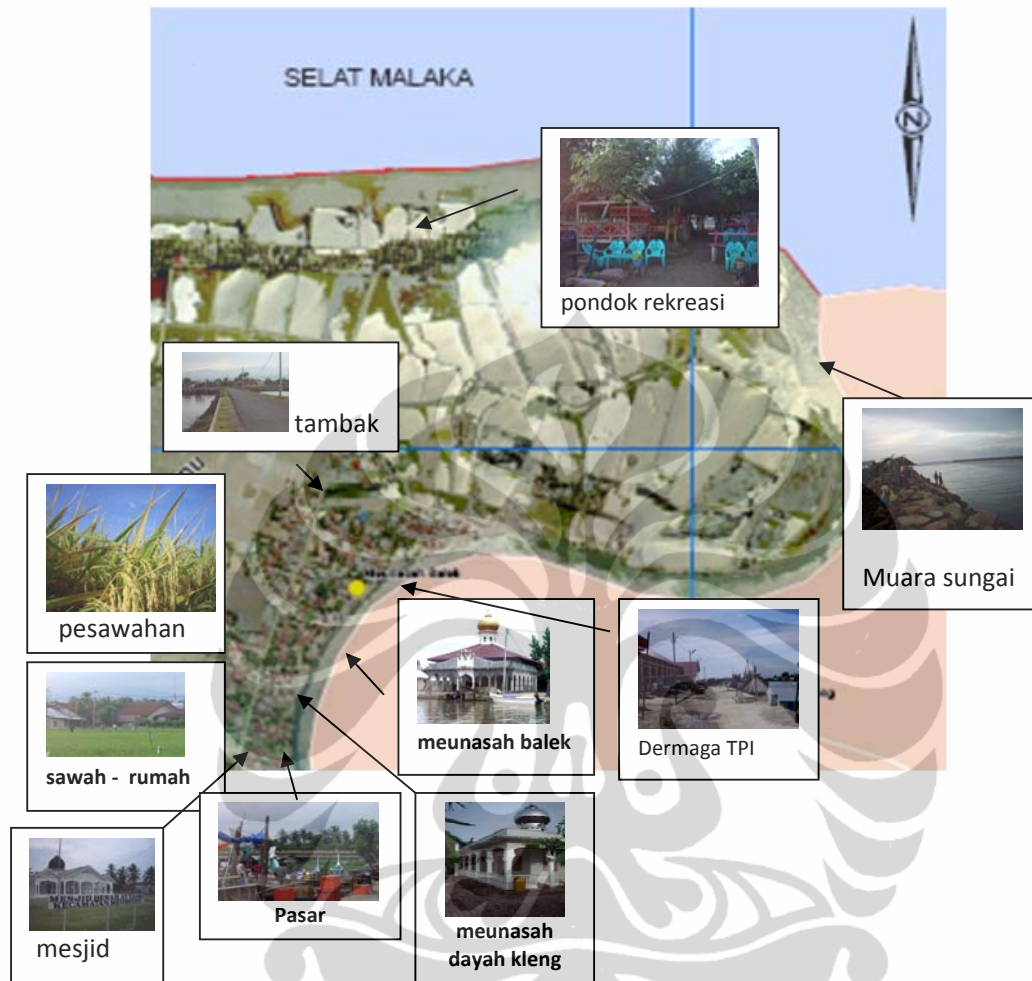
melaksanakan pengumpulan data di lapangan. Proses pengumpulan data ini berlangsung pada akhir bulan Januari sampai dengan hingga pertengahan Juni 2011, saat mana peneliti merasa bahwa data-data yang diperlukan telah dapat dikumpulkan sesuai rencana. Beberapa peristiwa yang berlangsung selama peneliti berada di lapangan sangat membantu peneliti dalam memperoleh data lapangan, seperti berlangsung panen raya dan ritual aktifitas *maulod*.

Penelitian ini berlangsung di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Sebuah gampong yang berada di pusat pemerintahan kabupaten, lokasinya berhimpitan langsung dengan pusat keramaian keude Meureudu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai ibukota kabupaten Pidie Jaya. Sebuah kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten induknya, yakni kabupaten Pidie yang beribukota Sigli, dengan waktu tempuh normal sekitar 1 jam dari Meureudu. Gampong Meunasah Balek, dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai lokasi dimana di dalamnya terdapat heteronitas masyarakat, baik dipandang dari sudut mata pencaharian maupun keberadaan sekelompok masyarakat keturunan india yang telah menetap lama. Di dalamnya terdapat masyarakat yang kaya dengan pekerjaan sebagai pedagang, dan sebagian lainnya masih hidup sederhana bila tidak disebut miskin dengan pekerjaan pokok sebagai nelayan atau petani.



Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pidie Jaya dan Lokasi Penelitian

Gampong Meunasah Balek diapit oleh laut, sungai, persawahan dan pertambakan. Sebuah jalan kecamatan membelah pemukiman padat, yang ujung dari jalan ini akan berhenti pada muara sungai meureudu. Muara sungai ini menjadi alur masuk kapal boat nelayan dan saat ini telah dipasang batu bronjong untuk melindungi dari abrasi. Secara umum, lokasi Gampong Meunasah Balek tergambar sebagai berikut :



Gambar 3.2 Peta Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Pemukiman penduduk Gampong Meunasah Balek Dayah Kleng tergolong padat, dikelilingi oleh sentra-sentra kegiatan ekonomi barang dan jasa potensial. Diantaranya terdapat tempat pendaratan ikan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat perbaikan kapal pencari ikan milik nelayan. Penduduk setempat lebih akrab menyebut tempat itu dengan sebutan “TPI”.



Gambar 3.3. Jalan kecamatan melintasi Gampong Meunasah Balek, menghubungkan pantai wisata “*manohara*” Meunasah Balek, dengan dan keude Meureudu. Tambak air payau di sisi kiri dan kanan jalan.

Gampong Meunasah Balek adalah salah satu gampong yang berada di daerah aliran sungai krueng Meureudu. Letak posisi gampong yang demikian rupa, mengakibatkan terjadinya keragaman jenis pekerjaan penduduknya. Diantara mereka ada yang menjadi pegawai negeri atau pejabat publik, pedagang, petani sawah, petani tambak dan nelayan. Keragaman pekerjaan tersebut mendorong terbentuknya kelompok sosial yang merujuk kepada derajat keadaan ekonomi atau kepemilikan materi harta kekayaan. Kelompok sosial menurut diferensiasi pekerjaan menjadi titik perhatian utama peneliti dalam mendalami perilaku kerja masyarakat dengan mengamati dinamika kehidupannya yang dijalannya sehingga menimbulkan dampak ekonomi menurut hasil capaian atau perolehan materi kekayaan.

Gampong ini memiliki keunikan, sehingga karenanya pemerintah setempat telah menambalkan nama perkampungan tradisional bagi Gampong Meunasah Balek. Pertimbangannya adalah di sini terletak beberapa peninggalan rumah adat Aceh milik masyarakat. Beberapa “*rumoh adat aceh*” dijadikan sebagai tempat

pusat budaya lokal yang telah mengalami pemugaran, sehingga setiap tamu luar daerah bisa mengunjungi tempat ini sebagai tempat yang memiliki nilai historis dan budaya.

Sarana dan prasana umum yang terdapat di gampong diantaranya dua meunasah tempat beribadah dan tempat bermusyawarah, satu kantor keuchik yang terlihat jarang digunakan sebagaimana layaknya kantor kepala desa yang terdapat di pulau Jawa. Ruas-ruas jalan kecamatan melewati gampong ini dan di sela-sela pemukiman terdapat jalan beton yang terbangun dengan baik. Kondisi rumah penduduk terdiri dari 292 unit rumah beton dengan atap seng, 25 unit rumah beton dengan atap genteng, 8 unit rumah kayu dengan atap rumbia dan 8 unit rumah kurang layak. Seluruh keluarga memiliki rumah tempat tinggal.

Untuk menunjang pendidikan anak-anak, terdapat fasilitas pendidikan di gampong ini dan kawasan sekitarnya yaitu masing-masing satu unit sekolah setingkat Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 unit, MIN, TPA atau Balai Pengajian Anak dan MAN. Untuk menunjang layanan kesehatan masyarakat, disamping tersedia Puskesmas yang berjarak sekitar 1 km dari gampong, juga terdapat unit polindes.

Pendapatan penduduk di atas terbagi atas beberapa mata pencaharian pokok, seperti tergambar berikut :

Tabel 3.1
Jenis Pekerjaan Penduduk Gampong Meunasah Balek Tahun 2010
Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pengangguran	28
2	Petani tambak	85
3	Petani sawah	120
4	Pedagang	100
5	Penjaga toko	15
6	Kontraktor	12
7	Nelayan	394
8	Pembantu rumah tangga	10
9	Pegawai negeri sipil	54
10	Pegawai swasta	19
11	Buruh	20
12	Supir	3
13	Tukang kayu	10
14	Pekebun	7

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Diantara ciri khas bidang wira usaha di gampong ini adalah adanya galangan perbaikan kapal penangkap ikan dan rumah produksi kue khas Pidie yang disebut kue *adee* yang telah dikelola secara moderen dan memiliki pangsa pasar menjanjikan. Kue jenis ini terjual sekitar 2.400 kue per bulan yang diproduksi oleh sekitar 6 tempat industri rumah tangga, dengan kemampuan serap tenaga lokal sekitar 60 orang. Selain itu, warung-warung sederhana menjual lauk pauk siap saji dengan ragam hidangan khas daerah ini seperti basi bryani, nasi lemak, kuah *dalicha* dan *mie caluk*. Ragam jenis pekerjaan di atas dilakukan oleh penduduk Gampong Meunasah Balek berbasis pendidikan penduduk sebagai berikut :



Gambar 3.4. Galangan Perbaikan dan Pembuatan Kapal Penangkap Ikan di TPI Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya

Di dalam gampong ini terdapat satu dusun yang memiliki keunikan karena keberadaan meunasah tersendiri yang disebut meunasah Dayah Kleng. Menurut jejak sejarah, perkampungan ini ditandai dengan keberadaan warga berketurunan India. Leluhur para warga gampong yang berperawakan khasnya masyarakat hindustan, pada awalnya hadir karena misi perdagangan rempah-rempah di pusat kegiatan ekonomi negeri Meureudu. Jejak pangkalan perdagangan armada kapal laut masih terasa hingga kini dengan keberadaan sungai Krueng Meureudu yang dapat dilalui kapal-kapal besar. Posisi perkampungan Dayah Kleng terdapat di sisi

sungai Krueng Meuredu dan relatif tidak jauh dari muara sungai Krueng Meuredu atau tepian pantai yang hanya berkisar 500 meter.

Kelak para pendatang dari India, menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat hingga meneruskan sebagian tradisinya dalam hal makanan khas racikan India. Diluar dari itu, saat ini para warga gampong yang keturunan India ini seluruhnya beragama Islam dan berbaur dalam berbagai ragam aktifitas, tapi kebanyakan dari mereka bermata pencaharian dari berdagang di pusat pasar Meuredu.

Posisi strategid gampong yang didukung oleh komposisi penduduk usia kerja yang mendominasi jumlah penduduk di gampong ini,

Tabel 3.2
Jumlah penduduk Gampong Meunasah Balek Tahun 2010
Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

Tingkat usia	Wanita	Pria	Total
0 - 12 bulan	17	23	40
1 - 5 tahun	93	102	195
5 - 7 tahun	112	101	213
7 - 15 tahun	103	107	210
15 - 56 tahun	309	442	751
56 - 60 tahun	69	73	142
Jumlah	703	848	1551

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Dengan mayoritas penduduk berusia kerja, maka gampong ini dapat dikatakan termasuk sasaran masyarakat usia pekerja bertempat tinggal. Selain dari penduduk asli gampong meunasah balek, ditemukan beberapa kepala keluarga sebagai pendatang. Namun mereka tidak bergitu asing dengan penduduk asli gampong ini, sebab sebelumnya mereka bertempat tinggal di gampong-gampong sekitar Meuredu yang telah saling mengenal satu sama lain.

Tingginya jumlah penduduk usia kerja terbagi atas beberapa bidang mata pencaharian atau pekerjaan. Namun, sebagian besar penduduk usia kerja menggantungahkan harapannya meraih pendapatan dengan bekerja sebagai pedagang, nelayan, petani, tukang bangunan, pegawai pemerintah. Sedikit dari

angkatan kerja usia muda mau melaksanakan pekerjaan petani karena pendapatan yang diperoleh tidak dapat dinikmati secara langsung. Sebagian besar diantara mereka, mulai mengenal pekerjaan sebagai nelayan atau pedagang, mengingat hal itulah yang langsung terlihat saat mereka masih anak-anak hingga tumbuh menjadi remaja. Posisi Meunasah Balek yang diapit oleh sungai lalulintas kapal-kapal nelayan, bahkan kapal penangkap ikan sering ditambat di sepanjang sungai yang berada di gampong ini.

Kebiasaan hidup masyarakat tradisional nelayan, yang masih terlihat dari kebiasaannya untuk membangun rumah tempat tinggal secara berdekatan dengan pola berdekatan satu sama lain dapat ditemui di gampong ini. Namun, kehidupan mereka tercampur dengan gaya hidup masyarakat non nelayan yang juga bertempat tinggal di kawasan ini. Namun secara umum, tidak terdapat pemisahan di antara mereka. Kebersamaan terbangun karena kedekatan kekerabatan antar mereka. Mereka bersama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal setiap hari Jumat pagi. Kebersamaan terlihat juga pada agenda kegiatan pengajian rutin kelompok pria pada malam minggu. Bagi penduduk perempuan, diadakan wirid rutin yang dilangsungkan pada malam jumat dan malam rabu.

3.3. Posisi dan Peran Peneliti

Dalam penelitian jenis pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama. Peneliti merasa sangat terbantu dan memiliki keuntungan karena latar belakang peneliti yang keturunan Aceh dan tumbuh besar dalam lingkungan masyarakat di pesisir pantai timur Aceh. Mereudu adalah tempat dimana Peneliti pernah bertempat tinggal antara tahun 1981 hingga 1983, dan untuk tahun-tahun berikutnya peneliti mendatangi Meureudu secara berkala untuk kepentingan hubungan kekerabatan.

Latar itu membuat peneliti menguasai bahasa Aceh secara aktif dan memahami kondisi masyarakat Pidie menurut norma dan adat tradisi kebiasaan yang berlaku sehari-hari. Kondisi tersebut, menjadikan peneliti mudah

membangun *rapport* dengan para informan, sehingga masyarakat di lokasi penelitian bersikap kooperatif dan terbuka dalam memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan baik dalam wawancara terbuka yang mengikuti pedoman pertanyaan atau diskusi terbuka dalam berbagai kesempatan yang tersedia. Keadaan ini membuat peneliti memiliki data dan informasi verbal yang kaya dan mendalam.

Disisi lain, status kekerabatan dan kedekatan peneliti dengan subyek penelitian membuka peluang *bias* pada diri peneliti dalam mengintepretasikan, menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data serta informasi yang berhasil peneliti kumpulkan selama penelitian. Karena itu, peneliti berupaya berposisi sebagai *stranger* untuk mengimbangi kedudukan peneliti yang relatif dekat dengan subyek. Dalam beberapa kesempatan tertentu peneliti, dalam keadaan mana peneliti terpanggil untuk memberikan pencerahan intelektual maka peneliti mengambil posisi sebagai partisipan terlibat.

Perlu dikemukakan disini bahwa meskipun sebagian informan mengetahui latar belakang peneliti yang masih memiliki hubungan kekerabatan, namun beberapa informan memiliki sikap berhati-hati karena sisa-sisa pandangan curiga akibat konflik yang berkepanjangan. Sebagian yang lain, menduga penelitian terkait dengan survey-survey lembaga donor yang berimplikasi dengan bantuan modal bagi pengembangan ekonomi masyarakat korban konflik dan korban tsunami.

3.4. Pengumpulan Data

Data penelitian ini bersifat kualitatif dan terdiri dari data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan sebagian besar data primer dari wawancara mendalam (*in-depth interview*), namun sebagian data primer lainnya peneliti peroleh dari diskusi-diskusi informal yang berlangsung dengan beberapa informan dalam berbagai kesempatan yang tersedia. Peneliti tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai diskusi informal yang sering kali tercipta secara spontan. Hal tersebut tak terlepas dari kebiasaan

masyarakat yang gemar berkumpul dan bercerita satu sama lain, sebuah kondisi yang menguntungkan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan terlibat langsung dalam perbincangan-perbincangan yang mengalir sesuai keinginan mereka.

Berbeda dengan wawancara mendalam, peneliti berusaha menggali pengalaman dan pemahaman subyektif mengenai isu keterkaitan kemiskinan, agama dan adat tradisi yang melingkupi kehidupan mereka. Bila diskusi terbuka berlangsung dalam nuansa spontan dan bebas materi perbincangan, maka dalam wawancara mendalam peneliti meminta waktu dan kesediaan informan secara khusus dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menurut pedoman wawancara yang telah peneliti siapkan (terlampir). Meskipun demikian, peneliti tidak menutup diri untuk mengejar informasi sesuai dengan informasi yang dibuka informan. Harapannya dengan pengembangan atas jawaban informan, maka peneliti akan memperoleh informasi yang lengkap, akurat dan mendalam.

Hal yang selalu peneliti perhatikan adalah agar wawancara berlangsung terarah sesuai dengan keadaan, status dan kapasitas informan sehingga informasi yang bersifat umum dapat diraih dengan pengayaan akan informasi yang bersifat khusus. Peneliti merekam seluruh kegiatan wawancara mendalam dan membuat catatan-catatan yang dirasa perlu diperhatikan selama proses wawancara tersebut berlangsung. Rekaman tersebut peneliti salin kembali sehingga terbentuk transkrip wawancara (terlampir), namun proses perekaman tidak peneliti lakukan untuk pembicaraan dan perbincangan yang berlangsung dalam diskusi informal guna mencegah munculnya rasa ketidaknyamanan para informan yang terlibat di dalamnya.

Dalam berbagai kesempatan wawancara, informan bertutur dalam bahasa Aceh, kecuali saat berlangsung wawancara dengan Bupati Pidie Jaya, Wakil Ketua DPRK Pidie Jaya dan seorang pedagang yang sempat beberapa lama menetap di Jakarta. Unikny informan tersebut, menggunakan bahasa Aceh saat

berbicara dengan peneliti ketika berbicara sebelum dan sesudah wawancara berlangsung. Menurut pengakuan dan pengamatan peneliti, para informan merasa sungkan dan janggal bertutur bahasa Indonesia, ditengah-tengah komunitas lawan bicara yang sama-sama dianggap mampu bertutur dengan bahasa Aceh.

Secara keseluruhan peneliti melukan kegiatan wawancara mendalam dengan 28 orang informan dengan durasi waktu yang variatif antar informan. Namun waktu tersingkat peneliti catat adalah wawancara dengan pejabat politik, yakni Bupati Pidie Jaya yakni sekitar 10 menit dan waktu terlama dengan informan nelayan dan petani. Dari 28 orang informan tersebut, 5 orang diantaranya adalah perempuan dan 23 orang lainnya adalah laki-laki. Dari aspek penggolongan menurut pekerjaan, peneliti tidak dapat menarik secara tegas mereka memiliki pendapatan terbesar dari pekerjaan yang mana. Sebagian besar dari mereka memiliki lebih dari satu pekerjaan dalam menopang kebutuhan diri dan keluarganya.

Peneliti memilih informan-informan tersebut di atas dengan mengedepankan tiga isu yang menjadi perhatian utama peneliti yaitu kemiskinan atau kekayaan, agama dan adat tradisi. Dari awal peneliti menilai bahwa pengumpulan data terkait tiga isu tersebut, akan lebih terorganisir bila melihat masyarakat menurut tipologi pekerjaan utama yang dijalannya dalam aktifitas mencari nafkah. Untuk memudahkan proses pengumpulan data, secara formal peneliti mengikuti prosedur yang berlaku dengan mengurus surat izin dari pejabat di tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan hingga tingkat gampong. Memanfaatkan momentum pertemuan awal dengan pemimpin formal di gampong Meunasah Balek, peneliti diberi kesempatan untuk bertemu dengan beberapa orang pengurus gampong yang dinilai dalam membantu kelancaran proses penelitian. Tokoh *keuchik* terlihat kooperatif karena memahami tujuan penelitian dan pada saat yang sama mereka juga menerima tim peneliti dari salah satu LSM yang akan memberi bantuan pengadaan pabrik dan mesin pembuat es bagi

kepentingan penunjang ekonomi di gampong tersebut. Pihak LSM tersebut, peneliti lihat sedang dalam proses mengumpulkan data-data penunjang kegiatan mereka.

Keuchik dan tim kerjanya mengajukan sejumlah nama menurut tipologi pekerjaan masing-masing, yang dinilai sukses dengan pekerjaannya sehingga berhasil menjadi orang kaya dan sebaliknya orang-orang yang dinilai tidak berhasil sehingga tetap berada dalam kondisi miskin atau setidaknya sederhana. Nama-nama itu, peneliti pertimbangkan dengan cara melakukan pengamatan langsung atas kondisi dan keberadaannya masing-masing, dan peneliti *cross check* dengan menggali informasi dari masyarakat lainnya akan kelayakan nama-nama dimaksud.

Dari beberapa kelompok masyarakat yang terbagi menurut pekerjaan utamanya, sebagaimana peneliti sebutkan di atas. Peneliti mendapatkan sebuah keadaan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor nelayan, petani dan pedagang berada dalam taraf hidup relatif beragam. Terutama pada kelompok masyarakat nelayan dan pedagang. Dalam kelompok masyarakat ini, terdapat nelayan yang berhasil dalam artian dikenal sebagai nelayan sukses memperoleh materi kekayaan yang melebihi masyarakat nelayan di kawasan itu. Dalam saat yang sama terdapat nelayan yang tergolong masyarakat miskin dan yang sekedar berkecukupan. Demikian pula dengan masyarakat pedagang, saat ini terdapat pedagang yang menonjol perolehan materi kekayaannya dan terdapat yang berkecukupan. Petani yang benar-benar murni pekerjaannya hanya dari bertani tidak ditemukan yang menonjol pencapaian perolehan materi kekayaannya, namun mereka berkecukupan dan sebagian lainnya yang menjadi petani penggarap cenderung melakoni pekerjaan lainnya.

Berikut disajikan daftar informan dalam penelitian ini :

Tabel 3.3
Ikhtisar Informan dalam Pengumpulan Data

No. Urut Informan	Deskripsi	Alasan dipilih sebagai informan	Informasi yang diharapkan (terkait isu kemiskinan, agama dan adat)	Tempat dan Tanggal wawancara
01	Laki-laki, 55 tahun	Seorang tokoh adat dalam bidang persawahan (Kejrue Blang).	Mengetahui seluk beluk mengenai sikap dan kebiasaan masyarakat petani	Persawahan, 19 maret 2011
02	laki-laki, 52 tahun	Pedagang, tokoh masyarakat yang mengerti banyak dinamika kehidupan masyarakat setempat.	Bagaimana perkembangan masyarakat berdagang, dulu dan kini	Mesjid, 12 Maret 2011
03	Laki-laki, 48 tahun	Bekerja sebagai pedagang gerobak dorong (menjual lontong)	Keadaanya dan situasi usaha yang dijalankannya, terkait dengan keadaan lingkungan sekitar	Mesjid, rumah, 14 Maret 2011
04	Laki-laki, 55 tahun	Seorang Imuem Meunasah, sekaligus berdagang.	Usaha pekerjaannya, dan sikap masyarakat dalam bekerja terkait dengan agama	Meunasah, rutin bertemu di Meunasah selama penelitian berlangsung.
05	Laki-laki, 60 tahun	Nelayan sukses, tokoh terkemuka	Seluk beluk kehidupan nelayan dan kebiasaan mereka dalam bekerja, terkait dengan nilai-nilai	Rumah, 14 Maret 2011
06	Laki-laki, 58 tahun	Keuchik	Detail keadaan gampong, dan kontribusi institusi pemerintah dan LSM dalam pengentasan kemiskinan	Rumah, dalam beberapa kesempatan interaksi di bulan Maret, April Juni.

No. Urut Informan	Deskripsi	Alasan dipilih sebagai informan	Informasi yang diharapkan (terkait isu kemiskinan, agama dan adat)	Tempat dan Tanggal wawancara
07	Laki-laki, 38 tahun	Nelayan sukses	Seluk beluk kehidupan nelayan dalam bekerja	Rumah, 14 Maret 2011
08	Laki-laki, 48 tahun	Anggota DPRD	Kebijakan politik pemerintahan terhadap masyarakat	Kantor, 14 Maret 2011
09	Laki-laki, 65 tahun	Pensiunan/petani	Mengerti tipikal petani di gampong ini. Menggagas pertanian tanaman sela	Sawah, 20 Maret 2011
10	Laki-laki, 65 tahun	Petani	Hidup berkecukupan, namun hanya petani penggarap. Memahami keadaan hidup petani setempat	Rumah, 8 Maret 2011
11	Laki-laki, 42 tahun	Guru/nelayan	Termasuk tokoh pemuda dan Memahami karakter masyarakat setempat	Rumah, 22 Maret 2011
12	Laki-laki, 50 tahun	Pegawai Pemerintah	Memahami detail program pengentasan masyarakat miskin	Kantor, April 2011
13	Laki-laki, 39 tahun	Nelayan	Sukses dalam usaha nya sebagai nelayan dan memiliki pemahaman terhadap kebiasaan masyarakat	Rumah, dalam bulan Maret, April 2011
14	Laki-laki, 49 tahun	Guru, Imuem Meunasah dan petani	Tokoh agama dan Memahami seluk masyarakat dalam bekerja	Sawah, 20 Maret 2011
15	Laki-laki, 58 tahun	Pedagang kedai kopi/petani pemilik	Menjadi pedagang sukses dan memahami kebiasaan masyarakat setempat	Sawah, 22 Maret 2011

No. Urut Informan	Deskripsi	Alasan dipilih sebagai informan	Informasi yang diharapkan (terkait isu kemiskinan, agama dan adat)	Tempat dan Tanggal wawancara
16	Laki-laki, 59 tahun	Pegawai Pemerintah(Guru) Pengusaha industri rumah tangga	Tokoh masyarakat dan memahami permasalahan masyarakat	Rumah, beberapa kesempatan di bulan Maret, April dan Mei 2011
17	Laki-laki, 50 tahun	Petani tambak/peladang	Sukses dengan kondisi yang berkecukupan dan memiliki kreatifitas	Ladang, rumah, dalam beberapa kesempatan di bulan Maret
18	Perempuan , 34 tahun	Bidan/pedagang	Sukses dalam usaha dan memahami situasi masyarakat setempat	Rumah, dalam beberapa kesempatan sepanjang bulan Maret, April dan Juni 2011
19	Laki-laki, 51 tahun	Pejabat Politik (Bupati)	Memiliki informasi tentang kebijakan politik terhadap keadaan masyarakat	Kantor, Maret 2011
20	Laki-laki, 49 tahun	Nelayan	Profil pekerja sukses, dengan karakter spesifik nelayan dan berpengalaman	Kedai kopi, Maret dan Mei 2011
21	Laki-laki, 49 tahun	Petani tambak	Profil sukses dalam bekerja dan berpengalaman. Memahami situasi bidang	Pertambakan, April 2011
22	Laki-laki, 37 tahun	Toke bangku/petani penggarap	Pemuda yang kreatif dan pekerja keras	Sawah, Maret 2011
23	Perempuan , 50 tahun	Pedagang kecil	Bertahan berdagang selama puluhan tahun dalam situasi berkecukupan	Kedai dalam beberapa kesempatan di Maret, April dan Mei 2011

No. Urut Informan	Deskripsi	Alasan dipilih sebagai informan	Informasi yang diharapkan (terkait isu kemiskinan, agama dan adat)	Tempat dan Tanggal wawancara
24	Laki-laki, 49 tahun	Penyuluh pertanian	Memahami masalah dan karakter masyarakat setempat	Rumah, April 2011
24	Perempuan, 50 tahun	Pedagang ikan asin	Berhasil dalam mensarajanakan anak-anaknya ditengah berkecukupan	Rumah, Mei 2011
26	Perempuan, 37 tahun	Pedagang putu	Berusaha bekerja mandiri diantara hasil yang tak lebih dari yang diharapkan	Rumah/kedai kaki lima, Maret dan April 2011
27	Perempuan, 65 tahun	Pengusaha kue tape	Bekerja dengan keadaan kurang dari cukup	Rumah, Juni 2011
28	Laki-laki, 49 tahun	Pedagang kuliner, gerobak dorong	Bekerja dengan pengalaman dan konsistensi	Tempat berdagang, April 2011

3.5. Analisis dan Penyajian Data.

Menurut Creswell (2007) analisis dan penyajian data terdiri dari beberapa tahap yaitu data *managing, reading and memoing, describing, clasifying, interpreting, dan representing and visualizing*. Peneliti mengorganisasikan data berupa rekaman dan transkrip wawancara ke dalam sejumlah file. Kemudian, peneliti membaca seluruh data secara mendalam. Bersamaan dengan itu, peneliti membuat catatan-catatan yang diperlukan.

Selanjutnya, peneliti menyusun narasi rinci mengenai pengalaman dan pemakaian pribadi para informan, lalu mengelompokkannya berdasarkan jenis-jenis makna untuk memudahkan tahap penafsiran. Ditahap penafsiran dikembangkan deskripsi tekstural mengenai “apa yang terjadi” dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat Pidie, terkait dengan kondisi ekonomi mereka masing-masing. Diperhatikan pula deskripsi struktural yang berbicara mengenai

“bagaimana dinamika tersebut dialami oleh para informan yang terlibat” serta benang merah yang menghubungkan pemaknaan subjektif masing-masing informan tersebut sehingga terbangun suatu deskripsi yang utuh dan saling menguatkan. Disepanjang proses analisis data, peneliti mendialogkan data temuan ini dengan kerangka teoritik yang diuraikan pada bagian sebelumnya.

Pada bagian akhir, pada tahap penyajian dan visualisasi. Peneliti menyusun narasi yang menggambarkan esensi proses yang berlangsung sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Sementara itu, dialog antara temuan penelitian dengan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini, dalam subbab diskusi yang disajikan di akhir bab pembahasan. Pada akhirnya, peneliti melakukan refleksi teoritik serta menarik kesimpulan tentang jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, serta menyusun rekomendasi kebijakan dan saran untuk penelitian lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian ini.

3.6. Strategi Validasi Data

Dalam upaya memvalidasi data, peneliti menggunakan lima dari delapan strategi validasi data yang biasanya digunakan (Creswell, 2007) yaitu pertama, triangulasi sumber data, melibatkan informan yang berbeda dengan pekerjaan pokok yang berbeda satu sama lain. Kedua, peneliti mengklarifikasi sejak awal kepada tentang posisi dan peran peneliti sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang pernah bertempat tinggal dan dibesarkan di kawasan tersebut. Harapannya kemungkinan bias dapat diwaspadai dan lebih mungkin dikontrol oleh berbagai pihak yang membaca hasil penelitian ini. Ketiga, mengumpanbalikan data, analisis, penafsiran serta kesimpulan kepada beberapa informan kunci. Keempat, menggambarkan berbagai proses dan setting yang terkait subyek penelitian sehingga memungkinkan pembaca sejauh mana penelitian ini dapat digeneralisasikan. Kelima, *audit eksternal* oleh *eksternal reader* mengikuti ketentuan pengujian karya ilmiah yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia.

3.8. Catatan Hambatan Studi Lapangan (*Field Study*).

Dalam penelitian ini, peneliti mengalami beberapa kendala yang menjadi permasalahan tersendiri. Seperti ketertutupan beberapa informan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan pekerjaannya dan sumber-sumber kekayaan materinya. Kemampuan ekonomi mereka terlihat menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Kecurigaan mereka akan maksud pendalaman informasi menyangkut hal ini, mungkin terkait dengan keterkaitannya dengan proyek-proyek pemerintah lokal. Dari informasi yang diperoleh dari diskusi-diskusi non formal sebagian informan menyebutkan adanya fenomena peningkatan kekayaan pejabat publik dalam beberapa tahun terakhir, yang terlihat dari pembangunan rumah-rumah yang terkesan mewah untuk ukuran masyarakat setempat.

Peneliti juga mendapat kesulitan untuk menggali informasi dari seorang informan yang peneliti amati tergolong pedagang sukses untuk produk obat. Dirinya tergolong aktif dalam mendatangi mesjid setempat untuk mengikuti ibadah shalat. Dalam beberapa kesempatan, peneliti dapat mendekati dan menerima informasi-informasi darinya terkait dengan aktifitas pekerjaannya di masa lalu. Namun informan satu ini, cenderung menghindari diri untuk meluangkan waktu dalam sesi wawancara mendalam.

Masalah lain adalah terbatasnya ketersediaan sumber-sumber dokumentasi tertulis yang otentik tentang dinamika keterkaitan kehidupan agama, adat dan keadaan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie. Data-data informasi umumnya, mengulas tentang Aceh secara keseluruhan yang mana Pidie tercakup sebagai salah satu bagiannya saja. Pada akhirnya peneliti cenderung mengandalkan data-data hasil wawancara mendalam dan hasil diskusi non formal sebagai data primer.

BAB 4

KONSTRUKSI SOSIAL KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT PIDIE

4.1. Gambaran Kehidupan Ekonomi Masyarakat di Pidie Jaya

Gambaran kehidupan ekonomi pada masyarakat yang berada di kawasan kabupaten Pidie Jaya tidak mudah disebutkan secara persis, bila itu hendak dikatakan secara arti harfiah miskin. Bila mengacu standar ketidakcukupan makan, ketiadaan rumah tempat tinggal dan ketiadaan pakaian layak pakai sepertinya tak mudah dijumpai di daerah ini. Namun, satu hal yang menyangkut ketidakpastian dan ketidakrutinan perolehan pendapatan merupakan suatu keadaan umumnya dialami sebagian besar masyarakat. Hal itu dialami masyarakat yang bekerja sebagai petani, nelayan dan menjual jasa seperti tukang. Disisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor pemerintahan dapat menikmati pendapatan secara rutin. Terdapat pengecualian pada nelayan dan petani yang menguasai alat-alat produksi, mereka dapat menikmati pendapatan yang jauh lebih besar setiap kali panen berlangsung.

Dengan kondisi demikian, lazim ditemukan masyarakat yang mengurus dan menggunakan surat keterangan miskin dari *keuchik* untuk berbagai keperluan yang memungkinkannya memanfaatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas. Pada saat yang sama, masyarakat juga memperebutkan peluang untuk mendapatkan sejumlah paket terbatas pembangunan rumah dhuafa yang digagas oleh pemerintah atau LSM. Dalam kasus seperti ini, umumnya rumah yang ditempati mereka sebelumnya adalah rumah tempat mereka menumpang bertempat tinggal. Seperti rumah orang tua, mertua atau saudara.

Di gampong Meunasah Balek, tidak ditemukan kepala keluarga yang tidak memiliki rumah tempat tinggal. Namun rumah-rumah sederhana yang di dalamnya hanya terdapat peralatan rumah tangga sekedarnya dengan mudah dijumpai. Hal ini semakin mudah ditemukan di dusun Balek yang mayoritas dihuni oleh masyarakat dengan pekerjaan utama sebagai nelayan. Rumah panggung dan rumah permanen berlantai semen berdiri berjajar dan saling berdekatan satu sama lain, bahkan

sebagian rumah panggung terlihat menjorok ke dalam sungai *krueng* Meureudu. Dalam kondisi rumah yang demikian, masyarakat terlihat menggunakan pakaian yang tidak berbeda dengan pakaian umumnya masyarakat yang berada di gampong tersebut.

4.2. Konstruksi Sosial

Dilihat secara ekonomi kehidupan masyarakat Pidie terbangun atas konstruksi sosial yang terdiri ada dua kelompok. Pertama, sejumlah kecil elit sosial yang disebut “*ureung kaya*”. Kelompok kedua, merupakan kelompok mayoritas yang disebut “*ureung sep pajoh*” dan “*ureung gasin*”. Pada kelompok pertama terdapat di dalamnya pemimpin pemerintahan, pegawai negeri, pedagang sukses, nelayan sukses dan petani yang memiliki lahan sawah yang relatif luas. Kelompok kedua, terdapat petani, nelayan dan yang bekerja menjual jasa.

Namun demikian secara sosial, terdapat aktor-aktor yang meskipun tidak memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik. Namun kedudukannya dihormati oleh masyarakat karena memegang instusi agama atau institusi adat yang berfungsi mengkoordinasikan aktifitas ekonomi tradisional. Diluar itu, tokoh intelektual mendapat tempat yang tinggi dalam masyarakat, seperti guru.

Kondisi terkini dari aktifitas kehidupan sehari-hari masyarakat Pidie berbasis pada keadaan sosial yang didalamnya terbentuk dari saling berkelindannya aspek sosio kultural dan struktur sosial masyarakat. Dalam kondisi dinamika kehidupan yang menunjukkan sebuah ciri kondisi spesifik pedesaan, umumnya masyarakat bertumpu pada hasil pertanian tanaman padi dan hasil perikanan laut. Diluar itu, puluhan tahun masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya “terbiasa” dengan warisan ketiadaan komoditas andalan daerah.

Meskipun demikian, secara turun-temurun masyarakat di kawasan ini dikenal dengan kemampuan dan kerja kerasnya mengelola lahan-lahan sawah pertanian yang relatif luas dan menjelajahi lautan untuk meraih hasil untuk bertahan hidup. Disisi lain, lambatnya perkembangan daerah di satu sisi memberi kebaikan dengan

minimnya praktek pengalihan area persawahan menjadi area peruntukan pemukiman atau pabrik-pabrik industri.

Sektor jasa pariwisata, perdagangan dan industri dapat dikatakan tidak hampir tidak memiliki denyut yang berarti. Selain tanaman padi, masyarakat Pidie yang bertumpu pada sektor perikanan kelautan. Dua sektor ini tidak mengalami perkembangan yang berarti, karena kondisi politik ekonomi pertanian yang berada di aras pemerintah Pusat menjadi sulit diterjemahkan dalam sebuah posisi yang memungkinkan pemerintah lokal melakukan terobosan-terobosan diluar pakem berlaku. Demikian pula, hasil produksi ikan tangkapan nelayan mengalami kesulitan pengelolaan karena beberapa hambatan seperti rendahnya teknologi dukungan dalam menangkap ikan dan ketiadaan instalasi gudang pengawetan serta sempitnya jaringan pemasaran yang berorientasi ekspor.



Gambar 4.1 Kapal penangkap ikan jenis *pukat langga* menyusuri sungai *krueng* Meureudu

Pemerintah Pidie dan saat ini pemerintah Pidie Jaya terlihat kesulitan mengembangkan sektor-sektor yang menjadi andalan masyarakat. Kesulitan-kesulitan tersebut terkait dengan kemampuan membina jaringan mitra dagang yang disebabkan

oleh sikap “menunggu bola dijemput”. Khusus menyangkut dengan produksi perikanan laut atau perikanan air tawar, sangat dirasakan oleh para informan bahwa orientasi pasar yang terbatas itu menyebabkan pengusaha lokal berada dalam kungkungan dan jeratan strategi pasar pengusaha Medan.

4.2.1. Struktur Sosial

Di dalam masyarakat Pidie Jaya terdapat pelapisan sosial yang berdasarkan kepemilikan harta kekayaan, dimana di posisi paling atas disebut “*ureung kaya*” dan yang miskin disebut “*ureung gasin*”. Sedangkan yang berada di antara keduanya disebut “*ureung sep pajoh*”. Di lapisan “*ureung kaya*”, merupakan tempat orang-orang yang berhasil membangun usahanya sehingga mapan. Diantara mereka dapat saja bekerja sebagai :

- 1) Nelayan, yang biasanya untuk menghormatinya saat telah berusia tua maka di awal namanya diawali dengan sebutan “*haji*” menggantikan sebutan “*pawang*” yang digunakan di saat mudanya. Umumnya mereka telah melakukan ibadah haji dan terlihat rajin melaksanakan shalat berjemaah di mesjid.
- 2) Pedagang/ Pengusaha, meskipun mereka meningkat status sosialnya karena usaha perdagangan. Namun dalam perkembangannya bila kemunduran usaha dagang sudah mulai dirasakan maka mereka mengalihkan modal untuk usaha-usaha pertanian tanaman padi. Pengusaha industri rumah tangga produk kuliner, saat ini sedang berada di puncak kepercayaan konsumen lokal. Sebagian dari mereka terlihat tidak mengalihkan pendapatan untuk membangun rumah tempat tinggal, namun mengalihkannya ke aset berupa tanah dan properti. Pengusaha lainnya, yang disebut *kontraktor* termasuk mendapat tempat prestise karena kedekatannya dengan elit politik lokal sehingga memiliki akses mendapatkan proyek-proyek pemerintah skala lokal.
- 3) Pegawai pemerintah/Pejabat Publik, mereka yang bekerja di sektor pemerintahan atau menjadi pejabat politik di pemerintahan termasuk kelompok masyarakat yang menanjak status sosialnya dalam lima tahun terakhir. Kepemilikan materi harta

kekayaan terlihat menonjol dibandingkan saat mereka tidak dalam posisi-posisi tersebut. Kondisi ini umumnya dialami oleh tokoh politik atau pegawai negeri sipil yang sebelumnya berafiliasi dengan GAM atau setidaknya saat ini mereka mendapat kepercayaan dari elemen Partai Aceh (PA) yang memegang kendali sebagai pemimpin di lembaga eksekutif atau legislatif Daerah.

Pada kondisi tertentu, tokoh agama atau ulama serta meskipun tidak memiliki harta kekayaan yang menonjol akan tetapi mendapat tempat terhormat di antara masyarakat. Dalam kondisi lainnya, masyarakat yang bekerja sebagai birokrat dan TNI/POLRI memperoleh tempat yang dihormati sejauh dirinya menunjukkan sikap dan tingkah laku baik menurut perspektif masyarakat setempat. Hal itu dilatarbelakangi oleh *stereotip* buruk yang sempat diarahkan pada anggota TNI/POLRI di masa konflik, kelompok GAM dan sebagian masyarakat kala itu menganggap mereka sebagai musuh .

Pada lapisan sosial lainnya, yakni "*ureung sep pajoh*" umumnya di dalamnya terdapat pegawai pemerintah atau yang mereka yang telah menjalani masa *pensiunan*, para petani pemilik dan pedagang kecil. Sedangkan pada lapisan "*ureung gasin*" umumnya terdapat petani penggarap, nelayan pekerja di kapal-kapal milik "*ureung kaya*", tukang bangunan (*utouh*) dan janda-janda yang berumur tua.

Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terdapat kelompok-kelompok yang memisahkan masyarakat satu dengan lainnya. Termasuk di dalamnya tidak terdapat kelompok agama, meskipun dalam skala kecil terdapat jemaah dakwah yang disebut *salafi*. Jemaah ini tidak memiliki jumlah anggota yang berarti, namun hasil dakwahnya menunjukkan hasil dengan adanya perbedaan cara berpakaian pada diri sebagian masyarakat. Seperti berkerudung dengan jilbab yang besar bagi wanita dan memakai baju hingga selutut disertai janggut yang lebih panjang dari ukuran biasanya pada kaum laki-laki setempat.

4.2.2. Situasi Sosio-kultural Masyarakat Gampong Meunasah Balek

Gampong Meunasah Balek yang dipilih sebagai lokasi penelitian, berada dalam wilayah kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kecamatan Meureudu yang menjadikan Keude Meureudu sebagai ibukota kecamatan sekaligus menjadi tempat berada sebuah kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya. Dengan sengaja disebut sementara, karena saat penelitian ini berlangsung pemerintah kabupaten sedang gencar-gencarnya memacu penyelesaian pembangunan komplek perkantoran moderen di lokasi baru yang berjarak sekitar 4 kilometer dari lokasi komplek perkantoran lama.

Dengan luas wilayah sebesar 123 hektar dan jumlah penduduk 1.551 jiwa, Gampong Meunasah Balek langsung berbatasan dengan pusat keramaian *Keude* Meureudu. Bagi masyarakat setempat, istilah *keude* sudah menggambarkan pusat keramaian pasar dan transaksional pertukaran uang dengan barang dan jasa masyarakat sehari-hari. Posisi ini menguntungkan Gampong Meunasah Balek, karenanya ia menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang menggantungkan aktifitas ekonomi utamanya di *Keude* Meureudu untuk bertempat tinggal. Di sebelah utara gampong ini memiliki garis pantai karena batas wilayahnya yang berhadapan dengan selat malaka, sebelah barat dengan Gampong Meuraksa dan timur dengan sungai Krueng Meureudu.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terdapat pusat kegiatan sosial dan ibadah yang disebut u meunasah, biasanya satu meunasah berada di satu gampong. Namun berbeda dengan Gampong Meunasah Balek, gampong ini memiliki dua pusat aktifitas ibadah serta kegiatan sosial, yakni meunasah Balek dan meunasah Dayah Kleng. Secara resmi dalam nomenklatur pembagian administratif pemerintahan hanya disebut Gampong Meunasah Balek, masyarakat tetap menyebut Dayah kleng

dibelakang nama Gampong Meunasah Balek, sehingga kadang-kadang dalam penyebutan sehari-hari tidak jarang disebut Meunasah Balek Dayah Kleng. Hal ini terlihat seperti yang ditulis pada papan batas antara gampong Kota Meureudu dengan Gampong Meunasah Balek, secara jelas tertulis bahwa pengunjung memasuki Gampong Meunasah Balek Dayah Kleng yang menjadi perkampungan tradisional.

Sebutan Dayah Kleng secara historis, menggambarkan bahwa pada tempat ini berdiam para pendatang keturunan india yang dalam masa awalnya membawa misi perdagangan rempah-rempah sehingga akhirnya menetap dan hingga beranak cucu. Keturunan pendatang dari India ini masih dapat terlacak dari perawakan wajah-wajah masyarakat setempat yang masih kental dengan ciri khas wajah India umumnya.



Gambar 4.2. Pedagang keturunan India sedang berbincang setelah sembahyang ashar di Mesjid Meureudu (kiri) dan seorang wanita yang sehari-harinya sebagai pedagang kecil, sedang menuju Meunasah membawa tikar anyaman untuk dijual (kanan).

Masyarakat gampong Meunasah Balek seluruhnya beragama Islam. Denyut kehidupan beragama sangat dominan dengan simbol-simbol Islam kultural yang terlihat mencolok dengan adanya mesjid dan meunasah sebagai sentral kehidupan

masyarakat. Disisi lain cara berpakaian kaum wanita yang umumnya menutup kepala, baik dengan jilbab ataupun kain panjang dalam kegiatan apa saja diluar rumah.

Kehidupan beragama terlihat semarak dengan kumandang azan setiap tibanya waktu shalat. Kedai-kedai ditutupi saat shalat jumat atau shalat magrib berlangsung. Sebagian dari masyarakat terlihat rutin mengunjungi mesjid atau meunasah untuk melaksanakan shalat berjemaah. Demikianpun sebagian besar lainnya, dengan mudah dijumpai berada di tempat-tempat keramaian pada saat yang sama. Hal tersebut terkecuali untuk waktu shalat magrib dan jumat. Aktifitas dakwah berlangsung meriah, saat bulan kelahiran Nabi yang lebih akrab dikenal dengan sebutan bulan *Maulod*.

Kehidupan sosial yang saling mengenal satu sama lain dan saling mendatangi bila saat salah satu di antara mereka mendapat keduakaan terlihat masih demikian kental dilakukan oleh masyarakat. Demikian juga bila terdapat hajatan sebagai bentuk rasa syukur kepada Maha Pencipta, maka diundang hampir seluruh keluarga dan kenalan yang terdapat di kawasan itu. Keekerabatan yang tinggi membuat satu sama lain masih saling memperhatikan bilamana dirasa ada yang patut mendapat pertolongan. Karena itulah, tidak ada di antara masyarakat setempat yang mengalami situasi miskin yang membuatnya tidak makan, tidak memiliki rumah atau tidak memiliki pakaian yang layak.

4.3. Profil Wilayah dan Institusi Pemerintahan

Pidie Jaya menempatkan Meureudu sebagai ibukota pemerintahan dan secara administratif wilayah ini dibagi ke dalam 8 kecamatan, 34 kemukiman dan 222 gampong. Kemukiman merupakan sebuah wilayah pemerintahan adat yang kemunculannya dalam kerangka usaha memudahkan pengkosentrasian ibadah shalat jumat pada gampong-gampong yang jarang penduduk. Hal ini terkait dengan syarat minimal jumlah jemaah agar dapat didirikan shalat jumat disebuah mesjid, yaitu

minimal 40 orang. Jumlah gampong berikut jumlah wilayah pada masing-masing kecamatan terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1
Jumlah Gampong dan Kemukiman dalam Kabupaten Pidie Jaya

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase	Jumlah	
				Gampong	Kemukiman
1	Bandar Baru	281.24	24,19	43	8
2	Pante Raja	40.04	3,44	10	2
3	Tringgadeng	128.00	10,01	27	5
4	Meureudu	156.74	13,48	30	7
5	Meurah Dua	292.2	25,13	19	3
6	Ulim	60.73	5,22	30	5
7	Jangka Buya	29.64	2,55	18	2
8	Bandar Dua	174.26	14,99	45	5
Jumlah		1.162,85	100	222	34

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Data di atas menginformasikan bahwa kecamatan Meurah Dua dan Bandar Baru merupakan kecamatan terluas di kabupaten Pidie Jaya. Namun bila dibandingkan jumlah gampong maka dapat dikatakan bahwa gampong di Bandar Baru memiliki luas wilayah yang lebih kecil dimana ia memiliki 43 gampong. Keadaan itu berlawanan dengan keadaan Meurah Dua yang memiliki jumlah gampong lebih sedikit. Hal ini mencerminkan jumlah penduduk Bandar Baru lebih banyak karena kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Hal ini akan terlihat pada data jumlah penduduk di bawah.

Jumlah dan penyebaran penduduk dalam Kabupaten Pidie Jaya bervariasi, yang kecenderungannya mengikuti adanya ketersediaan sarana transportasi dan peluang aktifitas ekonomi yang lebih baik. Demikianpun, jumlah penduduk turut ditentukan oleh suasana keamanan. Data berikut menggambarkan dinamika perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pidie Jaya dalam rentang waktu tahun 2004 hingga 2008.

Tabel 4.2
Perkembangan Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2004-2008

No	Kecamatan	Jumlah				
		2004	2005	2006	2007	2008
1	Bandar Baru	30.801	30.043	29.313	32.176	33.192
2	Pante Raja	8.093	7.864	7.133	8.106	8.279
3	Tringgadeng	22.497	20.532	18.955	18.523	21.490
4	Meureudu	18.565	19.075	17.508	18.580	19.961
5	Meurah Dua	9.597	9.557	9.776	9.670	10.331
6	Ulim	11.795	12.411	12.357	11.671	14.885
7	Jangka Buya	7.625	7.633	8.415	7.362	9.374
8	Bandar Dua	20.742	22.521	22.496	23.691	24.437
Jumlah		129.715	129.636	125.953	139.779	141.949

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Pertambahan penduduk tahun 2006, 2007 dan 2008 lebih disebabkan oleh karena kondisi keamanan yang berangsur membaik setelah perjanjian damai Helsinki. Kondisi ini bila tidak diimbangi dengan pembukaan kesempatan kerja maka akan semakin menjadikan Pidie Jaya dengan jumlah penduduk yang tinggi namun tidak diimbangi dengan produktifitas kerja. Pertambahan penduduk sedianya menjadi potensi bagi Pidie Jaya karena semakin banyak sumber daya manusia dalam menggerakkan produksi. Namun bidang utama pekerjaan yang tersedia di sektor pertanian dan kelautan, terbukti bukan bidang yang dapat memacu pertambahan pendapatan secara baik akibat proses di hilir yang tidak berpihak kepada petani atau nelayan.

Demikian halnya data jumlah penduduk ditinjau jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kepala keluarga menunjukkan bahwa jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan mendekati angka berimbang. Dari aspek kerja, perempuan-perempuan di Pidie menunjukkan ketangguhan. Saat berlangsung musim tanam atau musim panen, lazim terlihat perempuan terlibat langsung di sawah-sawah. Dalam sekali waktu terlihat jumlah perempuan lebih banyak di sawah daripada laki-laki. Data perbandingan itu terlihat seperti berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah			Jumlah Kepala Keluarga (KK)
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	(L+P)	
1	Bandar Baru	16.358	16.834	33.192	8.679
2	Pante Raja	4.142	4.137	8.279	2.133
3	Tringgadeng	10.583	10.907	21.490	5.833
4	Meureudu	9.795	10.166	19.961	5.164
5	Meurah Dua	5.123	5.208	10.331	2.665
6	Ulim	7.385	7.500	14.885	3.715
7	Jangka Buya	4.697	4.677	9.374	2.367
8	Bandar Dua	12.069	12.368	24.437	6.201
Jumlah		70.152	71.797	141.949	36.757

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Jumlah penduduk yang berimbang antara laki-laki dan perempuan, menunjukkan komposisi yang mungkin penerahan dan pengarahannya *skill* kerja yang telah dimiliki kaum perempuan untuk dapat mencapai peningkatan pendapatannya melalui sektor-sektor produksi kerajinan anyaman tikar ataupun sektor usaha kuliner. Disisi lain, aktifitas bekerja yang ditunjukkan oleh sebagian wanita-wanita Pidie yang berada di pesawahan atau di pasar-pasar sebagai penjual menunjukkan bahwa roda ekonomi masyarakat Pidie turut ditopang oleh kaum wanita.

Perbandingan jumlah penduduk dalam Kabupaten Pidie Jaya menunjukkan bahwa rata-rata jumlah jiwa tiap kepala keluarga di seluruh kecamatan memberi angka yang hampir sama, yakni 3,9 orang per kepala keluarga. Keadaan yang menggambarkan bahwa rata-rata keluarga di Pidie Jaya terdiri dari seorang bapak, seorang ibu dan dua orang anak. Jumlah anak yang sedikit memungkinkan masyarakat Pidie merencanakan belanja dan *saving* secara lebih terencana. Proses kegiatan ini dapat mendorong penataan ekonomi keluarga sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh pengelolaan keuangan rumah tangga masyarakat secara lebih baik.

Apabila dibuat perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah keseluruhan, maka terlihat bahwa setiap 1 kilometer persegi terdapat rata-rata 151 jiwa penduduk. Keadaan yang menggambarkan bahwa kepadatan penduduk tidak padat. Kepadatan penduduk yang tidak padat memberi keuntungan positif bahwa sebagian besar lahan masih tersedia untuk proses produksi. Sedikit dari lahan yang dihabiskan untuk pembangunan pemukiman. Keadaan ini, sedianya menjadi celah bagi masyarakat untuk mendayagunakan setiap jengkal tanah yang berada dalam area kepemilikannya untuk budi daya tanaman yang menghasilkan nilai tambah bagi keluarga.

Adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak membudaya dalam aktifitas tanam menanam turut memberi dampak dari rendahnya minat masyarakat mengelola tanah pekarangan atau tanah perkebunan yang dimilikinya. Sebagian kebiasaan para generasi yang lebih tua, yang terlihat rajin menanam dan merawat tanaman yang ada dipekarangannya, sepertinya tidak diikuti oleh generasi yang lebih muda. Gaya hidup ini turut terbentuk akibat keadaan hidup yang tidak sulit, dengan adanya bantuan orang tua dan keluarga maka kebutuhan pokok dapat terpenuhi. Kepadatan penduduk dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Luas Wilayah
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah			Perbandingan Jiwa/KK	Perbandingan Jiwa/Km2
		Penduduk	Wilayah	Kepala Keluarga		
1	Bandar Baru	33.192	281.24	8.679	3,8	118
2	Pante Raja	8.279	40.04	2.133	3,9	207
3	Tringgadeng	21.490	128.00	5.833	4,0	168
4	Meureudu	19.961	156.74	5.164	3,9	127
5	Meurah Dua	10.331	292.2	2.665	3,9	35
6	Ulim	14.885	60.73	3.715	4,0	245
7	Jangka Buya	9.374	29.64	2.367	4,0	316
8	Bandar Dua	24.437	174.26	6.201	3,9	140
Jumlah/ rata-rata		141.949	1.162,85	36.757	3,9	151

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Ditinjau dari keluarga miskin, terdapat sekitar 11.336 kepala keluarga atau 30.8% dari total kepala keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tabel 4.5
Jumlah Keluarga Miskin
Kabupaten Pidie Jaya tahun 2008

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin (KK)	Persentase
1	Bandar Baru	6.580	31,47
2	Pante Raja	1.347	6,44
3	Tringgadeng	3.413	16,32
4	Meureudu	3.038	14,53
5	Meurah Dua	1.467	7,02
6	Ulim	2.022	9,67
7	Jangka Buya	1.988	9,51
8	Bandar Dua	1.057	5,05
Jumlah		20.912	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008

Data di atas menggambarkan kondisi kemiskinan tertinggi di Pidie Jaya berturut-turut terdapat di kecamatan Bandar Baru, Tringgadeng dan Meureudu. Namun jumlah kecamatan Bandar Baru terhitung jauh dari angka kemiskinan di kecamatan lainnya. Namun hal itu, terkait dengan jumlah penduduk yang menempati wilayah tersebut merupakan jumlah penduduk tertinggi di Pidie Jaya. Namun jumlah yang tinggi di dominasi oleh penduduk dengan pendapatan ekonomi yang rendah. Tinggi jumlah keluarga miskin, memberikan sebuah gambaran bahwa keadaan ekonomi masyarakat Pidie masih berada dalam sebuah tingkatan yang memprihatinkan. Besarnya jumlah keluarga miskin bukan saja disebabkan oleh rendahnya produktifitas kerja mereka, serajin bagaimanapun bekerja sebagai petani dengan ukuran sawah yang kecil atau bahkan bekerja sebagai petani upahan tidak akan dapat membuat petani memiliki pendapatan yang memadai.

Demikian pula para pekerja di sektor petani tambak, ditengah penyakit yang disebut “virus” belum ditemukan solusi maka budidaya ikan hampir tak dapat dilaksanakan. Sejalan dengan itu, pendapat nelayan juga tidak mendapat keuntungan

yang lebih karena harga ikan akan membaik saat ikan sulit didapat. Sebaliknya, saat ikan dapat ditangkap sebanyak mungkin, justru harga ikan menjadi turun. Posisi ini akan dapat diatasi dengan menjalankan strategi terpadu untuk membantu ekonomi keluarga petani dan nelayan.

4.4. Profil Geografis dan Sosio Demografis Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya berada di wilayah beriklim tropis basah, dengan temperatur suhu minimum berkisar 19 - 22 derajat celcius dan suhu maksimum 30 – 35 derajat celcius. Selama ini curah hujan paling tinggi terjadi bulan Januari, sedangkan curah hujan tetap terjadi pada bulan Oktober dan Desember.

Keadaan struktur tanah dapat dilihat menurut klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng lebih besar 40% dan daerah pesisir pantai yang memiliki klasifikasi lereng 0 – 3 %. Kabupaten Pidie Jaya memiliki variasi ketinggian dari permukaan laut, antara 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Kondisi fisik dataran dengan ketinggian yang relatif rendah berada di sebelah utara dengan kondisi kemiringan lereng yang cenderung landai antara 0-25% yaitu sebesar 28.53%. Sedangkan dataran dengan ketinggian relatif tinggi berada di sebelah selatan dengan kemiringan lereng antara 25% hingga 40%.

Kondisi ini memungkinkan masyarakat Pidie untuk melangsungkan kehidupan ekonomi dari sektor pertanian dan perikanan. Hal itu sudah ditunjukkan oleh keberlanjutan masyarakat dalam usaha tani dan nelayan, dimana hasil yang diperoleh masih dapat dinikmati guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu terlepas dari tingkat keberhasilan panen yang diperoleh petani akibat pengaruh hama dan serangan penyakit tanaman serta serangan penyakit atas budidaya ikan air payau.

BAB 5

TINDAKAN KERJA MASYARAKAT PIDIE DALAM HISTORISITAS LOKAL

5.1. Tindakan Kerja Masyarakat Pidie dalam Dinamika Historisitas Lokal

Kehidupan sosial masyarakat Pidie pada masa dahulu, setidaknya dapat digali informasinya dari catatan sejarah. Meskipun agak disayangkan, bahwa catatan-catatan lama biasanya tidak menggambarkan secara detil kehidupan masyarakat Pidie secara keseluruhan. Penulisan berkisar tentang kehidupan di pusat-pusat keramaian dan sekitar pusat kerajaan karena catatan itu sendiri dituliskan oleh para cendekiawan yang menjadi pembantu-pembantu dekat raja dimana ia dipercayakan pada masanya masing-masing. Penulis lainnya adalah para pedagang Barat yang perhatiannya terbatas hanya pada tempat-tempat yang sempat dikunjungi dan dilihatnya. Tempat itu adalah pelabuhan atau pusat-pusat keramaian yang tak lain adalah merupakan pusat kerajaan. Dalam konteks tersebut, bagaimana kehidupan masyarakat Pidie dalam konteks lokal akan dicoba rekonstruksi.

Dalam cakupan keacehan, masyarakat Pidie dicirikan sebagai masyarakat mandiri. Hal itu terkait dengan keberadaan elit Pidie yang berhasil menjadikan dirinya sebagai salah titik pusat transaksi perdagangan lada internasional dan sekaligus menjadikan masa kejayaannya sebagai fase penting kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat yang berdiam di pesisir timur pulau Sumatera. Keadaan tersebut termuat dalam beberapa catatan masa kejayaan Kerajaan Pidir. Tidak diperoleh catatan bagaimana elit Pidie bekerja dan mampu menngkondisikan masyarakat Pidie bekerja dalam mata rantai produksi dan perdagangan lada sebagai komoditas penting pada masa itu. Namun nilai jual yang tinggi serta dikunjunginya pelabuhan Pidir oleh kapal-kapal pedagang asing baik dari Cina, India, Persia ataupun Eropa menunjukkan sebuah keadaan dimana Pidie mampu memberikan produksi yang berkualitas dan memenuhi kuantitas ideal yang dipersyaratkan transaksi perdagangan internasional.

Merujuk apa yang ditulis oleh Pires (Lombard,2007) bahwa aktifitas produksi dan perdagangan lada yang terdapat di Pidie pada saat itu, hanya dapat

disaingi oleh Pase atau Kerajaan Pasai. Selebihnya adalah kekuatan kerajaan Aceh yang masih berusia sangat muda. Dalam hal ini tidak disinggung ekspansi dagang yang dilakukan Pidie atas produksi lada. Karenanya dapat dikatakan bahwa Pidie benar-benar berkonsentrasi untuk menghasilkan lada melalui kerja keras masyarakat Pidie mengikuti tingginya permintaan lada dalam perdagangan internasional pada saat itu.

Meskipun kekuatan Kerajaan Aceh pada akhirnya dapat meredupkan pelabuhan dagang di Pidir dan Pase namun ada semacam perlakuan khusus Aceh atas komunitas masyarakat di Pidie. Dalam Lombard (2007) disebutkan bahwa untuk Pidie, Sultan Ala Ad-Din Ri'ayat Syah yang merupakan kakek dari Iskandar Muda menunjuk salah satu anak laki-lakinya untuk menjadi semacam Gubernur dalam memimpin pemerintahan Pidie. Meskipun tidak disebutkan alasan-alasan yang mendorong Sultan mengirimkan anaknya menjadi penguasa khusus untuk Pidie, namun hal ini diduga terkait dengan potensi hasil-hasil bumi yang tidak berkurang meskipun telah kekuasaan tidak lagi berada di tangan raja Pidir. Dari hal ini, dapat diperkirakan bahwa masyarakat Pidie mampu memberikan hasil kerja sebagaimana diharapkan elitnya pada saat itu.

Sejalan dengan itu, dapat diperkirakan pula bahwa pekerjaan-pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan utama masyarakat Pidie pada saat itu. Sekalipun demikian tindakan bekerja masyarakat Pidie diduga terkait erat dengan dorongan-dorongan yang dilakukan elit-elit pemuka kerajaan yang telah menikmati manfaat dari pertanian berorientasi dagang. Namun, bagaimana manfaat yang diperoleh masyarakat bawah di Pidie atas hasil pertanian tanaman ladanya tidak dikemukakan oleh sumber-sumber tersebut. Paling tidak, masyarakat Pidie yang terlibat dalam pekerjaan di pusat keramaian kerajaan atau di pelabuhan-pelabuhan dapat menyaksikan bagaimana transaksi dagang berlangsung dengan melibatkan pedagang-pedagang asing atas sejumlah hasil pertanian tanaman lada yang mereka usahakan.

Pengalaman transaksional dalam perdagangan internasional ini, diperkirakan turut berkontribusi atas terbentuknya mentalitas dagang sebagian masyarakat Pidie. Sebagian dari mereka masyarakat Pidie yang berada di

perantauan memilih usaha kerja di bidang perdagangan atau wirausaha (*intrepeneur*). Dalam masa-masa perdagangan lada berada pada masa puncak, dimana pusat perdagangan yang telah bergeser ke pelabuhan Aceh diceritakan bahwa Pidie tetap dijadikan andalan oleh Sultan untuk menjamin pasokan kebutuhan pangan.

Masalah pangan adalah masalah rumit bagi pusat kerajaan Aceh. Tingginya kebutuhan pangan bertalian dengan tingginya jumlah populasi penduduk sebagai salah satu akibat dari peran Aceh sebagai pusat perdagangan internasional di kawasan Selat Malaka. Strategi jaminan pangan yang dijalankan Sultan Iskandar Muda disebutkan sebagai langkah cemerlang dibanding para pendahulunya yang terjebak dengan kerumitan ketersediaan pangan. Namun, menjadikan Pidie sebagai lumbung beras, tentu tidak terlepas dari dukungan mentalitas kerja masyarakat Pidie berikut dukungan ketersediaan lahan yang luas beserta sarana penunjuang produksi lainnya. Keterlibatan masyarakat Pidie dalam produksi beras, diperkirakan berlangsung secara massal dibawah kepemimpinan elit-elit pemimpin di Pidie. Disayangkan tidak ditemukan catatan yang mengungkapkan bagaimana kehidupan masyarakat Pidie yang bekerja di garis depan dalam mata rantai produksi beras pada saat itu.

Tidak diketahui bagaimana manfaat hasil produksi bagi kehidupannya sehari-hari. Namun, dilihat dari kondisi pada saat itu dimana terbatasnya jaringan informasi serta daya mobilitas maka dapat dikatakan bahwa target produksi serta pergerakan hasil produksi beras dari Pidie ke pusat kerajaan sudah tentu melibatkan elit lokal dan pemuka-pemuka kerajaan. Tindakan bekerja masyarakat pada saat itu, diperkirakan pada awalnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan sendiri. Namun, bekerja lebih keras guna mencapai target peningkatan jumlah produksi dan pembatasan-pembatasan dalam aktifitas semacam jual beli beras mengikuti peraturan yang ditetapkan Sultan adalah suatu keadaan yang harus ditaati oleh masyarakat Pidie umumnya.

Pada dokumen Qanun Al-Asyi dituliskan sebuah keadaan bahwa Sultan memberikan kepercayaan yang tinggi kepada elit pemimpin Pidie. Seperti menjadi perpanjangan tangan Sultan dalam menegakkan supremasi hukum bagi komunitas

yang melanggar atau melawan. Tingginya kepercayaan itu, diduga terkait erat dengan tingginya tingkat kepuasan Sultan atas loyalitas dan kontribusi elit Pidie dalam memenuhi ekspektasi Sultan dalam bidang-bidang strategis seperti krisis pangan dan krisis pengaruh raja atas wilayah-wilayah lainnya. Keadaan itu juga terkait dengan loyalitas dan *performance* kerja masyarakat di kawasan Pidie.

Terlepas dari perbedaan dampak-dampak yang diterima oleh masyarakat Pidie menurut lapisan sosial dimana ia berada. Bagi elit Pidie, tindakan kerjanya memberikan dampak seperti diangkat dalam kedudukan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan dan kedudukan sosialnya, sedangkan bagi masyarakat yang berada di lapisan bawah tidak disebutkan menikmati apa dari upaya kerja kerasnya. Namun, setidaknya tidak ditemukan catatan adanya pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan secara masif seperti jatuhnya korban meninggal secara massal akibat tindak kekerasan, kelelahan atau kelaparan dari Pidie dalam masa-masa itu.

Meskipun tidak disebutkan bagaimana dinamika kehidupan masyarakat Pidie, bagaimana tindakan kerja itu berlangsung dan bagaimana mereka menikmati hasil kerjanya ditengah *booming* komoditas lada ataupun saat mana mereka mampu memberikan produksi beras secara fenomena untuk ukuran saat itu. Namun apa yang dikemukakan Hurgronje (1985), Alfian (1987), Juned (2002), Ismail (2002) dan Sanusi (2005) dapat dijadikan bahan untuk merekonstruksikan gambaran masyarakat Pidie bekerja dan berakfititas dalam kehidupan sosial lainnya sehari-hari. Berlaku bagi masyarakat Pidie sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang disebutkan dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi bahwa struktur sosial masyarakat di satuan teritori terendah bernama *gampong* terdiri atas tiga unsur yang berjenjang yaitu 1) pemimpin, terdiri dari *keuchik* dan *imuem meunasah*; 2) lembaga perwakilan dan permusyawaratan yang diisi oleh beberapa orang bijak yang dipresentasikan oleh keberadaan *ureung tuha* yang terdiri dari empat orang atau *tuhe peut*; dan 3) rakyat atau masyarakat biasa yang disebut *ureung rame* atau *ureung le*.

Meskipun demikian, struktur dalam satu *gampong* diikat oleh pertalian keluarga dan kekerabatan yang disebut masyarakat *kawom*. Dengan demikian,

dalam bekerja memproduksi komoditas pertanian baik lada ataupun padi untuk tujuan-tujuan perdagangan atau konsumsi dapat disebut berada dalam satu kerjasama yang bertindak atas nama kebersamaan dibawah kepemimpinan *keuchik* dan *tengku imuem* yang dapat dipastikan adalah individu yang paling berpengaruh di antara mereka se *kawom*.

Menyangkut lokasi kebun (*lampoh*) atau persawahan (*blang*) tempat masyarakat bekerja, disebutkan berada di luar *gampong* karena *gampong* itu sendiri lebih menunjukkan sebagai sebutan tempat tinggal hunian masyarakat yang diberi batas pagar sekelilingnya. Akses keluar dan masuk *gampong* dari jalan besar disediakan sebuah gapura yang disebut *reut*. Jarak antara *gampong* dipisahkan oleh hamparan ladang, persawahan atau hutan.

Masyarakat Pidie berada dan terbagi dalam *gampong* demi *gampong*, di dalamnya mereka hidup dalam sebuah harmoni kepemimpinan ganda (*dualitas power*) yaitu *keuchik* (*government power*) dan *teungku imuem* (*religius power*). Harmoni ini dalam tingkat otoritas yang lebih atas, tidak disebutkan secara khusus. Namun secara vertikal di atas *geuchik* terdapat *Mukim* atau *Imuem Mukim* yang pada dirinya menyatu dua kewenangan agama dan adat. Selanjutnya lebih ke atas terdapat *ulee balang* yang memegang urusan pemerintahan dan ulama yang berkuasa atas masalah agama. Masing-masing saling menghormati dan memegang urusannya yaitu urusan adat oleh *ulee balang* dan urusan agama oleh ulama.

Pada level *gampong*, dalam rangka mencapai harmoni bekerja komunal baik di sawah, di ladang ataupun di laut maka masyarakat menempatkan dirinya diri di bawah koordinasi seorang tokoh yang memiliki pengaruh dan kemampuan teknis untuk masing-masing bidang pekerjaan. *Kejrueu blang* mengatur harmoni masyarakat petani untuk menentukan waktu kapan mulai membajak, menebarkan, mendapatkan air untuk dialirkan ke dalam petak-petak sawah serta waktu yang tepat untuk mulai memanen. Demikian juga untuk masyarakat yang bertani kebun, ladang dan hutan terdapat *peutua seunebok*.

Bagi *gampong* yang berada di pesisir pantai, memungkinkan bagi masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Selain berlaku struktur sosial yang disebutkan di atas, juga terdapat panglima laot yang mengatur harmoni kerja antar

nelayan guna memastikan kelancaran kegiatan melaut. Dalam hal ini, panglima laot memiliki kekuasaan untuk melarang nelayan melaut bila kondisi alam membahayakan serta memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan antar nelayan bilamana muncul.

Dalam keadaan tersebut, masyarakat secara turun temurun diwarisi Islam sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan. Karenanya pada setiap gampong muncul institusi *imeum meunasah* dan biasanya ditengah-tengah pemukiman masyarakat terdapat bangunan fisik *meunasah* yang menjadi *sentral* orientasi hidup masyarakat. Meunasah secara fisik menjadi tempat dimana *Imuem Meunasah* memimpin ritual shalat jemaah dan di dalamnya berlangsung interaksi sosial antar individu masyarakat. Di Meunasah pula terahjadi sosialisasi pemahaman Islam sejak dini berupa pengajian Al-Quran dan pengajaran Islam tingkat awal kepada anak-anak. Bila usia anak-anak laki-laki telah remaja atau akhil baligh, meunasah dijadikan tempat mereka menginap setelah pengajian berakhir di malam hari.

Berkaitan dengan itu, keterikatan masyarakat Pidie dengan Islam menjadikan *Imuem Meunasah* berada dalam posisi aktif setiap harinya memimpin agenda kegiatan masyarakat yang terkait dengan ritual-ritual ibadah *mahdhah*, baik itu untuk urusan ibadah vertikal (*hamblumminallah*) atau pun untuk urusan horizontal berupa interaksi antara individu anggota masyarakat (*hablumminannas*). Namun untuk urusan ibadah *ghairu mahdhah*, seperti bekerja di ladang, sawah, di laut ataupun aktifitas perdagangan di pasar gampong berada di bawah koordinasi *institusi kejruen blang, peutua seunebok, panglima laot dan haria pekan*.

Dengan demikian, meskipun disebut terjadi kesenyawaan antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Aceh. Namun, pembagian kewenangan itu memberi kesan adanya penekanan profesionalitas dan pembedaan koordinatif saat mana masyarakat menyerahkan diri untuk berada dalam sub ordinasi tokoh yang berkompetensi dalam urusan *hukom*, berdimensi spiritual dan berorientasi akhirat. Juga saat mana masyarakat menyerahkan diri untuk berada di bawah kendali atau dalam sub ordinasi tokoh berkompetensi di bidang teknis pekerjaan yang

berdimensi keduniawian seperti pemerintahan adat dan aktifitas kerja di bidang pertanian, perkebunan, kelautan atau perdagangan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cara hidup masyarakat Pidie masa itu berlangsung komunal dimana antara mereka saling bergantung satu sama lain yang diikat sekaligus oleh nilai-nilai adat tradisi keacehan dan nilai keislaman. Nilai adat keacehan termanifestasi pada keberadaan institusi pemerintahan adat dan insititusi koordinatif sumber penghidupan ekonomi lokal, sedangkan nilai keislaman termanifestasi pada keberadaan insititusi religius sebagai sentral orientasi bertindak. Memperhatikan struktur sosial dan merujuk pada tipe tindakan yang disebutkan Weber (1964), maka tindakan kerja yang dilakukan masyarakat Pidie yang pada saat itu bertani terlihat dalam aktifitas perusahaan tanaman lada ataupun produksi tanaman padi dapat dikatakan sebagai tindakan rasional berorientasi nilai.

Nilai adat dan nilai agama menjadi sumber inspirasi mendorong tindakan individu bertindak bekerja. Bertolak dari pemikiran bahwa masyarakat Aceh lebih dahulu eksis sebelum kedatangan Islam, maka dengan sendirinya nilai-nilai asli keacehan yang bersifat lokal telah ada dan menjadi pedoman hidup masyarakat dalam bertindak. Tindakan bekerja dan berproduksi mengelola sumber-sumber alamiah merupakan aktifitas yang dilakukan secara rutin, karena itu keberadaan insititusi koordinatif bersifat ekonomi produksi semacam *kejruen blang*, *Peutua seunebok*, *panglima laot*, *haria pekan* lahir dari sebuah kebutuhan masyarakat Pidie.

Belakangan hadirnya Islam turut menguatkan nilai-nilai lokal yang sejalan dengan Islam, dimana bertahannya insititusi-insitutsi asli lokal yang terkait dengan aktifitas ekonomi produktif masyarakat menjadi bukti telah akulturasi Islam dan Aceh dengan baik. Pada saat itu, Islam juga tidak membawa konsep insititusi tindakan ekonomi produktif sehingga persoalan koordinasi kegiatan masyarakat bekerja di sawah, ladang, hutan, laut dan pasar tetap dibiarkan untuk dipegang oleh institusi yang telah ada. Kehadiran dan penerimaan masyarakat atas Islam di *gampong-gampong* yang disimbolkan dengan dibangunnya *meunasah* dan dimasukkannya *imeum meunasah* (unsur religius) ke dalam struktur sosial

masyarakat *gampong*, melengkapi struktur sosial yang telah ada sebelumnya. *Keuchik* sebagai pemimpin pemerintahan adat, tidak serta merta melebarkan kekuasaannya hingga merambah area religiusitas keislaman. Adanya pandangan bahwa persoalan agama Islam harus ditangani oleh seorang yang memahami Islam dan cakap menerapkan serta mampu mengajarkannya kepada warga masyarakat *gampong*.

Sejalan dengan itu, masyarakat melakukan pendalaman pemahaman Islam yang berlangsung di *meunasah* dan bagi anak-anak yang telah menginjak usia remaja secara khusus mereka meninggalkan *gampong* dan dimasukkan ke *dayah* semacam pesantren tradisional yang dipimpin oleh ulama-ulama besar (*tengku chik*) yang biasanya berpengaruh pada kawasannya masing-masing. Selain itu, Aceh sendiri menjadi semacam pusat pengembangan peradaban Islam yang disebabkan oleh kehadiran tokoh-tokoh ulama-ulama besar semacam Nurud din Ar raniry dan lainnya.

Dalam perkembangannya, harmoni kehidupan masyarakat Pidie yang berorientasi produksi tanaman lada ataupun padi itu bertahan dalam beberapa abad dan catatan para ahli sejarah kembali menyebut nama Pidie dalam konteks pertarungan militer antara kekuasaan Kesultanan Aceh yang terdesak hingga ke Pidie. Penetrasi militer Belanda sejak tahun 1873 yang dilawan oleh *ulee balang* sebagai pemimpin adat dan kaum ulama di seluruh Aceh. Dalam tahap awal *Ulee Balang* Meureudu turut mengirim kekuatan militer membantu perlawanan di Banda Aceh. *Ulee Balang* mendapat dukungan ulama dalam menggerakkan masyarakat menentang kolonial Belanda.

Institusi religius *dayah* di bawah pengaruh ulama-ulama besar menfungsikan diri sebagai media pembentuk mentalitas perang pada masyarakat Aceh. Tengku Syik Kutakareung membuat hikayat perang sabil, termuat pesan di dalamnya yang membakar gelora semangat juang masyarakat Aceh dimana Belanda adalah kafir yang memaksakan kehendak dan hendak merampas kebebasan dan kehormatan hidup kaum muslimin. Dalam hal ini telah terjadi konversi tindakan dari masyarakat, dari sebagian besar waktu dihabiskan untuk bekerja di sawah dan ladang. Namun, dengan kondisi itu masyarakat

meninggalkan gampong untuk turut berperang. Dalam pandangan Weber, tindakan ini digolongkan dalam tindakan afektif karena bertindak atas dasar kecintaan pada agama serta tanah air dan kemarahan pada penjajah.

Peperangan menimbulkan korban jiwa serta mengganggu keseimbangan harmoni masyarakat. Masyarakat Pidie, sebagaimana masyarakat Aceh lainnya mengalami masa peperangan berkepanjangan. Meskipun tidak selalu dalam suasana perang, namun pasang surut peperangan yang dimulai 1873 dan berakhir pada tahun 2005 menimbulkan dinamika tersendiri dalam masyarakat Pidie. Disamping tekanan militer yang memaksa masyarakat Aceh tunduk pada kekuasaan luar, terdapat juga kebijakan memberangus institusi-institusi lokal pada level gampong. Seperti penyeragaman pemerintahan desa pada masa orde baru, yang membuat masyarakat gampong seperti dicabut dari pijakan yang selama ini menjadi pedomannya melangsungkan kehidupan sosial.

Belakangan, semangat reformasi pemerintahan dan upaya merekonstruksi kembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh maka dikuatkan kembali keberadaan insititusi religius, institusi musyawarah/perwakilan dan institusi ekonomi produktif yang berada di tingkat *gampong*. Namun, sekian lama kehilangan pengaruh membuat semuanya tak dapat berjalan kembali sebagaimana diharapkan. Apalagi situasi dan kondisi perkembangan zaman sudah jauh berubah. Institusi-institusi tersebut dijalankan dengan mengandalkan ruang berpikir tradisional. Sementara itu, kemajuan komunikasi, informasi dan mobilitas menuntut perubahan dan gerak cepat mengikuti tuntutan pasar. Transformasi insititusi-institusi yang melekat pada masyarakat ini belum berjalan secara struktural.

Dibutuhkan kesadaran elit lokal untuk membentuk dan memperbaharui model-model kerja insititusi. Transformasi dibutuhkan untuk dapat mengikuti orientasi pasar. Kemajuan zaman, membuat masyarakat tak lagi sekedar bekerja untuk memproduksi, apalagi luas lahan yang dikelola semakin tak mendukung untuk berorientasi laba. Pemimpin dan elit terdidik lainnya yang berada di *gampong-gampong* sebagian telah menyadari produksi yang berbasis profit. Sehingga mereka secara individual membuka dan membangun jaringan untuk

pemasaran hasil produksi. Namun, tindakan rasional mereka hanya sebatas dalam cakupan individual ataupun *group* mereka sendiri. Tidak melibatkan institusi lokal, sehingga dapat menjalar dan berkembang menjadi kerangka pikir baru pada masyarakat kebanyakan. Dalam skala kecil, tindakan rasional juga dilakukan petani-petani dengan luas sawah garapan yang tidak dapat disebut luas. Petani tersebut berusaha mengadakan kontak langsung dengan pembeli yang turun langsung ke lokasi panen. Pembeli-pembeli tersebut biasanya telah menyiapkan diri untuk menampung padi sebanyak mungkin dengan menyediakan truk pengangkut berukuran besar yang turut dibawa ke lokasi panen raya.

Tindakan-tindakan rasional nilai yang ditunjukkan masyarakat Pidie secara individual atau kolektif pada umumnya terkait dengan agama dan adat. Tindakan berperang atau setidaknya bersimpati atas perang menunjukkan adanya kesadaran bersama bahwa terdapat ancaman serius terhadap kepentingan politik, agama, keadilan dan martabat mereka. Munculnya kesadaran tidak lepas dari pengaruh kuat ulama. Tindakan-tindakan semacam itu terlihat aksi yang ditunjukkan masyarakat Pidie atas sejumlah hal, diantaranya perang kolonial merespon invansi Militer Belanda tahun 1873, revolusi sosial menanggapi manuver sejumlah *Uleebalang pro* Belanda pada tahun 1946, aksi DI/TII tahun 1953 sebagai respon penghapusan status provinsi untuk Aceh pada tahun 1950 dan aksi GAM tahun 1976 sebagai bentuk ketidakpuasan atas ketidakadilan kebijakan ekonomi pasca eksploitasi sumber gas alam cair di Aron.

Aspek kesejarahan menunjukkan bahwa ulama Pidie sebagai *agent of change* mampu membentuk kesadaran dan melahirkan tindakan dengan bersandarkan pada nilai-nilai agama dan adat. Bila dilihat lebih mendalam, maka kesadaran itu mudah ditanamkan sejauh terkait dengan isu agama, keadilan dan martabat harga diri. Dengan kata lain, kesadaran kolektif masyarakat mempersyaratkan adanya ancaman terhadap agama, nilai keadilan dan martabat harga diri mereka. Keberadaan musuh sosial laten berupa keterbelakangan ekonomi atau kemiskinan belum dianggap sebagai ancaman serius. Meskipun kemiskinan dapat mengancam akidah agama, merusak rasa keadilan dan menjatuhkan martabat harga diri karena sikap inferior. Sebagian menganggap

bahwa keterbelakangan itu sendiri akibat dari ketidakadilan yang dirasakan akibat kekurangberpihakan kebijakan ekonomi pemerintah. Bahkan sebagian mencari pembenaran dengan menyebutkan bahwa kondisi ekonomi hari ini sebagai hal gaib atau takdir yang ditetapkan Tuhan kepadanya.

Upaya membentuk kesadaran kolektif akan bahaya laten kemiskinan, serta mengkondisikan lahirnya tindakan-tindakan kerja produktif sedianya dapat berlangsung sebagaimana ulama menggerakkan tindakan perlawanan pada era sebelumnya. Nilai-nilai agama dan adat bersifat universal dan tidak kaku untuk dapat ditransformasikan ke dalam tindakan individu dan tindakan kolektif yang sesuai perkembangan permasalahan sosial yang saat ini berlangsung. Transformasi tersebut dapat berlangsung sejauh mana diawali oleh kesadaran elit sosial yang kemudian menjadikan dirinya sebagai *agent of change*. Lebih dari itu, hanya elit yang dipercaya masyarakat yang memenuhi syarat menjalankan misi *agent of change*. Dahulu aspek independensi dari kekuasaan, integritas, moralitas dan kepedulian terhadap masalah-masalah sosial membuat ulama didengar oleh masyarakat. Namun, untuk saat ini tidak semua ulama memenuhi aspek tersebut. Sementara itu, elit sosial lainnya baik dari pemerintahan ataupun lainnya dianggap memiliki agenda pribadi serta terdapat jarak dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Lahirnya tindakan kerja positif secara kolektif, menurut nilai-nilai agama dan adat tidak berlangsung serta merta dari bawah. Perubahan dan transformasi berlangsung dari atas, yaitu dari para elit sosial yang dianggap lebih dalam segala hal dibanding mereka. Baik itu aspek pengetahuan agama atau pengetahuan umum, jaringan kekuasaan ataupun kemampuan ekonomi. Tipikal masyarakat pedesaan yang patrimonial membutuhkan kepemimpinan, otoritas, keteladanan dan rasa empati terhadap kehidupan mereka. Dari keadaan inilah sejumlah nilai etika kerja yang termuat dalam ajaran agama dan pandangan adat dapat ditransformasikan kepada masyarakat, dengan kesadaran bahwa ketidakmampuan dan kemiskinan adalah ancaman terhadap kepentingan bersama.

Sejauh ini institusi formal di aras makro dan institusi informal di aras meso belum menemukan kerangka relasi yang tepat terkait dengan pandangan

terhadap kemiskinan sebagai ancaman baru terhadap agama, keadilan dan martabat harga diri. Pengelolaan dan pengolahan informasi serta memperbaiki hubungan sosial dengan masyarakat merupakan langkah awal yang harus dilakukan, sebelum melangkah untuk memberi kesadaran pada masyarakat menyangkut isu ancaman kemiskinan atas kepentingan bersama. Penyadaran-penyadaran dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan adat, salah satunya seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa “Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka berusaha”.

Komitmen-komitmen semacam itu, akan membentuk kesadaran bahwa terdapat ruang improvisasi dan berusaha (*ikhitar*) bagi setiap individu untuk mencapai hasil-hasil ekonomi yang diinginkan. Keadaan sosial ekonomi hari ini bukan takdir kalau belum dilakukan usaha-usaha konkrit dengan bekerja semaksimal mungkin. Seiring dengan itu, institusi formal juga mengkondisikan serta memberikan stimulan-stimulan yang menggairahkan tindakan kerja masyarakat seperti jaminan harga jual yang merangsang usaha lanjutan serta jaminan penyediaan infrastruktur yang memudahkan pemasaran produksi masyarakat.

Institusi sosial semacam *keuchik*, *imuem meunasah* dan lainnya yang berada di gampong memegang peran penting dalam penyadaran masyarakat karena melekatannya dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Namun relasi institusi sosial dengan institusi formal di level makro sangat diperlukan sebagai sumber kekuatan dan dalam memperoleh dukungan komitmen secara lebih luas. Elit sosial di institusi formal diharuskan memiliki pandangan, pemahaman dan komitmen yang sama atas agenda-agenda tersebut.

5.2. Isu-Isu Lokal Masyarakat Pidie terkait Tindakan Kerja Aktor menurut bidang Pekerjaan

Mayoritas masyarakat Pidie mengandalkan sumber-sumber alam dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan dan sebagian kecil lainnya sebagai pedagang. Secara keseluruhan memperlihatkan sebuah kehidupan masyarakat

agraris sederhana. Disamping sebagai petani dan nelayan, sejumlah kecil dari mereka terdapat yang bekerja sebagai pegawai pemerintah ataupun bahkan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan diberbagai instansi pemerintahan kabupaten Pidie Jaya. Meskipun memiliki pendapatan tetap, mereka turut menjalankan usaha lainnya, seperti menjadi petani pemilik atau bahkan turut memiliki boat nelayan. Hal itu, biasanya berlaku bagi pegawai yang memang merupakan penduduk setempat dimana ia membeli atau mewarisi area sawah. Terkadang mereka secara langsung turut aktif berkerja di sawah miliknya

Potensi alam yang terlihat menonjol di kawasan Pidie adala area pesawahan yang terhampar luas, memungkinkan sebagian besar masyarakat untuk bertahan dalam usaha pertanian tanaman padi (*meubleng*). Sebagian lainnya yang bertempat tinggal di pesisir pantai menjadikan usaha pengkapan ikan di laut sebagai sumber penghidupan. Secara turun temurun masyarakat mewarisi kemampuan *meulaot*, bertani, berternak dan berdagang. Selebih dari itu, adalah mereka yang memanfaatkan peluang usaha dagang dan menjual jasa lainnya seperti bertukang (*utuoh*).

Di antara mereka tidak terlihat batas yang tegas bidang pekerjaan pokok yang digelutinya. Satu sama lain masih saling terkait dan memahami seluk beluk pekerjaan lainnya. Di gampong ini, terdapat nelayan yang juga memiliki pemahaman bertani karena ia mempunyai sawah. Terdapat pula nelayan atau , petani yang juga berdagang secara kecil-kecilan Seperti diungkapkan Kejrue Blang :

“yang sedang memotong padi itu, seorang tengku imuem di meunasah kami. Ia juga seorang guru sekolah sini. Tapi ia mau bekerja seperti itu, mungkin sambil memberi contoh bagi anak muda lain”
(Petani, wawancara di pesawahan tanggal 19 Maret 2010)

Namun demikian, di antara mereka terdapat juga yang lebih banyak membiarkan dirinya tanpa aktifitas produktif. Mereka yang termasuk kelompok ini, biasanya terjadi karena kebutuhan-kebutuhan hidupnya masih dipenuhi oleh kemampuan orang tua atau pihak keluarga lainnya, bahkan istrinya sekalipun. Beberapa uraian berikut ini, setidaknya memberi gambaran mengenai bagaimana tindakan kerja masing-masing aktor dalam kehidupan sosialnya.

5.2.1. Petani dan Kesederhanaan Orientasi .

Saat bulir padi menguning menjelang panen, pemandangan hijau bercampur kuning keemasan memberikan keindahan tersendiri bagi masyarakat yang berlalu lalang di jalanan utama *keude* Meureudu. Letak sawah berdekatan dengan pemukiman penduduk, bahkan berada berdekatan dengan pasar *keude* Mereudu. Hamparan persawahan di Gampong Meunasah Balek tergolong unik, seperti kebanyakan area pesawahan di kawasan Pidie yang berada tak jauh dari bibir pantai. Antara laut dan persawahan, hanya diselingi oleh sejumlah area pertambakan budi daya ikan air payau.. Beberapa informan tani mengakui bahwa diperlukan perhatian khusus untuk tanaman padi yang airnya terpengaruh air pasang laut.



Gambar 5.1. Pesawahan di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

Beberapa informan yang bermata pencaharian petani menyampaikan ceritanya sebagai berikut :

A. Kasus Zakaria : Perantau yang kembali ke Pidie untuk bertani

Dalam umurnya yang saat ini mencapai 65 tahun, kondisi fisik yang dimilikinya menunjukkan informan ini terbiasa bekerja tani sebagaimana ia kisahkan tentang perjalanan hidupnya. Sejak umur 25 tahun ia telah terlibat dalam pekerjaan sebagai petani, sebelumnya ia hanya membantu orang tuanya yang juga

petani. Ayahnya seorang kepala mukim Meureudu Dalam, sebuah jabatan yang disegani oleh masyarakat pada masa itu. Orang tuanya mengelola sepetak lahan miliknya sendiri. Zakaria terbiasa membantu ayahnya dalam bekerja.

Setelah menamatkan pendidikan SMP sekitar tahun 1966, ia bersama dua temannya bermaksud mengikuti seleksi menjadi Bintara TNI. Namun keinginannya itu urung dilanjutkan karena ketidaksetujuan ayahnya. Dengan keras ayahnya menolak, bahkan Zakaria diminta menunda keinginannya itu hingga ayahnya meninggal dunia. Keadaan itu, membuat cerita hidupnya menjadi berubah. Ia menerima ajakan salah satu pamannya untuk berangkat ke Jakarta hingga sangat hafal kawasan Kalibata dan Pasar Minggu sebagai tempat tinggalnya selama tiga tahun di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa masa-masa krisis karena pemberontakan PKI, ia sedang berada di ibu kota negara.

Di Jakarta ia di ajak berdagang oleh salah satu tokoh Aceh yang dikenalnya sebagai seorang yang memiliki jaringan pergaulan dengan petinggi kongres Amerika Serikat saat perjuangan perintis kemerdekaan di masa-masa awal kemerdekaan RI. Ia mengikuti kemanapun Syekh Bidin menjual obat-obatan anti kimia. Perdagangan obat-obat alami ini membuatnya berkelana di beberapa kota di pulau Jawa. Dalam kesempatan ini ia sedikit banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan seorang Aceh yang mempunyai harga diri dan prinsip hidup yang kuat. Ia mengenal dekat kehidupan tokoh tempatnya bekerja, dimana penghargaan akan jasa-jasanya dalam diplomasi internasional tidak mendapatkan penghargaan. Kesempatan untuk merubah keadaan datang, namun demi harga diri ditolak oleh tokoh tersebut. Informan menyebutkan andaikata saat itu, Charles Bidin demikian nama pimpinan usahanya saat berada di USA mau menerima tawaran Markam untuk bersedia menjalankan usaha perusahaan farmasi, tentu saat ini ia bukan petani.

Informan terlahir sebagai anak kedua dari enam bersaudara, mengaku menyerah dengan usaha pekerjaan obat anti kimia yang dilakukannya di perantauan. Sekitar 1970 ia kembali ke Meureudu dan menikah pada tahun 1971. Sejak saat itu, hingga lebih dari 13 tahun berusaha menutupi kebutuhan hidup dengan berdagang di pasar keudue Meureudu. Setiap dua hingga tiga tahun ia

mengganti komoditas yang barang yang diperdagangkan, dari rempah-rempah, ikan hingga es batangan. Namun seiring perjalanan waktu, kondisi dagang yang tidak pasti dan juga diperberat dengan tersedotnya modal dagang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga yang semakin bertambah jumlah tanggungannya maka ia memilih berhenti berjualan. Sebagaimana diakuinya berikut ini :

Saya pernah buka warung jualan, tapi tak berhasil juga. Mungkin tak cocok, akhirnya toko saya dilanjutkan oleh anak saya, cukuplah buat menutupi kebutuhannya sendiri. Saya kembali melanjutkan menggarap sawah milik orang lain yang tergolong saudara dengan saya”
(Petani, wawancara tanggal 8 Maret 2010)

Selanjutnya ia menjalani kembali usaha tani dengan mengelola seperempat hektar tanah milik kerabat dekat Ibunya. Sekali waktu, ia mendapatkan kesempatan mengelola hingga 1,5 hektar milik orang yang dipercayakan padanya. Dari hasil bekerja di sawah ini, ia mengakui dapat menjamin ketersediaan beras bagi kebutuhan pangan keluarganya. Setelah melalui beberapa pengalaman bekerja yang lain, ia mengakui bahwa petani adalah pilihan pekerjaan yang dirasakan paling tepat untuk dirinya mendapatkan pendapatan. Meskipun demikian, ia tak pernah memiliki kemampuan untuk membeli sepetak tanah. Mempunyai hak kelola, dalam istilah setempat disebut “*peumawah*”. Pembagian hasil dari sistem ini adalah dua bagian untuk pengelola dan satu bagian lagi untuk pemilik. Namun, model pembagian ini dirasa tidak adil olehnya. Ia berharap Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi masyarakat yang berstatus pengelola, sehingga ada peraturan yang lebih mencerminkan keadilan.

Meskipun demikian, informan ini mengungkapkan bahwa bagaimanapun keadaannya ia harus tetap dapat menghidupi diri dan keluarganya yang berjumlah delapan orang anak. Meskipun ia merasa kewalahan dengan biaya yang harus ia keluarkan untuk menghasilkan panen padi tidak sebanding antara pendapatan yang diperolehnya. Dari keseluruhan hasil panen yang diperolehnya, ia harus menyisihkan sepertiga hasil kepada pemilik. Sedangkan sisanya, duapertiga dari hasil panen menjadi miliknya juga harus ia sisihkan untuk menutupi modal yang telah ia keluarkan untuk pembiayaan-pembiayaan lain seperti biaya pembelian pupuk, benih, pestisida. Untuk bekerja di sawah ia mendapat bantuan dari seluruh

anak-anaknya yang secara sadar turut membantu pekerjaan orang tuanya. Melihat hal ini sebagian kawan-kawannya heran, karena biasanya begitu sulit mengajak anak-anak turut serta bekerja di sawah.

Informan mengakui bahwa ia mengerjakan sendiri seluruh tahapan pekerjaan untuk sawahnya, kecuali pada pekerjaan membajak. Ia mengupah pekerjaan itu dengan membayar jasa orang lain yang bekerja dengan bantuan mesin traktor. Upahnya sebesar Rp. 160.000,00 untuk membajak kasar di tahap pertama dan untuk tahap kedua guna menghaluskan dikenakan upah hingga Rp.128.000,00. Ia menggambarkan bahwa bila diupah untuk bekerja dari awal hingga akhir dalam “*sinaleh blang*”¹ mengeluarkan uang Rp.600.000,00 hingga Rp.800.000,00. Kemudian disebutkan sejumlah angka pengeluaran bekerja di sawah, seperti untuk biaya sewa tanah sebesar 400 kg untuk luas satu *naleh* atau setara Rp.1.500.000,00 untuk harga padi Rp.3.800,00 per kg. selanjutnya untuk membeli benih Rp. 150.000,00. Upah menyemai benih Rp.350.000,00. Biaya pembelian pupuk sebanyak 200 kg sebesar Rp.400.000,00. Untuk upah menyiangi tanaman pengganggu saat tanaman padi telah remaja sebesar Rp. 170.000,00. Biaya penyemprotan pestisida sebesar Rp.200.000,00. Bila panen diupahkan maka dihitung dengan cara luas tanah 1 *naleh* terdapat ongkos 7 *naleh* yang mana 1 *naleh* dimaksud setara 16 *are* (bambu) atau setara 17 kg gabah padi. Bila dihitung dengan harga jual padi 1 kg sebesar Rp.3.800,00 maka setara Rp. 452.000,00. Selanjutnya untuk ongkos memakai jasa pekerja yang menggunakan bantuan mesin perontok, dalam 1 *naleh* ditentukan ongkos sebesar 5 *naleh* yang setara dengan 85 kg gabah padi atau setara dengan Rp.323.000,00 dengan acuan harga padi sebesar Rp.3.800,00 per kg.

Lebih lanjut disebutkannya bahwa dengan luas tanah satu *naleh*, bila keadaan normal maka ia sebagai pengelola bisa mendapatkan hasil sebesar 12 *gunca* atau setara 2 ton. Bila dengan harga padi sebesar Rp. 3.800,00 maka uang yang dapat diperolehnya sebesar Rp. 7.600.000,00. Pendapatan tersebut dipotong pengeluaran-pengeluaran total sekitar Rp.4.500.000,00 maka yang tersisa sekitar

¹ Luas tanah sawah setara 2.500 Ha.

Rp. 3.100.000,00. Kemudian dikeluarkan untuk *zakeut* sebesar 8 *gunca* atau setara 10 persen dari hasil utama yang kalau diuangkan sekitar Rp.760.000,00. Sisa terakhir adalah Rp. 2.340.000,00. Uang sebanyak itu bila dibagi 150 hari periode bekerja untuk musim tanam maka setiap hari diperoleh pendapatan sebesar Rp.15.600,00 atau setara setiap bulan sekitar Rp.450.000,00. Sebuah angka yang tidak cocok untuk pendapatan menanggung beban keluarga.

Diakuinya, saat ini kerja sama dalam bertani tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu antar petani saling bantu membantu dengan cara bergantian saling membantu pengerjaan antar tahapan bertani. Saat itu, tidak dihitung dengan uang atas waktu dan tenaga yang diberikannya saat membantu. Sekedar makan siang, kue, kopi dan rokok yang disediakan oleh tuan rumah. Demikian sebaliknya, namun hal itu berbeda dengan saat ini dimana sudah lumrah diketahui bahwa keterlibatan tenaga luar keluarga dalam rangkaian proses bertani, harus diupah atau dibayar. Diberikan contoh seperti proses membajak, sekarang tidak lagi menggunakan cangkul ataupun lembu. Disamping menguras tenaga, juga menghabiskan waktu beberapa hari. Bila dibandingkan kesulitan-kesulitan tersebut, jauh lebih murah dan memuaskan apabila mengupah sejumlah uang untuk mengupah pekerja trackor.

Informan ini menyebutkan, saat ini semakin rendahnya kesadaran dan gotong royong antar petani. Bahkan pada untuk hal terpenting dalam usaha tani yaitu pembersihan saluran air untuk kepentingan pengairan air ke sawah. Kebersamaan yang dahulu dirasakan antar warga gampong, kini sangat memprihatinkan. Urusan pembersihan saluran air yang dulunya dengan penuh kesadaran seluruh petani turun serentak untuk membersihkan sepanjang alur air yang mengarah ke persawahan mereka, di bawah koordinasi *kejruen blang*. Namun saat ini tidak ada lagi kesadaran dan ketaatan pada *kejruen blang*. Meskipun dengan kesepakatan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air atau "P3A" sudah dibagi tanggung jawab berupa besaran panjang "*cumba*" aliran air yang sebanding dengan luas petak sawah yang dimiliki atau dikelolanya, tetap saja mereka tidak hadir. Akhirnya aliran air ada yang rapi dan ada yang tak tersentuh sama sekali. Denda yang ditetapkan sebesar 12 *are* (bambu) padi bagi

mereka karena tidak turun dalam pekerjaan gotong royong tersebut, dibayar dengan sekedar saja tanpa sesuai kesepakatan. Bila diluruskan permasalahan ini dapat terjadi keributan atau perkelahian. Masyarakat pernah mau turun semua, saat tentara yang dulu bertugas di Aceh turut mengawasi pekerjaan tersebut. Sehingga ia menilai bahwa masyarakat sekarang hanya mau bekerja gotong royong bila ada tekanan dari tentara.

Ketidakpatuhan ini dilihatnya banyak dilakukan oleh masyarakat berusia muda, sepertinya pemuda sekarang telah berbeda dengan masanya dulu. Saat mana mereka turun bersama-sama orang tua untuk membendung sawah dengan peralatan seadanya. Tujuannya agar kebutuhan air bagi sawah mereka dapat terpenuhi. Ia melihat masyarakat dulu sangat patuh pada pemimpin. Sekarang sudah tak ada pemimpin yang dapat dicontoh. Dulu anak-anak atau pemuda yang bermain sesuatu yang telah dilarang *keuchik* atau pemimpin, belum lewat *keuchik* mereka sudah berlarian menghindari diri. Sekarang malah menantang *keuchik*.

Disebutkan informan, sekarang semua pemimpin sudah dianggap sama saja oleh masyarakat. Baik itu ulama, pemimpin pemerintahan, tokoh adat ataupun *keuchik* dan *tengku imuem*. Pemimpin yang berwibawa adalah mereka yang mempunyai keteguhan dan konsekuen dengan apa yang diucapkannya. Dalam istilah setempat "*peugah lage but, peubuet lageu na*" yang bermakna pemimpin harus sejalan antara perbuatan dan perkataannya, dan perbuatan itu harus sesuai nilai-nilai kebenaran yang seharusnya. Kemudian, dicontohkannya seorang pengemuka pesantren yang mendakwahi agar mendirikan shalat tepat waktu. Namun dalam kesehariannya, pada saat masuk waktu shalat ia lebih memilih tempat ditempatnya daripada mendatangi meunasah atau mesjid. Alasannya ia masih dapat mendirikan shalat setelah tiba dirumahnya. Padahal waktu saat ia tiba dirumah waktu sudah jauh bergeser menjelang memasuki waktu shalat berikutnya. Dalam hal ini, informan memuji pemuka dan masyarakat kelompok salafi atau tabligh yang telah memasang palang pembatas pada kedai-kedainya sepuluh menit sebelum azan berkumandang. Tujuannya agar mereka dapat mendirikan shalat dalam kesempatan pertama saat shalat berjemaah berlangsung.

Informan ini melihat bahwa gejala kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pemimpin telah terlihat sejak pelita pertama berlangsung. Keuchik kepala desa disodorkan sejumlah lembaran yang harus ditandatangani sebagai pertanggungjawaban proyek. Namun pada kenyataannya keuchik tidak menerima dana ataupun proyek sebagaimana tertera di lembaran tersebut. Alasan yang dikemukakan bahwa dana sudah dipotong untuk pihak yang lebih atas. Masyarakat diajarkan dan diberitahu perbuatan-perbuatan yang tidak amanah tersebut. Tradisi tersebut berlangsung hingga hari ini, sehingga masyarakat sangat tidak menghargai pemerintahnya.

Hilangnya penghargaan tak hanya dialami pemerintah, sebagian pemuka agama meski dalam nada bergurau namun mengena dalam perbuatannya. Seperti perkataan "*menyo tapateh haba lam kitab, pienung tupe kap hana ta temeung rasa*". Sebuah pengungkapan bahwa seandainya semua perbuatan merujuk pada kitab-kitab agama maka pinang bekas gigitan tupai sekalipun tak bisa dinikmati. Sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah keadaan dimana perbuatan mencari kesejahteraan tak bisa terlalu berpijak pada nilai dan ketentuan-ketentuan agama. Dalam contoh nyata, diungkapkan informan bahwa selama sepuluh tahun terakhir seorang ulama terkemuka telah kehilangan marwah karena menghadiri kampanye sebuah partai politik dimana pada dasarnya ia diundang untuk membaca doa. Namun, tengku terlihat berada di deretan kursi terdepan menyaksikan tontonan musik yang diiringi joget penyanyi wanita. Semua khalayak menyayangkan hadirnya tengku dalam sebuah acara yang tak pantas dihadiri. Hal itu telah meruntuhkan wibawa ulama. Setelah itu, ulama itu disebut-sebut meminta proyek untuk kelangsungan hidup pesantren yang dikelolanya. Dengan keadaan ulama demikian, jumlah masyarakat yang mau menghadiri ceramah-ceramah atau dakwah agama juga terlihat minim. Masyarakat akan ramai datang, bila yang menjadi penceramah sudah lebih dahulu dikenal sebagai penceramah yang pintar melucu dan membuat tertawa terpingkal-pingkal. Sebagian anak muda akan meninggalkan lokasi tempat ceramah bila dilihatnya isi ceramah tidak menarik. Dengan keadaan itu, tidak banyak bisa diharap dalam sebuah dakwah agama dapat merubah perbuatan orang. Informan mencontohkan bahwa sebagusnya jumlah

shaf orang yang shalat di mesjid atau meunasah bertambah setelah mendengar ceramah. Namun kenyataannya jumlahnya sama saja, yang datang shalat jemaah hanya orang-orang itu saja.

Informan ini mengatakan sulit untuk patuhnya masyarakat pada ulama, bilaman ulama tak lagi menjadi teladan. Disisi lain, masyarakat hilang panutan. Belum lagi kebiasaan masyarakat yang sulit untuk maju, dinilainya masyarakat setempat tak bisa menempatkan diri. Dicontohkannya saat mana masyarakat diberi bantuan modal untuk bertani. Pemberi bantuan hanya mempersyaratkan agar setelah mendapatkan hasil dari tani, modal itu digilirkan kembali kepada anggota yang lain. Petani diberi kebebasan untuk manual kepada mereka atau kepada pihak lain, asal harga yang dipilih adalah yang paling menguntungkan buat petani. Namun, yang terjadi tak sesuai harapan. Sebagian dari mereka menganggap modal itu adalah hak mereka karena konflik, sehingga tak berputar lagi. Ia mengaku iri melihat kejujuran dan disiplin petani-petani di pulau Jawa saat mana dibantu, benar-benar memanfaatkan bantuan untuk kepentingan kemajuan bersama.

Dalam hal " *lueng ie*" atau aliran air, ia mengemukakan kekecewaannya dengan cara bekerja pemerintah. Sering kali saluran air diperbaiki oleh pemerintah saat mana petani sedang memasuki masa tanam. Seharusnya pemerintah dapat memilih waktu saat mana petani sedang tidak berkerja, seperti di bulan Desember saat mana dikalangan petani setempat dikenal dengan sebutan "tutop blang" atau masa kosong aktifitas di sawah. Ia menilai alasan tidak ada anggaran dalam masa itu, adalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah.

Hal lain yang membuatnya gelisah adalah permaian pupuk subsidi. Terdapat permainan pada agen penyalur. Ia mengungkapkan :

"Kalau dua tahun yang lalu, satu sak pupuk bisa berharga sampai Rp.120.000,00. Dibiarkan saja penggelapan pupuk itu oleh aparat. Kalaupun saya ungkapkan pada salah satu polisi kawan baik saya. Ia mengungkapkan sambil bercanda tak sanggup lagi difikirkan keadaan itu. Padahal dengan mudah dapat diperiksa, darimana penjual pupuk itu mendapatkan barang subsidi, hingga terakhir dapat diketahui siapa yang sumbernya"

Disamping harga pupuk, informan juga kecewa dengan harga padi yang dibeli oleh pemerintah. Harga akan baik bilamana pedagang luar Medan datang dan langsung membelinya di tempat panen berlangsung. Mereka mendatangkan truk ukuran besar untuk langsung memuat padi yang telah dibeli. Namun bila tidak ada yang datang menawar dengan harga tinggi, maka tanpa ada pilihan padi akan dijual dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah. Dicontohkannya bahwa harga padi saat ini sebesar Rp.3.800,00 per kg adalah harga yang baik bagi usaha tani.

Disebutkannya pula, bahwa peran orang luar dalam merusak juga ada. Seperti banyak bantuan yang diberikan pihak luar setelah peristiwa tsunami telah merubah tradisi gotong royong warga. Saat ini masyarakat semakin sulit diajak bergotong royong atau diajak rapat. Ia melihat ada perkembangan yang tidak baik dari cara LSM memberi uang kepada warga masyarakat yang bergotong royong, dimana saat itu masyarakat langsung mendapatkan uang setelah aktifitas membersihkan lingkungannya sendiri. Demikian juga setiap rapat untuk membicarakan kepentingan umum, juga diberikan uang transportasi oleh LSM. Sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan uang. Itu semua karena salah LSM yang mengupah orang untuk rapat dan untuk gotong royong. Sekarang mental sebagian sudah terbentuk agar ada uang baru mau turun gotong royong dan ikut rapat.

Informan menyebutkan juga rendahnya kepedulian sosial dari sebagian masyarakat yang kaya. Mereka memiliki tanah dan mereka "carter" kan tanah itu untuk kita kelola. Para pemilik bukannya membantu, tapi malah mengambil manfaat dari kesulitan dari sebagian masyarakat miskin. Meskipun demikian, ditengah kesulitan terdapat kebanggaan yang menyeruak pada diri informan ini. Ia bangga dengan anak-anaknya yang memiliki kesadaran dan kemauan belajar yang tinggi. Secara perlahan kedepan anak-anaknya telah besar dan diantara mereka telah menjadi sarjana dan telah diangkat menjadi pegawai negeri. Ada yang menjadi sarjana guru olah raga, diploma keperawatan dan diantaranya ketiga ada yang sudah menjadi pegawai negeri. Pada dasarnya dua anak perempuannya yang kedua dan ketiga memiliki kemauan yang sama untuk kuliah,

namun mereka mengalah karena mengetahui kondisi keuangan orang tuanya. Mereka memberi kesempatan saudara sulungnya untuk mendapatkan pendidikan tinggi dengan harapan kelak dapat membantu membiayai adik-adiknya sekolah.

Informan yang sering ditemui menggunakan sepeda untuk berpergian, menyebutkan bahwa sebenarnya usaha tani yang telah dilakukannya puluhan tahun ini dapat memberikan hasil yang menjanjikan, namun kendala alam seperti ketersediaan air bagi kebutuhan pengairan sawah dan keasaman PH tanah akibat pengaruh air laut membuat hasil tanaman mereka tidak maksimal, seperti disampaikan berikut ini:

“sebenarnya kita bisa mendapat hasil padi yang lebih baik, kalau saja penyuluh pertanian mau mengambil sampel padi yang kita tanami, untuk diteliti apa sebab kita punya padi tidak sebaik lokasi lain yang lebih jauh dari pantai...tapi ini tidak mereka malah kasih kita pengarahan di kantor, bukan ke lapangan mereka turun”
(Petani, wawancara tanggal 8 Maret 2010)

Dari apa yang diungkapkannya menunjukkan sebuah keadaan bahwa untuk mendapatkan sebuah kondisi pendapatan yang lebih dari sekedar kecukupan kebutuhan diri dan keluarganya, tidak hanya mengandalkan tindakan kerja individual. Untuk mengatasi kendala-kendala yang sifatnya besar, petani membutuhkan intervensi insitusi formal di level makro. Kebijakan dan tindakan pemerintah, dalam hal ini mengantisipasi resapan air payau yang menjangkau hingga kawasan persawahan tidak kunjung dilakukan. Bahkan dikeluhkan cara kerja pemerintah yang dilihatnya tidak turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi petani. Meskipun demikian keadaannya informan ini dan petani lainnya yang lokasi petak sawahnya berdekatan dengan garis pantai, tetap saja mereka menggantungkan sumber pendapatan pada sawah. Hal ini dikarenakan tidak tersedia bidang usaha lainnya yang lebih baik dari itu.

B. Kasus Kakek Karya : Agensi Pembangunan

Informan ini dipanggil dengan sebutan kakek Karya oleh orang-orang yang bekerja pada area sawah yang dikelolanya, mungkin hal itu ditujukan untuk mengingatkan dirinya bahwa meski masih terlihat bersemangat namun usianya

telah mencapai 65 tahun. Lahan sawah garapannya terlihat berbeda diantara petak sawah di kawasan itu. Saat orang lain sedang menanam padi, petak sawah garapannya justru sedang ditanami tanaman cabe merah dan timun. Dua orang perempuan dan seorang laki-laki terlihat rutin membantunya di sawah. Sawah yang telah digarapnya sejak belasan tahun itu bukan miliknya, tetapi merupakan tanah wakaf milik *meunasah*.



Gambar 5.2. Petak sawah garapan seorang pensiunan yang menjalani usaha tani sejak lama. Pola tanam selang antara padi dan cabe serta timun telah lama dijalannya

Kelihatannya wawasan dan pengetahuan yang dimiliki Kakek Karya sebagai seorang pensiunan pegawai negeri membuatnya kreatif, lebih terbuka cara berpikir dan berani melakukan terobosan. Ia menyebutkan bahwa kebiasaannya membaca dan memperhatikan keberhasilan-keberhasilan petani yang melakukan pola tanam selang, mendorongnya untuk mencoba hal tersebut. Ia sendiri telah melakukan pekerjaan bertani sejak masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Lebih dari sepuluh tahun ia mencoba menjalani pekerjaan tani dengan mengolah dua petak sawah milik Meunasah tersebut dalam pola bergantian jenis tanaman yaitu tanam padi dan tanam palawija jenis cabai serta timun. Usaha ini menurutnya memberi keuntungan yang sangat baik, seperti penuturannya di suatu pagi yang cerah di sisi petak sawah garapannya:

“ saya mengajak orang-orang sekitar saya untuk mengolah sawah secara bergantian antara tanam padi dan tanam palawija. Keuntungannya

menjanjikan, tapi tak ada yang mau ikut. Memang untuk bisa palawija tanahnya harus agak tinggi seperti lokasi saya ini. ..itu pupuk untuk tanam padi, masih bisa saya manfaatkan untuk tanaman cabe dan tanam timun. Saya tak perlu memberi pupuk lagi, karena kandungan pupuk untuk menanam padi masih ada di dalam tanah...itu yang bagian belakang itu, sudah saya tanam cabai duluan..lalu saya ganti dengan tanaman timun, hasilnya saya bermodal 5 juta dapat laba bersih sekitar 15 juta...”
(Pensiunan pegawai/petani, wawancara tanggal 20 Maret 2011).

Pengakuan kakek Karya di atas menunjukkan upayanya memberi contoh cara bekerja yang lebih memberi keuntungan bagi usaha tani. Namun ketidaksabaran dan ketidaktekunan dilihatnya menjadi penyebab dari minimnya petani sekitar yang mau mengikuti jejak langkahnya. Perlakuan terhadap tanaman cabe dan timun memang lebih khusus dan usaha jenis inipun menyerap modal yang lebih besar bila dibandingkan dengan tanaman padi, namun hasil yang diberikan juga lebih menjanjikan secara ekonomi. Memang diakuinya bahwa hanya petak-petak sawah yang terletak lebih tinggi yang memungkinkan untuk menerapkan pola tanam sebagaimana dijalaninya, namun mereka yang memiliki petak sawah yang memenuhi kriteria tersebut juga terlihat enggan melakukannya. Disamping itu, adanya pandangan masyarakat bahwa menanam padi itu berkah dan bernilai magis. Hal itu terkait dengan kedudukan padi sebagai sumber makanan pokok dan mungkin relevan dengan pandangan tradisi pra Islam yang menempatkan tanaman padi sebagai jelmaan Dewi Sri.

Informan yang juga sering menggunakan keahliannya dalam memasak nasi briyani ini juga mengungkapkan pandangannya tentang kebiasaan buruk masyarakat Pidie dalam bekerja, terutama laki-laki. Karena itu pula ia memperkerjakan perempuan semua di petak sawahnya, kecuali yang bekerja untuk penyemprotan hama. Ia memuji keuletan, kejujuran dan keihlasan bekerja yang dimiliki perempuan yang bekerja padanya. Sebaliknya ia mengatakan bahwa pada diri laki-laki kebanyakan dihinggapi kemalasan serta sering dipengaruhi fikiran-fikiran buruk. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan cara bekerja orang laki-laki Jawa dengan Aceh, dimana orang Aceh sering dihinggapi rasa malas. Lain lagi hal terhadap yang mau bekerja, setelah berhasil mendapat

beras satu bambu maka seketika dihentikannya pekerjaan. Sisa waktu selanjutnya dimanfaatkan untuk duduk-duduk atau tiduran di meunasah.

Munculnya rasa malas tersebut, disebutkannya terkait dengan alasan sejarah dan sikap toleran antar sesama kerabat. Sebagaimana diungkapkan berikut ini :

“Memang dari dasar, dari dahulu kala..karena orang kita adalah orang yang selalu tersedia bahan untuk dimakan sejak dulu (na pu pajoh dari awai). Kalau orang kita Jawa memang sudah susah hidupnya dari awal cerita. Pencarianpun tidak ada. Kalau di tempat kita, penduduk sedikit..tapi lahan tersedia luas. Di Jawa tidak, berbalik..maka semua diperebutkan. Kalau di kita, semiskin bagaimanapun miskin tapi tidak akan sampai menderita kelaparan (*kiban pih gasin yang deuk hana*). Karena masih kuat rantai saling tolong menolong sesama saudara. Masih ada kasih sayang..

(Pensiunan pegawai/petani, wawancara tanggal 20 Maret 2011).

Keadaan itu, ditambahkannya berimbas pada kemalasan dan rendahnya daya juang. Semua itu terkait dengan rendahnya atau hampir dapat dikatakan tidak adanya kepentingan-kepentingan mereka terhadap kerja. Tanpa bekerjapun, mereka tak sampai kelaparan. Bilapun ada yang mau bekerja, yang dicari tak lebih dari sekedar ada uang di kantong lalu santai di kedai kopi sembari mengumbar cerita-cerita yang jauh dari jangkauannya, semisal politik Amerika dan lain sebagainya.

Kemudian informan ini menyebut keunggulan profil kerja masyarakat Pidie yang bertempat tinggal di gunung atau lereng perbukitan dan dibuat perbandingan dengan cara nelayan bekerja. Sebagaimana diungkapkannya :

“...Beda dengan orang kita yang tinggal di gunung..(*ureung jak u gle*). Orang digunung pendiam, kalau nelayan kasar..kalau di pesisir orangnya pemalas. Kalau di pedalaman orangnya punya kesabaran, sabar yang banyak. Sangat sengsara orang bekerja di gunung. Dalam perjalanan saja sudah menderita, jalan tak bagus, banyak rintangan..tapi itulah kesabaran mereka. Kalau di pesisir kan tidak..karena sebentar aja melaut sudah terlihat ikan, akhirnya bekerja sembari di mulutnya meluncur caci maki yang sudah terbiasa dikalangan mereka. Kalau di gunung kan pendiam. Mereka bekerja tekun mencangkul dan sebagainya..karena itu, masyarakat sedikit banyak kebiasaan mereka sudah kita tahu. Orang digunung juga lebih sehat hidupnya”

Ungkapan ini menunjukkan pandangan informan bahwa lingkungan tempat tinggal dan tingkat hambatan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan hidup akan membentuk mental kerja individu. Keuletan dan ketegaran masyarakat Pidie yang bertempat tinggal dan mencari nafkah dengan mengolah sumber-sumber alam yang terdapat di lereng bukit atau pegunungan disebutnya sebagai orang yang sabar, tekun, telaten dan hemat. Berbeda dengan masyarakat yang bertempat tinggal dan bekerja di pesisir, cenderung royal dan malas. Dikarenakan kemudahan-kemudahan yang diberikan lingkungan bagi mereka mendapatkan sumber penghidupan.

C. Kasus Yusuf : Keprihatinan mendorong Keberhasilan

Petani yang berumur 56 tahun ini memiliki banyak pengalaman menghidupi keluarga dari sumber petak sawah dan tambak. Ia berasal dari keluarga yang tidak sempurna, sejak umur 12 tahun ia ditinggal orang tua laki-laki. Dengan asuhan ibu, ia dibesarkan dengan segala keadaan yang disebutnya memprihatinkan. Hal itu pula kelak membuatnya hati-hati dan telaten dalam melangsungkan kehidupan diri dan keluarganya. Dalam relatif anak-anak itu, ia telah mulai bekerja sebagai "*keneit*" atau semacam magang pada usaha tambak milik orang Jangka Matang Geulumpangdua. Posisi itu membuatnya tidak memiliki pendapatan yang pasti, ia hanya diberi makan atau sepasang baju bilamana panen berlangsung.

Setelah beberapa waktu bekerja, disaat umurnya 17 tahun maka tempatnya bekerja telah menghitung gaji dalam bentuk persen. Sembari itu, ia mengakui diam-diam menyerap semua pengetahuan menyangkut cara bekerja sebagai petani tambak atau dalam istilah setempat disebut "*meuneuheun*". Pada suatu waktu yang dinilainya tepat, sekitar umur 23 tahun ia memutuskan untuk keluar dari tempatnya bekerja dan memulai usaha sendiri. Dengan modal yang ada dari simpanan pendapatan, ia menyewa tambak milik orang lain seluas 1,5 hektar. Usaha ini memberikan hasil yang menggembirakan, sehingga setahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1979 ia memutuskan untuk berumah tangga.

Setelah berumah tangga, informan ini mengaku semakin rajin bekerja. Tabungannya disimpan dalam bentuk emas, sehingga saat orang membutuhkan biasanya akan menggadaikan sawah atau kebunnya. Dalam kesempatan seperti ini, informan meminjamkan emas dan ia dapat mengelola tanah kebun kelapa orang tersebut. Sembari tetap menjalankan usaha tambak, informan turut bekerja membantu usaha tambak milik orang lain dan disela-sela itu ia bekerja menjaring anak-anak ikan kecil yang disebut *sabe*. Kemudian saat telah memiliki tiga orang anak, ia membangun rumah tinggal. Ia mempertimbangkan bila bukan sekarang membangun rumah tinggal, maka semakin sulit untuk ia lakukan itu. Mengingat kebutuhan anak-anak kelak semakin banyak dan rumah adalah sebuah pekerjaan yang menghabiskan banyak uang.

Kondisi keuangan yang semakin baik, membuatnya punya kesempatan membeli lahan-lahan sawah dari orang lain. Baik itu yang dijual, maupun yang awalnya menggadaikan dan merasa sulit untuk menebus gadai maka memilih melepas jual kepadanya. Ia mengerjakan sendiri lahan-lahan sawah miliknya. Saat itu anak-anaknya sudah berada dalam masa pendidikan SD, SMP dan SMA. Ia tidak mengalami kesulitan sama sekali dalam membiayai pendidikan anak-anak kala itu. Bahkan di bidang usaha pertambahan miliknya, ia dapat memperkerjakan dua orang lainnya.

Masa-masa usaha yang paling mengesankan bagi dirinya adalah di awal tahun 1990-an, dimana ia memelihara udang yang memberi hasil berlipat-lipat. Saat itu harga udang sedang bagus-bagusnya, sehingga dari hasil tambak informan ini merasa dapat membeli tambak dan sawah. Kemudian pada tahun 1995, kondisi serangan virus membuat usahanya mengalami kemunduran. Dalam kondisi keuangannya yang menurun, justeru anaknya memasuki jenjang kuliah. Ia melihat kesungguhan dari anaknya, sehingga untuk bekal uang kuliah di akademi keperawatan diputuskan untuk mengambil kredit di baitul qiradh. Informan berharap dapat menutupi cicilan kredit dari usaha tambak dan sawahnya. Dalam keadaan demikian, disusul anak kedua melanjutkan kuliah ke bidang pendidikan perawat juga. Kebutuhan biaya yang besar dan hasil usaha yang tidak sesuai

harapan, mendorong informan menjual lahan sawah dan tambak secara perlahan pembiayaan dan untuk menutupi biaya kredit.

Disusul anak ketiga melanjutkan kuliah ke sekolah guru dan disusul lagi anak ke empat memilih kuliah di pendidikan guru, saat itu informan hanya memiliki satu lahan yang tersisa. Keadaan agak terbantu dengan telah selesainya anak pertama dari kuliah dan bekerja sebagai tenaga honor di rumah sakit pemerintah. Sembari itu, anak pertama membuka klinik semacam mantri kesehatan. Pendapatannya itu dapat membantu pendidikan adik-adiknya. Anak kelima memilih masuk kuliah komputer dan biaya yang dibutuhkannya ternyata lebih besar dari yang diduga. Saat ini anak kelima telah selesai dari kuliahnya dan yang tersisa hanya anak ke enam yang masih dibangku SMA.

Yusuf mengakui bahwa bila dilihat dari kemampuan, ia tidak percaya dengan hasil yang diraih anak-anaknya yang telah menjadi sarjana semua. Semua aset telah ia jual dan ia berusaha bekerja pada satu lahan yang tersisa dan berupaya meminjam pakai lahan tambak milik orang lain. Meskipun kondisi lahan-lahan miliknya telah dijual, tapi ia merasa semua itu seperti masih ada. Ia dapat merasakan itu, karena kesadaran dan kebaikan budi pekerti anak-anaknya yang secara rutin membantu kebutuhan keuangan dirinya. Semua yang ditunjukkan oleh anak-anaknya terlihat sebagai buah dari keprihatinan dan kedewasaan yang ditanamkannya. Ia tak pernah mengajak anak-anaknya untuk terlibat dalam pekerjaan di tambak atau di sawah. Namun bila mereka datang membantu, ia biarkan. Namun ia sangat menjaga agar tidak sampai mengganggu jam sekolahnya, apalagi sampai anaknya libur sekolah hanya karena membantu pekerjaannya.

Saat ini, Yusuf melihat bahwa orang-orang melanjutkan pendidikan anaknya agar menjadi pegawai. Bagi dirinya pendidikan bukan untuk menjadi pegawai, akan tetapi memiliki bekal untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya kelak. Bilapun saat ini, anaknya ada yang menjadi pegawai bukanlah keharusan yang ia tekankan pada anak-anaknya. Yusuf mengakui dirinya hanya bersekolah hingga kelas 5 sekolah dasar.

Menyangkut dengan kebiasaan bekerja masyarakat, Yusuf menilai setelah tsunami orang menjadi tidak lagi sosial. Banyak bantuan diberikan oleh pihak luar, namun pejabat lebih memilih saudara-saudaranya sendiri sebagai penerima. Ia prihatin melihat pemimpin-pemimpin yang semakin tidak bisa dipercaya. Pemimpin dan pejabat menjadi tidak dihargai karena tidak adil dan tidak amanah. Masyarakat pun bekerja karena uang, semasa LSM sering memberi uang Rp.500.000,00 per orang kepada masyarakat karena bergotong royong membersihkan kampung maka saat ini mereka akan bekerja kalau ada yang memberikan uang. Karena itu, sulit menemukan orang mau bekerja membuat kampung menjadi lebih baik. Bahkan bila ada orang yang mau bekerja secara ikhlas dan jujur, akan disingkirkan bila tidak sejalan dengan kemauan dan keinginan mereka.

Pemimpin seperti sudah tidak ada, agamapun tidak dijalankan seperti seharusnya. Sebagai contoh dikemukakannya bagaimana dalam sebuah rapat pemerintah, segera dihentikan ketika azan berkumandang. Namun, ternyata hanya berhenti selama azan berlangsung. Kemudian dilanjutkan kembali tanpa mendirikan shalat. Semua ini terjadi karena ulama hanya mampu berbicara, namun tidak melakukan sesuatu hal sebagaimana ketentuannya. Bila menyuruh shalat tepat waktu, namun saat azan selesai bukannya shalat. Tapi malah melanjutkan kegiatan karena alasan bisa dilaksanakan nanti shalatnya. Saat ini hanya ada orang tabligh dan salafi yang sesuai antara yang disampaikan dengan yang dilakukan. Banyak hal dalam agama saat ini ditambah-tambahkan, sehingga masyarakat sibuk menyelesaikan perbedaan pendapat soal itu.

Yusuf menilai bahwa saat ini masyarakat tidak ingin melihat ada orang lain yang lebih maju. Keadaan adalah sebuah keadaan tak baik dalam kehidupan masyarakat. Bidang pekerjaan semakin sempit, aa mencontohkan bahwa dulu ada *muge* ikan yang bisa mendapatkan langsung ikan dari toke bangku untuk dijual dalam satuan-satuan keranjang yang lebih kecil. Saat ini tidak lagi demikian, sejumlah toke bangku langsung mengambil alih dan menjual ikan-ikan ke kota-kota lain seperti Medan, Banda Aceh atau Lhokseumawe. Model semacam itu,

membuat orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dari sebuah kapal penangkap ikan yang pulang menjadi semakin sedikit.

Untuk dirinya sendiri, Yusuf mengakui bahwa *booming* udang windu telah berlalu. Bila dibudidayakan udang maka selalu mati akibat semacam “virus” yang terbawa gelombang laut tsunami. Sekarang tambak-tambak sudah terbengkalai, walaupun ada yang mengusahakan bibit-bibit ikan hanya sekedarnya saja. Pemandangan budidaya udang windu secara intensif sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya beberapa peralatan yang dulu dipakai untuk usaha udang windu. Yusuf tidak berhenti, ia melanjutkan dengan usaha tanaman singkong yang dikelolanya secara serius. Panen yang sekali-kali itu menjadi pendapatannya.

Kebanggaan Yusuf atas keberhasilan anak-anaknya mampu menutupi ketidakberdayaan ekonominya saat ini. Mengenang keadaan saat anak-anaknya masih dalam kuliah, sekali waktu rekan kongsi usahanya pernah cemburu pada apa yang dimilikinya, yaitu memiliki anak-anak yang memiliki kemauan yang tinggi dalam bersekolah. Yusuf mengatakan anak-anak rekan kongsi itu, tak ada yang melanjutkan sekolah hingga menjadi sarjana. Padahal si rekan kongsi tersebut, dikenal sebagai salah satu nelayan yang pantas disebut *ureung kaya* di gampong Meunasah Balek.

Tabel. 5.1.

Ikhtisar Pola Umum dari Kasus Informan Jenis Pekerjaan Petani

No.	Aspek/ Isu	Uraian
1	Tindakan kerja	Umumnya aktor memilih pertanian sebagai penopang ekonomi keluarga karena dinilai paling rendah resiko kegagalannya.
		Petani jarang memperluas ragam sumber pendapatan ke bidang lainnya
		Hidup prihatin turut membentuk semangat juang untuk memperbaiki keadaan sosial di generasi berikutnya.
		Bekerja sebagai petani dinilai memiliki nilai magis yang diistilahkan “ <i>berkat</i> ” karena bekerja untuk menghasilkan makanan pokok.
		Aktor yang berusia muda, menghindari bekerja di sektor pertanian. Karena citranya yang dinilai

		rendah.
		Aktor yang berusia tua mereferensikan anak-anaknya pada pekerjaan selain petani, semisal pegawai yang bergaji.
2.	Basis tindakan aktor	Bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebagai sumber biaya bertahan hidup atau paling tidak menjamin ketersediaan pangan.
	Basis nilai agama	Nilai Agama tidak terlihat dalam fungsinya mengarahkan tindakan aktor untuk peka secara sosial, berdisiplin dan bekerja sama. Agama hanya terlihat pada ritual bayar zakat dari panen bilamana mencapai ukuran yang diwajibkan.
		Kepatuhan pada ulama semakin rendah, karena tindakan ulama yang tidak sejalan dengan aturan-aturan agama yang sering disampaikannya.
	Basis nilai adat	Tidak seluruh petani memiliki kepatuhan pada institusi sosial adat. Adat tidak lagi memiliki daya paksa untuk membuat aktor bertindak bagi kemanfaatan kolektif.
		Kepatuhan kepada pemimpin insititusi adat menurun, karena bertindak tidak jujur dan tidak adil.
	Relasi dan posisi Agen Pembangunan pada Pemerintahan, Agama dan Adat.	Kepatuhan pada pemerintah rendah karena aktor memandang perhatian dan keberpihakan pemerintah kepada mereka rendah.

5.2.2. Nelayan, Kerja Keras dan Konsumtif

Maju tidaknya kehidupan ekonomi masyarakat Meureudu tercermin dari ramai tidaknya aktifitas masyarakat di *keude* Meureudu. Bila melihat dari struktur pendapatan masyarakat yang sebagian besar mengandalkan hasil tani dan laut, maka secara rutin pasar di ramaikan oleh dinamika hasil kerja nelayan. Nelayan berpeluang memperoleh pendapatan setiap hari, bila dibandingkan petani yang memperoleh pendapatan hanya pada saat musim panen saja. Dengan demikian, keramaian jual beli di pasar sangat terasa saat nelayan mendapat tangkapan ikan yang banyak. Bilapun ada perbedaan adalah pada minggu pertama awal bulan, saat mana para pegawai pemerintah diberikan gaji dan para pensiunan meramaikan pasar setelah mengambil gaji di kantor pos.

Denyut nadi perekonomian *keude* Meureudu yang berhubungan dengan perolehan pendapatan nelayan, juga terkait dengan kedudukan Meureudu sebagai

salah satu pangkalan pendaratan ikan yang dikenal sejak dahulu. Bersandarnya atau hilir mudik boat-boat kapal penangkap ikan berbagai jenis ukuran di sepanjang sungai *krueng* Meureudu bukanlah pemandangan asing bagi masyarakat Meureudu. Untuk mendukung aktifitas tersebut, saat ini telah disediakan pemerintah sarana Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) di Meureudu. Karenanya sangat relevan apa yang diungkapkan salah seorang informan, sebagai berikut :

“yang membuat hidup atau sepi *keude* Meureudu adalah nelayan, saat tangkapan ikan banyak..langsung terlihat hiruk pikuk jual beli di toko-toko. Namun, saat tangkapan ikan sedikit pasar sepi, tak ada gairah. Kalau yang lain, semisal petani sawah. Mereka panen setiap tiga bulan sekali, saat panen saja ramai pasar dengan belanja masyarakat. Setelah itu tunggu tiga bulan lagi. Itu belum kita bilang sudah duluan pinjam uang pada tengkulak”
(Nelayan, wawancara tanggal 14 Maret 2010)



Gambar 5.3 Suasana boat sandar dan aktifitas kerja masyarakat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Meureudu yang berada di gampong Meunasah Balek

Nelayan-nelayan di Meureudu sebagian besar bertempat tinggal di *Gampong* Meunasah Balek dan sebagian lainnya di *Gampong* Meunasah Teupin Pukat, *Gampong* Meuraksa, dan beberapa *gampong* lainnya yang tidak berjauhan. *Gampong* Meunasah Balek telah dijadikan pusat aktifitas kerja para nelayan. Di tempat ini pemerintah melalui BRR NAD-Nias (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias) telah membangun satu kompleks terpadu TPI. Di dalam

kompleks TPI terdapat : 1) dermaga sandar *boat* kapal penangkap ikan; 2) rumah pelelangan ikan; 3) dok pembuatan dan perawatan *boat-boat* kapal nelayan; 4) SPBU mini bagi keperluan pengisian bahan bakar minyak untuk boat yang akan berangkat melaut; 5) kantor Dinas Perikanan dan Kelautan; dan 5) pertokoan yang menjual dan menyediakan ragam kebutuhan nelayan. Berikut ini akan disampaikan mengenai kehidupan beberapa nelayan dalam bekerja untuk memberi gambaran tindakan kerja mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya :

A. Kasus Haji Zainal Abidin (Haji Non) : Perluasan sumber pendapatan

Haji Zainal Abidin atau lebih dikenal dengan sebutan Haji Non termasuk salah satu nelayan yang berhasil dalam usaha bekerja sebagai nelayan di Meureudu. Pada dasarnya ia bukan asli Meureudu, berasal dari Krueng Mane yang berjarak tempuh sekitar satu setengah jam perjalanan darat dari Meureudu. Ketika masih belia, keluarganya telah lebih dahulu bekerja sebagai nelayan. Haji Non muda tidak mau mengikuti abangnya yang pergi melaut. Ia lebih memilih berjualan kacang dengan menenteng tas di dalam kereta api di krueng mane, disamping itu ia sempat bekerja membuka kedai kopi dan berjualan rokok. Menjelang tahun 1964 haji Non mulai bekerja *meulaot*.

Secara perlahan Haji Non muda mulai mengenal cara-cara untuk bekerja mengelola dana. Ia membantu petani-petani yang sedang membutuhkan dana, dengan cara itu kemudian ia memperoleh sejumlah padi yang harganya jualnya sama dengan jumlah yang dipinjamkannya. Sekitar tahun awal tahun 1970-an, abangnya yang melaut mulai menetap di Meureudu, sehingga pada akhirnya mereka sekeluarga pindah ke Meureudu. Pada akhirnya Haji Non turut bekerja sebagai nelayan di Meureudu. Dalam usaha itu, kemudian ia menjadi menjadi pawang hingga menjadi tauke bangku. Sebutan lingkungan nelayan kepadanya pun mengikuti kedudukannya dalam usaha kerja nelayan seperti “Pawang Non” atau kemudian menjadi “Tauke Non” dan sejak dirinya pulang dari menunaikan ibadah haji panggilannya berubah menjadi “Haji Non”. Saat penelitian berlangsung haji Non menyebutkan sejumlah anak-anaknya yang telah

menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana. Anak-anaknya telah menjadi pegawai negeri dan sebagian membantunya dalam usaha nelayan.

Saat ini Haji Non memiliki beberapa *boat* penangkap ikan jenis *pukat langga*. Selain itu ia memiliki aset lainnya berupa tanah persawahan, bangunan rumah megah dan bangunan sarang burung walet. Ia memanfaatkan peluang usaha sarang burung walet yang saat ini sedang menjadi trend usaha baru di Meureudu dan kawasan Pidie lainnya. Menyangkut keadaan nelayan, Haji Non memiliki pandangannya tersendiri mengapa kehidupannya dapat berubah dari nelayan hingga seperti saat ini. Ia menyebutkan bahwa nelayan harus cerdas mengelola uang agar bisa bertahan hidup dan berkembang. Setiap pendapatan dari usaha nelayan harus disisihkan untuk usaha lain, yang paling mungkin adalah membelikan emas yang nantinya bisa dipakai untuk menerima gadai sawah orang-orang yang membutuhkan uang. Hasil mengolah sawah, nantinya bisa dipakai sepenuhnya untuk usaha sawah lagi. Dengan cara itu, sawah pun dapat dibeli menjadi milik sendiri sehingga memberi hasil yang lebih. Cara yang demikian disebutnya sebagai upaya "*peudong peng*".

Lebih lanjut disebutkan haji Non bahwa mengandalkan hasil usaha nelayan semata tidak akan mencukupi. Hal itu dikarenakan nelayan menghabiskan waktunya di laut dengan mengeluarkan tenaga yang berat untuk mendapatkan semua kebutuhan, kecuali ikan. Karena ikan sudah terpenuhi dari hasil melaut, diluar itu semacam beras, minuman kopi hingga uang jajan buat anak sekolah semuanya diambil dari hasil melaut. Haji Non mengakui kalau nelayan terbiasa menghabiskan uang secara tak terduga, sehingga tidak memiliki simpanan sama sekali. Cermat dalam mengelola dan yang sedikit harus dijalani nelayan kalau ingin menjadi lebih baik. Haji Non menyayangkan bila nelayan tak memanfaatkan peluang mengumpulkan modal saat ikan begitu banyak tangkapan ikan yang diperoleh nelayan selama dua tahun setelah terjadinya peristiwa tsunami.

Hal itu berlaku bagi semua nelayan, mungkin untuk nelayan yang telah berstatus tauke dengan kepemilikan boat-boat halnya sudah menjadi lain. Tapi mereka juga dapat demikian, karena merangkak dari bawah. Haji Non

menyebutkan bahwa banyak orang yang sekedar mencari uang, tapi tidak pintar mengelola uangnya

. Sepertinya Haji Non, menerapkan prinsip sederhananya yaitu membuka dua atau lebih mata pencaharian, disamping mata pencaharian utama. Pendapatan dari salah satu mata pencaharian adalah untuk dipakai sebagai sumber kebutuhan biaya hidup sehari-hari, sedangkan pendapatan dari sumber yang lain harus diputar kembali menjadi modal baru sepenuhnya atau tidak dipakai sama sekali. Cara jitu menyimpan keuntungan adalah membeli emas sehingga tercukupi jumlahnya untuk menyewakan atau membeli lahan-lahan yang digadaikan atau dijual orang. Bisa juga untuk membeli ternak semacam lembu dan lain sebagainya.

Ide-ide yang dijalannya sebagai prinsip bekerja dan mengelola pendapatan diperolehnya dari pemikiran dan pengalaman hidupnya sendiri. Ia mengkritik lembaga sekolah formal yang dilihatnya tidak membekali murid untuk bekerja dan berfikir mengembangkan usahanya. Hal itu setidaknya dilihat dari sekolah pertanian dan sekolah perikanan, ia tak melihat diantara lulusan sekolah itu yang menjadi nelayan atau petani handal. Sehingga haji Non lebih percaya kepada proses pembelajaran dalam alam, masyarakat dan lingkungan sosial yang sering membuahkan hasil. Melalui pergaulan, saling cerita dengan orang yang sudah berhasil maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa untuk berhasil harus pintar-pintar mengelola modal dan pekerjaan.

Saat menyinggung bahwa ada kenyataan orang yang sempat maju ekonominya, lalu jatuh maka haji Non menyebut itu kesalahan dari individu itu sendiri. Mungkin larut dalam berjudian atau berfoya-foya. Kalau orang tak berilmu, setiap mendapat uang lalu membelanjakannya dengan barang atau makanan yang mahal-mahal. Anggapannya bahwa besok akan diperoleh pendapatan itu kembali, meskipun dalam kenyaaannya tidak demikian. Diistilahkan dengan *“kadha sikai, hana mungken na si are”*. Haji Non menegaskan bahwa kalau bisa bekerja keras dan telaten dalam mengelola pendapatan, maka pendapatan nelayan jauh lebih tinggi daripada pegawai negeri. Namun nelayan mendapatkannya setiap hari dengan jumlah yang tidak menentu,

sehingga mereka tidak mengumpulkan dengan baik pendapatan yang setiap hari tersebut.

Haji Non membantah sebutan malas bagi masyarakat yang mau bekerja sebagai nelayan. Disebutkannya bahwa bila benar mereka malas, maka tak mungkin mereka mau bekerja susah payah melaut. Hidup di laut sangat melelahkan dan tidak enak. Hanya saja mereka tidak bisa memanfaatkan pendapatannya yang sedikit-sedikit itu. Disebutkan haji Non bahwa bila dijumlahkan dalam sebulan seorang nelayan bisa mengumpulkan uang hingga 3 juta. Namun bagaimana cara mereka membelanjakan uang itu dalam kehidupan sehari-hari, seperti menahan diri untuk tidak menghambur-hamburkan uang dengan membeli makanan yang mahal setiap hari atau apa hal lain yang serupa itu

Haji Non membandingkan sebagian pegawai yang bisa maju ekonominya. Ia melihat hal itu terjadi karena ada pendapatan sampingan yang dikerjakannya secara diam-diam seperti memelihara ternak ataupun menjual barang kredit. Bila ada yang dikerjakan untuk memiliki uang, lalu cara hidup hemat dan cermat dalam mengelola sedikit pendapatannya maka perbaikan ekonomi akan terwujud. Setiap orang akan berusaha bekerja, bila sudah merasa mendesak kebutuhan untuk makan, pakaian dan rokok. Begitu juga kalau istri sudah mengatakan perlu uang untuk keluarga. Maka akan orang laki-laki akan keluar rumah, itu dipikirkannya berputar apa saja jalan yang mungkin ditempuh yang bila perlu bohong pun harus dilakukan demi mendapatkan uang.

Haji Non meyakini bahwa pada dasarnya semua orang memiliki pekerjaan, hanya saja mungkin tidak diperlihatkan pada orang lain. Disamping itu pendapatan dari pekerjaan itu tidak bersifat tetap. Contoh yang diberikannya seperti wanita yang menganyam tikar pandan dirumahnya atau bahkan seorang yang menjual ganja. Meskipun itu melanggar peraturan, tapi ia bekerja mencari uang. Orang Aceh sekarang bekerja untuk apa yang perlu diperolehnya hari ini, tidak berpikir jangka panjang. Menyangkut orang miskin, Haji Non lebih melihat bahwa orang beramai-ramai mengaku miskin karena ingin mendapatkan layanan gratis karena bentuk perhatian Pemerintah kepada orang miskin. Pemerintah dinilainya sering tak tepat sasaran dalam bekerja. Hal itu disebabkan karena tidak

tersedia jalur komunikasi yang baik dengan masyarakat. Pemerintah merasa memiliki orang pintar yang mampu berbuat menurut pikirannya sendiri, masyarakat sebagai pihak yang paling tahu permasalahan dan kebutuhan dirinya malah tak didengar. Haji Non memberi banyak contoh bagaimana ketidaktepatan sasaran pembangunan yang membuat dana pemerintah menjadi tak bermanfaat banyak, seperti pengerukan sungai *krueng* Meureudu.



Gambar 5.4. Pendangkalan sungai *krueng* Meureudu tetap terjadi meskipun telah dilakukan proyek pengerukan. Kebijakan pembangunan yang tak mampu merubah hambatan lalulintas kapal nelayan.

Sebagaimana diungkapkan haji Non bahwa permasalahan hambatan lalulintas kapal nelayan akibat pendangkalan sungai *krueng* Meureudu, diatasi dengan proyek pengerukan dan pembuatan tanggul batas sungai dengan ikatan batu kali melalui sumber dana APBN. Ketidakberhasilan proyek menimbulkan ketidakpuasan dan kurangpercayaan masyarakat nelayan kepada pemerintah. Seperti yang disampaikan haji Non berikut :

“Alur sungai Krueng Meureudu telah kami sarankan kepada tim pemerintah yang turun sejak tahun 90-an, mereka sependapat dengan kami bahwa alur sungai dibuat lurus dan tak mengikuti kelokan yang telah ada. Tujuannya agar saat air turun tidak terjadi pendangkalan di tikungan-tikungan sungai. Kalau lurus kecil kemungkinan pasir-pasir atau lumpur mengendap karena turut dibawah air mengalir. Sekarang lihatlah bentuk sungai yang dibiarkan berkelok-kelok, pengendapan lumpur tak lama membuat dangkal sungai. Sehingga boat-boat nelayan harus menunggu air

pasang baru dapat masuk atau keluar. Hal lain, seperti TPI. Kita sudah memberi pendapat agar dermaga bongkar ikan dibuat saja di Teupin Pukat, sehingga lalu lintas mobil atau motor yang membawa ikan tak perlu melewati dalam kota. Kota pun menjadi indah dan tak lalu lalang kendaraan pengangkut ikan. Namun, realisasinya lain lagi. Banyak kepentingan, petugas yang dulunya turun kebawah Cuma bisa bilang pimpinannya punya pikiran lain lagi, mereka tak punya kekuatan melawan”

(Nelayan, wawancara tanggal 14 Maret 2010)

B. Kasus Yekdin : Berkerja Penuh Perhitungan

Informan ini terlihat menonjol keberhasilannya ekonominya diantara adik dan abangnya. Saat ini ia menjadi andalan keluarganya dan nama Yekdin adalah nama yang disegani oleh para nelayan setempat. Bila nelayan lain terlihat merosot usahanya, tidak demikian dengan Yekdin. Berbekal pengalaman dan kemampuannya dalam berbisnis ia malah dapat menambah jumlah kapal penangkap ikannya. Salah satu kapal yang selalu melaut saat ini adalah kapalnya. Beberapa kali terlihat kapal miliknya berhasil membawa pulang tangkapan ikan dalam jumlah banyak.

Ditengah sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan pemilik boat berhitung-hitung bila akan melaut. Karena biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekali perjalanan ke laut, terkadang tidak berimbang dengan jumlah ikan yang didapat. Bila ikan yang diperoleh tidak memberikan keuntungan, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik. Yekdin terlihat menguasai keadaan lingkungan, ia terlihat sangat hati-hati dan penuh perhitungan dalam bekerja. Kemampuan itu terbentuk dari kemauannya mendalami usaha-usaha di bidang perikanan.

Kepekaan mengelola pekerjaan telah dimulai Yekdin masih remaja. Ketika itu, ia bertekad untuk memulai usaha tambak. Merasa harus memiliki modal untuk menyewa tambak, bibit dan biaya pemeliharaan maka ia memberanikan diri meminta ayahnya untuk mencari pinjaman emas untuk modal usahanya. Walau sempat ragu, namun keyakinan serta argumentasinya membuat ayahnya mencarikan modal tersebut. Dengan modal itu, ia menjalankan rencananya secara

penuh dan total. Meskipun ia harus mengorbankan waktu-waktu yang seharusnya ia berada di kursi sekolah. Hasil kerja kerasnya dalam usaha budidaya ikan yang memberinya keuntungan secara berkelanjutan. Secara perlahan pinjaman modal dalam bentuk emas mampu dikembalikan pada ayahnya, bahkan ia dapat membantu keuangan keluarga.

Disisi lain, keseriusan usaha pertambakan membutuhkan kehadirannya di lokasi kerja yang sering kali harus dilakukannya pada jam-jam sekolah berlangsung. Kecerdikannya membujuk dan meyakinkan guru bahwa ketidakhadirannya untuk menjaga usaha yang sedang dibangunnya. Ia mengakui sering memberi gurunya rokok serta hasil-hasil panen dari tambak yang dikelolanya. Sehingga guru sekolahnya dapat menolerir ketidakhadirannya. membuat gurudapat dikembalikan. Pendapatannya yang dimiliki Yetdin saat itu membuatnya berbeda dengan kawan-kawan yang seusia dengannya yang masih mengandalkan uang pemberian orang tua. Saat kendaraan roda dua hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya, ia telah memilikinya dengan pendapatan dari usaha tambak.

Selanjutnya ia menyewa tambak-tambak orang lain, dan ia berhasil. Perlahan ia mulai mengembangkan usaha untuk pengadaan boat nelayan dan sebagian pendapatannya dibeli beberapa pintu ruko yang saat itu tak ada orang yang tertarik. Nalurinya ternyata benar, seiring waktu harga-harga toko meningkat cepat. Lalu ia menjual kembali beberapa toko itu, dengan selisih harga jual yang jauh berbeda dengan saat ia membelinya dulu. Saat inipun ia masih memiliki toko-toko yang dipakainya sendiri. Salah satu usahanya adalah menjual peralatan nelayan di TPI, dari itu semua kapal penangkap ikan miliknya membeli barang-barang keperluan dari toko usahanya sendiri. Dari itu saja sudah mengalir keuntungan lebih padanya. Barang-barang keperluan peralatan melaut dipesannya dari Medan dan Surabaya.

Disamping itu ia juga menempatkan beberapa *tuah hasan* atau rumpon laut di perairan lautan sekitar Meureudu. Dari *tuah* ini, mengalir pendapatan tambahan padanya. Menyangkut *tuah hasan*, ia terlihat kesal karena aktifitas kapal survey sumber energi sempat memutuskan rumpon laut miliknya. Walaupun diganti

kerugian oleh perusahaan yang melakukan survey tersebut, ia mengaku mereka merusak lingkungan laut tempat nelayan mencari rejeki.

Dalam kesehariannya, Yetdin tidak tampil dengan simbol-simbol status sosial tertentu selayaknya *ureung kaya*. Sepintas lalu, orang tidak tahu bahwa ia memiliki banyak aset kekayaan. Paling tidak ia memiliki empat boat penangkap ikan jenis *pukat langga* dan beberapa toko. Bahkan ia mengakui tidak memiliki alat komunikasi semacam telepon selular, sehingga bila ada orang yang ingin menghubunginya maka selalu melewati orang-orang kepercayaannya. Naluri kerja Yetdin semakin terasah dengan kondisi harga ikan yang tidak dapat dikendalikan akibat tidak tersedianya gudang pengawetan. Karena itu saat penelitian berlangsung, ia sedang memikirkan cara untuk merintis gudang pengawetan dari skala kecil lebih dahulu.

C. Kasus Iskandar Hamid: Nelayan Hidup dari Ketidakpastian

Iskandar Hamid adalah sedikit dari pemuda yang menunjukkan keberhasilan dalam usahanya sebagai nelayan. Informan ini telah mulai bekerja sebagai nelayan sejak berusia 18 tahun. Berasal dari keluarga nelayan, ayahnya ayahnya yang dikenal sebagai nelayan sukses. Setelah ayahnya meninggal dunia, ia semakin serius menekuni usaha itu. Berkongsi dengan kawan-kawan sebayanya yang memiliki kemauan kerja yang sama maka perlahan usahanya dapat berkembang seperti saat ini. Pada awalnya ia hanya memiliki satu boat mesin tempel, secara perlahan ia meluaskan usahanya hingga saat ini ia memiliki lima unit boat kapal penangkap ikan jenis mesin tempel. Iskandar mengakui bahwa suasana setelah tsunami, sangat mendukung untuk memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah banyak dan hal itu mendorongnya menjadi semakin baik.

Dengan kondisi ikan yang mudah diperoleh disertai harga jual yang tinggi, terlebih saat itu harga solar belum semahal saat ini membuat usaha nelayan yang dilakukan Iskandar Hamid semakin berkembang. Meskipun demikian, situasi usaha nelayan saat penelitian ini berlangsung diakui Iskandar Hamid sedang dalam kondisi sulit. Seperti yang diungkapkannya :

“Beberapa tahun yang lalu, kami dapat menangkap ikan dengan sangat mudah, seakan ke laut hanya untuk menjemput ikan. Harga ikan juga sedang tinggi-tingginya, harga minyak murah. Sekarang terbalik, ikan sulit didapat, harga bahan bakar minyak tinggi. Kalaupun ada tangkapan, yang tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan nelayan untuk beli minyak dan ongkos lainnya semisal makanan. “

(Nelayan, wawancara tanggal 14 Maret 2010)

Kondisi sulit itu salah satunya sangat dirasakan oleh nelayan-nelayan yang menangkap ikan dengan mengandalkan kapal penangkap ikan jenis mesin tempel. Jenis kapal ini ada keterbatasan jarak tempuh dan jangkauan. Keberadaan “*tuah*” atau rumpon laut yang dipasang pada jarak 120 hingga 150 mil laut membuat ikan-ikan lebih senang berada di area tersebut dan area itu tidak dalam jangkauan kapal boat penangkap ikan mesin tempel. Akhirnya nelayan yang menggunakan kapal-kapal semacam itu kesulitan mendapatkan ikan. Hanya nelayan-nelayan yang memiliki boat kapal penangkap ikan besar sejenis pukat langga yang mampu menjangkau area tersebut. Perjalanan ke lokasi tersebut menghabiskan waktu hingga 2 hari.

Untuk mensiasati kelangkaan ikan dan mahalnya bahan bakar solar, Iskandar telah memikirkan untuk mengusahakan kapal penangkap ikan jenis boat “*bak*” yang menggunakan mesin merek Yanmar yang dikenal irit bahan bakar. Kapal jenis ini dipergunakan untuk melaut dengan masa di laut hingga tujuh hari, dimana dukungan makanan dan kebutahan nelayan sangat dibutuhkan. Aktifitas memancing ikan menjadi andalan nelayan di jenis kapal ini. Informan merasa bahwa pendapatan dari boat mesin tempel yang maksimal memberi hasil paling banyak Rp.5.000.000,00 dalam satu pekan, tidak memadai untuk saat ini.

Musim nelayan juga semakin tidak jelas, ikan-ikan biasanya banyak saat musim “*barat*” yang puncaknya tiba pada bulan Maret hingga April. Namun dalam beberapa tahun terakhir pola tersebut tidak berlaku. Mendapatkan ikan pada musim barat atau musim timur hampir tidak ada bedanya. Melihat kondisi ini, Iskandar juga sudah mulai mengalihkan asetnya dengan membeli petak sawah sebagai sumber penghasilan lainnya diluar nelayan. Kegiatan nelayan adalah kegiatan yang penuh ketidakpastian. Kalau sedang banyak maka banyak ikan. Ikan-ikan itu segera dibawa ke Medan, disana dijual dengan harga yang

ditentukan oleh toke Medan, yang penting tong-tong ikan itu segera berpindah tangan.

Iskandar sadar bahwa saat jumlah ikan sedikit di Pidie maka ikan-ikan itu juga yang dikirim oleh toke Medan ke Pidie. Tentunya dengan kesegaran yang jauh berbeda dan dengan harga yang berbeda pula. Nelayan-nelayan besar setempat tidak cukup dana untuk membangun gudang pengawetan ikan. Disamping itu, berkongsi juga dirasa akan membawa kerumitan saat usaha berhasil kelak. Karenanya saat ikan sedang banyak, maka segera berpindah ke tong-tong guna dibawa ke kota lain. Pada saat itu, pendapatan nelayan meningkat cepat dan secepat itu pula uang-uang dibelanjakan semuanya oleh nelayan. Maka pedagang sangat senang kalau nelayan sedang bagus hasil melaut.

Disinggung mengenai kendala yang dialami sebagian pemuda lain yang sulit maju, informan yang berusia 38 tahun dengan tiga orang anak ini mengungkapkan karena ketidakpastian yang sangat tinggi dari kehidupan nelayan. Nelayan-nelayan muda tidak memiliki boat penangkap ikan, katakanlah mereka menyewa boat mesin tempel milik orang lain. Pendapatan yang diperoleh dari sekali melaut berkisar Rp.1.000.000,00. Kemudian uang itu disisihkan untuk pemilik sebesar Rp.500.000,00 dan sisanya lalu dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat 250.000,00. Modal hanya mungkin bertambah dari melaut bila boat itu miliknya sendiri. Namun untuk membeli boat juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Saat ini, informan ini mengakui bahwa nelayan dalam posisi sangat kesulitan. Harga minyak satu liternya berkisar Rp.4.800,00 dan kadang-kadang dengan harga Rp.5.000,00 bila membeli diluar stasiun pengisian resmi. Dengan harga bahan bakar minyak subsidi yang tinggi dan sulit diperoleh, melaut adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Kadang-kadang kalau membawa bon dari panglima laut, baru dilayani di stasiun pengisian bahan bakar minyak. Bila tak membawa apa-apa, jangan harap dapat membawa pulang minyak.

Saat ini ia juga membuka pangkalan minyak solar untuk kebutuhan boat nelayan. Ia mengakui bahwa ia bukan orang yang pertama kali berusaha membuka

pangkalan minyak solar bagi kebutuhan kapal-kapal nelayan, sebelumnya telah ada yang lain. Seperti yang diungkapkan berikut :

“saya pikir apa salahnya membuka pangkalan penjualan minyak tanah yang lebih dekat dengan dermaga. Lagi pula saya lebih memahami keadaan nelayan, saya berani menghutangi minyak kepada mereka. Pedagang minyak yang telah lebih dahulu ada tidak mau menghutangkan”
(Nelayan, wawancara tanggal 14 Maret 2010)

Diantara hal yang membuat pangkalannya banyak dikunjungi oleh para nelayan, adalah kesediaanya memberi hutang berupa keringanan pembayaran solar. Nelayan pemilik boat diperbolehkan membayar setelah kapal kembali dari melaut. Sebagai nelayan, ia sangat memahami kesulitan para nelayan pemilik *boat* yang harus memiliki modal tak sedikit setiap akan melaut. Setidaknya mereka perlu BBM dan bahan persediaan makanan selama berada di laut. Persoalan bahan bakar adalah salah satu persoalan penting untuk dapat memberangkatkan boat-boat nelayan ke laut. Dengan cara itu, ia termasuk mendorong aktifitas nelayan untuk bekerja mendapatkan hasil tangkapan ikan. Dari hasil itu bukan saja ia dapat memperoleh bayaran atas sejumlah solar yang diambil padanya, namun juga nelayan mendapatkan pendapatan dari penjualan ikan

Ia menyayangkan sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang telah disiapkan di TPI Meureudu menjadi terbengkalai karena tidak jelas penanggung jawab operasionalnya. Ia telah menawarkan diri untuk menjadi pengelola dan bersedia untuk membagi laba dari hasil usaha itu. Namun ketidakjelasan informasi dan penanggungjawab instalasi stasiun itu membuatnya menjadi hilang semangat. Saat ini, stasiun dan alat-alat penunjang terlihat sudah rusak. Iskandar sangat menyayangkan sejumlah dana yang telah digulirkan untuk pengadaan stasiun tersebut tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Contoh lain, diungkapkannya bahwa di Dinas Perikanan telah tersedia palka dan viber untuk bantuan kepada nelayan. Tapi informasi yang simpang siur, membuat semuanya menjadi serba tidak pasti. Beberapa nelayan telah mengakukan diri sebagai penerima alat tersebut. Namun, beberapa pihak meminta imbalan sebelum alat tersebut diberikan. Demikian juga dengan kapal penangkap ikan jenis pukat langga yang disebut-sebut milik pemerintah daerah, tidak jelas

akan dikemanakan untuk usaha nelayan. Informan ini mengatakan bahwa hubungan mereka dengan dinas perikanan terbilang tidak ada. Terakhir kali dinas mengundang rapat para nelayan untuk membicarakan pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Hal itu mengecewakan nelayan, untuk urusan pembebanan mereka dikumpulkan. Namun untuk urusan mendapatkan pendapatan bagi keberlangsungan hidup nelayan terhitung tidak tidak ada.

Tabel. 5.2.
Ikhtisar Pola dari Kasus Informan Jenis Pekerjaan Nelayan

No.	Aspek/ Isu	Uraian
1	Tindakan kerja	Umumnya aktor memilih perikanan sebagai penopang ekonomi keluarga hanya memiliki modal tenaga dan warisan pengetahuan.
		Nelayan cenderung memperluas ragam sumber pendapatan ke bidang lainnya
		Hidup prihatin tidak menjamin terbentuknya semangat juang untuk memperbaiki keadaan sosial di generasi berikutnya.
		Bekerja sebagai penuh ketidakpastian perolehan. Karenanya ketika dapat seperti “membalas dendam” atas semua hasrat konsumtif yang tertunda.
		Anak laki-laki nelayan, cenderung tetap dalam usaha nelayan bilamana orangtuanya berada dalam profesi ini. Sedangkan anak perempuan, relatif terbuka.
		Aktor yang berusia tua memberi kebebasan bagi anak-anaknya memilih pekerjaannya sendiri.
2.	Basis tindakan aktor	Bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebagai sumber biaya bertahan hidup.
	Basis nilai agama	Nilai Agama tidak terlihat dalam fungsinya mengarahkan tindakan aktor untuk peka secara sosial, berdisiplin dan bekerja sama. Kerjasama dan keeratan hubungan antar nelayan lebih disebabkan beratnya medan kerja mereka.
		Kepatuhan pada ulama semakin rendah, karena tindakan ulama yang tidak sejalan dengan aturan-aturan agama yang sering disampaikannya.
	Basis nilai adat	institusi sosial adat “panglima laot” masih eksis di kalangan nelayan, namun keterbatasan kapasitas dan hubungan yang tak baku dengan dinas perikanan membuatnya tak mempunyai hak negoisasi kepentingan nelayan
		Kepatuhan kepada pemimpin insititusi adat relatif tinggi. Karena abu laot berada dalam kebersamaan

		dengan sesama nelayan.
	Relasi dan posisi Agen Pembangunan pada Pemerintahan, Agama dan Adat.	Kepatuhan pada pemerintah rendah karena aktor memandang perhatian dan keberpihakan pemerintah kepada mereka rendah.

5.2.3. Aktor Pedagang dan Keterjepitan Kondisi Sosial

Lokasinya yang Berbatasan langsung dengan *keude* Meureudu, membuat *meunasah* Dayah Kleng menjadi salah satu pilihan bagi pedagang bertempat tinggal. Pemandang dari India yang pada mulanya melakukan aktifitas dagang memilih untuk menetap dan bertempat tinggal di gampong ini, terutama di dusun Dayah Kleng. Dalam beberapa dekade, pedagang keturunan sukses mengembangkan usaha perdagangannya pasar atau *keude* Meureudu. Hal itu terungkap dari keberadaan beberapa rumah adat Aceh yang masih berdiri kokoh dan berdekatan satu sama lain di *meunasah* Dayah kleng. Kesuksesan usaha kerja itu menempatkan mereka dalam sebutan *ureung kaya* pada tempat yang tinggi di pelapisan sosial masyarakat setempat. Salah satu simbol status sosial yang tinggi adalah rumah mewah yang saat itu berlaku, yaitu rumah adat Aceh. Hal itu menunjukkan pula bahwa secara kultural pedagang keturunan India telah menyatu dengan masyarakat setempat.



Gambar 5.5. Rumah Tradisional Aceh di Gampong Meunasah Balek, sebuah bangunan yang menjadi simbol kesuksesan dan tingkatan status sosial pedagang keturunan India era tahun 60-an dan 70-an

Pada era tahun 1960-an dan 1970-an, status sosial *ureung kaya* di gampong Meunasah Balek dapat dilihat dari tingkat kemewahan rumah hunian

tempat tinggal mereka, dimana hanya ureung kaya yang mampu membangun rumah adat Aceh. Selain mereka yang bekerja sebagai pedagang sulit untuk membangun rumah tersebut. Seperti yang diungkapkan berikut ini :

“dulu di dayah kleng ini, semua pemilik rumah bagus hanya pedagang, yang pegawai rumahnya kecil-kecil. Lain dengan sekarang, yang besar-besar rumah pegawai”
(Pedagang, tanggal 12 Maret 2010)

Ungkapan seorang informan yang merupakan pedagang keturunan tersebut menunjukkan sebuah pergeseran atau perubahan sosial dimana lapisan strata sosial tertinggi yang dulu diduduki oleh para pedagang, namun saat ini telah pula diduduki oleh masyarakat yang bekerja sebagai wirausahawan, nelayan dan pegawai negeri atau pejabat politik di lembaga pemerintahan seperti anggota DPR Kabupaten.



Gambar 5.6. Rumah beton moderen yang menjadi simbol status sosial *ureung kaya* saat ini di Gampong Meunasah Balek. Saat ini status ini disandang oleh mereka yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, wirausahawan kuliner dan pedagang

Saat penelitian ini berlangsung, beberapa rumah adat tradisional Aceh tersebut, sedang diupayakan pemerintah setempat untuk menjadi objek pada kawasan wisata tradisional Meunasah Balek. Kebijakan diarahkan untuk mempertahankan keberadaan beberapa rumah adat yang dinilai bersejarah dan

memiliki keunikan tersendiri karena didalamnya memuat jejak akulturasi budaya India dan Aceh. Karenanya di gerbang utama memasuki Gampong Meunasah Balek dituliskan pada sebuah papan “Perkampungan Tradisional bagi Gampong Meunasah Balek/ Dayah Kleng”.

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana tindakan kerja masyarakat yang menjadikan usaha berdagang sebagai sumber penghidupannya, pada bagian berikut akan dikemukakan informasi-informasi terkait dari beberapa informan pedagang.

A. Kasus Kasim : Pegawai yang kreatif berniaga

Berbekal kemauan, pengalaman dan kreatifitas telah mengantar Kasim, seorang pensiunan guru menjadi orang yang sukses dalam bidang usaha berdagang hasil industri rumah tangga yang pabriknya berada di rumah tinggalnya. Hasil produksi industri kuliner lokal yang diusahakannya adalah berupa kue adee. Ia menjalankan usaha ini bersama istri dan ketiga anaknya. Dua anaknya yang lain berada di Bogor, salah satunya sedang melanjutkan studi pascasarjana di IPB dan yang lain bekerja sebagai pegawai negeri sembari mendampingi tugas suaminya sebagai anggota Brimob.

Saat ini, produk kuliner buatan Kasim yang diberi label Adee Mutia dikenal luas sebagai *branded* kue adee yang bermutu. Selama 10 tahun terakhir industri ini berkembang pesat dan produk kue adee mereka menjadi incaran para masyarakat yang melewati kawasan Pidie menuju Medan atau Banda Aceh. Tingginya permintaan oleh-oleh kuliner khas Aceh ini, menjadi penyebab munculnya industri sejenis di kawasan ini. Kasim juga turut mendorong para pekerja di pabrik pembuatan adee di rumahnya untuk mandiri membuka usaha sendiri, tanpa merasa khawatir akan menjadi pesaing usaha.

Salah satu hal yang tetap pada diri Kasim, meskipun telah sukses adalah tetap tampil seperti sediakala. Rumah tinggal mereka tidak dirubah untuk menunjukkan kesuksesan itu. Kendaraan yang digunakan juga tidak menunjukkan suatu kemewahan. Sebagian pendapatan dikabarkan informan lain, dialihkannya untuk membeli properti, seperti tanah dan bangunan. Kelihatannya Kasim

memahami dinamika bisnis kuliner yang tak selalu berada dalam kondisi puncak atau akan melewati masa *booming*.

Di pabriknya yang sederhana Kasim memperkerjakan 8 orang wanita yang masing-masing bertanggungjawab pada dapurnya. Mereka adalah para tetangga yang merasa sangat terbantu karena pendapatan dari bekerja tersebut. Apalagi Kasim dan istrinya memberi upah secara harian, dengan perhitungan per produksi kue yang mampu mereka hasilkan. Hal itu mendorong motivasi kerja mereka sehingga setiap orang bisa mendapat antara Rp.80.000 hingga Rp. 150.000 per hari. Uang kerja hari ini akan dibayarkan langsung pada keesokan harinya. Diluar itu terdapat mereka yang bekerja sebagai orang yang menangani *tapeh*, kukur kelapa, pencuci loyang cetak kue. Tukang kukur kelapa merangkap RBT (petugas pengantar ke toko mendapatkan pemasukan hingga Rp. 100.000 per hari. Kasim menyebutkan bahwa ia harus mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000 per hari untuk biaya gaji pekerja.

Kasim mengakui bahwa terobosan yang dibuatnya dalam memasarkan hasil produksi kue adee tak terlepas dari kreasinya dalam mengemas kue sedemikian rupa. Ia mendapatkan inspirasi dari penanganan kue khas Medan yang bernama bingkang. Di luar itu, ia juga berusaha mencari titik penjualan yang paling memungkinkan untuk orang ramai mengetahui keberadaan kue adee, yakni di persimpangan yang menghubungkan Meureudu dengan jalan negara lintas Sumatera atau dikenal dengan jalan Medan-Banda Aceh. Toko yang dipilihnya itu, diberinya motivasi dengan pendapatan sebesar Rp.3.000 dari setiap kotak kue yang laku. Kasim mengaku senang dengan usahanya maju maka orang lain ikut merasakan dampak baiknya. Dalam perkembangannya terjadi lonjakan permintaan yang membuat pihak toko dapat menikmati keuntungan Rp.500.000 hingga Rp.750.000 per hari.

Kasim mempunyai pandangan tersendiri tentang kehidupan ekonomi masyarakat, ia mengatakan mayoritas masyarakat Pidie adalah petani. Namun diantara mereka sedikit yang bekerja sebagai petani pintar, sehingga keadaannya tidak berubah menjadi lebih baik. Tabiat bekerja orang di Aceh beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa orang diberi upah sebanyak tigapuluh ribu sehari sudah

sangat senang, namun orang di Aceh belum tentu mau. Mereka akan melihat-lihat dulu jenis pekerjaan. Mungkin hal itu terkait dengan kondisi orang di Aceh yang semiskin-miskinnya pasti punya rumah, bisa makan dan punya pakaian.

Hanya saja, Kasim menyangkan hal yang tak dapat dirubah dalam masyarakat aceh adalah kebiasaan untuk berhenti sejenak setelah mendapatkan uang dari bekerja. Sebagai contoh, petani sawah. Setelah panen, mereka santai-santai di warung kopi. Padahal tanah itu bisa digarap lagi untuk menanam timun, cabe atau kacang atau apa yang mungkin. Nanti saat musim tanam tiba baru mereka memulai lagi. Satu hal yang dianggapnya kelebihan dari orang Aceh adalah tanggungjawabnya yang tinggi bila menyekolahkan anaknya. Sejauh anaknya mau bersekolah, maka orang Aceh akan sekuat tenaga bekerja untuk dapat mengirim biaya kebutuhan sekolah anak-anaknya di rantau.

Kasim mengatakan bahwa kunci cara bekerja yang membawa keberhasilan belum dilakukan oleh seluruh orang Aceh. Kunci tersebut adalah bekerja dengan fokus, sepenuh hati, hal itu akan membuat orang sabar, telaten dan selalu berpikir sehingga mendorong munculnya kreatifitas. Ia menyebutkan masih banyak peluang usaha yang bisa dilakukan oleh masyarakat Pidie, dengan mengandalkan hasil pertanian dan perikanan yang berlimpah. Wawasan dan cara berpikir disebutkannya sebagai hal lain yang turut menentukan kreatifitas dalam berkerja seseorang. Lalu Kasim menggambarkan sebuah keadaan bekas muridnya yang harus menjadi ojek karena hasil tanaman kakao yang diusahakannya tak dapat memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Kemudian dengan sedikit saran, bahwa kebutuhan jangka pendek dapat dipenuhi dengan membudidayakan tanaman muda, semacam sawi di celah-celah tanah kebun yang kosong. Saran itu membuatnya kewalahan melayani orang yang membeli sawi langsung ke kebunnya.

Kasim menyebutkan kebiasaan kerja lainnya yang membuat orang Aceh tak maju, seperti boros bahkan terbiasa berbelanja melebihi kemampuan keuangannya. Kurang perhitungan, seperti halnya petani yang mengikat diri dengan berhutang sebelum panen tiba. Mengambil motor kredit, yang sebenarnya motor itu tidak terlalu mendesak kebutuhannya. Hampir setiap rumah memiliki

motor bebek. Tidak perhitungan tersebut, termasuk halnya dalam makanan dan minuman. Hal itu mudah diperhatikan saat pagi hari orang Aceh sarapan di kedai kopi, mereka memesan nasi guri berikut lauk bebek atau ayam. Lalu ditambah minuman kopi dicampur telur atau kadang kopi susu. Lihat juga dalam bulan puasa, semua yang dilihat semua dibeli. Persoalan kebutuhan barang elektronik seperti tivi, vcd *player* dan parabola sudah semacam kebutuhan wajib. Kasim mengemukakan bahwa dengan model kerja demikian saja orang Aceh dapat hidup layak, dapat dibayangkan kalau rajin yang kemungkinan besar dapat membuat sebuah keadaan jauh lebih baik.

Kasim mengakui bahwa jauh sebelum ini pernah berusaha mengelola truk untuk angkutan pasir, tanah ataupun ikan. Namun berbagai kendala seperti kekurangjajaran supir ditambah lagi dengan biaya perawatan truk yang tak sebanding dengan pemasukan yang sifatnya sudah baku. Karena sekeras apapun seorang supir truk bekerja, namun pendapatan tak akan pernah melewati jumlah tertentu. Hal itu disebabkan truk sudah terukur daya angkutnya dan sudah terbatas jam kerjanya. Pendapatan paling tinggi sekitar Rp. 200.000, yang hanya tercukupi untuk biaya anak sekolah.

Menyangkut alasan apa yang dapat dapat mendorong orang Aceh bekerja, Kasim melihatnya bahwa bila ada kepentingan akan sesuatu barang mereka akan bekerja. Namun mereka akan langsung berhenti kerja saat mana uang untuk dapat membeli barang tersebut telah tercapai. Seperti halnya, menyekolahkan anak. Orang Aceh akan serta merta tergerak untuk mencari uang agar dapat membiayai sekolah anaknya. Bahkan Kasim mencontohnya dirinya sendiri yang terdorong untuk membawa truk agar anaknya bisa bersekolah seperti anak yang lain. Melanjutkan anak ke perguruan tinggi, membuat setiap orang tua terdorong terus menerus untuk bekerja, dan kepuasan tertinggi saat melihat anaknya telah berhasil diwisuda menjadi sarjana.

Demikianpun Kasim mengamati bahwa sebagian orang yang dulunya *ureung kaya* saat ini telah jatuh. Hal itu tak terlepas dari ketidakseriusan anak-nakanya dalam bersekolah. Sehingga sebarangpun harta yang ditinggalkan tidak dapat dikembangkan olehnya. Bahkan terkadang, harta orang tuanya dihabiskan

untuk membebaskannya dari penjara akibat tergodanya obat-obatan terlarang. Kasim menyebutkan kehidupan saat ini jauh berbeda tantangannya dibandingkan dengan situasi dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu. Saat itu, kompetisi masih rendah dimana sedikit orang yang mampu berdagang. Sekarang apapun pekerjaannya memerlukan pun masih kurang berkompetisi. Saat ini semua jenis pekerjaan baik tani, nelayan atau pedagang harus memakai strategi dan ide prakarsa.

Kasim meyakini bahwa hanya dengan ilmu maka orang dapat berkreasi membuat pekerjaan. Tak mesti menjadi PNS, lingkungan pergaulan dalam pendidikan membuat jaringan luas untuk mendapatkan semua informasi dan peluang. Khusus soal pergaulan, semakin tinggi pendidikan maka semakin luas pergaulan. Secara berjenjang pendidikan formal turut membentuk jaringan pergaulan yang semakin luas dan tinggi cakupannya. Seperti tingkat SD bergaulnya dalam lingkup desa, SMP bergaulnya dalam lingkup kecamatan, SMA bergaulnya dalam lingkup kabupaten dan kuliah bergaulnya dalam lingkup provinsi atau ibu kota negara. Dengan pergaulan bisa hidup berbeda.

Dengan ilmu dan pergaulan semua bisa menjadi berharga. Seperti buah talas yang biasa dibuang, saat ini menjadi makanan ringan. Pohon Jati yang dulunya tak bernilai ekonomis. Saat ini diminati orang dengan membuat ladangnya ditanami pohon jati dengan tanpa harus telaten merawatnya. Kasim meyakini bahwa perubahan ekonomi berawal dan berbasis pada pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua pada anaknya. Beberapa contoh nyata diberikan Kasim untuk memperkuat argumentasinya, seperti tokoh Yusri Melon, yang dikenal sebagai aktor pembaharu di bidang agro bisnis. Ia dapat merubah ekonomi diri dan orang tuanya.

B. Kasus Tarmizi A. Jalil : Bertahan hidup pada usaha kecil

Tarmizi yang sehari-hari sering dipanggil dengan sebutan Midi pernah merantau ke Jakarta pada tahun 1970, berkerja dalam usaha percetakan dan sempat berpindah-pindah sehingga membuatnya menghafal beberapa belahan Jakarta. Pada tahun 2005 atau setelah peristiwa tsunami di Aceh, ia mengambil keputusan untuk kembali ke Pidie dengan membawa pulang keluarga. Ia

mengakui tak mendapatkan apa-apa selama perantauan kecuali keluarga. Pertimbangannya kembali ke Pidie, semata-mata untuk mendapatkan peluang hidup yang dikiranya akan lebih baik. Gampong Meunasah Balek adalah tempat dimana ia berasal, sehingga ia tak asing dengan orang-orang sekitar yang merupakan keluarga besar yang sempat ditinggalkannya bertahun-tahun.

Saat penelitian berlangsung, ia bersama istrinya bekerja menjual lontong di pagi hari. Dengan menggunakan becak dayung, setiap hari Midi terlihat sibuk mengantar dan menjemput peralatan dagangan dari rumah ke keude atau sebaliknya. Karena tak memiliki tempatnya sendiri, ia memilih tempat berdagang di teras salah satu kedai kopi kenalannya di *keude* Meureudu. Midi menumpang rak milik tukang jual nasi yang mulai dipakai berjualan sejak jam 11. Karenanya mendekati jam 11 ia sudah harus membereskan barang dagangannya, meskipun masih tersisa dagangan lontongnya. Bila tersedia waktu, kadang-kadang ia berusaha mencari pendapatan tambahan dengan cara bekerja membantu proses bongkar muatan tong-tong ikan hasil tangkapan nelayan di TPI Meureudu. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat mengantar ikan dengan becak dayungnya ke keude Meureudu.

Midi terlihat rajin mengikuti ibadah shalat berjemaah di mesjid Meureudu. Terutama saat shalat ashar dan dhuhur berlangsung. Ia memiliki pandangan tersendiri dengan suasana kerja di Meureudu, seperti yang diungkapkan berikut ini :

“saya lebih suka Meureudu saat masih kecamatan, menjadi kabupaten hanya membuat harga sewa toko meninggi dan membuat harga-harga barang ikut dinaikkan pedagang agar tertutupi biaya sewa itu. Orang jadi lebih suka belanja ke Ulee Glee daripada Meureudu, karena harga barang disana lebih murah. Karena harga sewa toko disana masih seperti dulu, sekitar 18 juta setahun.”

(Pedagang, wawancara tanggal Maret 2010)

Midi menjelaskan bahwa ia semakin gusar dengan biaya-biaya yang membengkak sejak dibentuknya kabupaten Pidie Jaya. Meningkatnya harga tanah, harga bangunan serta harga sewa toko membuatnya kehidupan dagang menjadi lesu. Jumlah pembeli tidak bertambah, karena yang membeli hanya orang-orang yang bertempat tinggal pada *gampong-gampong* di sekitar Meureudu saja.

Sedangkan masyarakat yang agak jauh dari Meureudu, lebih memilih untuk berbelanja pada pusat-pusat ekonomi baru seperti Ulee Glee dan Beureunuen. Kedua tempat itu, tidak mengalami guncangan harga akibat penetapan Pidie Jaya menjadi kabupaten otonom.

Kegusaran Midi berkaitan dengan kesulitannya mendapatkan modal usaha tambahan. Pendapatan yang diperolehnya sebagai penjual lontong, habis dipakai untuk hidup saja. Dari pendapatan berjualan, Midi tak sempat menambah atau memutar menjadi modal baru karena sebagian dari pendapatan itu habis dipakai untuk biaya sekolah dua orang anaknya. Ketika disinggung dengan kredit usaha kecil dari perbankan, mengemuka pandangannya yang kritis terhadap uang kredit. Dengan tegas dikatakannya bahwa ia tidak akan pernah mau meminjam modal uang di bank yang diyakinya haram. Midi menghindari tercampurnya usaha halalnya dengan uang kredit yang diyakinya riba. Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Karena itu, ia hanya berharap suatu hari mendapatkan bantuan dari pihak yang tidak menentukan bunga saat hutang modal diberikan. Ia mengaku akan mengembalikan pokok pinjaman dan akan memberi sukarela sebagian keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Namun masyarakat yang disebut *ureung kaya* juga tidak turut memberi bantuan pinjaman ataupun semacam hak dari harta mereka untuk orang fakir miskin. Sebagian yang kaya, cenderung membantu sesama saudara mereka sendiri.

Dalam aktifitasnya di TPI Meureudu, Midi menyebutkan banyaknya masyarakat berusia muda yang malas. Midi mengakui sikap orang Aceh yang ingin ada uang tanpa perlu kerja keras. Di TPI sering berkumpul orang-orang yang akan bekerja bila tidak ada uang sama sekali, namun uang diperoleh dari upah mengangkat tong-tong ikan tidak akan habis digunakan untuk bersantai-santai di warung kopi atau terkadang malah digunakan untuk membeli barang-barang yang berkategori narkoba. Dalam kapaisitasnya Midi sering mengajak dan menghimbau mereka yang biasa nongkrong di TPI untuk bekerja, semisal membeli di TPI dan menjual kembali ikan di pasar ikan Meureudu, namun masalahnya juga modal. Ketika waktu shalat ia mengajak shalat, namun disebutkan bahwa saat ketika para pemuda yang berada di tempat TPI kadang mau shalat, terkadang tidak. Ajakan-

ajakannya ke arah positif justru menjadi bahan tertawaan sehingga ia dijuluki provokator oleh mereka.

Sebagai orang Pidie yang telah merantau, sepertinya Midi memiliki pandangan hidup yang tidak kaku, hal itu terlihat dari pandangannya yang tidak larut dalam salah satu aliran agama yang saat ini berkembang di gampong Dayah Kleng. Ia mengatakan selalu berusaha hadir dalam ceramah-ceramah agama apa saja, biarpun itu dari kelompok mayoritas tradisional, ataupun kelompok yang masuk kemudian yaitu dari jemaah tabligh dan kelompok salafi. Dalam hal pelaksanaan ibadah shalat di Mesjid Meureudu mereka bercampur. Namun, ditambahkan Midi bahwa para jemaah pengikut salafi dan tabligh saling menghindari dalam ceramah-ceramah agama yang diadakan oleh mereka. Menariknya kelompok salafi terlihat sibuk dengan aktifitas bekerja, mereka sedikit bicara dengan orang lain selain dengan anggota kelompoknya sendiri. Pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya dari berdagang. Kelompok aliran baru itu, diakui Midi tidak ada yang menganggur sepenuhnya, ada saja aktifitas mereka mencari nafkah.

C. Kasus Tengku Haji Nasrul : Imuem meunasah dan usaha dagang

Secara bersamaan Tengku Haji Nasrul menjalankan dua aktifitasnya sekaligus. Untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya ia melakukan usaha dagang di *keude* Meureudu dan seiring dengan itu ia menjalankan tugas-tugas sebagai tengku imuem meunasah Dayah Kleng. Setiap malam ia mudah dijumpai di meunasah Dayah Kleng karena ia selalu hadir untuk memimpin ibadah shalat jemaah magrib, isya dan shubuh. Dalam beberapa kesempatan ia juga memimpin jemaah shalat ashar atau dhuhur di mesjid Meureudu. Terdapat kebiasaan masyarakat Dayah Kleng yang terbiasa melakukan shalat ashar dan dhuhur di mesjid Meureudu. Hal itu terkait dengan pertimbangan bahwa pada saat-saat shalat dhuhur dan ashar tiba, mereka tengah berada dalam aktifitas kerja di *keude* atau perkantoran yang lokasinya lebih dekat dengan Mesjid. Dengan kata lain, meunasah lebih ramai saat mana masyarakat telah kembali ke rumah masing-masing setelah sibuk dengan aktifitas kerja hariannya.

Tengku Haji Nasrul telah lama menjalankan usaha dagang, ia berjualan dengan menyewa ruko milik orang. Pertokoan pasar *keude* Meureudu saat ini sebagian besar adalah bangunan-bangunan pertokoan klasik berbahan kayu dengan model pertokoan cina era 1970-an dan 1980-an. Sebagian kecil telah dibongkar dan diganti dengan pertokoan permanen berlantai dua atau tiga. Bahkan ada yang masih belum dilanjutkan, hingga masih berbentuk bangunan satu lantai. Kebijakan pembenahan pasar tampaknya terkait dengan kedudukan Meureudu sebagai ibukota pemerintah kabupaten. Terkait hal ini terdapat ketidakpuasan pedagang atas keputusan pemerintah Pidie Jaya.



Gambar 5.7. Suasana Pasar *keude* Meureudu dari arah gampong Meunasah Balek, dengan latar sebagian pertokoan model lama dan sebagian telah diremajakan.

Saat penelitian berlangsung, disebutkan oleh informan suasana usaha dagang sedang lesu. Hal itu mencuat dalam obrolan-obrolan ringan antara Tengku Nasrul dengan beberapa orang jemaah shalat setelah shalat magrib berlangsung. Dikatakan bahwa kebijaksanaan peremajaan pertokoan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah setempat tidak melihat keadaan masyarakat. Seperti yang dikemukakan tengku Nasrul menanggapi rapat yang tadi siang dihadapinya di kantor kecamatan, sebagai berikut :

“rapat tadi cuma formalitas, diajak musyawarah, tapi di koran sudah diumumkan kalau bulan empat, semua toko akan dibongkar. Pedagang tak diberi tempat penampungan sementara. Semua barang harus kita bawa pulang ke rumah. Darimana kita tutup uang hutang dari barang yang sudah

ada. Kemana kita bawa barang yang ada itu. Uang sewa toko baru nantinya pun sudah tak seimbang dengan uang masuk dari jualan, bayangkan saja dengan luas hanya 3x3 m sewa sebesar 12 juta setahun, mengapa kita selalu kalah dengan penguasa. Padahal sebagian pejabat kantor bupati ada di kampung ini“

(Pedagang/tokoh agama, wawancara tanggal 10 Maret 2010)

Kegusaran Tengku Nasrul sepertinya bertambah dengan tidak berjalannya komunikasi yang baik antar pejabat pemerintah dengan masyarakat pedagang, meskipun pejabat-pejabat pemerintah adalah kerabat atau tetangga rumah mereka. Keputusan yang dianggapnya sepihak pemerintah itu, membuatnya kebingungan karena harus membawa pulang seluruh barang-barang dagangannya ke rumah. Tengku Nasrul menyesali karena tidak ada kebijakan penyediaan pertokoan untuk menampung sementara pedagang-pedagang tersebut. Disamping itu, pembongkaran pertokoan lama dilakukan pada bulan Mei dan diperkirakan memasuki ramadhan belum selesai. Padahal para pedagang justru menunggu masa ramadhan dan hari raya sebagai masa masyarakat membelanjakan uangnya dengan berbagai kebutuhan. Tengku Nasrul menyesali momentum tersebut justru mereka tidak dapat berjualan dengan tenang.

D. Kasus Hasan : Jaya berdagang di masa lalu dan bertani di saat ini

Hasan adalah penerus dari usaha dagang kedai kopi milik ayahnya. Kedai kopi miliknya ini sempat menjadi tempat minum kopi terbaik di *keude* Merueudu pada era tahun 1980an hingga pertengahan tahun 1990an. Setelah itu bermunculan kedai-kedai kopi lainnya yang menawarkan keunggulan baru, keadaan itu termasuk salah satunya yang membuat usaha Hasan tidak semaju dulu. Saat ini usaha kedai kopi tetap dijalankan, namun untuk bertahan pada mata pencaharian itu saja membuat dirinya kurang puas. Saat penelitian berlangsung, Hasan menyebutkan bahwa ia memiliki beberapa bidang sawah yang dikelolanya sendiri. Informan ini memiliki cara berpikir yang luas dan terbuka, karena mobilitas dan pergaulannya yang luwes. Ia sering mengunjungi kompleks Kopassus Cijantung Jakarta untuk melihat-lihat salah satu anak perempuannya yang dinikahi prajurit Koppasus saat bertugas di Aceh.

Sepertinya Hasan memiliki analisa sendiri terhadap situasi Meureudu yang sedang dalam masa transisi dari sebuah ibukota kecamatan menjadi ibukota kabupaten. Ia menyebutkan bahwa situasi berjualan sedang sangat sepi, sebagian besar pegawai-pegawai kantor pemerintahan yang siang meramaikan Meureudu adalah para pegawai yang bertempat tinggal di luar meureudu, kebanyakan di di sigli, yang lain ada di Lueng Putu, Beuracan, Trieng Gadeng, Beureuneun. Hasan memperhitungkan hanya sedikit uang yang mereka belanjakan di *keude* Meureudu, karena kebutuhan lainnya sebagian besar dipenuhi dimana mereka bertempat tinggal.

Selanjutnya Hasan menyebutkan bahwa dalam kondisi paling sulit, pedagang dikenakan penambahan pajak hingga mencapai limapuluh persen. Negosiasi yang diajukannya secara informal kepada beberapa pejabat yang dikenal, tidak memberi hasil seperti diharap. Pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan pemerintah tanpa pendekatan komunikasi menjadikan Hasan memiliki pandangan tersendiri terhadap penguasa yang dianggapnya kaku dalam menghadapi rakyat.

Dalam hal kehidupan ekonomi masyarakat lainnya, Hasan melihat bahwa kemampuan kerja dan modal uang yang dimiliki masyarakat sangat terbatas sehingga masyarakat hanya bisa menjadi nelayan atau petani biasa. Diluar itu, masyarakat Meureudu dalam mencari nafkah tidak bersemangat serta tak memiliki sifat iri yang positif. Sebagian besar waktu dihabiskan duduk-duduk santai disertai pembicaraan hal-hal yang tak perlu. Hasan memandang bahwa bekerja adalah kewajiban laki-laki untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Salah satu hal buruk dari kebiasaan bekerja orang setempat adalah ketika memperoleh sedikit uang lalu berhenti bekerja dan santai-santai. Seharusnya pendapatan yang lebih ditabung, guna menjadi modal baru untuk usaha yang lain. Bila perlu dapat berkongsi dengan orang lain yang bisa dipercaya.

Sepengatahuan Hasan, beberapa bantuan modal kerja yang disalurkan oleh beberapa pihak tidak digunakan sebagaimana harusnya. Bantuan modal digunakan untuk membeli barang-barang keperluan habis pakai. Kemampuan mengelola modal sangat rendah, termasuk halnya dalam mengelola hasil bekerja di sawah.

Sebagian besar padi hasil sawah dijual oleh masyarakat, bilamana beras diperlukan mereka mencarinya di pasar. Hasan sendiri mensiasati hasil produksi padinya dengan menitipkan di pabrik penggilingan padi dalam jumlah tertentu, secara bertahap kapan ia membutuhkan maka ia akan mengambilnya di pabrik tersebut.

Hasan memperhatikan perbedaan kehidupan ekonomi antara masyarakat Pidie pesisir dengan masyarakat pegunungan. Untuk sementara ini, perbedaan itu dilihatnya sebagai dampak dari pendidikan anak-anak pegunungan yang lebih maju dimana wawasan baru mereka itu turut dibagikan kepada para orangtua mereka. Sehingga usaha kerja pertanian orang tua mereka terlihat lebih maju secara perlahan. Masyarakat lereng bukit dan pegunungan selain menggarap sawah untuk padi juga memanfaatkan sawah untuk bertani semangka atau timun. Seketika setelah panen berlangsung, tanah digarap kembali untuk masa tanam timun selama satu bulan. Setelah masa panen timun berakhir, tanah kembali digarap untuk tanaman padi. Usaha tanam semangka sedemikian giatnya, sehingga terkesan tak tersisa lahan untuk ini. Demikianpun hasilnya dengan cepat tersalurkan karena truk penjemput telah menunggu langsung di lahan yang dipanen.

Kemudian Hasan menambahkan keadaan sebaliknya yang terjadi pada masyarakat pesisir, karena lingkungan pergaulan membuat semakin kurang anak-anak yang serius bersekolah. Sebagian mereka terjebak pemakaian shabu-shabu. Sebagian yang berhasil dalam sekolah cenderung tak berbagi tentang apa yang diketahuinya, karena ada sikap kurang senang melihat orang lain lebih maju. Mereka ingin sejahtera sendiri. Kegigihan dan keseriusan anak-anak pegunungan dalam belajar, terkait dengan keprihatin mereka karena orangtuanya harus bersusah payah membiayai sekolah mereka. Berangkat dari keadaan itu, tidak aneh bila sekarang mereka ingin mengubah keadaan orang tuanya. Hasan memberi contoh, saat masyarakat di pegunungan telah mulai membuka kebun sawit. Untuk membantu menjaga dan bekerja diberlakukan sistim yang memberi gaji bagi yang mau bekerja, sehingga pemilik hanya mengontrol saja. Hal ini membuat ekonomi mereka dapat berkembang.

E. Kasus Haji Masykur : Rasional dalam aksi ekonomi

Haji Masykur termasuk salah satu orang yang dituakan diantara pedagang keturunan India di gampong Dayah Kleng. Ia terlihat di hormati oleh masyarakat dan dalam kesehariannya terlihat rajin melaksanakan ibadah shalat berjamaah, baik ke mesjid maupun ke meunasah. Rumah tempat tinggal yang dibangunnya bukanlah rumah adat, tapi memilih rumah beton permanen dengan gaya model kolonial. Rumah informan ini langsung berhadapan dengan mesjid Meureudu.

Saat ini ia tak berdagang lagi, menurunnya daya beli dan meningginya harga-harga barang menjadi alasan mengapa ia tak lagi terlibat dalam usaha jual beli. Padahal usaha dagang yang dibangun dan dikembangkan oleh ayahnya termasuk usaha yang berhasil dan memiliki nama. Tokonya adalah toko terlengkap yang menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat Meureudu di tahun 60-an dan 70-an. Kondisi perdagangan yang semakin lesudengan daya beli masyarakat yang tidak bertambah membuatnya berpikir bahwa menyewakan rukonya lebih memberi nilai keuntungan daripada menjalankan usaha sendiri. Apalagi harga sewa pertokoan di keude Meureudu meroket setelah Meureudu ditetapkan sebagai ibukota kabupaten Pidie Jaya. Hal itu diungkapkannya :

“Saat ini saya lebih memilih menyewakan toko daripada berjualan sendiri, dengan menyewakan kita bisa mendapat uang sewa bersih 20 juta setahun. Sudah kita tidak lelah, juga tidak punya resiko menderita kerugian akibat sepiunya pasar”

(Pedagang, wawancara tanggal 12 Maret 2010)

Haji Masykur termasuk salah satu tokoh masyarakat yang selalu dilibatkan dalam agenda-agenda kegiatan sosial masyarakat. Ia memiliki pandangan yang luas untuk membuat kemajuan di kampung. Seperti yang peneliti lihat keaktifannya pada agenda perlombaan PKK tingkat Provinsi yang kali ini dipromosikan gampong meunasah Balek. Kepedulianya terhadap kemajuan dan ketertiban gampong dapat dikatakan tinggi. Jaringan sosialnya luas karena sejak muda ia berkenalan dengan banyak orang yang mendatangi dan membeli

berbagai kebutuhan di toko orang tuanya, saat mana ia telah melibatkan diri membantu ayahnya berdagang.

Tabel. 5.3.
Ikhtisar Pola Umum dari Kasus Informan Jenis Pekerjaan Pedagang

No.	Aspek/ Isu	Uraian
1	Tindakan kerja	Umumnya aktor memilih pedagangan sebagai penopang ekonomi keluarga karena dukungan modal dan keberanian mengambil resiko. Meskipun demikian aktor penuh perhitungan untung dan rugi
		Pedagang cenderung memperluas ragam sumber pendapatan ke bidang lainnya.
		Kondisi ekonomi yang umumnya baik, membuat pedagang kurang peka dalam membentuk semangat juang terhadap generasi berikutnya.
		Bekerja sebagai pedagang dinilai ke dalam strata tinggi oleh masyarakat.
		Aktor yang berusia muda umumnya tidak menolak bekerja sebagai pedagang
		Aktor yang berusia tua memberi kebebasan anaknya bekerja di bidang apa. Namun umumnya mengalihkan usaha dagang kepada anaknya.
2.	Basis tindakan aktor	Bekerja untuk mendapatkan penghasilan sebagai sumber biaya hidup.
	Basis nilai agama	Nilai Agama tidak terlihat dalam fungsinya mengarahkan tindakan aktor untuk peka secara sosial, berdisiplin dan bekerja sama. Agama hanya terlihat pada ritual yang diwajibkan.
		Kepatuhan pada ulama semakin rendah, karena tindakan ulama yang tidak sejalan dengan aturan-aturan agama yang sering disampaikannya.
	Basis nilai adat	Tidak tertunjuk kepatuhan pada institusi sosial adat. Adat tidak lagi memiliki daya paksa untuk membuat aktor bertindak bagi kemanfaatan kolektif.
		Kepatuhan kepada pemimpin insititusi adat menurun, karena bertindak tidak jujur dan tidak adil.
	Relasi dan posisi Agen Pembangunan pada Pemerintahan, Agama dan Adat.	Kepatuhan pada pemerintah rendah karena aktor memandang perhatian dan keberpihakan pemerintah kepada mereka rendah.

5.3. Diskusi : Isu-Isu Umum Pada Tindakan Kerja Masyarakat Pidie

Dalam bagian ini, peneliti berupaya untuk mendiskusikan berbagai pemikiran dan pandangan informan sebagaimana data dan informasi yang diuraikan di atas. Peneliti akan mengurai seluruh data yang menyangkut tindakan, baik data yang diperoleh dari penuturan dengan caranya sendiri informan menggambarkan tindakan-tindakan kerja yang telah mereka lakukan, atau dengan cara apa mereka mengkonsepsikan pandangannya secara secara subyektif dan detail terhadap dinamika kondisi dan permasalahan lingkungan sosial yang berlangsung di sekitar mereka. Termasuk halnya fakta-fakta yang peneliti bisa lihat dan meresapinya selama penelitian berlangsung.

Penelesuran tindakan-tindakan kerja para aktor menurut bidang pekerjaan utama dalam kehidupan ekonomi masyarakat *gampong* Meunasah Balek , yaitu bidang pertanian, perikanan dan bidang perdagangan menggambarkan suatu hubungan sosial yang terjadi diantara mereka. Setidaknya hal itu, terlihat pada upaya beberapa aktor yang memperluas cakupan bidang sumber mata pencahariannya ke bidang lainnya.

A. Nilai Kampung Halaman dan Realitas Kehidupan Ekonomi Tradisional

Masyarakat Pidie dikenal dengan entitas perantau. Saat berada di luar kampung halamannya, maka mereka mengidentifikasi diri sebagai orang Pidie atau kadang-kadang disebut “orang Sigli” guna memudahkan orang lain untuk cepat memahami dari daerah mana mereka berasal. Sigli adalah kota terbesar yang sekaligus ibukota kabupaten Pidie. Umumnya jenis pekerjaan yang dijalankan di perantauan adalah berdagang atau berwirausaha. Saat mana mereka berada jauh dari kampung halaman dan pekerjaan berdagang itu memberi kemajuan ekonomi selayaknya kemajuan dagang para kaum tionghoa maka orang Pidie yang berhasil itu digelari “tionghoa hitam”.

Namun tidak semua mencapai keberhasilan dari perantauan. Pengakuan aktor atas alasan apa ia kembali ke Pidie menunjukkan bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan kemajuan ekonomi sebagaimana diharapkan selama perantauan. Mereka pernah menetap lebih dari lima tahun di Jakarta dan sempat

berkeliling Jawa untuk berdagang. Kembali ke kampung halaman merupakan solusi yang dilakukan guna mendapatkan hasil minimum yaitu setidaknya mereka berada pada tempat dimana mereka merasa nyaman secara sosial. Meskipun disadari bahwa kondisi kampung halaman tidak lebih baik dari kondisi di perantauan, namun aktor yang kembali dari perantauan tetap menjadikan usaha dagang sebagai mata pencaharian setiba kembali di Pidie. Pekerjaan tersebut tidak memberi kemajuan berarti bagi ekonomi mereka, dan beban pengeluaran yang semakin membesar memaksa aktor yang pernah merantau untuk kembali melihat realitas kampung halaman bahwa usaha tani dan usaha nelayan adalah bidang yang paling mungkin dilakukan.

Disisi lain, nilai kehidupan ekonomi tradisional di bidang pertanian dan perikanan memiliki pandangan-pandangan magis. Masyarakat setempat menyebut bahwa bertani padi bukan sekedar kerja, di dalam pekerjaan itu terdapat "*berkah*". Hal ini terkait dengan hasil produk kerja petani yang menghasilkan kebutuhan pangan yang tidak dapat ditanggihkan ketersediaannya bagi kelangsungan kehidupan manusia. Mereka tidak menemukan sebutan yang sama pada bidang pekerjaan yang lain. Bila ditilik dalam pemahaman Islam, tidak ada referensi yang menyebut pekerjaan tani lebih mulia daripada pekerjaan lainnya. Hal itu anggapan umum yang diwariskan secara turun temurun, sedikitnya dipengaruhi pula oleh budaya Hindu yang menempatkan padi sebagai penjelmaan Dewi Sri. Karena itu, kebutahan sebagian besar masyarakat pada tradisi tani sawah sedikit banyak berkelindan dengan pandangan lokal ini.

Para informan mengatakan bahwa mereka yang bekerja sebagai tani sawah hanya berada dalam kondisi begitu-begitu saja. Dengan pendapatan satu tahun dalam dua kali musim panen. Namun mereka menyebutkan bahwa rendahnya pendapatan itu tertutupi dengan kepuasannya atas sebutan "*berkah*" yang diperolehnya dalam usaha ini. Dalam pandangan ini, meskipun padi akan dijual namun hasil panen tersebut haruslah dibawa pulang ke rumah untuk diinapkan di rumah dalam beberapa hari. Realitas kebutuhan keuangan yang tinggi telah melunturkan kepatuhan aktor tani tanaman padi. Saat ini pemandangan petani langsung menjual hasil panennya di lokasi panen sudah lazim ditemukan.

Disamping itu, terdapat pola umum yang menunjukkan latar belakang tindakan kerja masyarakat dimana adanya dorongan pemenuhan kebutuhan hidup tanpa mengambil resiko ketidakpastian. Terdapat dua resiko yang secara bersamaan dipertimbangkan oleh aktor, yaitu : pertama, aktor menghindari resiko kerentanan pangan dimana dengan bekerja sebagai petani sawah maka ia terlibat langsung dalam proses produksi pangan. Dalam hal ini ia dapat menjamin ketersediaan kebutuhan pangan yang disadarinya sebagai kebutuhan yang tak bisa ditunda pemenuhannya. Kedua, aktor menghindari pekerjaan lain yang dinilainya penuh resiko karena disamping membutuhkan pemikiran dan sumber daya yang besar juga sulit memperkirakan hasil capaian yang mungkin dihasilkan. Dalam hal ini terdapat aktor yang mengemuka etika subsisten yang mengedepankan keterjaminan pemenuhan kebutuhan pangan dalam bekerja.

Hal ini terlihat dalam kasus Tarmizi dan Zakaria yang telah berada di perantauan beberapa tahun namun memutuskan kembali ke kampung halamannya karena merasa tidak memperoleh keberhasilan ekonomi yang berarti dengan usaha-usahanya selama perantauan. Dalam masa-masa awal berada di Pidie kembali, kedua aktor ini menunjukkan kesamaan bahwa perdagangan adalah bidang sumber nafkah yang dipilihnya. Hal ini menunjukkan sebuah kondisi bahwa aktor tidak dengan mudah mengalihkan bidang pekerjaan sebagaimana ia pandang. Dalam masa itu, aktor menguji diri dengan melakukan pekerjaan serupa dengan di perantauan namun dengan *setting* tempat yang berbeda. Fakta empirik menunjukkan bahwa setelah mendapatkan solusi lain maka akhirnya Zakaria mengalihkan usaha ekonominya ke pertanian sawah. Sementara itu, Tarmizi hingga saat ini masih bertahan dalam usaha dagang skala usaha kecil dan melibatkan diri pada usaha perikanan kelautan, meskipun pada mata rantai kegiatan akhir yakni menjual jasa angkut di TPI.

Berbicara isu ketidakpastian, menarik dikaitkan dengan kehidupan nelayan. Sebagian besar informan nelayan mengatakan bahwa usaha mereka adalah usaha yang serba tidak pasti. Dalam saat tertentu mereka mendapatkan hasil yang besar dan pada saat lain mereka mendapatkan hasil seadanya.

B. Rasionalitas dalam Kerja

Dalam dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie, terdapat juga petani sawah yang menempatkan pertimbangan memaksimalkan keuntungan dan menekan resiko kerugian pada tindakan kerjanya. Namun petani yang termasuk tipe ini relatif minim, karena hanya mereka yang terbuka dalam berpikir yang dapat melakukannya. Seperti dalam kasus kakek Karya yang merupakan seorang yang memanfaatkan bekal pendidikan dalam bekerja. Bekal pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya selama ini membentuk kerangka pikir yang rasional dalam memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan pendapatan.

Ide atau pemikiran ini sulit diterima oleh sebagian masyarakat tani lainnya, dari lokasi penelitian hanya terdapat tiga petak sawah lainnya yang berdekatan dengannya yang terlihat mengikuti pola tani seperti itu. Hal itu menunjukkan bahwa besarnya modal dan kerumitan teknik tanam tanaman non padi yang digagasnya tidak mendapat respon. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari petani adalah mereka yang menghindari resiko dari usaha-usahanya. Terlebih lagi kurangnya penguasaan teknik tanam dan kebutuhan modal yang lebih besar membuat mereka urung terlibat dalam kegiatan budidaya pertanian non padi. Meskipun menjanjikan laba yang lebih tinggi daripada budidaya tanaman padi. Meskipun demikian, masyarakat Pidie yang berada di lereng-lereng pegunungan mulai menjalankan pola tani sebagaimana diperkenalkan oleh Yusri yang bisa disebut agen perubahan dari masyarakat setempat. Ia membuka pemikiran terhadap orientasi bertani dengan budi daya tanaman melon, semangka atau timun.

Demikianpun halnya dengan nelayan yang melebarkan usahanya ke bidang pertanian. Tindakan ini lebih di dorong pada pertimbangan mengamankan posisi keuangan yang diperolehnya dari keuntungan dari tindakan kerja di bidang perikanan sebagai nelayan. Beberapa dari informan menunjukkan hal yang sama, mereka menyadari tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan dari bidang perikanan laut. Mereka terlihat tetap menjadikan tindakan kerjanya sebagai nelayan menjadi sumber pendapatan rutin dan pokok. Namun, akumulasi kapital

diharapkan dari bidang pertanian atau juga ada sebagian menginvestasikannya ke dalam bentuk tanah atau properti bangunan ruko.

Akumulasi dan pertukaran modal dalam masyarakat Pidie dilakukan dalam bentuk emas dalam satuan manyam. Berlaku kebiasaan pada masyarakat Pidie bila tersedia dana lebih untuk dijadikan simpanan atau tabungan dalam bentuk emas perhiasan. Sebuah kearifan lokal yang menempatkan emas sebagai jaminan kebertahanan nilai dari ancaman inflasi. Sejalan dengan itu, sebagaimana lazim terjadi bahwa saat mana terjadi transaksi hutang dan piutang dengan jaminan gadai aset berupa tanah sawah atau kebun ladang maka yang dipertukarkan adalah sejumlah emas. Dengan cara ini sebagian aktor nelayan diketaui sedang memiliki posisi keuangan yang baik maka akan didatangi oleh pemilik tanah sawah dan kebun untuk meminjam gadai sejumlah emas. Tidak jarang kepemilikan tanah beralih karena pemilik merasa membutuhkan lebih banyak lagi dana untuk keperluan biaya pendidikan atau kesehatan anggota keluarganya. Keadaan ini menggambarkan sebuah keadaan dimana di Pidie telah ada ciri-ciri adanya kapitalisme skala lokal.

C. Nilai Kerja Rendah

Sebagian aktor yang terlihat lebih banyak menghabiskan waktu dengan aktifitas tidak produktif merupakan gejala rendahnya militansi kerja mereka. Hal itu terkait dengan tingginya rasa solidaritas komunal, dimana kepedulian yang tinggi antar aktor yang masih memiliki hubungan pertalian darah untuk saling menjaga martabat dan harga diri keluarga dari krisis tiga kebutuhan pokok berupa nasi, rumah, pakaian. Hal itu, tanpa disadari menimbulkan akibat ketergantungan sebagian aktor pada kemurahan hati aktor lainnya. Hal itu membuatnya tidak kreatif dalam memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Disamping itu, kemurahan alam dalam memberikan berbagai kebutuhan hidup aktor turut membentuk tindakan kerja mereka yang tidak produktif. Bentangan hamparan sawah yang luas, di dukung oleh suburnya tanah , adanya hamparan laut yang didukung landainya pantai disertai ombak selat malaka yang

tidak ganas telah membuat masyarakat setempat dimanjakan oleh fasilitas alam. Hal tersebut terlihat dari aktifitas perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh hasil alam, tertunjuk pada keadaan dan data informan saat mana tangkapan ikan banyak maka ramailah pasar. Demikian juga saat musim panen tiba, maka ramailah pasar. Sementara aktifitas keramaian pasar yang disebabkan oleh hal diluar ketergantungan pada hasil alam hanya terjadi sebulan sekali saat mana pegawai, pensiunan pegawai dan pensiunan tentara mengambil gaji di kantor Pos Kecamatan Meureudu.

D. Pendapatan Tetap dan Status Pegawai

Dalam beberapa kasus tertunjuk aktor muda lebih memilih bidang pekerjaan sebagai pegawai. Tindakan kerja yang menggantungkan pendapatan pada sejumlah gaji atau pendapatan tetap yang diberikan oleh kantor. Hal itu terlihat dari bentuk pilihan aktor dalam mencari jalan aman dari resiko untuk menempuh kehidupan sosialnya. Dengan bekerja pada kantor pemerintah atau perusahaan maka resiko kerugian atas usaha itu sama sekali tidak menjadi tanggungannya pribadi. Pada saat yang sama aktor telah melepaskan kebebasannya dalam bekerja dan mengikatkan diri pada sejumlah ketentuan, peraturan, mekanisme kerja, hirarki yang berlaku pada organisasi pemerintah atau perusahaan tersebut.

Pada saat yang sama aktor-aktor yang berusia tua, lebih mereferensikan anak-anaknya untuk bekerja pada organisasi pemerintahan. Hal itu terlihat dari adanya kebanggaan saat mana dengan susah payah anaknya berhasil memperoleh gelar kesarjanaan lalu dilengkapi dengan keberhasilannya menjadi pegawai pada instansi pemerintah, baik itu sebagai tetap atau pegawai honorer tidak tetap. Pada aktor yang bekerja sebagai petani terlihat kecenderungan tidak mereferensikan anaknya untuk melanjutkan usaha dimana ia selama ini dapat memberi nafkah kepada keluarganya. Referensi yang paling utama adalah pegawai pada kantor pemerintah dan selanjutnya membuka usaha mandiri atau bekerja pada perusahaan. Namun aktor yang bekerja sebagai nelayan, umumnya tidak memiliki visi kuat terhadap masa depan anaknya. Mereka biasanya memberi

kebebasan pada anaknya untuk melanjutkan kuliah atau langsung bekerja membantu dirinya dalam usaha nelayan perikanan. Namun, bagi anak perempuan biasanya dikuliahkan hingga menjadi tenaga guru atau tenaga kesehatan yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan.

Kehadiran pusat pemerintahan kabupaten di Meureudu menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat setempat. Penampilan pegawai kantor yang berseragam rapi dan terlihat sibuk di kantor-kantor dari pagi hingga sore hari disertai membaiknya kondisi ekonomi mereka secara masif telah menimbulkan persepsi masyarakat setempat bahwa bekerja sebagai pegawai lebih terhormat dan membawa jaminan kesejahteraan. Hal tersebut terlihat kontras karena saat ini di Meureudu telah menjadi basis tempat bekerja dan domisili pejabat-pejabat tinggi untuk tingkat pemerintahan kabupaten dimana dalam penampilannya melekat simbol-simbol statusnya yang elegan dengan fasilitas kemewahan seperti rumah, mobil, dan kehidupan sehari-hari dengan mobilitas perjalanan ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Hal itu berbeda dengan keadaan sebelumnya saat mana di Meureudu yang terlihat adalah pegawai biasa yang bekerja di instansi pemerintah setingkat kantor camat, kantor urusan agama, kantor penyuluh pertanian, kantor pos dan di sekolah-sekolah.

Keadaan yang sama ditunjukkan oleh mereka yang menjadi pejabat publik seperti anggota legislatif. Saat ini terlihat perubahan yang mencolok gaya hidup dengan simbol-simbol status sosial tinggi pada mereka yang sedang menjadi pejabat publik tersebut. Hal itu terlihat sangat kontras dengan kondisi saat mana mereka belum menjadi pejabat publik. Kehidupan di Pidie terlihat kontras karena sebagian besar masyarakatnya masih hidup dalam tradisi kehidupan agraris pedesaan tradisional dan pada saat yang sama di tengah mereka telah hadir gaya hidup status sosial tinggi dari para pejabat pemerintah.

Meskipun demikian, terlihat pada para pegawai pemerintah yang telah eksis sebelum Meureudu menjadi kabupaten. Mereka tidak hanya menjadi pegawai, namun juga merambah ke bidang pertanian dan perikanan. Mereka turut serta membuka peluang pendapatan dari sektor ini. Bahkan sebagian turut serta

bekerja dengan tidak hanya mengandalkan pada penyewaan lahan sebagaimana umumnya terjadi.

E. Resiko dan Disersifikasi Usaha

Beberapa aktor terlihat memiliki strategi penghidupan. Diantara mereka merupakan aktor yang menjalankan usaha dari ketiadaan modal. Secara perlahan keprihatinan dan pengalaman membentuk pemikiran kritis pada diri mereka untuk mengatur strategi usaha ekonomi guna menjamin dirinya tetap berada posisi aman secara sosial ekonomi. Strategi yang ditempuh terlihat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan, dimana sumber penghidupan ekonomi utama tetap mereka jalankan dan ekspansi usaha dikembangkan pada bidang-bidang lain yang diperkirakan secara rasional membuka peluang meraih keuntungan.

Kejelian dalam melihat peluang usaha, misalnya seorang nelayan melihat di kawasan sawahnya potensi untuk mengembangkan budidaya sarang burung walet. Lalu dialihkannya fungsi lahan sawah menjadi sebuah unit bangunan di area yang seharusnya berfungsi sebagai area pesawahan. Ia menghitung bahwa pendapatan dari usaha tersebut lebih menjanjikan daripada putaran uang yang diperolehnya dari usaha tani yang hanya menghasilkan dua kali panen dalam setahun. Apalagi sawahnya cenderung diresapi air laut karena posisinya yang berdekatan dengan area pantai.

Hal serupa juga terlihat dari apa yang ditunjukkan oleh seorang yang berhasil dalam usaha kuliner kue tradisional. Ia menginvestasikan keuntungan dari usaha tersebut dengan membeli tanah dan properti ruko di ibu kota provinsi. Sementara itu, pendapatannya yang tergolong tinggi untuk saat ini tidak dipakainya untuk membangun rumah atau membeli kendaraan mewah. Rumahnya yang sekaligus dapur bagi industri itu, masih dipertahankan sebagaimana bentuk awalnya. Strategi itu ditempuhnya karena tidak ada kepastian bahwa kemajuan usahanya saat ini dapat bertahan lama. Karena itu keuntungan-keuntungan yang diperoleh harus ditempatkan pada bidang usaha yang berbeda.

F. Historisitas Lokal dan Agensi Pembangunan (*Agent of Change*)

Secara historisitas, kemajuan Aceh pada masa lalu menunjukkan adanya keterkaitan dinamika kekuatan (*power*) agensi yang terkombinasi ulama dan raja. Keduanya adalah agensi pembangunan pada masanya. Dengan demikian kemajuan masyarakat lokal mempersyaratkan keterpaduan ide agama dan ide adat. Ideologi agama direpresenasikan oleh kedudukan ulama yang diberi kedudukan utama dalam menjalankan kehidupan negara. Sedangkan adat dalam hal ini dipahami sebagai “kekuasaan Pemerintahan”, sebagaimana tersurat pada sebutan lokal “...*adat bak Po Teumeureuhom*” dimana yang dimaksudkan sebutan “*Po Teumereuhom*” itu adalah Sultan Iskandar Muda.

Hal itu kemudian berlanjut dengan skala hubungan yang semakin lemah. Dimana pemerintahan adat melalui *ulee balang* menempatkan diri di atas ide agama. Sehingga terbukti terjadinya kemunduran Aceh hingga sebuah titik memaksa pemerintahan adat mendekat kembali pada ide agama, saat adat terancam oleh politik kolonial. Keadaan lain yang unik adalah saat masyarakat Aceh bersatu kata melawan ketidakadilan Jakarta pada tahun 1953 dimana saat itu pada diri Tengku Daud Beureueh menyatu dua kekuatan tersebut. Pada diri pemimpin Aceh itu disatukan ide kekuatan agama atau keulamaan dan kekuatan adat pemerintahan. Karena alasan itu maka masyarakat hidup dalam kondisi sosial yang menyiratkan hidupnya nilai-nilai agama dan adat dalam mengatur tindakan-tindakan aktor.

Saat ini, ketika masyarakat membahas permasalahan-permasalahan sosial yang sedang dihadapi saat ini, sering kali pembicaraan mengurucut atau bermuara pada kekecewaan dan ketidakpuasan mereka kepada pejabat pemerintah, tokoh ulama, pengemuka adat dan tokoh masyarakat lainnya. Para elit sosial pengemuka itu, saat ini dinilai tak memberi teladan yang baik. Masyarakat kehilangan agensi yang diharapkan menjadi pihak terdepan dalam membawa kehidupan sosial ke arah yang lebih baik. Saat itu menjadi tidak mempercayai mereka yang seharusnya menjadi agensi dari pembaharuan atau agensi pembangunan seperti pejabat pemerintahan, ulama dan pengemuka adat. Realitas sosial yang ditunjukkan bahwa tindakan para agensi justeru tidak

konsisten antara perbuatan dengan perkataan dan mimminya komitmen untuk menjadikan ketentuan-ketentuan negara dan agama sebagai patron untuk bertingkah laku. Peraturan yang semestinya ditegakkan dan dijalankan oleh para agensi justeru tidak terlihat realitasnya. Masyarakat memiliki kondisi agensi ideal sebagaimana ungkapan bahasa lokal “*haba lage buet, buet lage na*” (perbuatan harus sejalan dengan ucapan dan perbuatan harus selalu merujuk pada ketentuan yang berlaku). Ketiadaan keteladanan hidup dari para agensi dinilai menjadi sumber kekisruhan sosial.

Agen perubahan dalam masyarakat adalah pemerintah, ulama dan tokoh pemuka masyarakat. Terkait dengan bidang penghidupan ekonomi mereka, sebagian besar informan mengeluhkan hal yang sama. Sebagian besar masyarakat merasakan ketidakhadiran agen perubahan di antara mereka. Instansi pemerintah, ulama dan tokoh pemuka masyarakat yang sedianya menjadi panutan dan agen dalam menggiring perubahan di dalam masyarakat justeru telah kehilangan wibawa. Menyangkut dengan relasi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dianggap tidak membangun komunikasi sebagaimana yang diharapkan. Dalam hal tertentu pemerintah dinilai lebih banyak memaksakan kemauan dan keinginannya pada masyarakat, untuk hal semacam pengenaan pajak bagi pedagang dan nelayan. Disisi lain, informan yang sedang menjabat di instansi pemerintahan mengakui bahwa saat ini terdapat dilematis pada diri mereka. Dilematis terletak pada ketidakberdayaan pemerintah setempat dalam beberapa proyek yang bersumber dari dana APBD. Proyek tersebut berlangsung dengan kendali proyek dari pejabat di Jakarta. Konsultan merencanakan gambar tanpa melibatkan seluruh pihak setempat secara baik, sehingga dalam pelaksanaannya proyek yang dibangun sering kali tidak sejalan dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat dalam batas-batas tertentu tidak membeda-bedakan pemerintah kabupaten, provinsi atau pusat. Semuanya bagi mereka adalah sama. Karena dalam level tertentu saat mana proyek yang bersumber pada APBD kabupaten juga kerap kali berlangsung tidak sejalan dengan keinginan-keinginan masyarakat. Dalam hal lain, ulama-ulama yang dulunya menjadi pemimpin informal dalam kalangan masyarakat Aceh telah mengalami pergeseran posisi.

Masyarakat melihat antara ulama dan pemerintah harus ada jarak. Ulamalah yang menjadi simbol penegakkan kebenaran. Setiap kesalahan sosial harus mendapatkan koreksi dari ulama. Namun disaat yang sama, pemerintah justru mendekatkan diri pada ulama untuk meminjam kharisma ulama agar terjamin kesuksesan program-program pembangunan. Dalam keadaan tertentu hal itu menjadi cair, sehingga ulama terbawa dalam kepentingan dan agenda politik pejabat pemerintahan. Masyarakat melihat ulama tidak lagi independen dari pemerintah yang terlanjur mereka tidak percayai.

Bersamaan dengan itu, minimnya kemunculan agen-agen perubahan diluar ulama terutama terletak pada situasi Aceh yang tidak kondusif. Pemuka-pemuka sering kali menjadi sasaran dari kedua belah pihak bertingkai dalam dinamika konflik. Sasaran yang paling terlihat adalah pemerasan materi dan intimidasi bilamana dirasa seorang pemuka terlihat lebih mendekat ke salah satu pihak bertikai.

G. Institusi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat

Dalam level gampong terdapat *keuchik*, *kejruen blang*, *peutua seunebok* dan *panglima laot* sebagai institusi-institusi sosial yang menjalankan fungsi mengatur dan memelihara harmoni, keselarasan dan ketertiban antar aktor dalam bekerja. Aktifitas bekerja dalam orientasi produksi melalui pengolahan sumber-sumber alam, seperti sawah, kebun ladang dan laut diatur oleh insitusi-institusi adat tersebut. Demikianpun halnya pemasaran produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dimaksud dalam skala sederhana dikoordinasikan oleh institusi *haria pekan* untuk menjamin ketertiban proses bertemunya penjual dan pembeli di pasar-pasar rakyat. Namun terbiasa bekerja dalam orientasi berproduksi semata tak dapat dianggap syarat cukup untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi dalam kondisi kekinian yang penuh tekanan, tantangan dan kompetisi.

Disisi lain, satu hal unik semacam spesialisasi pekerjaan pada level gampong atau dalam batas-batas tertentu dapat disebut terjadi sekulerisasi institusi-institusi sosial non agama. Misalnya saja, *imuem meunasah* menangani masalah *hukom* dan melayani ritual-ritual agama yang dilakukan masyarakat.

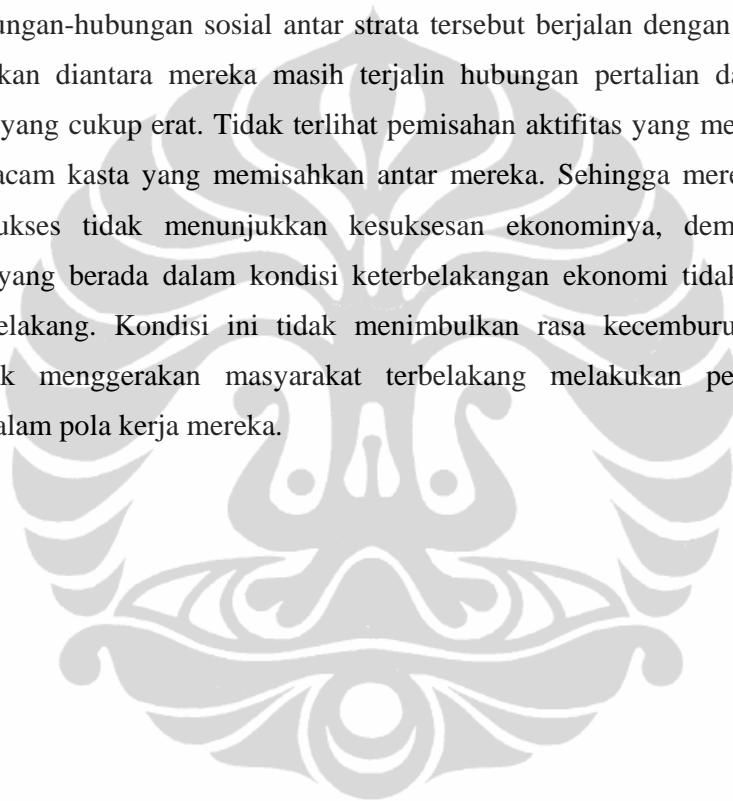
Sedangkan urusan non hukom-ritual agama tingkat *gampong* dipegang oleh institusi lain, sebut saja *keuchik* bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan adat. *Kejrueu blang*, *peutua seuneubok* atau *panglima laot* bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan harmonisasi pekerjaan menurut tradisi adat yang berlaku. Sementara itu, Islam diakui memiliki pengaturan seluruh bidang kehidupan, Namun dalam struktur sosial, hal itu dinegasikan dengan dipisahkannya penanggung jawab agama dan non agama dalam kedudukan setara. *Imuem meunasah* tidak mengambil tempat lebih tinggi atau lebih rendah dari seorang *keuchik*. Peneliti menduga bahwa *keuchik* adalah institusi yang telah lebih dahulu eksis sebelum Islam menjadi agama masyarakat di kawasan Pidie pada khususnya, Aceh pada umumnya.

Institusi-institusi tersebut hidup dan berjalan membentuk suasana yang statis. Kegiatan-kegiatan ekonomi produksi berlangsung rutin mengikuti musim alam dan pengaturan waktu kerja mengikuti pola tersebut. Sehingga masyarakat hanya menempatkan target-target sederhana dalam bekerja. Misalnya, bekerja hanya untuk memperoleh pendapatan sekedar cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga selama satu atau dua hari. Sisa waktu digunakan untuk berkumpul dan bercengkrama di tempat-tempat yang biasa dijadikan tempat berkumpul. Tempat tersebut dapat saja kedai kopi, pos jaga, meunasah atau lainnya. Berlawanan dengan kondisi itu, bilamana musim panen tiba maka rasa gembira diwujudkan dengan kebiasaan konsumtif.

Sejalan dengan tradisi bekerja yang sedemikian rupa, diantara aktor yang berhasil mensiasati dan menutupi sisi lemah tersebut sehingga dapat menjadi “*ureung kaya*” tidak serta merta melakukan berbagai tindakan-tindakan ekonomi rasionalitas yang mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan batasan-batasan norma agama dan adat yang membekali timbang rasa kepatutan dan kepatasan dalam menegakkan komitmen hidup harmonis dalam kebersamaan. Budaya *hedonisme* dan *materealisme* belum menjalar dalam kehidupan masyarakat Pidie. Dalam batas-batas tertentu “*ureung kaya*” di Pidie mengungkapkan simbol status sosialnya dalam membangun rumah besar dengan model yang mencirikan kemampuan ekonominya. Diluar itu, terkadang mereka memiliki mobil keluaran terbaru yang bermerek terkenal menurut selera dan perspektif mereka sendiri.

Namun dalam keseharian beraktifitas dan berinteraksi, mereka biasanya hanya menggunakan kendaraan roda dua.

Kondisi-kondisi yang tidak menjadikan materi sebagai standar tertentu yang harus dicapai dalam hidup, membuat situasi sosial yang tidak memperlihatkan perbedaan mencolok antara masyarakat yang menempati strata sosial tinggi (*ureung kaya*), menengah (*ureung sep pajoh*) dan rendah (*ureung gasin*). Hubungan-hubungan sosial antar strata tersebut berjalan dengan cair, hal itu dikarenakan diantara mereka masih terjalin hubungan pertalian darah dan kekerabatan yang cukup erat. Tidak terlihat pemisahan aktifitas yang menyerupai adanya semacam kasta yang memisahkan antar mereka. Sehingga mereka yang tergolong sukses tidak menunjukkan kesuksesan ekonominya, demikianpun masyarakat yang berada dalam kondisi keterbelakangan ekonomi tidak merasa dirinya terbelakang. Kondisi ini tidak menimbulkan rasa kecemburuan yang positif untuk menggerakkan masyarakat terbelakang melakukan perubahan-perubahan dalam pola kerja mereka.



BAB 6
KONTRIBUSI NILAI DAN STRUKTUR SOSIAL
TERHADAP DINAMIKA EKONOMI MASYARAKAT PIDIE

6.1. Dinamika Ekonomi Masyarakat Pidie.

6.1.1. Spirit Masyarakat Pidie dalam Bekerja

Di kawasan provinsi Aceh, sebagaimana telah dikenal umumnya bahwa Pidie menjadi salah satu andalan penghasil beras. Meskipun fenomena itu dapat dijelaskan dengan alasan ketersediaan lahan pertanian sawah yang memungkinkan, namun aspek manusia adalah hal yang lebih menentukan. Semangat dan keuletan dalam mengolah sumber-sumber alam merupakan tradisi kerja masyarakat Pidie sebagai modal penting dalam kehidupan ekonomi mereka. Tanpa kemauan dan dorongan untuk bekerja keras mengolah lahan, maka sebuah hal ganjil bila Pidie tetap menghasilkan produksi beras. Permasalahan petani sawah tidak kunjung membaik taraf hidupnya adalah persoalan diluar dari kemampuan kontrol dari masyarakat itu sendiri.

Keadaan serupa dapat disaksikan dalam pemandangan sehari-hari, aktifitas kerja masyarakat Gampong Meunasah Balek terlihat dalam ragam wujud tingkah laku dan semangat. Sejak pagi hingga malam terlihat dinamika gerak masyarakat dengan kesibukannya masing-masing. Kesibukan sedikit mereda pada setelah waktu salat dhuhur atau sekitar jam 14 hingga jam 16. Masyarakat setempat terbiasa menggunakan istilah waktu yang dihubungkan dengan jadwal ibadah shalat lima waktu. Namun, dalam masa menurunnya aktifitas tersebut, suasana lengang juga tidak terjadi karena iring-iringan pelajar yang bersenda gurau seraya menghilangkan penat dalam perjalanan kembali menuju rumahnya masing-masing. Rombongan pelajar dengan kendaraan roda dua atau berjalan kaki memenuhi jalanan utama serta lorong-lorong gampong.

Di pagi hari, sejak azan shalat shubuh dikumandang lewat pengeras suara mesjid atau meunasah. Terlihat beberapa pria remaja dan dewasa bergegas keluar dari rumahnya. Ditemani cahaya lampu penerang jalan sembari melawan dingin mereka berjalan menuju mesjid Meureudu atau dua meunasah yang berada di gampong ini. Tak lama kemudian, perlahan surya mulai menerangi pekarangan

rumah-rumah penduduk dan jalanan, saat itu pula secara perlahan pula kaum ibu terlihat sibuk. Pedagang makanan yang menyasar para pencari panganan pagi terlihat merapikan meja dan menata menu jualannya. Tak banyak yang berjualan jalanan atau lorong gampong, karena perkampungan ini berdekatan dengan *keude* Meureudu. Sebagian lebih suka langsung menuju *keude* dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda, bahkan kendaraan bermotor.



Gambar 6.1. Aktifitas bekerja masyarakat di pagi hari. Sebagian melayani kebutuhan makanan di pagi hari di jalanan utama gampong. (kiri) dan seorang wanita terlihat mendorong bahan bakar *tapeuh* di dekat pabrik industri rumah tangga *kue adee*.

Suasana pagi menjelang waktu masuk sekolah dan kantor, saat mana masyarakat semakin ramai memenuhi jalanan gampong dengan tujuannya masing-masing. Sebagian pemuda dan pria dewasa tampak mengisi kedai kopi Saweu, salah satu kedai kopi dari belasan kedai kopi yang berada di *keude* Meureudu. *Keude* yang satu ini terlihat paling diminati oleh penduduk pria gampong Meunasah Balek, dan tentu saja juga didatangi oleh penduduk lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan kedai inilah yang paling pertama ditemui apabila masyarakat gampong Meunasah Balek hendak ke *keude* Meureudu.

Masyarakat terbiasa untuk mendapatkan sarapan pagi di *kedai* kopi. Sembari menikmati secangkir kopi atau segelas teh panas, kebanyakan dari mereka menikmati juga potongan kue yang disediakan atau sebungkus nasi guri yang sudah dikemas bungkusannya oleh pihak penjual. Biasanya nasi-nasi bungkus itu dititip oleh seseorang untuk dibantu jual oleh pemilik kedai. Hasil

penjualan, diberikan dalam bentuk uang jasa sesuai nilai yang disepakati dari setiap bungkus yang laku. Di antara waktu menikmati minuman dan makanan, masyarakat pengunjung kedai sering memanfaatkan waktu untuk membaca koran lokal yang disediakan oleh pemilik kedai kopi. Beberapa diantara mereka saling bertukar cerita dan informasi, dari hal-hal ringan hingga hal-hal penting. Terlihat juga canda tawa diantara mereka yang sudah akrab satu sama lain.

Aktifitas di *keude* kopi menjadi semacam aktifitas rutin yang mengawali kegiatan masyarakat setempat. Setelah itu, mereka terlihat meninggalkan kedai kopi menuju tempat aktifitas masing-masing. Sebagian terlihat ke kantor, ke pasar, ke sawah dan sebagian lainnya ke TPI. Memang tak semua, penduduk masyarakat Gampong Menasah Balek terbiasa mengunjungi kedai kopi. Beberapa diantara mereka tidak membiasakan diri untuk menyempatkan diri berkumpul di kedai kopi. Ada anggapan miring bagi mereka yang jarang mengunjungi *kedai* kopi, karena akan dianggap sombong. Seperti yang diungkap:

“saya dicap sombong, karena saya jarang duduk-duduk di kedai kopi. Tapi bagi saya yang tak terbiasa melakukan itu, melakukan itu malah seperti menyiksa diri, bahkan seperti membuang-buang waktu”
(PNS, Wawancara Maret 2011)

Namun masyarakat yang menunjukkan sikap yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat setempat, salah satunya disebabkan oleh karena perbedaan nilai akibat pernah ke luar daerah atau bahkan tumbuh besar di luar Aceh. Hal itu, dapat terlihat pada informan. Ia tumbuh besar di salah satu kota di pulau Jawa dan kembali ke Aceh setelah diterima bekerja di salah satu instansi pemerintah.

Seiring dengan meningginya matahari, sebagian telah sibuk di tempat bekerjanya masing-masing. Demikian juga kedai kopi, meskipun sebagian pengunjung telah keluar, namun secara bergantian akan hadir pengunjung lainnya. Mereka seperti telah memiliki jadwal alamiah kapan mengunjungi kedai kopi langganannya dan bertemu dengan koleganya.

Waktu kerja bagi masyarakat gampong Meunadah Balek tidak teratur sebagaimana jadwal kerja guru atau pegawai kantor pemerintah. Mereka bekerja

menurut keadaan pekerjaannya. Waktu dan tempat adalah sesuatu yang dinamis. Semisal yang ditunjukkan *Keuchik* Gampong Meunasah Balek, diantara kesibukannya bekerja melayani masyarakat di rumah atau dimana saja yang disepakati. Saat mengetahui ada kapal pencari ikan memasuki TPI dengan tangkapan yang bagus, segera bergegas menanggalkan pakaian yang sebelumnya dipakai ke kantor KUA kecamatan dalam rangka pendampingan salah satu warganya yang ditatar pra pernikahan. Dengan pakaian kerja seadanya *Keuchik* Meunasah Balek langsung bekerja mengangkat tong-tong ikan yang dibongkar ke TPI Meureudu.



Gambar 6.2. Aktifitas masyarakat di TPI Meureudu, saat kapal “Ernita” berhasil membawa hasil tangkapan

Kesibukan di tempat pembongkaran ikan di TPI Meureudu tidak selalu berlangsung ramai, seperti saat *Keuchik* Meunasah Balek sibuk diantara perpindahan tong-tong ikan dari kapal ke dermaga. Seringkali hasil tangkapan tak sesuai harapan, tangkapan tak memadai walau untuk sekedar menutupi biaya operasional kapal penangkap ikan. Dalam bagian berikut akan dibahas dinamika kehidupan ekonomi masyarakat Pidie menurut bidang sumber penghidupan pokok yang dijalani masyarakat.

6.1.1.1. Nelayan.

Walaupun hasil tangkapan ikan yang diperoleh masyarakat nelayan saat ini berbeda jauh dengan apa yang pernah dialami beberapa waktu pasca musibah

gelombang tsunami, namun semangat mereka untuk bekerja melaut tetap tinggi. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tak pilihan bagi mereka selain untuk tetap berangkat ke laut. Masyarakat yang berada dalam kelompok ini tidak memiliki ketrampilan mencari nafkah selain daripada melaut.

Gelombang tsunami sepertinya turut menggeser koloni besar ikan ke perairan selat malaka, sehingga sebagaimana dituturkan oleh masyarakat nelayan bahwa saat itu mereka ke laut seakan hanya untuk menjemput ikan yang telah menunggu untuk diangkat. Mereka tidak perlu menghabiskan bahan bakar solar secara berlebihan untuk menggerakkan kapal bergerak jauh ke tengah perairan laut. Dalam posisi relatif dekat dengan garis pantai, hasil tangkapan dapat dengan mudah diperoleh. Demikian juga dengan kompetisi antar kapal penangkap ikan, jumlah tangkapan ikan tetap tak berkurang meskipun jarak antar kapal penangkap ikan berada dalam posisi rapat satu sama lain.

Saat ini, pihak yang paling menderita akibat kelangkaan ikan adalah nelayan pemilik kapal. Untuk sekali melaut kapal jenis *lingga*, membutuhkan persediaan bahan bakar solar sebanyak tiga *drum* minyak. Tidak cukup hanya itu, dibutuhkan juga ketersediaan beras, minyak goreng dan lauk pendukung lainnya untuk keperluan berlayar selama tiga hari. Seluruh biaya operasional ini hanya akan tertutupi bila mendapat tangkapan ikan memadai. Bila tidak maka, kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik boat.



Gambar 6.3. Kapal penangkap ikan jenis *pukat langga*. Kapal dengan nama lambung “*Ermita*” ini milik salah seorang nelayan berhasil (kiri) dan kapal mesin 42 parkir di tempat penjualan minyak milik salah satu nelayan sukses lainnya.

Bagi nelayan pekerja yang melaut berlaku ketentuan bahwa setiap hasil tangkapan yang diperoleh dilakukan pembagian menurut peran dan tanggung jawab para awak kapal. Pembagian peran dan tanggung jawab di dalam kapal penangkap ikan jenis *pukat langga* yaitu seorang *pawang boat* yang bertanggungjawab sebagai pemimpin dalam kapa, seorang tukang masak dan sekitar 12 hingga 20 orang penarik pukat. Hasil tangkapan ikan dibagi dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagian nelayan lain, saat ini telah menjual kapal penangkap ikannya. Alasan yang mendorong mereka melakukan ini adalah karena hasil tangkapan yang tidak memenuhi harapan. Sebagian lainnya masih bertahan dengan kapal jenis “mesin 42” atau disebut juga oleh masyarakat setempat dengan nama “boat mesin tempel” . Kapal jenis ini dikenal kemampuannya bergerak cepat yang terbantu dari bentuk badannya yang ramping dan menggunakan mesin merek yamaha.

Kapal jenis ini, biasanya dijalankan oleh dua orang yang salah satu diantaranya adalah pemilik. Pencarian ikan dengan kapal jenis ini juga tidak sejauh yang dilakukan oleh kapal jenis *lingga*. Menurut penuturan salah seorang nelayan yang memiliki kapal jenis ini, mereka melaut subuh sebelum fajar terbit dan akan kembali ke daratan di siang hari.

Salah satu dari pemilik kapal “*boat tempel*” adalah seorang muda yang sukses membangun usahanya. Ia memiliki sebuah tempat pengisian bahan bakar solar. Usahnya ini terbantu berhasil karena terbangunnya saling pemahaman antar nelayan yang kerap tak memiliki uang untuk melaut, namun membutuhkan bahan bakar. Pembayaran dilakukan setelah mendapat tangkapan ikan, sekembalinya dari lautan. Selain itu, ia sendiri memiliki kapal jenis mesin tempel yang masih beroperasi hingga kini.

6.1.1.2. Petani Sawah.

Sajian pemandangan indah bagi setiap orang yang melintasi kawasan Pidie, terutama dapat dinikmati pada saat tanaman padi sedang dara atau juga menguning. Tanpa banyak bicara dan bergurau, aktifitas petani di bawah terik

matahari baik pada saat menanam benih atau memanen menunjukkan ketekunan dan keuletan kerja Petani Pidie. Aktifitas lain seperti membajak saat ini sudah diupahkan kepada pemilik mesin *tractor*. Petani mengungkapkan bahwa “ sudah jauh lebih menguntungkan mengupahkan daripada dibandingkan dengan besarnya waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk membajak dengan cangkul”. Karena itu pada musim membajak, sawah tidak terlihat ramai oleh aktifitas petani seperti saat teknologi mesin belum digunakan masyarakat Pidie. Beberapa petani akan hadir untuk melihat atau mengawasi para pekerja upahan yang bekerja dengan peralatan mesin *handtractornya*. Bisnis menyewakan *handtractor* menjadi lahan mencari pendapat baru bagi sebagian masyarakat.

Meskipun pendapatan petani dirasa tidak berimbang dengan biaya yang dikeluarkan bagi pembelian pupuk, benih unggul atau biaya operasional upah lainnya. Namun petani Pidie tetap menjalankan usahanya, sering kali diungkapkan oleh informan bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain menjalankan usaha tersebut. Pekerjaan bertani secara turun temurun dijalankan oleh sebagian masyarakat Pidie. Pidie sebagai kawasan lumbung padi telah dikenal sejak era Kerajaan Aceh. Yang membedakan pada generasi saat ini adalah kepemilikan sawah yang dapat saja beralih karena kebutuhan uang yang mendesak. Sebagian petani bekerja sebagai petani penggarap dengan pembagian pendapatan yang dirasa pantas untuk keadaan saat ini.

6.1.1.3. Petani Tambak

Areal tambak yang luas di kawasan Pidie, menjadi bidang pekerjaan yang menjanjikan. Namun, petani tambak terlihat sangat tergantung pada kondisi harga sebuah komoditas budi daya. Seperti saat harga udang windu sedang tinggi-tingginya, dan didukung oleh kecocokan kondisi air dan lingkungan maka aktifitas lahan pertambakan sepanjang kawasan Pidie menggairahkan. Pada saat itu, disebutkan bahwa setiap tambak terlihat ramai dengan beroperasinya peralatan yang dibutuhkan untuk budidaya udang dengan teknik intensif, seperti putaran air agar suhu air dapat diatur penyesuaiannya. Namun setelah terjadi perubahan kadar

air yang antara lain disebabkan setelah tsunami, maka lahan pertambakan ditinggalkan oleh para pengelolanya.

Konsistensi bekerja secara profesional sepertinya tidak terlihat eksis di kalangan petani tambak. Dari pengamatan terlihat hanya satu petani tambak yang masih bekerja tekun mengusahakan lahan tambaknya untuk jenis budidaya kerapu. Selain dari itu, sebagian besar tambak terlihat terlantar dan sebagian lainnya terlihat dikelola seadanya dengan bibit-bibit bandeng.

6.1.1.4. Pedagang dan Pengusaha Industri Rumah Tangga

Masyarakat Pidie dikenal dengan bakat dagangnya, namun berada di kawasan Pidie sendiri terlihat bahwa tidak semua masyarakat Pidie mencari pendapatan dengan berdagang secara profesional. Namun, secara tradisional kaum wanita sering meluangkan waktu untuk menghasilkan tikar alas duduk berbahan baku daun pandan. Kebiasaan ini diwariskan secara turun temurun oleh kaum wanita, namun peluang laba yang rendah menjadikan kebiasaan ini tidak menjadi pekerjaan pokok. Mereka melakukannya untuk mencari pendapatan tambahan dari sedikit pendapatan pokok dari bertani.

Pedagang-pedagang kecil mudah dijumpai di lorong-lorong perkampungan, namun perdagangan skala yang lebih besar biasanya dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal disekitar *keude* atau pasar. Sebagaimana lazimnya perdagangan akan maju dengan didukung oleh konsentrasi jumlah penduduk yang tinggi, namun Pidie yang mengandalkan penduduk setempat dan tidak memiliki daya tarik bagi pendatang maka menjadikan Pidie diramaikan oleh penduduk yang berdaya beli rendah. Beberapa pedagang senior yang merasakan kemunduran usahanya lebih senang menyewakan tokonya kepada pedagang lain. Pengusaha yang lebih eksis terlihat dari kelihaiannya membaca keadaan, seperti yang terlihat bahwa saat ini sedang mendulang hasil adalah pengusaha kuliner makanan lokal seperti *Mie Caluk* dan *Kue Adee*.

Kedua produk ini menyasar masyarakat yang berbeda, *Kue Adee* menyasar masyarakat yang melintas kawasan Pidie sebagai oleh-oleh khas Meureudu. Sedangkan mie caluk menyasar masyarakat setempat yang terbiasa mencari

jajanan makanan ringan di siang atau sore hari. Permintaan yang tinggi membuat usaha ini bergairah dan menjadi *trend* di kawasan Meureudu.

6.1.1.5. Pegawai Pemerintah dan Pejabat Publik

Sebagai sebuah kawasan yang baru saja menjadi pusat pemerintahan kabupaten, terlihat *euforia* sebagian masyarakat yang tertarik untuk menjadi pegawai negeri. Hal ini terutama berlaku bagi penduduk usia muda. Mereka mengincar pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, paling tidak dengan harapan kelak mereka akan menjadi pegawai negeri maka berstatus pegawai honorer sudah memberi sebuah kepuasan dan kebanggaan. Sebelumnya pegawai negeri tidak menjadi perhatian utama masyarakat di kawasan Meureudu dan sekitarnya. Orang-orang yang berseragam Pegawai negeri dalam jumlah kecil hanya dapat dijumpai di kantor camat, Kantor Penyuluhan Pertanian atau KUA kecamatan. Pegawai negeri lainnya adalah guru-guru di berbagai sekolah. Tingkat kesejahteraan dari mereka juga tidak terlalu memperlihatkan perbedaan dengan masyarakat yang berprofesi lainnya.

Kehadiran pusat pemerintahan mendorong berdirinya berbagai instansi yang dijalankan oleh banyak orang. Sehingga jumlah pegawai yang meningkat pesat terlihat mengimbangi keramaian keude Meureudu yang menjadi tempat kantor Bupati Pidie Jaya berada. Selain itu, simbol-simbol kesejahteraan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah atau pejabat publik dengan rumah megah, kendaraan terbaru baik dinas ataupun milik pribadi serta sering berdinasnya ke luar kota hingga ke Jakarta membuat kalangan ini menjadi rujukan kaum muda untuk berhasrat mengikuti jejak. Kehadiran lembaga DPRD dengan seluruh aspek yang mengikutinya, seperti anggota DPRD yang menunjukkan gaya hidup serupa telah menyita perhatian masyarakat dalam melihat peluang mencapai kesejahteraan.

Tabel 6.1.
Ikhtisar Kehidupan Ekonomi Masyarakat terkait Struktur Sosial

	Bidang Sumber Penghidupan Ekonomi			
	Pertanian	Perikanan Kelautan	Pedagang	Pegawai/Pejabat Pemerintah
Tingkat kehidupan ekonomi (umumnya)	Rendah	Tinggi, menengah dan rendah	Rendah, menengah dan sedikit yang tinggi	Tinggi dan menengah
Tempat dalam stratifikasi sosial	<i>Ureung sep pajoh, ureung gasin</i>	<i>Ureung kaya, ureung sep pajoh dan ureung gasin</i>	<i>Ureung kaya, ureung sep pajoh</i>	<i>Ureung kaya, ureung sep pajoh</i>
Institusi Sosial orientasi produksi	<i>Kejrueu Blang</i>	<i>Panglima Laot</i>	<i>Haria Peukan</i>	<i>Keuchik</i>
Institusi sosial orientasi profit ekonomi	Tidak ada	TPI hanya sekedar menjadi tempat-tidak lebih. Fungsi ekonomi progressive terdapat pada aktor individual-tidak terorganisir	Pasar. (sekedar tempat bertemu kepentingan) tidak ada insititusi khusus kepentingan ekonomi kolektif	Tidak dikenal
Institusi sosial orientasi keagamaan	<i>Imuem Meunasah</i>	<i>Imuem Meunasah</i>	<i>Imuem Meunasah</i>	<i>Imuem Meunasah</i>
Tingkat pendidikan aktor (umumnya)	Rendah	Menengah dan rendah	Menengah	Menengah dan Tinggi
Jaringan sosial	Cakupan terbatas	Cakupan luas bagi nelayan pemilik dan terbatas bagi nelayan pekerja	Cakupan luas	Cakupan luas

Mengamati dan mendalami dinamika kehidupan ekonomi masyarakat sebagaimana diuraikan di atas, sejauh ini peneliti melihat bahwa permasalahan-permasalahan ekonomi masyarakat nelayan terletak pada kekurangmampuan nelayan dalam menghadapi tekanan-tekanan yang berada di luar kemampuan mereka. Nelayan bekerja secara klasik, dimana mereka hanya tahu bekerja keras menangkap ikan di laut lalu membawanya ke darat guna dijual. Menyangkut kejatuhan harga karena berlimpahnya jumlah ikan atau bagaimanapun pengelolaan pendapatan secara terencana adalah hal-hal yang jauh dari jangkauan mereka. Nilai-nilai adat yang terpresentasikan pada keberadaan *panglima laot* hanya menjalankan fungsi mengatur ketertiban dan harmonisasi kegiatan melaut para nelayan. Demikian juga dengan bidang usaha pertanian yang didalamnya fungsi-

fungsi pengaturan air bagi kebutuhan usaha pertanian tanaman padi diatur oleh institusi *kejruen blang* atau persoalan ladang bagi usaha-usaha perkebunan diatur oleh *peutua seunebok*.

Dengan kata lain institusi adat hanya sampai mengatur bagaimana kepentingan-kepentingan nelayan dan petani dalam bekerja tidak saling berbenturan dan semua dapat berjalan secara aman dan tertib tanpa melanggar kaidah-kaidah adat dan agama. Kaidah agama yang diterapkan, seperti pelarangan melaut pada hari kamis hingga selesainya shalat jumat. Hal ini ditujukan agar para nelayan dapat menjalankan kewajiban shalat jumat dengan baik. Demikian juga dengan ketertiban usaha tani yang memerlukan kerja kolektif agar serentak dalam membajak, menebar benih dan panen. Sejauh ini beberapa aktor nelayan telah menyadari tekanan-tekanan pada usaha nelayan, dengan improvisasinya sendiri mereka berusaha untuk keluar dari tekanan itu. Namun kesadaran-kesadaran itu tidak mengarah untuk pembentukan institusi sosial yang dapat menyelamatkan nelayan secara keseluruhan. Akhirnya yang terlihat adalah upaya-upaya individual atau terkadang mengajak jaringan kerjanya sendiri untuk turut serta. Sementara itu, petani lebih sulit untuk berimprovisasi karena keterbatasan-keterbatasannya seperti luas lahan yang semakin sempit karena harus berbagi dengan sesama ahli waris lainnya.

Demikianpun halnya dengan institusi agama, seperti *imuem meunasah* sejauh ini hanya berkisar pada fungsinya mengatur tentang *hukom* atau hal-hal yang terkait ibadah dan muamalah. Persoalan sebagaimana disebut di atas yaitu bagaimana mengkondisikan kerja keras nelayan bernilai lebih bagi pendapatannya dan bagaimana pendapatan itu dapat memberi manfaat lebih melalui pengelolaan yang terencana tidak menjadi domein dari insitusi agama. Masyarakat tidak memiliki struktur sosial yang mampu mentransformasi atau menjembatani mereka untuk menyempurnakan kebiasaan kerja keras menjadi lebih awal dari kemajuan ekonomi.

Bila dihubungkan dengan konteks historis masyarakat Pidie, maka terlihat bahwa semangat kerja keras masyarakat berhasil ditransformasikan menjadi semangat berperang melawan penindasan. Struktur sosial yang berlaku

saat itu hanya mengalami sedikit perbedaan dengan saat ini yaitu : 1) elit pemimpin *uleebalang* telah berganti dengan bupati yang berganti secara berkala melalui cara-cara demokratis; 2) ulama-ulama saat ini terkesan jauh dari masyarakat dimana yang tak dimiliki oleh ulama saat ini adalah kepekaan, kekurangpahaman yang berdampak pada kurang terlibatnya ulama dalam pemecahan permasalahan-permasalahan sosial yang membelit umat. Ulama cenderung kurang inisiatif dan lebih berorientasi pada permasalahan agama semata.

Gejala tidak adanya institusi sosial yang mengatur ekonomi masyarakat terkait dengan budaya *patriarchy* menempatkan masyarakat dalam posisi menunggu dan mengikuti hal-hal yang bersifat *top down*. Paradoks dalam hal ini terjadi, elit pemerintah yang menempati tempat tertinggi dalam struktur sosial justru kehilangan kepercayaan dari masyarakat akibat kekurangpekaan terhadap masalah-masalah sosial. Sebaliknya, dalam kondisi ini proses pembentukan institusi ekonomi sulit muncul atas inisiatif masyarakat itu sendiri.

Sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran merasakan dirinya tidak dalam kapasitas dalam menggagas institusi sosial guna mengatur kepentingan orang lain. Aktor yang demikian tidak merasa harus mengambil alih tanggung jawab struktur sosial dalam mengkondisikan usaha ekonomi masyarakat sehingga tertata rapi dan dapat mengantisipasi tekanan-tekanan dari kemajuan zaman. Elit agama, dalam hal ini ulama merasa bahwa persoalan ekonomi seakan menjadi wilayah sekuler yang tidak menjadi tanggungjawabnya. Karenanya merupakan sesuatu yang sulit diharapkan ulama lokal mengintegrasikan isu-isu kepentingan ekonomi ke dalam isu-isu kepentingan agama, sementara itu sentimen utama yang dapat memicu kebangkitan dan kesadaran masyarakat Aceh adalah kepentingan agama.

6.1.2. Tabiat dan Kebiasaan Kerja Masyarakat Pidie

Berdasarkan informasi dari beberapa informan yang peneliti temui, masyarakat setempat secara umum berada dalam katagori bekerja hanya untuk mendapatkan uang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan hari berjalan.

Mereka tidak memikirkan untuk menyisihkan pendapatan untuk ditabung, meskipun jumlah pendapatan hari berjalan tersebut dapat disebut jumlahnya melebihi dari total pengeluaran dalam membeli kebutuhan pokok. Asumsi bahwa mereka akan memperoleh uang semudah dan sejumlah itu kembali sangat mengental. Hal tersebut dikemukakan seorang guru pegawai negeri yang membantu distribusi ikan hasil tangkapan boat mertuanya :

“entah bagaimana tabiat kita, terutama nelayan atau kita yang bekerja mendukung aktifitas jual beli ikan. Uang demikian mudah kita dapat, tapi belum sempat tiba dirumah, uang sudah habis. Seumpama saya bilang jari ini ada 10, semua jari bergelantungan plastik bawaan barang-barang yang kita beli. Kadang barang itu tidak terlalu penting....Yaah itu tadi, kita pikir besok juga kita akan dapat duit sebesar ini lagi”
(Pegawai Negeri, Wawancara tanggal 22 Maret 2011)

Pola hidup boros begitu mengental di kalangan nelayan, padahal sebagian dari kebutuhan sehari-hari seperti lauk ikan dapat dipastikan menjadi tentengan setiap tangan para nelayan yang baru pulang melaut. Terkadang beras pun sudah tersedia di rumah dari hasilnya mengusahakan usaha tanam padi dengan pola garap petak sawah milik orang. Namun hal itu, tidak menyurutkan kebiasaan untuk membelanjakan uang yang ada padanya. Hal yang sama dikemukakan oleh seorang *toke bangku* yang ia dikenal sebagai nelayan yang berhasil, sebagai berikut :

“uang di tangan kita seakan-akan meronta-ronta minta dilepaskan. Begitulah kira-kira keadaan yang dapat kita sebut. Betapa tak lama uang itu ditangan kita. Ada yang langsung ke kedai kopi, pesan kopi telur, mie dan duduk berlama-lama disanan sambil menghabiskan rokok”
(Nelayan, wawancara tanggal 22 Maret 2011)

Adanya kebiasaan para lelaki bersantai di warung kopi sembari menikmati belanjaan uang yang didapat dalam usaha kerjanya dikemukakan oleh seorang guru yang saat ditemui justru sedang bekerja memotong padi di petak tanah milik orang lain. Pemandangan itu tersaji di suatu pagi hari yang sejuk. Terlihat pada tepi pematang sawah, beberapa laki-laki dewasa tampak bersenda gurau di tengah gesitnya kedua tangan mereka memotong batang padi dan mengikat batang-batang yang telah menguning warna dari untaian bulir-bulir padi berisi. Satu dari tiga

lelaki itu adalah seorang guru yang juga menjadi imam meunasah dari gampong terdekat. Sementara di atas motor tua, duduk di atas sadel seorang lelaki paruh baya yang kemudian ternyata *kejruen blang*. Seorang dari mereka berseru sambil tetap bekerja :

“lihat lah ke kedai-kedai kopi. Banyak dari mereka senangnya menikmati kopi dari pagi hingga siang. Menghabiskan sedikit uang yang didapatinya kemarin. Itu lah kebiasaan buruk kita”

(guru/petani/imam meunasah, wawancara tanggal 20 Maret 2011)

Pekerjaan bertani sawah yang tak kunjung berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan menjadi lebih baik, lambat laun menjadi simbol dari status masyarakat tidak berhasil. Apalagi sistim perolehan pendapatan di akhir musim panen menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi berbagai keperluan rutin yang tak mengenal musim. Keadaan ini mendorong sebagian masyarakat berusia muda menghindari pekerjaan di bidang ini. Sebagaimana dikemukakan

Seorang *kejruen blang*:

“Anak muda sekarang, tak bisa lagi bekerja seperti itu...memotong padi, anak saya dirumah ..saya ajak ke sawah belajar melakukannya pun mereka sudah tak mau. Mereka lebih senang kerja bertukang, karena uang bisa didapat langsung setiap seminggu sekali atau setiap sore saat pulang kerja. Kalau bertani kan tidak begitu, setelah panen baru bisa dapat uang kan lama..sekitar 3 bulan dari sejak bekerja”

(Petani/Kejruen Blang, wawancara tanggal 20 Maret 2011)

Demikianpun, di antara petani terdapat juga yang mengisi waktu kosong antara masa tanam dan masa panen, dengan aktifitas bertukang atau mengikuti kegiatan proyek bangunan. Selebihnya ada juga petani yang menghabiskan waktu dengan agenda kegiatan yang tidak jelas. Diantara kebiasaan petani yang membuat miris adalah menjual seluruh hasil panennya, sehingga kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangganya harus mencari kembali dengan membelinya di pasar. Sebagaimana yang dikemukakan :

“saya selalu menyisihkan beras 1 ton dengan menitipkannya di pabrik padi, karena saya tak memiliki tempat untuk menumpuknya dirumah...pikir saya adalah setiap waktu bila ada kebutuhan beras di rumah maka saya minta kepada pabrik penggilingan untuk menggiling

padi saya. Merekapun membuat catatan berapa beras yang telah saya ambil”
(Pedagang, wawancara tanggal 22 Maret 2011)

Di bagian lain, terdapat keunikan tersendiri pada sebagian masyarakat petani sawah. Pola kerja dua kali tanam dan dua kali panen dalam setahun membuat mereka memiliki banyak waktu kosong. Sebagian memanfaatkan waktu kosong tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mencari tambahan. Memang sebagian diantara petani tersebut, turut serta dengan boat milik orang untuk melaut. Namun, pola pemanfaatan dana hasil tangkapan ikan yang diperoleh tak juga berbeda dengan kebanyakan nelayan lainnya.

Dalam beberapa waktu terakhir, dirasakan terjadi perubahan pola pikir dan pola tanam pada sebagian masyarakat petani yang berada di *tsunong*. Masyarakat menyebut *tsunong* sebagai petunjuk tempat bagi petani yang membuka petak sawah ke arah lebih dalam atau perbukitan kabupaten Pidie Jaya. Di kawasan ini, belakangan masyarakat dikenal berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Salah satu kemajuan pikiran yang ditularkan oleh si anak yang telah sarjana kepada para orang tua dan kerabat tetangga sekitarnya adalah pola tanam di sawah. Seperti yang dituturkan :

“sekarang kita harus bilang bahwa masyarakat *tsunong* telah pesat kemajuannya. Mereka di atas menanam kebun dengan coklat kakao. Sistem tanam padi diselang seling dengan usaha pertanian palawija. Secara serentak setelah panen, langsung petak sawah digarap untuk area tanam palawija seperti cabai, timun dan komoditas lain. Hasilnya luar biasa. Mereka begitu patuh dan kompak dalam mengikuti hal-hal baik. Beda dengan kita yang dibawah, malah anak-anak muda nya banyak terjebak dalam pergaulan tidak sehat akibat mudahnya diperoleh obat-obat terlarang”
(pedagang, wawancara tanggal 22 Maret 2011)

Fenomena mewabahnya peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang di kalangan remaja hingga pemuda di kawasan yang dianggap jauh dari suasana hingar bingar kota besar, seperti Meureudu membuat situasi semakin kompleks. Sebagian masyarakat sudah terbiasa untuk bekerja saat memasuki fase genting kebutuhan dana tunai, semakin menjadi beban dengan ketidaksadaran sebagian

remaja pemuda yang terjebak dalam arus pemakaian obat-obatan yang mengganggu saraf dan menuntut pemenuhannya setiap saat. Hal itu dikemukakan :

“sebagian besar dari mereka sering bersantai-santai di dermaga TPI. Mereka bekerja sekedar mendapatkan uang sedikit dengan cara menurunkan tong-tong ikan dari boat...Selebih itu mereka malah duduk-duduk sambil menikmati keadaan. Saya sering memperingatkan karena saya juga takut, saat mereka menikmati yang dilarang, mereka ditangkap...kita yang dekat mereka juga bisa kena. Mereka tidak salat, sering kali saat di TPI disuarakan azan, yang datang salat hanya orang-orang yang sama”
(Pedagang, 49 tahun, wawancara, Maret 2011)

Salah seorang informan, menyebutkan bahwa sebagian dari remaja pemuda yang malas bekerja dan cenderung mengkonsumsi apa yang dilarang pemerintah adalah mereka yang putus sekolah karena terlalu cepatnya menikmati uang dari ikut serta pekerjaan orang tua, kurangnya minat sekolah dan kurangnya kesadaran serta semangat dorongan dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Alasan klasik yang sering menjadi sumber masalah bahwa sekolah atau kuliah karena ketiadaan uang. Hal itu diungkapkan oleh seorang guru pegawai negeri yang sekaligus menjadi wirausahawan “*kue adee*” yang dikenal sukses:

“asal ada yang bertanya pada saya karena keraguannya untuk menyekolahkan anak..maka saya selalu mengatakan bahwa duit untuk sekolah anak, tidak harus kontan ada dalam jumlah besar. Semua sedikit demi sedikit, sehingga kalau ditotal setelah ia selesai kuliah, kita pun tak sangka sanggup mencari duit sebanyak itu..bagi yang mendengar banyak terbukti berhasil, ..itu yang di gampong Meuraksa..dari hasil ia bekerja memelihara ayam potong, hingga semua anaknya telah menjadi sarjana. Saya melihat asal anak telah kita kasih kuliah, kita selalu berusaha untuk bekerja...dan, rejeki itu ada saja datangnya..alam ini luas dan memberikan sumber rejeki bagi kita”
(Pengusaha, 58 tahun, wawancara April 2010)



Gambar 6.4. Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirausaha di dapur *kue adee* (kiri) dan pengusaha kuliner yang mendorong gerobak *mie caluk* (kanan) di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya

Hal yang sama dikemukakan seorang petani tambak yang jatuh bangun dengan kegiatan tambaknya. Pekerjaannya sebagai petani tambak, membuatnya berhasil menyekolahkan anaknya hingga menjadi sarjana. Seperti tuturnya :

“Pada awalnya, saya berhasil dalam usaha tani tambak..sehingga bertambah modal saya..saya pun dapat membeli tambak lain dan juga mencarter tambak orang untuk saya kelola. Saya juga berkongsi dengan tokoh nelayan lainnya. Namun perlahan usaha ini menyurut dan susut akibat penyakit virus yang terdapat di tambak. Anak saya yang menyarankan agar saya menjual saja tanah yang sempat saya beli untuk biaya sekolah. Mereka tak mau saya tinggalkan harta, hanya akan membuat ribut..untung saya dengar mereka. Akhirnya sekarang mereka telah berhasil menjadi sarjana. Saya selalu bekerja apa saja, karena mengingat harus ada uang untuk saya kirim kepada mereka. Contohnya hingga hari ini di pantai yang tak ada orang yang menggarap, saya malah menanam dan memanen ubi (singkong)..ada yang menertawakan,,tapi saya mendapatkan uang dari hasil penjualan ubi ke tempat pembuatan *adee ubi*” (Petani tambak, 50 tahun, wawancara tanggal 18 Maret 2011)

Sebagian dari masyarakat terdorong bekerja karena adanya kebutuhan pendidikan anak yang disekolahkan hingga ke bangku kuliah. Sementara terdapat juga yang dirinya sendiri tergolong sukses dalam usahanya, namun ia tak berhasil mendorong anaknya sendiri untuk melanjutkan pendidikan hingga sarjana.

Bahkan kerap putus di tengah jalan, akibat si anak terlalu cepat memiliki uang dari jerih payahnya membantu usaha orang tuanya. Seperti dituturkan :

“ Ada kawan saya sukses dan kami berkongsi mengelola tambak, tapi ia selalu cemburu melihat anak-anak saya mau kuliah meskipun saya masih dibawah dirinya dalam hal kemampuan biaya. Ia sangat sayang pada anak saya, sering saat anak saya libur kuliah dan pulang kampung maka diberi uang sekadarnya oleh ia. Hari ini anaknya tidak ada yang berhasil menjadi sarjana”

(Petani tambak, wawancara tanggal 18 Maret 2011)

Mencari pendapatan tambahan demi sekolah anak, juga sudah pernah dilakoni oleh seorang guru yang saat ini telah sukses dengan kreatifitasnya menggarap industri pembuatan *kue adee*. Saat ini dari industri ini ia dapat memperkerjakan 8 orang sekitar yang tak memiliki pendapatan memadai. Setiap dari mereka dapat membawa pulang uang sekitar 100 ribu setiap harinya. Dari kegiatan yang sama ia dapat membuat pemilik toko tempat ia titipkan kemasan *kue adee* mendapatkan uang sekitar 500 hingga 700 ribu sehari. Ia dapat menambah pendapatan tukang antar *kue* dari rumah ke toko, tukang cuci cetakan *kue* dan tukang yang mengantar “*tapeh*” atau kulit kelapa kering sebagai bahan bakar utama pembuatan *kue* tersebut.

Dari keberhasilannya ini, telah pula muncul beberapa dapur lainnya pada masyarakat sekitar, mereka adalah para pekerja yang ia dorong untuk mendirikan usaha sendiri. Permintaan yang tinggi akan *kue* tersebut, membuat kewalahan bila tidak ditambah dapur baru. Namun, dibalik kesuksesannya saat ini maka menurut tuturnya :

“Saya sempat membawa truk pengangkut tanah atau pasir, awalnya saya titipkan orang bawa. Namun ia tak jujur, lalu saya bawa sendiri..hingga saya ahli akan bagian mesin yang rusak. Hari demi hari, saya lihat tidak ada yang lebih dari hasil usaha ini. Pendapatannya tak pernah lebih dari yang itu dan itu juga. Maka akhirnya saya berhenti..dari keadaan itu, saya berpikir mengapa *kue adee* yang telah turun temurun dibuat oleh orang tua saya, tidak saya coba kemas seperti bingkai ambon di medan..dan kita titip jual pada toko di pinggir jalan medan-banda aceh..dari sinilah cikal bakal, hingga saya punya perwakilan di banda aceh..bahkan *kue* ini telah dicicipi oleh orang yang berada di Malaysia dan Jawa”

(Pensiunan guru/wirausahawan *kue adee*, 63 tahun, wawancara tanggal 13 Maret 2011)

Dari keberhasilan usahanya ini, keuntungan tidak diwujudkan dengan membangun rumah sebagaimana ditunjukkan oleh dua orang beberapa wirausahawan kuliner panganan lokal, semisal *mie caluk dan nasi*. Terdapat dua orang yang dikenal fenomenal usahanya sebagaimana pemandangan tersaji, setiap gerobak mereka hadir selalu dikerubuti oleh pelanggannya..dikemukakan :

“Kedua mereka menjadi contoh orang yang berhasil, dari pekerjaannya melakukan penjualan makanan dengan gerobak sorong. Mereka dapat membuat rumah beton megah..”

(Bidan Pegawai Pemerintah, Wawancara tanggal 24 Maret 2011)

Kesuksesan kerja warga masyarakat , umumnya diwujudkan dengan beragam cara seperti kebanggaan akan berhasilnya sejumlah anak menjadi sarjana dan berlanjut bekerja sebagai pegawai negeri di instansi pemerintah. Cara lain yang juga sering muncul adalah dengan cara membangun rumah beton, besar dan megah. Paling tidak adalah membeli atau menampung gadai tanah sawah atau kebun yang pemiliknya dalam kesulitan keuangan. Bagi masyarakat setempat, rumah menjadi simbol kehormatan dan status sosial. Sehingga keberadaan rumah menjadi prioritas utama setelah berhasil menumpuk kekayaan materi. Sebelum itu, secara perlahan mereka mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, sehingga genap berjumlah untuk membeli satu manyam emas. Manyam sebuah satuan setara 3,2 gram berat emas. Hal tersebut dikemukakan “

“Petani di tsunong, membawa hasil tanam palawija, daun pisang, pisang ke pasar. Sepulangnya mereka membawa pulang duit sekitar 50 ribu berikut setumpuk ikan, karena kebutuhan lain telah ada di kebunnya. Besok hal yang sama kembali mereka lakukan, hingga suatu hari tabungan yang mereka sisihkan itu mencukupi membeli satu manyam emas, maka larilah mereka ke keudeu Meureudu untuk menukarkan uang itu dengan emas. Demikian berlanjut, hingga suatu hari bila ada yang datang menggadai petak sawahnya dengan 10 manyam emas, maka tak langsung dipenuhi..mereka tangguhkan esok hari dengan alasan seakan harus melihat lihat dulu. Selanjutnya bisa-bisa bukan 10 yang diberi, tapi 20 manyam dengan bila kelak sulit bagi peminjam mengembalikan emas, maka secara perlahan sepetak tanah itu berpindah tangan menjadi miliknya”

(Guru, 42 tahun, Wawancara tanggal 22 Maret 2011)

Secara umum, di Gampong Meunasah Balek kebiasaan bekerja masyarakat dalam upaya memenuhi pendapatannya terbagi atas beberapa pola kerja. Sebagian dari remaja, pemuda dan lelaki separoh baya berada dalam keadaan malas karena kebutuhannya sehari-hari masih dapat ditutupi oleh orang tua atau kerabat dekat. Bilapun mereka bekerja, sekedar hari berjalan dapat membeli rokok, minum kopi dan panganan sederhana. Setelah itu mereka berhenti sembari berkumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu. Pada kelompok ini terdapat indikasi penggunaan obat-obatan terlarang yang tanpa disadari telah beredar dengan cara-cara tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Selebihnya dari mereka adalah mereka yang rajin mencari nafkah, namun pendapatan yang diperolehnya dengan cepat dihabiskan untuk membelanjakan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan mendesak. Nelayan misalnya, setiap kembali dari laut. Mereka dapat memperoleh pendapatan dalam jumlah tertentu. Seperti disebutkan :

“ Paling tidak setiap anak buah boat memegang uang sekitar 50 ribu hingga 100 ribu. Uang tersebut, langsung dibelanjakan di pasar berbagai barang hingga disisakan sedikit saja untuk uang jajan sekolah anaknya”.
(Nelayan, 57 tahun, wawancara tanggal 9 Maret 2011)

Dalam kelompok ini, tidak ada strategi untuk mengelola dana. Mereka tak berpikir untuk dapat memutar dana di bidang kerja lainnya. Ketidakmampuan mengelola keuangan pribadi dapat saja disebabkan oleh lingkungan pergaulan yang tidak sehat dan tingkat pendidikan serta wawasan yang terbatas. Disisi lain sebagian dari mereka menyadari keadaan tersebut, dan berusaha mensiasati kelemahan dengan mengumpulkan setiap pendapatan guna dikelola di bidang usaha lainnya. Dalam kelompok ini, biasanya didominasi oleh masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.

Pedagang dan wirausahawan memiliki kecenderungan yang sama, pendataan yang ia peroleh dari hasil pekerjaannya tidak dialihkan sebagai modal tambahan bagi peralatan pekerjaan itu sendiri. Investasi baru tetap mengarah kepada petak sawah, petak kebun atau membeli tanah di perkotaan. Mereka memutar uang di bidang itu dengan nilai-nilai keyakinan bahwa dari usaha itu,

uang tetap mengalir dari olah tanaman padi atau palawija. Sedangkan harga tanah akan terus naik atau minimal bertahan. Kebanyakan dari orang sukses yang menginvestasikan modal di petak sawah, petak kebun atau tanah di perkotaan tidak mengkonsumsi laba dari hasil usahanya itu. Mereka memutar lagi ke dalam usaha yang sama, seperti membeli tanah lagi. Seperti dikemukakan :

“untuk kebutuhan makan dan rumah tangga sehari-hari, saya ambil dari hasil boat. Namun, laba dari pesawahan langsung saya tambahkan ke usaha tersebut semisal membeli atau menampung gadai tanah orang yang memerlukan duit”

(Nelayan, 57 tahun, wawancara tanggal 9 Maret 2011)

Bidang pekerjaan baru dari mereka yang memiliki modal, saat ini adalah pengembangan bangunan-bangunan yang potensial dihuni burung walet. Walet yang menyenangkan area luas, semisal sekitar sungai *krueng* Meureudu, hamparan pesawahan luas dan luasnya pesisir pantai dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Diantara mereka menjadikan toko, lantai dua rumah tinggal atau bahkan membuat bangunan tersendiri yang sesuai dengan tempat bersarangnya walet. Sebagaimana diungkapkan :

“dari apa yang saya dapat dengan adanya walet berdiam di lantai dua rumah saya, yang tanpa sengaja saya lihat walet senang bersarang disana..maka akhirnya saya jadikan lantai dua untuk ia bersarang. Hasil nya cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, terlebih menutup uang kredit di bank yang saya ambil untuk modal pembuatan boat saya..”

(Nelayan, 37 tahun, wawancara tanggal 5 Maret 2011)

Pegawai Pemerintah atau pensiunan pegawai pemerintah, cenderung memiliki sumber pendapatan sampingan dari kegiatan tani sawah. Paling tidak mereka menggarapkan tanah miliknya kepada orang lain, atau terdapat juga yang menerima gadai tanah dari pihak yang membutuhkan untuk selanjutnya ia kelola dengan mengupah garap pada orang lain. Semisal yang diungkapkan :

“saya sudah lama menggarap sawah ini, ini sawah milik wakaf gampong. Hasilnya sangat bagus. Sedari saya belum pensiun, saya sudah bertani. Saya juga pernah berdagang nasi briyani, dikampung ini saya sering dimintai bantu masak nasi briyani bila ada khenduri..sekarang jualan nasi itu diterukan anak saya. Saya semata-mata mendapatkan nafkah dari sini, pola tanam selang seling padi dan palawija membuat saya mendapatkan

keuntungan lebih..yang lain saya ajak tak mau, saya minta carter tanah sawahnya juga tak boleh”
(Petani/pensiunan pegawai, 63 tahun, wawancara tanggal 20 Maret 2011)

Selebihnya di gampong Meunasah Balek, terdapat beberapa pegawai pemerintah yang menjadi pejabat teras di organisasi pemerintah daerah Pidie Jaya. Saat ini, masyarakat melihat mereka sebagai bagian dari warga yang berhasil. Hal itu ditunjukkan dari rumah megah yang dibangun dengan gaya moderen. Karenanya sebagian masyarakat menganggap bahwa menjadi pejabat pemerintah adalah salah satu jalan untuk mendapatkan kekayaan materi.

Di Gampong ini terdapat sekelompok masyarakat yang disebut salafi, mereka mudah ditandai dengan kebiasaan hadir tepat waktu di mesjid atau meunasah untuk melaksanakan shalat setiap azan berkumandang. Cara berpakaian dan wajah memelihara janggut, menjadi ciri-ciri yang ada pada mereka. Mereka cenderung berada dalam pekerjaannya masing-masing dengan tanpa banyak terlibat dalam tempat-tempat ramai. Hanya diwarung kopi dekat mesjid, kerap terlihat mereka duduk membaca koran atau mengobrol ringan.

Gambaran di atas, memperlihatkan tabiat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang telah mentradisi dimana tradisi itu berdampak pada pencapaian kondisi ekonomi. Secara sederhana berikut ini peneliti mencoba membedah kebiasaan-kebiasaan itu dapat diuraikan dalam elemen-elemen sosialnya.

Tabel 6.2.
Ikhtisar Tabiat dan Kebiasaan Kerja Masyarakat Pidie

	Bidang Pekerjaan			
	Petani	Nelayan	Pedagang/ Wirausahawan	Pegawai/Pejabat Pemerintah
Pola waktu peroleh pendapatan	Musiman saat panen	Relatif rutin dengan jumlah tak tetap	Rutin dengan jumlah tak tetap, mengikuti pola pendapatan petani, nelayan dan pegawai	Rutin dengan jumlah tetap, ditambah pendapatan usaha lain
Pola pembelanjaan pendapatan (umumnya)	Kurang terencana (sering terjerat hutang)	Tidak terencana (dihabiskan untuk konsumsi)	Terencana (untuk konsumsi dan modal)	Terencana (untuk konsumsi dan modal)

Kemampuan bernegosiasi dengan jaringan luar (pemasaran)	Rendah	Rendah, kecuali nelayan berstatus tauke	Menengah dan tinggi	Menengah dan Tinggi
Kebiasaan memanfaatkan waktu diluar kerja	Berkumpul, bercengkrama, membaca koran atau menonton tivi di warung kopi	Berkumpul dan bercengkrama di TPI atau di warung kopi	Kurang waktu luang karena jam kerja sepanjang hari.	Berkumpul dan bercengkrama di warung kopi. Terlibat dalam pekerjaan sampingan
Minat dan reputasi sosial di kalangan masyarakat usia muda	Rendah	Rendah (kecuali dalam status <i>tauke</i>)	Tinggi	Tinggi
Pekerjaan sampingan	Berdagang, melaut, membuat kerajinan (biasanya perempuan)	Bertani, berdagang	Pertanian (tidak terlibat/sebagai pemilik))	Pertanian dan perikanan (tidak terlibat/sebagai pemilik)
Solidaritas, inisiatif kerjasama/kongsi membangun ekonomi	Rendah, karena dapat bertahan dengan mengandalkan diri dan keluarga	Tinggi karena lingkungan pekerjaan yang membutuhkan kerjasama	Rendah/berkompetisi	Kerjasama terbentuk karena sistem birokrasi
Implementasi nilai positif Ibadah <i>mahdhal</i> dalam bertindak	Relatif Rendah	Relatif tinggi (pada nelayan berstatus tauke) dan Rendah	Relatif tinggi (pada diri aktor yang intelek) dan sedang	Relatif tinggi (pada aktor yang taat pada agama) dan sedang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bagaimana tindakan-tindakan individu menunjukkan sebuah variasi pola bertingkah laku. Sebuah masyarakat yang hidup pada tempat yang sama, memiliki nilai-nilai pedoman bertingkah laku yang sama namun memberikan reaksi yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan sosialnya. Menurut kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, dalam batas-batas tertentu masyarakat seperti tergiring secara sosial alamiah untuk memilih pekerjaan yang paling mungkin menjadi sumber nafkah penghidupannya. Pilihan-pilihan yang tersedia dalam kondisi desa agraris adalah pekerjaan sebagai petani, nelayan, pedagang atau pegawai/ pejabat pemerintahan.

Karenanya setelah mereka berada dalam lingkup pekerjaan tersebut, maka kebiasaan tersebut seperti mengkrystal di antara sesama mereka. Petani dan nelayan memperlihatkan kesamaan pemaknaan subyektif atas kehidupan. Mereka memperlihatkan kemauan untuk bekerja keras dalam kerangka memenuhi kebutuhan diri, namun dalam cara-cara tradisional. Tindakan-tindakan mereka hanya berorientasi apa yang diperlihatkan oleh pendahulu. Memproduksi sebanyak mungkin lalu memakai sesuai keperluan dan selebihnya dijual. Dalam menjualpun mereka tidak memiliki kemampuan negosiasi atau dapat didikte oleh pihak luar. Hal itu karena keterbatasan ide dan strategi yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, pandangan petani dan nelayan terhadap waktu yang tersisa setelah mereka bekerja dengan orientasinya itu adalah bonus waktu yang digunakan untuk berkumpul dengan sesama mereka, bersantai dan bergembira.

Petani dan nelayan, sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya cenderung untuk berperilaku ekonomi menurut apa yang dilihatnya dari generasi terdahulu. Dalam jumlah kecil, sebagian dari mereka mencoba bernegosiasi dengan penetrasi pemilik modal luar daerah yang langsung “menjemput bola” saat panen berlangsung. Walaupun pada gilirannya posisi petani tetap dipihak yang lemah karena kurangnya informasi pasar yang sebenarnya berlaku. Dengan alasan-alasan jumlah produksi yang berlimpah atau alasan mutu padi yang tak dijamin validitas kebenarannya, harga ditentukan sepihak oleh pemilik modal. Petani yang sudah mendesak kebutuhan uang, menerima saja keadaan itu tanpa kemampuan untuk bernegosiasi. Demikianpun adanya nelayan, dengan keadaan yang kurang lebih hampir sama.

Pedagang, wirausahawan dan pegawai pemerintah secara alamiah adalah pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat yang sempat mengenyam pendidikan yang lebih baik. Wawasan dan pengetahuan yang dimiliki membuatnya memiliki informasi yang cukup untuk bertindak, termasuk halnya mencari peluang penambahan pendapatan dari celah-celah yang tersedia di bidang pertanian dan perikanan. Lebih dari itu, karakter positif yang diperolehnya dalam pengetahuan agama dan pengetahuan umum turut membentuknya untuk mengimplementasikan nilai-nilai positif yang terkandung dalam ajaran agama. Termasuk halnya

kekosongan waktu, diluar pekerjaan pokok yang menjadi tanggung jawabnya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya.

Setelah melihat bagaimana kebiasaan dan tabiat yang berlaku pada masyarakat dalam kehidupan ekonominya. Terlihat adanya kecenderungan yang berbeda dimana kecenderungan itu sejalan dengan perbedaan tingkat pengetahuan, strategi, orientasi dan wawasan berpikir para aktor. Namun secara sederhana keadaan itu dapat dilihat pada ujung pencapaian atas usaha-usaha ekonomi yang mereka lakukan. Dua posisi realitas sosial diametral tersebut adalah menjadi *ureung kaya* sebagai sebuah kondisi yang diinginkan semua orang atau sebaliknya terjerembab menjadi *ureung gasin* sebagai sebuah kondisi dan status sosial yang tidak diinginkan atau dihindari oleh semua aktor. Pembahasan berikut ini berkisar atas maksud tersebut.

6.1.3. Strategi Bekerja : “Ureung Kaya” dan ”Ureung Gasin”

Dalam kalangan masyarakat gampong Meunasah Balek, ukuran kesuksesan yang dicapai seseorang dari usahanya tidak hanya dilihat dari seberapa besar rumah dibangun, seberapa luas tanah yang dikuasainya atau seberapa banyak kendaraan bermotor yang dimilikinya. Masyarakat juga menyebut sukses apabila seseorang di antara mereka berhasil mendidik, memfasilitasi dan mendorong anak-anaknya menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya hingga akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap dimaksudkan baik sebagai pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan atau suatu perusahaan.

Selama lima belas tahun terakhir, terdapat fenomena kemunculan seorang tokoh muda yang berhasil mengembangkan usaha pertanian buah melon. Industri pertanian serupa belum pernah ada di Pidie, bahkan di Aceh. Kelezatan buah melon Meureudu, begitu sebutan yang melekat pada buah yang kerap dijajakan disepanjang jalan negara yang terdapat di kawasan Pidie. Keberhasilan usaha yang diprakarsai oleh Haji Yusri tersebut tersebar informasinya hingga ke Malaysia dan Thailand. Keberhasilan Haji Yusri secara ekonomi, menggeser pandangan masyarakat bahwa kesuksesan juga dapat terjadi dengan kreatifitas dan

kerja keras mengolah usaha pertanian moderen komoditas non padi. Tokoh muda tersebut dikenal dengan sebutan “Yusri Melon”.

Sebaliknya, terlihat sebagian masyarakat di Gampong Meunasah Balek tergolong tidak meraih kesuksesan dari kerja yang dijalannya. Namun secara umum mereka dapat melangsungkan kehidupan dengan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tergolong sukses. Mereka dapat menikmati makanan pokok, sehari tiga kali. Mereka memiliki rumah tempat tinggal dan memiliki pakaian selayaknya orang masyarakat lainnya. Bukti-bukti ketidaksiuksesan usaha kerja yang mereka jalankan, hanya terlihat saat mengunjungi rumah tempat tinggal yang terlihat seadanya. Rumah itu berbentuk rumah panggung dari papan, ataupun rumah semi permanen dengan lantai berbahan semen.

6.1.3.1. Dibalik Kesuksesan Usaha dan Pekerjaan “Ureung Kaya”

Beberapa orang disebut sukses dalam usaha dan pekerjaan yang dijalannya. Mereka bukan dari kalangan keluarga yang memiliki riwayat pendidikan tinggi. Menurut penuturan dan pengamatan, keberhasilan mereka lebih disebabkan keuletan dan ketelatenan dalam mengelola pendapatan. Terlihat dari wawancara dan pendalaman dari sumber lain bahwa mereka menjadi sedemikian rupa karena ditempa oleh lingkungan pergaulan sosial. Berbagai pengalaman hidup dirangkum sehingga diramu menjadi suatu kiat atau strategi dalam mengelola pendapatan. Secara umum mereka tidak berada dalam satu bidang pekerjaan semata. Dalam bekerja sebagai nelayan, dapat saja mereka melebarkan usaha dengan menanamkan investasi di bidang pertanian. Demikian juga dengan pedagang, dapat saja melebarkan sayap ke bidang pertanian. Sebaliknya, seorang pejabat publik yang berasal dari kalangan politisi tidak kalah semangatnya mengembangkan menanamkan modalnya ke bidang usaha nelayan.

A. Nelayan

Beberapa informan dari kalangan nelayan, memberikan informasi yang tidak berbeda satu sama lain. Nelayan mendapatkan penghasilan dalam keadaan

serba tidak pasti. Kalau sedang beruntung maka nelayan akan membawa pulang pendapatan yang lebih. Sebaliknya, tidak mendapatkan apa-apa selain dari ikan secukupnya untuk konsumsi sendiri atau sekedar untuk belanja kebutuhan rumah tangga satu hari.

Keadaan sulit menjadi berbeda saat diolah penyelesaiannya oleh nelayan yang memiliki pola pikir dinamis. Seperti penuturan beberapa informan yang menunjuk sejumlah nama nelayan yang terbukti menjadi kebanggaan mereka. Menurut pengakuan beberapa nelayan sukses, mereka telah terbiasa bekerja keras dan berkreasi sejak remaja. Pengalaman berusaha dan bekerja dengan menggunakan strategi membuat mereka tidak saja bekerja untuk menghabiskan dalam bentuk konsumtif jangka pendek. Terdapat beberapa variasi strategi pengelolaan dana. Namun pada dasarnya, akumulasi dana simpanan dipergunakan untuk bidang usaha yang berbeda. Seperti penuturan berikut :

“saya mulai terbiasa bekerja mencari uang sejak remaja. Saat itu saya masih di Krueng Mane. Sebagian dari abang saya melaut. Saya tidak mau, saya malah berjualan kacang di stasiun kereta api. Sedikit dari pendapatan itu, saya tabung. Lalu ada orang yang meminta pinjaman uang dari saya dengan jaminan sepetak sawahnya dan meminta pada saya untuk tetap dirinya yang garap..ya saya setuju saja dengan ketentuan hasilnya nanti dibagi dua”

(Nelayan, 57 tahun, wawancara tanggal 9 Maret 2011)

Informan ini, mengungkapkan hingga hari pun saat ia telah memiliki dua orang anak yang menjadi sarjana dan beberapa lainnya mengikuti jejaknya di bidang usaha perikanan laut. Kebiasaan itu tetap berjalan, melalui dana simpanan yang diatur sedemikian rupa membuat dirinya menjadi tempat bagi kalangan petani menggadaikan lahan sawah. Meskipun selanjutnya pemilik sawah dapat saja mengelola sawahnya dengan perjanjian tertentu berupa persentase bagih hasil pertanian. Keadaan gadai ini, sering kali berakhir dengan beralihnya lahan sawah menjadi miliknya. Menurut hasil wawancara dan pengamatan, saat ini terlihat nelayan sukses tersebut telah mengalihkan penggunaan lahan menjadi kavling bangunan yang diperuntukkan untuk sarang walet. Posisi tanah yang menghadap lautan selat malaka, berbatasan dengan jalan desa dan berada dalam lingkungan hamparan sawah serta pertambakan merupakan area yang disukai burung walet.

Dari aktifitas usaha ini membuat nelayan sukses ini dapat meraih dana hingga Rp.20.000.000,00 per bulannya. Pengalaman di bidang usaha walet ini, diawali oleh pengalaman tak sengaja yang diperolehnya saat membeli satu unit bangunan rumah tinggal di tepi krueng Meureudu. Burung walet menempati lantai dua rumah tersebut, yang kemudian mendorongnya membangun tempat khusus untuk tempat walet bersarang hingga dapat diambil air liurnya yang bernilai jual tinggi tersebut. Di luar itu, nelayan sukses ini masih memiliki dua unit kapal penangkap ikan jenis *pukat langga*.

Salah satu dari nelayan sukses lainnya yang tidak kalah terkenalnya mengaku telah terbiasa mandiri sejak remaja. Bahkan di saat masih sekolah SMP ia meminta pinjam uang pada ayahnya untuk menyewa lahan tambak. Meskipun sempat diragukan oleh orang tuanya, tapi ia mampu membalikkkan keadaan dengan keberhasilannya mengembalikan uang pinjaman. Bahkan dari rintisan usahanya ini ia berhasil membelikan sepeda motor yang dipergunakannya untuk kelancaran mobilitasnya. Mobilitasnya yang tinggi untuk mengawasi lahan tambaknya membuatnya berpikir cepat untuk menutup kelemahannya di bidang sekolah dengan membina hubungan yang baik dengan guru kelas SMA nya. Hasilnya ia dapat memperoleh ijazah dan status pelajar mandiri dengan kepemilikan aset tertinggi di antara rekan-rekannya

Keadaan itu tidak berubah hingga kini. Nelayan sukses tersebut menggunakan akumulasi simpanan pendapatannya untuk diinvestasikan kembali membeli beberapa ruko dan menyewa lahan tambak. Perkiraanannya tidak meleset, harga ruko semakin semakin tinggi. Sembari menunggu waktu berjalan hingga mendapat harga jual yang pantas, maka ruko disewakan kepada pihak lainnya. Tidak cukup sampai keadaan itu, salah satu ruko yang dipergunakan untuk tempat usaha menjual alat-alat perlengkapan pendukung kapal penangkap ikan di salah satu ruko di TPI Meureudu. Disamping itu, beberapa kapal penangkap ikan jenis *lingga* yang dimilikinya termasuk dari sedikit kapal penangkap ikan yang tinggi intensitas melautnya.

Disamping itu, ia memiliki beberapa "*tuah*". Sebuah sebutan masyarakat setempat untuk menunjuk sebuah alat kerja penunjang penangkapan ikan. *Tuah*

lebih merupakan alat pemancing ikan untuk berkumpul di suatu tempat ditengah laut. Nelayan mengetahui kebiasaan ikan yang sering bergerombol di bawah gelondongan kayu besar yang mengapung di laut. Hal itu mengilhami nelayan dengan membuat sedemikian rupa sebuah ikatan besar tangkai daun kelapa yang dilengkapi dengan kumpulan daun-daunan. *Tuah* itu dibuat terapung di laut, supaya tak bergeser terbawa arus maka diberikan pemberat berbahan beton semen yang dibentuk dari *drum* minyak. Dari *buah* ini ia dapat memperoleh pendapatan *sharing* dari setiap nelayan yang menangkap ikan dari *buah* miliknya.

Semangat dan kreatifitas untuk dapat memperoleh kemajuan lebih besar terlihat dari sudah terdeteksi dengan rencananya membangun gudang pengawetan ikan berteknologi tinggi. Untuk menuju ke tahap ini, dirasakan sulit. Namun, permainan harga ikan yang dilakukan oleh Pengusaha Cina di Medan serta jatuhnya harga ikan saat tangkapan berlimpah telah menggiring pemikiran untuk secepatnya merealisasikan pembuatan gudang pengawetan ikan berukuran sederhana di tempat ini.

Nelayan sukses lainnya yang terkenal lainnya, mengaku menginvestasikan simpanan pendapatannya untuk berkongsi membeli kapal penangkap ikan *mesin tempel 42*. Pendapatan itu kemudian dikembangkan melalui usaha pertambakan udang dengan sistem kongsi dan usaha lain berupa jual beli bahan bakar minyak bagi keperluan kapal penangkap ikan. Dalam usahanya itu, nelayan meraup kesuksesan. Meskipun diakuinya, akhir-akhir tangkapan ikan tidak sebaik beberapa waktu silam.

Hal-hal yang dikemukakan oleh beberapa orang nelayan sukses di kampung ini mengarah pada cara berpikir dan penerapan pola pengelolaan keuangan yang hampir mirip. Mereka sadar akan kekurangan pola hidup masyarakat nelayan yang semua kebutuhan hidup harus dibeli kecuali ikan. Mensiasati keadaan itu, nelayan yang sukses melakukan pemisahan pendapatan secara ketat. Setiap mendapatkan hasil yang baik, selalu dipisahkan untuk membeli emas. Selanjutnya mereka tidak berdiam diri menghabiskan pendapatan yang ada. Sisa dari dana yang dipergunakan bagi kebutuhan operasional rumah

tangga, pendidikan serta kesehatan maka langsung disisihkan hingga secara perlahan mereka memiliki simpanan berbentuk emas perhiasan.

Dalam suatu keadaan, bisa saja terdapat kerabat atau kenalan yang membutuhkan dana maka sudah pasti yang dicari adalah siapa diantara mereka diduga memiliki simpanan emas. Dalam keadaan ini, seperti pengakuan salah seorang informan bahwa permintaan pinjam emas dengan sistem gadai sawah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Meureudu. Pada awalnya tidak serta merta diakui bahwa mereka memiliki simpanan emas. Negosiasi terjadi atas jumlah emas dengan satuan manyam. Terkadang, bila memungkinkan nelayan sukses malah memberikan pinjaman emas dengan jumlah di atas yang diminta. Strategi ini bila bersambut maka menjadi pintu masuk bagi nelayan sukses mendapat tanah untuk dikelola dalam waktu lama. Bahkan dapat saja karena ketidakmampuan mengembalikan, si petani pada akhirnya akan melepas tanah itu kepada nelayan sukses dengan meminta tambahan emas sesuai kesepakatan.

Mereka mengaku, mempelajari keadaan ini dari kehidupan para nelayan sebelumnya. Karena pada diri masyarakat nelayan telah melekat stigma royal, malas melaut bila simpanan dana masih tersedia dan terkadang terlibat dalam kegiatan mencari hiburan yang kadang-kadang justru menguras uang yang diperoleh dari hasil melaut. Secara perlahan Meskipun dirinya sukses dengan tidak berbekal pendidikan tinggi, namun sebagian besar dari mereka justru memperlihatkan keinginan dan kemauan tinggi agar anak-anaknya melanjutkan pendidikan hingga jenjang kesarjanaaan. Kebanyakan dari mereka melanjutkan pendidikan tinggi terbatas pada bidang pendidikan yang telah nyata dilihat kepastian lapangan kerja. Diantaranya yang paling menonjol adalah bidang kesehatan dan bidang kependidikan atau guru.

B. Petani

Sulit menemukan masyarakat yang sukses dengan mata pencaharian tunggal sebagai petani sawah. Bilapun terdapat satu nama yang disebut petani sukses maka lebih tepat dikatakan bahwa keberhasilannya terlihat dari

kemampuannya menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang pendidikan sarjana. Namun dari penuturannya, ia turut berdagang untuk dapat memenuhi beragam kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya. Tempat usaha dagangnya juga tak bertahan lama, sehingga usaha tersebut dialihkan kepada anaknya.

Pola perolehan pendapatan yang mengikuti musim panen yang tidak berlangsung rutin setiap bulan maka memaksa masyarakat yang bekerja sebagai petani sawahya menghabiskan simpanan pendapatannya untuk konsumsi dan belanja rumah tangga. Beberapa nama lain yang mencuat sebagai petani sukses, memiliki pekerjaan lain semisal pegawai negeri dan pengusaha kedai kopi. Sehingga pekerjaan tani sawah, lebih bersifat pelengkap dari pekerjaan utamanya sebagai pegawai negeri atau pengusaha.

Sistem kerja pertanian sawah yang menunjukkan tradisi upahan memungkinkan seseorang yang berprofesi sebagai pegawai negeri atau pengusaha dapat mengelola sawahnya tanpa harus terlibat langsung dalam semua tahapan. Saat penelitian ini berlangsung, diperoleh sebuah keadaan bahwa dari tahap membajak, menebar benih hingga memanen sudah tersedia orang-orang yang dikenal menerima pekerjaan upahan. Bagi petani upahan itu sendiri, sistem ini memberi kenyamanan karena mereka dapat langsung menikmati uang untuk keperluan belanja rumah tangganya. Petani yang bekerja upahan ini terdiri dari kaum pria dan wanita yang kebanyakan berusia muda.

Pada saat penelitian berlangsung, kebetulan petani setempat merasakan “*pade troh asoe*”, maka itu merupakan keuntungan bagi petani pemilik yang memiliki profesi lainnya. Terlihat dirumah-rumah yang sedianya bukan rumah petani telah menumpuk karung-karung padi. Mereka memilih membawa pulang gabah daripada menjualnya langsung pada pihak yang siap menampung pembelian gabah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan keuangan yang mengharuskan untuk sesegera mungkin menguangkan gabah yang baru dipanen. Mereka menyimpan gabah atau menggilingnya menjadi beras

sehingga tiba waktunya harga beras atau gabah membaik. Harga gabah atau beras biasanya membaik setelah musim panen terlewatkan.



Gambar 6.5. Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan memanen padi di sawah Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya

Bersamaan dengan itu, terdapat masyarakat yang menseiasati rendahnya pendapatan petani sawah. Seorang pensiunan yang sejak masih aktif sebagai pegawai negeri telah terbiasa bekerja sampingan sebagai petani dan sekaligus dikenal keahliannya dalam usaha pembuatan *nasi lemak*. Petani yang bekerja dengan mengandalkan lahan sewa milik gampong, mencoba merubah kebiasaan menaman yang lazim berlangsung di Meunasah Balek. Terobosan yang dilakukannya menrapkan pengetahuan pertanian yang dibacanya, yakni melakukan variasi komoditas jenis tanaman yang diusahakan secara tanam “selang seling”. Secara bergantian ia menanam cabai dan timun, pada saat yang lain telah dua kali panen tanaman padi maka pada musim berikutnya komoditi tanaman padi yang dikerjakannya. Pola ini terbukti mampu memberikan keuntungan yang nyata, selain keuntungan lain yang diperolehnya yakni

tertekannya aktifitas pengadaan pupuk bagi tanaman padi. Pemupukan yang dilakukan untuk tanaman cabe atau timun tetap bertahan di dalam kandungan tanah. Kandungan ini berguna untuk kebutuhan tanaman padi.



Gambar 6.6. Aktifitas masyarakat yang kreatif dengan tanaman sela non padi di sawah Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya

Pola tanam seperti ini, tidak membuat masyarakat serta merta turut mengikutinya. Meskipun ia telah mengajak para petani lainnya yang letaknya petak sawahnya memungkinkan untuk komoditas serupa. Mengingat lahan sawah di area ini, semakin ke selatan semakin terpengaruh serapan air asin yang pada pasang besar dapat melesak jauh ke daratan. Dengan usaha tanam ini, telah terbantu tiga orang masyarakat lainnya untuk bekerja secara rutin. Menurut penuturannya saat dijumpai di lokasi tempatnya bekerja, mereka telah bertahun-tahun bekerja seperti ini dan pengalamannya menjadi andalan bagi petani pengelola sawah sistem “selang seling”.

Tuntutan pemahaman dan penguasaan kemampuan teknis yang tinggi terhadap tata cara penanaman komoditas cabe, membuat masyarakat menghindari budidaya tanaman ini.

C. Petani Tambak

Meskipun area petambakan terlihat mendominasi salah satu sudut gampong Meunasah Balek, namun aktifitas petani tambak yang serius bekerja di bidang usaha hampir dapat dikatakan hanya tersisa beberapa orang. Yang menonjol dari mereka adalah Haji Rusli, seorang petani yang tambak yang konsisten mengelola pertambakan dari sejak harga jual ikan sedang tinggi-tingginya. Dari pengamatan dan penuturannya, tampak pengalaman, keteguhan dan keseriusannya membuatnya bertahan di bidang usaha ini meskipun yang lain mengalihkan pekerjaannya ke bidang lain. Usaha pertambakan mulai berjatuh sejak terjadi perubahan keadaan kimiawi air. Hal itu bermula sejak area pertambakan sekitar kawasan ini dilewati gelombang banjir laut tsunami. Sebagian masyarakat menyebut penyakit yang membunuh benih udang dengan sebutan *virus*.

Pengusaha tambak di kawasan ini sempat menikmati masa keemasan, saat harga udang windu sedang tinggi-tingginya pada akhir tahun 1990 an dan awal tahun 2000 an. Pada masa itu, hama nyaris tak mengganggu usaha pertambakan budi daya udang intensif. Petani tambak dengan mendapatkan pendapatan dengan mengirim udang produksi lahannya ke tauke cina di Medan dan mendapatkan pembayaran tinggi sesuai dengan kualitas udangnya. Meskipun terkadang, mereka sadar menjadi permainan *tauke Cina* di Belawan saat posisi penentuan kualitas udang dilakukan secara sepihak. Kemudahan pendapatan petani tambak saat itu, diungkapkan bahwa dengan hanya sekali panen seorang pekerja yang hanya bertugas menjaga pertambakan dapat dengan mudah membawa pulang kendaraan bermotor honda supra dari dealer terdekat.

Sebagaimana dituturkan petani tambak ini, bahwa primadona saat ini adalah jenis ikan kerapu. Jenis kerapu tidak mengalami kendala pembudidayaannya dengan kondisi air seperti saat ini. Beberapa jenis kerapu sedang mengalami harga terbaik akibat kebutuhan dan permintaan yang tinggi di luar negeri. Sayangnya ikan ini, Namun Kondisi air saat ini maPertambakan usaha kerapu yang Beberapa petak tambaknya terlihat masih menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya aktif merawat dan membesarkan bibit ikan di dalam petak-petak

tambaknya. Sebagian petak tambak lainnya terlihat tak terurus maksimal, meskipun terdapat usaha menanamkan bibit ikan ke dalamnya dengan perawatan sekedar saja.



Gambar 6.7. Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan petani tambak di Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

D. Pedagang dan Pengusaha Industri Rumah Tangga

Meskipun masyarakat Gampong Meunasah Balek dikenal sebagai tempat bermukimnya kebanyakan kaum pedagang dan pengusaha. Namun, saat ini mendapatkan pengusaha atau pedagang sukses tidak semudah mendapatkannya limabelas atau duapuluh tahun silam. Iklim usaha perdagangan telah berubah. Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan baru seperti Bireuen, Ulee Glee dan Beureuen telah menarik perhatian masyarakat pembeli kebutuhan pakaian dan keperluan barang-barang kelontong lainnya untuk berbelanja di tempat-tempat tersebut. Disamping alasan lebih dekat jarak tempuhnya, dapat saja karena alasan harga bersaing serta ketersediaan alternatif pilihan yang lebih banyak.

Situasi rawan keamanan yang berlangsung sebelumnya juga menggiring masyarakat untuk mengurangi pergerakan atau mobilitasnya, termasuk untuk urusan belanja. Mereka memilih solusi aman, barang kebutuhan dapat diperoleh

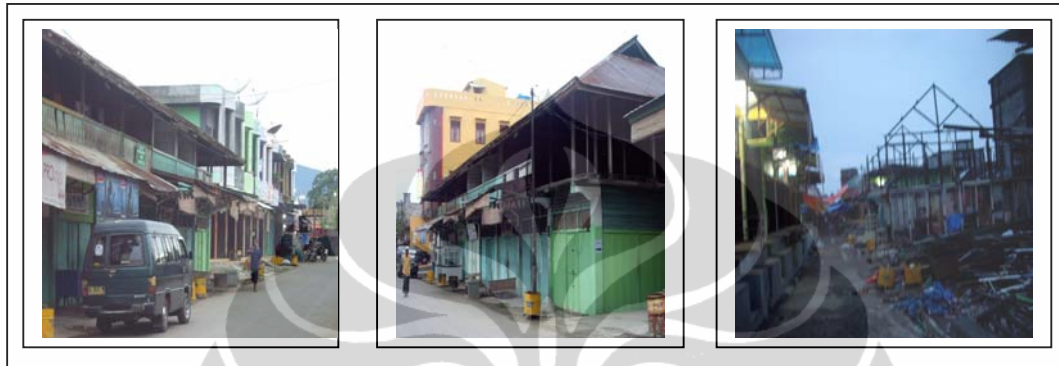
namun mereka dapat segera kembali ke rumah. Masyarakat setempat mengaku khawatir bila dalam perjalanan mobilitasnya yang tidak penting malah terjebak kontak peperangan tentara dan gerilyawan GAM. Disisi lain keadaan itu, membuat masyarakat menahan diri untuk untuk berbelanja. Karena bila teridentifikasi memiliki banyak uang maka akan menjadi sasaran pemungutan *pajak nanggroe* oleh orang tak dikenal atau dapat saja orang yang telah dikenal sebelumnya. *Pajak nanggroe* merupakan sebutan masyarakat setempat untuk praktik pemungutan dana pendukung perjuangan gerilyawan GAM. Dana yang dipungut tidak tetap besarnya, tergantung tingkat kekayaan dari orang yang dipungut dan dipengaruhi oleh negosiasi dengan pihak pemungut.

Rendahnya pergerakan lalu lintas masyarakat pembeli menuju keude Meureudu sebagai titik keramaian pasar yang menonjol di tahun 1980 an dan pertengahan 1990 an terlihat nyata menurun secara perlahan. Penurunan jumlah penumpang angkutan umum semacam angkot yang melayani trayek Meureudu-Ulee Glee dan trayek Meureudu-Beurueneun-Sigli pada akhirnya membuat pengusaha angkutan menutup mati trayek ini. Saat penelitian ini berlangsung, pergerakan penduduk yang tidak memiliki angkutan pribadi, hanya dapat mengandalkan jasa ojek atau dengan istilah masyarakat setempat disebut RBT yang disingkat dari “Rakyat Banting Tulang”.

Walaupun demikian, situasi *keude* Meureudu tetap hidup dengan keadaan apa adanya. Peremajaan pertokoan yang berlangsung cepat lebih merupakan tuntutan otoritas lokal untuk mempercepat perubahan wajah kota kabupaten pemekaran ini agar tampak lebih moderen. Pertokoan kayu dirubuhkan dan diganti dengan pertokoan berbahan beton. Beberapa pengusaha yang ditemui justru merasa tertekan praktek pembongkaran pertokoan lama, apalagi pembongkaran itu diperkirakan akan berlangsung hingga memasuki bulan ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Sebuah masa yang biasanya pedagang justru mendapat peningkatan transaksi jual beli karena meingkatkan kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kebijakan otoritas lokal membuat pedagang kehilangan momentum puncak perdagangan tahun ini. Disisi lain, kesulitan akibat menurunnya jumlah

transaksi jual beli semakin bertambah karena membengkaknya harga sewa yang terjadi setelah pembentukan kabupaten baru. Kesulitan berikutnya adalah harga sewa toko jauh lebih tinggi setelah peremajaan berlangsung.



Gambar 6.8. Peremajaan Pertokoan yang merubuhkan pertokoan lama berbahan kayu. Kebijakan ini melambungkan biaya sewa yang harus ditanggung pedagang di saat transaksi dagang menurun.

Seorang informan yang menjalankan usaha kedai kopi ternama di era tahun 1980an dan 1990an, menyebutkan bahwa gairah yang berlebihan dalam menyambut pemekaran kabupaten dan penetapan Meureudu menjadi ibukotanya telah membuat situasi usaha semakin memburuk. Keude Meureudu hanya ramai di jam-jam kerja, setelah itu para pegawai yang sebagian besar adalah pegawai alihan dari kabupaten Pidie tentu akan kembali ke tempat dimana ia bertempat tinggal. Baik di Sigli, Beureunuen atau tempat lainnya. Para pegawai tersebut tidak menetap di Meureudu, sehingga aktifitas jual beli barang-barang kebutuhan pokok hanya dilakukan oleh masyarakat yang memang dari dulunya sudah menetap di Meureudu.

Menurut pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan, diantara pedagang yang menonjol kesuksesannya saat ini adalah pedagang toko obat yang mengembangkan usahanya juga dibidang penyediaan air isi ulang. Dari penuturannya dan pengakuan masyarakat lainnya diketahui bahwa rintisan usahanya telah dimulai sejak lama dan bidang usaha menjangkau jasa angkutan umum L-300. Sebuah moda transportasi antar kota berpenumpang 10 orang.

Usahanya itu pada akhirnya menemui kebangkrutan. Usaha selanjutnya dengan dibantu bekal pengalaman salah satu anggota keluarganya adalah di bidang obat-obatan. Toko obat berizin yang dikelolanya terlihat ramai dikunjungi. Ketrampilannya dalam berbicara dan membangun kepercayaan pembeli atas obat yang diramu atau obat yang dipilihnya telah membuat usahanya meninggalkan usaha sejenis di *keude* Meuredu.

Diluar itu, pengusaha lain yang saat ini terlihat berhasil mencetak kesuksesan adalah masyarakat yang berkerja sebagai pengusaha komoditas kuliner dan jajanan makanan lokal. Permintaan yang sangat tinggi, bahkan diakui permintaan pada hari-hari di penghujung pekan membuat mereka tidak sanggup memenuhi permintaan. Hal itu dialami pengusaha gerobak “*mie caluk*” dan pengusaha “*kue adee*”. Dari produksi dan penjualannya mereka dapat membeli banyak tanah dan membangun rumah yang tergolong besar.

1) Pengusaha *Kue Adee*

Salah satu pengusaha industri rumah tangga pembuatan *kue adee* yang menonjol adalah seorang guru yang sempat menjabat kepala sekolah beberapa tahun silam. Industri ini dikelola bersama istrinya, bahkan merek kue pun menggunakan label nama istrinya yakni *Adee Meutia*. Menurut penuturannya usaha pembautan kue adee telah dirintis oleh keluarga secara turun temurun. Pada awalnya produksinya dilakukan sederhana karena mengikuti pesanan tetangga dan kenalan dari kampung lain. Kebanyakan dari mereka yang memesan *kue adee* diperuntukkan untuk dibawa ke acara hajatan atau oleh-oleh saat berkunjung.

Saat ini permintaan *kue adee* dari dapur pabrik miliknya yang mengambil lokasi sebelah rumah kediamannya, mampu memproduksi hingga 400 *loyang* hari. Pada awalnya gagasan itu muncul karena mencoba meniru sistem pengemasan dan strategi penjualan kue bingkang yang terkenal sebagai oleh-oleh khas Medan. Metode itu telah dijalankan sekitar tujuh tahun yang lalu dan menuai hasil semakin hari semakin membaik. Rasa *kue adee* yang lezat, aroma yang menarik dan ditambah pengemasan *kue adee* dalam balutan kotak yang dicetak khusus dengan label dan gambar menarik serta di dukung tempat penjualan yang mudah

diakses masyarakat pengguna jalan negara Medan-Banda Aceh membuat kue jenis ini dengan cepat dikenal luas sebagai oleh-oleh khas Meureudu.



Gambar 6.9. Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirasusaha *kue adee* di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

Pertokoan “*babah jurong*” atau simpang empat Meureudu yang merupakan persilangan jalan negara dengan akses menuju keude Meureudu, menjadi pilihan bagi tempat penjualan industri rumah tangga *kue adee*. Keude Meureudu yang terletak menjorok ke dalam dalam formasi huruf “U” membuatnya hanya dapat dilewati atau didatangi oleh masyarakat yang dengan sengaja bertujuan ke keude Meureudu. Keadaan ini membuat keude Meureudu menjadi tempat yang harus memiliki sesuatu yang membedakannya dengan tempat-tempat lain agar dapat menarik perhatian masyarakat luar Meureudu. Hal ini berbeda dengan Ulee Glee atau Beureunuen.

Melihat tingginya permintaan *kue adee*, mendorong masyarakat di meunasah Balek dan meunasah Meuraxa mengikuti jejak usaha *Adee Meutia*. Uniknya, mereka yang membangun usaha yang sama adalah mereka yang pernah bekerja di dapur unit usaha label Meutia Adee. Pemilik label Meutia Adee justru mendorong mereka untuk mandiri dengan membuka membuka usahanya sendiri bila dana memungkinkan. Pekerja yang hari ini berada di dapur industri kue adee adalah mereka yang menjadi tetangga-tetangganya yang dirasa kurang mampu. Mereka berjumlah delapan orang itu dibayar langsung setiap hari pada penghujung jam kerja dengan perhitungan setiap loyang mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000,00. Melihat jumlah permintaan, pemilik usaha *kue adee* yang berkeinginan memperluas area dapur pabrik pembuatan kue terganjal dengan tidak tersedianya tempat di area pekarangan rumahnya. Diturunkan, sempat beberapa diusahakan untuk membeli atau menyewa sekitar lima meter kepada pemilik tanah sawah yang berbatasan dengan pabriknya. Namun terganjal karena ketidaksetujuan pemilik tanah tersebut.

Industri *kue adee* yang menggunakan bahan bakar *tapeuh* yakni sabut kelapa kering, sempat disinyalir asapnya mengganggu tetangga sekitar. Asap yang ditimbulkan oleh pembakaran tapeh dikenal mampu membuat mata perih. Namun, hal itu justru disanggah oleh pemilik usaha dan tetangga yang sekaligus menjadi pekerja pada delapan tungku dapur industri kue adee. Para tetangga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan lain selain dari bekerja di dapur *kue adee* mengatakan justru bila tidak ada pabrik kue adee ini mata mereka perih dengan air mata. Mereka mengaku, dengan hasil bekerja yang langsung dibayar harian. Mereka bekerja lebih semangat dan mengejar target harian. Melalui pendapatan tersebut mereka dapat membayar biaya sekolah anak-anak mereka. Pemilik usaha yang sekaligus guru terlihat sigap dalam memotivasi dan memberi contoh kepada masyarakat sekeliling untuk bekerja keras. Diturunkan oleh masyarakat sekitar, tak jarang kendaraan avanzanya digunakan untuk menjemput bahan bakar *tapeuh* kering dari beberapa tempat. Bahkan anak-anak, tanpa bisa dilarang turut membantu menurunkan bahan bakar tapeuh yang dibawa ke pabrik industri kue adee. Biasanya pemilik usaha mengakui membayar sekadar keperluan anak-anak,

dengan maksud memotivasi anak-anak bahwa setiap ada usaha bekerja maka akan memperoleh pendapatan.



Gambar 6.10. Usaha kue *adee* mendorong Petani tambak dengan kreatifitasnya mengolah lahan kosong di sekitar pantai untuk usaha pertanian tanaman singkong. Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupatean Pidie Jaya

Uniknya keberhasilannya dalam meraih kesuksesan di bidang ini tidak membuatnya membangun rumah atau membeli mobil seperti umumnya masyarakat setempat yang menunjukkan keberhasilan usaha bekerjanya melalui simbol-simbol status sosial masyarakat elit. Menurut penuturan masyarakat yang mengenalnya. Setelah sukses membangun usaha, pemilik usaha ini menanamkan investasi di bidang properti seperti membeli tanah atau bangunan yang berguna. Sikap tidak latah dan penuh kehatian-hatian dalam pengelolaan pendapatan seperti tidak terlepas dari pengalaman usaha yang dijalankan oleh pengusaha *kue adee* Meutia. Menurut penuturannya, beberapa bidang usaha sebelum ini sudah pernah dijalaninya. Seperti pengalaman pahit yang dialami saat mengusahakan sebuah angkutan pengangkut pasir dan tanah uruk. Diakuinya bidang usaha ini tidak memberi hasil lebih dari apa yang menjadi standar perolehan harian. Walaupun pengeluaran untuk biaya perawatan angkutan telah diakalnya dengan kemampuan sendiri yang sebenarnya tidak ada keahliannya di bidang mesin kendaraan.

Perkembangan industri ini yang demikian cepat telah menjadi perhatian pihak pemerintah, sehingga kepada mereka diberi bantuan peralatan penunjang, seperti mesin peras santan kelapa. Keadaan ini dapat terjadi karena komunikasi yang dibangun oleh pemilik usaha label *Adee Mutia* dengan pejabat pemerintah kementerian terkait. Usaha ini telah pula mendorong peningkatan permintaan singkong sebagai salah satu bahan baku pembuatan kue adee. Diakui oleh beberapa penduduk sekitar yang turut menyuplai singkong, disebutkan mereka merasa senang dengan adanya peluang usaha tanaman singkong. Singkong ditanam ditempat lain dan sebelum masa panen telah lebih dahulu dipesan oleh beberapa pengusaha industri *kue adee* yang berada di Meunasah Balek dan Meunasah Meuraksa.

Bahkan salah seorang nelayan tambak, terdorong untuk berkreasi mengusahakan tanaman singkong di area yang tak jauh dari bibir pantai. Usahanya ini sempat ditertawakan oleh sebagian kenalannya karena sebelumnya tidak ada yang mencoba mengolah sama sekali untuk budidaya tanaman singkong.

“saya sempat merasa dicemooh oleh sebagian kawan, mereka menertawakan saya yang merapikan dan mengolah tanah berpasir ini..akhirnya setelah saya berhasil memanen singkong dan mereka lihat lahan saya, tahu-tahu mereka juga mengkapling tanah pasir di sekitar tempat saya ini”

(Petani tambak, 50 tahun, wawancara Maret 2011)

2) Pengusaha *Mie Caluk*

Pengusaha lainnya yang diakui sukses dalam usahanya bekerja adalah pengusaha kuliner berbahan utama berupa mie basah. Setidaknya terdapat dua pengusaha mie dikenal fenomenal bekerja berdagang *mie caluk*, makanan ini dapat disebut kreasi lain dari pengusaha setempat untuk membedakannya dengan mie aceh. Pada awalnya *mie caluk* menysasar para pelajar di sekolah-sekolah, terutama pada saat mereka mencari jajanan pada jam-jam istirahat sekolah. Dibungkus dengan dengan daun pisang dalam ukuran kemasan relatif kecil, dengan tujuan agar daya beli pelajar.

Kedua masyarakat yang sukses berusaha di bidang dagang kuliner ini, menurut penuturan masyarakat yang mengenalnya dan dari hasil wawancara

diakui memiliki pengalaman bekerja yang tak mudah menyerah pada keadaan. Pengusaha mie dengan label “mie lapangan” misalnya, sempat merasakan pengalaman berjualan keliling mie caluk dengan sepedanya. Berjualan dari lokasi yang biasanya ramai oleh anak-anak. Mengamati peluang yang lebih menjanjikan di tempat biasanya masyarakat bersantai di waktu sore, maka maka diputuskan untuk menempatkan gerobak dorongnya secara rutin berjualan di salah satu sudut lapangan sepakbola Meureudu. Dengan pendapatannya yang meningkat, pedagang satu ini mampu membeli tanah dan membangun rumah permanen di atasnya. Memiliki rumah sedemikian, dengan pekerjaan sebagai pedagang mie caluk mengandalkan gerobak dorong telah dipandang fenomenal oleh masyarakat setempat.

Pengusaha kuliner mie lainnya, mengkombinasikan barang dagangannya dengan menu lainnya seperti *kanji* dan miehun. Tempat berdagangnya terpola tiga waktu dan tiga tempat yang berbeda. Pada pagi hari sekitar jam 06.00 WIB hingga 07.00 WIB mengambil tempat di depan rumahnya. Posisi rumahnya yang berhadapan dengan jalan gampong memungkinkan masyarakat pembeli dengan mudah menjangkaunya. Mulai jam 09.00 hingga 12.00 WIB berjualan di sekolah Madrasah Aliyah yang berdekatan dengan mesjid Meureudu. Sedangkan mulai jam 14.00 WIB gerobaknya diisi muatan untuk mulai didorong ke salah satu sudut jalan keude Meureudu.

Menurut penuturannya, mie yang diolahnya sendiri dengan ramuan dapurnya sedang diminati oleh masyarakat Meureudu dan sekitarnya. Keadaan ini tidak serta merta menjadi begini, namun melalui sebuah tahapan yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Beberapa pedagang kuliner lain, yang sempat membuka dagangan di sebelahnya hanya bertahan berjualan sekitar 2 minggu. Disaat sepi pembeli di awal masa usahanya dibuka maka diputuskan untuk berhenti. Nasehat dan masukan yang diberikan bahwa untuk jenis pekerjaan di bidang usaha makanan harus berani bertahan sehingga meraih pelanggan, tidak mampu merubah sikap rekannya yang lain tersebut.



Gambar 6.11. Suasana aktifitas masyarakat yang terlibat dalam pekerjaan wirasusaha kuliner *mie caluk* di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kab. Pidie Jaya

Pengusaha ini terlihat gesit, dan dari usahanya telah berhasil membangun rumah permanen dua lantai. Di rumah ini pula semua proses memasak berlangsung. Menurut pengamatan peneliti, tidak disediakan ruang khusus sebagai dapur bagi usaha dagangnya. Semua berlangsung sebagaimana biasanya. Sejak subuh, di saat suasana masih sepi dan gelap. Namun, di bagian tengah rumahnya telah sibuk dengan aktifitas bekerja mempersiapkan barang dagangan. Cahaya kompor menyala terlihat dari jendela yang berhadapan dengan bagian lorong gampong yang menuju meunasah.

E. Pegawai Negeri dan Pejabat Publik

Masyarakat gampong meunasaha Balek, tidak selalu menjalankan pekerjaannya secara tunggal pada profesi pegawai kantor pemerintahan. Terdapatnya kapasitas pengetahuan, wawasan dan didukung oleh ketersediaan manajemen waktu serta dana yang memadai secara alamiah mendorong masyarakat yang berprofesi pegawai turut terlibat dalam penguasaan aset di bidang usaha lainnya.

Seperti yang dituturkan oleh masyarakat bahwa salah seorang politis lokal yang sedang mengemban jabatan publik, dengan kemampuan modalnya turut memiliki satu unit kapal penangkap ikan jenis *pukat langga*. Kapal penangkap ikan yang dimilikinya merupakan kapal bekas milik nelayan Thailand yang dilelang oleh pemerintah lokal setelah selesai proses hukum karena melewati batas perairan Indonesia. Beberapa pegawai negeri yang menduduki jabatan publik strategis bertempat tinggal di gampong ini. Dari pengamatan, terlihat memiliki simbol-simbol sukses yang melekat pada dirinya saat ini. Seperti rumah beton permanen dua lantai dengan model moderen minimalis atau model mideterania, memiliki kendaraan roda empat. Kepemilikan simbol-simbol kesuksesan dalam meraih pendapatan pada diri pegawai negeri tampaknya tidak meraih apresiasi dari masyarakat sekitar.

Masyarakat menganggap pegawai negeri atau pejabat publik memiliki akses kekuasaan untuk mengatur sedemikian rupa berbagai proyek-proyek pengadaan barang pemerintah atau proyek pembangunan fisik lainnya, sehingga memberi keuntungan bagi peningkatan pendapatannya di luar gaji yang diperoleh. Kritik masyarakat gampong ini terhadap kebijakan pemerintah setempat, sering dialamatkan kepada pejabat-pejabat yang berdomisili di sekitar mereka.

Tabel 6.2.
Ikhtisar Strategi Aktor Menjadi *Ureung Kaya*
dalam Struktur Sosial Masyarakat Pidie

	Bidang Pekerjaan			
	Petani	Nelayan	Pedagang/ Wirausahawan	Pegawai/Pejabat Pemerintah
Pola pengelolaan pendapatan	Tidak ada	Ketat, memisahkan sumber uang untuk dipakai konsumsi dan dipakai untuk akumulasi modal.	Memisahkan keuntungan dan modal	Pendapatan tersisa sedikit, tapi sumber modal dari kredit bank, atau menggunakan “ <i>commitment fee</i> ” dari kegiatan proyek pemerintah
Kreatifitas	Kurang	Kreatif mencari	Tinggi, membuat terobosan dengan mengemas produk, mendekati posisi produk	Kreatif dalam mencari usaha sampingan.

			pada konsumen dan membangun kepercayaan konsumen	
Aktifitas Ibadah <i>madhah</i>	Rendah	Tinggi, mengekspresikan keberhasilan usahanya secara sosial dengan naik haji. tauke yang telah berhaji ditambalkan kata "haji" pada pemanggilan namanya.	Tinggi, mengekspresikan keberhasilan usahanya secara sosial dengan naik haji.	Tinggi, mengekspresikan ketaatannya dan pengukuhan strata sosialnya
Menyelenggarakan Aktifitas adat	Umumnya rendah	Tinggi, tauke mempertahankan reputasi dan pengukuhan atas strata sosialnya pada jaringan dalam dan luar	Tinggi, mempertahankan reputasi dan pengukuhan atas strata sosialnya	Tinggi, mempertahankan reputasi dan pengukuhan atas strata sosialnya
Upaya Investasi pada <i>human capital</i> (pendidikan anak)	Rendah karena tidak punya biaya dan dirinya sendiri juga tidak berpengetahuan, (kecuali kasus tertentu bila anak memiliki bakat dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan.	Tinggi, <i>tauke</i> /meniru praktek yang dilakukan aktor pedagang/pejabat yang selevel jaringan dengan dirinya. Hal itu dapat dilakukan sejauh ia dapat mengkondisikan anak tidak terbawa kondisi lingkungan kehidupan nelayan.	Rendah, anak terbiasa membantu berdagang sejak dini dan terkondisikan sibuk mencari uang	Tinggi, anak dipersiapkan memasuki dunia kerja dengan bekal pendidikan tinggi.
Ekspansi usaha	Tidak ada	Ke bidang properti, pertanian, perkebunan, ternak atau sarang walet	Ke bidang properti, Pertanian dan perikanan	Pertanian dan perikanan
Pemanfaat waktu luang	Tidak ada	Tinggi, bilapun ada menyisihkan waktu untuk berkumpul di warung kopi untuk tujuan mempertahankan relasi kolegal.	Tinggi	Tinggi, berkumpul di kedai kopi untuk membangun relasi usaha sampingan.
Wujud Simpanan (<i>saving</i>)	Tidak ada	Emas dan uang. uang untuk perputaran jangka pendek	Uang dan emas, uang untuk perputaran pendek dan emas	Uang dan Emas. Uang karena pendapatan diberikan

		dan emas untuk perputaran modal jangka panjang	untuk perputaran jangka panjang	melalui bank, sehingga cenderung sering berhubungan dengan di bank.
--	--	--	---------------------------------	---

6.1.3.2. Dibalik Ketidakberhasilan Usaha dan Pekerjaan “*Ureung Gasien*”

Masyarakat yang tidak meraih kesuksesan dalam rintisan usaha pekerjaannya, tidak selalu karena ketiadaan semangat dan kemauan kerja. Terdapat beberapa diantara mereka yang konsisten dengan aktifitas dan rutinitas pekerjaannya. Ketiadaan tambahan modal, rendahnya kreatifitas serta pola pikir yang tidak terbuka mengakibatkan usaha kerjanya tidak dinamis sehingga tidak berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan.

Terdapat perbedaan pola dan ciri dari kelompok masyarakat yang tidak berimplikasi kesuksesan ini, yakni mereka yang terjebak dalam kebiasaan malas bekerja dan sebagian lainnya adalah mereka yang tidak kunjung melakukan pembaharuan atas bidang pekerjaannya. Kelompok pertama yang disebutkan di atas adalah mereka sebagian masyarakat gampong Meunasah Balek yang berada dalam usia 17 hingga 27 tahun. Kebiasaan menggantungkan hidup pada orang tua dan berada dalam jaringan pergaulan yang tidak terkendali membawa mereka ke dalam jebakan jaringan peredaran obat-obatan terlarang. Sebagian dari masyarakat usia muda ini, tidak memiliki riwayat pendidikan yang memadai. Bahkan diantara mereka cenderung menghentikan sekolah karena terlalu cepat merasakan kemudahan mendapat pencaharian lewat aktifitas jasa bongkar tong di TPI atau menjual ikan yang diturunkan salah satu kerabatnya pemilik kapal penangkap ikan.

A. Nelayan

Beberapa orang nelayan sukses di kampung ini mengemukakan hal yang hampir sama dan menerapkan pola pengelolaan keuangan yang hampir mirip. Secara sosiologis, diungkapkan bahwa masyarakat nelayan cenderung boros dan royal. Mereka juga memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Hal ini disebabkan

karena kerasnya kehidupan di laut. Dapat diresapi dalam ilustrasi betapa mereka bahwa selain dari sekumpulan kayu yang berbentuk kapal yang mereka pijak maka selebihnya adalah adalah lautan maha luas yang tak ada satu manusiapun dapat dimintai tolong sebagaimana di daratan. Keadaan ini yang memaksa mereka untuk harus selalu saling bergantung satu sama lain dan saling bekerja sama mempertahankan hidup. Berada di tengah lautan, dengan situasi perbekalan serba terbatas terkadang membawa sebuah keinginan dan janji pada diri nelayan untuk mendapatkannya saat berada di daratan. Di laut, mereka hanya memiliki ikan. Sedangkan barang kebutuhan pribadi serta kebutuhan keluarga lainnya harus dibeli. Apabila pendapatan yang diraih dari hasil tangkapan memungkinkan untuk belanja pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu maka nelayan tak akan menunggu esok hari untuk merealisasikannya di pasar. Maka tidak heran, bila menyaksikan pemandangan nelayan kembali ke rumahnya dengan menenteng kantong-kantong plastik hingga tak bersisa jarinya menjepit kantong bawaan.

Hal lain yang membuat nelayan cenderung boros dan jauh dari sifat hemat adalah karena adanya suatu anggapan bahwa mereka mendapatkan ikan dilaut cukup hanya berbekal kemauan, pengalaman dan separangkat peralatan alat penangkap ikan. Termasuk di dalamnya, kapal penangkap ikan, pukat serta alat-alat pendukung lainnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa nelayan yang mencari tangkapan ikan dengan melewati sebuah tahapan yang mengorbankan tak sedikit dana, tenaga, waktu dan perasaan sebagaimana dilakukukan petani. Petani sebelum memanen hasilnya, diawali dengan usaha pengadaan bibit, pemeliharaan, perawatan dan pengawasan hingga terjamin tanaman dapat tumbuh berkembang hingga dapat dipanen sebagaimana diharapkan.

Suasana kebatinan itu juga terbawa hingga mereka tiba di daratan. Saat kapal penangkap ikan membongkar muatan hasil tangkapan Pada saat tangkapan tinggi atau mencukupi, kerap kali kerabat atau sahabat yang datang meminta sekedar seekor atau dua ekor dibiarkan saja. Mereka menganggap ikan berlimpah di laut, mereka datang hanya untuk mengambil yang sudah disediakan alam. Kebiasaan lain, adalah membiarkan diri untuk menikmati pendapatan hingga tak bersisa. Setelah itu, mereka bergerak lagi untuk bekerja.

B. Petani

Pendapatan petani dapat dipastikan hanya diperoleh setiap akhir periode bersawah. Dengan kalimat lain tangan petani menyentuh uang pendapatannya pada bulan ke empat dari sejak permulaan kerja. Keadaan ini memaksa petani harus memeras pikiran guna menutupi berbagai kebutuhan biaya hidup dari bulan pertama hingga mencapai bulan ke empat. Situasi semakin sulit apabila dalam panen terakhir hasil diperoleh tidak sesuai harapan, maka dengan sendirinya dana semakin sulit dikelola.

Petani harus berhutang pada tengkulak, atau menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat yang kaya apabila terjadi kesulitan keuangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dan terlebih untuk biaya pendidikan anak atau biaya pengobatan bila dirinya atau salah satu anggota keluarga tertimpa musibah sakit. Sebaliknya, dalam keadaan hasil tani bagus maka petani menjadikan uang simpanannya dalam bentuk emas. Kebiasaan masyarakat setempat tidak menyimpan uang di bank, namun dialihwujudkan menjadi emas. Umumnya, dana simpanan dalam bentuk perhiasan emas perhiasan yang dipegang oleh kaum perempuan. Untuk keadaan tertentu, terkadang dipakai dalam acara-acara sehingga mencitrakan tingginya status sosial. Situasi panen yang baik seringkali berujung pada meningkatnya gairah aktifitas jual beli di *keude* Meureudu, termasuk ramainya para ibu dengan membawa dara remajanya berjejer di etalase toko emas.

Pendapatan petani aktifitas bekerja masyarakat petani di Gampong Meunasah Balek mengikuti periode bersawah yang berlangsung dua kali dalam setahun. Usaha sawah mengandalkan hujan dan aliran air dari *krueng* Meureudu. Biasanya masyarakat setempat bergerak untuk mulai menanam dan memanen dilakukan secara serentak dengan komando *Kejrueu Blang*. Dalam masing-masing periode tersebut, petani terbagi masa bekerjanya dalam tahapan tanam, pemeliharaan, perawatan serta tahapan panen. Puncak aktifitas kerja biasanya

terletak pada tahapan tanam dan tahapan panen. Dalam periode ini, keterlibatan masyarakat turun ke sawah lebih bersifat massal. Mereka akan mengajak seluruh anggota keluarga untuk turut serta mengerjakan pekerjaan itu secara bersama-sama.

Secara spesifik, bagi petani sawah hampir seluruh tahapan dalam usahanya menguras dana, tenaga, waktu dan perhatian. Kehadiran teknologi dan munculnya perhitungan-perhitungan ekonomi yang menyebabkan tidak ada tenaga yang dikeluarkan dengan cuma-cuma, menjadikan petani harus menyediakan dana modal hampir pada semua tahapan. Diantaranya untuk upah bajak dengan mesin dan untuk pembelian pupuk yang seringkali mahal karena sulit ditemukan dipasaran. Tahap panen menjadi tahap yang ditunggu-tunggu oleh petani, karena di tahap inilah petani mendapatkan jerih payahnya berupa pendapatan. Meskipun harga gabah tak selalu dapat membuat petani sawah tersenyum gembira. Satu-satunya hal yang dapat membuat kegembiraan muncul apabila dalam sebuah istilah lokal disebut “*pade jadeh*” atau “*pade troh asoe*”. Istilah yang menunjukkan ungkapan syukur bahwa tanamannya mampu memberikan hasil maksimal. Petani sudah memiliki standar ukuran untuk disebut perolehan maksimal hasil usaha taninya dengan membuat rasio perbandingan antara jumlah berat padi yang diperoleh dengan luas area sawah yang digarap.



Gambar 6.12. Masyarakat bekerja keras dalam panen raya di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

Pada saat penelitian berlangsung, kebetulan petani setempat merasakan “*pade troh asoe*”. Petani terlihat sumringah dalam aktifitas panen raya. Satu dua truk ukuran besar atau dalam istilah masyarakat setempat disebut “*intercooler*”, langsung merapat ke titik terdekat dengan pesawahan. Truk ini dikirim pengusaha Medan untuk menjemput gabah ke sumbernya. Masyarakat tani setempat mengungkapkan lebih senang menjual gabahnya kepada toke Medan karena harga yang lebih kompetitif dan terkadang mereka memberi karung gabah pengganti yang lebih baru.

C. Petani Tambak

Masyarakat petani tambak sebagian besar mendapatkan peluang meraih pendapatan besar dalam periode yang relatif pendek. Menurut pengamatan, saat harga udang sedang membaik mereka dapat meraih keuntungan yang sangat besar. Hal itu didukung oleh ketersediaan tambak dengan kadar air yang cocok. Namun hal tidak berlanjut sebagai sebuah kesinambungan usaha akibat merosotnya harga udang dan diperparah lagi dengan perubahan kadar keasaman air yang berdampak buruk bagi usaha budi daya udang.

Situasi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat yang sebelumnya sempat menjalani aktifitas sebagai petani tambak, meninggalkan usaha tersebut untuk bekerja di sektor lain. Kebanyakan dari petani tambak adalah mereka yang juga menjalani profesi nelayan, sedikit dari mereka yang berkerja di sektor non nelayan. Sesuai dengan latarbelakang kebiasaan masing-masing, tingginya pendapatan yang diraih dalam masa puncak kejayaan usaha budidaya udang cenderung dimanfaatkan untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti kendaraan bermotor atau pakaian. Hal tersebut, sering

menjadi pembicaraan dikalangan para informan yang dulunya sempat merasakan kejayaan usaha ini, disebutkan bahwa saat itu seorang penjaga tambak saja, dapat membelikan motor honda supra seketika setelah panen. Walaupun tak

lama kemudian motor itu dijual kembali untuk kebutuhan menutupi kebutuhan hidup lainnya. Tidak ada strategi pengelolaan pendapatan, menyebabkan sebagian dari petani tambak gagal memanfaatkan momentum tersebut untuk modal kerjanya dibidang lain.

D. Pedagang dan Pengusaha Industri Rumah Tangga

Sebagaimana diungkapkan bahwa Gampong Meunasah Balek adalah tempat bertempat tinggalnya para kaum pedagang dan pengusaha. Keadaan itu tidak berubah hingga kini, meskipun secara jumlah masyarakat yang menjalankan aktifitas kerja sebagai pedagang mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena berubahnya situasi dan keadaan. Pendapatan pedagang mengalami penurunan sesuai yang dituturkan oleh informan keturunan India yang sudah mulai berdagang sejak tahun 1970an. Namun terdapat juga sebagian dari masyarakat Gampong Meunasah Balek justru mendapat peningkatan pendapatannya. Tampaknya terjadi perubahan komoditas primadona, karena yang mengalami peningkatan permintaan dan pada saat yang sama terdapat komoditas mengalami penurunan.

Komoditas kuliner dan jajanan makanan lokal menunjukkan peningkatan permintaan, seperti yang dialami oleh pengusaha gerobak “*mie caluk*” dan pengusaha “*kue adee*”. Dari produksi dan penjualannya mereka dapat membeli banyak tanah dan membangun rumah yang tergolong besar. Sebaliknya terdapat beberapa pedagang lama, malah menutup usaha dagangnya karena merasakan menurunnya pendapatan akibat munculnya sentra-sentra pasar baru di Ulee Glee dan Beurenuen. Keadaan semakin sulit akibat meroketnya harga sewa toko akibat euforia penetapan Meureudu sebagai pusat pemerintahan kabupaten pemekaran yakni Pidie Jaya.

Seorang pengusaha kedai kopi ternama di era tahun 1980an dan 1990an, menyebutkan bahwa gairah yang berlebihan dalam menyambut pemekaran

kabupaten dan penetapan Meureudu menjadi ibukotanya telah membuat situasi usaha semakin memburuk. *Keude* Meureudu hanya ramai di jam-jam kerja, setelah itu para pegawai yang sebagian besar adalah pegawai alihan dari kabupaten Pidie tentu akan kembali ke tempat dimana ia bertempat tinggal. Baik di Sigli, Beureunuen atau tempat lainnya. Para pegawai tersebut masih enggan menetap di Meureudu, sehingga aktifitas jual beli barang-barang kebutuhan pokok hanya dilakukan oleh masyarakat yang memang dari dulunya sudah menetap di Meureudu.

Beberapa pengusaha bermodal kecil mengaku bahwa mereka bekerja seadanya. Terdapat seorang informan perempuan yang bekerja sebagai pengusaha di sebuah warung berbahan papan selebar dua meter. Warung ini memang berada di dalam pekarangan rumah yang diwariskan orang tuanya. Anak-anaknya telah mandiri, mereka bekerja sebagai pedagang baju serta sepatu di pertokoan *keude* Meureudu. Usaha bekerja di warung yang dijalankannya sejak pagi hingga malam hari, meskipun demikian pendapatan yang diperoleh hanya memadai untuk keperluan hidup sehari-hari. Diwarung ini proses memasak kuah, kue atau mie dilakukannya sendiri. Menjelang siang, sebagian masyarakat di sekitar menjadikan warung ini tempat membeli kuah *dalicha*, sebuah nama masakan khas bumbu india. Di warung ini pula, seorang informan lainnya yang telah berusia lanjut menitipkan produksi kue tape beras putihnya untuk dijual.

Informan pembuat tape ini, dua puluh tahun silam ketika suaminya masih hidup sempat menjalani usaha berdagang es campur di *keude* Meureudu. Pendapatannya saat itu tergolong tinggi, sehingga dengannya dapat dibeli sepetak tanah tempat ia bertempat tinggal bersama salah seorang anak perempuannya hingga kini. Usaha tersebut secara perlahan menurun pendapatannya, hingga akhirnya diputuskan untuk menghentikan usaha setelah suaminya menderita sakit berat. Saat ini, penghidupannya ditopang oleh usaha membuat tape dan membuat *timphan* bagi siapa saja kenalan yang memesan padanya



Gambar 6.13. Masyarakat pedagang dan pengusaha kecil dengan andalan warung kecil dan gerobak dorong di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya

Seorang pria pedagang lainnya yang sehari-hari bekerja menjual lontong dan disaat lain bekerja di TPI Meureudu sebagai tenaga pengangkut *tong* atau peti ikan saat proses pembongkaran dari kapal pengangkut ikan. Semangatnya bekerja mencari peluang hidup yang lebih baik telah membuatnya memiliki pengalaman bekerja hingga ke Jakarta. Sempat berpindah-pindah tempat hingga beberapa kali hingga pada akhirnya setelah Aceh damai timbul pemikiran untuk mencoba pertuntungan usaha bersama istri dan satu anak tunggalnya bekerja di kampung halamannya di Aceh.

Dengan wajah bersih dan perawakan keturunan india serta kebiasaanya mendayung becak, pedagang ini mudah dijumpai di jalanan Meunasah Balek karena laluilintasnya membawa barang dan perlengkapan dagangan lontong sayur. Lokasi tempatnya berjualan, mengambil tempat di bagian depan salah satu pertokoan *keude* kopi. Pedagang ini menyasar para pekerja atau masyarakat lain yang tidak makan pagi di rumah. Pemilik toko hanya memberinya waktu berjualan maksimal jam 10 pagi karena setelah itu tempat yang sama dipergunakan oleh pedagang lain untuk berjualan nasi.

Kesulitan terbesarnya adalah ketiadaan akses meminjam tambahan modal. Uniknya, pedagang ini menolak mengajukan permintaan kredit usaha kepada pihak bank. Alasannya karena larangan terlibat dalam transaksi yang mengandung bunga atau riba. Keyakinannya terhadap nilai agama agar tidak terjerumus dalam praktek riba membuatnya bertahan hingga menunggu bantuan lain yang sifatnya bukan pinjaman berbunga. Namun, hingga penelitian ini berlangsung harapannya mendapat bantuan modal seperti kriteria yang diinginkannya belum terwujud. Menyinggung BAZIS yang memungkinkan untuk mendapat bantuan semacam yang dikehendakinya, ternyata belum berjalan sebagaimana diharapkan.

E. Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah.

Pegawai negeri atau pejabat pemerintah (jabatan publik) yang berada di gampong meunasaha Balek, umumnya termasuk dalam strata menengah atau *sep pajoh*. Tidak ada yang termasuk masyarakat miskin atau *ureung gasin*. Hal itu terkait dengan jaminan hari tua dan gaji mereka yang bersifat tetap, sehingga mereka selalu dapat terpenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka hanya mengandalkan pendapatan pensiunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Pendapatan lain, biasanya berasal dari pemberian secara tidak berkala dari anak-anaknya.

Tabel 6.4.
Ikhtisar Aktor tertahan pada status *Ureung Gasin*
di dalam Struktur Sosial Masyarakat Pidie

	Bidang Pekerjaan			
	Petani	Nelayan	Pedagang/ Wirausahawan	Pegawai/Pejabat Pemerintah
Pola pengelolaan pendapatan	Longgar dan konsumtif. Dalam keadaan tertentu bila panen raya ada kebiasaan membeli emas sebagai dana cadangan. Namun biasanya tak lama dijual kembali	Longgar dan cenderung boros. Pendapatan dikonsumsi hingga habis.	Keuntungan habis dipakai untuk konsumsi, tidak ada kesempatan untuk penambahan modal	Standar

Kreatifitas	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Aktifitas Ibadah madhah	Rendah	Rendah		Menengah dan Tinggi
Menyelenggarakan Aktifitas adat	Ada, untuk sekedar kemampuannya (walau kadang berhutang)	Ada, untuk sekedar kemampuannya (walau kadang berhutang)	Umumnya sekedar saja	Ada walau dalam skala kecil. (kadang-kadang berhutang)
Upaya Investasi pada human capital (anak)	Rendah karena tidak punya biaya dan dirinya sendiri juga tidak berpengetahuan, (kecuali kasus tertentu bila anak memiliki bakat dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan.	Rendah karena tidak punya dukungan biaya dan dirinya sendiri juga tidak berpengetahuan. Anak juga kurang berminat sekolah karena telah diperkenalkan sejak dini mendapatkan uang melalui usaha nelayan.	Rendah, anak terbiasa membantu berdagang sejak dini dan terkondisikan sibuk mencari uang	Sedang dan tinggi, tergantung lingkungan sosial mempengaruhi anak.
Ekspansi usaha	melaut	Berdagang kecil-kecilan di rumah	Tidak ada waktu karena bekerja sepenuh hari	Bertani atau berjualan kecil-kecilan dirumah

6.1.4. Dorongan Bekerja karena Pendidikan Anak

Sebagian masyarakat gampong Meunasah Balek menganggap penting pendidikan bagi anak-anaknya. Menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi menjadi impian sekaligus harapan agar anaknya dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dari pada yang sedang mereka. Kondisi ini akan terwujud bilamana pada saat yang bersamaan pada diri anak-anak mereka juga terdapat kemauan dan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan formal.

Kemauan untuk menyekolahkan anak hingga mencapai gelar kesarjanaan biasanya harus melewati tahap kritis berupa pertimbangan atas kemampuan membiayai pendidikan. Bagi masyarakat sukses persoalan ini dapat dilewati dengan mudah, namun tidak demikian bagi beberapa masyarakat lainnya yang sehari-hari menunjukkan sebuah keadaan yang tidak mapan dari sudut pandang pendapatan. Bagi kelompok terakhir ini, mendatangi tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengalaman dan pandangan dalam membiayai anak-anaknya hingga

meraih gelar kesarjanaan adalah wujud nyata atas upaya seriusnya mencari dukungan moril. Keadaan ini diungkapkan oleh salah seorang informan :

”saya kuatkan mentalnya dan saya dorong agar tidak menyerah dengan keadaan. Jangan takut tidak ada dana. Dana tidak harus sudah tersedia dalam jumlah besar. Mereka berpikir, bahwa dana harus sudah tersedia sejak awal untuk kebutuhan biaya-biaya seluruhnya hingga selesai kuliah. Uang dipenuhi secara bertahap-tahap. Setiap tahun atau setiap enam bulan, dengan demikian ada kesempatan untuk mencarinya secara perlahan dengan bekerja.”

(Kasim, guru dan pengusaha, 58 tahun, wawancara tanggal April 2010)

Pertimbangan dan dorongan tersebut terkadang berlanjut pada keadaan dimana anak-anak dapat menempuh pendidikan pada perguruan tinggi, sementara orang tua mereka disibukkan dengan agenda bekerja apa saja dengan semangat tinggi dengan harapan memperoleh pendapatan bagi keberlangsungan perkuliahan anak-anaknya.

Seorang informan yang sehari-hari dikenal sebagai petani tambak kurang sukses, berhasil mendidik anak-anaknya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya. Untuk dapat menutupi tuntutan dana pendidikan, ia selalu bergerak untuk mendapatkan pendapatan. Saat ini anaknya yang sarjana tersebut telah bekerja sebagai pegawai di salah satu instalasi kesehatan milik pemerintah. Kebanggaan atas keberhasilan tersebut. Dalam kesempatan lain, terdapat sebuah keluarga yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang ikan asin di keude Meureudu. Di dinding rumah sederhana tempat mereka tinggal, terlihat berjejer foto-foto anak-anak mereka saat menjadi wisudawan. Menurut penuturan informan yang merupakan ibu dari anak-anak tersebut, disebutkan bahwa mereka selalu memberi dorongan kepada anaknya untuk tekun belajar meskipun orang tua mereka hanya penjual ikan asin. Jangan terbawa suasana lingkungan yang sebagian anak-anak yang lebih senang meninggalkan sekolah untuk mencari uang dengan berjualan ikan atau terlihat dalam jasa pembongkaran ikan saat kapal penangkap ikan membongkar muatan.

Seorang informan lain yang dikenal sukses bekerja membangun usahanya di bidang kuliner juga menunjukkan keseriusannya mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Masyarakat gampong

Meunasah Balek terlihat memiliki semangat kerja karena tuntutan kebutuhan pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi.

6.2. Struktur Sosial dan Eksistensi Nilai Agama serta Adat dalam Dinamika Kehidupan Ekonomi

Masyarakat Pidie sebagaimana masyarakat Aceh lain pada umumnya adalah masyarakat yang telah menjalani proses akulturasi Islam sekian lama. Relevansi semboyan setempat, sebagaimana yang telah diangkat di bagian awal disertasi ini “*Adat ngeun hukom hana cree, lagee zat ngeun sifeut*” (adat kebiasaan tidak berpisah dengan hukum syariah, seperti zat dengan sifatnya) masih sangat kental. Dengan keadaan Pidie yang terkondisikan sedemikian rupa membuatnya tetap bertahan dengan ciri kehidupan masyarakat agraris pedesaan, berbeda halnya dengan kondisi daerah terdekatnya seperti Lhokseumawe atau Banda Aceh yang relatif maju.

Kesederhanaan hidup masyarakat Pidie, tergambar dari realitas kehidupan sehari-hari masyarakatnya sebagaimana yang dapat dilihat pada kondisi masyarakat gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu. Kesederhanaan itu tetap mencuat, meskipun Gampong Meunasah Balek dapat dikategorikan bukan sebuah gampong yang berlokasi jauh dari pusat keramaian atau pasar. Sehari-harinya masyarakat terlibat dalam aktifitas bekerja, berhubungan sosial dan beribadah. Di antara ragam aktifitas itu, pelapisan sosial mana yang disebut *ureung kaya, ureung sep pajoh* dan mana tetap terbentuk meskipun tidak terlihat mencolok.

Terbentuknya pelapisan sosial tersebut berkisar pada pekerjaan yang bercirikan pedesaan agraris, dimana orang-orang tersebut dapat menjadi orang kaya dengan bekerja mengelola sumber-sumber yang ada di Pidie baik sebagai nelayan, sebagai pedagang atau sebagai petani. Dalam kesehariannya aktifitas mereka bekerja tak terlepas dari pandangan-pandangan hidup yang merujuk pada kepantasan dan kepatutan yang diatur dalam agama dan adat. Kepantasan dan

kepatutan tersebut telah tersosialisasi sejak dini di dalam institusi keluarga, yang kemudian dimantapkan dan dikembangkan di dalam hubungan-hubungan pergaulan sosial di tingkat gampong yaitu di institusi Meunasah. Bahkan kemudian dapat berkembang dalam tahap lebih luas dalam wujud interaksi sosial yang berlangsung di dalam dan diluar institusi pendidikan formal.

Nilai-nilai yang menjadi anutan dan pedoman masyarakat dalam bertindak bersifat abstrak. Dalam tataran lebih lebih konkrit untuk dapat mengatur tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari, akan terbentuk struktur sosial seperti *imuem meunasah* untuk nilai agama dan *kejruen blang* atau *keuchik*, *panglima laot* dan lainnya untuk nilai adat budaya tradisi. Dalam bagian di bawah ini akan disajikan pembahasan menyangkut dengan keberadaan nilai yang termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pidie.

6.2.1. Ragam Ibadah Keagamaan, Struktur Sosial dan Persinggungannya dengan Aktifitas Ekonomi Masyarakat

Proses diterimanya Islam sebagai agama oleh masyarakat Aceh telah berlangsung sejak Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara yang ditandai dengan kontak perdagangan dengan pedagang-pedagang muslim di Peurelak dan Samudera Pasai. Sehingga saat ini, Aceh seakan identik dengan Islam. Namun demikian, proses adaptasi Islam dengan kehidupan adat istiadat yang telah ada sebelum Islam hadir tetap terjadi. Hal itu terlihat dengan adanya semacam institusi *imuem meunasah* di basis kehidupan masyarakat tingkat gampong, yang mana lembaga itu tidak ditemukan di Arab Saudi sekalipun.

Sedemikian kuatnya sosialisasi Islam dalam kehidupan masyarakat yang berdampak pada kekuatan keyakinan. Menimbulkan fenomena bahwa tidak mudah menemukan masyarakat Aceh yang beragama selain dari agama Islam. Pada saat yang sama kaum pendatang amat minim karena Meureudu yang tidak memiliki daya tarik bagi kaum pendatang dari luar Aceh. Hal ini merupakan dampak dari letak Meureudu yang memiliki jarak dengan pusat-pusat perkotaan besar Aceh seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe. Karena itu, Meureudu yang

berkarakteristik pedesaan cenderung bertahan dengan keadaan homogenitas penduduk. Di Meureudu tidak ditemukannya gereja, pura ataupun wihara.

Kesulitan menemukan rumah-rumah ibadah agama lainnya, bukan pula disebabkan oleh karena resistensi masyarakat setempat terhadap kehadiran rumah ibadah tersebut. Tidak ditemukan catatan dari penuturan masyarakat yang menggambarkan konflik menyangkut hal tersebut. Konflik horizontal antara penduduk lokal dengan warga Tionghoayang pernah terjadi pada tahun 1982, leboh disebabkan oleh rambatan peristiwa yang bermula dari luar Meureudu. Warga Tionghoa pada dasarnya dapat hidup rukun dengan warga masyarakat Pidie. Namun, peristiwa “demo cina” yang terjadi tersebut membawa dampak kerugian ekonomi yang memaksa korban warga Tionghoa untuk memilih merintis usaha di tempat baru.

Saat ini ditemukan beberapa pendatang-pendatang dari luar Aceh yang berkerja sebagai tukang bangunan. Umumnya mereka adalah pendatang sementara yang tidak membawa keluarga. Mereka adalah masyarakat keturunan Jawa Deli yang lahir dan dibesarkan di sekitar Medan. Umumnya mereka beragama Islam. Mentalitas tekun berkerja dan tidak banyak bersantai, membuat sebagian masyarakat Pidie memborongkan pekerjaan proyek pembangunan rumah tinggal atau pertokoan kepada mereka. Saat ditanya mengapa dengan tukang bangunan yang dari masyarakat setempat maka jawaban diperoleh jawaban mereka kecewa dengan buruknya mentalitas kerja serta lambatnya penyelesaian proyek.

“ kalau tukang orang Aceh, banyak duduk daripada bekerja. Datang telat sekitar jam 9, lalu jam 10 istirahat minum kopi dan makan kue, lalu jam 1 siang berhenti untuk makan siang dan shalat duhur serta tidur-tiduran, jam 4 minum kopi dan makan kue lagi sekaligus shalat ashar, jam 5 pulang. Uang selalu minta yang kadang uang sudah banyak habis, pekerjaan masih banyak tersisa. Bahkan sering kemudian tak datang lagi bekerja, karena uang sudah banyak diambil di awal”

(Bidan/Pengusaha,wawancara pada 29 Maret 2011)

Pendatang lainnya yang bersifat sementara adalah rombongan pendakwah. Mereka datang secara rutin setiap sebulan atau dua bulan sekali, bermalam di rumah salah satu penduduk selama satu malam. Melakukan ceramah di mesjid Meureudu pada malam hari setelah shalat magrib atau isya, lalu dilanjutkan

kembali setelah shalat subuh. Masyarakat setempat menyebut mereka dengan sebutan salafi. Kehadiran mereka membawa suasana kehidupan beribadah, terutama ibadah shalat.

Hal lainnya yang menunjukkan dampak dari usaha dakwah kelompok salafi adalah penampilan sebagian masyarakat di tempat ini. Pada kaum pria, terlihat memakai paduan celana panjang dengan gamis sepanjang lutut. Di antara mereka memelihara janggut hingga lebat. Sedangkan pada kaum perempuan terlihat menggunakan jilbab panjang dan lebar. Kebiasaan untuk selalu datang ke Mesjid atau Meunasah untuk melaksanakan shalat pada saat azan berkumandang adalah ciri-ciri utama masyarakat yang mengikuti dakwah kaum salafi.

Namun, di antara jemaah shalat fardhu lima waktu tidak selalu mereka yang berpakaian ala kaum *salafi*. Sebagian lainnya dari jemaah masih berpakaian sebagaimana lazimnya masyarakat setempat. Mayoritas dari masyarakat yang hadir shalat berjemaah adalah kaum salafi. Hanya pada momen shalat jumat saja, yang dapat dilihat mayoritas jemaah shalat dengan cara berpakaian umumnya masyarakat Aceh yang menggunakan sarung dan baju teluk belanga.

Terdapat keunikan dari masyarakat yang telah mengikuti dan menerapkan dakwah kaum salafi adalah pada tekad untuk rajin bekerja mencari nafkah. Jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh kelompok ini adalah berdagang di *keude* Mereudu. Diantara mereka ada yang berjualan obat-obatan, salah satu penjual *mie caluk* yang sukses adalah jemaah salafi. Dalam berjualanpun cara berpakaian mereka tetap tidak menanggalkan identitas jemaah yang mengikuti dakwah salafi.

Di dalam masyarakat tidak terdapat pertentangan antara masyarakat yang mengikuti dakwah salafi dengan yang tidak. Dalam hal ini terlihat bahwa kelompok salafi menghidupkan kembali gairah beribadah, terutama ibadah shalat lima waktu. Nilai-nilai Islam dikonstruksikan kembali dalam kehidupan masyarakat yang menganut agama Islam. Dengan rekonstruksi itu, terlihat gairah yang berbeda dalam menjalankan ibadah shalat berjemaah antara masyarakat yang sering mengikuti dakwah salafi dengan mereka yang tidak. Meskipun terdapat beberapa orang yang terlihat bukan jemaah namun tetap menjalankan ibadah shalat secara berjemaah. Khusus untuk beberapa orang yang terakhir itu, terlihat

bahwa ada latar belakang yang membentuknya sehingga tindakan-tindakan dalam hal ibadah shalatnya merefleksikan kedalaman pengetahuan agama serta pengamalan atas apa yang diketahuinya tersebut.

Masyarakat Meuredu dapat disebut masyarakat yang homogen dari sudut pandang agama yang dianut. Dari pengamatan peneliti, beberapa ritual ibadah berjalan normal dan terselenggara dengan formalitas rutin, seperti azan setiap lima waktu shalat. Untuk hal ini Bupati Pidie Jaya menginstruksikan agar setiap meunasah mengumandangkan azan setiap tiba waktu shalat, sebagaimana yang diungkapkan salah satu informan yang sehari-harinya menjalankan tugas sebagai imuem meunasah.

Ketersediaan rumah-rumah ibadah, baik mesjid ataupun meunasah disekitar pemukiman penduduk membuat jarak jangkauan masyarakat untuk melaksanakan aktifitas shalat menjadi tidak terkendala. Meskipun menurut pengamatan peneliti, sangat minim kehadiran masyarakat untuk melaksanakan shalat berjemaah di tempat-tempat yang telah disediakan tersebut. Meskipun dalam dimensi ajaran Islam disebutkan bahwa Tuhan memberikan ganjaran pahala dua puluh tujuh derajat lebih tinggi kepada mereka yang mengerjakannya. Dimensi ini mengisyaratkan sebuah proses bermasyarakat bagi masyarakat muslim itu sendiri. Kehadiran untuk berkumpul dan melakukan shalat bersama-sama dibawah seorang imam yang dipercayai. Lalu diantara waktu sebelum dan sesudah shalat dapat berlangsung interaksi sosial untuk mengetahui keadaan satu sama lain.

Proses penyembahan Tuhan secara vertikal dan secara horizontal terbangun hubungan sosial dalam satu komunitas secara intensif lima kali sehari, untuk saat ini tidak terlihat dilaksanakan oleh mayoritas penduduk Pidie. Bilapun ibadah itu berlangsung dalam jumlah jemaah yang tak sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki, hanyalah pada waktu shalat magrib dan isya. Beberapa proses ritual ibadah seperti membayar zakat, berpuasa dan melaksanakan ibadah haji merupakan aktifitas keagamaan yang di dalamnya dapat diketahui sejauh mana aktifitas tersebut berkontribusi dalam mendorong tindakan kerja serta membangun ekonomi masyarakat.

A. Buleun Puasa dan Dispensasi Kerja

Memasuki ibadah puasa di bulan Ramadhan, hal unik berlangsung di sini sebagaimana dituturkan informan yakni secara sadar masyarakat dan pemerintah mengkondisikan penurunan ritme aktifitas kerja masyarakat. Hal ini dilakukan dengan dalih ibadah puasa yang membuat tenaga jauh berkurang untuk bergerak dan agar terdapat waktu lebih banyak untuk beribadah. Seperti pegawai kantor pemerintah, diambil kebijakan untuk mengatur sedemikian rupa waktu untuk masuk dan pulang kerja sehingga waktu untuk bekerja menjadi lebih pendek dari biasanya. Demikian juga, guru dan pelajar sekolah diliburkan dari aktifitas belajar dan mengajar selama bulan Ramadhan dan bagi mereka ditambah libur lainnya beberapa hari untuk menikmati hari raya idul fitri.

Selama ramadhan, masyarakat lebih banyak berdiam diri di rumah. Seperti dituturkan informan bahwa ada anggapan sederhana yang dipegang oleh masyarakat setempat bahwa “mencari harta selama sebelas bulan tahun untuk dipakai habis pada bulan puasa”. Mereka menganggap bahwa bulan puasa total untuk beribadah dan mengenyampingkan urusan cari rezeki. Karena dalam bulan puasa semua ibadah diberi ganjaran berlipat-lipat dibandingkan bulan-bulan lainnya. Dalam prakteknya sebagian mengisi waktu dengan tidur-tiduran seharian, baik dirumah maupun di mesjid atau meunasah. Dalih mereka adalah bagi orang berpuasa, tidurpun diberikan ganjaran pahala. Tidur masih lebih baik, daripada membicarakan hal-hal buruk seperti mengumpat atau menggunjing kekurangan orang lain. Tidur masih lebih baik, daripada melihat hal-hal yang dilarang Tuhan sehingga mengurangi pahala puasa. Sebagian mengemukakan alasan banyak tidur siang karena jam tidur malam yang berkurang akibat banyak aktifitas untuk ibadah seperti shalat tarawih yang berlanjut dengan ibadah tadarus hingga larut malam dan harus bangun kembali dini hari untuk makan sahur

Keadaan itu membuat pasar nyaris tanpa pengunjung di pagi hari. Pasar akan mulai diramaikan para penjual dagangan makanan sejak menjelang shalat ashar atau sekitar pukul 15 dan mencapai puncaknya sekitar jam 17 disaat mana sebagian masyarakat tumpah ruah di antara penjual-penjual makanan dan minuman yang khusus disediakan untuk menu penganan berbuka puasa. Secara

perlahan, hal ini akan mulai berbeda sejak memasuki hari ke duapuluh satu puasa ramadhan. Pasar mulai ramai dengan aktifitas jual beli perlengkapan perayaan hari raya Idul Fitri. Saat mana orang tua mulai mengeluarkan uang untuk berbelanja kebutuhan baju, sepatu atau sandal hari raya bagi anak-anaknya. Berbelanja sarung, mukena ataupun baju teluk belanga untuk dikenakan pada shalat sunat Idul Fitri. Ibu-ibu sibuk berburu aneka kue kering, *stoples* penyimpan kue, taplak meja, gordena penghias ruang tamu untuk memanjakan kerabat dan sahabat yang bersilaturahmi ke rumahnya. Bapak-bapak sibuk membersihkan halaman, mengecat atau memperbaiki pagar dan dinding rumah rumah. Keadaan ini dengan sendirinya membuat konsentrasi sebagian besar masyarakat bukan lagi pada aktifitas ibadah ritual, yang terlihat dari semakin berkurangnya jumlah jemaah yang menghadiri ibadah shalat di mesjid-mesjid atau meunasah-meunasah.

B. Kesibukan Masyarakat di *Museim Haji*

Museim haji, begitu cara masyarakat Pidie menyebut masa-masa antara menjelang keberangkatan jemaah haji dan setelah jemaah haji tiba kembali di Indonesia. Pada *museim haji* masyarakat kembali disibukkan dengan aktifitas mengunjungi untuk mendoakan dan saling memberi maaf kepada mereka yang akan menunaikan ibadah haji. Biasanya mereka yang akan menunaikan ibadah haji dengan sengaja mengadakan sebuah kenduri besar, mengundang dan mengumpulkan seluruh kerabat keluarga, sahabat dan kolega di rumahnya. Di dalam acara ini disuguhkan makan siang dan dilakukan ritual "*peusujuk*" kepada orang yang akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci. "*Peusujuk*" atau tepung tawar lebih merupakan adat tradisi Aceh dari masa Hindu namun dipertahankan dan diwariskan hingga hari ini. Prosesi ini kini telah dikemas dengan pembacaan salawat serta doa-doa dengan tatacara Islam.

Dalam agenda acara seperti ini, biasanya diberikan bekal berbentuk uang tunai kepada yang akan berangkat menunaikan haji. Meskipun disadari bahwa mereka yang berhaji telah berada dalam katagori mampu secara finansial, namun bantuan uang itu lebih merupakan keterlibatan dan kepedulian keluarga, kenalan atau kolega agar yang bersangkutan agar tidak kehabisan bekal uang bagi dirinya

atau bagi keluarga yang ditinggalkan. Kadang kala acara ini, justru menjadi media bagi masyarakat yang akan berangkat ke tanah suci untuk mengumpulkan bekal berbentuk uang bagi keperluannya. Semakin tinggi status sosial, pengaruh atau kedudukan orang yang akan berangkat ke tanah suci maka semakin tinggi peluangnya untuk mendapatkan dana yang diharapkan tersebut. Karena anggapan ini, sebagian masyarakat yang sadar biasanya akan menolak pemberian dari kerabat atau kolega yang datang. Sehingga acara semata-mata untuk saling maaf memaafkan, karena ada nilai yang mengemuka bahwa “yang berangkat ke tanah suci, harus benar-benar bersih dari dosa dan dapat saja terjadi tidak kembali karena meninggal di dalam proses berhaji itu sendiri”.

Persoalan haji ini, tidak berakhir hingga di acara tersebut. Kebiasaan yang sudah mentradisi adalah proses mengantar yang massal dan berantai. Keluarga, kerabat dan handai taulan merasa tidak puas hanya mengantar orang yang berhaji hingga di pintu pagar rumahnya saja. Proses mengantar dan melepas keberangkatan akan berlanjut hingga ke stasiun angkutan bus khusus haji. Bahkan, proses mengantar dan bersalam-salaman berlanjut hingga ke asrama haji walaupun mereka harus mengeluarkan uang dapat mencapai Banda Aceh atau Medan pada masa sebelum bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh dijadikan embarkasi pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Tidak puas hingga di asrama haji, proses pengantaran akan berujung di bandara. Lambaian tangan para pengantar baru berhenti saat pesawat yang membawa jemaah haji terbang tak terlihat mata.

Dalam musim haji, aktifitas lalu lalang kendaraan sangat tinggi. Karena jadwal pemberangkatan haji yang diatur pemerintah sedemikian rupa sehingga dalam masa pemberangkatan hilir mudi angkutan jemaah dan penghantar jemaah menghidupkan suasana jalanan dan mendorong transaksi jual beli peralatan kebutuhan makanan para pengguna jalan negara menuju Banda Aceh. Kawasan Pidie termasuk menikmati berlimpahnya aktifitas lalu lalang ini, karena letaknya dalam rute Bergeraknya masyarakat yang dari kota-kota yang berada di pesisir timur atau dataran tinggi Gayo menuju Banda Aceh.

C. *Zakeut* dan Manfaat Ekonomi Masyarakat.

Menyangkut dengan ibadah membayar zakat yang disebut dengan “*zakeut*” di kalangan masyarakat Pidie, menurut pengamatan dan penuturan informan bahwa zakat fitrah adalah jenis zakat yang paling populer dikenal oleh masyarakat. Mereka membayar zakat sesuai waktunya, mereka sangat takut bila tak membayar zakat fitrah. Karena zakat ini diyakini sebagai kewajiban yang harus dilakukan untuk membersihkan diri dan jiwa yang ada di dalamnya. Zakat fitrah yang biasanya sudah mulai dapat dibayar sejak pertengahan ramadhan dan harus sudah dibayar sebelum pelaksanaan shalat sunat Idul Fitri semakin mengukuhkan anggapan bahwa seluruh amal ibadah yang dengan susah payah dilakukan selama bulan ramadhan menjadi tidak berarti bila tidak diakhiri dengan penyucian jiwa melalui pembayaran zakat fitrah.

Zakat yang dibayar biasanya berbentuk beras dengan kualitas beras sebagaimana dikonsumsi sehari-hari. Selain beras, masyarakat setempat menganggap kurang afdhal bila dikonversikan dalam bentuk uang, sekalipun jumlah nilai uang sama dengan harga pembelian beras yang seharusnya. ‘*Amil*’ atau pengelola zakat yang biasanya menunggu setelah pelaksanaan shalat tarawih di meunasah-meunasah dan mesjid-mesjid, masyarakat membawanya sembari shalat. Beras-beras itu pada akhir bulan puasa disalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Disamping itu, para ‘*amil*’ zakat yang biasanya terdiri dari *tengku imuem meunasah* atau *teungku imuem syik* serta pengelola meunasah lainnya adalah pihak yang secara ketentuan termasuk pihak yang turut dapat menikmati zakat tersebut.

Selain zakat tersebut, oleh panitia biasanya juga membuka diri untuk menampung penyerahan zakat *maal* atau zakat harta. Hal tersebut dapat dipahami karena momentum bulan puasa dianggap sebagai waktu dimana seorang yang beragama Islam sedang berada dalam puncak kesadaran akan hak dan kewajibannya kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai tanggung jawab sosialnya. Namun, beberapa informan mengaku bahwa tidak terbiasa dengan membayar zakat maal pada momen tersebut. Bahkan di antara mereka yang

sedang sukses, diantaranya belum terbiasa dengan tradisi membayar zakat harta setiap tahunnya.

Pengalaman dan keberhasilan beberapa insitusi yang memanfaatkan potensi dana zakat, infak dan sadakah untuk membangun masyarakat dhuafa atau masyarakat miskin turut menginspirasi pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten untuk mendirikan lembaga baitul maal. Namun, terlihat institusi ini belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meskipun upaya-upaya penyadaran dengan membuat tulisan himbauan dan ajakan untuk menunaikan zakat harta sebagai pembersih harta, dengan mudah dapat ditemui di baliho-baliho yang ditempatkan di tempat strategis.

Keadaan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di kawasan ini belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama secara utuh sekalipun untuk urusan pembersih harta. *Baitul Maal* dapat dikatakan belum dapat merealisasikan bantuan dana kepada pihak-pihak yang seharusnya dapat menerima. Kekurangannya adalah belum adanya kesadaran, apalagi tindakan dari kelompok masyarakat sukses untuk menyalurkan kewajibannya. Dalam konteks ini, seorang informan yang sehari-hari bekerja membawa becak dan berjualan makanan mengaku mengharamkan diri meminjam uang ke bank konvensional untuk menambah modal kerjanya, sehingga dapat dikatakan bahwa bentuk bantuan seperti dari baitul maal adalah termasuk model bantuan modal yang diharapkannya.

Tabel 6.5.
Ikhtisar Kegiatan Ibadah Keagamaan dan Dorongan Ekonomi Masyarakat

	Kegiatan Ibadah Keagamaan		
	Buleun Puasa	Museim Haji	Zakeut
<i>Domein</i> Institusi sosial	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>
Aktifitas kerja individual	Masyarakat lebih memilih tidur dan bersantai di rumah atau tempat-tempat ibadah.	Masyarakat dipenuhi kesibukan dan mobilitas	Semakin banyak materi harta, semakin banyak yang dapat dizakatkan. Dalam aspek ini dapat yang kaya dapat

			memberikan kepada yang miskin sebagai stimulan dorongan modal aktifitas kerja. Berbeda dengan zakat fitrah yang dikenakan tanpa kecuali.
Dukungan penghargaan atas waktu	Rendah, karena waktu tidak digunakan maksimal untuk berproduksi	Tinggi, masyarakat terkondisi dalam aktifitas memuliakan orang yang akan berhaji dengan mengikuti jadwal yang ditetapkan secara ketat	Tidak bermasalah
Sikap terhadap penggunaan pendapatan/ uang	Cenderung boros, konsumtif selama bulan ramadhan dan berlanjut hingga hari raya	Cenderung boros, konsumtif dalam prosesi tradisi pemberangkatan haji.	Dampak pendapatan zakeut dirasakan oleh kelompok miskin.

6.2.2. Ragam Tradisi Adat, Insitusi Sosial dan Persinggungannya dengan Aktifitas Ekonomi Masyarakat

Sebagaimana tersebut dalam semboyan lokal “*adat ngen hukom, lage zat ngeun sifeut*” maka hal itu pula yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat gampong Meunasah Balek. Mereka hampir tidak menyadari bagian mana kebiasaan yang mereka lakukan sebagai *hukom* yang bersumber dari *syariah* agama Islam dan bagian mana sebagai adat tradisi turun temurun. Namun diantara mereka dapat memastikan bahwa adat tradisi yang bertahan dan mereka lakukan menurut yang mereka ketahui tidak mengalami pertentangan dengan *hukom*.

Dalam hal ini, justru kegiatan tradisi adat dicoba kait-kaitkan dengan keyakinan agamam Islam. Alasannya sederhana yaitu setiap individu tidak menginginkan pengorbanannya tidak bernilai manfaat bagi dirinya dan keluarganya. Nilai manfaat itu berasal dari Tuhan, tindakan-tindakannya terlibat dalam aktifitas adat adalah untuk meraih ganjaran kebaikan dari Tuhan. Kekuatan makro kosmos masih kuat melingkupi setiap tindakan masyarakat Pidie. Tidak ada kegiatan yang tetap dipertahankan masyarakat namun terlepas atau juga bertolak belakang dengan keyakinan agama Islam. Dalam pada itu, institusi sosial

semacam *imeum meunasah* dan *keuchik* menjadi semacam “*event organizer*” atau yang mengorganisasikan kegiatan-kegiatan tersebut sehingga berjalan sesuai rencana. Kesuksesan kerja kedua institusi tersebut turut ditentukan oleh kepiawaiannya dalam mengatur agenda-agenda tradisi adat dimaksud.

6.2.2.1. Tradisi Uroe Meugang

Salah satu di antara adat tradisi yang sangat melekat dengan agenda keagamaan adalah kegiatan “*meugang*” yang berlangsung tiga kali dalam setahun. Disebutkan informan “*meugang* berlangsung tiga kali yaitu satu hari menjelang hari pertama bulan puasa, satu hari sebelum hari raya idul fitri dan satu hari sebelum hari raya haji”. Kegiatan *meugang* bukan bersumber dari ajaran Islam, terbukti hal ini tidak disebutkan dan tidak diatur dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadist.

Penyelenggaraan *meugang* lebih menunjukkan tindakan sosial masyarakat setempat untuk menunjukkan rasa suka cita dan kegembiraan karena sesaat lagi mereka akan memasuki sebuah kegiatan besar keagamaan seperti kedatangan bulan suci Ramadhan, menyambut hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Diluar dari tiga agenda tersebut tidak terdapat hari “*meugang*”. Hari *meugang* merupakan hari dimana di dalamnya terjadi transaksi jual beli daging sejak subuh hari hingga menjelang siang. Pada hari itu, disebutkan informan bahwa seluruh ruang kaki lima atau pelataran toko yang ada di keude Meureudu dipenuhi dan didominasi oleh meja-meja para pedagang daging. Penataan tempat berjualan sudah dilakukan satu hari sebelum tiba hari *meugang*. Pada hari *meugang*, transaksi didominasi oleh kebutuhan akan daging dan bumbu-bumbu masakan yang berkaitan dengan menu masakan daging itu sendiri.

Hari *meugang* menjadi hari dimana seluruh aktifitas yang tidak terkait dengan “*meugang*” seakan terhenti sejenak. Seluruh perhatian masyarakat ditujukan untuk mendapatkan daging dan meramaikan dapur rumah masing-masing dengan ritual memasak daging. Semakin ramai aktifitas kaum perempuan di dapur dan ditemani tawa riang gembira anak-anak yang meramaikan sebuah

rumah, maka dianggap semakin baik keadaannya. Sehingga setiap orang tua, selalu berusaha agar tidak menanggung sedih, bahkan aib apabila dirumahnya pada hari meugang tidak ada aktifitas memasak daging sama sekali. Menyiasati keadaan ini, serendah-rendahnya mereka berusaha memasak daging, meskipun hanya ada daging ayam atau bebek.

Kaum pria dituntut memiliki kemampuan membawa pulang daging untuk anak dan istrinya. Seberapa banyak daging yang ditenteng dalam perjalanan pulang ke rumahnya menunjukkan pertarungan gengsi yang sedang dipikulnya. Para kaum perempuan telah menyiapkan diri untuk berada dirumah sepenuhnya hari itu, mereka harus menyelesaikan tugas memberikan masakan daging seistimewa mungkin kepada suami dan anak-anaknya.

Kegiatan tradisi adat yang membutuhkan biaya tinggi ini, mendorong suatu situasi dimana meningkatnya aktifitas kaum pria untuk mendapatkan uang bekal belanja keluarga di hari *meugang*. Karena kaum pria tak hanya memikirkan bekal belanja daging untuk keluarganya saja, tapi juga bagaimana dirinya dapat mempersembahkan daging kepada mertuanya. Khusus bagi pengantin baru yang disebut "*linto baroe*" menjadi pertarungan kebanggaan baginya apabila mampu membawa pulang daging lembu terbaik kepada mertuanya. Keadaan ini terkadang membawa dampak ramainya kantor-kantor pejabat pemerintahan lokal didatangi masyarakat kurang mampu yang berharap diberikan uang *meugang*.

Tradisi ini secara tak langsung telah mendorong petani ternak untuk mendapatkan hasil keuntungan dengan harga yang lebih baik paling dari keadaan biasanya. Hal ini terjadi paling tidak, setahun tiga kali. Di lain sisi, aktifitas ini juga mendorong meningkatnya kebutuhan berbagai bahan kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan kebutuhan konsumsi daging dalam jumlah besar.

6.2.2.2. Tradisi *Khanduri Mulod*

Menyangkut hal yang satu ini, masyarakat menganggapnya bagian dari syariat Islam, meskipun di dalam Al Quran dan Al Hadist tidak ditemukan pengaturan hal ini secara eksplisit. Di dalam ajaran Islam dianjurkan untuk berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak disebutkan

bahwa ritual kenduri dan kegembiraan memperingati hari lahir nabi bentuk lain dari salawat. Tradisi Maulid nabi sendiri merupakan tradisi yang diletakkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi sebagai formulasinya meningkatkan soliditas dan semangat kaum muslimin.

Masyarakat memegang teguh tradisi ini, meskipun di dalamnya mempersyaratkan kebutuhan dana penyelenggaraan yang tidak sedikit. Dalam pelaksanaannya, maulid yang oleh penduduk Pidie disebut "*khanduri mulod*" berlangsung secara massal. Kenduri ini pada bentuknya menjadi jamuan makan bagi anak yatim dan handai taulan serta kenalan yang diundang ke rumah. Bersamaan dengan itu, sebagaimana disebutkan informan bahwa secara tradisi bahwa nyaris menjadi keharusan bagi semua masyarakat untuk menyumbang hidangan "*aso talam*" ke *meunasah*. Masyarakat mampu, sedang atau tidak mampu dimintai kerelaannya untuk mengantar sepaket hidangan ke Meunasah. Secara tak disadari, kegiatan ini menjadi ajang perlombaan gengsi sekaligus pembuktian status sosial masyarakat yang diukur dari kualitas dan kuantitas sumbangan menu makanan yang diantar ke meunasah. Makanan itu akan dihidang secara massal kepada tamu yang hadir merayakan hari lahir nabi di gampong mereka.

Masing-masing gampong mendapat giliran, saat mana mereka menjadi tuan rumah bagi kegiatan "*khanduri maulod*". Menjelang hari *maulod*, meunasah mulai dibersihkan dan dihias secara gotong royong. Di halaman meunasah, dibuatkan podium tempat mana seorang dai akan menyampaikan dakwah *maulod*. Podium dihias sedemikian rupa sehingga nyaman dipandang mata. Masyarakat *gampong* setempat dan *gampong* tetangga akan hadir untuk ikut mendengarkan dakwah yang dilaksanakan malam harinya *khanduri maulod*.

Pada hari *khanduri maulod*, sejak pagi hari *meunasah* sudah ramai dengan para kaum laki-laki. Di dalamnya bercampur antara tokoh, pemuda, remaja dan anak-anak. *Meunasah* diramaikan dengan pemutaran lagu-lagu kasidah lewat pengeras suara sehingga terdengar ke seluruh penjuru gampong. Bersamaan dengan itu, dapur-dapur rumah penduduk hiruk pikuk dengan aktifitas para ibu dan perempuan remaja yang sedang memburu waktu memasak hidangan agar

dapat selesai tepat waktu. Hidangan disiapkan untuk keperluan makan siang anak yatim serta tamu lainnya yang telah diundang.

Mulai jam 13, paket hidangan yang dikemas dalam “*talam*” ditutup kain khusus berwarna kuning diantar oleh kaum laki-laki ke *meunasah*. Hidangan disambut oleh panitia untuk kemudian disiapkan dalam paket jamuan *khanduri* di halaman *meunasah*. Sekitar jam 15, jalanan menuju *meunasah* mulai dipenuhi oleh gelombang rombongan kaum laki-laki baik yang dewasa, pemuda, remaja maupun anak-anak dari gampong-gampong terdekat. Prosesi *khanduri* berlangsung singkat, tak melebihi satu jam sehingga semua makanan disantap di tempat dan sebagian yang hendak dibawa pulang makanan telah pula disediakan kantong-kantong plastik.

Pada tempat yang sama, malam harinya *meunasah* diramaikan kembali dengan agenda dakwah hingga tengah malam. Saat mana, seluruh masyarakat berkumpul bersama mendengar dakwah. Pendakwah biasanya di datangkan dari luar daerah, sehingga semakin jauh atau semakin populer juru dakwah yang diundang maka semakin bergengsi gampong tersebut. Keramaian malam hari dakwah, dimanfaatkan oleh sebagian pedagang keliling untuk menjajakan dagangan jajanan malamnya, seperti kacang rebus, jagung rebus, minuman dan mainan anak-anak sejenisnya.

Tradisi adat kebiasaan ini mengharuskan masyarakat untuk memiliki sejumlah dana untuk keperluan kenduri. Dorongan untuk mempertahankan nama baik atau menghindarkan diri dari rasa malu dari masyarakat sekeliling karena tak mampu mempersembahkan kenduri bagi kenduri maulid terkadang mendorong masyarakat untuk bekerja dan menyimpan dana bagi keperluan kenduri. Dengan keadaan ini, dana masyarakat, terutama yang tidak berlebihan dapat tergerus untuk kegiatan konsumtif. Walaupun dalam bentuk konsumtif yang dinikmati secara kolektif.

Terdapat beberapa bentuk kegiatan adat lainnya yang bersifat konsumtif kolektif, menurut pengamatan peneliti diantaranya adalah *khanduri blang* yang diselenggarakan menjelang tahapan membajak sawah. *Khanduri laot* yang lebih merupakan persembahan hidangan yang diarak ke laut. Kegiatan ini meskipun

tidak disebutkan dalam hukum, namun masyarakat setempat mempercayainya sebagai bentuk syukur mereka kepada Maha Pencipta dan pengharapan agar terhindar dari malapetaka bagi nelayan yang mencari kehidupan di laut.

6.2.2.3. Tradisi *Khanduri Peukawin Aneuk dan Peusunat Aneuk*

Tradisi ini merupakan tradisi yang melekat dengan *hukom*. Tidak saja *hukom* yang dipatuhi, namun juga ketentuan negara untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Masyarakat gampong masih memegang teguh bentuk hubungan lelaki dan wanita yang tak tercela yakni melalui pernikahan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Proses pernikahan itu sendiri harus melalui pra perkawinan itu sendiri, yaitu tahapan “*cah rauh*” yang berisikan kegiatan orang tua mempelai pria membuka silaturahmi dan bertemu dengan orang tua mempelai wanita. Menghindari rasa kaku maka dalam rombongan pria biasanya dengan ditemani “*seulangke*” yang membicarakan kemungkinan untuk bisa melangkah ke tahap berikutnya atau tidak.

Selanjutnya tahap “*intat ranup*” yang merupakan tahapan melamar yang di dalamnya termasuk dibicarakan hal mas kawin dan tanggal acara pernikahan dan *khanduri peukawen aneuk* sebagai bentuk resepsi perkawinan. Dalam tahap ini, biasanya para pemuka gampong sudah mulai dilibatkan, pemuka gampong dapat saja salah satu dari di antara *Keuchik*, *Teungku Imuem* atau kepala dusun. Pelibatan tokoh gampong untuk membuat hubungan ini sudah setengah formal dan beberapa langkah selanjutnya yang terhitung berat akan mudah mendapat dukungan dari masyarakat karena ditopang oleh kharisma pemuka gampong.

Acara selanjutnya yang membutuhkan dana dan dukungan tenaga adalah *khanduri peukawen aneuk*. Kegiatan ini dalam *hukom* dikenal dengan istilah *walimatul ursy*. Namun, *walimah* yang diatur dalam ajaran Islam ditujukan untuk memberitahukan secara terbuka bahwa pernikahan telah berlangsung. Dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari, tahapan ini membuat orang tua perlu menghabiskan dana besar bagi penyelenggaraan acaranya. Karena di dalam acara adat ini telah terbawa urusan martabat, kehormatan, gengsi dan prestisius. Acara ini terbagi dua tahap, yakni “*preh linto baro*” yang menjadi tuan rumah adalah

orang tua mempelai wanita. Beberapa waktu kemudian akan berlangsung “*tueng dara baro*” yang menjadi giliran tuan rumah adalah orang tua dari mempelai pria.

Kedua acara ini, dikondisikan sedemikian rupa agar berlangsung semeriah mungkin. Semakin banyak undangan yang hadir dengan simbol-simbol orang kaya atau terpandang maka semakin baik anggapan orang terhadap tuan rumah. Menyambut kehadiran para tamu undangan, mengharuskan tuan rumah mempersiapkan hidangan konsumsi yang menelan biaya besar. Pengeluaran biaya yang besar juga termasuk dalam paket kegiatan lainnya seperti pembuatan dan penyebaran undangan, penyewaan pelaminan, tenda beserta atribut penghiasnya, kursi-kursi. Kegiatan-kegiatan ini tidak diperhitungkan sebagai pengeluaran yang tidak terlalu penting, karena dorongan mempertahankan harga diri dan kehormatan telah menutupi rasionalitas.

Dalam rangkaian acara ini, bila lokasi tempat tinggal antara dua orang mempelai berbeda kota. Prosesi mengantar pengantin akan membutuhkan beberapa kendaraan berupa bus atau mini bus. Perjalanan ini biasanya dibiayai oleh orang tua dari mempelai yang sedang diantar. Aktifitas ini menjadi peluang mendapatkan pendapatan bagi pengusaha jasa angkutan dan masyarakat pengusaha jasa dan barang lainnya yang menyasar masyarakat pengguna jalan raya.

Dalam tahap selanjutnya masih terdapat ritual lainnya, yang bersifat konsumtif seperti “*peusujuk tujuh buleun*” bila kelak seorang wanita telah menjalani masa kandungan pada bulan ke tujuh, “*aqiqah dan putreun tanoh*” untuk kenduri akikah dan syukuran kelahiran. Bila kelak anak laki-laki sudah menginjak umur 12 tahun maka akan diselenggarakan kenduri “*peusunat aneuk mid*”. Ritual-ritual tradisi adat menghendaki kepemilikan modal dana yang tidak sedikit. Semakin terpandang seseorang dalam masyarakat maka semakin berusaha mempertahankan posisi itu dengan menggelar acara yang layak untuk standar kedudukannya.

Dikonfirmasi oleh beberapa informan bahwa terdapat beberapa kegiatan adat lainnya yang bersifat menggerakkan masyarakat secara ramai. Seperti tradisi “*rabu abeih*”, secara massal dan serentak masyarakat mengunjungi tempat-tempat

rekreasi sembari membawa makanan yang akan dinikmati bersama. Acara ini berlangsung pada pekan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadhan. Biasanya masyarakat, beramai-ramai mendatangi tempat-tempat pemandian seperti sungai atau tepi pantai. Masyarakat menganggap bahwa dengan mandi ditempat tersebut, maka mereka telah membersihkan diri dari kotoran. Kebersihan diri dianggap penting sebelum memasuki bulan Ramadhan. Pada kesempatan ini, tempat-tempat rekreasi ramai dikunjungi oleh masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi atau menyewa kendaraan umum. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pedagang di tempat-tempat wisata sebagai kesempatan penambahan pendapatan.

Tabel 6.6.
Ikhtisar Kegiatan Tradisi Adat dan Dorongan Ekonomi Masyarakat

	Kegiatan Tradisi Adat		
	<i>Oroe Meugang</i>	<i>Khanduri Mulod</i>	<i>Khanduri Peukawen aneuk</i>
<i>Domein</i> Institusi sosial	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>	<i>Keuchik dan Tengku Imeum Meunasah</i>
Aktifitas kerja individual	Mendorong semangat kerja masyarakat peternak karena tingginya transaksi penjualan.	Masyarakat dipenuhi kesibukan dan mobilitas	Tidak memberi dampak memadai bagi aktifitas kerja
Dukungan penghargaan atas waktu	Kurang relevansi	Kurang relevansi	Proses persiapan dan pelaksanaan menyita sebagian besar waktu aktor
Sikap terhadap penggunaan pendapatan/ uang	Cenderung berlebihan, konsumtif untuk mempertahankan strata sosial	konsumtif dengan alasan untuk mendapatkan berkah	Cenderung boros, konsumtif dengan alasan menjaga marwah keluarga
Ajaran agama Islam	Tidak diatur dalam ajaran agama	Tidak diajarkan dalam awal mula risalah Islam, Namun muncul kemudian yang diperkenalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir	Disebutkan dalam format <i>walimah ursy</i> , namun tidak ditetapkan tatacara pelaksanaan.

Tabel di atas memberikan informasi atas ragam aktifitas tindakan-tindakan pemuliaan tradisi adat yang dilakukan oleh aktor dalam struktur sosial masyarakat Pidie. Di dalamnya terlihat beberapa elemen sosial yang ternyata tindakan-tindakan tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai yang mempunyai dukungan dari institusi sosial. Menekan sisi buruk dari kegiatan tersebut diluar perhatian dan pertimbangan aktor maupun pemuka sosial keagamaan.

6.3. Pemuka Agama, Adat dan Transformasi Nilai Terkait Budaya Kerja

Pemuka-pemuka masyarakat di gampong ini dapat dikategorikan dalam beberapa ketokohan seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh nelayan, tokoh pengusaha dan tokoh pemerintahan. Di Gampong Meunasah Balek, ketokohan para pemuka dapat dikatakan masih terbatas dalam cakupan Meureudu dan sekitarnya. Tidak terdapat tokoh yang kepopulerannya dalam skala cakup Aceh secara keseluruhan. Terdapat seorang ulama populer yang berada di Ulee Glee, berjarak sekitar 10 km dari Meureudu. Ulama ini dikenal dengan sebutan Tengku Haji Usman Kuta Krueng, meskipun sering di datangi oleh masyarakat untuk meminta rujukan atas masalah yang dihadapi. Namun, menurut di dalam penuturan informan diketahui tidak terdapat bagian-bagian yang khusus mendorong masyarakat untuk mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam bentuk konkrit seperti menghargai waktu, bekerja keras, rajin membantu sesama, rajin menabung dan tidak royal.

Tokoh agama lokal setingkat gampong, yang disebut dengan *tengku imuem meunasah* lebih merupakan tokoh yang menjadi sentral saat mana ritual shalat jemaah berlangsung di meunasah-meunasah atau saat mana berlangsung prosesi terhadap seorang anggota masyarakat yang meninggal dunia. Diluar aktifitas itu, *tengku imuem meunasah* bersama *keuchik* menjadi andalan masyarakat untuk memimpin mereka saat mana harus mengadakan kenduri besar mengawinkan anak. *Keuchik* dan *teungku imuem* menjadi kepala rombongan saat mana mereka harus mengunjungi sebuah kota dimana besan bertempat tinggal dan menjamu mereka sebagai tamu dalam acara resepsi perkawinan.

Teungku imuem biasanya memiliki pekerjaan pokoknya sendiri, seperti *teungku imuem meunasah dayah kleng* yang bekerja sebagai pedagang di *keude Meureudu*. *Teungku Imuem* tidak menjadikan posisi itu sebagai kegiatan pokoknya. Hal itu berbeda dengan *keuchik* yang dengan sadar harus dipilih dan diangkat untuk bersedia meluangkan waktu sepenuhnya untuk memimpin pemerintahan gampong melalui kompetisi dan pemilihan terbuka. Karena tugas-tugasnya yang tidak bersifat formal mengurus administrasi gampong, maka *teungku imuem* lebih banyak menjalankan tugasnya sebagai imam rawatib. Meskipun terdapat pembagian lima waktu shalat, namun realitanya *imuem meunasah* terlihat sering memimpin shalat di *meunasah* pada saat waktu shalat magrib dan isya. Disamping tugas memimpin shalat, *imuem meunasah* selalu diminta berdiri di depan manakala masyarakat berhadapan dengan sebuah kondisi tak nyaman akibat adanya aktifitas yang melanggar *hukom*.

Sekali waktu setelah shalat magrib, peneliti yang berada diantara jemaah shalat melihat beberapa orang terlihat geram dan emosi atas perbuatan beberapa orang dari *gampong* luar terlihat bermain judi di salah satu warung di tepi sungai *krueng Meureudu*. Kegusaran itu disampaikan kepada *teungku imuem*, lalu dibawah koordinasinya disusun rencana bersama agar perbuatan itu dihentikan. Diluar dari itu, terlihat keterbatasan para pemuka agama dan adat dalam mewujudkan dirinya menjadi figur sentral sebagai pembaharu di bidang budaya kerja yang positif dan produktif.

Para tokoh belum dapat mengartikulasikan semua nilai-nilai yang terpelihara dalam agama dan adat tradisi menjadi sumber daya yang mampu menggerakkan masyarakat menjadi lebih spartan, kreatif dan agresif membentuk aktifitas-aktifitas yang memberi keuntungan finansial. Keterbatasan tersebut ditenggarai bukan disebabkan oleh pemahaman agama, namun visi tersebut belum menjadi bagian dari kepemimpinan seorang tokoh.

6.4. Aspek Dukungan dan Hambatan Lingkungan Eksternal

Lingkungan luar memberikan dampak bagi masyarakat gampong Meunasah Balek dalam bekerja, baik dampak pendukung maupun dampak

penghambat. Sesuai kondisi masyarakat Meunasah Balek yang satu sama lain berada dalam suasana akrab dan saling terhubung satu sama lain, meskipun bidang yang menjadi lahan pekerjaan pokok mereka berbeda satu sama lain. Namun pada dasarnya, isu-isu yang beredar di kalangan mereka dapat dengan cepat dipahami satu sama lain.

6.4.1. Aspek Pendukung

Diantara isu dan kebijakan pemerintah yang dinilai menjadi aspek yang mendorong masyarakat berada dalam aktifitas tinggi dalam bekerja adalah kebijakan pembentukan pemerintah kabupaten Pidie Jaya. Munculnya pusat pemerintahan kabupaten mendorong bertambahnya populasi penduduk di tempat ini. Meunasah Balek menjadi salah satu gampong yang menikmati keadaan itu. Pertambahan jumlah pegawai pemerintahan, berimbas pada meningkatkan kebutuhan rumah kontrakan atau penyewaan kamar kos. Meskipun menurut pengamatan peneliti, tidak semua masyarakat dapat menikmati peluang ini. Beberapa orang yang dikenal membuka usaha penyewaan kamar atau kos, adalah orang-orang yang telah lebih dahulu sukses. Diantaranya mereka adalah pegawai negeri, bidan dan petani tambak sukses.

Disisi lain, pertambahan jumlah penduduk di siang hari karena kehadiran aktifitas bekerja pegawai pemerintahan telah mendorong munculnya usaha-usaha rumah makan.

6.4.2. Aspek Penghambat

Lingkungan luar sekaligus memberi dampak buruk, seperti meningkatnya harga penyewaan toko serta meningkatkan harga tanah karena perubahan Meureudu dari ibukota kecamatan menjadi ibukota kabupaten. Pengharapan yang berlebihan atas kehadiran ibukota kabupaten, telah membuat sebagian bidang usaha kerja masyarakat terganggu. Tingginya harga sewa tidak diimbangi dengan meningkatnya transaksi perdagangan. Mengandalkan pembeli penduduk lokal, membuat pasar hanya bergairah pada musim panen dan pada saat nelayan mengalami penangkapan ikan yang lebih baik.

Kebijakan yang dianggap keliru dan selalu menjadi ganjalan bagi masyarakat nelayan adalah pembangunan infrastruktur pasar di TPI Meureudu dan kebijakan pengadaan stasiun pengisian bahan bakar solar bagi kebutuhan kapal penangkap ikan. Pasar dianggap tidak memberi manfaat maksimal karena terletak pada tempat yang tidak strategis, bahkan dianggap tidak memenuhi estetika lingkungan setempat karena membelakangi kantor pemerintah yang menangani urusan perikanan. Terbilang lainnya stasiun pengisian bahan bakar yang disiapkan dengan dana pemerintah, sangat disayangkan oleh masyarakat.

Beberapa nelayan yang berpengalaman di bidang usaha pengisian bahan bakar mengajukan penawaran agar dapat mengelola stasiun tersebut. Namun ditolak dengan alasan birokrasi yang sulit dimengerti. Menurut pengamatan dan wawancara peneliti, diketahui bahwa pihak BRR yang membangun instalasi tersebut, berharap bahwa stasiun pengisian bahan bakar tersebut dikelola oleh koperasi masyarakat setempat. Hasilnya dapat dinikmati bersama oleh masyarakat. Namun, aspek formalitas yang mengemuka. Koperasi dibentuk hanya sekedar memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur. Perlengkapan yang dibeli dapat dikatakan tidak memberi manfaat sama sekali bagi aktifitas kerja pendukung masyarakat nelayan.

6.5. Diskusi

Dari uraian deskriptif kehidupan masyarakat Pidie sehari-hari menunjukkan adanya keberagaman tindakan kerja. Meskipun aktor berinteraksi dan bersosialisasi dalam sosio kultural dan struktur sosial yang sama namun pada akhirnya memiliki keragaman. Perbedaan yang paling nyata adalah munculnya aktor-aktor yang berhasil membangun ekonomi melalui tindakan kerjanya dan terjerembabnya sebagian besar aktor-aktor yang lain dengan berbagai halangan dan rintangan untuk membangun ekonomi diri mereka sendiri karena berbagai alasan yang melingkarinya.

Pada dasarnya setiap aktor individu dalam masyarakat Pidie berangkat dari titik keadaan yang sama, yaitu berbekalkan semangat kerja yang tinggi dalam mengolah sumber-sumber kehidupan baik dari bidang pertanian, perikanan

ataupun perdagangan. Hanya sebagian kecil yang berkesempatan menjadi pegawai negeri, karena Meureudu dan sekitarnya hanya terdapat kantor-kantor pemerintahan kecamatan dengan kebutuhan pegawai yang minim. Itupun sebagian besar direkrut di pusat pemerintahan kabupaten atau provinsi, yang jauh dari akses pengetahuan mereka. Bila ternyata kemudian muncul aktor-aktor yang berhasil membangun ekonominya, itu lebih disebabkan sebuah keberhasilan individual yang menunjukkan tindakan rasionalitas yang kemampuan intelektual baik yang diperoleh lewat pendidikan formal ataupun lingkungan sosial.

Tindakan-tindakan aktor dalam berkerja menunjukkan improvisasinya mensiasati sisi-sisi lemah dari kebiasaan dan tabiat kerja masyarakat Pidie yang telah mereka sadari. Meskipun pada dasarnya masyarakat Pidie pada khususnya dan Aceh pada umumnya, merupakan masyarakat pekerja, dimana hal itu ditunjukkan oleh keberadaan *keuchik*, *kejruen blang*, *peutua seunebok* dan *panglima laot* sebagai institusi-institusi sosial dalam struktur sosial masyarakat Pidie yang menjalankan fungsi mengatur dan memelihara harmoni, keselarasan dan ketertiban antar aktor dalam bekerja. Aktifitas bekerja dalam orientasi produksi melalui pengolahan sumber-sumber alam, seperti sawah, kebun ladang dan laut diatur oleh insitusi-institusi adat tersebut. Demikianpun halnya pemasaran produk hasil pertanian, perkebunan dan perikanan dimaksud dalam skala sederhana dikoordinasikan oleh institusi *haria pekan* untuk menjamin ketertiban proses bertemunya penjual dan pembeli di pasar-pasar rakyat. Namun terbiasa bekerja dalam orientasi berproduksi semata tak dapat dianggap syarat cukup untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi dalam kondisi kekinian yang penuh tekanan, tantangan dan kompetisi.

Pergaulan masyarakat dunia telah menempatkan uniformitas perpektif dalam menilai kemajuan atau keterbelakangan ekonomi suatu masyarakat disudut bumi manapun mereka berada. Demikian halnya masyarakat Pidie, sebagian besar masyarakatnya disebut dalam kondisi miskin yang diukur menurut indikator-indikator tertentu. Data yang diberikan BPS dan World Bank demikian adanya, dimana salah satu aspek yang diperhatikan jumlah pendapatan atau pengeluaran masyarakat Pidie guna membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam

melangsungkan kehidupannya. Sementara itu, fakta empirik menunjukkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie yang berlangsung dalam tradisi-tradisi lama yang sederhana dan bersahaja.

Sebagian besar informan memandang diri mereka (masyarakat Pidie) tidak miskin. Argumentasi yang mereka bangun adalah tidak ada masyarakat Pidie yang mati karena kelaparan, tidak ada masyarakat yang harus tinggal di rumah-rumah kardus dan tidak ada masyarakat yang sampai tidak mengenakan pakaian “compang-camping” akibat tidak mampu membeli pakaian. Namun sebagian besar mengakui bahwa sebagian besar masyarakat Pidie hidup dalam sistem kekeluargaan yang satu sama lain saling menjaga dan saling memberi sehingga walaupun seorang diantara mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap saja tidak akan muncul kekhawatiran-kekhawatiran seperti takut akan menderita lapar, tak punya hunian tempat berteduh atau khawatir akan malu karena mengenakan pakaian-pakaian tak layak.

Namun demikian, mereka mengakui adanya sikap menempatkan target-target sederhana dalam bekerja. Misalnya, bekerja hanya untuk memperoleh pendapatan sekedar cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga selama satu atau dua hari. Selanjutnya mereka langsung menggunakan waktunya untuk berkumpul dengan kawan-kawannya di kedai kopi sembari menikmati secangkir kopi, bercengkrama, membaca koran ataupun menyimak berbagai sajian acara televisi yang memang disediakan oleh para pemilik kedai kopi dalam menarik minat pengunjung. Disamping itu, bilamana pendapatan yang dimiliki dirasa menggembirakan karena jauh di atas target yang diharapkannya maka segera digunakan secara konsumtif. Mereka membelikan apa saja yang sebenarnya bukan barang-barang yang perlu dan mendesak pengadaannya. Kurang bijak dalam mengelola dana pendapatan, menjadikan sebagian besar masyarakat Pidie sulit memulai usaha-usaha produktif sampingan pekerjaan utamanya, akibat rendah bahkan tidak adanya akumulasi modal.

Sejalan dengan tradisi bekerja yang sedemikian rupa, diantara aktor yang berhasil mensiasati dan menutupi sisi lemah tersebut sehingga dapat menjadi “ureung kaya” tidak serta merta melakukan berbagai tindakan-tindakan ekonomi

rasionalitas yang mengejar keuntungan pribadi dan mengabaikan batasan-batasan norma agama dan adat yang membekali timbang rasa kepatutan dan kepantasan dalam menegakkan komitmen hidup harmonis dalam kebersamaan. Budaya *hedonisme* dan *materealisme* belum menjalar dalam kehidupan masyarakat Pidie. Dalam batas-batas tertentu “*ureung kaya*” di Pidie mengungkapkan simbol status sosialnya dalam membangun rumah besar dengan model yang mencirikan kemampuan ekonominya. Diluar itu, terkadang mereka memiliki mobil keluaran terbaru yang bermerek terkenal menurut selera dan perspektif mereka sendiri. Namun dalam keseharian beraktifitas dan berinteraksi, mereka biasanya hanya menggunakan kendaraan roda dua.

Kondisi-kondisi yang tidak menjadikan materi sebagai standar tertentu yang harus dicapai dalam hidup, membuat situasi sosial yang tidak memperlihatkan perbedaan mencolok antara masyarakat yang menempati strata sosial tinggi (*ureung kaya*), menengah (*ureung sep pajoh*) dan rendah (*ureung gasin*). Hubungan-hubungan sosial antar strata tersebut berjalan dengan cair, hal itu dikarenakan diantara mereka masih terjalin hubungan pertalian darah dan kekerabatan yang cukup erat. Tidak terlihat pemisahan aktifitas yang menyerupai adanya semacam kasta yang memisahkan antar mereka. Sehingga mereka yang tergolong sukses tidak menunjukkan kesuksesan ekonominya, demikianpun masyarakat yang berada dalam kondisi keterbelakangan ekonomi tidak merasa dirinya terbelakang. Kondisi ini tidak menimbulkan rasa kecemburuan yang positif untuk menggerakkan masyarakat terbelakang secara ekonomi tersebut untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pola kerja mereka.

Sejalan dengan itu, keberhasilan sebagian kecil masyarakat sebagai aktor-aktor yang mampu bangkit membangun ekonomi dirinya sendiri belum dapat dikatakan sebagai keberhasilan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Meskipun dalam batas-batas tertentu dapat dijelaskan bahwa penyediaan berbagai fasilitas infrastruktur seperti jalan yang baik dan TPI bagi aktifitas nelayan turut memberi kemudahan bagi pergerakan-pergerakan aktor dalam aktifitas ekonominya. Namun dalam bentuk yang spesifik, dalam artian lahirnya sebuah kebijakan yang mampu melindungi dan mendorong masyarakat

mendapatkan hasil pendapatan yang berlipat dari praktek tindakan kerja kerasnya dapat dikatakan belum ada.

Masalah utama dari gejala keterbelakangan ekonomi masyarakat Pidie, terletak pada struktur sosial. Meskipun demikian, secara sosio kultural masyarakat tidak merasakan kondisi kehidupan sosial ekonomi mereka sebagai sebuah masalah. Hal ini disebabkan karena sejauh ini masyarakat dapat menikmati kehidupan sosial dengan tanpa merasa kekurangan yang berarti, paling tidak itu dirasakan menurut pandangan dan pemaknaan subyektif mereka sendiri. Namun demikian, proses dan *output* pemakmuran masyarakat tetap menjadi tanggung jawab negara sebagai kekuatan pada struktur sosial level makro. Se jauh ini bila dirujuk pada historitasitas perjalanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie, maka dapat dikatakan bahwa intervensi kebijakan pemerintah sebagai kekuatan di level makro belum memberikan perubahan berarti bagi pemajuan kehidupan ekonomi masyarakat Pidie.

Sebelumnya pada masa-masa pemerintahan negeri yang dikendalikan oleh *ulee balang* (bersama ulama) masyarakat Pidie telah merasakan kemajuan ekonomi, paling tidak dilihat dari maraknya aktifitas produksi masyarakat. Hal itu terjadi karena struktur sosial mengkondisikannya sedemikian rupa, sehingga pada satuan kehidupan masyarakat tingkat dasar (*gampong*) dibentuk institusi-institusi yang mengatur harmonisasi tindakan kerja antar aktor di semua bidang-bidang mata pencaharian utama. Institusi-institusi itu berfungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu, dimana kepentingan ekonomi yang utama adalah memenuhi kebutuhan diri sendiri dan bila jumlah produksi melebihi kebutuhan maka dijadikan bahan kepentingan perdagangan dan keperluan lain.

Proses perubahan sosial yang terjadi antara tahun 1873 hingga 1946 merubah struktur sosial masyarakat Aceh, dimana struktur sosial mengalami pergeseran. Institusi-institusi sosial baik itu yang berbasis pada adat maupun yang berbasis pada agama seluruhnya dialihkan fungsinya dari menjaga harmoni kehidupan sosial ekonomi menjadi berfungsi menyediakan sumber-sumber untuk menggencarkan perlawanan dan menggelorakan peperangan dengan pihak musuh. Hingga pada akhirnya, sinergitas ulama dan uleebalang terpecah akibat polarisasi

dan kontestasi kekuasaan. Situasi ini berakhir dengan tersingkirnya *uleebalang* yang berkuasa secara turun temurun dari struktur sosial masyarakat. Tersingkirnya *uleebalang* mengakhiri model kepemimpinan negeri ala *monarchi* lokal yang disatu sisi memiliki keunggulan-keunggulan dalam penguasaan masalah lokal dan kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat sasaran.

Setelah tersingkirnya *uleebalang* dari struktur sosial, posisinya digantikan oleh pejabat pemerintahan yang dipilih oleh masyarakat secara berkala. Sisi lemahnya adalah bilamana yang terpilih bukan orang yang berakar pada masyarakat pemilih, maka struktur sosial tidak bekerja lebih banyak untuk memberikan hasil maksimal bagi penanganan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini semakin menjauhkan masyarakat dari kemajuan, seiring dengan itu tingkat kepercayaan masyarakat atas otoritas pemerintahan juga semakin lemah.

Dalam kondisi demikian, persoalannya lainnya yang lebih rumit adalah “pembekuan” beberapa institusi sosial di tingkat gampong yang dilakukan pemerintah pasca perang kolonial. Model penyeragaman pemerintahan desa melalui yang dilakukan pada tahun 1979 telah merusak tatanan institusi-institusi sosial dalam kehidupan masyarakat gampong. Akibatnya institusi ini mengalami diskontinuitas fungsi dan mandeg dalam beradaptasi terhadap dinamika perubahan-perubahan kebutuhan masyarakat terkini. Inilah salah satu alasan yang dapat menjelaskan mengapa institusi ini tidak dapat mengimbangi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat Pidie saat ini, meskipun institusi-institusi lokal telah diaktifkan kembali oleh Pemerintah setelah gelombang reformasi. Bahkan bagi Provinsi Aceh yang memperoleh otonomi khusus, menempatkan institusi ini sebagai simbol kemenangan perjuangan mengembalikan marwah masyarakat Aceh.

Untuk mengurai gejala sosial tersebut, dapat dipinjam pemikiran Nee (2005) guna mendapatkan penjelasan atas dinamika kehidupan sosial ekonomi masyarakat Pidie yang dalam kondisi tertentu dapat dikatakan mengalami kegagalan pemajuan taraf kehidupan ekonomi. Nee menjelaskan bahwa kegagalan terjadi karena disharmoni hubungan dari level makro (*policy environment*) terhadap institusi informal atau organisasi di level meso hingga ke

level mikro (individu). Dengan kata lain, ketidakberhasilan pemajuan ekonomi yang berlangsung pada masyarakat Pidie terjadi akibat kerusakan salah satu mekanisme integrasi (*decoupling*). Institusi formal tak berhasil sepenuhnya berinteraksi dengan *social network* dan norma-norma sosial yang sifatnya informal dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi individu aktor. Kerenanya, lingkungan institusi dan budaya dipandang penting dalam membentuk tingkah laku ekonomi masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini berposisi sebagai lingkungan kebijakan tidak sepenuhnya memahami bagaimana proses ekonomi masyarakat berlangsung. Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat, sejauh ini Pemerintah lebih menekankan perhatian pada penyediaan stimulan keuangan serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur fisik. Persoalan mendasar menyangkut masalah struktur sosial dan sosio kultural yang berkelindan dengan tindakan-tindakan ekonomi masyarakat cenderung dabaikan dari proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Kurangnya perhatian terhadap aspek sosial, tidak terlepas dari wujudnya yang abstrak. Sejalan dengan itu, persoalan-persoalan sosial yang mengakar pada struktur sosial bukan pula sesuatu gejala yang disadari oleh masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan ekonomi. Karenanya masyarakat tidak menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi atas masalah struktur sosial yang menghambat kemajuan ekonomi mereka. Kesadaran itu, hanya mungkin diperoleh dari kajian dan penelitian ilmiah sosial. Persoalan berikutnya adalah sejauh mana pemerintah memiliki kemauan untuk memperhatikan dan menggunakan hasil-hasil penelitian sosial terkait aspek pendukung dan penghambat pembangunan ekonomi guna dituangkan dalam perumusan rencana pembangunan masyarakat di bidang sosial.

Sementara itu, kelihatannya pemerintah lebih memilih menginvestasikan dana pembangunan pada proyek-proyek fisik yang memungkinkan mereka memperoleh hasil dalam tempo relatif pendek. Selain proyek fisik, lebih memudahkan dalam pengukuran *progress* realisasinya. Sebaliknya, mengukur realiasi dan keberhasilan proyek-proyek pembangunan sosial bukanlah hal yang

mudah. Disamping itu, hasil dari proyek sosial baru terlihat dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi-kondisi demikian, menjadi latar mengapa para perencana pembangunan di kalangan birokrat lebih banyak memperhatikan pembangunan fisik daripada pembangunan sosial budaya. Keadaan itu pula, dapat menerangkan mengapa penggunaan dana PNPM Mandiri didominasi oleh proyek-proyek pembuatan jalan-jalan dusun atau lingkungan.

Persoalan mendasar menyangkut struktur dan sosio kultural dalam kehidupan sosial masyarakat justru luput dari penanganan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada ketidakmampuan institusi formal dalam berinteraksi dengan *social network* dan norma-norma sosial yang sifatnya informal dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi individu aktor secara masif dan massal. Lingkungan kebijakan, dalam hal ini pemerintah lokal tidak memiliki kepekaan untuk merumuskan langkah-langkah guna merangsang perluasan fungsi institusi-institusi sosial yang telah eksis dan diterima masyarakat *gampong*.

Dalam hal ini, peneliti melihat setidaknya terdapat dua penekanan penting yang perlu digaris bawahi. Pertama, proses mengintegrasikan kepentingan agama dengan kepentingan ekonomi yang menjadi *domein* institusi keagamaan semacam *imuem meunasah*, *imuem-imuem chiek* atau *dayah*. Salah satu babak sejarah masyarakat Aceh menunjukkan bahwa isu-isu agama begitu sensitif, dimana ia mampu menyedot perhatian serta mampu melahirkan tindakan-tindakan sosial “powerfull”. Karenanya, institusi keagamaan idealnya dapat meramukan penjelasan dalam dakwah dan sosialisasi lain bahwa kepentingan ekonomi adalah kepentingan agama, demikian sebaliknya. Dalam tataran abstrak, tak ada kebaikan akhirat dunia tanpa di dahului kebaikan di dunia. Kebaikan dunia tak terlepas dari kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini hanya dapat terjadi dengan peningkatan kapasitas pengetahuan dan perluasan pandangan serta pemahaman pada setiap aktor yang berada institusi keagamaan.

Sekedar perbandingan dalam situasi konflik kekuasaan Sultan-Ulee balang Lhee Sago disatu sisi dengan Belanda di sisi lain. Terjadi koalisi ulama dan *Uleebalang*, yang mendorong ulama sebagai elit struktur paling berpengaruh untuk mengambil tindakan mengemas agama dan pandangan adat menjadi suatu

paket yang sangat kontributif untuk menggerakkan masyarakat Aceh secara massal. Meskipun dalam perang taruhannya adalah kematian. Dengan keadaan yang sama, sebuah kondisi jihad yang mengorbankan lelah dan peluh bukanlah suatu hal yang lebih berat dari jihad masa perang Aceh-Belanda. Hanya saja kepiawaian tokoh pemuka sangat diperlukan untuk cerdas mengemas nilai-nilai tersebut menjadi menarik, logis dan transformatif sehingga perang baru merupakan perang massal melawan kebodohan dan kemiskinan.

Menurut pengamatan peneliti, terdapat satu kendala yang mendasar pada level gampong yaitu dalam batas-batas tertentu terjadi sekulerisasi institusi-institusi sosial non agama. Misalnya saja, *imuem meunasah* menangani masalah *hukom* dan melayani ritual-ritual agama yang dilakukan masyarakat. Sedangkan urusan non hukom-ritual agama tingkat *gampong* dipegang oleh institusi lain, sebut saja *keuchik* bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan adat. *Kejruen blang*, *peutua seuneubok* atau *panglima laot* bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan harmonisasi pekerjaan menurut tradisi adat yang berlaku. Disisi lain, masyarakat Aceh mengakui bahwa Islam memiliki pengaturan seluruh bidang kehidupan, Namun dalam struktur sosial, hal itu dinegasikan dengan dipisahkannya penanggung jawab agama dan non agama dalam kedudukan setara. *Imuem meunasah* tidak mengambil tempat lebih tinggi atau lebih rendah dari seorang *keuchik*. Peneliti menduga bahwa *keuchik* adalah institusi yang telah lebih dahulu eksis sebelum Islam menjadi agama masyarakat di kawasan Pidie pada khususnya, Aceh pada umumnya.

Kelihatannya kondisi itu “tertangkap” Hurgronje (1985) yang menyebutkan bahwa kehidupan agama masyarakat Aceh di awal abad ke 19, terpisah atas tiga bidang agama murni, muamalat dan politik. Ketiganya tidak saling berhubungan dan mempengaruhi. Urusan yang menyangkut ritual ibadah dan hubungan antara sesama manusia dalam konteks hukum *fikh* senantiasa terpelihara hingga hari ini. Namun, sebenarnya kolonial Belanda berkepentingan memisahkan mengunci Islam di ranah agama murni semata. Islam tidak dilibatkan untuk urusan-urusan selain ibadah dalam arti sempit. Hal inilah yang tersisa hingga hari ini, dimana ulama terjebak dengan urusan menjalankan tanggung jawan ibadah mahdhah. Ulama berusaha tidak terlibat dalam urusan sosial ekonomi.

Saat ini, dalam batas-batas tertentu ulama terlibat dalam bidang politik saat ini mana terjadi tarik menarik dan polarisasi kepentingan politik praktis dalam kompetisi pilkada.

Kedua, perluasan fungsi-fungsi institusi yang bersifat teknis produksi yang selama ini berbasis pada peraturan adat. Institusi-institusi semacam *kejruen blang*, *peutua seuneubok* atau *panglima laot* digariskan oleh adat untuk menjalankan fungsi-fungsi harmonisasi, kekompakan dan mengatur lalulintas kepentingan aktor dalam kegiatan produksi menurut bidang sumber nafkah penghidupan masing-masing. Fungsi itu hingga hari ini belum berubah, meskipun perkembangan kehidupan masyarakat telah memperluas orientasinya hingga *marketing* produksi. Ragamnya kebutuhan-kebutuhan non pangan, telah mendorong tindakan-tindakan aktor untuk segera mengkonversikan hasil produksi dengan sejumlah uang. Bahkan, sebagian aktor petani berani melepas sebagian besar produksinya sehingga mengorbankan kepentingan jaminan ketersediaan konsumsi pangannya sendiri.

Demikian halnya, sebagian nelayan kaya yang digelar *tauke* justru telah melangkah lebih jauh dari apa yang dilakukan seorang *panglima laot*. Kreatifitasnya telah mendorongnya mencari pasar dengan cara membuka jaringan kerja dengan Medan atau kota lainnya. Sembari itu, untuk menjaga harga ikan dapat stabil disadari untuk penyediaan fasilitas *storage* di Meureudu. Hal-hal semacam inilah yang perlu dirangsang oleh Institusi formal agar terjadi perluasan fungsi mengikuti dinamikan kebutuhan masyarakat pekerja terkini. Memang tidak dikesampingkan fakta adanya aktor-aktor yang berpikir cepat sehingga mereka telah melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Namun, mereka bergerak secara individual dan tidak memberikan efek meluas bagi seluruh nelayan.

Diluar itu, tidak dikenali institusi yang berfungsi membantu manajerial pengelolaan pendapatan masyarakat. Artinya, masyarakat dibiarkan untuk mengelola pendapatannya menurut kadar kemampuannya sendiri. Karena itu dirasa perlu untuk menghadirkan institusi dimaksud, dengan inisiatif dari masyarakat itu sendiri (*button up*). Keberadaan beberapa toko atau pedagang emas di Meureudu serta adanya kebiasaan membeli dan menjual emas yang dilakukan

masyarakat petani dan nelayan, menjadi petunjuk adanya manajemen pengelolaan pendapatan secara tradisional. Ini merupakan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Pidie. Setidaknya, diketahui bahwa tindakan ini ditujukan agar nilai simpanannya terjaga dari inflasi atau pengurangan nilai uang. Disamping itu, sekali waktu emas menjadi simbol dari strata sosial keluarga dari wanita yang memakainya di acara-acara besar.

Bilapun jaringan pedagang jual beli emas dapat disebut institusi sosial ekonomi warga gampong, maka ia berfungsi membantu kemudahan bagi masyarakat yang mengkonversikan kelebihan pendapatan dengan sejumlah emas. Dimana investasi itu dapat dilepas kembali pada pedagang emas, saat mana pemilik investasi merasa butuh dana segar untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang tak dapat dibayar dengan emas. Dalam kesehariannya, masyarakat Pidie hingga hari ini, masih menjalankan kebiasaan meminjamkan atau memberi hutang dalam bentuk emas. Proses hutang piutang ini, lebih tepat disebut tindakan menggadaikan (*peuagala*) yang aset tak bergerak yaitu seperti tanah sawah atau kebun sebagai jaminan yang diiringi hak pengelolaan dan pengambilan hasil. Pengembaliannya harus dilakukan dalam bentuk emas dalam jumlah yang sama.

Memperhatikan beberapa tingkah laku ekonomi masyarakat Pidie, sebagian dapat dikatakan maju. Namun secara khusus itu berlaku pada aktor masyarakat yang dapat mengelola diri dan membangun usaha dengan kejelian melihat pasar. Salah satu contoh adalah upaya membina jaringan dagang dengan usaha dagang di Medan. Secara umum, tindakan-tindakan ekonomi ini adalah murni inisiatif dan kreatifitasnya aktor itu sendiri. Ia dapat memberi manfaat hanya dalam batas *group* nya sendiri atau tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, tindakan ekonomi yang kolektif hanya akan terbentuk bila pemerintah memperhatikan struktur sosial masyarakat Pidie yang telah mengendur dan terlihat tidak dalam keseimbangan untuk melaku menjawab tekanan ekonomi dari lingkungan luar.

Bagaimana aktor bertindak, tidak terlepas dari lingkungan sosial yang diperoleh dari asal mana aktor tersebut lahir, tumbuh berkembang dalam didikan keluarga, lembaga pendidikan formal dan lingkungan sekitar tempat ia berada.

Pelapisan sosial dalam masyarakat Pidie cenderung merujuk pada pelapisan sosial selayaknya yang terdapat di gampong-gampong. Perbedaan dilihat dari jenis ragam pekerjaan yang dilakoni, seperti petani (*ureueng meugo*), pedagang (*ureung meukat*), nelayan (*ureung melaot*), tukang (*utoh*), birokrat dan militer (Melalatoa, 2005). Belakangan disebutkan munculnya pelapisan baru lain yang mengemuka setelah munculnya mantan *combat* GAM sebagai pejabat politik, politisi di legislatif dan *kontraktor*. Kelompok terakhir disebutkan menguasai tiga aspek pelapisan sosial, dimana mereka merengkuh kekuasaan, menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat dan menonjolkan diri dengan prestise berikut atribut-atribut kebesaran.

Pelapisan yang demikian terjadi di Pidie, dapat dipahami akibat kawasan Pidie yang tidak mengalami kemajuan *progresive* seperti yang dialami Banda Aceh akibat posisinya sebagai ibukota provinsi ataupun seperti yang dialami Lhokseumawe (Aceh Utara) yang berkembang pesat akibat *booming* gas alam cair yang mendorong munculnya industri besar lainnya. Masyarakat. Bilapun beberapa tahun terakhir, sebuah kebijakan otonomi daerah diberikan untuk membuka kesempatan pengembangan masyarakat Pidie yang berdiam di kawasan ini. Namun secara struktur sosial, belum mengalami perubahan berarti kecuali munculnya pelapisan baru yang menunjukkan hegemoni mantan *combatan* GAM.

Sejalan dengan itu, dalam kehidupan sehari-hari menyangkut perbedaan kepemilikan materi kekayaan dalam kehidupan masyarakat Aceh (Pidie) menimbulkan tiga pelapisan lainnya yaitu orang kaya (*ureung kaya*), kelompok sederhana berkecukupan (*ureung sep pajoh*) dan kelompok masyarakat miskin (*ureung gasin*). Namun persepsi miskin di gampong Meunasah Balek, tidaklah seekstrim dibayangkan. Mereka memiliki rumah, pakaian dan masih menikmati makan secara lumrah sebanyak tiga kali sehari. Keterkungkungan sebagian yang disebut *ureung gasin* lebih disebabkan mereka terjebak pada tertutupnya peluang untuk bangkit dari kemiskinan akibat rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengelolaan usaha yang tepat. Disamping itu sempitnya peluang usaha juga terkait dengan terbatasnya pemasaran atas produk-produk yang diusahakan. Sebagian

dari mereka hingga penelitian ini berlangsung, berkerja membuat tikar pandan di sela-sela bekerja di sawah atau berjualan di TPI Meureudu, namun pemasaran yang tak menjanjikan menjadikan perputaran modal menjadi kritis.

Perbedaan-perbedaan tingkat kehidupan yang saat ini dialami oleh masyarakat Pidie, tidak terlepas dari apa yang diperolehnya dari lingkungan tempatnya berada. Kontestasi dengan sesama dalam memperebutkan modal sedikit banyak ditentukan oleh pengalaman, wawasan- pengetahuan, jaringan, kemampuan mengelola usaha. Secara keseluruhan aspek-aspek tersebut merupakan akumulasi dari rangkaian situasi sosial yang terdapat di kawasan Pidie. Sebagaimana disebutkan pada Bab 4 bahwa Pidie menjadi kawasan dimana pertarungan dan perlawanan politik terjadi. Wujud akhir dari permasalahan tersebut untuk sementara ini adalah terganggunya struktur sosial secara berkepanjangan.

Gangguan itu, semakin lengkap dengan ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat atas fasilitas, sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi yang menyebabkan terbentuknya atau tertahannya sosio-kultural masyarakat sebagaimana saat ini berlaku. Hal ini mungkin dialami oleh masyarakat yang berdiam di kawasan lainnya di provinsi Aceh, kecuali Banda Aceh dan Lhokseumawe. Namun, sebuah pengecualian kemajuan bagi Pidie yang diapit oleh dua kota tersebut adalah sebuah dampak dari proses yang dibangun kekuatan lingkungan kebijakan atau institusi formal. Karenanya melengkapi pemikiran Nee (2005) bahwa perlu perhatian pada : pertama, konsistensi level meso dan makro untuk menegakkan peraturan adalah basis penting untuk menautkan hubungan dengan level mikro. Terutama dalam aspek nilai dan norma sebagai kekuatan yang dapat mendorong tindakan ekonomi. Kedua, kebijakan institusi formal yang mengambil kebijakan tertentu kepada pihak yang “berseberangan”, semisal tidak memberi atau mengalokasikan dana pembangunan ekonomi baik proyek fisik maupun non fisik. Bentuk “*punishment*”

pada sebuah kawasan semacam ini ini menghasilkan sebuah kondisi dimana masyarakat kesulitan meraih insentif sebagaimana dimaksud Nee.



BAB 7

DISKUSI, REFLEKSI DAN IMPLIKASI TEORITIS

7.1. Diskusi dan Refleksi

Terjadinya gejala kemiskinan pada sebuah kawasan yang dilanda konflik dari berkepanjangan pada dasarnya adalah sebuah keniscayaan. Konflik telah mengganggu keseimbangan dan merusak harmoni kehidupan sosial, keadaan mana struktur sosial turut mengalami perubahan-perubahan. Telepas dari periodeisasi waktu dimana terdapat peneliti berusaha membuat pembabakan histori dinamika kehidupan sosial masyarakat Aceh terkait perebutan kekuasaan demi kepentingan-kepentingan ekonomi pada sebuah wilayah yang dianggap strategis karena persis berada di pintu masuk kawasan Asia Tenggara.

Sejak tahun 1873 masyarakatnya ditempat ini hampir tak diberi kesempatan untuk menikmati rasa aman. Invansi militer Kerajaan Belanda sebagai awal dari instabilitas besar yang melanda kawasan ini, bersambung dengan kerasnya benturan dengan tentara pendudukan Jepang periode waktu 1942-1945. Konflik *ulee balang* dan ulama periode 1945-1949 di tengah tekanan mempertahankan masuknya kembali tentara Belanda dan sekutu di Medan Area.

Berlanjut dengan situasi lainnya pada tahun 1953 hingga 1957, letupan ketidakpuasan Daud Beureueh atas peleburan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara diwujudkan dengan menggerakkan seluruh kekuatan di bawah pengaruhnya untuk mendirikan negara Islam DI/TII. Selanjutnya antara 1976 hingga 2005, praktis tidak ada stabilitas keamanan sepenuhnya di Aceh akibat Gerakan Aceh Merdeka dibawah kepemimpinan Muhammad Hasan Tiro. Meskipun perlawanan tidak berlangsung sporadis dalam kekuatan besar, namun dukungan secara perlahan semakin menguat diperoleh Tengku Hasan Tiro setelah era reformasi tahun 1998. Dalam rentang masa konflik yang panjang itu, Pidie adalah sebuah kawasan yang selalu menjadi pusat pusaran konflik. Pidie menjadi tempat dimana elit pelakunya berasal atau setidaknya menjadi tempat dimana elit berkonflik bertahan dan menyerang lawan-lawannya. Karenanya adalah sebuah hal yang lazim bilamana kemudian Pidie mendapatkan semacam “kebijakan khusus” sesuai kontribusinya kepada kekuasaan negara.

Proses konflik yang panjang dan menghabiskan waktu lebih dari 130 tahun telah membentuk empat generasi masyarakat Pidie, mereka dilahirkan dan dibesarkan dalam situasi pusaran konflik. Masyarakat Pidie yang saat ini ditemui menjadi pemuka di segala sektor pekerjaan dapat dikatakan sebagai generasi ketiga, mereka menjadi subyek sekaligus obyek dari sebuah kawasan yang berlabel perkampungan kaum pejuang atau bahkan oleh pihak lawan disebut kampung pemberontak. Hal ini secara alamiah mendorong terbentuknya masyarakat yang berorientasi sederhana, mereka cenderung menghindari hal-hal yang hal-hal yang rumit dan kompleks. Karena memang sedikit waktu untuk hal-hal besar lebih dari sekedar mempertahankan hidup (*survive*).

Dengan kata lain, masyarakat tetap berusaha bekerja, namun tanpa sadar membatasi diri pada target-target pencapaian tujuan atau kepentingan jangka pendek semata. Hal itu terkait dengan struktur sosial, historisitas lokal telah membawa institusi sosial yang berorientasi adat pada sebuah keadaan stagnan. Selama masa konflik kolonial, institusi difungsikan untuk mendukung dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi kebutuhan perang. Selanjutnya kebijakan penyeragaman model pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 praktis menghilangkan secara formal institusi adat dan insititusi agama di level gampong.

Setelah reformasi, praktis institusi lokal diakui dan dihidupkan kembali. Namun keadaan sosial sudah jauh berubah, sementara institusi sosial di gampong masih bertahan pada fungsi-fungsi klasik. *Keuchik* lebih cekatan dalam mengatur harmoni kegiatan masyarakat kegiatan pemerintahan adat, daripada mengurus beban tanggung jawab administratif pemerintahan moderen. *Kejreun blang*, *peutua seunebok* dan *panglima laot* lebih berorientasi pada kegiatan mengatur harmoni kegiatan ekonomi produksi masyarakat. Tanpa perhatian pada proses pasca produksi atau (marketing).

Demikianpun *imeum meunasah* sebagai institusi sosial keagamaan, lebih fokus pada kegiatan-kegiatan melayani kebutuhan aktifitas masyarakat yang berkenaan dengan agama (*hukom*), tanpa terlibat lebih terhadap persoalan-persoalan masyarakat di luar aspek ibadah *mahdhah*. Terkait dengan agama,

Islam menjadi agama yang dianut secara turun temurun oleh masyarakat Pidie. Rentang sejarah telah menunjukkan kekuatan keyakinan (akidah) yang dimiliki masyarakat Pidie. Menyangkut dengan syariah Islam itu sendiri tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang terpisah dari aktifitas cara hidup sehari-hari. Ungkapan bahwa adat tradisi masyarakat Aceh telah menyatu dengan ketentuan *hukum* syariah masih berlaku hingga hari ini.

Lain hal dengan Islam sebagai sumber etik atau pedoman praktik kehidupan sosial belum terlihat sepenuhnya dimanifestasikan oleh Masyarakat Pidie. Secara sederhana, nilai-nilai yang terkandung dalam beberapa ritual ibadah yang sehari-hari dilakukan juga seperti shalat belum terlihat diimplementasikan dalam perbuatan dan tingkah laku masyarakat sehari-hari. Demikianpun, adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dipegang teguh karena dikaitkan dengan ritual keagamaan. Dalam hal bekerja masyarakat bersikap pragmatis, melihat apa yang tersedia dan mengerjakannya dalam batas-batas yang diinginkan sehingga diperoleh materi yang tercukupi untuk pemenuhan kepentingan jangka pendek.

Persoalan kemiskinan juga tidak selalu sejalan dengan produktifitas hasil pertanian. Pidie yang dikenal sebagai lumbung pangan di kawasan Aceh sejak abad 17 hingga saat ini, praktis dihuni oleh mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian pokok sebagai petani. Terlepas dari statusnya apakah petani pemilik dengan lahan sempit atau bahkan petani penggarap, namun yang pasti sistem dan mekanisme perdagangan gabah atau beras yang berlangsung tidak membuka peluang bagi petani mendapatkan keuntungan lebih. Hasil kerja musiman dipakai habis untuk biaya kehidupan sehari-hari. Memecahkan persoalan kemiskinan bagi masyarakat Pidie dibutuhkan perubahan radikal atas cara berpikir dan bekerja para petani dengan membuka usaha yang lebih berorientasi keuntungan dari komoditas yang ditanami. Diluar itu, politik ekonomi pertanian berada jauh di luar jangkauan masyarakat Pidie yang bekerja sebagai petani. Karenanya, opsi yang terakhir menjadi *domein* tugas elit politik nasional yang harus mengasah kepekaannya atas nasib sebagian besar masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada bidang pertanian tanaman padi.

7.2. Implikasi Teoritis

7.2.1. Tindakan Kerja Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Pidie telah mengenal aktifitas kerja sebagai tradisi untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam saat yang sama masyarakat Pidie menganut agama Islam. Islam tidak hanya menyangkut aktifitas ritual, namun juga menjadi sumber nilai yang idealnya berfungsi sebagai pedoman bertindak dan berinteraksi bagi para penganutnya. Termasuk halnya dalam bidang sosial ekonomi. Fakta empirik menunjukkan bahwa tindakan kerja yang diperlihatkan aktor tidak mencerminkan manifestasi dari nilai-nilai Islam.

Keadaan tersebut menggambarkan gejala ketidaglekatan nilai agama pada realitas tindakan masyarakat, terutama pada aktifitas sosial ekonomi. Islam dijalankan dalam batas-batas keberadaan institusi-institusi keagamaan di tingkat gampong atau lebih ke atas lagi di tingkat kemukiman. Institusi itu juga dalam batas menjalankan fungsi pelayanan ibadah ritual atau ibadah lainnya yang tidak masih diperdebatkan sebagai masalah khilafiah dalam agama Islam.

Demikian halnya dengan nilai adat, adat tidak lagi memiliki fungsi sebagai aturan yang dapat dipaksakan dalam mengendalikan tindakan-tindakan ekonomi anggota masyarakat. Adat hanya terwakilkan pada fungsinya mengharmonisasikan kegiatan ekonomi produksi antar aktor dalam kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari realitas kondisi ekonomi yang dialami masyarakat, namun dorongan untuk bekerja mengolah sawah, ladang dan laut sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Pidie. Dalam perkembangannya, sesuai ciri kondisi lingkungan sosial tradisional agraris yang antar aktor masih memiliki ikatan hubungan darah, menjalani pola hidup sederhana dan terhindari dari pola kompetitif. Model masyarakat komunal dan ramahnya alam di kawasan Pidie membuat sebagian masyarakat terlihat kurang kreatif dalam tindakan-tindakannya memenuhi kebutuhan hidup.

Dari tindakan kerja aktor serta hasil ekonomi yang diperlihatkan, setidaknya gejala sosial itu dapat disederhanakan dalam empat tipologi model tindakan kerja aktor, yaitu : 1) rajin bekerja dan kreatif sehingga meningkat taraf

ekonominya (*ureung kaya*), 2) rajin bekerja namun tidak kreatif sehingga taraf ekonominya bertahan pada kondisi yang sama (*ureung sep pajoh*), 3) malas bekerja sehingga taraf penghidupan ekonominya rendah, namun tidak mengalami krisis sandang, pangan dan papan karena kebutuhan hidupnya dijamin pemnuhannya oleh jaringan keluarga (*ureung gasin*).

Secara umum, dinamika kerja masyarakat Pidie berada dalam tingkat rendah karena kondisi masyarakat Pidie memungkinkan adanya ketersediaan dukungan lingkungan sosial dan lingkungan fisik untuk menjamin anggota masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti disebutkan komposisi penduduk yang cenderung homogen dalam arti rendahnya kaum pendatang yang berdiam di kawasan Pidie Jaya, mengakibatkan tidak membuka peluang hadirnya kompetisi sosial. Termasuk di dalamnya, tidak terbuka peluang masyarakat Pidie mendapatkan masukan atas nilai-nilai kehidupan selain dari apa yang disaksikannya selama ini.

Hasil penelitian ini, menguatkan pendapat Weber (1968) bahwa tindakan kerja yang ditunjukkan masyarakat Pidie lebih banyak didorong oleh kepentingannya untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarganya terpenuhi tiga kebutuhan dasar. Lebih dari itu, bilamana wawasan pergaulan dan pengetahuan seorang aktor dalam masyarakat Pidie melebihi rata-rata masyarakat sekitar maka upayanya bekerja dan mengelola pendapatan hasil kerja terlihat jauh berbeda. Hal lain yang menentukan perbedaan tersebut adalah jiwa kewirausahaan yang muncul dan terasah melalui beragam eksperimen usaha yang dilakukannya.

Aspek-aspek utama yang mencirikan pemikiran Weber seperti *emotion* tertunjuk pada cara bagaimana sebagian aktor makin semangat bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anaknya yang bersemangat melanjutkan pendidikan. Meskipun aktor tidak mengetahui dengan cara mana ia harus mengumpulkan dana-dana itu ditengah ketiadaan pekerjaan tetapnya. Masyarakat bekerja keras. Lebih mendasar lagi, adalah aktor bekerja demi memenuhi kebutuhan pangan orang-orang yang disayanginya karena pertalian darah. Baik itu anak-anaknya atau keluarga dekatnya yang lain.

Aspek *habits*, terlihat dari tradisi bekerja keras yang diturunkan dari para orang tua yang menyertai aset yang diwariskannya membuat aktor turut melakukan hal yang sama. Tradisi yang menjadi acuan dalam bertindak bukan hanya dalam hal bekerja di lahan, sawah atau laut. Tapi juga tradisi menghabiskan waktu untuk berkumpul dan bercengkrama di kedai-kedai kopi atau *meunasah*. Hal itu terkait dengan konsep pembagian waktu sebagaimana disebutkan dalam analisis makna di atas. Demikian halnya aspek *interest* dan ideal, terlihat pada bagaimana aktor berusaha mencapai kepentingan-kepentingannya secara konkrit. Upaya-upaya itu selalu berlandaskan pada idealisme yang dikonstruksikan oleh agama dan adat kebiasaan yang berlaku.

Data lapangan menunjukkan ketidakberlakuan pemikiran sosiologi ekonomi yang dikemukakan Karl Polanyi (1957), Mark Granovetter (1985,2005), Robert Wuthnow (2005) dan Victor Nee (1998,2005) bahwa tindakan kerja sebagaimana yang ditunjukkan masyarakat Pidie lebih banyak didorong oleh situasi sosial yang mengkonstruksi kepentingan-kepentingan ekonominya. Namun tindakan-tindakan kerja yang ditunjukkan tidak mengalami keterlekatan (*social disembeddedness*) pada seperangkat nilai agama dan nilai adat yang idealnya menjadi fungsi penentu dalam tindakan-tindakan aktor. Persoalan ini merupakan gejala dari ketidakberfungsian agama dan adat dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat (*social disfunctionality*). Ketidakmampuan agama dan adat menjelma sebagai pengatur tindakan sosial, lebih disebabkan karena agama dan adat merupakan faham yang *latent* dan umumnya mampu termanifestasi dalam wujud tindakan konkrit melalui **agensi**. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan sembari diartikulasikan dalam tindakan-tindakan konkrit sehingga menjadi contoh bagi masyarakat pengikut. Saat ini, data empirik menunjukkan bahwa eksistensi pemuka agama sebagai agen dari agama justru sedang berada pada posisi yang jauh dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sama halnya dengan pemuka adat dan pemerintahan. Kekosongan agensi (*vacuum of agency*) telah menyebabkan krisis berantai yang menjadi sumber permasalahan dari ketidaklekatan sosial dari tindakan-tindakan aktor atas seperangkat nilai-nilai ideal yang terdapat dalam agama dan adat.

Keadaan masyarakat saat ini, umumnya tindakan ekonominya didorong oleh kepentingan yang sederhana, seperti hanya untuk memastikan bahwa dalam jangka pendek seluruh anggota keluarganya terpenuhi tiga kebutuhan dasar. Usaha mencapai kepentingan dilakukan dalam batas-batas dibenarkan norma-norma agama dan adat tradisi. Lebih dari itu, bilamana wawasan pergaulan dan pengetahuan seorang aktor dalam masyarakat Pidie melebihi rata-rata masyarakat sekitar maka upayanya bekerja dan mengelola pendapatan hasil kerja terlihat jauh berbeda. Hal lain yang menentukan perbedaan tersebut adalah jiwa kewirausahaan yang muncul dan terasah melalui beragam eksperimen usaha yang dilakukannya.

Dalam hal ini, tindakan sosial bekerja yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pidie memenuhi tiga unsur analisa sosiologi tindakan ekonomi yaitu (1) tindakan bekerja secara ekonomi dipandang sebagai sebuah tindakan sosial; (2) tindakan ekonomi selalu melibatkan makna. Masyarakat Pidie terdorong untuk bekerja setelah memaknai kehidupan bahwa untuk dapat meneruskan kehidupan maka serendah-rendahnya kebutuhan kebutuhan dasar harus dipenuhi melalui mana ia bekerja mengelola tanah dan alam lingkungannya. Lebih dari itu, masyarakat yang memiliki perbedaan cara pikir dan wawasan akan memperluas cakupannya untuk dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi dan (3) tindakan ekonomi selalu memperhatikan kekuasaan, terlihat secara mencolok bahwa aktifitas bekerja yang lebih tinggi ritme dan frekuensinya adalah mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih dari rata-rata masyarakat lainnya.

Perilaku kerja masyarakat Pidie menunjukkan tiga tipe tindakan ekonomi yakni *custom*, *convention* dan *interest*. Tindakan yang ditentukan oleh kepentingan jangka pendek, didefinisikan sebagai tindakan instrumental dan berorientasi kepada harapan jangka pendek. Tindakan ini mempersyaratkan *setting* sosial dimana aktor lain berpikir dengan cara instrumental yang sama.

Tindakan sosial yang terlihat dari cara masyarakat Pidie berperilaku kerja, menunjukkan bahwa tindakan sosial yang mereka lakukan berada dalam dua dari empat empat golongan tindakan yang disampaikan Weber, yaitu pertama ;

tindakan rasional yang berorientasi nilai, tindakan ini dilakukan aktor dalam masyarakat Pidie dengan membasiskan tingkah lakunya pada nilai-nilai dasar dalam masyarakat; Kedua, tindakan tradisional dalam hal mana masyarakat Pidie senantiasa menyelenggarakan aktifitasnya yang tidak berorientasi keuntungan atas dasar kebiasaan, adat istiadat yang turun temurun tanpa upaya kritis untuk mengevaluasi kegiatan tersebut.

Temuan hasil penelitian, mendukung sekaligus mengoreksi sebagian pendapat Kontjaraningrat. Temuan yang bersifat bertentangan dengan pemikiran Kuntjaraningrat yaitu “sebagian mentalitas masyarakat menghambat pembangunan”. Secara dialektika, di Pidie justru terjadi hal sebaliknya. Kurangnya pembangunan akibat kebijakan “daerah hitam” telah mengucilkan Pidie dari pelaksanaan pembangunan. Hal ini berdampak pada terhambatnya pembentukan mentalitas progresif pada masyarakat Pidie.

Pendapat Kontjaraningrat tentang masyarakat *patricheal* “mentalitas masyarakat berorientasi pada ketokohan, atasan dan senior” dikuatkan oleh temuan penelitian ini. Dimana degradasi kepercayaan masyarakat kepada agensi sosial yang mempuncaki struktur, disebabkan oleh karena ketidakkonsistenan agen pada tindakan-tindakan sosial yang ditunjukkannya. Tidak sesuai antara yang diucapkan dengan yang dilakukan dan ketidaksesuaian antara yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Agensi kehilangan wibawa dalam penanganan masalah-masalah sosial masyarakat sehari-hari. Pergeseran elit dari tokoh *uleebalang* yang mengenal dan berbuat sesuai kebutuhan spesifik rakyatnya menurut sistem *monarchi*-nya, dengan bupati atau camat yang kurang mengenal permasalahan lokal dan lebih berorientasi kepada karir, partai dan kekuasaan

Masyarakat Pidie, seperti sikap umumnya masyarakat Aceh dikenal sikap egaliter. Sikap ini diduga berakar dari pandangan Islam yang menganggap sama semua manusia kecuali dari takwanya. Menyangkut dengan hal yang terakhir ini, perkembangan terakhir menunjukkan loyalitas dan penghargaan sebagian masyarakat Pidie terhadap ulama sedikit banyak tergerus dengan larutnya sebagian ulama dalam arus politik praktis. Kembali pada pendapat Kontjaraningrat, bahwa masyarakat Pidie tidak selalu berorientasi pada tokoh-

tokoh tertentu, kecuali sang tokoh dapat menjaga integritas dan indenpendesinya dari kekuatan manapun.

5.2.2. Institusi agama dan adat dalam dinamika kehidupan ekonomi masyarakat.

Keberagaman tindakan kerja dan hasil perolehan strata ekonomi yang dicapai aktor-aktor dalam kehidupan masyarakat di kawasan Pidie memang unik. Karena mereka lahir, tumbuh besar dan berinteraksi dan bersosialisasi dalam sosio kultural dan struktur sosial yang sama namun pada akhirnya memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan yang paling nyata adalah munculnya aktor-aktor yang berhasil membangun ekonomi melalui tindakan kerjanya dan tertahannya strata ekonomi sebagian besar aktor lainnya karena berbagai halangan dan rintangan.

Pada dasarnya setiap aktor individu dalam masyarakat Pidie berangkat dari titik keadaan yang sama, yaitu berbekalkan semangat kerja yang tinggi dalam mengolah sumber-sumber penghidupan baik dari bidang pertanian, perikanan ataupun perdagangan. Hanya sebagian kecil yang berkesempatan menjadi pegawai negeri. Bangkitnya ekonomi beberapa aktor terlihat sebagai sebuah keberhasilan individual, mereka melengkapi sisi tradisi kerja kerasnya dengan sisi ideal intelektual baik yang diperoleh lewat pendidikan formal ataupun lingkungan sosial.

Tindakan-tindakan aktor dalam berkerja menunjukkan improvisasinya mensiasati sisi-sisi lemah dari kebiasaan dan tabiat kerja masyarakat Pidie yang telah mereka sadari. Meskipun pada dasarnya masyarakat Pidie merupakan masyarakat pekerja, dimana hal itu ditunjukkan oleh keberadaan *keuchik*, *kejruen blang*, *peutua seunebok* dan *panglima laot* sebagai institusi-institusi sosial dalam struktur sosial masyarakat Pidie yang menjalankan fungsi mengatur dan memelihara harmoni, keselarasan dan ketertiban antar aktor dalam bekerja. Aktifitas bekerja dalam orientasi produksi melalui pengolahan sumber-sumber alam, seperti sawah, kebun ladang dan laut diatur oleh insitusi-institusi adat tersebut. Namun terbiasa bekerja dalam orientasi berproduksi semata tak dapat

dianggap syarat cukup untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi dalam kondisi kekinian yang penuh tekanan, tantangan dan kompetisi.

Gejala rendahnya taraf kehidupan sosial ekonomi juga dapat dilihat dari gejala kesenjangan antara tindakan aktor dan nilai ideal agama dan adat tradisi. Dalam hal ini perlu perhatian atas hal yang melatari nilai tidak melekat pada tindakan aktor. Data empirik menegaskan bahwa agensi memiliki posisi penting dalam menseminasi nilai-nilai ke dalam kehidupan sosial masyarakat. Adanya konsistensi dan integritas agensi atas aturan-aturan formal dan informal akan mendorong level mikro mengadopsi nilai ke dalam dirinya dalam bertindak. Sebaliknya, ketiadaan hal itu maka memutuskan rantai hubung antara agensi dengan masyarakat. Hal itu menyebabkan kegagalan ekonomi yang berbasis nilai. Sebagaimana disebut Nee (2005) bahwa kegagalan terjadi karena dari level makro (*policy environment*) terhadap institusi informal atau organisasi di level meso hingga ke level mikro (individu). Dengan kata lain, ketidakberhasilan pemajuan ekonomi yang berlangsung pada masyarakat Pidie terjadi akibat kerusakan salah satu mekanisme integrasi (*decoupling*). Institusi formal tak berhasil sepenuhnya berinteraksi dengan *social network* dan norma-norma sosial yang sifatnya informal dalam mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi individu aktor. Kerenanya, lingkungan institusi dan budaya dipandang penting dalam membentuk tingkah laku ekonomi masyarakat. Sisi agensi tidak mendapat perhatian Nee, dimana hal itu penting dalam dinamika mekanisasi integrasi sosial. Nee terlalu mensederhanakan mekanisme dengan anggapan semua berjalan tanpa pengaruh kuat agensi. Agensi dalam hal ini, tidak semata agen pembaharu di bidang keagamaan atau adat di level meso, namun juga pejabat pemerintahan yang berkedudukan di level makro.

Dalam upaya membangun ekonomi masyarakat, lingkungan kebijakan atau pemerintah tidak sepenuhnya memahami bagaimana proses ekonomi masyarakat berlangsung. Sehingga kasus pemberian modal-modal kerja (stimulan keuangan) yang dilakukan Pemerintah lebih merupakan kebijakan populis. Persoalan mendasar menyangkut masalah struktur sosial dan sosio kultural yang

berkelindan dengan tindakan-tindakan ekonomi masyarakat cenderung dibaikan dari proses pembangunan ekonomi masyarakat.

Bagaimana aktor bertindak, tidak terlepas dari lingkungan sosial yang diperoleh dari asal mana aktor tersebut lahir, tumbuh berkembang dalam didikan keluarga, lembaga pendidikan formal dan lingkungan sekitar tempat ia berada. Pelapisan sosial dalam masyarakat Pidie cenderung merujuk pada pelapisan sosial selayaknya yang terdapat di gampong-gampong. Perbedaan dilihat dari jenis ragam pekerjaan yang dilakoni, seperti petani (*ureueng meugo*), pedagang (*ureung meukat*), nelayan (*ureung melaot*), tukang (*utoh*), birokrat dan militer (Melalatoa, 2005). Belakangan disebutkan munculnya pelapisan baru lain yang mengemuka setelah munculnya mantan *combat* GAM sebagai pejabat politik, politisi di legislatif dan *kontraktor*. Kelompok terakhir disebutkan menguasai tiga aspek pelapisan sosial, dimana mereka merengkuh kekuasaan, menguasai sumber-sumber ekonomi masyarakat dan menonjolkan diri dengan prestise berikut atribut-atribut kebesaran.

Sejalan dengan itu, dalam kehidupan sehari-hari menyangkut perbedaan kepemilikan materi kekayaan dalam kehidupan masyarakat Aceh (Pidie) menimbulkan tiga pelapisan lainnya yaitu orang kaya (*ureung kaya*), kelompok sederhana berkecukupan (*ureung sep pajoh*) dan kelompok masyarakat miskin (*ureung gasin*). Namun persepsi miskin di gampong Meunasah Balek, tidaklah seekstrim dibayangkan. Mereka memiliki rumah, pakaian dan masih menikmati makan secara lumrah sebanyak tiga kali sehari. Keterkungkungan sebagian yang disebut *ureung gasin* lebih disebabkan mereka terjebak pada ketertutupan peluang untuk bangkit dari kemiskinan akibat rendahnya pengetahuan dan pemahaman pengelolaan usaha yang tepat. Disamping itu sempitnya peluang usaha juga terkait dengan terbatasnya pemasaran atas produk-produk yang diusahakan.

Perbedaan-perbedaan tingkat kehidupan yang saat ini dialami oleh masyarakat Pidie, tidak terlepas dari apa yang diperolehnya dari lingkungan tempatnya berada. Kontestasi dalam memperebutkan modal turut ditentukan oleh pengalaman, wawasan- pengetahuan, jaringan, kemampuan mengelola usaha. Secara keseluruhan aspek-aspek tersebut merupakan akumulasi dari rangkaian

situasi sosial yang terdapat di kawasan Pidie. Pidie menjadi kawasan dimana pertarungan dan perlawanan politik terjadi. Wujud akhir dari permasalahan tersebut untuk sementara ini adalah terganggunya struktur sosial secara berkepanjangan.

Gangguan itu, semakin lengkap dengan ketertinggalan dan keterbelakangan masyarakat atas fasilitas, sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi yang menyebabkan terbentuknya atau tertahannya sosio-kultural masyarakat sebagaimana saat ini berlaku. Hal ini mungkin dialami oleh masyarakat yang berdiam di kawasan lainnya di provinsi Aceh, kecuali Banda Aceh dan Lhokseumawe. Namun, sebuah pengecualian kemajuan bagi Pidie yang diapit oleh dua kota tersebut adalah sebuah dampak dari proses yang dibangun kekuatan lingkungan kebijakan atau institusi formal. Karenanya melengkapi pemikiran Nee (2005) bahwa tindakan institusi formal yang mengambil kebijakan tertentu kepada pihak yang “berseberangan”, semisal tidak memberi atau mengalokasikan dana pembangunan ekonomi baik proyek fisik maupun non fisik. Bentuk “*punishment*” pada sebuah kawasan semacam ini ini menghasilkan sebuah kondisi dimana masyarakat kesulitan meraih insentif sebagaimana dimaksud Nee.

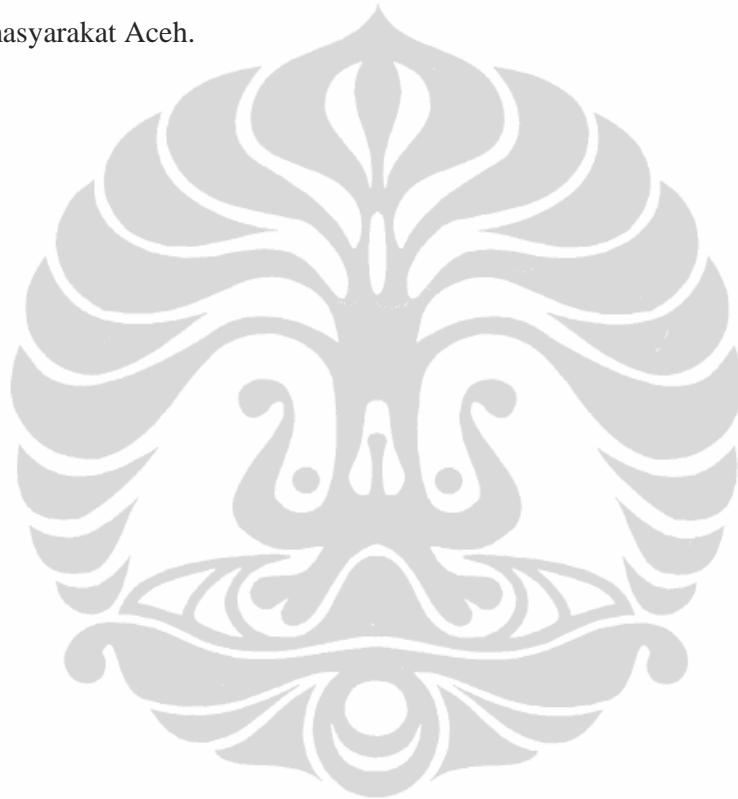
Disamping itu, penelitian ini sejalan dengan temuan studi Sufi dan kawan-kawan (1995). Temuan yang memiliki keberlakuan adalah; pertama, dorongan dan semangat kerja masyarakat Aceh terbatas pada capaian pemenuhan kebutuhan bertahan hidup (*physiologis*). Diluar itu, target capaian kerja hanya sebatas memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan anak serta terpenuhinya biaya ONH; kedua, etos kerja masyarakat secara normatif merujuk pada etika kerja Islam. Namun, etik tersebut tidak memiliki kekuatan fungsional mengendalikan perilaku kerja masyarakat; ketiga, nilai-nilai adat tradisional yang mendorong bekerja keras tidak memiliki kekuatan fungsional; keempat, tradisi komitmen terhadap waktu, yang berlaku pada bidang pertanian tanaman padi dan perikanan laut; kelima, etos kerja turut ditentukan oleh sebesar apa peluang meraih keuntungan dari peluang perdagangan yang tersedia.

Hasil studi penelitian ini, mengkritisi pendapat Koentjaraningrat (1974) yang menyederhanakan pemilahan periodik akar penyebab munculnya mentalitas yang melemahkan masyarakat dalam gerak pembangunan atas periode sebelum revolusi dan setelah revolusi kemerdekaan. Periodisasi semacam itu, sulit diberlakukan bagi masyarakat Pidie yang tidak mengalami kolonialisasi dalam periode panjang. Keberadaannya di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh lebih bersifat sebagai daerah berpemerintahan sendiri, demikian juga di bawah kolonialisasi sejak awal tahun 1900-an hingga 1942. Dua contoh berikut menunjukkan mentalitas pekerja keras dan militan dimiliki masyarakat Pidie, yakni senantiasa menjadi produsen beras bagi kawasan Aceh sejak abad ke 17 hingga saat ini dan mampu memberikan perlawanan heroik berbasis semangat keagamaan dalam perang kolonial pada pertengahan abad ke- 20.

Disamping itu, Koentjaraningrat terlalu menekankan pemahaman kemerdekaan dalam pengertian normatif atau formal. Pendapat Koentjaraningrat itu, mengemuka pada peletakan garis pembatas dinamika sosial antara sebelum revolusi dan setelah revolusi kemerdekaan. Realitas sosial menunjukkan bahwa kemerdekaan formal tidak selalu diikuti oleh kemerdekaan substantif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara empirik masyarakat Aceh dan Pidie pada khususnya melakukan perlawanan-perlawanan atas dominasi kekuasaan luar Aceh. Tindakan perlawanan dilatarbelakangi perasaan yang sama bahwa “kolonialisasi baru” (neo kolonialisasi) sedang berlangsung pasca kolonialisasi Belanda dan Jepang. Legalitas pemahaman masyarakat lokal tersebut, dikuatkan dengan adanya kebijakan dan tindakan represif atas diri mereka. Lebih lanjut disempurnakan dengan praktek marginalisasi masyarakat dari kepentingan-kepentingan sosial ekonominya, walau dilakukan dengan cara-cara yang tidak langsung.

Pada bagian lain, terjadi pergeseran persepsi masyarakat Pidie atas simbol-simbol Eropa yang identik dengan kolonialisasi. Pada era peperangan dengan Belanda masyarakat ditanamkan antipati terhadap semua simbolisasi kolonial yang diberi label “*kaphe*” atau kafir. Namun, belakangan seiring dengan kebijakan elit GAM yang berupaya meraih simpati internasional atas perjuangan

yang digerakkannya. Maka simbol-simbol asing, terutama kehadiran orang Eropa dan Amerika Serikat di Aceh adalah hal yang sangat diharapkan. Kehadiran mereka dianggap pertanda baik akan adanya dukungan internasional. Keadaan ini terbukti dalam setiap kesempatan Mr. Marti Ahtisaari berkunjung ke Aceh dalam kedudukannya sebagai pimpinan yang memediasi perundingan Pemerintah dengan elit GAM, maka mendapat perhatian dan harapan sedemikian besarnya dari elit GAM dan masyarakat Aceh.



BAB 8

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir penulisan disertasi ini, peneliti mengambil kesimpulan atas dasar data dan analisis temuan lapangan yang menyangkut tindakan kerja masyarakat di Gampong Meunasah Balek Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, diantara fenomena gejala kemiskinan yang dialami sebagian besar masyarakat Pidie. Idealnya kesimpulan mampu memberi jawaban atas pertanyaan penelitian seperti yang disebutkan di bab pertama. Penelitian ini memiliki tiga kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

8.1.1. Tindakan Kerja Masyarakat Pidie .

Kesimpulan pertama, bahwa realitas kehidupan ekonomi masyarakat Pidie menunjukkan adanya ragam tindakan kerja, baik yang tradisional maupun rasional. Cara berpikir sederhana dan untuk kepentingan jangka pendek mendominasi latar belakang tindakan. Tindakan sosial yang termanifestasi pada pola bekerja menunjukkan independensi masyarakat atas kepentingan-kepentingan jangka panjang, berkelindan dengan tradisi adat yang secara institusional masih bertahan pada fungsi produksi.

Sejalan dengan itu, institusi keagamaan melokalisasikan diri pada urusan *hukom* semata, atau berkisar pada fungsi pelayanan ritual masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan. Sekularisasi dalam pengertian terbatas menjadikan institusi keagamaan kehilangan kepekaan untuk mengintegrasikan kepentingan agama dengan kepentingan ekonomi masyarakat, sebagaimana pernah berlangsung pada era Aceh akhir abad 19 yang mengintegrasikan kepentingan agama dengan kepentingan politik kekuasaan.

Terkait dengan dinamika pada historisitas lokal, terlihat bahwa masing-masing periode memiliki gejala perubahan sosial baik pada tataran intitusi sosial ataupun tataran kehidupan individual aktor. Namun pada dasarnya aktor selalu menunjukkan kecenderungan bahwa tindakan kerja yang dilakukannya mengalami penyesuaian dengan situasi lingkungan sosial berkembang.

Sementara itu, terdapat minoritas aktor yang dibentuk dengan pengetahuan, jaringan kerja dan pengalaman memiliki cetak biru tindakan yang terbedakan dengan masyarakat Pidie umumnya. Bersamaan dengan itu, persoalan kemiskinan yang dialami masyarakat di kawasan ini, tak lepas dari umumnya keadaan ekonomi petani subsisten. Persoalan menjadi pelik pada saat mana mayoritas masyarakat di kawasan ini bekerja sebagai petani sawah dan sebagian yang lain menjadi nelayan tradisional, pedagang dan pegawai pemerintah. Bagi petani dan nelayan, bagaimanapun tinggi dan militan mereka bekerja bekerja, namun tahapan akhir yang penting yakni pengkonversian produk menjadi pendapatan, justru berada di luar kekuatan kontrol mereka. Mereka sebagai pihak yang tak memiliki posisi tawar, sehingga menutup peluang peningkatan pendapatan secara signifikan. Pendapatan yang tersedia bersifat musiman dan dipakai habis untuk biaya bertahan hidup dan hampir tak bersisa untuk tabungan.

8.1.2 Tautan Islam dengan Tindakan Kerja Masyarakat Pidie

Kesimpulan kedua, tindakan-tindakan kerja aktor tidak mengalami kelekatan dengan nilai etika kerja Islam. Dalam konteks tindakan ekonomi, implementasi Islam dalam kehidupan masyarakat Pidie saat ini hanya terbatas pada sisi “luar” religiusitas Islam itu sendiri dimana yang terlihat menonjol adalah simbol dan penyelenggaraan ritual-ritual agama. Sisi “terdalam” dari religiusitas Islam yang memiliki kekuatan sosial dalam fungsinya memaksa dan mengendalikan tindakan aktor tidak mengemuka. Dibandingkan dengan spirit yang ditunjukkan pada beberapa periode lampau, maka perubahan ini lebih disebabkan oleh krisis eksistensi agen perubahan dari kalangan pemuka agama atau ulama. Ketidakelekatan ini tidak disadari oleh aktor karena proses perubahan itu berlangsung secara evolusi.

8.1.3 Tautan Adat Tradisi dengan Tindakan Kerja Masyarakat Pidie

Kesimpulan ketiga, tindakan-tindakan kerja aktor tidak sepenuhnya mengalami kelekatan dengan substansi nilai-nilai ideal adat yang berfungsi mendorong tindakan ekonomi masyarakat menuju kondisi ideal. Keberadaan adat

yang direpresentasikan dengan institusi sosial ekonomi dalam mengatur harmonisasi aktifitas ekonomi produksi, tidak memiliki kekuatan pemaksa atas tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan aktor. Hal itu lebih disebabkan oleh rendahnya kapasitas agen perubahan dalam ketokohan adat. Dalam batas tertentu adat dipatuhi dalam ritual-ritual yang secara tak langsung telah mendorong terjadinya aktifitas ekonomi perdagangan menyangkut barang dan jasa yang terkait.

8.2. Rekomendasi

8.2.1. Rekomendasi Kebijakan

Dalam permasalahan kehidupan masyarakat Pidie Jaya, terutama menyangkut dengan aktifitas kehidupan ekonomi yang tercermin dari dinamika perilaku kerja mereka. Aspek kebijakan adalah salah satu hal yang menentukan dalam program peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat yang *inline* dengan program pengurangan jumlah penduduk miskin. Dalam kaitan itu, peneliti mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan :

A. Rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah

1) Mengembalikan kondisi lingkungan sosial berbasis nilai Agama dan mempersiapkan lingkungan untuk kemunculan Agensi

Pemerintah perlu menyadari bahwa nilai agama yang hari ini berjalan dan menjadi basis tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial merupakan nilai Islam yang telah mengalami pergeseran interpretasi. Persoalan nilai bagi masyarakat merupakan ruh atau energi penggerak bagi kehidupan sosial itu sendiri. Karenanya nilai-nilai tersebut harus dikembalikan kepada bentuk dan isi yang semestinya. Konsensus sosial untuk sadar dan mau kembali pada nilai ideal sesungguhnya adalah sebuah kegiatan sosial yang berbiaya besar dan membutuhkan waktu.

Nilai bersemayam di dalam wadahnya institusi sosial, sejauh ini institusi lama masih bertahan namun dengan fungsi dan kekuatan yang jauh menurun dan berbeda. Dengan demikian maka langkah pertama yang harus

dilakukan adalah memperbaiki atau mengangkat kembali nilai agama yang sesungguhnya, lalu agensi yang berada di puncak-puncak institusi sosial memberikan keteledanan agar dapat meraih kembali kepercayaan yang tergerus. Setelah kondisi nilai ideal eksis dalam kehidupan maka institusi sosial yang perlu mendapat penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan terkini. Sejauh ini institusi lain yang tidak berbasis pada nilai Islam dan adat hanya menjadi semacam penawar dari kebutuhan masyarakat. Namun kebutuhan yang dapat dipenuhi adalah kebutuhan materi. Kepuasan atas kemajuan materi bagi masyarakat lokal, hanya dapat diperoleh apabila disertai dukungan legalitas Islam. Bilamana tidak diimbangi oleh agama, maka kemajuan material tersebut tidak memberi manfaat permanen bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Realitas adanya agensi-agensi baru dalam cakupan struktur sosial ekonomi masyarakat seperti di kalangan petani, nelayan dan pedagang perlu dikaitkan dengan institusi sosial keagamaan, adat dan pemerintahan. Namun, institusi itu sendiri perlu merubah diri untuk berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Dengan melekatnya agensi-agensi pada institusi sosial maka kecenderungan orientasi materialistis yang diggerakkan oleh nilai rasionalitasnya dapat terimbangi dengan nilai-nilai ideal Islam dan adat dalam kerangka pemajuan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah perlu mendorong terbentuknya sebuah kondisi yang memungkinkan munculnya agen-agen pembangunan yang mampu merebut kembali kepercayaan masyarakat. Baik agensi di bidang keagamaan, pemerintahan maupun adat. Bersamaan dengan itu, mendorong peningkatan kapasitas pemuka adat yang mengemban tugas pada institusi sosial ekonomi tradisional sehingga lebih memiliki power dan berinisiatif meluaskan bidang koordinasi hingga ke tahap pemasaran produk.

Disamping itu, perlu memperhatikan potensi-potensi kemunculan agensi dari kalangan komunitas usaha tani, nelayan atau pedagang yang memungkinkan untuk disiapkan sebagai agen pembangunan bagi kalangan

mereka sendiri. Sehingga agensi tidak semata diharapkan kemunculannya dari struktur dan kultur.

2) Intervensi Pemerintah terhadap masyarakat petani.

Mengacu pada realita bahwa masyarakat Pidie yang berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya dominan berkerja di sektor pertanian dan perikanan, karenanya untuk memacu peningkatan pendapatan secara merata maka sektor inilah yang perlu perhatian penuh. Diperlukan upaya intervensi pemerintah untuk melakukan dua hal, pertama mengkondisikan untuk terjadi perluasan fungsi institusi sosial semacam kejrueu blang, panglima laot atau peutua seunebok untuk turut memperhatikan aspek-aspek teknis pertanian atau perikanan laut hingga pada tahapan pasca panen atau tahapan pemasaran produk. Karena fase inilah yang paling strategis untuk melihat sejauh mana keberhasilan usaha mengangkat ekonomi masyarakat.

Kedua, melindungi petani dari sisi teknis di aras kerja pemerintah. Seperti mengendalikan permainan suplai pupuk subsidi dan permainan harga gabah perlu diawasi secara ketat, sehingga petani terhindar dari pertanian biaya tinggi. Bersamaan dengan itu, patut dipertimbangkan untuk membuka dan membiasakan petani membudidayakan komoditas tanaman alternatif selain padi. Nilai jual gabah yang bermain dalam interval angka terbatas mudah dimanipulasi oleh para pedagang besar dengan menggunakan kekuatan modal.

Peluang menambah pendapatan petani, hanya dengan pola variasi masa tanam antara tanaman padi dengan tanaman lainnya. Bidang usaha agro pertanian buah-buahan semacam melon, sebagaimana telah diberikan contoh pengusahaannya oleh salah satu wirausahawan lokal dapat terus dikembangkan. Pemerintah perlu menyusun strategi dan pemetaan wilayah yang memungkinkan untuk penggalakan program penanaman tanaman alternatif yang memiliki nilai jual di pasar. Unit kerja yang bertanggung jawab atas hal ini, selayaknya mendapat perhatian lebih dari kepala daerah. Memberi parameter pencapaian secara bertahap akan memudahkan kepala daerah melakukan evaluasi kemajuan progres pencapaian program peningkatan pendapatan petani.

2) Strategi mendekati produk kuliner kepada pembeli di lintasan padat.

Cita rasa makanan serta jajanan kuliner khas Meureudu secara perlahan telah menjadi merek dagang yang memiliki kesan tersendiri bagi masyarakat yang biasa melintasi kawasan Meureudu. Penikmat jajanan dan makanan tersebut adalah para pengguna jalan raya Medan-Banda Aceh yang transit. Posisi Meureudu yang berjarak dengan kota-kota besar, dapat dibalik menjadi sebuah keuntungan. Untuk memanfaatkan kondisi ini, perlu dikondisikan upaya memancing para pelintas agar singgah beristirahat di titik-titik sepanjang jalan negara yang berdekatan dengan keude Meureudu.

Tempat peristirahatan yang nyaman, teratur, bersih dan dilengkapi dengan menu-menu jajanan yang khas Meureudu dapat diciptakan lewat kerja sama pemerintah dengan wirausahawan kuliner yang telah terasah di keude Meureudu. Keude Meureudu sendiri tak memiliki potensi untuk memaksa para pelintas khusus untuk singgah, karena letak Meureudu yang menjorok ke dalam membuat para pelintas tidak merasa perlu energi lebih untuk sekedar singgah. Lokasi persinggahan wisata pantai yang telah dibuka di Trieng Gadeng dapat diintegrasikan secara perlahan hingga mencapai kawasan Meureudu.

B. Masyarakat dan perubahan pola kerja jangka pendek.

Pemerintah lokal perlu memberi perhatian yang lebih besar untuk memahami dan mengeksekusi kebutuhan detail masyarakat dalam bidang usaha ekonominya baik itu pertanian, perikanan, perdagangan maupun usaha industri rumah tangga.

1) Masyarakat Petani

Kebiasaan bekerja masyarakat petani yang musiman, menyebabkan petani memiliki waktu luang yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja di sektor lainnya. Memanfaatkan lahan yang tersedia di pekarangan dapat dilakukan dengan upaya penanaman atau budidaya aneka tanaman yang menghasilkan nilai tambah. Budidaya ini perlu dilakukan secara terencana dan sungguh-sungguh. Tanaman

yang dapat dikembangkan seperti seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dengan masa panen jangka pendek atau menengah.

Produksi yang dihasilkan akan berdampak ganda, yaitu dapat menekan pengeluaran untuk pembelanjaan produk sejenis untuk kebutuhan dapur rumah tangga dan sekaligus dapat menghasilkan pendapatan baru dengan menjual hasil panen ke pasar. Beberapa tanaman sederhana yang tidak mengalami peremajaan seperti tanaman pisang dan kelapa menunjukkan degradasi sikap hidup produktif masyarakat yang seharusnya mendapat penyadaran.

Disamping itu, sumber pendapatan lainnya yang menjanjikan adalah kebiasaan masyarakat merajut tikar pandan yang diperoleh secara turun temurun. Keterampilan ini strategis untuk dikembangkan lebih lanjut, dengan mempedomani pembekalan yang diberikan institusi terkait. Masyarakat penting mengutamakan perolehan hasil produk yang lebih menarik, lebih beragam fungsi, lebih rapi dan lebih berkualitas. Untuk menjamin tercapainya target usaha maka tahapan penting berupa pemasaran diperlukan sikap proaktif memperluas jaringan pemasaran dan secara rutin terlibat dalam ajang pameran produk khas daerah, langkah ini perlu difikirkan pembentukan badan usaha semacam asosiasi yang membantu manajemen pemasaran. Secara umum, karakter usaha masyarakat desa yang rajin dan ulet dalam bekerja menghasilkan produk, namun macet dititik konversi barang menjadi uang. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan dan jaringan informasi perdagangan. Sehingga yang mengambik keuntungan, lagi-lagi adalah kaum pemodal diperkotaan.

2) Masyarakat Nelayan.

Masyarakat nelayan tradisional dapat menyadari keterkungkungannya pada kebiasaan buruk berupa kebiasaan hidup konsumtif pada saat posisi keuangannya membaik. Tidak memiliki perencanaan kebutuhan jangka panjang mendorong nelayan untuk selalu mengambil kesempatan istirahat atau libur bekerja hingga batas waktu dirasakan uangnya telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Diskontinuitas usaha bekerja masyarakat nelayan membuat nelayan tidak memiliki kesempatan menabung dan menutup peluang bagi nelayan

untuk memiliki modal usaha baik bagi pekerjaannya sebagai nelayan atau membuka bidang usaha lain seperti di bidang pertanian atau perdagangan.

Strategi peningkatan pendapatan nelayan di kawasan ini, adalah diperlukan upaya konkrit dari beberapa nelayan sukses untuk membuat instalasi pengawetan ikan di Meureudu. Sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap harga ikan, saat mana produk tangkapan ikan yang berlebihan tidak menjatuhkan harga di pasaran. Selama ini masyarakat nelayan hanya menjadi permainan toke ikan pemilik modal di Medan, saat mana mereka membeli ikan dengan harga murah bilamana hasil tangkapan berlimpah dan menjual kembali dengan harga tinggi saat mana tangkapan ikan oleh nelayan menurun.

C. Keterlibatan LSM lokal dan asing dalam aksi pengentasan kemiskinan

Konflik dan bencana tsunami yang terjadi di Aceh, merangsang tumbuhnya LSM lokal serta memancing kehadiran LSM asing untuk turut membantu masyarakat dalam meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Beberapa program bantuan usaha yang diberikan kepada masyarakat ada yang berhasil, namun tidak sedikit yang bermasalah.

LSM perlu mengetahui karakteristik sosiologis masyarakat sehingga dana pancangan atau instalasi bantuan yang diberikan dapat mencapai target yang seharusnya. Bantuan-bantuan usaha yang terkait dengan aktifitas kerja masyarakat sehari-hari seperti rencana pabrik es bagi kebutuhan pengawetan ikan yang akan diberikan oleh salah satu LSM perlu diapresiasi. Namun terdapat titik krusial yang dapat menghancurkan keberlanjutan program tersebut. Titik krusial tersebut salah satunya adalah manajemen pengelolaan.

Selama ini LSM lebih mempercayai untuk menyerahkan pengelolaan sebuah instalasi produktif yang mereka sumbangkan, kepada koperasi yang mereka bentuk seketika dengan menunjuk orang-orang yang dirasa dipercaya sebagai manajernya. Hal ini tidak menajikan hasil yang baik, seperti program SPBU di TPI Meureudu. Karenanya dapat dipertimbangkan untuk memberikan kontrak kepada pihak ketiga yang memiliki pengalaman usaha sejenis dengan kompensasi sharing persentase pendapatan yang diberikan kepada pihak masyarakat.

8.2.2 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Peneliti merekomendasikan dua penelitian lanjutan. Yang pertama, penelitian yang menyangkut dengan dinamika tindakan kerja masyarakat Aceh yang berada di kawasan Tengah dan Barat Selatan dari Provinsi Aceh. Mereka termasuk tertinggal dalam kemajuan ekonomi. Penelitian kedua, menyangkut dengan tindakan kerja masyarakat Aceh yang berada di perantauan, seperti kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan bahkan perlu diperluas pada aktor-aktor pengusaha kaliber nasional yang berasal dari Aceh. Alasan-alasan apa yang dapat menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tindakan kerja mereka di perantauan perlu didalami secara sosiologis. Mungkin hal itu terkait dengan terbaaur sosio-kultural dengan suku bangsa lainnya dan atau berkelindan dengan kondisi peluang usaha yang terbuka.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik (Ed), 1979, *Agama Etos Kerja dan Pengembangan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta.
- Abdullah, Taufik (Ed), 1983, *Agama dan Perubahan Sosial*, PT Rajawali, Jakarta.
- Abdullah, Otto Nur, 2011, *Aceh Pasca Konflik : Arena Kontestasi Tiga Varian Nasionalisme*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta
- Al-Chaidar, 1998, *Aceh bersimbah darah*, Pustaka Al-Kautsar, .
- Alfian, Teuku, Ibrahim. 1999, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh,
- Alfian, Teuku. Ibrahim, 1987, *Perang di Jalan Allah*, Sinar Harapan, Jakarta
- Amin M.M., dkk., , 1988, *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. PT. Pustaka Grafika Kita, Jakarta
- Anugrah, Iwan.Setiajie dan Suryani, Erma, tanpa tahun, *Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan*. publikasi di website PSE Litbang Deptan RI,.
- Arndt H.W, , 1991, *Ekonomi Pembangunan : studi tentang sejarah pemikiran*. LP3ES, Jakarta.
- Asrori, M, 1997, *Makna Kerja bagi Wanita Kalimantan Barat (Penelitian terhadap wanita etnik Dayak, Melayu dan Cina)*. FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak,.
- Aspinall, Edward, 2005, *The Helsinki Agreement : A More Promising Basis for Peace Aceh?* Policy Studies n20, East West Centre, Washington DC.
- Atal, Yogash dan Pieris, Ralph, 1980, *Kritik Asia terhadap pembangunan: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta.
- BPS, 2005, *Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2004*, Buku 2 Kabupaten/Kota, Jakarta
- BPS, 2009, *Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2008*, Buku 2 Kabupaten/Kota, Jakarta.

- BPS Kabupaten Pidie Jaya & BAPPEDA Kabupaten Pidie Jaya, 2009, *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pidie Jaya (Menurut Lapangan Usaha) Tahun 2005-2008*, Meureudu.
- Beals, Ralph L, et al, 1997, *An Introduction to Anthropology*, MacMilan Publishing C Inc, New York, London
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia, Jakarta.
- Creswell, John W, 1994, *Research Design, Qualititatif and Qualitative Approaches*, California, Saga Publications
- Davis, Winston, 1987, *Religion and development : Weber and East Asia Experience*, dalam Suwarsono and So Yo Alvin, *Perubahan Sosial dan Pembangunan, teori-teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia*, LP3ES, Jakarta, 2006
- Djuned, Teuku Mohd, 2002, *Hukum Adat Aceh, Gayo dan Alas, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh*, Banda Aceh
- Dharmaputera, Eka, 2001, *Etika Sederhana untuk semua: bisnis, ekonomi dan penatalayanan*, cetakan ke 4 – Jakarta, Gunung Mulia
- Dove, Michael R, 1988, *Tradistional Culture and Development in contemporary Indonesia*, , city of Hawaii Press, Honolulu
- Fakultas Teknik, 1997, Pusat Studi Pengkajian Islam, *Makna dan Adab Kerja dalam Pemanfaatan Waktu*, Universitas Islam Jakarta.
- Faisal, Sanapiah.S, 2003, *Budaya Kerja Masyarakat Petani : Kajian Strukturionistik berdasarkan kasus petani Sumbawa*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Firth, Raimond, 1966, *Malay Fisherman, Their Peasant Economy*, Routledge and Regent Paul Ltd., London.
- Geertz, C. 1997, *Penjaja dan Raja- Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Granovetter, Mark, 2005, *The impact of social structure on economic outcomes*, Jurnal of Economics perspectives, Volume 19, Number 1
- Hasjmi, A. dkk, 1995, *50 Tahun Aceh Membangun*. Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh

- Hebding at al, 1994, *Introduction of sociology: A text with Reading*, Mac Graw Hill Inc and Philipine Graphics Art Inc, Philipina.
- Horton, Paul B dan Chester L. Hunt, 1984, *Sociology*, McGraww-Hill Book Company, Sidney, Tokyo
- Hurgronje, Snouck, 1985, *Aceh dimata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta
- IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, 2006, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Ar-Raniry Press, Banda Aceh
- Ishak, Otto Syamsuddin, (Ed.), 2001. *Suara dari Aceh, Identifikasi Kebutuhan dan Keinginan Rakyat Aceh. Seri II : Resolusi Konflik*. Jakarta: YAPPIKA
- Ismail, Badruzaaman, 2002, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat di Aceh Besar*, Thesis Magister Hukum, Pascasarjana USU, Medan
- Ismail, ,2002, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat di Aceh Besar*, Thesis Magister Hukum, Pascasarjana USU, Medan
- Kaosityah dan Hakiem, Lukman, 2000. *Keistimewaan Aceh Dalam Lintasan Sejarah*. Pinbuk, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1984, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta,
- Lawang, Robert MZ, 2004, *Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat tahun 1950-an dan 1980 an*, FISIP UI Press, Jakarta
- Lawang, Robert MZ,2005, *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik: Suatu Pengantar*, FISIP UI Press, Jakarta
- Lombard, Denys, 2007, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, KPG kerjasama dengan Forum Jakarta Paris, Jakarta.
- Jhonson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Moderen*, Di Indonesia : Robert MZ Lawang, Gramedia, Jakarta
- Melalatoa, Junus M, 2005, *Aceh Kembali ke Masa Depan*, IKJ Press-Kata Kita, Jakarta
- Malik, MuhLuthfi, 2010, *Etos Kerja, Pasar dan Mesjid : studi sosiologi mobilitas perdagangan orang Gu Lakudo di Sulawesi Tenggara*, (Disertasi),

Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, Depok

McClalend, David C, 1971, *The Achievement Motive in Economic Growth*,
London

Mitchell, G Duncan, 1968, (ed) *A Dictionary of Sociology*, Routledge and
Keagan Paul, London

Nazaruddin, T, 2003, *Konflik Aceh dan Model Alternatif Penyelesaiannya -
Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Penyelesaian Konflik Aceh Melalui
Operasi Militer di Nanggroe Aceh Darussalam*, Elsam, Banda Aceh

Reid, Antony, 2007, *Asal Mula Konflik Aceh*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Ritzer, George dan Douglas J Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern*. Kencana
Prenada Media Group, Jakarta

Sanusi, M. Syarif, 2005, *Gampong dan Mukim di Aceh, menuju Rekonstruksi
Pasca Tsunami*. Pustaka Latin, Bogor

Saebani, B.A., 2007, *Sosiologi Agama : Kajian tentang Perilaku Institutional
dalam Beragama Anggota Persis dan Nahdlatul Ulama*. PT. Refika
Aditama, Bandung

Siegel, James T, 1969, *The Rope of God*, University of California Press.
Barekeley and Los Angeles.

Scott, James C, 1981, *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di
Asia Tenggara*. LP3ES, Jakarta

Soemardjan, Selo dan Soemardi, Soeleman, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*,
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Sosrodihardjo, Soejito, 1986, *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri*,
Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sufi, Rusdi et al., 1995, *Persepsi Etos Kerja Kaitannya Dengan Nilai Budaya
Masyarakat Provinsi D.I Aceh*. Departemen P dan K, Banda Aceh

Sumarti, Titik, 2007, *Sosiologi Kepentingan (interest) dalam tindakan ekonomi*,
Jurnal Sodality, volume 1 no 2 Agustus 2007, Departemen Komunikasi
dan Pengembangan Masyarakat IPB, Bogor

- Suwarsono dan So, Alvin Y, 1994, *Perubahan Sosial dan Pembangunan, teori-teori modernisasi, dependensi dan sistem dunia*, LP3ES, Jakarta
- Swedberg, R, 2003, *The Principles of Economic Sociology*, Princeton University Press, New Jersey, US
- Syarif S.M, 2005, *Gampong dan Mukim di Aceh : Menuju Rekonstruksi Pasca Tsunami*. Pustaka Latin, Bogor
- Sztompka, P, 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Prenada Media Group, Jakarta
- Taneko, B. Soleman, 1984, *Struktur dan Proses Sosial : suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Rajawali, Jakarta
- Tasmara, Toto, 2008, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, Gema Insan Press, Jakarta
- Timmer, C.Peter, 2007, “*How Indonesia connected the Poor to Rapid Economic Growth*”, in World Bank, 2007, “*Deleviring on the promise of Pro Poor Growth- insight and lesson from Country Experience*”, diedit oleh Timothy Besley dan Luise J Cord.
- Tjondronegoro, SMP, *Memudarnya otonomi Desa dalam : Keping-keping Sosiologi dari Pedesaan*, Dirjen Dikti Depdikbud RI, Jakarta.
- Todaro, Michael P, 1994, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Universitas Indonesia, 2001, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. *Metode Penelitian Sosial*. FISIP UI, Depok.
- Weber, Max, 1958, *The Protestan Ethic and the Spirit Capitalism*, translated by Talcot Parsons, Charles Scribners, New York
- World Bank, 2008, *Kajian Kemiskinan di Aceh Tahun 2008 : Kajian Konflik, Tsunami dan Rekontruksi terhadap Kemiskinan Aceh*, The World Bank, Washington DC,
- World Bank, 2007, *World Development Report 2008- Agriculture for development : The World Bank*, Washington DC.
- Zainudin, HM,1961, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Pustaka Iskandar Muda, Medan.

Transkrip Wawancara

Informan 02.

Laki-laki, usia 52 tahun, Pekerjaan utama sebagai pedagang. Memiliki rumah permanen dengan model semi mideterania walaupun belum selesai. Kelihatannya sudah lama terhenti proyek rumah tersebut. Ia merupakan pemilik sebuah toko kelontong yang berjaya di kawasan keude Meureudu pada penghujung 70an, 80an hingga pertengahan 90an. Saat ini tidak berdagang lagi. bersebelahan dengan mesjid. Peneliti memiliki beberapa kali kesempatan pendalaman informasi dengan informan ini. Ia rajin mengikuti shalat berjemaah, baik di meunasah Dayah Kleng maupun di mesjid Meureudu.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana keadaan usaha bekerja dan taraf hidup masyarakat di Gampong kita ini Pak, mungkin juga untuk lingkungan yang lebih luas seperti Meureudu ini?

Sudah berbeda, sekarang yang berhasil bukan hanya ada pedagang, tapi ada juga pegawai, ada nelayan dulu di dayah kleng ini, semua pemilik rumah bagus hanya pedagang, yang pegawai rumahnya kecil-kecil. Lain dengan sekarang, yang besar-besar rumah pegawai.

Usaha Bapak sendiri, saat ini ?

Saat ini saya lebih memilih menyewakan toko daripada berjualan sendiri, dengan menyewakan kita bisa mendapat uang sewa bersih 20 juta setahun. Sudah kita tidak lelah, juga tidak punya resiko menderita kerugian akibat sepi pasar.

Transkrip Wawancara

Informan 01.

Laki-laki, usia 55 tahun, Pekerjaan utama sebagai petani. Saat ini ia menjadi kejruean blang, sebuah kedudukan adat yang bertugas mengemban tanggung jawab pengaturan kegiatan bertani secara adat. Dalam sebuah kesempatan, kejruean memberi kesempatan bertemu pada pagi hari, di tengah pesawahan dimana ia hendak melihat kondisi persawahan menjelang panen. Sambil duduk di atas motor yang terparkir di pinggir sawah, kejruean terlihat mengobrol lepas dengan beberapa petani yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Mereka terlihat sedang makan nasi guri yang dibungkus (semacam nasi uduk) dan minum kopi dari plastik yang dituangkan ke dalam gelas.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana keadaannya usaha bekerja masyarakat sekarang ini pak?

Lemah sekali, reusam kita duduk di kedai kopi. Cari duit sekedar untuk dapat belanja hari ini. Tidak rasa cemburu kalau melihat orang bisa membangun rumah yang megah..mereka merasa sudah cukup dengan apa yang dimiliki sekarang.

Apa karena kurang pekerjaan Pak?

Kalau kita pikir kerja, setiap hari ada pekerjaan yang dapat dilakukan? Sekarang lihat saja, yang sedang memotong padi itu, seorang tengku imuem di meunasah kami. Ia juga seorang guru sekolah sini. Tapi ia mau bekerja seperti itu, mungkin sambil memberi contoh bagi anak muda lain. Anak muda sekarang, tak bisa lagi bekerja seperti itu, saya yakin yang tersisa hanya orang-orang yang sebaya kami...yang bisa memotong padi,tak mau lagi mereka ke sawah. Anak saya saja dirumah ..saya ajak ke sawah untuk belajar melakukan pekerjaan tani pun mereka sudah tak mau. Mereka lebih senang kerja bertukang, karena uang bisa didapat langsung setiap seminggu sekali atau setiap sore saat pulang kerja. Kalau bertani kan tidak begitu, setelah panen baru bisa dapat uang kan lama..sekitar 3 bulan dari sejak bekerja. Beda dengan masa kami muda dulu, asal kosong waktu dan ada pekerjaan di sawah..kami turun ramai-ramai. Anak muda sekarang kita bilang biar kita belajar bila memang tak bisa..tetap tak mau. Pidie ini bisa dibilang dimana-mana sawah. Ga usah dulu kita bilang banda aceh atau tempat lain..tapi sekarang pun tanah sawah sudah mulai kurang, karena dibangun rumah, toko..lihat aja yang dekat itu..sebentar lagi sudah akan dibangun rumah. Maka nanti, sempit dan semakin sempit..mungkin juga karena jalan ini sudah bagus, kalau dulu kan tidak..dengan ada jalan bagus, orang terpancing untuk mendirikan bangunan.

Bicara tentang jalan, Bagaimana dengan tanah sawah yang ditengah-tengah, mereka tidak punya akses jalan untuk memindahkan padi saat panen?

Oh tergantung keadaan, kalau tanah sedang kering mereka langsung letakkan batang padi yang dipanen di petak sawahnya..tapi kalau sedang basah mereka angkut ke pinggir jalan ini. Yang agak tinggi tempatnya, mereka alasi dengan jerami lainnya lebih dahulu.

(disela itu, Kejruen mencandai seorang tani yang sedang memotong padi. Dikatakannya sang tani makan gaji buta..jam segini bukan mengajar..dijawab sang tani yang juga seorang guru, bahwa jam mengajar yang menjadi kewajibannya telah dipenuhi..)

Bagaimana hasil Bapak sendiri?

Saya cukup, dan punya sawah sendiri.

Setelah panen berlangsung, petani biasanya mengerjakan apa lagi hingga musim tanam mendatang?

Tidak sama semua,ada yang pergi ke laut (nelayan). Tapi ada juga yang tak punya kerja. Kalau anak muda sebagian besar mereka bertukang di pekerjaan bangunan. Mereka mengharap gaji seminggu sekali. 3 bulan menunggu hasil. Seperti padi ini, makan waktu 100 hari untuk panen..

Bagaimana cara kerja sekarang para tani?

Ada yang diupah, ada juga yang bergotong royong..bergantian kita saling membantu. Saat kita panen, kawan kita bantu..saat dia, kita bantu..paling kita disuguhi makan siang, kopi dan rokok saat istirahat. Kalau kita kerjakan bersama tak lama, sehari selesai..

Kalau hasilnya?

Kali ini memang bagus..tapi biasanya juga kalau sawah yang disini dan yang di blang raya beuringeun, setiap tahun selalu memberi hasil bagus. Disana tak pernah kekurangan hasil



Transkrip Wawancara Mendalam

Informan 03

Jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 50 tahun, sudah punya 2 anak dan satu istri. Pekerjaan utama berjualan lontong di emperan teras kedai kopi.

Wawancara berlangsung di mesjid sesuai melaksanakan shalat jemaah dhuhur. Peneliti sempat mengalami pergeseran lokasi wawancara karena kesibukannya. Permintaannya wawancara berlangsung di Mesjid. Menggunakan topi warna merah dan baju kemeja lengan pendek ia terlihat memasuki halaman mesjid dengan sepeda. Peneliti sudah lebih dahulu hadir. Setelah shalat selesai, ternyata peneliti sudah ditunggu di bagian yang berdekatan dengan shaf wanita. Dari informasi awal, ternyata informan sudah sempat merantau hingga ke Jakarta, bahkan istrinya merupakan orang Sumatera Barat yang dikawininya saat di Jakarta. Ia berada kembali di Meureudu karena ingin mencoba mendapatkan keadaan hidup yang lebih baik. Momentum tsunami, mengantarnya kembali berada di kampung halamannya.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana keadaan usaha pekerjaan Bapak saat ini dan apa saja yang telah Bapak lakukan selama ini?

Saat ini saya berjualan lontong. Saya telah merantau ke Jakarta sejak tahun 1970an, kemudian saya kembali ke Aceh tahun 2005. Setiba di Aceh saya sempat bekerja di Alice, perusahaan asing yang bekerja membangun Aceh setelah tsunami. Di Jakarta saya bekerja di percetakan. Saya tidak mendapat apa-apa kecuali keluarga di Jakarta. Saya kembali ke Meureudu karena ingin merubah nasib dan lebih berkembang. Saya asli Meunasah Balek.

Apa yang Bapak peroleh setelah bapak pulang di sini?

Saya kerja mocok-mocok, kerja bangunan, begitu-begitu saja. Tidak ada peningkatan yang berarti.

Pendapatan yang Bapak peroleh sekarang, apa mencukupi?

Tidak, setiap hari dari berjualan lontong saya hanya mendapat keuntungan sekitar 20ribu per hari.

Apa yang bapak pikirkan dengan pekerjaan ini saat ini, bagaimana?

Ngak memang Kepengen juga yang lain, tapi karena modal tidak ada maka Cuma ini yang bisa kami jalankan. Kami juga punya anak-anak yang membutuhkan

biaya banyak. Sehingga kita tak bisa putar modal. Akhirnya dengan jualan lontong, ya standar ukuran aja kita hidup.

Hal-hal apa yang mendukung usaha Bapak mencari rejeki, dengan kondisi Pidie Jaya atau Meureudu saat ini?

Nggak, kalau dari masalah ekonomi jauh. Tidak enak.

Tadi saya lihat bapak menarik becak (barang)?

Ya itu tadi saya jadikan modal berusaha

Bagaimana aktifitas harian Bapak saat ini?

Saya mulai bekerja jam 7, mengangkut lontong ke kedai kopi tempat kita berjualan. Kita hanya bisa pakai rak, itu lemari hingga jam 12. Karena setelah itu sudah mulai dipakai oleh orang yang berjualan nasi. Setelah itu pulang, kalau ada mocok-mocok di TPI bisa jadi sampe jam 2 atau 3. Tergantung kalau lagi kuat. Setelah itu saya dirumah, membantu istri untuk memasak lontong sehingga jam 12 malam. Abis shalat magrib dan isya kita kerjakan untuk jualan besok hari. Saya melihat usaha lain, tapi tak ada.

Yang menghambat Bapak dalam bekerja dan berusaha?

Modal, modal usaha

Dengan keadaan sehari-hari di Gampong ini, bagaimana bapak melihat upaya-upaya Pemerintah terhadap pekerjaan Bapak?

Tak ada membantu, bila kita mengeluh pada anggota Dewan atau DPR. dianggap lalu, masa bodoh. Saat LSM ada dulu, saya sempat bekerja di ALECE dengan gaji 35ribu sehari. Mereka mempekerjakan kita untuk membersihkan rumah-rumah penduduk yang di meunasah Balek, Teupin Pukat dan Meuraxa.

Mengapa tidak mengajukan kredit usaha kecil ke Bank?

Bank-bank itu mengambil bunga dari kredit..itu riba, saya tak mau ada bagian yang diharamkan Tuhan dari setiap usaha saya mencari makan. Saya mau kalau ada yang memberi bantuan modal tanpa bunga..saya akan kembalikan pokok nya saja, Bila ada kelebihan dari uangnya yang saya jadikan modal maka dengan ihlas akan saya berikan sebagai bentuk terimakasih saya. ..aa jadi kita ihlas memberi.

Motivasi bapak bekerja apa?

Yaa untuk mendukung anak-anak dan keluarga, supaya anak-anak bisa berhasil..

Bagaimana dengan nilai keyakinan, terkait motivasi itu Pak?

Ada, saya pikir pertama tuntutan ilmu. Setelah itu bekerja dagang usaha..apalagi kalau modalnya agak aman agak tenang..

Secara agama, orang kaya apakah ada memberi sedekah untuk modal untuk bapak?

Gak ada, paling paling saya dapat uang fakir miskin..tapi dilihat orang nya dulu. Dilihat karakternya orangnya dulu. Mungkin kalau orangnya berlebih tidak dikasih,mungkin juga orang yang dibawah saya kan ada..nah dibawah itu juga ada lagi. Dikasih kan dibaca dulu oleh geuchik, kalau tidak pantas ya gak dikasih.

Dilihat dari kondisi rumah tinggal disini, apakah ada yang dibawah Bapak keadaannya? Dan apa pekerjaan mereka?

Ya ada,dibawah saya banyak. Dia suka di TPI, suka angkat raga atau ikan kalau ada boat yang pulang..ada diberi sekitar 10 ribu dan 20 ribu.

Apakah ada diantara mereka yang Bapak sebut tadi terlihat malas bekerja?

Banyak..hehe..banyak, malah saya saranin, kamu kerja dong..jangan suka mabuk. Masih muda-muda. Kalau orang itu bilang saya intel. Saya suka bilang pada mereka agar yang begini itu jangan..yang begitu itu jangan. Mereka kadang suka melecehkan saya, apa itu kamu ngatur-ngatur saya. Buat hidup kamu sendiri aja susah.

Umur berapa mereka? Dan ada berapa banyak mereka?

Sudah ada 2 atau 3. Mereka banyak pak..banyak.

Lalu,dari mana mereka mendapat uang untuk menutupi kebutuhannya?

Kadang belum tentu,kadang di TPI, kadang mancing, kadang ikut perahu pada tarik pukat.lalu uang itu dipakai untuk minum ke keude. Mereka juga kalau kepalanya lagi pas, bekerja. Kalau lagi mau,bekerja. Kalau tidak itu, mereka ngobrol-ngobrol di TPI. Kalau ada boat yang pulang dipanggil untuk angkat ini dan itu, mereka angkat.

Di gampong ini, semua fasilitas untuk bekerja ada. Seperti sawah,pasar,tambak,TPI. Mengapa mereka tidak bekerja?

Mereka itu malas, kalau kata orang aceh. Tanpa kerja dapat uang. Kalau bapak perhatikan sedih kita lihat..mereka punya anak punya cucu.

Kalau Bapak mengenal mereka, Apa sebab mereka begitu?

Yang pertama sekolahnya tidak ada,mereka teman maen saya..bahkan saya saranin kenapa tidak jualan, kan ada boat-boat bawa pulang ikan. Beli 5ribu jual 10ribu..akhirnya larinya ke modal juga.

Tapi modalnya kan kecil kan Pak? mengapa tidak pinjam.

Ya itu tadi, kalau ada duit. mereka larinya ke ganja.. kalau lagi mau, mau.. kalau gak ya gak. Kadang saya saranin dilecehkan. Kadang mereka meminta saya membawa ikannya ke pasar. Saya tak terima duit. Itu buat kalian aja..

Mengapa?

Karena saya kasih support, supaya mereka terdorong. Banyak orang disini kenal mereka, tauke ki dan kak dah pada tau mereka semua

Dimana mereka biasa duduk?

Mereka biasanya ngisap di tong tong di TPI, sekarang sering diusir oleh tauke bangku.. kalau ada apa-apa dengan polisi, mereka bisa kena karena dikira mengisap juga.

Bagaimana Bapak melihat orang di gampong ini yang berhasil? mengapa mereka bisa demikian?

Yaaa. ini kalau mau masalah kekeluargaan, itu ada Yutdin, dia itu lumayan.. boatnya saja ada empat atau tiga. Hartanya juga ada. Tapi gak ada untuk narik orang kerja, gak ada.. memangnya orangnya agak pelit sedikit. Yang bekerja konco konconya saja.. anaknya, keluarganya. Saya termasuk keluarga, tapi saya tak ditarik juga, orangnya agak pendiam.. ngomong dengan orang juga tidak.

Bagaimana dengan yang lain?

Ada tauke bangku lain, seperti is. Dia standar, hidupnya lumayan.. orangnya suka menolong juga. Dia suka pegang boat, boatnya sendiri juga ada. Sepulang dari pegang boat sering saya lihat dia suka pegang buku.. tapi yang paling afdol yutdin. Kalau yang paling berhasil ya Yutdin.. kalau is ada meningkat.

Bapak sendiri, apa yang bapak miliki dan mendukung kerja bapak hari ini?

Saya belum punya rumah, kemarin ada NGO. saya diinterogasi, agak jauh.. dia mencari agak jauh. Dia mencari orang yang agak kaya, pegawai.

Bapak, bagaimana dengan bantuan rumah-rumah bagi orang tak mampu yang diberikan NGO?

Itu permainan orang dalam semua, saya tau persis.. orang dalam gampong. Misalnya ada ketua, nah ketua itu memilih sodara-sodaranya sendiri.. ada dua rumah yang dibantu disini. yang lain standar diberi.. saya kan tsunami di jakarta. Saya pernah komplain pada NGO, terus saya digeser.. mungkin tersinggung.

Bagaimana dengan adat istiadat terkait dengan kebiasaan bekerja?

Untuk sementara saya kira gak ada, cuma disini kan ada dua kelompok. Salafi dan tabligh, dua duanya berjanggut.. keduanya saling bermusuhan. Berdua itu lain jalur,

kalaupun tabligh ada ustaz maka salafi ga denger, begitu juga kalau salafi da ustaz tabligh ga denger. Ayaa..saya semua saya ikut, apa yang perlu saya ambil..saya ambil. Di jararta, NU saya ikut, muhammdyah saya ikut..orang ini saya bilang, untuk apa ribut-ribut? Di jakarta tidak ada ribut-ribut.

Bagaimana mereka bekerja?

Mereka kalau usaha,ada yang jual buku, ada yang jual es..bisnislah, ada yang jual jahe juga..mereka ada yang beristri dengan orang sini.

Apa ada diantara mereka,salafi dan tabligh tidak bekeja?

Tidak ada,mereka bekerja semua..sayalihat yang nganggur 100% tidak ada..ada yang tukang juga ada.

Apa ada beda masyarakat mencari nafkah, antara masyarakat yang tidak dalam dua kelompok itu dengan kelompok itu?

Bedanya jauh sekali.,jauh.

Apa sebabnya?

Mereka itu kan...aaa,kalau lagi kerja,kurang negur-negur. Kalau masalah ekonomi tidak ada ngomong...masa bodoh begitu...nah itu semua salafi (sambil menunjuk orang lewat).

Berdasarkan itu, Apa ada kaitan orang rajin bekerja dengan agama?

Gak juga. Kadang pikir pikir ,kadang orang ini. Tabligh salafi,pilih teman. Kalau teman dekat ngobrol..kalau tidak ya tidak. Kalau di sana, mereka tidak ada teman ngobrol. Mereka Cuma di mesjid,ngobrol dengan sesama sendiri..kan di mesjid tempat orang orang terhormat.

Bagaimana dengan shalatnya orang yang bapak sebut bekerja di TPI?

Jarang..jarang,sering malah saya tegur.kenapa kalian ga shalat. Malah saya datang,mereka sebut provokator datang.mereka tak mau diganggu,mereka bilang itu hak dia,dia yang tanggung jawab sendiri. Malah saya punya becak tawarkan diri,kalau ada barang akan saya bantu bawa..saya ga minta duit.

Sebenarnya kenapa orang salafi bisa rajin bekerja, disana tidak?

Kalau itu seperti yang saya bilang tadi, mereka punya kelompok-kelompok disana..memang dasarnya malas. Tapi kalau lagi shalat ya shalat.tapi setahu saya tidak selalu.

Transkrip Wawancara

Informan 04.

Laki-laki, usia 55 tahun, Pekerjaan utama sebagai pedagang di keude Mereudu. Kedudukan lainnya adalah tengku imuem meunasah. Memiliki rumah berdekatan dengan meunasah dan terlihat gesit serta cekatan membuatnya lebih tepat masuk ke kelompok anak muda maupun orang tua. Peneliti memiliki kesempatan lebih banyak menggali informasi darinya, karena keberadaannya selalu di meunasah pada untuk memimpin shalat magrib dan isya. Diantara kedua waktu tersebut, terkadang informan tidak meninggalkan meunasah. Bersama dengan beberapa orang lain, sering berlanjut berbicara dari hal-hal ringan hingga yang berat.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana Bapak melihat kondisi usaha bekerja masyarakat, terkait dengan kondisi taraf hidup dan pendapatan masyarakat?

Walau orang terlihat ramai, tapi penjualan sepi. Belum lagi toko-toko lama mau dibongkar pemerintah. Mau dibangun toko yang lebih bagus, toko beton..sayangnya mereka tak mengajak kita bicara, agar kita bisa sampaikan bahwa kondisi hari ini sangat tak layak untuk usaha tersebut. Ini tidak..seperti rapat tadi cuma formalitas, diajak musyawarah, tapi di koran sudah diumumkan kalau bulan empat, semua toko akan dibongkar. Pedagang tak diberi tempat penampungan sementara. Semua barang harus kita bawa pulang ke rumah. Darimana kita tutup uang hutang dari barang yang sudah ada. Kemana kita bawa barang yang ada itu. Uang sewa toko baru nantinya pun sudah tak seimbang dengan uang masuk dari jualan, bayangkan saja dengan luas hanya 3x3 m sewa sebesar 12 juta setahun, mengapa kita selalu kalah dengan penguasa. Padahal sebagian pejabat kantor bupati ada di kampung ini.

Mengapa bisa Pak?

Begitulah kalau sudah besar, apa kita bilang..sesama kita sendiri juga. Semua yang duduk di pemerintahan adalah orang kita. Mungkin kita sudah terbiasa untuk tak diajak bicara kalau mau berbuat sesuatu.

Bagaimana dengan dukungan terhadap Bapak sebagai pemuka agama?

Ada dibantu sekedar untuk biaya kita tengku imuem meunasah, honda juga katanya akan diberi..tapi saya yang dekat untuk apa juga.

Transkrip Wawancara

Informan 05.

Laki-laki, usia 60 tahun, anak tujuh, Pekerjaan utama sebagai tauke pemilik dari beberapa kapal penangkap ikan jenis pukat langga. Ia aktif mengembangkan usaha diluar bidang utama tersebut.

Seorang nelayan yang terbilang berhasil di Meureudu, ia dikenal masyarakat luas. Saat ini ia memiliki pendapatan di luar dari usaha nelayan adalah usaha sarang burung walet dan usaha pertanian sawah yang memperkerjakan orang lain.

Dalam kesempatan yang diberikannya untuk saya mewawancarainya, menggali informasi mengenai cara masyarakat Aceh bekerja dalam konteks kemiskinan yang menjadi isu utama dan dikaitkan dengan agama dan adat istiadat yang berlaku. Wawancara berlangsung dirumah anaknya, Agustina (Bidan PTT) pada tanggal 14 Maret 2011, sekitar jam 20.00 selama kurang lebih satu jam.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana Bapak melihat keadaan bekerja dan penghidupan nelayan ?

Nelayan yang pintar mengelola uang akan bisa bertahan hidup dan berkembang. Contoh saya katakan bahwa mengalihkan pendapatan dari sekali panen, 3 ton, sekitar 5 juta. Kita beli emas yang dapatnya sekitar 5 manyam (3,2 gram). Emas itu bisa kita jadikan alat untuk membantu orang yang hendak menggadaikan tanah sawahnya pada kita. Kelola lagi yang baru, sehingga dari tahun ke tahun uang kita semakin bertambah. Yang dari 3 ton, tahun depan dapat 4 ton dan tahun depannya lagi bisa dapat 5 ton. itu cara supaya uang bisa bertahan (peudong peng). Tapi kalau hanya nelayan menjadi pekerjaan tunggal, seberapa banyak uang tidak akan bertahan apalagi berkembang. Karena apa, dari laut kita hanya dapat 1 tapi pengeluaran kita 10, yaitu seumpama pertama uang jajan anak sekolah, kedua Beras dan nasi, ketiga Kopi di botol untuk dibawa ke rumah. Tak cukup apa yang kita dapat. Sebut saja dapat uang 200ribu, setelah beli beras tinggal 150ribu. Nah yang 50 ribu untuk hilang tak jelas..kebutuhan yang tak terduga. Tapi kalau pendapatan dari sawah, terkumpul. Dengan adanya dua mata pencaharian, untuk cari makan dari pendapatan sebagai nelayan, untuk terkumpul harta kekayaan dari tani sawah. Itu yang saya jalankan dan saya anjurkan pada semua. Yang mau menjalankan terbukti berhasil. Tapi bila hanya mengandalkan laut maka seberapapun hasil uang yang didapat maka akan habis lagi.

Nelayan bisa berhasil bila ada usaha nya yang lain di darat. Kalau nelayan penuh tak akan berhasil. Kecuali telah menjadi tauke...itu sudah lain cerita. Karena sudah ada boat sendiri modal sendiri, sekali-kali dalam sebuah kesempatan bisa mendapat uang sampe 1 milyar (sambil tertawa). Ini berlaku yang masih

mengikuti atau bekerja di boat milik orang lain. Seperti setelah terjadi tsunami tempo hari, tak ada nelayan yang tak kaya. Sebut saja sekali melaut, boat membawa ikan 15 hingga 20 tong. Dan itu berlangsung hingga 2 tahun. bayangkan saja..(tertawa terkekeh-kekeh membayangkan suasana saat itu). Tapi itu sewaktu-waktu. Tidak selamanya. Siapa yang pandai menggunakan peluang itu untuk usaha lain, maka akan beruntung.

Contoh saja saya sebutkan yang juga mengerjakan tiga pekerjaan sekaligus, Haji Umar. Bekerja sebagai pedagang, peternak lembu dan bertani sawah. Lembu di tahun ini 5, dengan modal 5 jt maka modal 25 juta. Akhir tahun lembu terjual 28 juta, tak saya sebut 30jt. maka dapat keuntungan 3 jt, total dapat laba 15 juta. Dari laba itu beli lembu lagi 2 ekor, sehingga lembu menjadi 7 ekor. Tahun depan demikian lagi, sehingga lembu terus bertambah. Katakan setiap tahun bertambah 3 atau 2. Diluar itu, hasil sawah. Ia punya sawah 5 nalah. Dikerjakan oleh orang lain. Katakan ada hasil 4 ton. Beli benda, tidak dimakan. Musim depan dapat 4 ton lagi. Beli benda lagi, sehingga benda nya banyak. Lalu mencari tanah sawah yang hendak dijual. Sebut saja ia mendapat tanah 5 are. Saat ini saya tahu ia punya lembu sampai 70 ekor dan tanah mencapai sigunca setengah. Pendapatan dari dagang adalah yang untuk dimakan sehari-hari. Begitu cara hidup ekonomi orang yang membuka usaha lebih dari satu. Karena itulah orang yang mencari uang ramai, tapi yang mengelola uang dengan cerdas sangat sedikit.

Jadi ?

Dalam hidup harus dibagi mana untuk keluarga, rumah tangga. Setiap kita harus membuat pembagian dari pendapatan. Apa mau dibagi 5,4 atau 3. Harus ada administarasi kalau istilah bahasa orang yang sekolah. Katakan ada pendapatan 3 juta. Si istri tidak bekerja, maka misal kita bagi 4 atau tiga. Misalnya utk operasional rumah tangga disisakan 1,5juta. Tersisa 2 kalau dibagi 4. Yang 750 rb harus disimpan, sedangkan yang 750rb lainnya untuk kegiatan bermasyarakat misalnya untuk kado orang kawin, sedekah untuk orang meninggal. Simpanan itu harus disimpan, kecuali untuk hal-hal yang sangat terpaksa.

Jadi mengelola uang?

Sering salah mengelola dan mempergunakan uang.

Dari mana mendapat hal itu?

Datang dengan sendirinya dari perjalanan hidup, setiap saat kita berpikir bagaimana mendapatkan dan mengumpulkan uang. Bila itu datang dari pemikiran sendiri maka sebagian besar itu akan berhasil. Tidak bisa mengandalkan sekolah, karena pemerintah hanya menyelenggarakan pendidikan di sekolah tidak fokus. Contoh saja sekolah perikanan, berapa orang dari mereka yang menjadi nelayan? Begitu juga sekolah pertanian, ada mereka diajarkan teknik bercocok tanama sehingga mereka kelak menjadi petani yang sukses ? tidak. Saya melihat apa yang

diajarkan sekolah tidak banyak terkait dengan pekerjaan yang kelak dilakukan. Tapi kalau kita belajar ini dari alam, sering membuahkan hasil. Dengan kita bergaul, saling cerita dengan orang yang sudah berhasil. Lalu kita tarik sebuah pemahaman bahwa untuk berhasil harus pintar-pintar mengelola modal dan pekerjaan.

Begitulah cara menjadi sukses. Ini pengalaman saya pribadi ya..waktu di krueng mane, Saya tolong orang miskin. Tak ada pupuk, saya kasih ia pupuk. Bila perlu uang dia, saya kasih. Lalu saya katakan padanya berapa sudah uang saya yang ada padanya..sejumlah uang itu, nantinya bila sudah panen. Jangan kembalikan duitnya. Tapi berikan hasil padi sesuai dengan jumlah padi yang sama dengan jumlah uang, melihat harga padi di pasaran pada hari itu. Mengapa demikian? itu uang arisan (julo-julo) yang saya pinjam dari beberapa orang, sebut saja 1 jt dari si polan, 1 jt dari si polan dan 1 juta lagi dari yang lain. Akhirnya dikembalikan padi sebanyak 3 gunca. Lalu padi itu saya simpan dulu atau saya jual langsung, saya lihat kondisi harga. Nah setelah terkumpul itu padi maka saya jual, uangnya saya belikan emas sehingga mendapat beberapa manyam..saya tidak meminta kembalikan uang karena kalau ia sudah mendapat uang seringnya tergoda untuk menggunakan dahulu. Jadi saya minta dikembalikan dalam bentuk barang yang ia hasilkan, pasti dalam kesempatan pertama setelah panen adalah mengembalikan hutang uang itu pada saya. Keadaannyapun tidak menyulitkan dia, karena saya tidak meminta lebih besar dari jumlah uang yang dipinjam, harga padipun mengikuti yang berlaku pada saat dipanen. Demikian secera perlahan-lahan bertambah dan bertambah. Itu cara orang biasa menambah modal atau kekayaan. Berbeda dengan kontraktor yang memang sudah punya uang banyak. Tapi kalau dari bawah, ya harus seperti itu. Tak ada jalan lain.

Bila orang sudah menjalankan strategi itu, tapi kemudian jatuh juga. Itu karena alasan apa?

Kalau orang sudah berilmu, lalu jatuh juga. Itu karena kesalahan diri sendiri. Mungkin berjudi, beli judi buntut, foya-foya. Tapi kalau jatuh orang tidak ada ilmu, ya seperti kita katakan tadi. Keinginannya besar daripada apa yang mampu ia buat. Istilah "*kadha sikai, hana mungken na si are*". Begitu ada duit 30ribu sudah beli kentucky. Tak berpikir untuk besok, bagaimana. Mereka pikir hari ini dapat 200ribu, besok kemungkinan dapat 300robu. Begitu tidak ada, bingung.

Khusus untuk nelayan, artinya nelayan kecil?

Hanya bisa maju bila ada kegiatan mencari pendapatan lain di darat, uang tetap dicari di laut. tetapi sebagian darinya diputar untuk modal pekerjaan lain di darat. Apa mau berkebun, buka kios di rumah, apa mau bersawah. Uang pokok tetap dari nelayan. Dari laut biaya harus kita beli semua, kita sebut 'sira campli' semua harus kita beli. Kalau bertani sayur-mayur bisa diambil sendiri di lahannya. Kalau

kita dari mana? Semua kita beli, bahkan air untuk minumpun harus kita beli. Maka dari itu, sulit bertahan uang. Padahal kalau kita lihat seringnya lebih banyak uang nelayan daripada yang bekerja sebagai buruh atau pegawai. Hanya saja nelayan uangnya sedikit demi sedikit diperoleh secara harian dan tidak dalam jumlah pasti. Bila ia hemat dan cermat dalam mengelola uang, pasti ia akan lebih baik.

Nelayan pekerjaan yang berat di laut, apa pemikiran Bapak dengan sebagian pendapat yang menyebutkan malas menghingapi masyarakat ?

Kalau malas tentu mereka tidak ke laut. Karena menjadi nelayan di laut itu pekerjaan yang lelah. Namun bila ada yang tidak terbangun keadaan hidupnya. Itu lebih disebabkan karena ketidakmampuannya mengelola uang. Kalau pendapatan nelayan, saya sebut saja 100-150ribu setiap hari pasti di dapat...kecuali mungkin untuk hari-hari tertentu yang tidak melaut. Saya sebut dari pukat ia bisa dapat. Pendek kata setiap nelayan, totalnya sekitar 3 juta bisa didapat setiap bulannya..lebih besar dari gaji pegawai dengan golongan kecil.

(Agustina yang turut mendengar Ayahnya bercerita, turut memberi pendapat ia sempat mempraktekkan kebiasaan menyisihkan sebagian pendapatannya sebagai bidan PTT, 100ribu setiap bulan). Ini saya ceritakan yang lain. Sewaktu saya muda saya bertemu sekelompok anak muda yang bekerja setiap hari mengangkat batu bangunan dari sungai. Mereka saya tanya berapa dapat sebulan, dijawab 50ribu. Untuk ukuran sekarang katakanlah uang itu, 500ribu. Lalu mereka menyambung jawabannya. tapi kami tak makan ikan enak seperti yang bapak makan. Kami makan ikan asin dan ikan yang murah. Kalaupun kami makan ikan enak, seminggu sekali. Agar dapat tersisa uang setiap bulan. Dari tahun ke tahun, hingga 10 tahun ia mampu membuka kios es. Ternyata ia pakai modal sendiri dengan dibantu tauke tempatnya bekerja sedikit. Saya lama berkawan dengan dia. Saya sendiri waktu muda, sudah biasa berkerja mencari uang dari luar nelayan, hanya saya sendiri yang begitu di antara keluarga. Saya sempat jualan kacang dengan menenteng tas di dalam kereta api di krueng mane (tertawa terkekeh mengenang masa mudanya). Menjelang tahun 1963 atau 1964 baru saya berangkat ke laut. Awalnya saya sempat jualan kopi, jualan rokok di Mane.

Kalau di Meureudu, bagaimana PNS bisa terbangun taraf hidupnya?

Saya melihat mereka tidak bisa sejahtera, kalau hanya mengandalkan gaji Pegawai nya. Tapi sebagian dari mereka menyisihkan sedikit dari gajinya untuk memelihara ayam dan usaha lainnya seperti sawah. Kalau gaji tetap saja tak cukup. Di gampong ini, memang demikian polanya. kalau mau berhasil harus hemat dan cermat mengelola sedikit pendapatannya. Kalau ada yang tak berhasil, bukan karena malas. Mereka rajin mencari nafkah, karena dengan nafkah itu mereka penuhi kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan rokok. Kalau sudah itu, apapun akan dilakukan setiap orang agar ia bisa membeli. Begitu juga

kalaupun istri sudah mengatakan perlu uang untuk keluarga. Maka akan orang laki-laki akan keluar rumah, itu dipikirkannya berputar apa saja jalan yang mungkin ditempuh. Maaf kata mungkin terlintas, bila perlu bohong pun harus dilakukan demi mendapatkan uang.

Bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak ada kerja untuk nya?

Tidak mungkin itu ada, pekerjaan yang bisa dikerjakan banyak. Kalaupun ia katakan tidak ada, hanya tidak tampak saja. Saya beri contoh, ada perempuan dirumah kerjanya menganyam tikar pandan. dalam satu bulan dapat dihasilkan sepuluh lembar tikar pandan. Ada duit minimal sekitar 200ribu. Itu disebut uang sampingan. Demikian juga pegawai yang sambil bekerja di kantor, juga menjual baju-baju di rumahnya saat ada waktu luang. Uang itulah yang lebih, bukan dari kantor. Sebut saja dari menyisihkan pendapatan gaji dan dari laba menjual baju di rumah ada tertinggal uang 1juta. Lalu dibeli emas, bulan depan begitu lagi, beli emas lagi. Yang jelas semua orang pada dasarnya ada pekerjaan yang tak diperlihatkan pada orang lain, meski tidak menjadi hal baik. Penjual ganjapun yang diam-diam bekerja, adalah dalam upaya mendapatkan uang. Meskipun orang lain melihat ia tidak mempunyai pekerjaan.

Bagaimana Bapak melihat kelakuan masyarakat dengan keadaan Aceh yang disebut miskin dalam data pemerintah? Padahal orang Aceh mayoritas beragama Islam yang menyebutkan bahwa bekerja itu ibadah.

Kalau karena agama...(ia menggeleng)..karena semua bekerja dengan apa yang dipikir butuh hari ini. Kita lihatlah tak ada rencana hidup orang secara jangka panjang, apa yang sudah mereka kerjakan. semua yang hari ini dipetik adalah apa yang ditanam oleh orang tua mereka. Tak ada orang Aceh yang miskin. Bisa kita lihat tak orang Aceh yang sampai tidak makan. Perkara tak ada uang yang pasti masuk ke kantongnya setiap hari, iya memang betul. Hanya saja mungkin dilihat dari banyaknya proposal dari kegiatan bangun mesjid, bangun pondok pesantren sehingga terkesan orang Islam itu miskin. Itu salah saya bilang. Tapi hal itu terjadi, karena ada yang menyediakan dana untuk diambil. sehingga semua membuat proposal mengaku diri miskin. Ini contoh saya sebutkan. Ada jatah uang dari pemerintah untuk hak orang miskin yang sakit. Tapi karena itu, semua orang yang hendak berobat ke rumah sakit di sigli membuat surat keterangan miskin. Padahal saat berobat mereka memakai perhiasan emas besar-besar. Sehingga seorang dokter pernah mengatakan pada saya “coba tengok pak Non, itu mengaku orang miskin yang dirawat sakit. Tapi ia membawa spreid sendiri dari rumah, gelas emas besar-besar di pergelangan tangannya”. Akhirnya data-data penduduk miskin diambil dari kejadian-kejadian administrasi semodel itu oleh para wartawan atau pemantau Aceh. Nah itulah model miskin pada masyarakat kita. Mana ada miskin pada kita. Sekarang Bapak boleh lihat, karena sedang turun di lapangan. Lihatlah berapa orang sesungguhnya yang miskin di sini, yang

rumahnya tidak ada ? yang tak ada pakaian, tak ada makanan. Malah diantara mereka ada sawah 10 are.

Bukan saya bilang tidak ada orang miskin.tetap ada, tapi saya tak yakin ada orang miskin seperti yang digambarkan data pemerintah. Kebanyakan orang miskin karena melihat ada keuntungan bila mengaku miskin.

Bagaimana dengan kondisi rumah yang terlihat lebih memprihatinkan daripada rumah lainnya?.

Saya pikir tidak ada,kecuali rumah thaleb yang sedang tidak waras.

Apa yang pernah dilakukan Pemerintah dalam rangka memecahkan masalah yang Bapak sudah temukan tadi sebagai simpul dari masalah tak membaiknya kondisi pendapatan?

E..itu yang paling berat dan sulit, Pemerintah tak punya perhatian pada masalah itu..saya hanya melihat pemerintah harus mengawali perhatiannya dengan banyak berbicara pada masyarakat.Contoh saya sebutkan, Sawah. Apa pernah mereka turun ke lapangan dan mengatakan akan membuat supaya air mengalir rata ke semua petak sawah? Mereka hanya turun,sambil berkata mereka akan bekerja menurut RAB (maksudnya Rencana Anggaran Biaya) yang telah diberikan kantor. Kadang-kadang kalau kita kritik ada yang sampe marah, atau setidaknya mereka ngotot bahwa ini patokan proyek yang harus mereka jalankan. Mereka membuat rencana gambar dan proyek di atas meja, bukan di lapangan. Maka kesalahan pemerintah dari situlah..maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah tak pernah ada.

Saya pernah langsung mengkritik Bupati di depannya, soal toko di TPI. saya menyesali dibangunnya sesuatu dengan uang bantuan pihak lain tapi tak bisa maksimal dinikmati kemanfaatannya. Saya tahu sumber uang bantuan,tapi mereka hanya bisa membangun dengan rekom dan persetujuan Bupati setempat. Mngapa tidak dikomunikasikan dengan masyarakat, apa dan bagaimana yang sedang dibutuhkan saat ini? Lihatlah yang ada rugi saja. Dijawab nya sudah dipanggil orang-orang untuk dimintai pendapat. Tapi saya sendiri sebagai tokoh masyarakat dan nelayan tidak pernah dimintai pendapat soal itu. Begitu juga soal sawah, disitu ada beberapa tokoh masyarakat yang bekerja sebagai petani. Kapan mereka pernah dipanggil sebelum proyek parit air yang melewati persawahan dibangun? Seringkali kami tidak diajak bermufakat. Padahal proyek itu harus mengutamakan pendapat orang setempat.bagaimana negeri itu,hanya orang setempat yang tahu kebutuhannya. Ini tidak? Mereka membuat RAB dengan praktek sekolah di Jawa. Lalu untuk kebutuhan proyek di tempat kita, mereka Bekerja di meja,hasilnya lalu mereka bawa ke sini. Mana bisa cocok dengan kita?

Bagaimana dengan Musrenbang?

Tidak ada itu, mana ada pendapat kita dimintai. Lihatlah proyek krueng Meureudu. Tujuan dibuat supaya tidak terjadi lagi pendangkalan sehingga memudahkan arus keluar masuk boat nelayan. Tapi lihatlah mereka membuat berkelok-kelok, tidak lurus. Akhirnya arus air sungai membuat dangkal di tiap tikungan sungai. Coba mereka buat lurus, maka semua pasir yang dibawa arus akan lurus terbawa hingga ke lautan. Sebenarnya ada cerita menarik soal ini, terjadi saat Gubernur di pegang... (sambil mencoba mengingat).. Nah mereka dari kantor Gubernur, Alur sungai Krueng Meureudu telah kami sarankan kepada tim pemerintah yang turun sejak tahun 90-an, mereka sependapat dengan kami bahwa alur sungai dibuat lurus dan tak mengikuti kelokan yang telah ada. Tujuannya agar saat air turun tidak terjadi pendangkalan di tikungan-tikungan sungai. Kalau lurus kecil kemungkinan pasir-pasir atau lumpur mengendap karena turut dibawah air mengalir. Sekarang lihatlah bentuk sungai yang dibiarkan berkelok-kelok, pengendapan lumpur tak lama membuat dangkal sungai. Sehingga boat-boat nelayan harus menunggu air pasang baru dapat masuk atau keluar.

Bagaimana bisa ?

Bisa. Kenapa tidak. Krueng Meureudu itu dulunya lurus, dan pertambahan yang sekarang ada itu dulunya tempat aliran sungai.. pendangkalan perlahan membuat sungai membelok sendiri dan secara bertahap bekas aliran sungai berubah menjadi pertambahan yang dikelola masyarakat. Kemudian, saat Wagub dari Meureudu maka pemikiran membangun TPI ditempat tersebut dilaksanakan. Tanah disitu ditimbun kembali. Saya pikir karena lokasi itu ada tanah keluarga mereka. Sangat kita sesali, karena sejak awal sudah kita sampaikan bahwa kalau di situ TPI. Hal lain, seperti TPI. Kita sudah memberi pendapat agar dermaga bongkar ikan dibuat saja di Teupin Pukat, sehingga lalu lintas mobil atau motor yang membawa ikan tak perlu melewati dalam kota. Kota pun menjadi indah dan tak lalu lalang kendaraan pengangkut ikan. Namun, realisasinya lain lagi. Banyak kepentingan, petugas yang dulunya turun kebawah Cuma bisa bilang pimpinannya punya pikiran lain lagi, mereka tak punya kekuatan melawan

Jadi begitulah, harusnya turun pada rakyat. Tanyakan apa yang dapat dibuat. Kita mufakat sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang terbaik menurut pengamatan kita itu baik.

Bagaimana LSM yang turun setelah tsunami?

Banyak mereka turun, tapi mereka turun untuk keperluannya saja. Tak banyak komunikasi dengan kita. Andai ada, tentu misalkan saja untuk mengangkat hidup kaum nelayan, lalu mereka ingin menggali informasi dari kami langsung. Tentu kami bisa mengajukan sejumlah nama. Katakanlah 30 orang untuk bertemu bermufakat. Ini tidak, mereka hadir secara begitu saja. Lalu mereka mengajak bicara, dapat saja yang diajak bicara tidak mengerti maksimal seluk beluk masalah nelayan. Inilah masalah sekarang ini, saya yakin Banda Aceh dan Jawa tidak tahu

banyak soal hidup kita. Pasti mereka membutuhkan informasi kalau memang mau membuat kita menjadi lebih baik. Harusnya setiap datang surat soal rencana membuat sesuatu, sebut saja misalnya membuat sawah. Maka Bupati menyurati Geuchik agar mengumpulkan tokoh petani agar dapat disampaikan maksud rencana proyek dan apa yang mereka butuhkan agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga pada tanggal pelaksanaan turut dihadiri oleh mereka yang dari Banda atau Jawa. Saya pernah, mengatakan meski tak pantas..kami bukan mau minta uang atau kopi bila kalian memanggil kami untuk mufakat membangun sesuatu di tempat kami..panggillah kami untuk bermufakat. Kami hanya ingin memastikan apa yang kalian buat sesuai dengan kebutuhan kami. Kami bukan mau uang dari kalian. Kalau kalian mau mainkan duit proyek, silahkan sesuka hati kalian. Yang penting proyeknya sesuai dengan kebutuhan kami dan bisa kami gunakan. Misalnya sawah, aliran yang dibangun mestinya lebih tinggi di hulu sehingga air mudah mengalir ke bawah. Sekarang aliran lebih rendah dari permukaan sawah, akhirnya untuk kemudahan aliran air ke sawah, masyarakat membendungnya dengan papan kayu dan plastik. Harusnya itu bisa diakali dalam pembangunan proyek. Apalagi sekarang sudah banyak kemajuan teknologi pembangunan yang membuat semua menjadi lebih mudah dan sederhana. Saya pikir masyarakat lebih cerdas dari petugas yang berpangkat tinggi itu. Karena masyarakat diajari oleh alam. Contoh lain, aliran air ke sawah yang tak sesuai derajat kemiringan aliran telah membuat perebutan air yang dulunya tak ada antara petani di Meureudu dan Ulim. Itu semua karena petugas pembangun yang tak beres. Kelemahan itu, karena petugas tidak memadukan ilmunya dengan apa yang diketahui masyarakat. Sekarang boleh Bapak lihat di irigasi, bendungan yang mereka buat membuat kita khawatir jebol sewaktu-waktu.

Transkrip Wawancara

Informan 06.

Laki-laki, usia 58 tahun, Pekerjaan utama sebagai nelayan. Memiliki rumah kecil di salah satu lorong di gampong itu. Terlihat gesit melayani masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi dengannya. Terlihat semangat dengan beberapa ide membangun gampong. Peneliti dimudahkan dengan sikap terbukanya terhadap tamu.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana Bapak melihat kondisi gampong saat ini, terutama terkait dengan kebiasaan kerja dan taraf perolehan pendapatan dari pekerjaan tersebut?

Masyarakat di gampong ini, ada nelayan, ada tani, ada pedagang, ada juga sebagian yang pegawai negeri, ada juga yang masih bertambak. Kalau pendapatan tergantung musim, masing-masing ada musimnya. Tapi saya melihat ada satu yang mengganjal, sebagai kepala gampong mengapa susah sekali menyampaikan apa yang kita mau pada pemerintah? Hari ini coba lah lihat ke TPI..Pemerintah sering sekali tak mendengar apa yang kami sampaikan, Ruko yang di TPI. Contoh nyata semisal di ruko di TPI, kami bilang agar dibuat letter L sehingga area parkir luas dan tidak membelakangi kantor Dinas Perikanan yang berada di kompleks tersebut.

Transkrip Wawancara

Informan 07.

Laki-laki, usia 38 tahun dengan tiga orang. Pekerjaan utama sebagai nelayan. Ia adalah sedikit dari pemuda yang menunjukkan keberhasilan dalam usahanya sebagai nelayan. Memiliki rumah permanen yang tergolong lebih dibandingkan lingkungannya tinggal. Ia dikenal sebagai nelayan muda yang berhasil. Peneliti memiliki kesempatan menggali informasi, ditengah sempitnya waktu yang tersedia karena kesibukannya mengelola usaha boat dan galon BBM bagi kepentingan nelayan.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana kisah usaha bekerja Bapak?

Saya mulai bekerja sebagai nelayan sejak 18 tahun. Saya berasal dari keluarga nelayan, ayah juga nelayan dan setelah ayah meninggal dunia maka saya merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar maka Saya semakin serius menekuni usaha itu. Berkongsi dengan kawan-kawan sebaya yang punya satu prinsip maka usaha saya pelan-pelan berkembang seperti saat ini. Pada awalnya saya hanya memiliki satu boat mesin tempel. Kemudian secara perlahan, bertambah dan hingga saat ini saya punya lima unit boat kapal penangkap ikan jenis mesin tempel.

Yang paling enak cari rezeki adalah setelah tsunami, saat itu sangat mendukung untuk memperoleh tangkapan ikan dalam jumlah banyak dan hal itu mendorongnya menjadi semakin baik. Saat itu, kami dapat menangkap ikan dengan sangat mudah, seakan ke laut hanya untuk menjemput ikan. Harga ikan juga sedang tinggi-tingginya, harga minyak murah. Sekarang terbalik, Kalaupun ada tangkapan, yang tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan nelayan untuk beli minyak dan ongkos lainnya semisal makanan. Ikan juga sulit didapat, harga bahan bakar minyak tinggi. Saat ini, Harga minyak satu liternya berkisar Rp.4.800,00 dan kadang-kadang dengan harga Rp.5.000,00 bila membeli diluar stasiun pengisian resmi. Dengan harga bahan bakar minyak subsidi yang tinggi dan sulit diperoleh, melaut adalah pekerjaan yang sulit dilakukan. Kadang-kadang kalau membawa bon dari panglima laut, baru dilayani di stasiun pengisian bahan bakar minyak. Bila tak membawa apa-apa, jangan harap dapat membawa pulang minyak.

Apa yang bapak kembangkan terkait dengan pekerjaan pokok sebagai nelayan?

Saat ini ia juga membuka pangkalan minyak solar untuk kebutuhan boat nelayan yang sangat dekat dengan dermaga. Saya bukan orang yang pertama kali berusaha membuka pangkalan minyak solar bagi kebutuhan kapal-kapal nelayan, sebelumnya telah ada yang lain.

Diantara hal yang membuat pangkalan minyak saya banyak dikunjungi oleh para nelayan, adalah membolehkan hutang dulu sebagai keringanan pembayaran solar. Nelayan pemilik boat membayar minyak setelah kapal kembali dari melaut. Saya nelayan, jadi saya sangat memahami kesulitan para nelayan pemilik *boat* yang harus memiliki modal tak sedikit setiap akan melaut. Setidaknya mereka perlu BBM dan bahan persediaan makanan selama berada di laut. Persoalan bahan bakar adalah salah satu persoalan penting untuk dapat memberangkatkan boat-boat nelayan ke laut. Saya hanya bisa mendorong dengan cara itu, agar banyak aktifitas nelayan bekerja mendapatkan hasil tangkapan ikan. Dari hasil itu bukan saja ia dapat memperoleh bayaran atas sejumlah solar yang diambil padanya, namun juga nelayan mendapatkan pendapatan dari penjualan ikan

Bagaimana pandangan Bapak terhadap dorongan Pemerintah?

Pemerintah kurang memberi perhatian. Ada hal yang saya sangat sayangkan. sebuah stasiun pengisian bahan bakar yang telah disiapkan di TPI Meureudu menjadi terbengkalai karena tidak jelas penanggung jawab operasionalnya. Saya pernah minta untuk menjadi pengelola dan bersedia untuk membagi laba dari hasil usaha itu. Tapi tidak jelas informasi dan siapa penanggungjawab stasiun stasiun itu. Saya jadi malas berurusan. Saat ini, stasiun dan alat-alat lain sudah rusak. Sayang sekali berapa besar uang pemerintah habis untuk membangun dan membeli alat stasiun tersebut. Tapi tidak hasil apapun.

Contoh lain, Dinas Perikanan. Saya dengar telah tersedia palka dan viber untuk bantuan kepada nelayan. Tapi informasi yang simpang siur, membuat semuanya menjadi serba tidak pasti. Beberapa nelayan telah meminta agar dirinya menjadi penerima alat tersebut. Namun, beberapa pihak dari pemerintah meminta imbalan sebelum alat tersebut diberikan. Demikian juga dengan kapal penangkap ikan jenis pukat langga yang disebut-sebut milik pemerintah daerah, tidak jelas akan dikemanakan untuk usaha nelayan. Saya pikir tak bagus hubungan mereka dengan dinas perikanan. Terakhir kali dinas mengundang rapat para nelayan untuk membicarakan pajak yang harus mereka bayar kepada pemerintah. Hal itu mengecewakan nelayan, untuk urusan pembebanan mereka dikumpulkan. Namun untuk urusan mendapatkan pendapatan bagi keberlangsungan hidup nelayan terhitung tidak ada.

Kendala lain?

Ya, sekarang yang susah kami yang yang menangkap ikan dengan mengandalkan kapal penangkap ikan jenis mesin tempel. Jenis kapal ini ada keterbatasan jarak tempuh dan jangkauan. Keberadaan "*tuah*" atau rumpon laut yang dipasang pada jarak 120 hingga 150 mil laut membuat ikan-ikan lebih senang berada di area tersebut dan area itu tidak dalam jangkauan kapal boat penangkap ikan mesin tempel. Akhirnya nelayan yang menggunakan kapal-kapal semacam itu kesulitan mendapatkan ikan. Hanya nelayan-nelayan yang memiliki boat kapal penangkap ikan besar sejenis pukat langga yang mampu menjangkau area tersebut. Perjalanan ke lokasi tersebut menghabiskan waktu hingga 2 hari.

Apa Solusi pemikiran Bapak terhadap kendala ini ?

Untuk mensiasati kelangkaan ikan dan mahal nya bahan bakar solar, saya memikirkan untuk mengusahakan kapal penangkap ikan jenis boat “*bak*” yang menggunakan mesin merek Yanmar yang dikenal irit bahan bakar. Kapal jenis ini dipergunakan untuk melaut dengan masa di laut hingga tujuh hari, perlu makanan yang lebih banyak dan kerja keras nelayan yang lebih besar. Di kapal ini kita memancing ikan hingga berhari-hari. Saya lihat penghasilan dari boat mesin tempel yang paling banyak Rp.5.000.000,00 dalam satu pekan, tidak memadai untuk saat ini.

Musim nelayan juga semakin tidak jelas, ikan-ikan biasanya banyak saat musim “*barat*” yang puncaknya tiba pada bulan Maret hingga April. Namun dalam beberapa tahun terakhir pola tersebut tidak berlaku. Mendapatkan ikan pada musim barat atau musim timur hampir tidak ada bedanya. Melihat Saya mulai berpikir untuk mencari sumber penghasilan di luar nelayan, saya membeli sepetak sawah dari simpanan yang ada. Melaut adalah kegiatan yang serba tidak pasti. Walaupun kita sedang dapat tangkapan ikan yang banyak, maka kita ingin tong-tong ikan itu segera jadi duit. Kita buru-buru mengangkutnya ke Medan. Nah tiba disana kadang harga ditentukan sepihak oleh tauke Medan. Meskipun harga tak cocok tak mungkin kita biarkan ikan busuk di truk dan, yang penting tong-tong ikan itu segera berpindah tangan.

Ikan-ikan yang kita jual itu, akan dikirim lagi untuk dijual ke Pidie kalau jumlah tangkapan ikan kita menurun. Ikan yang mereka jual sudah pasti tidak segar lagi. Sayang memang karena nelayan yang kaya disini tidak cukup dana untuk membangun gudang pengawetan ikan. Disamping itu, berkongsi juga dirasa akan membawa kerumitan saat usaha berhasil nantinya. Karenanya saat ikan sedang banyak, maka segera berpindah ke tong-tong guna dibawa ke kota lain. Pada saat uang nelayan banyak karena banyaknya tangkapan ikan, uang tak tahan lama di tangannya karena secepat itu pula uang-uang dibelanjakan semuanya oleh nelayan. Maka pedagang sangat senang kalau nelayan sedang bagus hasil melaut.

Bagaimana dengan kendala yang dialami sebagian pemuda dalam berusaha?

Nelayan pekerjaan yang serba tidak pasti. Uang sulit dikumpulkan, yang ada malah habis langsung dipakai. Maka susah mengumpulkan uang untuk menjadi modal membeli boat. Nelayan-nelayan muda tidak memiliki boat penangkap ikan, Mereka menyewa boat mesin tempel milik orang lain. Pendapatan yang diperoleh dari sekali melaut berkisar Rp.1.000.000,00. Kemudian uang itu disisihkan untuk pemilik sebesar Rp.500.000,00 dan sisanya lalu dibagi dua, sehingga masing-masing mendapat 250.000,00. Modal hanya mungkin bertambah dari melaut bila boat itu miliknya sendiri. Namun untuk membeli boat juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Transkrip Wawancara

Informan 08

Jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 47 tahun, sudah punya 2 anak dan satu istri. Pekerjaan utama saat ini sebagai anggota legislatif DPRK Pidie Jaya. Sebelumnya selama 5 tahun terakhir telah menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Pidie. Beliau termasuk unsur pimpinan. Pendapatannya menurut informasi informan yang sangat dekat dengan peneliti bahwa beliau juga memiliki pendapatan dari boat penangkap ikan jenis pukat langga yang aktif beroperasi.

Wawancara berlangsung di ruang kerjanya. Tampil dengan suasana santai dan akrab. Peneliti tidak merasa kesulitan mendapat waktunya. Ia menjadi pimpinan salah satu partai politik nasional.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana kondisi masyarakat di sini, dilihat dari isu pekerjaan yang dilakukannya dan taraf hidup yang dicapai?

Masyarakat di sini, mayoritas petani dan nelayan. Kalau di gampong Meunasah Balek sendiri termasuk dominan nelayan. Pertama di mana saja masyarakat yang berprofesi nelayan, itu sistem pemakaiannya sedikit agak royal..mereka kalau mendapatkan hari ini..rasa-rasanya agak takut kalau tak bisa dihabiskan hari ini ..itu ada image masyarakat kita. (tertawa)..kita telah berupaya dan kita dalam hal ini melihat telah bergeser dari kalangan masyarakat kita. kalau dulunya memang apa yang didapatkan hari ini, dia habiskan ..sehingga kita melihat pendapatan nelayan lumayan besar, tetapi begitu satu dua hari tidak bisa melaut.itu untuk makan pun sudah tidak ada ..mengapa ? karena sistem pengelolaan keuangan tadi yang tidak ada. Kita coba memberikan masukan-masukan kepada masyarakat dan khususnya nelayan kita. Dan hal ini sudah mulai berubah, sudah mulai berubah..karena masyarakat nelayan kita sedikit agak moderen...masyarakat kita untuk mendapatkan pendapatn lebih pada masyarakat kita tidak terpaku pada satu mata pencaharian. Jadi banyak di antara nelayan sekarang ini yang berprofesi sebagai petani...nah, yang harus kita akui bahwa katakanlah untuk Meureudu, bahwa perputaran uang setiap hari itu hanya ada dari hasil laut. Mengapa saya mengatakan demikian, karena bila melihat dari hasil tani ..itu hasilnya maksimal, katakanlah padi..itu hasilnya baru kita dapatkan tiga bulan kemudian. Nah setiap nelayan kita sekarang, untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi keluarga. Saat dia pulang dari laut,dia kalau sempat ia menggarap sawah. Kalau tak sempat menggarap sendiri, ia diongkosin. Dana yang didapat dari hasil laut tadi, diinvestasikan di pertanian. Mengharapkan ada penambahan. Dan ini

sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Tapi yang paling harus dihidupkan, tanpa mengabaikan sektor pertanian. Karena kebutuhan untuk pertanian, katakanlah garapan, membajak itu butuh biaya. Biaya yang didapatkan. Kebanyakan dari hasil nelayan dibawa ke pertanian. Kemudian juga untuk ongkos penanaman, diinvestasikan juga dari nelayan, dari penyiangan, penanaman, pupuk dan lain sebagainya. Ini yang saya maksudkan tanpa mengabaikan sektor pertanian. Perikanan kelautan harus diutamakan, kenapa? karena terjadi perputaran uang kontan tiap hari, dari garapan mereka di perikanan. Karena di pertanian kita harus menunggu, musiman. Angkanya memang banyak, akan tetapi kita harus menunggu. Nanti kita bisa melihat, aktifitas sangat ditentukan hasil tangkapan nelayan. Begitu menurun hasil tangkapan, langsung terasa nadi ekonomi berkurang. Begitu tinggi hasil tangkapan nelayan banyak maka terasa hidup ekonomi. Mengapa ? Karena seperti saya katakan tadi, karena hasil tangkapan ikan, Begitu mereka bawa langsung menjadi uang. Sementara di tani, kita tanam hari ini, kita dapat hasil tiga bulan kemudian. Hasil perkebunan barangkali lebih lama lagi. Jadi banyak juga nelayan kita sekarang, usahanya di sektor pertanian dan perkebunan.

Apakah nilai-nilai yang disebutkan tadi disosialisasikan secara terencana dan sistematis oleh lembaga tertentu?

e...Kalau lembaga resmi saya rasa belum ada, tapi seperti yang saya katakan tadi..kita yang punya pemikiran, saya sendiri itu sering menyampaikan hal hal seperti ini kepada masyarakat secara tidak formil,..barangkali sambil duduk duduk di warung kopi dan masyarakat kita sekarang, motivasi kerjanya sudah sedikit baguslah ketimbang dulu. Sudah lumayan

Sebagian besar masyarakat kita bekerja sebagai petani, dan mereka tidak merangkap sebagai nelayan. Bagaimana kondisi kerja mereka ? sebab bisa jadi itu menjadi perangkap kemiskinan karena putaran uang yang rendah pada mereka.

Iya. Eh..versi nelayan yang menjadi petani.. itu juga banyak. Dan itu biasanya yang lebih berhasil. Tetapi bila terpaku pada pertanian, peluang untuk terperangkap pada kemiskinan itu sangat besar. Karena pendapatan yang mereka dapatkan itu sangat kecil untuk sekarang ini. Disana kita bayangkan, cost yang dikeluarkan itu sangat besar. Sementara mereka tertumpu dari situ aja...nahh, tidak ada lain, sehingga masyarakat kita yang Cuma menggarap lahan sawah barangkali..ini sekarang di Pidie Jaya sedang kita upayakan disamping itu masyarakat bisa menanam hortikultura, kacang-kacangan, cabe dan segala macam. Kemudian satu saran dari kita, nanti bapak juga bisa pelajari. Sekarang sudah membudaya dari para petani kita biasanya setelah panen padi...itu kan untuk tanam keduanya, itu adaa tenggang waktu satu atau dua bulan untuk digarap kembali. Nah kita mlihat masyarakat kita, karena mungkin untuk tingkat ekonomi

dan untuk memanfaatkan waktu. Begitu selesai dipanen, banyak lahan-lahan masyarakat menanam semangka..jadi menanam semangka, setelah semangka ditanam. Nah nanti ada lokasi, katakanlah lokasi yang areal 2500 meter, sebagian kecil itu ditinggalkan untuk menanam bibit padi, disemai. Yang lainnya ditanam semangka, jadi begitu semangka panen..padi itu sudah bisa ditanam kembali. Ini suatu kemajuan bagi masyarakat kita, walaupun belum semua. Tapi perlu dorongan kita,nah dinas pertanian ini sering melakukan sosialisasi tapi komponen masyarakat juga harus ikut memberikan sosialisasi.

Bagaimana strategi yang dijalankan pemerintah/pejabat politik dalam rangka mengentaskan kemiskinan pada petani yang merupakan komponen terbesar dari masyarakat Pidie Jaya ?

Masyarakat Pidie atau Pidie Jaya sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah di tani. Barangkali kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung kepada petani itu tentu saja terbatas. Tetapi ada kemampuan pemerintah juga,yang selama ini belum maksimal menurut saya..kalau membantu secara pribadi semua petani, menurut saya tidak bisa dibantu. Tetapi ada hal tertentu yang bisa dibantu tetapi dengan sendirinya membantu semua petani. Sebagai contoh, saat petani mau ..setelah tanam padi, saat masyarakat membutuhkan pupuk. Pupuk hilang di pasaran,nah ini kendala. Barangkali hal ini yang bisa dibantu, dan memang itu tugas pemerintah. Pupuk-pupuk bersubsidi,saat petani membutuhkan itu tidak ada pupuk sama sekali...setiap tahun. itu suatu penyakit. Dalam hal ini, pemerintah dapat bersikap tegas kepada distributor pupuk. Karena kita kan menentukan siapa-siapa yang berhak menyalurkan pupuk, yaitu sudah ada korelasi angka. Kalau ada yang nakal itu di-black list aja ..jangan kasih untuk tahun depan. Kerena jangan mereka hanya menggarap keuntungan semata. Kita butuh uang tapi nasib petani pada kita juga harus kita perhatikan. Janganlah mereka bermain di atas petani kita. Barangkali pemerintah ini menurut saya, dan saya menyarankan ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan itu memang leadingnya pemerintah. Ada kewenangan, saat masyarakat menjual, membutuhkan pupuk, pupuk hilang di pasaran. Saat pupuk butuh, itu selalu hilang dipasaran. Dan itu sudah saya menyampaikan berulang kali, dan itu sudah sedikit teratur saya lihat. Barangkali hal-hal seperti inilah yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Bagaimana strategi politik daerah agar pemasaran padi petani terhindar dari tengkulak?

Untuk sementara ini, pemasaran belum begitu menjadi permasalahan bagi para petani kita dan sering juga saat terjadi panen itu angka, harga beli itu sedikit menurun. Dan dalam hal ini kita telah membuat semacam trik untuk membantu petani kalau itu terus terusan terjadi. Kita melalui dinas koperasi dan perdagangan kita akan memback-up dana supaya ada persaingan pengusaha-pengusaha swasta

sehingga tidak menentukan harga oleh diri mereka. Jadi terjadi persaingan harga. Nah kita sudah ada upaya-upaya ke arah itu. Walaupun tahun ini belum, tapi sudah kita wacanakan itu. Malah pemda sudah menyiapkan gudang sebagai salah satu upaya yang kita lakukan sehingga pihak-pihak swasta tidak seenaknya saja menentukan harga untuk bisa menekan petani kita. Saya rasa demikian.



Transkrip Wawancara

Informan 09.

Laki-laki, usia 65 tahun, pekerjaan utama sebagai petani. Dikenal sebagai seorang pensiunan pegawai negeri dan terampil memasak nasi briyani yang menjadi hidangan favorit masyarakat setempat. Setiap ada kenduri yang menyajikan menu dimaksud, ia sering dimintai untuk memasaknya. Sajian nasi briyani menjadi pekerjaan yang dialihkan untuk ditekuni anaknya yang berjualan di keude Meureudu. Secara rutin, setiap pagi ia mengunjungi lahan sawahnya yang terlihat berbeda dengan lahan sawah lain di sekitarnya. Bila yang lain sedang menanam padi, maka ia menanam cabai dan timun. Ia memperkerjakan dua orang wanita dan satu orang laki-laki yang diakuinya sudah bekerja padanya selama 10 tahun. Mereka sudah terdidik untuk urusan tanaman non padi. Tak perlu terlalu detail diarahkan, mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Dalam beberapa pertemuan peneliti sering menemuinya di lahan cabe dan timun tersebut, sembari menanyakan hal-hal terkait kebiasaan kerja, taraf hidup dan nilai-nilai yang mengitari masyarakat dalam bekerja. Dalam sebuah kesempatan, Peneliti diberi timun hasil panennya untuk dibawa pulang.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana keadaannya usaha bekerjanya saat ini pak?

Kalau saya sudah tidak kuat bekerja sendiri..saya minta orang-orang ini bekerja, satu hari saya kasih 20-25 ribu setengah hari bekerja..tergantung berat tidaknya pekerjaan yang dilakukan.

Setiap hari mereka bekerja Pak?

Tidak. Tergantung ada tidaknya pekerjaan..tapi mereka tak perlu kita ajari lagi. Sudah lama sekali mereka bekerja pada saya, 10 tahun.., mereka sudah tahu semua. Setiap memulai musim tanam, mereka hanya bertanya pada saya, kakek mau tanam apa? Cabe misalnya saya jawab. Mereka minta saya minggir, mereka semua yang mengerjakan dari membuat bedeng dan lainnya.

Berapa orang pekerja laki-laki dan perempuan ?

Tidak, perempuan semua.

Mengapa?

Perempuan banyak yang rajin, kalau laki-laki banyak sekali fikiran tidak baik muncul. Kalau perempuan bekerja sepenuh hati, seikhlas hati..kalau orang laki tidak, banyak malasnya. Itulah saya katakan, cara kerja orang kita (laki-laki) beda dengan orang Jawa. Orang Aceh banyak malasnya, memang sudah demikian adanya, asal sudah ada beras 1 are..duduk aja sembari tiduran di meunasah.

Apa sudah lama begitu Pak?

Memang dari dasar, dari dahulu kala..karena orang kita adalah orang yang selalu tersedia bahan untuk dimakan sejak dulu (na pu pajoh dari awai). Kalau orang kita Jawa memang sudah susah hidupnya dari awal cerita. Pencaharianpun tidak ada. Kalau di tempat kita, penduduk sedikit..tapi lahan tersedia luas. Di Jawa tidak, berbalik..maka semua diperebutkan. Kalau di kita, semiskin bagaimanapun miskin tapi tidak akan sampai menderita kelaparan (*kiban pih gasin yang deuk hana*). Karena masih kuat rantai saling tolong menolong sesama saudara. Masih ada kasih sayang..

Efeknya, menurut Bapak?

a..itu tadi jadi malas mereka, karena tak mungkin lapar kalau tak bekerja. Mereka tak berjuang..muncul penyakit itu. Orang kita juga begitu, asal ada duit sedikit langsung terlena dan santai. Soal bicara juga jangan ditanya, Amerika saja obrolannya. (tertawa)..

Apa sama hal itu berlaku pada petani dan nelayan?

Sama saja. Beda dengan orang kita yang tinggal di gunung..(*ureung jak u gle*). Orang digunung pendiam, kalau nelayan kasar..kalau di pesisir orangnya pemalas. Kalau di pedalaman orangnya punya kesabaran, sabar yang banyak. Sangat sengsara orang bekerja di gunung. Dalam perjalanan saja sudah menderita, jalan tak bagus, banyak rintangan..tapi itulah kesabaran mereka. Kalau di pesisir kan tidak..karena sebentar aja melaut sudah terlihat ikan, akhirnya bekerja sembari di mulutnya meluncur caci maki yang sudah terbiasa dikalangan mereka. Kalau di gunung kan pendiam. Mereka bekerja tekun mencangkul dan sebagainya..karena itu, masyarakat sedikit banyak kebiasaan mereka sudah kita tahu. Orang digunung juga lebih sehat hidupnya.

Mengapa?

Orang di gunung, acuh tak acuh terhadap penyakit.

(Terlihat pekerja membawa beberap ember timun yang baru saja dipetik dan Informan telah siap memasukkan timun itu ke dalam kantong bekas pupuk urea. Ebuah sajian pemandangan yang langka menyaksikan petani setempat memanen timun di tengah dominasi padi)

Berapa kali seminggu panen seperti ini?

Satu hari berselang kita panen lagi, begitu seterusnya..

Mengapa masyarakat sekitar tak mengikuti pola tanam seperti Bapak?

Oh, tak mau mereka. Pernah saya ajak. Mereka tak mau,

Apa ada beda? Hasil panen padi dengan non padi?

Memang ada beda, mengusahakan padi itu berkah. Dimana masuk banyak, tapi keluar seakan tak ada.., keluar sedikit-dikit.

Dipetak satunya lagi, peneliti lihat sedang dilakukan penyemprotan pada tanaman cabe. Peneliti melihat dari jawaban-jawaban informan, terlihat sangat memahami hal teknis seperti obat-obatan yang disemprot supaya pohon tidak ada jamur akibat hujan.

(Selanjutnya, kantong-kantong urea yang telah dimuat timun dibawa ke jalanan. Kebetulan lokasi petak sawah bersisian dengan jalan. Tak lama Terlihat ojek yang menjemput panen mampir dan mengangkat kantong-kantong untuk dibawa ke tempat yang ditunjuk informan untuk ditimbang). Dua pekerja perempuan yang telah menyelesaikan pekerjaannya, terlihat beristirahat sembari menikmati nasi bungkus yang telah disiapkan sebelumnya.



Transkrip Wawancara

Informan 10

Laki-laki, usia 65 tahun, Pekerjaan saat ini petani. Informan yang memiliki fisik kuat ini dan sering bersepeda ke mana saja ternyata termasuk orang Pidie yang pernah merantau namun kembali lagi ke kampung halamannya. Informan ini berasal dari keluarga besar. Ia anak kedua dari enam bersaudara.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana keadaan usaha ekonomi Bapak saat ini.

Sejak umur 25 tahun saya telah memulai pekerjaan sebagai petani, orang tua saya petani. Dulu ayah saya mukim disini, di Meureudu Dalam. Namun saat itu tak ada gaji buat Mukim, jadi ayah saya memberi kami makan dari hasil sawahnya sendiri. Saat itu saya telah terbiasa bekerja membantu ayah di sawah. Saya pernah ingin menjadi tentara. Maka setelah tamat SMP, waktu itu tahun 1966, saya mencoba ikut tes. Ada dua orang kawan saya. Tapi ayah saya tak setuju dengan cita-cita saya itu, ayah bilang setelah dirinya meninggal dunia baru boleh saya masuk tentara. Maka saya pikir untuk apa kalau ayah tak setuju.

Lalu bagaimana Pak?

Saya kecewa, tapi mau bilang apa. Dalam saya kecewa itu, kemudian datang pak cik mengajak saya merantau ke Jakarta. Saya senang sekali, maka saya tinggal di Jakarta Selatan selama tiga tahun. Saat itu saya suka keliling hingga sangat hafal daerah Kalibata dan Pasar Minggu. Tapi suasana waktu itu, sangat teringat oleh saya karena kejadian PKI. Kemudian saya diajak membantu usaha jual obat anti kimia oleh Syekh Bidin. Ia orang Aceh yang hebat. Pernah di Amerika tinggal. Maka ia punya istri orang Amerika, kedudukan istrinya pun Profesor disana. Syekh Bidin punya kawan yang menjadi kongres Amerika Serikat. Disana ia dipanggil Charles Bidin karena kalau Syekh dikira saudagar Arab. Karena kedekatannya itu ia bisa membantu perjuangan kemerdekaan dengan meminta tolong kawan itu membantu agar Belanda tidak seenaknya sama Indonesia. Soekarno akui kehebatan Syekh Bidin. Tapi DN Aidit bersiasat sehingga Syekh Bidin kecewa akibat hasutannya ke Soekarno. Maka akhirnya Syekh Bidin memilih tetap berdikari dengan menjual obat-obatan anti kimia berkeliling Jawa. Dia punya harga diri dan prinsip hidup yang kuat. Dalam mengikutinya berjualan saya punya pengalaman dengan banyak kota-kota di Jawa. Dalam suatu hari, Saat kami berjualan. Lewatlah Kapten Markam yang kaget saat tahu Syekh Bidin sedang berjualan obat-obatan. Kapten Markam dekat dengan Soekarno dan tahu betul siapa Syekh. Maka diajaknya untuk berhenti usaha keliling itu, markam berjanji akan membuka usaha farmasi untuk Syekh kelola. Namun, Syekh tak mau. Ia menolak, andai tak ditolak syekh maka saya sudah menjadi karyawan besar (sambil tertawa), bukan menjadi petani.

Jadi, Mengapa Bapak bisa berada di Meureudu kembali?

Saya lihat tak ada kemajuan dari usaha jual obat di perantauan. Sekitar 1970 saya kembali ke Meureudu dan menikah pada tahun 1971. Sejak itu, sampai 13 tahun saya berusaha menutupi kebutuhan hidup dengan berdagang di pasar keudue Meureudu. Merasa tidak bagus keadaan, maka saya sempat mengganti barang yang saya jual. Saya pernah jualan rempah-rempah, ikan dan juga es batangan. Namun kondisi dagang yang tidak pasti dan juga pengeluaran saya makin berat karena anak semakin banyak dimana modal dagang turut saya pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Laba tak banyak. Akhirnya saya berhenti berjualan. Toko tempat saya jualan saya dilanjutkan oleh anak saya, cukuplah buat menutupi kebutuhannya sendiri.

Kemudian saya kembali kerja tani, mengelola seperempat hektar tanah milik kakak dari Mamak saya. Sekali waktu, saya mendapatkan kesempatan mengelola hingga 1,5 hektar milik orang lain. Dari hasil bekerja di sawah inilah saya punya beras bagi kebutuhan makan anak istri. saya tak pernah memiliki kemampuan untuk membeli sepetak tanah. Saya hanya bisa mengelola atau *peumawah*. Bagi hasil dari sistem ini adalah dua bagian untuk saya dan satu bagian untuk pemilik. Saya pikir tak adil, semoga Pemerintah turun tangan untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang melindungi masyarakat yang bekerja mengelola. Namun saya tetap bersyukur, karena dapat menghidupi diri dan keluarga yang berjumlah delapan orang anak. Meskipun saya merasa berat dengan banyak uang keluar untuk bertani, kadang kalah dengan uang yang kita dapat dari hasil tani. Uang panen itu saya harus kasih sepertiga-nya pemilik. Sisanya, duapertiga dari hasil panen yang menjadi hak saya masih harus dikurangi untuk menutupi modal yang telah saya keluarkan.

Untuk apa saja itu Pak?

Untuk belanja beli pupuk, benih, pestisida. Saya termasuk tidak mengupahkan pekerjaan tani. Kadang saya dibantu oleh seluruh anak-anak yang ihlas membantu saya. Hal ini juga tidak sering terjadi di kampung ini. Maka kadang orang heran melihat. Anak-anak orang lain sangat susah untuk diajak bekerja di sawah. Malulah atau apalah dengan kerja tani. Oya, hanya ada bagian membajak yang saya upahkan. Ia pakai mesin tracktor untuk urusan membajak, upahnya sebesar Rp. 160.000,00 untuk membajak kasar di tahap pertama dan untuk tahap kedua guna menghaluskan dikenakan upah hingga Rp.128.000,00. Saya pikir bila diupah untuk bekerja dari awal hingga akhir dalam "*sinaleh blang*" yang luasnya kurang lebih 2.500 hektar akan mengeluarkan uang Rp.600.000,00 hingga Rp.800.000,00.

Bisa Bapak gambarkan jumlah pengeluaran seorang tani yang menggarap atau mengerjakan sawah milik orang lain?

Mungkin kalau seorang tani yang tak punya tanah hitung-hitungannya begini seperti untuk sewa tanah sebesar 400 kg untuk luas satu *naleh* atau setara Rp.1.500.000,00 untuk harga padi Rp.3.800,00 per kg. selanjutnya untuk membeli benih Rp. 150.000,00. Upah menyemai benih Rp.350.000,00. Bsayaya pembelsayan pupuk sebanyak 200 kg sebesar Rp.400.000,00. Untuk upah

menysayangi tanaman pengganggu saat tanaman padi telah remaja sebesar Rp. 170.000,00. Biaya penyemprotan pestisida sebesar Rp.200.000,00. Bila panen diupahkan maka dihitung dengan cara luas tanah 1 *naleh* terdapat ongkos 7 *naleh* yang mana 1 *naleh* dimaksud setara 16 *are* (bambu) atau setara 17 kg gabah padi. Bila dihitung dengan harga jual padi 1 kg sebesar Rp.3.800,00 maka setara Rp. 452.000,00. Selanjutnya untuk ongkos memakai jasa pekerja yang menggunakan bantuan mesin perontok, dalam 1 *naleh* ditentukan ongkos sebesar 5 *naleh* yang setara dengan 85 kg gabah padi atau setara dengan Rp.323.000,00 dengan acuan harga padi sebesar Rp.3.800,00 per kg.

Bagaimana hasilnya Pak ?

Dengan luas tanah satu *naleh*, bila keadaan normal maka pengelola bisa mendapatkan hasil sebesar 12 *gunca* atau setara 2 ton. Bila dengan harga padi sebesar Rp. 3.800,00 maka uang yang dapat diperolehnya sebesar Rp.7.600.000,00. Pendapatan tersebut dipotong pengeluaran-pengeluaran total sekitar Rp.4.500.000,00 maka yang tersisa sekitar Rp. 3.100.000,00. Kemudian ada dikeluarkan untuk *zakeut* (zakat) sebesar 8 *gunca* atau setara 10 persen dari hasil utama yang kalau diuangkan sekitar Rp.760.000,00. Sisa terakhir adalah Rp.2.340.000,00. Uang sebanyak itu bila dibagi 150 hari periode bekerja untuk musim tanam maka setiap hari diperoleh pendapatan sebesar Rp.15.600,00 atau setara setiap bulan sekitar Rp.450.000,00. Sebuah angka yang tidak cocok untuk pendapatan menanggung beban keluarga.

Apa ada hal yang paling berbeda antara bekerja tani saat ini dengan dulu?

Bertani sekarang tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu antar petani saling bantu membantu dengan cara bergantian saling membantu pengerjaan antar tahapan bertani. Saat itu, kami tidak pakai hitung-hitungan uang saat membantu. Paling diberi sekedar makan, kue, kopi dan rokok. Dan kita akan membantu dia saat mana ia memerlukan tenaga. Hal itu tidak lagi ada sekarang. Berbeda dengan sekarang, setiap orang yang membantu harus diupah atau dibayar. Mungkin saya hanya membayar untuk membajak, yang tidak mungkin lagi menggunakan cangkul ataupun lembu. Disamping menguras tenaga, juga menghabiskan waktu beberapa hari. Bila dibandingkan kesulitan-kesulitan tersebut, jauh lebih murah dan memuaskan apabila mengupah sejumlah uang untuk mengupah pekerja trackor.

Yang paling rusak dari hal ini, saya pikir adalah kesadaran dan gotong royong antar petani yang sudah menjalar ke hal terpenting dalam usaha tani yaitu pembersihan saluran air untuk kepentingan pengairan air ke sawah kita sendiri. Kalau dulu kami tanggung bersama antar warga gampong yang bertani. Kami naik ke hulu sungai, membawa bambu dan perlengkapan. Kami bendung sebagian, kini sangat memprihatinkan. Urusan pembersihan saluran air yang dulunya dengan penuh kesadaran seluruh petani turun serentak untuk membersihkan sepanjang alur air yang mengarah ke persawahan mereka, di bawah koordinasi *kejruen blang*. Namun saat ini tidak ada lagi kesadaran dan ketaatan pada *kejruen blang*. Meskipun dengan kesepakatan kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air atau "P3A" sudah dibagi tanggung jawab berupa besaran panjang "*cumba*" aliran air

yang sebanding dengan luas petak sawah yang dimiliki atau dikelolanya, tetap saja mereka tidak hadir. Akhirnya aliran air ada yang rapi dan ada yang tak tersentuh sama sekali. Denda yang ditetapkan sebesar 12 *are* (bambu) padi bagi mereka karena tidak turun dalam pekerjaan gotong royong tersebut, dibayar dengan sekedar saja tanpa sesuai kesepakatan. Bila diluruskan permasalahan ini dapat terjadi keributan atau perkelahian. Masyarakat pernah mau turun semua, saat tentara yang dulu bertugas di Aceh turut mengawasi pekerjaan tersebut. Sehingga saya menilai bahwa masyarakat sekarang hanya mau bekerja gotong royong bila diancam dengan kekerasan.

Siapa saja yang biasanya malas ini Pak?

Ketidapatuhan ini dilihatnya banyak dilakukan oleh anak muda, seperti pemuda sekarang telah berbeda dengan masa saya dulu. Dulu kami bersama-sama orang tua ikut membendung sawah dengan peralatan seadanya. Tujuannya agar kebutuhan air bagi sawah mereka dapat terpenuhi. Saya melihat masyarakat dulu sangat patuh pada pemimpin. Sekarang sudah tak ada pemimpin yang dapat dicontoh. Dulu anak-anak atau pemuda yang bermain sesuatu yang telah dilarang *keuchik* atau pemimpin, belum lewat *keuchik* mereka sudah berlarsayan menghindari diri. Sekarang malah menantang *keuchik*.

Disebutkan informan, sekarang semua pemimpin sudah sama rata oleh masyarakat. Baik itu ulama, pemimpin pemerintahan, tokoh adat ataupun *keuchik* dan *tengku imuem*. Pemimpin yang berwibawa adalah mereka yang mempunyai keteguhan dan konsekuen dengan apa yang diucapkannya. Dalam istilah setempat "*peugah lage but, peubuet lageu na*" yang bermakna pemimpin harus sejalan antara perbuatan dan perkataannya, dan perbuatan itu harus sesuai nilai-nilai kebenaran yang seharusnya. Contoh seorang ulama pesantren yang mendakwahi agar mendirikan shalat tepat waktu. Namun dia, saat sedang dipasar misalnya masuk waktu shalat. Dia tidak mendatangi meunasah atau mesjid. Alasannya cukup waktu mendirikan shalat setelah tiba dirumahnya. Padahal waktu saat saya tiba dirumah waktu sudah jauh bergeser bahkan hampir habis waktu. Saya sangat setuju dengan cara orang *tabligh* atau *salafi*. Pemuka dan kelompok *salafi* atau *tabligh* sudah pasang palang pembatas pada kedai-kedainya sepuluh menit sebelum *azan* berkumandang. Tujuannya agar mereka dapat mendirikan shalat dalam kesempatan pertama saat shalat berjemaah berlangsung.

Kapan Bapak melihat rasa krisis kepercayaan pada pemimpin mulai hilang?

Kalau saya melihat, kita sudah hilang kepercayaan masyarakat kepada pemimpin sejak *pelita* pertama dulu. *Keuchik* kepala desa disodorkan sejumlah lembaran yang harus ditandatangani sebagai pertanggungjawaban proyek. Namun pada kenyataannya *keuchik* tidak menerima dana ataupun proyek sebagaimana tertera di lembaran tersebut. Alasan yang dikemukakan bahwa dana sudah dipotong untuk pihak yang lebih atas. Masyarakat diajarkan untuk menipu dengan cara perbuatan-perbuatan yang tidak amanah. Kebiasaan itu selalu ada hingga hari ini, sehingga masyarakat sangat tidak menghargai pemerintahnya.

Hilangnya penghargaan tak hanya dialami pemerintah, selanjutnya pemuka agama pun ikut-ikutan. Mereka bilang sekarang kalau terlalu pegang agama, bisa-bisa mereka tidak makan. Katanya “*menyo tapateh haba lam kitab, pienung tupe kap hana ta temeung rasa*”. (tertawa karena gurauan itu, arti kalimat itu seandainya semua perbuatan merujuk pada kitab-kitab agama maka pinang bekas gigitan tupai sekalipun tak bisa dinikmati). Saya pikir itu mengena dalam perbuatannya..

Bagaimana dengan tengku Haji Usman Kutakrueng yang terkenal itu?

Selama sepuluh tahun terakhir beliau telah kehilangan marwah, hal itu saya ingat saat mana menghadiri kampanye sebuah partai politik. Diundang untuk membaca doa. Namun, tengku yang duduk di deretan kursi terdepan tidak pergi atau pun apa..ia malah melihat joget penyanyi wanita. Semua khalayak menyayangkan hadirnya tengku dalam sebuah acara yang tak pantas dihadiri. Hal itu telah meruntuhkan wibawa ulama. Setelah itu, ulama itu disebut-sebut meminta proyek untuk kelangsungan hidup pesantren yang dikelolanya.

Bagaimana dengan Dakwah agama ?

Saat ini sangat susah melihat masyarakat mau mengikuti ceramah beramai-ramai. Jumlah masyarakat yang mau menghadiri ceramah-ceramah atau dakwah agama amat sedikit. Masyarakat akan ramai datang, bila yang menjadi penceramah sudah lebih dahulu dikenal sebagai penceramah yang pintar melucu dan membuat tertawa terpingkal-pingkal. Sebagnya anak muda akan meninggalkan lokasi tempat ceramah bila dilihatnya isi ceramah tidak menarik.Ia berdiri di luar pagar agar mudah kalau pergi tidak diketahui orang lain. Akhirnya yang dengar ceramah orang-orang tua yang itu itu saja. Tidak banyak bisa diharap dalam sebuah dakwah agama dapat merubah perbuatan orang. Saya melihat bahwa apabila dakwah berhasil maka dapat dilihat dari jumlah shaf orang yang shalat di mesjid atau meunasah bertambah setelah mendengar ceramah. Namun kenyataannya jumlahnya sama saja, yang datang shalat jemaah hanya orang-orang itu saja. Saat ini sulit untuk patuh masyarakat pada ulama, bilaman ulama tak lagi menjadi teladan. Masyarakat hilang panutan

Bagaimana Bapak melihat kehidupan ekonomi masyarakat dengan situasi beragama yang seperti itu ?

Masyarakat inipun punya kebiasaan buruk, Tak suka melihat orang maju dan dirinya pun tak mau maju. Beda dengan di Jawa sana. Ini misalnya petani. Saya pikir, masyarakat disini tak bisa menempatkan diri. Lihat saja saat diberi bantuan modal untuk bertani. Pemberi bantuan hanya mempersyaratkan agar setelah mendapatkan hasil dari tani, modal itu digilirkan kembali kepada anggota yang lain. Petani diberi kebebasan untuk manual kepada mereka atau kepada pihak lain, asal harga yang dipilih adalah yang paling menguntungkan buat petani. Namun, yang terjadi tak sesuai harapan. Kebanyakan dari mereka menganggap modal itu adalah hak mereka karena bantuan konflik, sehingga tak berputar lagi. Saya iri melihat kejujuran dan disiplin petani-petani di pulau Jawa saat mana dibantu, benar-benar memanfaatkan bantuan untuk kepentingan kemajuan bersama.

Hal lain ?

Pemerintah juga punya salah. Dalam hal " *lueng ie*" atau aliran air, saya kecewa dengan cara bekerja pemerintah. Sering kali saluran air diperbaiki oleh pemerintah saat mana petani sedang memasuki masa tanam. Seharusnya pemerintah dapat memilih waktu saat mana petani sedang tidak berkerja, seperti di bulan Desember saat mana dikalangan petani setempat dikenal dengan sebutan " *tutop blang*" atau masa kosong bekerja di sawah. Saya menilai alasan tidak ada anggaran dalam masa itu, adalah alasan yang dibuat-buat oleh pemerintah.

Pupuk juga. Pupuk subsid selalu dimainkan pada agen penyalur. Kalau dua tahun yang lalu, satu sak pupuk bisa berharga sampai Rp.120.000,00. Dibiarkan saja penggelapan pupuk itu oleh aparat. Kalaupun saya ungkapkan pada salah satu polisi kawan baik saya. Dia bilang "Tak sanggup lagi kita pikir" (sambil bercanda dan tertawa). Padahal dengan mudah dapat diperiksa, darimana penjual pupuk itu mendapatkan barang subsidi, hingga terakhir dapat diketahui sumbernya.

Harga padi juga begitu. Harga yang dibeli oleh pemerintah selalu dibawah harga yang kita inginkan. Harga akan baik bilamana pedagang luar Medan datang dan langsung membelinya di tempat panen berlangsung. Mereka mendatangkan truk ukuran besar untuk langsung memuat padi yang telah dibeli. Namun bila tidak ada yang datang menawar dengan harga tinggi, maka tanpa ada pilihan padi akan dijual dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah. Contoh bahwa harga padi saat ini sebesar Rp.3.800,00 per kg adalah harga yang baik bagi usaha tani.

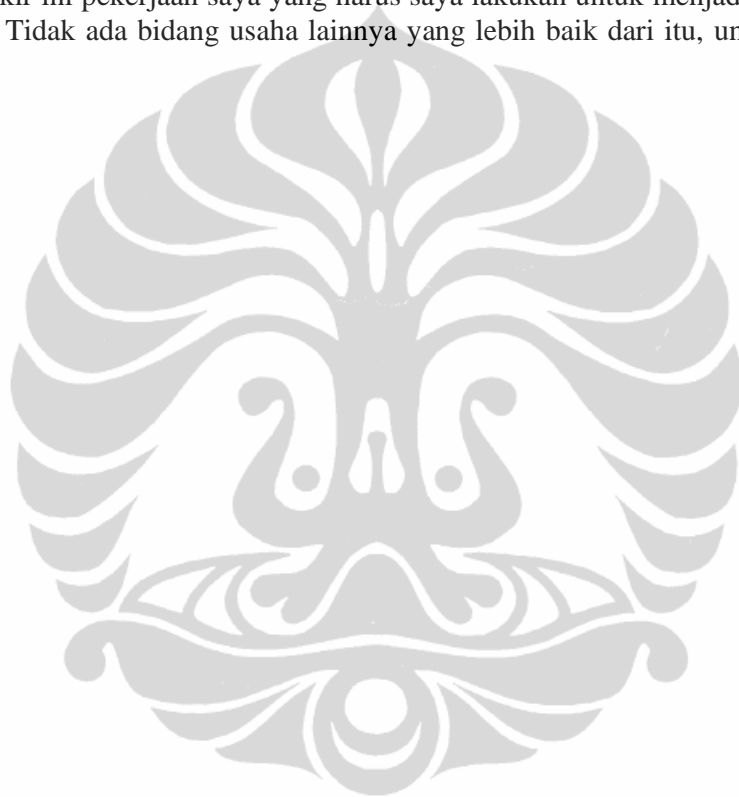
Hal lain yang Bapak lihat menjadi sesuatu yang mengganggu Bapak?

Setelah tsunami banyak orang luar datang merusak. Mungkin tujuannya baik tapi caranya malah merusak. Seperti banyak bantuan yang diberikan pihak luar telah merubah tradisi gotong royong warga. Cara LSM memberi uang kepada warga masyarakat yang bergotong royong, padahal mereka membersihkan lingkungannya sendiri. Sehingga saat ini tak ada yang memberi uang maka masyarakat semakin sulit diajak bergotong royong atau diajak rapat. Dulu dalam rapat selalu diberi uang transportasi oleh LSM. Sekarang masyarakat sudah terbiasa dengan uang. Itu semua karena salah LSM yang mengupah orang untuk rapat dan untuk gotong royong. Sekarang kalau ada uang baru mau turun gotong royong dan ikut rapat.

Kasih sayang dan kepedulian sosial juga semakin rendah. Orang kaya yang memiliki tanah dan mencarterkan tanah pada kita yang miskin. Para pemilik bukannya membantu, tapi malah mengambil manfaat dari kesulitan dari kita yang miskin. Tapi buat saya bukan hal, karena dari itu saya berhasil dan bangga dengan anak-anak yang punya kesadaran karena ayahnya susah sehingga mau belajar dan bersekolah. Saat ini 8 orang anak saya telah besar. Mereka sudah menjadi sarjana dan menjadi pegawai negeri. Ada yang menjadi sarjana guru olah raga, diploma keperawatan. 3 orang sudah menjadi pegawai negeri. Ada yang membuat saya sedih, karena dua anak perempuannya yang kedua dan ketiga memiliki kemauan yang sama untuk kuliah. Tapi mereka mengalah karena mengetahui kondisi keuangan orang tuanya. Mereka memberi kesempatan abang pertamanya untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Mereka bilang kalau abang sudah berhasil nantinya dapat membantu biaya sekolah adik-adik lain-lain.

Jadi bagaimana dengan pekerjaan Bapak saat ini ?

Sebenarnya usaha tani dapat memberikan hasil yang menjanjikan, namun kendala alam seperti air bagi kebutuhan pengairan sawah dan keasaman PH tanah akibat pengaruh air laut membuat hasil tanaman tidak maksimal. Kalau saja penyuluh pertanian mau mengambil sampel padi yang kita tanami, untuk diteliti apa sebab kita punya padi tidak sebaik lokasi lain yang lebih jauh dari pantai. Tapi dalam hal mereka malah kasih kita pengarahan di kantor, bukan ke lapangan mereka turun. Tapi saya pikir ini pekerjaan saya yang harus saya lakukan untuk menjadi sumber pendapatan. Tidak ada bidang usaha lainnya yang lebih baik dari itu, untuk saya yang begini.



Transkrip Wawancara

Informan 11.

Laki-laki, usia 45 tahun, pekerjaan utama sebagai guru SMA. Dikenal sebagai tokoh pemuda dan di luar itu, ia sering terlibat dalam aktifitas nelayan karena membantu usaha mertua yang dikenal sebagai nelayan terkemuka. Dalam sebuah kesempatan di siang hari, setelah ia pulang mengajar, peneliti diberi kesempatan untuk mendalami informasi berkaitan dengan kebiasaan bekerja masyarakat, terkait dengan kondisi ekonomi dan nilai yang melatarbelakanginya. Ditemani istrinya yang seorang guru SMA dan seorang saudara laki-lakinya yang lain ia menjawab beberapa pertanyaan saya

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana Bapak melihat masyarakat di gampong ini bekerja terkait dengan taraf hidup yang dicapainya?

Masyarakat disini, sering ikut suatu usaha yang telah menunjukkan hasil. Misal sedang tinggi harga cabe, maka mereka baru menanam cabe. Padahal saat mereka panen, harga cabe sudah menurun..itu belum lagi peluang gagal, karena tidak ada pengalaman bertani cabe..(tertawa geli). Bersamaan dengan itu, orang kita cepat berhenti kalau sudah berhasil..habiskan pendapatan yang sedang ada itu dulu, kalau sudah tak ada lagi duit di tangan. Mereka bekerja lagi.. Tapi ada juga masalah misalnya soal pemasaran, pernah ada saya ikuti acara yang dihadiri oleh Bappeda Provinsi. Masyarakat diminta mengusahakan bibit padi,dengan janji akan ditampung pembeliannya oleh sebuah perusahaan. Tapi kenyataan kemudian, tak jadi dibeli..entahlah saya tak tahu mengapa dapat terjadi demikian..apakah karena putus komunikasi dengan mereka. Ada berita tersiar kabat, bahwa karena petani yang mengusahakan usaha tanaman bibit itu tidak mendaftarkan diri kepada perusahaan itu. Apaaa namanya,..(sembari mencoba mengingat)..oh ya Sanghiyang. Usut punya usut ternyata Sanghiyang itu membeli, tapi orang yang bertanggungjawab sosialisasi usaha ini..tidak mendaftarkan masyarakat yang ikut serta dalam program jual beli bibit tanaman padi tersebut. Sehingga Sang Hyang tak bisa membeli, karena mereka tidak bisa menjamin kualitas bibit yang diusahaka. Karena setahu saya, SangHyang itu memberi label kepada setiap petani yang telah mendaftar turut serta dalam usaha mereka. Label itu merupakan garansi mereka. Maka tak ada garansi itu, Sanghyang tak mau membeli..jadi begitulah masyarakat tani sudah bekerja, eh tak tahunya setelah jadi hasil tak tahu harus membawa kemana..putus komunikasi saya pikir. Sementara yang dijanjikan Pemerintah bahwa yang akan membeli benar-benar ada. Tapi itulah masalahnya, ada mata rantai yang putus..

Bagaimana dengan masalah lainnya menurut Bapak?

Modal, ya modal..dulu sebelum konflik. Hampir semua petani dan masyarakat tak punya modal. Contoh yang tadi kita cerita, setelah mengusahakan bibit padi..pake modal. Tapi saat mau dijual,tak jadi dibeli..jangan untung, modalpun tak kembali.

Dulu pernah dicoba ada KUD yang memberi pinjaman uang bagi masyarakat tani atau pedagang kecil. Setelah mereka punya duit diantar ke KUD cicilan dalam jumlah kecil dan rutin. Awalnya lancar. Namun konflik membuat semua macet. Dan saat ini jangan harap bisa antar cicilan. Yang banyak antar penganten (intat linto) atau antar orang meninggal ke kuburan..(tertawa).

Hal masyarakat lain?

Satu lagi yang sulit adalah pola kehidupan masyarakat kita pesisir dengan pedalaman. Orang di pesisir, seperti yang saya sebutkan tadi. Seumpama hari ini ia berhasil mendapatkan uang 75 ribu, dia yakin besok bakal mendapat hal yang sama. Sehingga sejak di pasar, sudah diputuskan untuk membeli apa saja dengan seluruh uang yang 75ribu tersebut..pokoknya tangan kiri dan kanan sudah penuh dengan tentengan kantong plastik belanjaan..paling disisakan untuk uang jajan anak sekolah besok. Padahal besok, saat dia ke laut belum tentu mendapat hal yang sama..Padahal harusnya kan tidak begitu, harusnya sudah difikirkan ini uang 75ribu, saya sisihkan untuk keperluan lain. Yang keperluan hari ini, dibeli seperlunya..semacam kebutuhan ikan sudah ada dari usahanya sendiri, Beras dan beberapa hal lain yang perlu difikirkan..Beraspun harusnya sudah ada dirumah kalau ia mengusahakan sawah, walau sawah milik orang. Ini tidak, semua dihabiskan..kan besok ada lagi, begitu fikirannya. Berbeda dengan orang pedalaman. Mereka dapat uang sedikit, tapi hemat dan tidak boros. Ini contoh, tak usah kita ambil tempat yang jauh. Dayah Husen saja, seorang bisa saja membawa pulang uang paling banyak hanya 50ribu dari menjual bawaan hasil kebunnya. Sebut saja membawa daun pisang beberapa lembar, pisang beberapa tandan, daun singkong beberapa ikat. Lusanya turun lagi ke pasar, mereka membawa hasil kebun yang lain, mungkin bisa mendapat 50ribu lagi. Nah uang itu mereka bawa pulang semua, tak ada dibelanjakan..kalaupun ada sekedar membeli ikan yang murah.. Bandingkan dengan nelayan yang bisa mendapat 50-100ribu per hari, tapi langsung habis. Dikantong orang kita, uang seperti meronta-ronta ingin dilepaskan..,haha (tertawa). Berikutnya, orang pesisir itu..setelah terkumpul sejumlah uang yang cukup untuk membeli emas 1 manyam. Mereka bergegas ke pasar, mengalihkan uang menjadi emas..lalu mereka pulang membawa emas. Perlahan dia punya simpan emas yang memadai. Setelah itu, sembari bekerja rutin ..telinga juga dipasang, siapa yang sedang membutuhkan uang...Suatu ketika bila ada yang datang ke rumah, bertujuan hendak meminjam gadai sesuatu. Tak langsung dijawabnya bisa atau diserahkan seketika. Mereka bersikap seakan sedang tak siap dan tak punya simpanan seperti yang diminta..mereka bisa saja berkata, besok lah kembali, coba dilihat dulu ada apa tidak seperti yang diminta. Itu ditujukan agar tak nampak dimata orang ramai, mereka memiliki simpanan dalam jumlah besar..Sementara mereka juga mengambil waktu untuk berpikir keuntungan bagi mereka atas boroh yang digadaikan, seperti kebun atau ladang, bahkan juga sawah. Dari hasil ladang atau kebun itu ia dapat mengumpulkan lagi pendapatan. Bahkan kadang-kadang kalau tak mampu ditebus, ladang itu bisa beralih ke tangannya dengan menambahkan kekuarangan emas yang disepakati. Kalau kita lihat secara fisik dan penampilan orang-orang kita yang tinggal di pedalaman itu...kita kira mereka miskin, padahal simpanan emasnya tak

terkira..Berbalik dengan kita, cara kita berpakaian seakan kita mampu, padahal isi kantong tak seperti yang dikira. Sembunyikan miskin, tunjukkan ciri layaknya orang kaya (*som gasin,plumah kaya*). Tapi kalau orang di pedalaman bukan bermaksud tunjukkan diri seakan dia miskin, tapi begitulah cara ia berpakaian atau memiliki rumah tinggal.

Ini pengalaman saya pribadi, dulu setiap pulang sekolah saya rajin membantu ayah..membawa ikan ke kota-kota lain. Saat itu kalau saya mengumpulkan semua duit itu, mungkin keadaan saya jauh lebih baik dari hari ini. Tapi begitulah setiap hari saya punya uang 50ribu. Yang bernilai besar pada waktu itu. Tapi begitulah..tak pernah bertahan lama, Sejak saya masih di pasar duit itu sudah habis. Nelayan begitu juga saat itu, luar biasa..tangkapan ikan yang dibawa pulang membuat boat penangkap ikan seakan hampir tenggelam sanking beratnya muatan ikan yang berhasil di tangkap. Hanya satu dua nelayan yang berhasil mengumpulkan dan mengembangkan semua penghasilan itu sehingga kini mereka kita kenal sebagai orang kaya. Sebagian besar lainnya, mana ada. Entahlah saya tak mengerti,mengapa bisa demikian..kebiasaan hidup yang sudah membudaya itu membuat nelayan atau orang yang tinggal di pesisir sulit maju. Asala ada uang pasti dibelanjakan habis, seumpama kata..jari ada 10, setiap nelayan pulang ke rumah..kesepuluh jari itu terlihat mengait tentengan kantong plastik (hahah).

Transkrip Wawancara

Informan 12.

Laki-laki, usia 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri. Punya 2 anak. Memiliki pengalaman tumbuh besar di pulau Jawa telah membuatnya memiliki kebiasaan yang berbeda dari kebanyakan orang di lingkungannya. Memiliki sebuah rumah yang tergolong mewah untuk ukuran sekitar gampong. Hal itu tak terlepas dari peran istrinya, seorang bidan pegawai negeri yang membuka usaha praktek di rumah. Peneliti memiliki satu kesempatan untuk mendalami informasi dengannya.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana Bapak melihat kondisi gampong saat ini, terutama terkait dengan kebiasaan kerja dan taraf perolehan pendapatan dari pekerjaan tersebut?

Saya bekerja di dinas PMD dulunya, sekarang tidak. Saya melihat bahwa salah satu hal sulit membangun masyarakat adalah membuat mereka berubah pola pikir dan cara pandang. Seperti kebiasaan yang tak disadari bahwa tak penting, bahkan boros..apa itu yang ditradisikan duduk di warung kopi. Saya tak mengikuti cara itu, saya dicap sombong, karena saya jarang duduk-duduk di kedai kopi. Tapi bagi saya yang tak terbiasa melakukan itu, melakukan itu malah seperti menyiksa diri, bahkan seperti membuang-buang waktu

Transkrip Wawancara

Informan 13.

Laki-laki, usia 39 tahun, pekerjaan utama nelayan. Saat ini sudah agak berkurang mempunyai istri seorang bidan PTT dan anak empat. Pekerjaan utama sebagai tauke yang pernah memiliki dua boat penangkap ikan jenis pukat langga. Saat ini ia menggarap usaha sarang burung walet karena lesunya aktifitas penangkapan ikan..

Wawancara berlangsung tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 10.30 di sisi samping rumahnya yang langsung tersajikan pemandangan keramaian lalu lalang pejalan kaki, kendaraan roda dua dan roda empat dengan ragam aktifitas masyarakat. Diperhatikan dari pakaian yang digunakan, mereka kebanyakan para pelajar yang bergerak pulang ke rumah masing-masing, disamping itu terdapat juga pria dan wanita dewasa dengan agenda ke pasar atau baru pulang dari pasar. Meski dipersilahkan masuk ke dalam, namun melihat suasana disisi kiri rumahnya yang sejuk karena dari rindangnya pohon mangga yang ada maka saya memilih tempat ini. Wawancara berlangsung dalam suasana duduk lesehan.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana kisah hidup Bapak hingga berada dalam keadaan seperti hari ini di tempat ini?

Saya orang meuredu, lahir dan besar di sini, di Meunasah Beuringen, jaraknya tak sampai 1 kilo (km) dari pasar Muereudu. Saya tinggal di Keude Mereudu, sejak masih bujangan, dulu saya berjualan ikan di pasar. Sehingga saya disebut tauke bangku. Maka sebagian orang memanggil saya dengan nama Tauke Ki. Kemudian saya menikah dengan istri yang bidan desa, hingga punya empat anak. Ia putri dari Tauke Non, nelayan berhasil yang tinggal di meunasah teupin pukat, bersebelahan dengan gampong Beuringen. Istri saya awalnya bidan PTT dan saat ini sudah PNS dan berdinis kerja di Polindes Gampong Meunasah Beuringen. Ia rajin mencari uang tambahan sampingan, seperti menyewakan piring atau pernak pernik kebutuhan sajian makanan orang pesta kawin. Saya dapat membeli tanah dan membangun rumah ini dari rezeki penjualan udang windu hasil tambak, dan hasil penjualan tangkapan ikan ikan setelah tsunami. Kalau saya ingat-ingat, setelah tsunami tangkapan ikan sangat baik, dengan harga dan permintaan ikan juga tinggi sekali di banda aceh. Demikianpun saat saya memelihara udang windu. Dalam dua tahun, tak pernah gagal panen, dan harga jual juga tinggi di Medan. Dengan rezki itu, saya dan keluarga dapat membeli tanah, membangun rumah ini dan memiliki mobil.

Untuk saat ini. Apa yang bapak lakukan dalam upaya memenuhi berbagai biaya pemenuhan kebutuhan hidup, seperti makan, pakaian, rumah, pendidikan anak?

Nah, saat saya membangun rumah ini. Terpikir oleh saya untuk menyiapkan lantai dua sebagai tempat bersarangnya walet. Harga sarang walet sedang mahal, dan lingkungan tempat ini juga banyak walet. Sehingga hari-hari ini meskipun kegiatan melaut saya jauh berkurang, tapi i kebutuhan rumah tangga saya ditutupi oleh hasil penjualan (sarang) walet yang membuat sarang di lantai dua rumah saya. Pekerjaan saya sebagai nelayan, sementara ini dapat dibilang sedang tidak saya lakukan sama sekali. Mungkin selanjutnya pun, semakin sulit kegiatan melaut, karena saya lihat harga minyak semakin naik, ongkos anak buah semakin tinggi, tangkapan ikan juga tidak sebanyak dulu. Hasil kegiatan nelayan yang saya jalani lebih dari setahun yang lalu tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, sehingga akhirnya boat itu harus saya jual. Saat ini ada satu boat yang sedang dalam proses pembuatan, namun belum selesai karena terhambat dana.

Hambatan apa yang bapak rasakan mengganjal dalam mencapai target tersebut? Seperti semangat, modal dana atau sejenis itu?

Untuk saat ini saya pikir, situasi berbeda-beda setiap orangnya. Saya merasa rezeki saya dari melaut semakin tak mungkin, tangkapan sedikit, modal tak banyak. Contoh cerita, pernah saat anak buah boat mau berangkat melaut. Mereka meminta 5 drum minyak. Dana yang tersedia pada saya cukup utk 3 drum saja, akhirnya mereka berangkat. 1 hari di laut menelan 1 drum minyak, dan saat itu mereka belum mendapat apa-apa, pada saat tanda-tanda ikan mulai merapat sekitar posisi boat malahan boat harus segera kembali ke pantai karena persediaan minyak sudah tak memadai. Sisa 1 drum lagi untuk keperluan kembali ke pantai. Begitulah, sehingga habis uang hanya utk operasional boat. Tangkapan tak ada, bilapun ada hanya untuk dibawa pulang oleh anak buah boat. Tapi ada juga kawan saya yang berhasil mendapat rezeki ikan berlimpah, sehingga boat nya dari satu saat ini telah menjadi tiga. Itu rezeki masing-masing, yang tak sama setiap orang. Tapi bila ada juga orang yang melaut meski hasil demikian, karena memang itulah pekerjaannya. Melakukan hal lain pun tak bisa.

Hal apa yang Bapak pandang telah Bapak miliki dan hal itu membantu sekali dalam upaya mencapai pemenuhan segala pembiayaan kebutuhan kehidupan ini?

Saya dan istri punya cara mengelola uang dengan baik, ada juga kawan yang mendapat rezeki dari musim udang windu seperti saya. Tapi ia tak hidup enak, uangnya habis tak menentu. Demikian juga pergaulan saya dengan tauke walet seorang cina di Bireun, maka yang sudah seperti keluarga dengan saya. Dimana bila ada hajatan, baik krn ada yang meninggal atau perkawinan dalam keluarga saya disini, selalu mereka datang. Demikianpun saat saya menjual udang ke Medan, saya punya jalur utk membawa udang dengan harga tinggi. Demikian juga mereka melihat bila kita mampu memasukkan udang dalam jumlah besar, mereka

akan memberi harga terbaik buat kita. Saya juga berupaya mempersiapkan diri bila suatu mata rezeki semakin sepi, maka harus ada mata rezeki lain. Semisal saya mempersiapkan sarang walet di rumah, sembari menikmati rezeki dari penjualan ikan setelah tsunami.



Transkrip Wawancara

Informan 15

Jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 50 tahun dengan pekerjaan utama berjualan kopi di salah satu kedai kopi ternama di Meureudu pada era 80an dan 90an. Ia sering berkunjung ke Jakarta, mengunjungi anaknya yang menikah dengan salah satu prajurit Kopassus pada saat tugas operasi di Aceh.

Wawancara berlangsung di persawahan pada tanggal 22 Maret 2011 jam 07.00, dimana pagi itu ia memberi waktu sembari melihat langsung keadaan sawah, dimana sekaligus ia akan mengontrol sawahnya menjelang panen.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bapak Hasan, Bagaimana perjalanan riwayat pekerjaan Bapak hingga dapat dalam posisi seperti keadaan hari ini?

Saya berjualan membantu ayah saya di kedai kopi Samudera, sehingga kemudian saya meneruskan usaha tersebut. Saat ini berjualan sangat sepi, memang betul disini sekarang sudah kabupaten. Tapi hampir 80 persen dari mereka bertempat tinggal di luar meureudu, kebanyakan di di sigli, yang lain ada di Lueng Putu, Beuracan, Trieng Gadeng, Beureuneun. Berapalah uang yang sempat mereka belanjakan saat berada di Meureudu pada jam kantor. Paling hanya segelas kopi dan dua kue.(catatan peneliti : memang dari apa yang terlihat pada hari minggu, kebanyakan dari pedagang nasi atau warung kopi menutup jualan karena berkurangnya pembeli secara drastis- berbeda dengan pengalaman di kota besar lain di Aceh, hari minggu justru menjadi incaran karena kebanyakan dari masyarakat yang libur hari kerja cenderung membelanjakan duit untuk makanan pagi hari). Meureudu ini selain dari pada pegawai yaaa tidak ada pendatang masuk. Tidak ada yang menarik perhatian para pendatang ke sini. Saya sendiri merasa tak cukup mendapatkan pendapatan dari sekedar jualan kopi (kedai pak Hasan, termasuk kedai favorit pengunjung pada era nya dahulu).

Dengan keadaan begini, kami juga mau dikenakan pajak sehingga 50% meningkatkan dari yang sudah-sudah.Saya katakan pada mereka,kita bukan masalah naik harga.tapi pemerintah harus melihat dan bertanya dulu pada kita,bagaimana keadaan penjualan kita saat ini. Dengarlah keluh kesah kami. Untuk apa kita menyebut Pidie Jaya tapi uang tak ada. Pemerintah pasti menang, mereka tak ada pendekatan. Apalagi sekarang pemda dan DPRD sudah banyak orang GAM, kalau mereka keras. Seharusnya pemerintah itu membuat himbauan.

Buat pendekatan pada masyarakat pedagang..kalau sekarang tidak, mereka mengatakan bahwa ini Pidie Jaya, ikuti apa yang kami atur. Kami sering mengatkan, agar kami sering dikunjungi, dilihat dan bertanya..bagaimana keadaan, apa laku barang ..atau sepi. Mereka tahunya menambah pajak saja. Tapi kita semua yang menyanggah disebut pembangkang. Idealnya pemerintah ada dalam rakyat, rakyat ada dalam pemerintah. Meskipun mereka yang memerintah adalah orang-orang kita juga,tapi mereka tak mau mendengar keluhan kita. Mereka katakan, itu bukan urusan mereka. Urusan kami jualan, lalu bayar pajak. Tampaknya tertutup pintu komunikasi. Kami kesulitan, karena konsumen terbatas. Orangnya itu itu saja..

Mengapa kalau ada masyarakat Gampong ini sampai tidak terbangun taraf ekonominya. Padahal potensi untuk bekerja terbuka?

Seperti kita katakan tadi, terkadang orang itu mengerjakan sesuatu tanpa ada pengalaman..orang laki-laki kebanyakan menjadi nelayan. Mau membeli alat-alat kerja sendiri, seperti boat atau mesin dan lain, tak ada modal. Tapi kalau nelayan yang mengikuti boat orang lain, ya habis buat makan saja. Demikian juga dengan tani tambak, untuk saat ini semua usaha pertambakan hancur. Ada virus yang membuat mati semua udang dan ikan. Terkadang mampu kerja,tak mampu modal. Kalau di gampong ini, ada ingin berjualan ikan di pasar,tapi tak ada modal. Sekarang orang ramai-ramai di TPI. Padahal kalau saya pikir, bukan begitu. Kalau ada duit,beli itu ikan 40kg. Tuangkan pada keranjang,lalu bawa dengan motor untuk dijual ketempat lain..jangan disitu-situ aja. Lagi pula, jujur diutamakan. Kalaupun tak kita lunasi dulu,asal dipercaya oleh pemilik ikan..bisa saja. Tapi okelah begitu,tetap perlu alat transportasi untuk membawa ikan ke tempat lain..mana ada lagi yang angkut ikan dengan sepeda sekarang hahahaha.

Apa masyarakat ini kurang modal?

Jadi masyarakat sini, kalau dalam ungkapan aceh. Tak cemburu dalam mencari nafkah..banyak nongkrong. Yang banyak waktu dihabiskan mencibir orang lain..sebenarnya orang laki itu, harus membuat pekerjaan, bukan dicarikan. Apalagi orang laki bertugas mencari nafkah buat anak dan istrinya..cari pekerjaan dengan membuka pikiran. Ini tidak, sekarang ada duit sedikit lalu berhenti bekerja dan santai-santai. Padahal seharusnya, duit ini ditabung dan ia langsung bekerja lagi. Uang itu, dapat digunakan untuk anak sekolah atau mengobati anak kalau sakit. Sekarang mereka kapan butuh duit baru tergerak untuk bekerja..mana tahan kita. Begitulah pola mereka. Saya pikir, mengapa tidak mereka saat ada duit, timbul pemikiran untuk berkongsi dan mencarter tambak untuk mengusahakan ikan..itu tidak dilakukan malah, mereka lebih banyak nongkrong.

Bagaimana bila sedang ada program bantuan dari pihak lain?

Saat ada bantuan, entah apapun mereka beli. Mereka tidak bekerja. Seharusnya bantuan itu, disamping dimakan juga disimpan hingga tercukupi untuk perputaran modal. Sekarang jangan hal lain, tinggal di kampung, beras saja harus mereka beli. Sebenarnya urusan beli beras, sangat berat. Tak terasa sudah habis. Petani sebagai rakyat kecil, dengan anak sebut saja 6. Mendapatkan hasil sawah cukup untuk makan. Kalau saja petani berpikir untuk bekerja mengelola tanahnya sendiri dan turut bekerja menggarap tanah orang lain, saya rasa mereka bisa mendapat lebih dari cukup. Sehingga untuk kebutuhan dapur, seperti beras sudah ada di rumah. Mungkin mereka hanya perlu membeli sayur atau ikan ke pasar. Sekarang agak lain, padi di jual semua. Manakala perlu, baru mencari sekedarnya di pasar. Saya tidak demikian, saya simpan padi 1 ton dari usaha sepetak demi sepetak sawah, hingga saat ini saya juga mengambil sawah milik orang untuk digarap. Hasilnya sangat baik untuk saya, paling tidak saya tidak membeli beras lagi untuk kebutuhan rumah tangga, yang lain saja seperti ikan yang masih perlu saya cari. Saya hanya perlu mengatakan pada pabrik penggilingan padi tempat saya titip untuk menggiling padi saya sebanyak yang saya perlukan, tinggal mereka membuat catatan. Dengan cara ini, kita tidak morat marit.

Jadi masyarakat sekarang bagaimana?

Untuk sementara ini, masyarakat di baroh sudah berbeda dengan masyarakat di tsunong. Soal pendidikan, kita sudah kalah. Sekarang yang banyak menyekolahkan anak, justru orang tsunong dipedalaman. Sarjana-sarjana disana sudah penuh. Mereka disana, selain menggarap sawah untuk padi juga memanfaatkan untuk bertani timun selama satu bulan, mereka langsung menggali untuk penanaman itu setelah masa panen padi berakhir..saat ini mereka telah berbeda.

Mengapa?

Mereka sudah banyak orang pintar, anak-anaknya yang disekolahkan dan mereka pulang untuk mengembangkan orang tuanya. Kalau ada rapat mereka mendengar apa yang disampaikan anak-anak yang sudah disekolahkan itu..mereka diberi pengarahan. Maka terbuka pikiran mereka. Sekarang di baroh, sudah semakin kurang anak disekolahkan. Yang banyak anak muda, terjebak dalam shabu-shabu. Yang kedua, walaupun ada masyarakat yang punya anak sekolahan, tak mau berbagi. Karena hanya mau sejahtera sendiri. Sekarang datanglah ke banda aceh, kalau kita tanya orang mana ia di Pidie Jaya, maka jawabannya ,tsunong, beruracan, gintieng. Sekarang semua mereka, punya orangtua petani tapi anaknya sudah sarjana semua. Mereka lebih prihatin dalam sekolah karena orangtuanya susah payah dulu mencari uang. Sekarang mereka ingin mengubah keadaan orang tuanya. Kebanyakan penduduk sana telah membuka kebun-kebun, katakanlah sawit..mereka memasukkan pikiran pada orang tuanya untuk menggaji

dua orang lain untuk menjaga. Sehingga pemilik hanya mengontrol saja..biaya kebutuhan sudah ditanggung anaknya..sehingga mereka berkembang.

Jadi lahan digunakan maksimal?

Ya, sekarang usaha tanam semangka..mereka kehabisan lahan untuk tanaman ini. Begitu giatnya mereka mengelola setiap ruang tanah..untuk mengambil semangka, langsung tronton yang menjemput..sementara anak-anak di baroh semakin kacau. Saya sendiri punya anak yang terjebak dalam shabu-shabu, apa saja telah saya nasehati dengan lembut. Agar sayang pada kami orangtua nya.. Ini sekarang dia dalam tahanan..Ini di gampong Beuringen baru ditangkap. Saya pikir sulit membasmi narkoba,karena tak ada keseriusan..yang terlibat di dalamnya juga ada petugas. Seringnya yang ditangkap adalah orang beli, yang mengedar dan bandar tidak. Shabu-shabu banyak dari malaysia.sekarang di Ulim, Samalanga, tempat kita penuh dengan itu sekarang..saya kuatir dalam 5 tahun lagi, otak anak-anak muda kita habis semua. Kasihan anak muda kita, sudah rusak dengan narkoba itu. Lihatlah di panteu-panteu dimana anak muda berkumpul, mereka sudah terbungong-bungong..kita juga tak berani melawan keadaan. Anak muda kalau tak mau, diberi gratis dulu..sehingga kalau sudah candu. Maka dengan segala cara si anak muda mencari uang untuk memenuhi kecanduannya.

Transkrip Wawancara

Informan 16

Jenis kelamin laki-laki, umur sekitar 59 tahun, punya 5 anak dan satu istri. Pekerjaan utama saat ini adalah menjalankan usaha industri pembuatan kue adee bersama dengan istrinya.

Selama 10 tahun terakhir industri di bawah kelolanya, berkembang pesat dan produk kue adee mereka menjadi incaran para masyarakat Pidie ataupun para pelintas jalan negara (jalan raya Banda Aceh-Medan). Tingginya permintaan oleh kuliner khas Aceh ini, menjadi penyebab munculnya industri sejenis di kawasan ini. Menggunakan lahan kosong sebagai dapur pembuat kue, langsung disamping kiri rumah tinggalnya. Meski sudah berhasil, rumahnya masih seperti sediakala. Kelihatannya ia tidak terpancing untuk menunjukkan keberhasilannya dengan membuat rumah mewah. Kendaraan yang digunakan juga lebih bersifat kendaraan niaga, jenis avanza.

Wawancara berlangsung di ruang tamu rumahnya. Peneliti diberi waktu untuk datang setelah shalat isya. Sempat mengalami pergeseran beberapa kali karena istrinya sedang berkunjung ke Banda Aceh. Pak Kasim menyambut peneliti dengan terbuka dan terlihat antusias menceritakan apa saja hingga tanpa terasa waktu nyaris pukul 24.00.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana kehidupan masyarakat disini dan bagaimana mereka bekerja?

Mayoritas masyarakat kami adalah petani. Petani tetap sebagai petani, tapi ada dari mereka yang pintar dan ada yang tidak. Kalau pintar mereka mencari tambahan uang untuk modal, katakanlah 20 juta, setelah panen ia bisa dapat 100 juta. Di Aceh orang bekerja beda dengan di Jawa. Kalau di Jawa orang kerja upahan dapat 30 ribu sehari sudah sangat senang. Disini minta maaf tak mau mereka bekerja meski dikasih 50 ribu. Semiskin-miskin orang Aceh tidak yang tidak punya rumah. Sewaktu masa moneter, hebat sekali uang orang Aceh...demikian orang Aceh, yang disebut malas oleh sebagian orang. Yang tak dapat dirubah dalam masyarakat Aceh adalah kebiasaan untuk berhenti sejenak setelah mendapatkan uang dari bekerja. Sebagai contoh, petani sawah. Setelah panen, mereka santai-santai di warung kopi. Padahal tanah itu bisa digarap lagi untuk menanam timun, cabe atau kacang atau apa yang mungkin. Tapi seperti kita katakan tadi, nanti saat musim tanam tiba baru mereka memulai lagi. Mengapa saya katakan demikian, orang Aceh asal menyekolahkan anaknya ..pasti sampai

berhasil. Tidak ada yang kandas ditengah jalan. Asal orang tua dan anak ada kemauan. Sebagai contoh saya ceritakan, ayah dari Ilyas Ansyari. Rumah saja pada waktu itu menumpang di tanah orang,pekerjaannya hanya nelayan yang menggunakan perahu kecil.Tapi anaknya semua sarjana dan sekarang mereka semua menjadi PNS. Mengapa bisa?karena kemauan tinggi.Cara mencari rezeki.Tapi sebagian orang, berpikir “ah tak sanggup kita sekolahkan anak, banyak sekali biaya memasukkan anak ke fakultas..butuh uang ini dan itu” mereka semua kebanyakan tidak berhasil. Banyak orang yang datang pada saya bercerita ingin sekolah anak dimana saya mendapatkan uang? Saya menjawab, yang jangan takut. Tuhan sangat kaya, contoh kak Lah. Kak lah tidak berencana menyekolahkan anaknya tempo hari karena banyak habis uang. Saya beri motivasi, setelah itu baru dia tersentak sadar..mengakui sudah berhasil bersekolah anak saya. Lalu saya tanya, apa yang sudah ibu jual untuk urusan itu? Tak ada apapun. Tapi dari mana uang semua itu? Tuhan itu sangat kaya. Yang penting kemauan ada,Tuhan pasti akan membantu. Saya sendiri. Kerja sebagai guru, tapi anak saya kelimanya sarjana. Bahkan anak yang namanya wahyuni hendak saya lanjutkan hingga S.2. (lalu ia bercerita tentang anaknya yang hendak mencari jurusan yang hendak dipilih).

Bagaimana Bapak mendorong masyarakat bekerja? (istrinya Pak Kasim yaitu kak meutia ikut duduk bersama)

Orang yang bekerja di tempat kita, misalnya usaha suaminya sudah macet di tambak..atau malah ada yang suaminya telah meninggal. Orang yang bekerja di dapur kue kita mendapat 80ribu per hari. Itu rata-rata.terkadang ada 100 dan malah ada yg 150 ribu. Kita membayar langsung keesokan harinya dari produksi yang dikerjakan sehari sebelumnya. Kita punya 8 orang pekerja, yang ada bekerja teknis dan bukan. Dalam sehari kita membayar gaji sekitar 640ribu hanya untuk yang didapur,belum termasuk untuk orang yang menangani *tapeh*,orang kukur kelapa, pencuci loyang cetak kue. Tukang kukur kelapa merangkap RBT (petugas pengantar ke toko), dia mendapat sekitar 100ribu per hari...kami harus punya uang sehari 1 juta per hari untuk biaya gaji pekerja. Mereka rajin kerja, tak mau libur..apalagi mereka kami hargai upah kerja bukan per hari, tapi per potong cetak kue. Mereka pun sangat terbantu bekerja mengaduk adonan karena adanya teknologi peras santan. Meskipun peras santan itu menjadi tanggung jawab petugas teknis dapur, namun kami turut bekerja. Jam 6 pagi santan sudah siap di meja dapurnya masing-masing. Sehingga jam 7 mereka bekerja, melanjutkan mengaduk adonan dan membakar kue yang telah dimasukkan ke dalam loyang cetak. pagi hari pekerja hanya melakukan pekerjaan mengiris daun pandan, potong bawang merah, aduk telur dan minyak. Mereka bekerja keras dan semangat, setiap sore anak saya Fadli telah punya catatan berapa dari mereka mampun menyelesaikan kue hari itu. Besok pagi sudah ada duit untuk mereka sebesar 2ribu per cetak. Itu uang 2ribu sudah banyak,tapi jangan dilihat dari satu

unit cetakan kue. Jam 3 sore mereka mampu membuat 100 cetakan masing-masing. Hal ini berbeda dengan hari jumat, sabtu, minggu. Juga kadang-kadang senin. Saat permintaan sedang tinggi, mereka juga makin semangat bekerja. Selagi permintaan ada dan mereka meminta tambahan..istilah kami sebut sambung. Maka santan juga harus sudah kami siapkan. Kue Adee yang pertama di Meureudu adalah buatan kami. Kami titip di toko di simpang peut mereudu. Awal pertama kami titipkan, agak kami paksa juga..setelah 6 bulan dilihatnya bagus penjualan. Si Nasir, toko yang kami titip itu. Tak mengizinkan kami titip ke tempat lain, harus selalu ke tempat dia. Hitungannya satu unit yang laku terjual dia mendapatkan 3 ribu. Rata-rata kue adee kami laku terjual 200 kotak sehari, dan yang ubi sekitar 50 kotak. sehingga dia rata-rata dapat 750ribu sehari. Minimal dia mendapat 500ribu per hari. Sangat tinggi untuk dia. Kita punya prinsip agar orang lain ikut merasakan manfaat dan keuntungan dari pekerjaan ini. Demikian juga bila ada pekerja yang mau berdikari, membangun usaha sendiri. Kami persilahkan. Kami tidak menahan. Kami melihat meskipun kami tidak membendung kehadiran pesaing. Tetap saja tak berkurang omset permintaan. Malah kita terbantu dengan adanya mereka turut membantu permintaan pembeli. Kepada mantan pekerja kita yang telah mendirikan usaha serupa, kami malah memberi ruang lemari untuk tempat produksi mereka. Kami tak mau hidup sendiri saja. Termasuk kak Juwoy, itu tak lama bekerja pada kita, sekitar 3 tahun lebih. Usaha yang dengan sistem pemasaran di simpang peut ini sudah kita bangun sebelum tsunami sekitar 8 tahun yang lalu. Tapi kalau pembuatan dengan penjualan biasa sudah kita laksanakan sejak 15 tahun yang lalu. Pada awal usaha kami hanya mendapa 80ribu per bulan. Ada cerita pekerja yang membuat saya terharu, dari uang pertama kami beri ia langsung gunakan untuk membeli beras dan pemberian setelah itu ia gunakan untuk membayara cicilan hutang pada bank hingga lunas. Ia menceritakan itu pada istri saya dengan terharu. Ada cerita lain, kak Ni ubie. Pada awalnya hanya menitip sekitar 2 adee ubi untuk turut disertakan dalam penjualan kami.. akhirnya sekarang membuat hingga 100 unit kue. Darinya hanya kami ambil 2ribu untuk harga kotak saja. Sekarang banyak yang merayunya agar memutuskan penitipan kue buaatannya pada kami. Tapi sedikitpun ia tak mau bergeming dari kami, karena kami hanya mengambil harga kotak. Jadi dari usaha itu dia sekarang sudah punya dua rumah bagus dan beberapa kendaraan roda dua di rumahnya. Yang bekerja pada kita adalah tetangga kita semua, sehingga kalau ada komplain dari sementara pihak bahwa asap dapur pabrik kita mengganggu orang sekitar. Maka saya minta agar disampaikan langsung pada orang sekeliling pabrik agar menyuruh kami meniadakan asap pabrik. Mereka menjawab, dapat saja kita hentikan asap pabrik kue adee. Tapi setelah itu dapur kami pun tak berasap lagi. Apa yang mau dikomentari lagi. Ada sebagian yang kurang senang dengan perkembangan usaha ini, ada juga yang tak senang dengan pola kami mendidik serta memajukan orang lain untuk turut menikmati keadaan ini. Meskipun diantara mereka tidak mengakui bahwa kemajuannya akibat didikan

kami, itu tidak masalah karena kami lakukan karena mengharap balasan Allah SWT. Bahkan ada yang meminta resep, kami berikan meskipun itu rahasia perusahaan atau rahasia produksi. Contoh satu lagi adalah adik kami di banda Aceh. Awalnya ia membuka usaha pembuatan sendiri. Usaha kami banyak yang suruh tutup, terlebih lucu ada Komnas Anak yang memprotes kami karena setiap sore saat datang tapeeh, anak-anak seusia SD berkerumun disini. Mereka rame-rame menggotong tapeeh. Kita larang tak mau, mereka kami beri sepantasnya ada yang 5ribu, ada yang lebih. Kak La termasuk, Siapapun yang belajar industri ini pada kami. Kami persilahkan. Dengan keadaan ini, ekonomi masyarakat sekitar meningkat. Malah para tetangga yang turut bekerja, kita bilang istirahat saja malah tak mau. Walaupun produksi tetap saja melihat tingkat permintaan harian di simpang peut. Yang paling kami jaga toko adlah di simpang peut dan Beueruenen. Di Beueruenen ada 4 titik kami sebar produksi kita. Produksi kita sampai Malaysia, ditelepon oleh mereka langsung. Kue ini juga sampe ke Surabaya dan Jogjakarta. Malah pernah ditelepon, karena kue kita ternyata dapat bertahan hingga lima hari. Padahal kami sempat bilang tahan 3 hari. Kami tidak menggunakan pengawet karena masih alami. Kami masih menggunakan gula, bukan sari manis. Pembakaran pun menggunakan tapeeh (sabut kelapa kering). Pernah ada yang bilang kami soal gula dan sari manis..saya tantang bahwa bila barang kita bisa bertahan dalam tiga hari maka itu terbuat dari gula. Tapi kalau dari sari manis sampe sore saja sudah tak tahan. Sebenarnya kalau tak ada santan,dapat tahan lebih lama.Tapi karena ini basah maka demikian. Bandingkan dengan bingkang ambon, kadar air pada adee lebih banyak. Mungkin kalau disimpan di kulkas dapat tahan lebih lama.tapi ia menjadi keras. Pekerjaan ini telah kami sebar perjualannya hingga bandara.Namun bandara sangat mahal dijual sampe berharga 50ribu,sehingga kami hentikan sejenak. Terlebih sebagian orang sudah tahu tempat membeli yang berharga standar di banda Aceh. Yaitu tempat adik kami sebutkan tadi. Di Batoh,setui, ulee kareng dan dekat mesjid Raya Banda Aceh.Ada rencana kami kembangkan di Jakarta. Tapi dengan sistem lebih moderen.mungkin sistem open. Jangan sampai mereka merasa enak nya dengan bahan bakar tapeeh. Apalagi di Jakarta orang sudah mulai mencari makanan asli.Untuk sementara ini, simpang peut macet karena antrian dan parkir an mobil-mobil angkutan umum dan angkutan pribadi yang saling berebutan membeli oleh-oleh kue adee. Pada hari-hari tertentu, kami tak sanggup mengangkat hp karena permintaan tambahan kue adee di berbagai titik yang kami sebar, Beueruenen, Ulee Glee.

Ada rencana tambah Dapur kerja pak ?

Sebenarnya ada, tapi tanah saya sudah habis.saya pernah meminta beli tanah sawah yang belakang tanah kita ini..walaupun 4m yg dijual. Sepanjang rumah saja, tapi pemilik nya Tapi memberi, bahkan saya bilang sewa..tapi sama juga.tak diberi. Yang meminta kerja juga ada, tapi tak ada tempat.

Bagaimana pandangan Bapak, mengapa bilapun rajin tapi tak bertambah taraf ekonominya?

Kelemahan orang kita adalah tidak sepenuh hati bekerja, contoh saya katakan demikian karena saya sendiri merasakan bahwa bila saya tak sepenuh hati maka tidak begini keadaan saya hari ini. Karena pada awal saya berusaha, seperti kerakap di atas batu. Setiap saya buat ada yang laku, ada yang tidak. Karena pemasarannya dalam kalangan orang terdekat. Jangan lihat keadaan hari ini, setelah adee dikenal orang ramai. Setiap kita buat, pasti laku. Tapi mengembangkan pemasarannya pertama kali yang menjadi masalah. Contoh lain, misalnya ikan kayu. Tapi mengapa tidak berkembang? Ikan yang sedang berlebih terkadang sampai membusuk sendiri. Kebanyakan orang tidak mau. Setiap orang tidak punya kreatifitas. Ada saja alasan mereka untuk tidak berkreasi. Atau mengapa orang tidak membuat abon ikan? Karena orang kita tidak mau. Bagaimana cara membangkitkan? Contoh lain, nagasari. Yang terkenal di Bireuen. Satu pikiran lain dari saya adalah limbah industri pembuatan natadecoco atau sari kelapa. Rencana saya melihat cara membuatnya di Bogor. Saya memperkirakan setiap hari terbuang air kelapa sekitar 1500 kelapa. Air kelapa diolah dengan bahan-bahan kimia, maka menjadi makanan yang lezat. Saya pikir saya harus mengikuti pelatihannya terlebih dahulu, baru kemudian kita dapat membuatnya, terutama mendapat izin untuk membeli unsur Na yang tak mudah dijualbelikan kalau kita tak lulus pelatihannya lebih dahulu. Saya pikir kalau saya sudah memulai dan sukses nantinya, maka baru orang lain mengikuti. Untuk bergerak pertama kali sangat susah orang kita. Apa yang sudah dibuat orang maka sebagian hanya mengekor. Contoh dalam hal ini adalah kotak kue adee, itu kita yang buat. Sekarang semua mengikuti kita, kecuali kak Nah. Dia membuat model sendiri, yang motifnya mengikuti motif lama yang kita miliki. Sekarang saya sudah membuat motif yang baru. Saya membuat design nya di Jakarta, dikantor Kementerian Perindustrian. Saya ingin orang melihat orang tertarik dengan kemasannya, apalagi ditambah dengan kelezatan rasanya.

Konon orang Pidie dikenal pandai berdagang? Bagaimana Bapak melihat keadaan ini disini?

Memang betul demikian, tapi kalau keadaan itu disini agak lain. Mungkin karena disebabkan oleh pergaulan dan pendidikannya. Ini contoh saya kemukakan, ada mantan murid saya. Ia mencoba berkebun coklat di lahan sekian hektar. Ia mengeluh karena 3 hari di gunung, 2 hari ia harus turun. tak mungkin bertahan terus di gunung, karena uang harian untuk kebutuhan belanja dan sekolah anak harus dicari dengan meng-ojek. Saya sarankan agar ia merubah pola pikir. Untuk kebutuhan uang harian, dapat diambil dari tanaman yang dapat dipanen dalam tempo singkat. Saya sebut Sawi. Tanam sawi disela-sela tanaman coklat atau pada area yang kosong di kebun...dengan membuat petakan berpola, sehingga masa

panen tidak putus. Lalu ia dapat memperoleh 80ribu per hari. Ia tak perlu turun lagi untuk menjual, akan ada tengkulak yang naik menjemput..itu kan hanya pola pikir. Tuhan telah membuat ada tanaman muda dan tanaman keras. Tanaman muda dapat dipanen dalam waktu 15 hari, mengapa harus mengharap tanaman keras semacam coklat saja. Ini sekarang masyarakat kita tidak demikian, keperluan sayur mayur pun dikirim dari luar Meureudu. Rhing dapat hidup karena terbiasa menanam tanaman seperti sayur, buah-buahan seperti melon. Itu Yusri Melon, adalah orang sana. Saya lihat orang sebelah sana (menunjuk ke arah kaki gunung) sudah berbeda dengan kita yang sebelah sini. Orang kita hanya mengandalkan sepetak sawah dan laut. Jadi tidak berusaha berpikir dengan cara lain. Begitu juga saya, usaha ini dirintis oleh mamak saya, saya hanya berpikir bagaimana membuat usaha ini memiliki prospek yang bagus dari sekedar selama ini ada.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa putaran uang tertinggi di Meureudu mengikuti tangkapan ikan oleh nelayan? Ada pendapat pak?

Bila hanya mengandalkan hasil tani, maka tak bisa hidup. Tapi menggeluti beberapa bidang secara tak fokus juga bisa hancur. maka saya mengatakan bahwa fokus penting agar berhasil. Misalnya pelihara ayam, bekerjalah sefokus mungkin agar usaha ini berhasil. Lihatlah Pak Ansyari, berternak ayam potong sampai berhasil. Nah dalam bekerja fokus diperlukan kesabaran. Perlahan-lahan, dikembangkan lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jangan patah semangat. Persoalan jatuh sedikit sering kali membuat orang patah semangat dan tutup total usahanya. Perkara lain yang membuat orang kita tak maju adalah lebih besar pasak daripada tiang. Dapat uang 10ribu, belanjanya melampau pendapatan. Tak punya perhitungan. Contoh lain, padi belum panen, hutang sudah ada, Motor sudah kredit. padahal tak terlalu butuh. Terlalu suka meminjam dan kredit. Dalam kebiasaan makan juga, tak perhitungan. Sekali duduk di kedai kopi maka belanja 10ribu sudah paling rendah. Yang diminum telur ayam kampung setengah matang, kopi susu. Lihatlah pagi hari, nasi guri dengan daging dan kopi dengan campuran telur. Lihat juga dalam bulan puasa, semua yang dilihat semua dibeli. Lihat juga motor, semua rumah punya motor. Dealer tak mampu menyediakan suplai motor. Sementara penghasilan tak menunjukkan itu, demikian juga televisi. Akhirnya saya mengatakan bahwa dengan model begini kerja saja orang Aceh dapat hidup layak, bagaimana lagi kalau rajin..sudah pasti jauh lebih baik. Persoalan orang Aceh pintar, saya yakin semua universitas ada orang Aceh. Mengapa demikian? karena ada yang mau bersekolah dan kreatif dari orang Aceh. Namun ada juga dari orang Aceh yang malas, asik dengan mengajukan proposal bantuan dana. Yang saya tak suka adalah tak sesuai antara isi proposal dengan pelaksanaannya. Kalau bagus yang dibuat maka akan membuahkan hasil yang bagus. Seperti bantuan ternak ayam, kalau dipelihara dengan baik dan diobati atau diperiksa secara rutin pada mantri hewan. Saya yakin, akan berhasil usaha

mereka. Lihatlah si Nazar, dari sekedar memelihara ayam sekarang ia telah buka rumah makan di cot treing. Sekarang kalau kita membuka usaha lebih dari satu, maka tak mampu kita kontrol dengan baik semuanya. Demikian juga dana tersedot untuk modal sangat besar. Saya pikir jangan takut gagal, kalau ada yang gagal, belajarlah lagi. Pengalaman itu yang mendorong muncul ilmu.

Berkaitan dengan masalah yang ada..apakah ada pencerahan dari LSM?

Ada. Malah di rumah kita, berlangsung penataran industri pembuatan adee. Kita mengambil peserta dari semua kampung di Meureudu. Diberi duit 30ribu per hari per orang. Tapi setelah penataran berakhir, berakhir pula semuanya. Industri kue adee yang hari ini ada, dikembangkan bukan oleh mereka yang ikut penataran. Mereka semua, yang pernah bekerja pada kami. Pemerintah juga membantu, saya dibantu alat peras santan. Bahkan saya membantu menunjuk pengusaha mana lagi yang perlu dibantu.

Usaha apa, sebelum ini pernah Bapak lakukan ?

Saya usaha lain dulunya, membawa dum truk. Mengangkut apa saja seperti pasir, tanah atau barang atau ikan. Tapi setelah saya pikir, itu semua tak memberi hasil maksimal. Tak ada nilai tambah.

Kendalanya?

Kejujuran operator sulit kita dapat. Diluar itu, usaha ini bersifat merata. Kalau segitu..ya segitu terus, tak akan melewati dari angka itu. Apalagi truck sudah tua, sebagian pendapatan habis buat bengkel atau biaya rawatan. Akhirnya kadang tak dirawat lagi. Lain dengan kapal nelayan, sekali-kali kalau sedang rezeki bisa membawa pulang sampai 10 jt. Kalau truck mana bisa? Sudah terukur daya angkutnya, dan sudah terbatas jam bekerjanya. Paling tinggi, 200ribu di dapat. Lebih dari itu tak ada waktu untuk kita kerjakan..hanya cukup sekedar biaya anak sekolah. Akhirnya, saya berpikir apa salahnya kita kelola usaha kue adee mamak. Biasanya mamak membuat kalau ada orang pesan. Namun belakangan kita tetap membuat meski tak ada yang pesan. Saat yang pesan meminta dan langsung ada barang maka selanjutnya secara informasi berantai, mereka datang untuk langsung membeli. Akhirnya kita titip di pasar, sehingga kita titip di simpang peut. Soal angkutan, saya pikir orang Aceh terlalu memilih-milih. Berbeda dengan di Jawa. Lihatlah metromini, bagaimana keadaanya jelek tapi tetap saja ada yang naik.

Apa ada kaitan semua kreatififitas itu, dengan pernah keluar dari Aceh dan melihat negeri orang lain?

Bisa. Pengalaman pribadi saya begitu. Saat saya melihat bingkang ambon di medan dapat terjual banyak. Mereka kemas dalam kotak menarik. Lalu saya berusaha mencontoh keadaan itu untuk mengemas kue adee secara kotak menarik. Awalnya saya rakit dari kotak kardus indomie. Agar mudah diingat, saya beri

label Adee Meutia. Dalam sebuah diskusi di hotel Lading Banda Aceh. Ditanya sebagian peserta, apa itu adee? Sebut saja bingkang. Saya tidak mau. Harus tetap adee disebut. Namun untuk memperkenalkan bahwa adee itu makanan kue, maka disebutlah kue adee. Apalagi ada gambar kue di kotaknya. Kotak kue meutia adee mereudu telah ada di kantor kementerian perindustrian di Jakarta. Nah, sekarang dengan hanya mengemas sedikit saja, demikian banyak nikmat yang didapat. Dan saya tak ingin dipuja karena saya semua menjadi begini. Malah sekarang industri ini sudah mulai diikuti oleh gampong-gampong yang jauh dari dayah kleng. Memang Adee adalah kue khas Aceh, tapi kelezatannya berbeda cita rasa dengan adee Meureudu.

Secara umum masyarakat Pidie, terletak pada posisi yang menguntungkan. Tapi keadaan begini. Bagaimana pendapat Bapak?

Ini karena alam...lihatlah aceh timur. Padahal duluan berkembang dia karena ada temuan minyak. Tapi lihatlah kondisi rumah-rumah penduduknya, tidak ada rumah yang seperti di gampong ini. Sederhana semua, kalau di Pidie boleh masuk hingga ke dalam. Rumah-rumah tak ada yang buruk-buruk. Saya pikir, mereka hanya mendengar tentang Pidie. Saya pikir, bolehlah lihat ke dealer penjualan motor. Berapa banyak laku terjual. Dan berapa banyak motor yang pernah ditarik oleh leasing karena tak mampu membayar. Tak pernah ditarik, meski 500ribu per bulan. Kalau sudah bertekad harus mendapat uang untuk sebuah keperluan, orang kita pasti akan mendapatkannya. Contoh saja, karena ingin bisa membeli rokok maka ia bekerja, namun pendapatan yang didapatinya kadang melebihi dari sekedar untuk membeli rokok. Namun begitulah, setelah mendapat 100 maka ia berhenti. Apa yang dicari sudah didapatkannya.

Apakah ada dasar dari masyarakat kita melakukan sesuatu, terutama kegiatannya bekerja, yang dilihat dari nilai adat atau agama?

Kalau karena agama saya pikir sedikit, kalau karena adat malah tak ada. Saya pikir motivasi berkerja karena anak. Kalau sudah disekolahkan anak, maka ia berikrar untuk membiayai dengan segala upaya sehingga harus selesai. Anak nya harus bisa mendapatkan sama dengan anak anak orang lain. Contoh yang saya sebutkan, pak umar. Ia malu bila kelak anaknya gagal dalam sekolah. Makanya akan maju, orang yang menyekolahkan anaknya ke kota. Saya pikir bukan karena agama, saya berikan contoh lain. Orang Beuracan bisa maju karena sebagian besar anak anak orang Beuracan disekolahkan hingga kuliah di universitas. Berbeda dengan kita. Sehingga berubah adat kebiasaan hidup orang Beuracan karena anak-anak mereka menjadi orang terdidik. Orang akan tergerak untuk bekerja karena karena memikirkan apa yang harus dikirim buat anaknya. Sekarang berikan saya orang bekerja karena agama?, tak ada. Begitu juga adat istiadat. Sebagian orang yang takut mensekolahkan anaknya karena ketiadaan dana, itulah sebenarnya orang orang yang gagal. Karena semangat bekerja orang tua ada pada upayanya

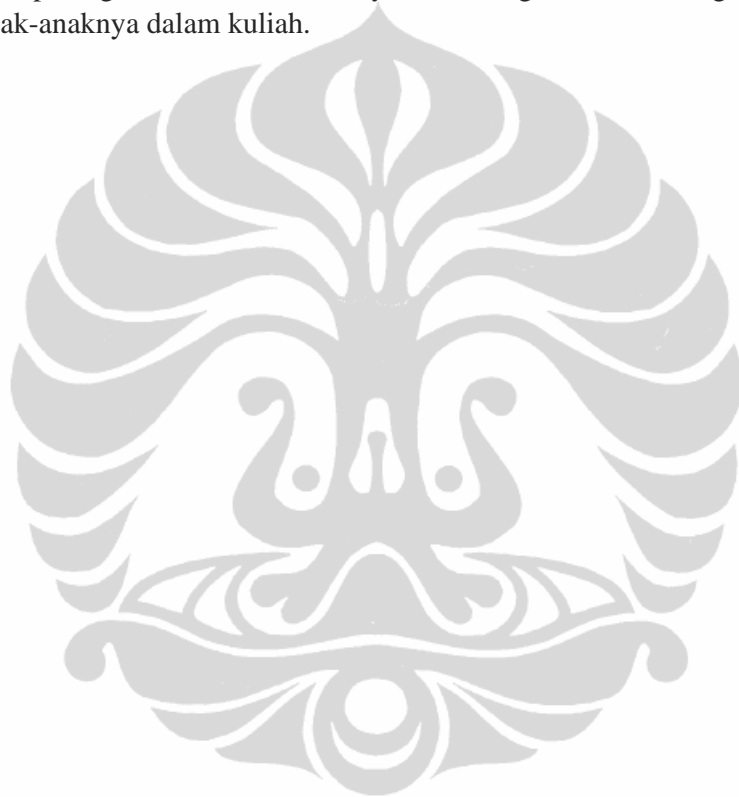
memenuhi kebutuhan kuliah anaknya. Saya termasuk yang bekerja keras karena memikirkan anak, mengajar di smp dengan gaji pas pasan sehingga saya membawa truk untuk mendapat tambahan. Karena anak pun dalam kuliah tidak sekalian harus ada uang dalam jumlah besar, semua bertahap. Memang betul, dalam tahap awal pasti butuh dana lebih besar. Tapi kebutuhan untuk kost setahun, untuk spp. Bisa berhutang dulu. Nanti dibayar pelan-pelan. Setelah itupun anak-anak hanya perlu uang makan dan transportasi. Bila kelak ia telah wisuda, luar biasa terasa kebahagiaan karena berhasil dari jerih payah yang tak ada kepastian dari hari ke hari. Saya sering kali memberi masukan nasehat, setiap yang datang pada saya untuk mendapatkan jalan keluar. Saya katakan kuliahkan, walaupun jurusan bidan yang katanya banyak butuh biaya karena ada praktek. Setiap yang mengikuti, hari ini telah mendapatkan kebenarannya. Seringkali orang yang miskin tapi bisa berhasil mensekolahkan anaknya hingga kuliah memacu orang lain untuk mengikuti. Asal ada usaha pasti ada jalan, sejak pagi setelah shalat subuh tidak tidur lagi. Bekerja apa saja, karena rezeki telah ditebar Allah. Contoh orang yang membuka warung dibuka di pagi hari..pasti ada yang mendesak butuh kopi, gula dan warung itulah yang didatangi pastinya. Begitulah orang yang bekerja sejak pagi..boleh diuji, tanya pada orang berhasil, dimana anaknya sekarang? Begitu juga yang tidak, tanyakan dimana anak mereka sekarang. Dayah kleng terkenal banyak orang kaya, nah yang dulu kaya tak memikirkan untuk menkuliahkan anaknya, sehingga harta itu lenyap sudah..karena pekerjaan anak yang tidak ada. Meski tidak dihabiskan dia, tapi habis karena untuk menebusnya di penjara. Kalau anaknya dalam pendidikan, maka semua menjadi baik. Orang tuanya juga terbawa merubah diri menjadi lebih baik.

Jadi?

Ya kejatuhan orang yang dulu kaya, karena anaknya tidak pintar bekerja mengelola usaha. Tidak pintar karena tidak pendidikan. Sekarang sebagian anak yang dipojok sana..terjebak pada kegiatan gelek karena tidak ada pendidikan, agama pun tidak. Sekarang bang Uma, hanya duduk duduk saja..tinggal menunggu apa yang diberi anak-anaknya. Semua anaknya telah berhasil bekerja karena pendidikan yang ditanamkan pada anak-anaknya. Berbeda dengan keadaan dulu, tanpa sekolah pun bisa bertahan. Orang yang berdagang hanya sedikit. sekarang kompetisi sudah tinggi. Bekerja harus memakai strategi dan ide prakarsa. Dengan ilmu maka orang dapat berkreasi membuat pekerjaan. Tak mesti menjadi PNS..Pergaulan dalam pendidikan membuat jaringan luas untuk mendapatkan semua informasi dan peluang. Khusus soal pergaulan, semakin tinggi pendidikan maka semakin luas pergaulan. Saya bilang pendidikan tingkat SD bergaulnya dalam lingkup desa. SMP bergaulnya dalam lingkup kecamatan, SMA bergaulnya dalam lingkup kabupaten, Kuliah bergaulnya dalam lingkup Provinsi atau negara. Dengan pergaulan bisa hidup

berbeda. Contoh buah talas, bisa bisanya dinegeri orang menjadi makanan ringan..demikian dengan pohon jati, di kita tak ada artinya. Tapi ditempat orang dikreasi sehingga menjadi barang berharga. Selanjutnya orang sekarang yang telah mendapat informasi dari bergaul, dianjurkan anaknya menanam jati yang tak perlu diurus pertumbuhannya. Anak yang terdidik pasti ingin merubah keadaan orang tuanya..

Lihat juga seperti Yusri Melon, bagaimana ia sekarang dapat merubah diri dan orang tuanya..peningkatan ekonomi masyarakat sangat terkait dengan upaya mendidik anak-anaknya dalam kuliah.



Transkrip Wawancara

Informan 17

Laki-laki, usia 56 tahun, Pekerjaan saat ini petani tambak dan mengusahakan kebun singkong pada lahan pantai. Informan ini anak tunggal dan telah ditinggalkan ayahnya sejak kecil. Kehidupan masa kecil yang berat membuatnya menjadi orang yang dengan penuh kesadaran bekerja keras.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bisa Bapak ceritakan bagaimana kehidupan ekonomi Bapak hingga saat ini.

Saya berasal dari keluarga yang tidak sempurna, sejak umur 12 tahun saya ditinggal orang tua laki-laki. Dengan asuhan ibu, saya dibesarkan dengan segala keadaan yang memprihatinkan. Hal itu pula membuat saya selalu belajar dan bekerja dengan hati dalam hidup ini. Mulai kecil saya telah bekerja sebagai “*keneit*” (semacam magang) pada tambak milik orang Jangka Matang Geulumpangdua. Keniet tidak diberi gaji tetap, paling hanya diberi makan atau sepasang baju saat panen ikan.

Baru setelah umur 17 tahun saya diberi hitungan gaji dalam bentuk persen. Sejak mula saya sudah belajar dan memperhatikan tata cara bekerja sebagai petani tambak “*meuneuheun*”.

Umur 23 tahun saya keluar dari tempat bekerja itu dan saya pikir dapat memulai usaha sendiri. Dengan modal yang ada dari simpanan pendapatan, saya menyewa tambak milik orang lain seluas 1,5 hektar. Usaha ini memberikan hasil yang bagus. Setahun setelah itu, sekitar tahun 1979 saya pikir saya harus menikah karena saya sudah mampu untuk berumah tangga.

Setelah berumah tangga, saya bertambah semangat bekerja. Dari hasil kerja itu saya selalu mendapat panen yang pas harapan. Hasilnya saya bisa membeli emas dan menyimpannya untuk suatu hari bila perlu digunakan. Tapi ada juga orang yang perlu lalu saya beri, biasanya orang itu menggadaikan sawah atau kebunnya. Tanah kebun itu saya kelola. Ada tanah kebun kelapa. Jadi saya diluar usaha tambak juga bekerja mengelola kebun-kebuh itu. Karena saya punya kemampuan tambak dan sedang punya, maka orang pun mau mengajak saya kerjasama. Jadi saya juga membantu dengan turut bekerja membantu usaha tambak milik orang lain. Saya juga tidak diam kalau ada waktu kosong, saya pergi menjaring anak-anak ikan kecil yang disebut *sabe*. Kemudian saat telah memiliki tiga orang anak, saya pikir saya sudah harus punya rumah. Maka saya membangun rumah tinggal. Saya pikir kalau tidak sekarang maka semakin sulit untuk saya lakukan itu. Nantinya anak-anak saya semakin besar maka biaya akan lebih banyak kebutuhan untuk hal lain.

Saat itu usaha saya berjalan bagus, sehingga uang semakin banyak. Saya punya kesempatan membeli lahan-lahan sawah dari orang lain. Baik itu yang dijual, maupun yang awalnya menggadaikan saja. Setelah merasa perlu lagi uang mereka merasa lebih bagus menjual kepada saya. Saya mengerjakan sendiri lahan-lahan

sawah yang saya miliki itu. Saat itu anak-anak sudah mulai masuk sekolah SD lalu perlahan ada yang masuk SMP dan kemudian SMA. Selama itu saya tak ada masalah sama sekali dalam membiayai pendidikan mereka. Untuk urusan usaha saya di tambak saya bisa menggaji dua orang lain.

Kapan Bapak merasa usaha yang paling bagus dan paling susah?

Masa-masa usaha yang paling adalah saat awal tahun 1990-an, saat itu memelihara udang akan memberi hasil berlipat-lipat. Harga udang sedang bagus-bagusnya, sehingga dari hasil tambak informan ini merasa dapat membeli tambak dan sawah. Kemudian pada tahun 1995, kondisi serangan virus membuat usahanya mengalami kemunduran. Dalam kondisi keuangannya yang menurun itu malah anak saya mulai kuliah. Saya melihat kesungguhan dari anak untuk kuliah, maka untuk bekal uang kuliah di akademi keperawatan saya ambil kredit di baitul qiradh. Saya berharap dapat menutupi cicilan kredit dari usaha tambak dan sawahnya. Namun tidak demikian adanya. Dalam keadaan demikian, anak kedua juga harus melanjutkan kuliah ke bidang pendidikan perawat juga. Kebutuhan biaya yang besar dan hasil usaha yang tidak sesuai harapan, membuat saya menjual lahan sawah dan tambak secara bertahap. Apalagi biaya kredit tak tertutupi juga.

Selanjutnya anak ketiga melanjutkan kuliah ke sekolah guru dan kemudian disusul lagi anak ke empat memilih kuliah di pendidikan guru, sehingga modal hidup saya hanya tersisa satu lahan saja. Keadaan itu kemudian agak terbantu dengan telah selesainya anak pertama dari kuliah dan bekerja sebagai tenaga honor di rumah sakit. Anak yang pertama juga membuka praktek mantri kesehatan. Pendapatannya itu dapat membantu pendidikan adik-adiknya. Anak kelima memilih masuk kuliah komputer dan biaya yang dibutuhkannya ternyata lebih besar dari yang diduga. Saat ini anak kelima telah selesai dari kuliahnya dan yang tersisa hanya anak ke enam yang masih dibangku SMA.

Bagaimana bisa ?

Ya.. saya tidak percaya dengan hasil yang diraih anak-anak yang saat ini telah menjadi sarjana semua. Semua orang yang kenal saya juga heran. Kok bisa saya yang begini berhasil membuat anak-anak menjadi sarjana semua. Memang semua harta milik telah terjual dan hanya sisa satu lahan. Untuk menutupi kekurangan saya berupaya meminjam pakai lahan tambak milik orang lain. Tapi begini ya...walau saya sekarang miskin dan tak ada harta sawah kebun lagi. Tapi saya merasa semua itu seperti masih ada. Kenapa?secara rutin saya selalu diberi oleh anak-anak. Saya mendapat uang dari anak. Karena kesadaran dan kebaikan budi pekerti mereka maka secara rutin membantu kebutuhan keuangan kami orang tuanya.

Bagaimana bisa Bapak membentuk seperti itu ?

Semua yang dimiliki anak-anak saya, saya pikir buah dari keprihatinan dan kedewasaan yang saya tanamkan. Saya tak pernah mengajak anak-anak ke tambak atau ke sawah. Saya cerita pada mereka biar saya saja yang bekerja, kalian belajar yang bagus. Saya tak mau mereka turut dalam pekerjaan di tambak atau di sawah.

Namun bila mereka datang membantu dengan tanpa saya suruh, tidak saya larang..saya biarkan. Tapi saya kontrol agar hal itu tidak sampai mengganggu jam sekolahnya. Saya paling tidak mau anak-anak sampai harus tidak masuk sekolah gara-gara membantu pekerjaan di sawah dan di tambak. Soal sekolah, saya bukan mau mereka tak lagi bekerja sebagai petani atau mereka harus menjadi pegawai. Sekarang saya lihat orang menyekolahkan anak agar menjadi pegawai.

Bagi saya sekolah bukan untuk menjadi pegawai, akan tetapi untuk punya bekal hidup. Untuk bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya kelak. Tapi ternyata anak saya juga menjadi pegawai. Tapi saya tidak memaksa mereka. Itu bebas saja. Tapi yang saya mau adalah jangan mereka seperti saya yang hanya bersekolah hingga kelas 5 sekolah dasar.

Bagaimana Bapak melihat kebiasaan kerja masyarakat disini ?

Soal kebiasaan bekerja masyarakat disini ada perubahan. Terutama setelah tsunami orang menjadi tidak lagi sosial. Banyak bantuan diberikan oleh pihak luar, namun pejabat lebih memilih saudara-saudaranya sendiri sebagai penerima. Saya kecewa dengan apa yang dilakukan para pemimpin. Mereka semakin tidak bisa dipercaya. Pemimpin dan pejabat menjadi tidak dihargai karena tidak adil dan tidak amanah. Lain lagi penyakit masyarakat. Mereka tak mau kerja bakti lagi. Bekerja karena uang, semasa LSM sering memberi uang Rp.500.000,00 per orang kepada masyarakat karena bergotong royong membersihkan kampung maka saat ini mereka akan bekerja kalau ada yang memberikan uang. Karena itu, sulit menemukan orang mau bekerja membuat kampung menjadi lebih baik. Bahkan bila ada orang yang mau bekerja secara ikhlas dan jujur, akan disingkirkan bila tidak sejalan dengan kemauan dan keinginan mereka.

Bagaimana dengan pemimpin agama?

Pemimpin saat ini seperti sudah tidak ada, agama juga pun tidak dijalankan seperti seharusnya. Sebagai contoh dikemukakannya bagaimana dalam sebuah rapat pemerintah, segera dihentikan ketika azan berkumandang. Namun, ternyata hanya berhenti selama azan berlangsung. Kemudian dilanjutkan kembali tanpa mendirikan shalat. Semua ini terjadi karena ulama hanya mampu berbicara, namun tidak melakukan sesuatu hal sebagaimana ketentuannya. Bila menyuruh shalat tepat waktu, namun saat azan selesai bukannya shalat. Tapi malah melanjutkan kegiatan karena alasan bisa dilaksanakan nanti shalatnya. Saat ini hanya ada orang tabligh dan salafi yang sesuai antara yang disampaikan dengan yang dilakukan. Banyak hal dalam agama saat ini ditambah-tambahkan, sehingga masyarakat sibuk menyelesaikan perbedaan pendapat soal itu.

Hal lain?

Ya, masyarakat kita juga tidak suka melihat ada orang lain yang lebih maju. Keadaan ini sebuah keadaan tak baik dalam kehidupan masyarakat. Bidang pekerjaan semakin sempit, saling bersaing. Saya kasih contoh dulu ada *muge* ikan yang bisa mendapatkan langsung ikan dari toke bangku untuk dijual ke tempat-tempat lain dalam satuan-satuan keranjang yang kecil digantung di honda. Saat ini mana ada lagi *mugee*? Toke bangku langsung mengambil alih dan menjual ikan-

ikan ke kota-kota lain seperti Medan, Banda Aceh atau Lhokseumawe. Model semacam itu, membuat orang yang bisa mendapatkan pekerjaan dari sebuah kapal penangkap ikan yang pulang menjadi semakin sedikit.

Bagi Bapak sendiri?

Untuk saya ? saya pikir masa udang windu sudah lewat. Maka walaupun saya kerjakan udang maka selalu mati akibat “virus”. Virus itu dibawa gelombang laut tsunami. Sekarang tambak-tambak sudah terbengkalai, walaupun ada yang mengusahakan bibit-bibit ikan hanya sekedaranya saja. Pemandangan orang memelihara udang windu secara intensif sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya beberapa peralatan yang dulu dipakai untuk usaha udang windu. Tapi saya tidak berhenti, saya tetap melanjutkan dengan memelihara udang secara sederhana. Kadang-kadang memberi hasil, kadang tidak..ada saja musibah misalnya saat udang sudah siap panen, saya tunggu beberapa hari lagi agar beratnya bertambah dan harganya bagus menjelang bulan Maulod..eh,,tau-tau entah kenapa ada satu orang kurang waras. Malam-malam sedang hujan lebat malah dibukanya pintu ari tambak saya. Maka keluar semua, paling tinggal 10 persen saja. Sedih saya..harusnya dari modal 1 juta itu, saya bisa mendapat laba 5 juta. Dalam keseharian saya juga mengelola usaha tanaman singkong. Lokasinya saya gunakan lahan yang tak terpakai di pantai. Sebagian orang awalnya menertawakan. Namun setelah beberapa kali panen, mereka sudah mulai mengikuti. Lumayan untuk menambah pendapatan.

Tapi biarlah keadaan itu terjadi, yang jelas saat ini saya bangga atas keberhasilan anak-anak. Itu sudah mampu menutupi kekurangan ekonomi saat ini. Karena apa? Anak-anak di kampung sini tidak ada jaminan akan berhasil sekolah walaupun orang tuanya kaya. Pernah seorang kaya yang berkongsi dengannya mengelola tambak, cemburu pada saya karena melihat anak-anak saya begitu bersungguh-sungguh sekolah. Ia memberi anak saya uang. Ia bilang ia tak punya anak-anak yang memiliki kemauan tinggi dalam bersekolah. Sehingga saat ini, ia sudah almarhun namun anak-anak tak ada yang menjadi sarjana. Anaknya menjadi nelayan, meskipun bagus juga keadaan hidupnya saat ini.

Transkrip Wawancara

Informan 19.

Laki-laki, usia 55 tahun, pekerjaan saat ini sebagai pejabat politik yang memegang pucuk pimpinan lembaga eksekutif pemerintahan daerah. Sebelumnya ia seorang anggota DPRD Provinsi Aceh. Berpasangan dengan seorang mantan GAM dan diusung partai lokal yakni Partai Aceh. Akhirnya ia dapat menduduki posisinya saat ini.

Melalui bantuan seorang politisi lokal, yang saat ini berkedudukan sebagai salah satu pimpinan pada DPRD Pidie Jaya maka saya dapat bertemu Bupati Pidie Jaya tanpa prosedur rumit dan berbelit-belit. Wawancara berlangsung tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 10.30 sekalipun saya sudah diantar oleh politisi senior, tapi saya tetap saja harus menunggu antrian. Saat saya memasuki ruang tunggu kerja bupati, ditempat itu telah duduk dua orang perempuan serta seorang pria yang terlihat sebagai salah seorang pejabat di pemda setempat. Setelah keluar masuk sekitar dua orang, si wanita tadi menegur beberapa petugas yang terlihat menjalankan fungsi sekretaris ruang tunggu bupati. Si wanita bertanya kenapa orang lain tak antri, dijawab oleh si petugas bahwa yang pejabat harus didahulukan karena kepentingannya mendesak. Hingga kemudian terlihat Bupati seperti akan keluar ruangan, namun ketika melihat saya menunggu ..langkah beliau tertahan dan lantas saya dipersilahkan masuk dengan isyarat beliau terburu-buru dengan agenda lain yang sudah menunggu. Dalam kondisi itu bupati menjawab beberapa pertanyaan saya.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Sebagai daerah otonom baru. Pidie Jaya mewarisi keadaan sosial dari kabupaten induk. Bagaimana Bapak mendorong aktifitas masyarakat bekerja, ditengah dominasi petani dan nelayan sebagai mata pencaharian utama masyarakat dan mereka bekerja dengan kebiasaan berlaku turun temurun?

Yang pertama kita akan laksanakan agar rakyat yang rajin agar terus beraktifitas.kita akan menampung semua hasil-hasil dan kita akan menyalurkan. Yang kedua kita berusaha memberi semangat bekerja, yang tak ada modal diberi modal, yang tak ada lahan diberi lahan. Bantuan bagi petani diarahkan semaksimalnya kepada petani penggarap, bukan petani pemilik karena itu sudah merupakan orang berada.

Bagaimana Bapak menyikapi kendala di tingkat petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi?

Dan kita tidak main-main dengan “permainan” para oknum penggelap pupuk dan obat-obatan bersubsidi, asal ada laporan masyarakat, kita langsung turun tangan ke lapangan dan mengambil tindakan tegas.

Sektor lain yang Bapak beri semangat?

Sektor berkebun. Kita support dengan bibit dan penyuluhan juga kita berikan agar hasil yang diperoleh berkualitas. Seperti sekarang petani kakao sedang dibimbing oleh suskontek. Malah sekarang sudah kita buka bersama itu..a..adalah klinik kakao. semua itu kita lakukan untuk kepentingan rakyat. Juga masalah perikanan, apapun persoalan dengan perikanan sekarang, kita telusuri..dinas terkait juga perintahkan untuk turun. Bila ada masalah yang perlu kita bantu,kita bantu..tapi dengan catatan, tidak semua petani kita bantu. Ada petani yang mampu dan ada yang tidak. Kalau petani mampu kita bantu, itu menzalimi petani yang tak mampu. Katakanlah ada petani penggarap dan petani pemilik. Yang kita bantu adalah petani penggarap. Karena haram hukumnya membantu orang kaya. Wajib kita bantu petani yang miskin. Kalaupun pemerintah tidak membantu, kita himbau orang-orang kaya yang dermawan untuk membantu petani yang miskin.

Masalah terbesar pada petani adalah pasca panen, kondisi apa yang akan Bapak bentuk ?

a..kita sudah coba membentuk badan usaha milik daerah yang khususnya agar dapat kita tampung hasil-hasil panen dari rakyat, agar tidak ada yang monopoli seperti hari ini di Pidie Jaya sedang panen raya..kalau kemarin harga padi 5ribu per kilo sekarang sudah 3.200 per kilo. Kenapa, karena permainan toke-toke dari Medan..oleh karenanya nanti supaya petani tidak rugi. Nantinya kita dengan badan usaha milik daerah, akan menampung hasil-hasil dari petani. Namun itu agar tidak ada kendala kita akan musyawarah dengan DPRD, berapa dana yang disediakan. Tugas pemerintah adalah menyalur dan mencari pasar.

Soal stock padi di rumah, ada tradisi adat yang hilang dari kehidupan masyarakat tani Aceh..dulu setiap rumah ada lumbung padi, agar persediaan padi kepentingan diri ada, juga dipasar tidak berlimpah?

Ya sekarang sudah tidak ada, masyarakat ingin praktis. Dan lagi dulu panen sekali setahun..kalau sekarang sudah dua kali dalam setahun. Bahkan ada yang tiga kali panen setahun.

Masyarakat Aceh yang dikenal dengan agama dan adat budayanya, apa yang dilakukan pemerintah guna mengikis kebiasaan kerja yang dinilai tidak produktif itu Pak?

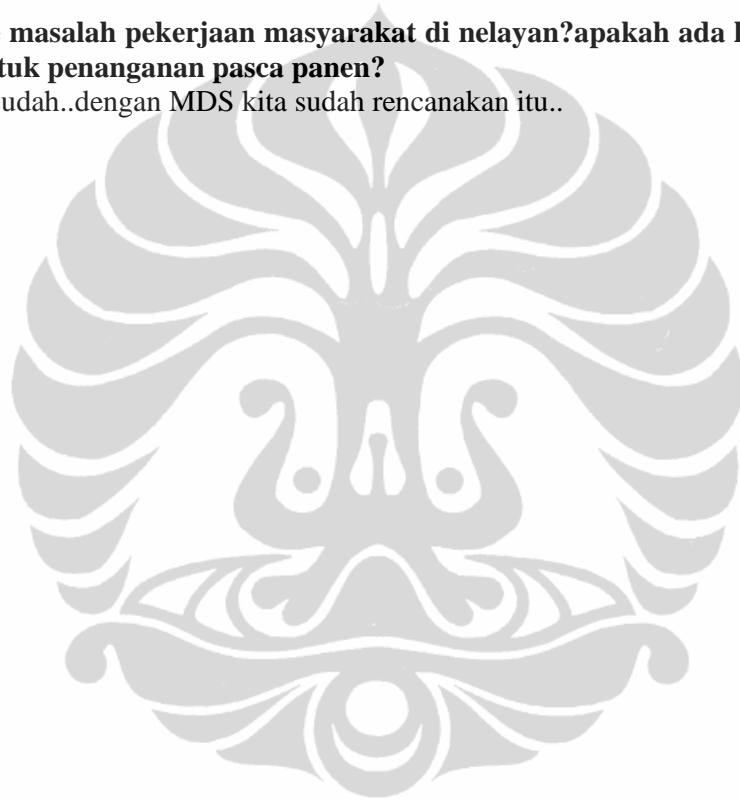
Pertama kita akan mendidik pemuda disini untuk mencintai agama dan adat. Dan kita sudah kerjasama dengan KNPI beberapa kali. Yang kedua masalah syariat. Kita sudah upayakan agar tidak ada meunasah dan mesjid yang tidak mengumandangkan azan lima kali waktu dalam sehari. Malah kita minta agar di dalamnya berlangsung shalat jemaah lima waktu. Yang kedua, imam mesjid dan imam meunasah dan muazzin kita beri honor. Dan besok kita akan membagikan sepeda motor kepada imam meunasah agar mudah transportasi...agar tidak hambatan imam meunasah untuk memimpin shalat.

Ditengah budaya kerja yang sebagian masyarakat terjebak dalam kemalasan. Masalah yang mengancam adalah peredaran obat-obatan terlarang dalam kalangan masyarakat. Apa yang dilakukan pemerintah?

..kita berupaya kerjasama dengan kepolisian, agar wabah itu tidak menular..bahkan kita setiap jam 3 malam sering berkeliling ke desa-desa untuk memantau permasalahan masyarakat. Yang penting pemuda di Pidie Jaya tidak terkontaminasi dengan narkoba.. Jika ada pegawai yang terjebak narkoba akan segera kita pecat.

Kembali ke masalah pekerjaan masyarakat di nelayan?apakah ada langkah-langkah untuk penanganan pasca panen?

oo.. sudah, sudah..dengan MDS kita sudah rencanakan itu..



Transkrip Wawancara

Informan 20.

Laki-laki, usia 47 tahun, memiliki 2 orang anak. Pekerjaan utama saat ini sebagai nelayan berstatus tauke. Diluar itu ia memiliki beberapa pertambakan dan pertokoan serta usaha jual beli alat-alat nelayan. Informan ini terlihat menonjol keberhasilannya ekonominya diantara adik dan abangnya. Saat ini ia menjadi andalan keluarganya dan namanya disegani oleh para nelayan setempat. Dalam kesehariannya, ia tidak tampil dengan simbol-simbol status sosial tertentu selayaknya *ureung kaya*. Sepintas lalu, orang tidak tahu bahwa ia memiliki banyak aset kekayaan. Paling tidak ia memiliki empat boat penangkap ikan jenis *pukat langga*.

Berikut transkrip wawancara dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan:

Bagaimana keadaannya usaha bekerjanya saat ini pak?

Sejak masih sekolah SMP saya sudah terpikir untuk bekerja. Dengan tekat kuat saya mulai usaha dengan keberanian meminta uang modal pada ayah. Saya pinjam emas sebagai modal untuk usaha tambak. Awalnya saya diragukan oleh Ayah. Tapi berulang-ulang saya minta. Maka ayah mencarikan modal tersebut. Modal itu saya pakai untuk sewa tambak, bibit dan biaya pemeliharaan. Dengan modal itu, saya mulai menjalankan rencana secara penuh dan total. Kadang saya harus korbakan waktu-waktu yang seharusnya saya belajar dan berada di kursi sekolah. Tapi kerja keras itu tidak sia-sia. Usaha tambak ikan memberi keuntungan dan selanjutnya usaha itu selalu berhasil. Secara perlahan pinjaman modal dalam bentuk emas mampu saya kembalikan pada ayah dan lebih dari itu saya dapat membantu kebutuhan keluarga.

Hanya sekolah saya jadi agak kacau. Lokasi tambak tak bisa kita percayakan ke orang lain maka saya harus hadir sendiri pada jam-jam sekolah. Saya berusaha mendekati guru dan meyakinkannya bahwa saya tidak masuk sekolah karena menjaga usaha tambak yang menjelang panen. Dari panen saya sering memberi guru rokok serta hasil-hasil panen. Entah karena apa, guru sekolah juga bisa menutupi ketidakhadiran. Saat itu, dengan keberhasilan pekerjaan. Saya sudah berbeda dengan kawan-kawan yang yang lain yang masih meminta uang dari orang tua. Saat kendaraan roda dua hanya mampu dibeli oleh orang-orang kaya, saya telah memilikinya dengan pendapatan dari usaha tambak.

Selanjutnya saya menyewa tambak-tambak orang lain, dan berhasil. Pelan-pelan dari laba usaha tambak saya mulai membeli boat nelayan dan sebagian pendapatan yang lain saya beli beberapa pintu toko. Waktu itu tak ada orang yang tertarik. Dugaan saya ternyata benar, kemudian perkembangan terbaru membuat harga-harga toko meningkat cepat. Lalu saya menjual kembali beberapa toko itu, dengan selisih harga jual yang jauh berbeda dengan saat ia membeli dulu. Saat inipun saya masih memiliki toko-toko untuk saya pakai berjualan sendiri. Salah satu usahanya adalah menjual peralatan nelayan di TPI, dari itu semua kapal penangkap ikan yang punya saya mengambil barang dari toko usahanya sendiri.

Barang-barang keperluan peralatan melaut saya pesan dari Medan dan Surabaya dan dari barang-barang saya mengalir keuntungan lagi.

Bagaimana saat ini ?

Sebagian orang bilang melaut sekarang susah. Tapi saya jalan terus. Saya menggunakan pengalaman dan kemampuannya dalam bekerja. Mungkin karena itu saya mampu menambah jumlah kapal penangkap ikannya. Salah satu kapal yang selalu melaut saat ini adalah kapal saya. (Beberapa kali terlihat kapal miliknya berhasil membawa pulang tangkapan ikan dalam jumlah banyak).

Saat ini, ditengah sulitnya mendapatkan ikan, banyak nelayan pemilik boat berhitung-hitung bila akan melaut. Karena biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sekali perjalanan ke laut, terkadang tidak berimbang dengan jumlah ikan yang didapat. Bila ikan yang diperoleh tidak memberikan keuntungan, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik. Saya tahu keadaan lingkungan dan saya tak mau sembarangan dalam bekerja..

Saya memiliki beberapa *tuah hasan* atau rumpon laut di perairan laut sekitar Meureudu. Dari *tuah* ini, mengalir pendapatan tambahan. Menyangkut *tuah hasan*, saya kesal dengan kejadian kapal asing menabrak yang katanya kapal survey sumber energi memutuskan rumpon kami. Walaupun diganti kerugian oleh perusahaan yang melakukan survey tapi mereka merusak lingkungan laut tempat nelayan kami mencari rejeki.

Rencana ke depan?

Saya orangnya sederhana, bahkan saya tidak punya HP. Kalau ada kawan ingin menghubungi maka selalu melewati orang-orang yang dekat dengan saya. Soal rencana, saya punya keinginan untuk menampung ikan-ikan dari tempat kita agar tak lagi dibawa ke medan saat sedang berlebih. Sekarang, harga ikan tidak dapat kita atur akibat tidak tersedianya gudang pengawetan. Saya sedang memikirkan cara untuk merintis gudang pengawetan dari skala kecil lebih dahulu. Kabarnya kalau kita beli dari luar negeri susah sekali perizinan dari Bea Cukai di pelabuhan.

Transkrip Wawancara

Informan 24.

Perempuan, usia 50 tahun, pekerjaan utama pedagang ikan asin. Saat ini ia telah janda, setelah suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Kelima anaknya telah menjadi sarjana seluruhnya.

Wawancara berlangsung tanggal 2 Mei 2011, sekitar pukul 10.30 di rumahnya yang berbentuk rumah kopel, berbagi dengan saudaranya yang lain. Rumah ini berada dalam dusun Meunasah Balek, yang berdekatan dengan TPI. Menurut tetangganya, dulunya di lokasi rumahnya sekarang adalah rumah panggung, namun telah dirubuhkan karena bahan kayu sudah dimakan usia. Rumahnya berdekatan dengan sungai. Wawancara berlangsung di ruang tamu yang sekaligus ruang keluarga dan ruang makan, rumah tanpa perabot ini pada dindingnya terpajang beberapa foto acara wisuda sarjana anak-anak dari keluarga ini.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Apa pencaharian Ibu saat ini dan mungkin beberapa waktu yang lalu?

Berjualan ikan asin dan beberapa keperluan sayur di pasar. Dulu dengan suami saya berjualan. Namun dengan telah meninggalnya, maka saya tinggal sendiri meneruskan usaha tersebut. Tapi suasana berjualan sekarang tak seperti dulu. Sekarang sepi. Orang jarang sudah ke pasar karena di gampong-gampong sudah ada yang menjual ikan hingga sayur-sayuran untuk keperluan harian. Bahkan ada yang berkeliling jualan dengan motor. Waktu konflik dulu enak sekali mendapatkan uang.

Mengapa Bu?

Orang tak berani tinggal di gampong, takut pada perang dan diperiksa..asal sudah ribut maka terlihat banyak orang turun ke pasar untuk mencari ini dan itu. Kalau sudah aman, mereka naik lagi. Pulang ke gampongnya..saat itu bisa kita dapat duit 1 juta satu hari. Kalau sekarang mana ? 100ribu kadang tak sampai. Sekarang ini anak yang pertama membantu biaya sekolah adiknya, kalau saya mana ada lagi..yang lain, harta saya tak punya..

Apa yang Ibu lakukan hingga ibu memiliki anak-anak yang bisa menjadi sarjana seluruhnya, sementara di kawasan ini sebagian mengatakan sulit mendapatkan anak-anak muda yang mau kuliah karena lebih cepat mengenal uang?

Sewaktu mereka masih sekolah dan ayahnya masih ada dulu, mereka ditanya sama ayahnya "ini kami hanya labi-labi yang kami siapkan untuk keperluan

kalian..tinggal kalian pilih, mau ayah mobil labi-labi (angkutan umum) ini atau ayah jual mobil untuk dapat biaya kalian kuliah?” anak yang pertama menjawab, ia tak mau labi-labi. Ia ingin kuliah saja. Akhirnya kami jual labi-labi itu, kuliahlah mereka. Akhirnya ia selesai kuliah, Sekarang dia membantu adik-adiknya yang belum selesai. Meskipun telah kawin. Cuma saya bilang padanya, agar terbuka pada istri. Kalau mau membantu adikmu, beritahu istrimu, jangan sembunyi-sembunyi. Harus terbuka.

Bagaimana Ibu melihat cara orang-orang lain disekitar ibu dalam bekerja dan mengelola uang yang diperolehnya?

Ada yang bagus mengelola bekal, ada yang tidak. Pendek kata, orang di sini sedikit sekali yang mau kuliah. Kebanyakan mereka bergerombol di TPI..nah di sekitar TPI, bisa dihitung berapa orang yang mau sekolah. Lihat rumah-rumah yang sekitar TPI.. belum lagi kita bilang sudah selesai kuliah tapi belum ada kerja. Jarang yang berpikir bahwa sudahlah kita bodoh, tapi jangan sampai anak kita juga bodoh..kemauan anak juga harus ada. Seperti anak saya, dia memang memilih sekolah. Ini anak yang kedua baru saja lulus test pegawai negeri. Saya punya keponakan, karena keras didikannya maka ia punya anak satu satunya perempuan berhasil menjadi sarjana dan ia menjadi pegawai yang bagus di sini. Orang sekitar mengatakan dia berhasil..padahal ia perempuan.

Bagaimana anak-anak muda sekitar sini ?

Agak sulit diatur, mereka sudah rusak dengan ganja dan shabu-shabu. Ada keponakan baru selesai kuliah, disuruh jadi ketua pemuda. Saya bilang untuk apa buat sakit kepala mengatur anak-anak muda yang tak sekolah itu..kalau malam, mata-mata tampak merah karena mabuk. Mereka biasanya duduk di TPI atau di kedai kopi dekat situ..sudah berapa orang ditangkap..ada orang yang menjual, ditangkap..sekarang sudah dipenjara 3 tahun. Rusak sekali, karena narkoba..

Transkrip Wawancara

Informan 26.

Perempuan, usia 35 tahun, pekerjaan utama pedagang kue putu di TPI. Belum menikah. Ia meneruskan usaha ibunya yang telah meninggal dunia. Wawancara berlangsung tanggal 28 Mei 2011, sekitar pukul 10.15 di tempatnya berjualan yakni salah satu sebuah emperan toko pada kompleks pertokoan TPI. Bertempat tinggal di sebuah rumah sederhana milik kakaknya, tak jauh dari TPI Mereudu. Sambil wawancara berlangsung, disuguhkan makanan kue khas Aceh.

Berikut transkrip wawancara mendalam dalam bentuk tanya jawab antara peneliti dengan informan :

Bagaimana keadaan usahanya saat ini?

Seperti ini, kalau lagi rame TPI karena ada kapal pulang membawa tangkapan, rame..setelah itu tak lama sepi lagi. Sekarang tidak pasti..uang walaupun dapat cukup untuk makan. Lebih tidak..

Mengapa memilih tempat disini? Mengapa tidak di keude Meureudu?

Disini sedikit yang berjualan, di Keude banyak. Dulu saya berjualan di sana, sejak orang tua saya meninggal saya lebih memilih dekat rumah atau di TPI ini. Ada kemungkinan kita dibeli oleh orang-orang yang baru pulang melaut atau yang ingin melihat boat-boat yang kembali dari laut.

Apa ada pekerjaan lain, diluar ini?

Menjual tikar, dirumah kami dengan kakak menganyam tikar pandan. Kadang laku terjual cepat, kadang juga tidak..yang lain kita tak tahu harus melakukan apa.. (peneliti sempat mampir ke rumah dan menyaksikan rumah yang sederhana tanpa perabot apapun. Di dalam rumah sedang menganyam tikar dua orang saudara perempuan dari informan).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnya dan Kabupaten Pidie pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Pidie, dipandang perlu membentuk Kabupaten Pidie Jaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- c. bahwa pembentukan Kabupaten Pidie Jaya diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat:

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Kabupaten Pidie adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Pidie Jaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah:

- a. Kecamatan Meureudu;
- b. Kecamatan Ulim;
- c. Kecamatan Jangka Buya;
- d. Kecamatan Bandar Dua;
- e. Kecamatan Meurah Dua;
- f. Kecamatan Bandar Baru;
- g. Kecamatan Panteraja; dan
- h. Kecamatan Trienggadeng.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Pidie dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kabupaten Pidie Jaya mempunyai batas-batas wilayah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
 - c. Sebelah selatan berbatasan Kecamatan Tangse, Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane Kabupaten Pidie; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Geuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro, dan Kecamatan Keumbang Tanjong Kabupaten Pidie.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.
- (4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batas tersebut digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakan wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Bagian Ketiga Ibu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan di Meureudu.

BAB III URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (3) Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Pidie Jaya mencakup urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya merupakan urusan yang berskala kabupaten meliputi:
 - a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dan
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- (5) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi :
 - a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam; dan
 - d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan kota Subulussalam.
- (6) Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

BAB IV
PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Peresmian Daerah Otonom Baru
dan
Penjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Pidie Jaya dan pelantikan Penjabat Bupati Pidie Jaya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Bagian Kedua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

- (1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie yang asal daerah pemilihannya pada Pemilihan Umum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayah Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya sebagai akibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie.
- (4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yang berlaku di Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (5) Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Pidie Jaya.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya dipilih dan disahkan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundangundangan, paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipil dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam untuk melantik Penjabat Bupati Pidie Jaya.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belum dilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapat mengangkat

kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, serta unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB V PERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

- (1) Bupati Pidie bersama Penjabat Bupati Pidie Jaya menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan pemindahan personel, penyerahan aset, serta dokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.
- (4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasi pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen kepada Kabupaten Pidie Jaya.
- (6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja dari asal satuan kerja personel yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), meliputi :
 - a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie yang berada dalam wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Pidie yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pidie Jaya;
 - c. utang piutang Kabupaten Pidie yang kegunaannya untuk Kabupaten Pidie Jaya menjadi tanggung jawab Kabupaten Pidie Jaya; dan
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Pidie Jaya.
- (8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dilaksanakan oleh Bupati Pidie, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam selaku wakil Pemerintah wajib menyelesaikannya.
- (9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahan aset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PENDAPATAN,
ALOKASI DANA PERIMBANGAN,
HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

- (1) Kabupaten Pidie Jaya berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus prasarana pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (2) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikan Pejabat Bupati Pidie Jaya.
- (4) Apabila Kabupaten Pidie tidak memenuhi kewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Kabupaten Pidie untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (5) Apabila Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (6) Pejabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan realisasi penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Pidie.
- (7) Pejabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibah dan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 17

Pejabat Bupati Pidie Jaya berkewajiban melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Pidie Jaya dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penjabat Bupati Pidie Jaya menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jaya untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah disahkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Bupati Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

- (1) Sebelum Kabupaten Pidie Jaya menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Pidie tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Pidie, Peraturan dan Keputusan Bupati Pidie yang selama ini berlaku di Kabupaten Pidie Jaya harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kabupaten Pidie Jaya disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai luas wilayah $\pm 56.500,51$ km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia Barat, terutama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Pidie melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam SK Persetujuan DPRD Kabupaten Pidie Nomor 12 A Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, Surat Usulan Bupati Pidie Nomor 146.1/1618 tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, SK Persetujuan DPRD Provinsi NAD Nomor 11/PMP/2004 tanggal 25 Juni 2004 tentang Persetujuan Penetapan usul Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, Surat Usulan Gubernur NAD kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135/20284 tanggal 16 Agustus 2004 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, SK. DPRD Kabupaten Nomor 12 B Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie mempunyai luas wilayah $\pm 4.160,55$ km², dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Pidie sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Pidie Jaya sebagai kabupaten pemekaran. Calon Kabupaten Pidie Jaya mempunyai luas wilayah + 1.073,6 km², terdiri dari Kecamatan Meureudu, Kecamatan Ulim, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, Kecamatan Meurah Dua, Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja, Kecamatan Trienggadeng.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Pidie ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah otonom, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten Pidie, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta, dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala 1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pidie Jaya khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Meureudu sebagai ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berada di Kecamatan Meureudu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nama lain adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Pidie Jaya diusulkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan Bupati

Pidie.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya kepada APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan APBD Kabupaten Pidie dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Pidie dalam wilayah calon Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian pula BUMD Kabupaten Pidie yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pidie Jaya, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Pidie Jaya diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Pidie No. 423 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan DPRD No. 6/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Pidie yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4683